OTORITAS
JASA
KEUANGAN



2019

Laporan Tahunan
Annual Report

Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan

Collaboration in Building the Optimism and Acceleration of Sustainable Growth

Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan

Collaboration in Building the Optimism and Acceleration of Sustainable Growth

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, memiliki peranan penting dalam memperkokoh stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung pemerataan pembangunan. Peran OJK tersebut dituangkan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran.

Selama 2019, OJK meningkatkan sinergi dan kolaborasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun semangat optimisme bersama dalam menghadapi berbagai tantangan demi terciptanya akselerasi pertumbuhan yang berkelanjutan.

As supervisor of the financial services sector, Indonesia Financial Services Authority (OJK) plays an essential role in terms of strengthening financial system stability and increasing the contribution of the financial services sector to accelerate national economic growth and support equitable development. OJK's role is implemented through the execution of duties and authority, which ceaselessly prioritise the principles of good governance, namely independence, accountability, responsibility, transparency and fairness.

In 2019, OJK increased synergy and effective collaboration with all stakeholders in order to build a spirit of broad optimism in the face of various challenges, thereby creating and accelerating sustainable growth.

Daftar Isi

Table of Content



Tentang Otoritas Jasa Keuangan

About Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Visi & Misi 6
Vision & Mission
Nilai-Nilai Strategis 8
Strategic Values
Logo Otoritas Jasa Keuangan 9
OJK's Logo
Struktur Organisasi 10
Organization Structure
Sambutan Ketua Dewan Komisioner 13
Foreword from Chairman of Board of Commissioners
Profil Anggota Dewan Komisioner 18
Board of Commissioners Profile
Kebijakan Strategis 2019 35
Strategic Policies in 2019
Peristiwa Penting 2019 42
2019 Event Highlights



Fokus 2019

Focus in 2019

***Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia** 54
Indonesia Financial Services Sector Master Plan
Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan sebagai Landasan Pembangunan yang Berkelanjutan 57
Maintaining Financial System Stability as Sustainable Development Foundation
Optimalisasi Peran Sektor Jasa Keuangan dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Nasional 74
Optimization of the Financial Services Sector in the Acceleration of National Economic Growth
Mewujudkan Kemandirian Finansial Masyarakat serta Mendukung Upaya Peningkatan Pemerataan dalam Pembangunan 95
Manifesting Community Financial Independence and Supporting Means to Increase Equity in Development



Tinjauan Sektor Jasa Keuangan

Financial Sector Overview

Kondisi Ekonomi Global dan Domestik 120
Global and Domestic Economic Conditions
Perkembangan Industri Perbankan 129
Banking Industry
Perkembangan Industri Pasar Modal 138
Capital Market
Perkembangan Industri Keuangan Non-Bank 153
Non-Bank Financial Industry
Perkembangan Industri Jasa Keuangan Syariah 168
Islamic Financial Industry



Tata Kelola dan Manajemen Strategis

Governance and Strategic Management

Dewan Komisioner 188
Board of Commissioners
Komite-komite 190
Committees
Kode Etik 191
Code of Ethics
Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas 192
Internal Audit, Risk Management and Quality Assurance
Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja 196
Strategic, Budget and Performance Management
Insiatif Strategis 201
Strategic Initiatives
Manajemen Perubahan 207
Change Management
Komunikasi 210
Communication
Hubungan Kelembagaan 212
Institutional Relationships
Pengembangan Organisasi dan Sumber Daya Manusia 218
Organizational and Human Capital Development
Sistem Informasi dan Logistik 223
Information Systems and Logistics



Outlook Ekonomi dan Arah Strategis OJK 2020

Economic Outlook and OJK Strategic Direction in 2020

Outlook Ekonomi 2020 228
Economic Outlook 2020
Arah Strategis 2020 230
Strategic Direction 2020
Peta Strategis OJK 2020 233
OJK Strategic Map 2020
Inisiatif Strategis & Proyek Khusus 2020 235
Strategic Initiatives & Special Projects in 2020



Laporan Keuangan OJK 2019

OJK 2019 Financial Report

Laporan Keuangan OJK 2019 238
OJK 2019 Financial Report

01

Tentang Otoritas Jasa Keuangan

About Indonesia Financial Services Authority (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang secara independen mengemban tugas mewujudkan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan. Wewenang tugas pokok dan fungsi OJK meliputi sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. Selain bertanggung jawab pada tataran mikroprudensial sektor jasa keuangan, OJK juga mengemban amanat untuk melaksanakan fungsi edukasi dan perlindungan konsumen.

The Indonesian Financial Services Authority (OJK) was established in accordance with Act No. 21 of 2011 to independently create and maintain a regulatory and supervisory system for all activities in the financial services sector. The core tasks and function of OJK involve the banking sector, capital market and nonbank financial industry, including insurance, pension funds, finance companies and other financial services institutions. In addition to its microprudential mandate, OJK is also mandated with an education and consumer protection function.





Tari Saman - Aceh
Saman Dance - Aceh

Visi & Misi

Vision & Mission



Visi
Vision

“Menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum

Become a trusted financial services authority, protecting the interests of consumers and the public, while creating a globally competitive financial services industry that promotes public welfare as a pillar of the national economy.”

Misi
Mission

Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel

Realise the implementation of regulated, fair, transparent and accountable activities in the financial services sector.

Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil

Safeguard sustainable and stable financial system growth.

Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat

Protect the interests of consumers and the public.



Nilai-Nilai Strategis

Strategic Values



Bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Take measures objectively, fairly, and consistently according to code of conduct and organizational policy, which is carried out by paying high respect over honesty and commitment.

Integritas
Integrity

Profesionalisme
Professionalism

Bekerja dengan penuh tanggung jawab, senantiasa termotivasi mengembangkan diri meningkatkan kompetensi untuk mencapai kinerja terbaik.

Work responsibly based upon high competence so as to achieve the best work performance





Berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal secara produktif dan berkualitas.

Productive and quality collaboration with all internal and external stakeholders.

Sinergi
Synergy

Inklusif
Inclusive

Terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan.

Openness and acceptance on a diversity of stakeholders, as well as efforts in expanding opportunities for public to access financial industry.





Wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan serta dapat berpikir di luar kebiasaan.

Having broad knowledge and capability to look forward and think out of the box.

Visioner
Visionary

Logo OJK

OJK's Logo



Sederhana yaitu Logo OJK dengan cepat bisa dibaca berbunyi OJK dan melambangkan kesederhanaan dalam sikap, tetapi cepat dalam bertindak menjalankan fungsi yang diamanatkan negara kepada OJK.
Simplicity, the OJK logo can be read as fast as OJK and symbolising simplicity in attitude, but is fast in acting carrying out the functions mandated by the state to OJK.

Ringan yaitu Logo OJK berkesan ringan, tidak berat, melambangkan bahwa Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK akan selalu bekerja dengan rendah hati, ringan tangan dan tidak membeda-bedakan dalam menangani kewajiban yang diamanatkan.
Modesty, OJK logo impresses light, not heavy, representing that the Board of Commissioners, officials, and OJK employees will always work humbly, light-handed and do not discriminate in handling mandated obligations

Garis-garis tegas yaitu Logo OJK merupakan garis-garis tegas yang membentuk tulisan OJK melambangkan bahwa Dewan Komisioner, pejabat, dan pegawai OJK akan selalu bertindak tegas dalam menjalankan kewajibannya, sesuai dengan amanat undang-undang.
Clear lines that is the OJK Logo are the firm lines that form the OJK writing symbolizing that the Board of Commissioners, officials, and OJK employees will always act decisively in carrying out their obligations, in accordance with the mandate of the law.

Warna Logo OJK yaitu melambangkan bahwa organisasi OJK adalah hidup, selalu memiliki darah segar, sehingga tidak pernah berhenti bekerja hingga sempurna pekerjaan yang diamanatkan.
The color of the OJK logo symbolising OJK as live organization always has fresh blood, and never stops working until the duties mandated achieve perfection.

Warna huruf OJK yaitu memberi kesan elegan dan menyiratkan bahwa OJK sebagai institusi yang maju dan bervisi masa depan.
The color in OJK font symbolising the impression of elegance and implies OJK as an advanced and visionary institution of the future.

Warna merah dan putih di atas huruf OJK yaitu warna merah dan putih yang melancip menunjukkan sikap dinamis dan bekerja yang menjadi ciri aparat OJK, namun selalu dalam koridor undang-undang.
The red and white colors above the OJK letters, the sharp red and white colors, indicate the dynamic and working attitude that characterizes the OJK apparatus, but always within the corridor of the law.

Berdasarkan PDK nomor 08/PDK.02/2016
Based on PDK number 08/PDK.02/2016

Struktur Organisasi

Organization Structure

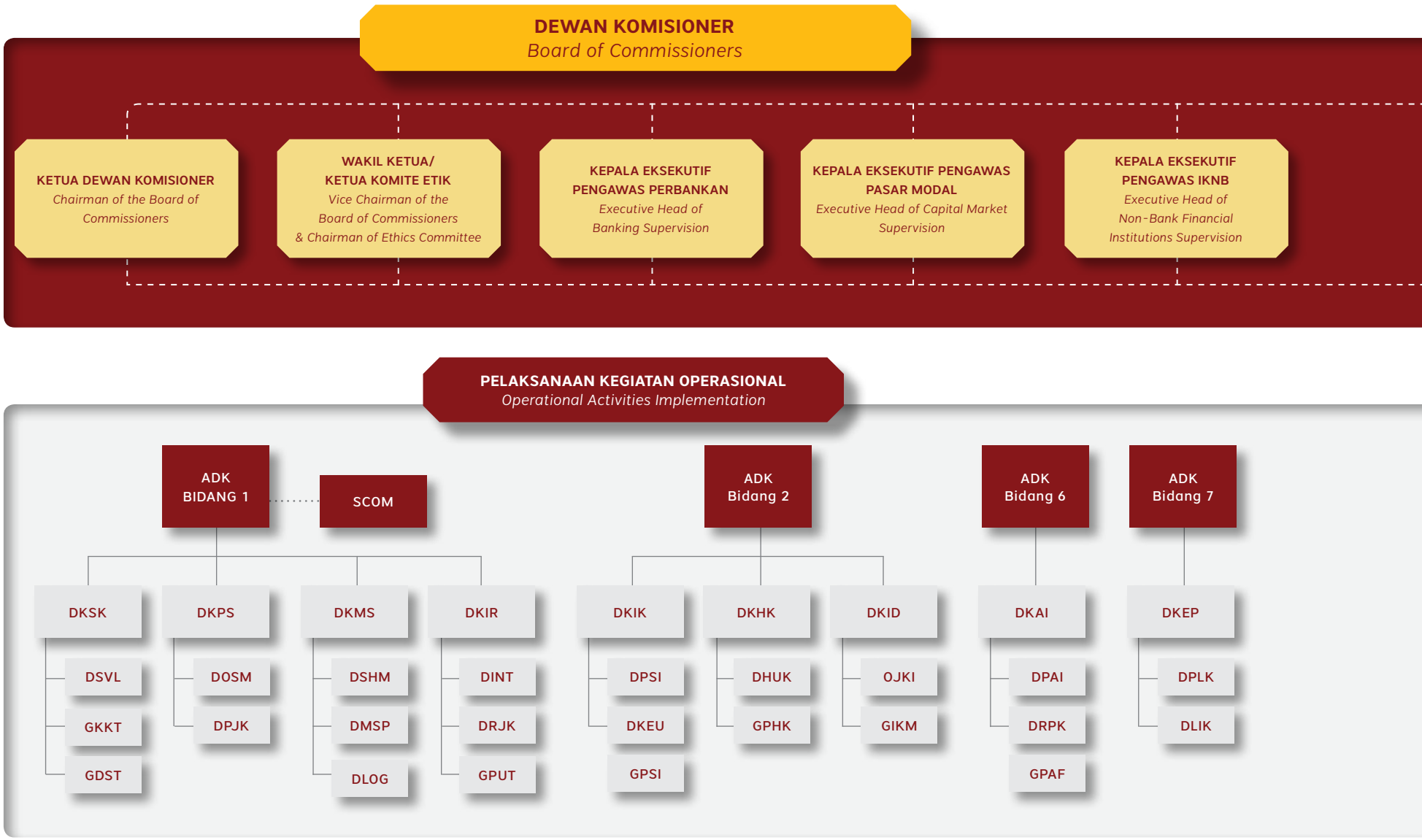

Berdasarkan PDK.05/PDK.01/2018
Based on PDK/05/PDK.01/2018

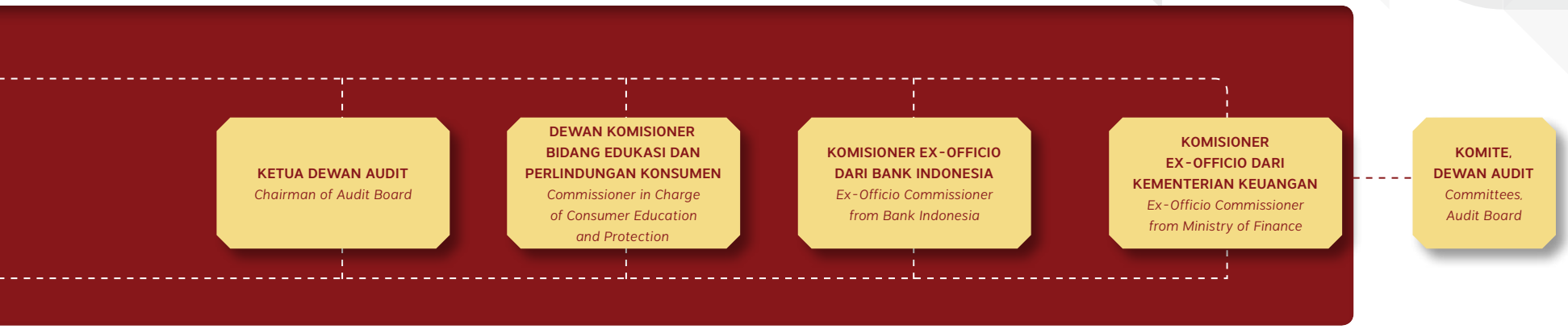
KETUA DEWAN AUDIT
Chairman of Audit Board
DEWAN KOMISIONER BIDANG EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Commissioner in Charge of Consumer Education and Protection
KOMISIONER EX-OFFICIO DARI BANK INDONESIA
Ex-Officio Commissioner from Bank Indonesia
KOMISIONER EX-OFFICIO DARI KEMENTERIAN KEUANGAN
Ex-Officio Commissioner from Ministry of Finance
KOMITE, DEWAN AUDIT
Committees, Audit Board

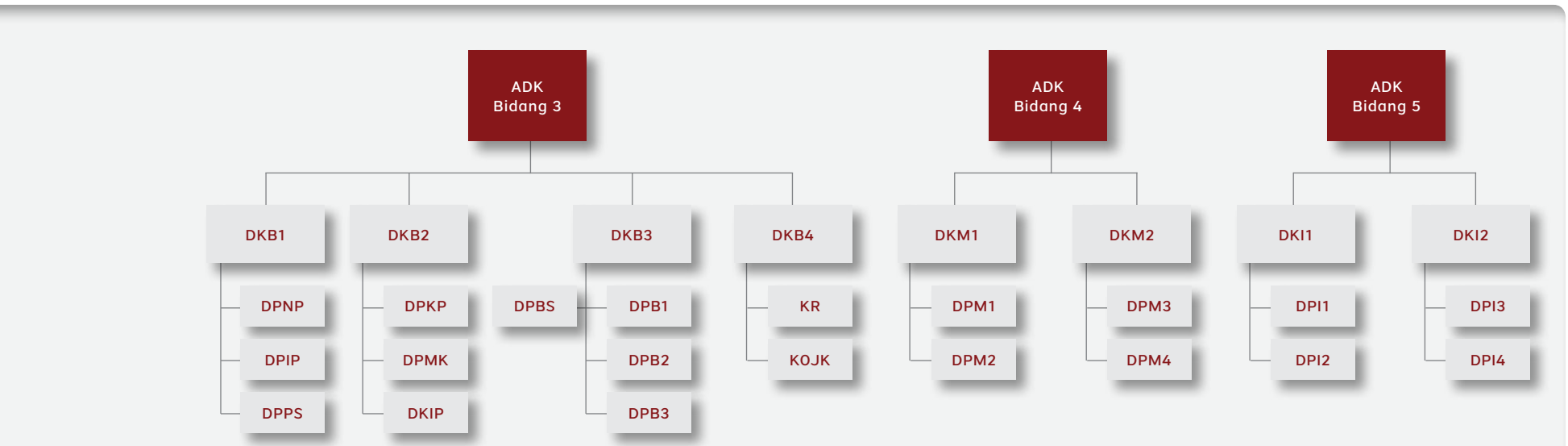
ADK Bidang 3
ADK Bidang 4
ADK Bidang 5
DKB1
DKB2
DKB3
DKB4
DKM1
DKM2
DKI1
DKI2
DPNP
DPIP
DPPS
DPKP
DPMK
DKIP
DPBS
DPB1
DPB2
DPB3
KR
KOJK
DPM1
DPM2
DPM3
DPM4
DPI1
DPI2
DPI3
DPI4



“Kolaborasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun optimisme bersama merupakan aspek penting dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Effective collaboration with all stakeholders to build mutual optimism is an important aspect of accelerating sustainable economic growth.”

WIMBOH SANTOSO
Ketua Dewan Komisioner
Chairman of the Board of Commissioners

Sambutan Ketua Dewan Komisioner

Foreword from Chairman of the Board of Commissioners

Para pemangku kepentingan yang kami hormati,

Pertama-tama perkenankan kami memanjatkan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya dengan berkah dan rahmat-Nya, OJK dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam mencapai visi dan misi sesuai amanat UU No. 21 Tahun 2011 dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan serta melindungi konsumen dan masyarakat di Indonesia. Dengan dukungan dan sinergi berbagai pihak, OJK dapat mencapai kinerja yang baik di 2019.

Laporan Tahunan OJK tahun 2019 mengambil tema "Kolaborasi Membangun Optimisme dan Akselerasi Pertumbuhan Berkelanjutan". Tema ini diangkat untuk menggambarkan kinerja dan komitmen OJK selama tahun 2019 yang mengedepankan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun optimisme bersama guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang didukung oleh sektor jasa keuangan yang stabil dan berperan optimal.

Perekonomian dunia pada 2019 diwarnai oleh berbagai dinamika di beberapa kawasan yang berujung pada perlambatan aktivitas ekonomi global. Dinamika tersebut didominasi oleh meningkatnya kebijakan proteksionisme dan gejolak geopolitik di beberapa kawasan, di antaranya eskalasi perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa, serta gejolak politik di beberapa wilayah seperti di Timur Tengah dan Asia Timur. Semua peristiwa ini berimplikasi pada menurunnya volume perdagangan dunia dan jatuhnya harga komoditas yang mendorong beberapa lembaga internasional memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Dinamika ini juga mendorong otoritas moneter global mengubah arah kebijakan menjadi lebih akomodatif untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan.

Dengan berbagai kolaborasi kebijakan antar Otoritas terkait, dampak perlambatan ekonomi global pada perekonomian domestik dapat diminimalkan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 masih terjaga stabil, tercatat mencapai 5,02% (*yoy*). Inflasi tetap terjaga rendah sesuai target yang ditetapkan yakni di level 2,72% (*yoy*) untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, defisit neraca transaksi berjalan menyempit menjadi USD30,4 miliar atau 2,72% terhadap PDB yang didorong oleh kinerja neraca perdagangan yang membaik.

Respected stakeholders,

First of all, allow me to give praise and thanks to the God Almighty as it is only with His blessings and grace OJK could carry out its duties and function towards realising its vision and mission, as mandated by OJK Act No. 21 of 2011, to regulate and supervise the financial services sector, as well as protecting consumers and the public as a whole. With the support and synergy among various parties, OJK was able to achieve good performance in 2019.

OJK Annual Report 2019 is entitled "Collaboration in Building Optimism and Accelerating Sustainable Growth". This theme reflects OJK's performance and commitment in 2019, which puts forward collaboration with all stakeholders in order to build shared optimism and accelerate sustainable economic growth, supported by a stable and well-performing financial services sector.

The global economy in 2019 was shaped by various dynamics around the world that spurred global economic slowdown. That dynamics were dominated by the emergence of inward-looking policies and geopolitical shocks in various regions, including the escalating trade war between the United States and China, UK's withdrawal from the European Union, as well as geopolitical shocks in the Middle East and East Asia. Such events resulted in lower world trade volume and commodity prices, prompting several international organisations to trim their projections for global economic growth. Furthermore, monetary authorities around the world responded to the global economic dynamics through more accommodative policies to maintain economic growth and financial system stability.

The impact of global economic moderation on the domestic economy was minimized through policy collaboration with relevant authorities. In general, national economic growth in 2019 was maintained at a stable rate of 5.02% (yoy). Furthermore, low and stable inflation was recorded within the target corridor, at a rate of 2.72% (yoy); sufficient to maintain public purchasing power. In addition, the current account deficit was narrowed to USD30.4 billion or 2.72% of GDP, driven by trade balance gains.

Di tengah tekanan dari dinamika di pasar keuangan dan perokonomian global, stabilitas sektor jasa keuangan domestik tetap dapat terjaga dan menunjukkan kinerja positif. Kinerja pasar keuangan domestik terpantau membaik tecermin dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup mengalami peningkatan 1,70% ke level 6.299,54. Ketahanan industri perbankan juga terjaga baik yang tecermin dari tingkat permodalan yang solid dengan CAR mencapai 23,31%, likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terukur dan terkendali dengan baik. Meski demikian, pertumbuhan kredit perbankan mengalami perlambatan, yaitu tumbuh sebesar 6,08% (*yoy*), lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sebesar 11,75% (*yoy*). Perkembangan kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) juga tercatat positif dengan pertumbuhan total aset mencapai 6,52% (*yoy*). Demikian halnya dengan industri jasa keuangan syariah yang juga tumbuh dengan cukup baik.

Despite prevailing global economic and financial market dynamics, domestic financial services sector stability was maintained and demonstrated positive performance. The domestic financial markets rallied in 2019 as the Jakarta Composite Index (JCI) traded up 1.70% to close at a level of 6,299.54. Banking industry also remained resilient, as reflected by a high Capital Adequacy Ratio (CAR) of 23.31%, coupled with adequate liquidity as well as a measured and controlled risk profile. Nevertheless, outstanding loans disbursed by the banking industry experienced slower growth in the reporting period, from 11.75% (yoy) in 2018 to 6.08% (yoy). Additionally, the non-bank financial industry recorded positive performance in 2019, with total asset growth reaching 6.52% (yoy). Similarly, the Islamic financial services industry also maintained robust growth.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, OJK terus berupaya untuk mewujudkan Sektor Jasa Keuangan yang stabil dan berperan optimal dalam perekonomian nasional. Fungsi penyusunan kerangka pengaturan yang berimbang antara aspek prudensial untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mendorong pertumbuhan sektor jasa keuangan yang sehat terus dilakukan. Selama 2019, OJK telah menerbitkan 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan 31 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) yang menyentuh berbagai sektor keuangan, baik perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non-bank dan perlindungan konsumen. Penyempurnaan kerangka pengaturan ini di antaranya dalam rangka menyesuaikan dengan standar prudensial internasional yang sesuai dengan kondisi Indonesia dan menyikapi berbagai perkembangan dan kebutuhan industri keuangan, termasuk pengaturan dalam mengantisipasi dan mendorong perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan.

As mandated in the OJK Act, OJK constantly strives to create a stable financial services sector that significantly contributes to the national economy. OJK continues to formulate a regulatory framework that strikes an optimal balance between prudential aspects -in order to maintain financial services sector stability–and stimulating healthy financial services sector growth. In 2019, OJK issued 44 OJK Regulations (POJK) and 31 Circular Letters (SEOJK) across various financial sectors, including the banking, capital market and nonbank financial industry as well as in relation to consumer protection. Refinements to the regulatory framework were made based on international prudential standards tailored to conditions in Indonesia, while addressing various developments and needs of the financial industry, including regulations to anticipate and foster IT development in the financial industry.

Stabilitas sektor jasa keuangan menjadi kunci penting untuk menciptakan landasan pembangunan yang berkelanjutan. OJK menerbitkan serangkaian kebijakan strategis untuk terus melengkapi dan menyempurnakan ekosistem sektor jasa keuangan, di antaranya penerbitan kebijakan dalam menfasilitasi pendirian perusahaan efek daerah, sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah, dan mewajibkan penyampaian Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-bank. OJK juga berupaya untuk terus meningkatkan kualitas dan infrastruktur pengawasan Sektor Jasa Keuangan, antara lain melalui peningkatan kapabilitas pengawasan secara berkelanjutan, reformasi IKNB, pengawasan berbasis teknologi melalui pengembangan OJK-BOX (OBOX), dan perluasan perizinan terintegrasi bekerja sama dengan lembaga lainnya seperti Bursa Efek Indonesia. Dalam rangka meningkatkan daya saing sektor jasa keuangan di Indonesia, OJK mengadopsi *best practices* dan standard internasional, antara lain melalui

Stability in the financial services sector is a prerequisite to creating a sustainable development foundation. OJK rolled out a series of strategic policies to complement and hone the financial services sector ecosystem, including policies to establish municipal/regional securities companies and to promote synergy under sole ownership to stimulate Islamic banking industry development, while requiring non-bank financial institutions to submit their business plans. Furthermore, OJK also strived to enhance the quality and infrastructure of financial services sector supervision, such as by continuously increasing supervisory capacity, NBFI reforms, technology-based supervision through OJK-BOX (OBOX) development and expanding integrated licensing between OJK and other institutions such as the Indonesia Stock Exchange. In an attempt to increase the competitiveness of the financial services sector in Indonesia, OJK continued to adopt international best practices and standards, including through completion the Mutual Evaluation Review (MER) of Anti-

penyelesaian pelaksanaan *Mutual Evaluation Review* (MER) dalam lingkup Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), serta *Reports on the Observance of Standards and Codes in Accounting and Auditing* (ROSC A&A) Indonesia. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerapan tata kelola yang baik di sektor jasa keuangan untuk menjaga integritas pasar serta kepercayan investor dan masyarakat.

OJK senantiasa mendorong kontribusi Sektor Jasa Keuangan dalam pembangunan nasional. OJK meningkatkan peran alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis, baik Pemerintah dan Swasta, di antaranya dengan menfasilitasi penerbitan instrumen pasar modal seperti RDPT, KIK-EBA, EBA SP, KPD serta KIK DIRE dan DINFRA termasuk efek berwawasan linkungan seperti penerbitan *Green Bonds*/ SUKUK dan *Blended Finance*. Berbagai kebijakan stimulus juga diluncurkan untuk mendorong industri prioritas seperti industri pariwisata, ekspor/ substitusi impor, dan juga perumahan.

Sementara itu, OJK menaruh perhatian besar pada peningkatan literasi dan penyediaan akses keuangan bagi masyakarat di berbagai kalangan termasuk usaha ultra mikro, UMKM dan masyarakat di daerah terpencil. Untuk itu OJK terus menfasilitasi berbagai macam program seperti penyaluran KUR melalui skema klaster, tersedianya pembiayaan di sektor perikanan dan kelautan melalui Program Jangkau, Sinergi dan *Guideline* (JARING), tersedianya program perlindungan bagi profesi petani dan nelayan melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Perikanan, pendirian 56 Bank Wakaf Mikro di berbagai daerah untuk pengembangan usaha ultra mikro masyarakat, berdirinya BUMDes-Center serta pengembangan asuransi mikro. OJK juga tidak hentinya berupaya untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan mendekatkan masyarakat dengan produk keuangan untuk berbagai kalangan, antara lain melalui program Laku Pandai, Simpanan Pelajar (SimPel) dan Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA). Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) juga terus kami optimalkan untuk mengkoordinasikan berbagai upaya peningkatan akses keuangan dan perlindungan masyarakat di daerah.

Selanjutnya, dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat dan menyikapi perubahan ekspektasi masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan, OJK mendorong pengembangan inovasi keuangan digital melalui optimalisasi peran OJK *Infinity* dalam merespon perkembangan teknologi yang pesat di sektor jasa keuangan. Peran OJK *Infinity* ditujukan sebagai salah satu wadah konsultasi dan edukasi terkait Inovasi Keuangan Digital (IKD).

Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF), as well as Reports on the Observance of Standards and Codes in Accounting and Auditing (ROSC A&A). This is in line with effort to enhance the quality of governance and transparency in the financial services sector in order to increase market integrity as well as reinforce investor and public trust.

OJK has also continuously endeavoured to increase the financial services sector's contribution to the national development. OJK has expanded the role of medium and long-term alternative financing for strategic government and private sectors, which includes facilitating issuances of capital market instruments such as private equity funds (RDPT), asset-backed securities - collective investment contracts (KIK-EBA), asset-backed securities in the form of participatory notes (EBA-SP), discretionary fund management contracts (KPD), real estate investment funds - collective investment contracts (KIK DIRE) and infrastructure investment funds - collective investment contracts (DINFRA), as well as green finance instruments such as green bonds/sukuk and blended finance. OJK has also issued various stimulus policies to catalyse priority industries, namely the tourism industry, exports/import substitution and housing.

Meanwhile, OJK has continued to focus on increasing financial literacy and enhancing public access to finance, including for ultra-micro, micro, small and medium enterprises (MSMEs) as well as communities in remote areas. To that end, OJK facilitates a broad variety of programs, such as disbursing People's Business Loans (KUR) through cluster schemes, providing financing in the maritime and fisheries sector through the JARING program, providing protection for farmers and fishermen through rice farm insurance (AUTP) and fishing insurance, establishing 56 Micro Waqf Banks in various regions to facilitate development of ultra-micro enterprises as well as establishing village-owned enterprises (BUMDes Centres) and developing micro-insurance. Furthermore, OJK has not slowed down in its efforts to increase financial literacy and introduce financial products to the public through branchless banking, student savings accounts (SimPel) and savings accounts for university students and young people (SiMuda). Additionally, OJK has continued to optimise the role of regional financial access acceleration teams (TPAKD) in order to coordinate various efforts that enhance financial access and consumer protection in the regions.

To increase public financial access and address the changing public expectations of financial products and services, OJK also encourages digital financial innovation by optimising the role of OJK Infinity in response to the rapid development of technology in the financial services sector. OJK Infinity serves as a consultation and educational forum for all matters concerning digital financial innovation (IKD).

Di bidang edukasi dan literasi keuangan, OJK melaksanakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang ketiga dengan hasil indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19% yang telah melampaui target Pemerintah yaitu sebesar 75% pada tahun 2019 yang tercantum dalam Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Selain itu, OJK meningkatkan layanan perlindungan konsumen antara lain melalui layanan kontak 157 yang membuka akses melalui aplikasi *Whatsapp*, pengawasan *market conduct* yang semakin terstruktur, dan Satgas Waspada Investasi yang semakin aktif dalam memberantas modus-modus investasi illegal baik di Kantor Pusat maupun Daerah.

In terms of education and financial literacy, OJK conducted the third National Financial Literacy and Inclusion Survey (SNLIK), which revealed a financial literacy index of 38.03% and a financial inclusion index of 76.19%, thus surpassing the Government's 75% target for 2019 as stipulated in Presidential Regulation (Perpres) No. 82 of 2016 concerning the National Financial Inclusion Strategy. In addition, OJK has expanded consumer protection services through OJK Kontak 157, which facilitates access through WhatsApp application, structured market conduct supervision and an active Investment Alert Task Force to eradicate illegal investment activities at the head office as well as regional and branch offices.

OJK juga melakukan upaya peningkatan pengelolaan manajemen internal untuk mencapai pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien. OJK terus mengedapankan penerapan good goverance dengan berbagai upaya, antara lain pelaksanaan Standar Pengendalian Kualitas (SPK), penguatan ISO 9001:2015, dan *Whistleblowing System* (WBS). Dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, OJK mengkampanyekan program budaya kerja yang menunjang pencapaian kinerja, antara lain dengan program pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi insan OJK secara kolaboratif. Seluruh aktivitas dan tugas OJK tersebut juga ditunjang oleh sistem informasi digital yang semakin maju sebagaimana ditetapkan dalam Rancang Bangun Sistem Informasi.

Further, OJK has enhanced internal management in order to achieve more efficient and effective organisational management. OJK continues to prioritise good governance through various efforts, including quality control standards, strengthening ISO 9001:2015 and the whistleblowing system (WBS). Striving to enhance human resources capacity, various work culture programs were campaigned by OJK through trainings in order to collaboratively increase the capacity and competencies of all OJK staff. Furthermore, OJK activities and functions are also supported by advanced digital information systems, as contained in the Information Systems Master Plan.

Laporan Tahunan ini juga memuat Laporan Keuangan OJK beserta hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap Laporan Keuangan OJK 2019. Predikat Wajar Tanpa Pengecualian telah diberikan kepada OJK sebanyak enam kali berturut-turut. Pencapaian ini merupakan wujud komitmen seluruh Insan OJK untuk mengedepankan kredibilitas dan integritas tinggi dalam pelaksanaan tugas. Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi standar penerapan tata kelola yang baik pada seluruh pelaku industri jasa keuangan.

The annual report also contains the financial statements and results of the audit conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia. The Audit Board has now concluded an unqualified opinion for six consecutive years, demonstrating OJK's avowed commitment to credibility and integrity. This achievement is hoped to be the exemplar of implementation of good governance amongst all financial services industry players.

Akhir kata, atas nama Dewan Komisioner kami menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh pegawai OJK yang telah memberikan dedikasi tinggi dan kinerja terbaiknya serta kepada seluruh lembaga/instansi dan pihak terkait lainnya termasuk peran serta industri jasa keuangan atas kontribusi, sinergi dan optimisme yang telah dibangun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OJK selama 2019. Kiranya Laporan Tahunan OJK tahun 2019 ini dapat menjadi sumber informasi yang komprehensif atas pelaksanaan seluruh fungsi dan tugas OJK selama 2019, serta dapat digunakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan.

In closing, on behalf of the Board of Commissioners, I would like to express my sincere appreciation to all OJK staff who have dedicated themselves to performing at their best, as well as to all institutions and other relevant parties, including the financial services industry, for their contribution, synergy and optimism that has been built in carrying out OJK duties and functions in 2019. The OJK Annual Report 2019 is a comprehensive source of information regarding the implementation of all OJK duties and functions during the 2019 period, which may be used as a reference by all stakeholders.

Jakarta, 18 Mei 2020/*18 May 2020*

Ketua Dewan Komisioner
Chairman of the Board of Commissioners



WIMBOH SANTOSO

Profil Anggota Dewan Komisioner

Board of Commissioners Profile



Dody Budi Waluyo
Komisioner
Ex-Officio Dari Bank Indonesia
Ex-Officio Commissioner from Bank Indonesia

8

Ahmad Hidayat
Ketua Dewan Audit
Chairman of Audit Board

6

Hoesen
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Executive Head of Capital Market Supervision

4

Nurhaida
Wakil Ketua/Ketua Komite Etik
Vice Chairman of the Board of Commissioners & Chairman of Ethics Committee

2



Wimboh Santoso
Ketua Dewan Komisioner
Chairman of the Board of Commissioners

1

Heru Kristiyana
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
Executive Head of Banking Supervision

3

Riswinandi
Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
Executive Head of Non-Bank Financial Institutions Supervision

5

Tirta Segara
Komisioner
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Commissioner in Charge of Consumer Education and Protection

7

Suahasil Nazara
Komisioner
Ex-Officio Dari Kementerian Keuangan
Ex-Officio Commissioner from Ministry of Finance

9



Wimboh Santoso
Ketua Dewan Komisioner OJK
Chairman of
the Board of Commissioners

Wimboh Santoso lahir di Boyolali, Jawa Tengah, pada 15 Maret 1957. Usai menamatkan pendidikan sarjananya di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta (1983), Wimboh melanjutkan studi dan meraih gelar Master of Science bidang Business Administration dari University of Illinois, at Urbana-Champaign, USA di tahun 1993. Pada tahun 1999, Wimboh berhasil membawa pulang gelar Ph.D di bidang Banking and Finance - Risk Management, dari Loughborough University.

Born in Boyolali, Central Java, on 15th March 1957, Wimboh Santoso graduated with a bachelor's degree from the Sebelas Maret University (UNS) in 1983. He earned a master's degree in Business Administration from the University of Illinois in 1993 and a PhD in Banking and Finance - Risk Management from Loughborough University, UK, in 1999.

Wimboh Santoso memulai kariernya tahun 1984 sebagai pengawas bank di Bank Indonesia dan pada tahun 2010 diangkat sebagai Direktur Penelitian dan Pengaturan Perbankan di Bank Indonesia. Wimboh Santoso juga pernah bertugas sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia di New York dan Direktur Eksekutif International Monetary Fund (IMF) pada tahun 2013. Sejak tahun 2015, Wimboh Santoso menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk hingga 2017. Pada tahun 2016 Wimboh juga merangkap menjadi Direktur Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia.

Beginning his career as a bank supervisor at Bank Indonesia in 1984, Wimboh Santoso was promoted to Director of Banking Research and Regulation at Bank Indonesia in 2010. He was subsequently assigned as Head of Bank Indonesia's Representative Office in New York and Executive Director at the International Monetary Fund (IMF) in 2013. In 2015, Wimboh Santoso was appointed President Commissioner of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and in 2016 he was also installed as Director of the Indonesian Banking Development Institute (LPPI).

Pada 20 Juli 2017, Wimboh Santoso ditetapkan sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017 serta dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

On 20th July 2017, Wimboh Santoso was appointed as Chairman of OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for the period from 2017-2022.

Di luar kesibukannya, Wimboh Santoso juga aktif sebagai pengajar di beberapa universitas ternama di Indonesia, baik untuk program Sarjana maupun Pasca Sarjana. Wimboh juga telah menorehkan sederet prestasi dan karya tulis dalam jurnal internasional, antara lain Effective Financial System Stability Framework dan The Impact of Global Liquidity on Financial Landscapes and Risk in the ASEAN-5 Countries di 2007, dan Risk Profile of Households and the Impact on Financial Stability di 2009.

Beyond his duties as Chairman of the OJK Board of Commissioners, Wimboh Santoso also actively lectures at prestigious Indonesian universities on undergraduate and postgraduate programs. Wimboh Santoso has authored international papers, including the Effective Financial System Stability Framework as well as the Impact of Global Liquidity on Financial Landscapes and Risks in ASEAN+5 Countries in 2007 and the Risk Profile of Households and the Impact of Financial Stability in 2009.

Di tahun 2019, Wimboh dianugerahi gelar Profesor dan dikukuhkan menjadi Guru Besar Dosen Tidak Tetap Ilmu Manajemen Risiko dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.

In 2019, Wimboh earned his Professorship and was confirmed as an adjunct lecturer on risk management at the Faculty of Economics and Business of the Sebelas Maret University.

Selain itu, Wimboh Santoso juga terpilih menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2018 - 2021, organisasi yang bertujuan mempercepat pengembangan dan penerapan sistem ekonomi dan etika bisnis Islami di Indonesia. Wimboh juga terpilih sebagai anggota Dewan Pengawas Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) periode 2018-2021 dan Ketua Majelis Pakar Dewan Masjid Indonesia periode 2017-2022.

In addition, Wimboh Santoso was selected as Chairman of the Islamic Economic Community (MES) for the period from 2018-2021, an organisation that aims to accelerate the development and implementation of an Islamic economic system and business ethics in Indonesia. In addition, Wimboh Santoso is currently serving as a member of the Indonesian Economist Association (ISEI) for the period from 2018-2021 and Chairman of the Expert Assembly of the Indonesia Mosque Council for 2017-2022.



Nurhaida

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK
Vice Chairman of the Board of Commissioners

Nurhaida lahir di Padang Panjang, 27 Juni 1959. Nurhaida berhasil meraih gelar Insinyur Bidang Kimia Tekstil dari Institut Teknologi Tekstil Bandung dan meraih gelar Master of Business Administration dari Indiana University, Bloomington, Amerika Serikat.

Nurhaida mengawali karier di Kementerian Keuangan pada tahun 1989. Sejumlah posisi ia duduki, seperti Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Kementerian Keuangan RI 2011, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan periode 2011-2012, dan Anggota Dewan Komisioner merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK masa jabatan 2012-2017.

Pada 22 Agustus 2017, Nurhaida dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Nurhaida dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Nurhaida aktif mewakili OJK di forum Internasional seperti ASEAN Capital Market Forum (ACMF) serta Organization of Securities Commissions (IOSCO). Nurhaida juga dipercaya sebagai Advisory Council mewakili Indonesia pada Women's World Bank untuk membawa kepentingan dan aspirasi Perempuan Indonesia dalam hal inklusi keuangan. Berbagai penghargaan berhasil diraih seperti 71 Indonesian Inspiring Women dari Obsession Media Group, Thomas Mural Medallion dari Indiana University, dan 99 Most Powerful Women dari Globe Asia.

Born in Padang Panjang on 27th June 1959, Nurhaida earned an engineering degree in textile chemistry from the Bandung Institute of Textile Technology, followed by a Master of Business Administration (MBA) from Indiana University, Bloomington, United States.

Starting her career at the Ministry of Finance in 1989, Nurhaida has served a number of positions, including as the Ministry's Expert Staff for Financial Services and Capital Market Policy and Regulation in 2011, Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency from 2011 to 2012, and most recently as the Executive Head of Capital Market Supervision on the OJK Board of Commissioners from 2012-2017.

On 22nd August 2017, Nurhaida was appointed as Vice Chairman of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

Nurhaida actively represents OJK at various international forums, including the ASEAN Capital Market Forum (ACMF) and the International Organisation of Securities Commissions (IOSCO). Furthermore, Nurhaida is also an entrusted member of the Advisory Council representing Indonesia at the Women's World Banking to advocate the importance and aspirations of Indonesian women in terms of financial inclusion. Nurhaida has earned various accolades. She was named one of 71 Inspiring Indonesian Women by Obsession Media Group, presented with the Thomas Mural Medallion by Indiana University and listed as one of the 99 Most Powerful Women by Globe Asia.



Heru Kristiyana
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan
Executive Head of Banking Supervision

Heru Kristiyana lahir di Salatiga, 5 September 1956 dan mengawali karirnya di Bank Indonesia pada tahun 1982 setelah menamatkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Latar belakang pendidikannya dilanjutkan ke jenjang Master di Bidang Ilmu Ekonomi. Selain itu, berbagai pelatihan dan pendidikan baik domestik maupun internasional telah diikuti.

Born on 5th September 1956 in Salatiga, Heru Kristiyana graduated from the Faculty of Law, Diponegoro University in 1982 before furthering his education with a master's degree in Economics and graduating from various international and domestic education and training programs.

Sebelum mengawali karier di OJK, Heru Kristiyana merupakan Direktur Eksekutif Departemen Pengawasan Bank 3 Bank Indonesia pada tahun 2013. Pengabdiannya di OJK diawali pada tahun 2014 sebagai Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV dengan lingkup tugas pengawasan atas seluruh Bank yang berkantor pusat di luar Jakarta, Kantor Regional dan Kantor OJK seluruh Indonesia.

For most of his career at Bank Indonesia, Heru Kristiyana was entrusted to the banking sector, heading the Bank Supervision Work Unit and supervising private banks, state-owned banks and rural banks. In his final post at Bank Indonesia, Heru Kristiyana served as Executive Director of Banking Supervision in 2013 prior to his assignment to OJK in 2014 as Deputy Commissioner of Banking Supervision, overseeing all banks headquartered outside Jakarta as well as all OJK regional and branch offices throughout Indonesia.

Pada 20 Juli 2017, Heru Kristiyana ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Heru Kristiyana dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

On 20th July 2017, Heru Kristiyana was appointed as a member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a period from 2017-2022.

Dalam menjalankan tugasnya, Heru Kristiyana memberikan perhatian pada peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya pengawas. Selain itu komitmennya terhadap kebijakan mikroprudensial dimanifestasikan dengan mendorong dan menjaga tingkat kesehatan bank sehingga mampu meningkatkan kontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional. Heru Kristiyana membuktikan kualitasnya dengan memperoleh Sertifikasi dari Program Eksekutif Direksi Sertifikasi Manajemen Risiko dari Badan Sertifikasi Manajemen Risiko.

During his tenure, Heru Kristiyana has been a staunch proponent of enhancing the capacity and competencies of human resources, focusing on supervisors, while also remaining avowedly committed to improving bank soundness through microprudential policies, thus contributing to national economic growth and development. Heru Kristiyana has also earned a number of certificates, including the Executive Program for the Certification of Risk Management Directors from the Risk Management Certification Agency.

Heru Kristiyana juga aktif mewakili OJK dan Indonesia di forum International seperti Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), yang merupakan Komite penetap standar global utama bagi prudensial perbankan dan forum kerjasama perihal pengawasan perbankan. Sejalan dengan keanggotaan OJK pada BCBS, OJK menjalani Program Penilaian Konsistensi Peraturan (RCAP/Regulatory Consistency Assessment Program) kerangka NSFR (Net Stable Funding Ratio) dan Large Exposures (LEx) untuk sektor Perbankan dengan nilai Compliant.

Actively representing OJK at international forums, including the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), as the primary global standard setter for the prudential regulation of banks and a forum for regular cooperation on banking supervisory matters, Heru Kristiyana expresses his concerns regarding the implementation of Basel standards across Indonesia's banking industry.

Heru Kristiyana juga merupakan member forum Executive's Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP) yang merupakan organisasi kerjasama Bank Sentral & Otoritas Keuangan dan moneter dalam kawasan Asia Timur & Pasifik.

Heru Kristiyana it is also a member of the Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP), which is a forum for central banks in the East Asia and Pacific region to strengthen the cooperative relationship amongst its members.



Hoesen
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Executive Head of Capital Market Supervision

Hoesen lahir di Jakarta, 21 Februari 1966. Hoesen mendapatkan gelar Sarjana Pertanian Universitas Padjajaran 1990 serta gelar Master Manajemen Keuangan, Universitas Pelita Harapan.

Selama karirnya di SJK, Hoesen pernah menjabat sebagai direktur utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. Selanjutnya Hoesen ditunjuk sebagai Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Jakarta hingga 2015. Hoesen juga dipercaya memimpin PT Danareksa sebagai direktur selama dua tahun terakhir sebelum menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK.

Pada 20 Juli 2017, Hoesen ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Hoesen dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Semasa kariernya, Hoesen terlibat dalam Global Custody and Portofolio Administration, State Street KDEI, Managing Change di PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia dan turut serta aktif dalam pembahasan bertema Permasalahan Saham Transaksi Saham di Pasar Modal "Gadai Saham-Saham Transaksi Repo Pinjam Meminjam Saham", Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia.

Born in Jakarta on 21st February 1966, Hoesen graduated from Padjajaran University's School of Agriculture in 1990 and earned a master's degree in Financial Management from Pelita Harapan University.

During his career in the financial services sector, Hoesen served as President Director of the Indonesia Stock Market Clearing House (KPEI) before his appointment as Director of Corporate Appraisals at PT Bursa Efek Jakarta through to 2015. Hoesen was subsequently entrusted to lead PT Danareksa as Director for the last two years prior to his nomination as a member of the OJK Board of Commissioners.

On 20th July 2017, Hoesen was appointed as a member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

During his distinguished career, Hoesen has been involved with the Global Custody and Portfolio Administration and State Street KDEI, while also Managing Change at the Indonesia Stock Market Clearing House (KPEI), and taking an active role in the discussions of the Indonesia Capital Market Arbitration Board regarding Issues concerning Stock Transactions in the Capital Market - 'Trading Repurchase Agreement Shares'.



Riswinandi
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank
Executive Head of Nonbank Financial Institution Supervision

Riswinandi lahir di Jakarta, 12 September 1957. Riswinandi meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1984.

Riswinandi mengawali kariernya pada kantor SGV Utomo. Memulai karier perbankan di PT. Bank Niaga, Tbk selama hampir 13 tahun, dengan menempati berbagai posisi seperti kredit korporasi, kantor cabang luar negeri (Los Angeles, California) dan jabatan terakhir sebagai Vice President Human Resources Group Head, pada 1999.

Selanjutnya Riswinandi bergabung dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), dengan jabatan terakhir sebagai Senior Vice President Loan Work Out Division, pada tahun 2001. Karier Riswinandi pada tahun yang sama berlanjut di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk sebagai Executive Vice President Corporate Lending Division Head dan jabatan terakhir sebagai Direktur Corporate Banking pada tahun 2003.

Riswinandi melanjutkan karier perbankannya di PT Bank Mandiri (Persero), Tbk selama hampir 12 tahun dengan berbagai posisi, mulai dari Komisaris Independen, Direksi yang membidangi Special Asset Management, Direksi yang membidangi Kredit Korporasi dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Direktur Utama sejak tahun 2010 s.d. 2015.

Sewaktu menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Mandiri, Riswinandi juga dipercaya sebagai Komisaris PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero). Terhitung tahun 2015, Riswinandi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Pegadaian (Persero) disamping sebagai komisaris pada PT. Pefindo Biro Kredit.

Pada 20 Juli 2017, Riswinandi ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Riswinandi dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Riswinandi pernah menjabat Wakil Ketua Umum Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (PERBANAS) dan Anggota badan pengawas Ikatan Bankir Indonesia (IBI).

Born in Jakarta on 12th September 1957, Riswinandi received a bachelor's degree in Economics from Trisakti University in 1984.

Riswinandi began his career at the offices of SGV Utomo before moving to the banking sector to fulfil various positions at PT Bank Niaga Tbk over a 13-year period, including corporate loans and an overseas position in Los Angeles, California, culminating as Vice President of Human Resources Group Head in 1999.

Riswinandi subsequently joined the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), with his final role as Senior Vice President of the Loan Work Division in 2001. In the same year, Riswinandi was appointed as Executive Vice President of the Corporate Lending Division before serving as PT Bank Danamon Indonesia Tbk Director of Corporate Banking in 2003.

Riswinandi continued his illustrious career in the banking sector at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, fulfilling various roles at the state-owned bank over a 12-year period, from Independent Commissioner to Director in Charge of Special Asset Management, Director in Charge of Corporate Credit and finally Vice President Director from 2010 to 2015.

During his tenure as Independent Commissioner at Bank Mandiri, Riswinandi was also entrusted as Commissioner of PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero). In 2015, Riswinandi was installed as President Director of PT Pegadaian (Persero), while simultaneously serving as Commissioner of PT Pefindo Biro Kredit.

On 20th July 2017, Riswinandi was appointed as a member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

Riswinandi also honed his experience as Vice Chairman of the Association of Indonesian Private Commercial Banks (PERBANAS) as well as a member of the Supervisory Board of the Indonesian Bankers Association (IBI).



Ahmad Hidayat
Ketua Dewan Audit
Chairman of the Audit Board

Ahmad Hidayat lahir di Banyuwangi, 19 Juli 1966. Ahmad Hidayat mendapatkan gelar sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Airlangga pada tahun 1988 dan gelar MBA - Finance, dari University of Illinois, Urbana - Champaign pada tahun 2000.

Ahmad Hidayat mengawali karier sebagai Officer di PT Bank Bali selama dua tahun sebelum akhirnya bergabung dengan Bank Indonesia pada 1991. Karir di Bank Indonesia diawali sebagai Staf di Biro Penelitian dan Pengembangan Perbankan dan dilanjutkan dengan penugasan di PT Bank Private Development Finance Company of Indonesia (1995-1997). Karir selanjutnya dijalankan pada bidang Akunting dan Sistem Pembayaran (2000-2008) serta menjadi Kepala Bagian Pengembangan Sistem Keuangan Bank Indonesia (2008-2012). Pada tahun 2012 - 2017, Ahmad Hidayat ditugaskan sebagai Kepala Grup Pengaturan, Perencanaan dan Pelaporan Keuangan Bank Indonesia. Posisi terakhir di Bank Indonesia adalah sebagai Direktur Eksekutif dengan jabatan Staf Ahli Dewan Gubernur Bidang Keuangan (2017).

Pada 20 Juli 2017, Ahmad Hidayat ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Ahmad Hidayat dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Berbagai jabatan pernah diamanatkan kepada Ahmad Hidayat antara lain Anggota Dewan Pengarah Komite Penyusun Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia, Wakil Ketua Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI), Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun Bank Indonesia dan Anggota Dewan Pembina Yayasan Yasporbi.

Born in Banyuwangi on 19th July 1966, Ahmad Hidayat earned a Bachelor of Economics in Accounting from Airlangga University in 1988 before furthering his studies to obtain an MBA in Finance from the University of Illinois, Urbana, Champaign in 2000.

Starting his career as an Officer at PT Bank Bali for two years, Ahmad Hidayat joined Bank Indonesia in 1991 as a member of staff in the Bureau of Banking Research and Development. He was subsequently appointed to PT Bank Private Development Finance Company of Indonesia from 1995-1997 before pursuing a career in accounting and payment systems from 2000-2008, becoming division head of Bank Indonesia Financial System Development in 2008 until 2012. Ahmad Hidayat was assigned from 2012-2017 to lead Bank Indonesia Financial Regulation, Planning and Reporting as Group Head. His final position at Bank Indonesia was Executive Director of the Board of Governors' Expert Staff in 2017.

On 20th July 2017, Ahmad Hidayat was appointed as a member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

Ahmad Hidayat has excelled in various distinguished positions throughout his career, including as a member of the Bank Indonesia Financial Accounting Steering Committee, Vice Chairman of the Bank Indonesia Employee Association (IPEBI), member of the Bank Indonesia Pension Funds Supervisory Board, and board member of the Yasporbi Foundation.



Tirta Segara

Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen

Commissioner in charge of Consumer Education and Protection

Tirta Segara dilahirkan di Semarang, 6 Juli 1963. Tirta Segara mendapatkan gelar sarjana dari Jurusan Akuntansi, Universitas Diponegoro dan menguatkan pemahamannya tentang keuangan dengan merampungkan gelar Master Business-Finance and Investment, The George Washington University pada 1994.

Beberapa jabatan yang pernah diemban antara lain VP Investment Banking, Ficorinvest Bank, staf Gubernur BI, dan Advisor-SEA VG Office International Monetary Fund. Pada tahun 2010, Tirta Segara menjadi Lulusan Terbaik Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia (SESPIBI) Angkatan XXIX dan diangkat menjadi Direktur Pengembangan Perbankan Syariah, Bank Indonesia. Dua tahun kemudian, Tirta Segara dipercaya menjadi Direktur Kerjasama Multilateral di Departemen Internasional, Bank Indonesia. Pada awal 2014, Tirta Segara diangkat menjadi Kepala Departemen Komunikasi, Bank Indonesia. Semasa menjabat, Tirta cukup inovatif dalam pengembangan materi dan proses komunikasi kepada stakeholders seperti penggunaan infografis, mobile apps, media online, media sosial, dan kanal lainnya.

Pada 20 Juli 2017, Tirta Segara ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/P Tahun 2017. Tirta Segara dilantik dan mengucapkan sumpah di hadapan Ketua Mahkamah Agung untuk masa jabatan 2017-2022.

Tirta Segara merupakan Advisory Board dari Organisation for Economic Co-operation and Development/International Network on Financial Education (OECD/INFE) dan Governing Council dari International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet).

Born in Semarang on 6th July 1963, Tirta Segara graduated from the Faculty of Accounting of Diponegoro University before furthering his financial education with a Master of Business-Finance and Investment from the George Washington University in 1994.

Tirta Segara's illustrious career in the financial services sector includes serving as VP of Investment Banking at Ficorinvest Bank, Advisor-SEA VG Office of the International Monetary Fund. In 2010, Tirta Segara excelled as the top graduate from the XXIX Class of the Bank Indonesia Leadership Staff School (SESPIBI) and was appointed as Director of Islamic Banking Development at Bank Indonesia. Two years later, he was entrusted to lead Multilateral Cooperation at the International Department of Bank Indonesia as Director. At the beginning of 2014, Tirta Segara was appointed as Head of Bank Indonesia's Communication Department, seizing the opportunity to develop innovative communication processes and materials for the stakeholders through the use of infographics, online media, mobile apps, social media and various other channels.

On 20th July 2017, Tirta Segara was appointed as a member of the OJK Board of Commissioners pursuant to Presidential Decree Number 87/P of 2017 and subsequently sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court for a tenure from 2017-2022.

In addition, Tirta Segara was also selected to serve on the Advisory Board of the Organization for Economic Co-operation and Development/International Network on Financial Education (OECD/INFE) and the Governing Council of the International Financial Consumer Protection Organisation (FinCoNet).



Dody Budi Waluyo

Komisioner *Ex-Officio* dari Bank Indonesia
(25 September 2019 - Sekarang)
Ex-Officio Commissioner from Bank Indonesia
(25 September 2019 - Present)

Dody Budi Waluyo lahir di Jakarta, 19 September 1961, menempuh pendidikan Sarjana di bidang Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan Universitas Indonesia (UI). Kemudian, Dody melanjutkan pendidikan di University of Colorado, AS dan meraih gelar Master of Business Administration (MBA).

Posisi penting yang pernah dijabat oleh Dody Budi Waluyo yaitu Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter (2016 hingga Maret 2018), Kepala Departemen Manajemen Strategis & Tata Kelola (2014-2016), Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi & Moneter (2013-2014), Kepala Departemen Perencanaan Strategis & Hubungan Masyarakat (2012-2013), Direktur Direktorat Internasional (2012), Kepala Biro Direktorat Internasional (2010-2012).

Mengawali karirnya di Bank Indonesia sebagai Staf Departemen Sumber Daya Manusia pada tahun 1988, Dody Budi Waluyo juga pernah bertugas sebagai anggota Working Group G20, BIS, IMF, dan World Bank, di Bidang Moneter dan Keuangan. Selanjutnya menjadi anggota Working Group FDI Statistics di ASEAN pada 2003-2006, dan sebagai Advisor to Executive Directorat South East Asia Voting Group Office, International Monetary Fund, Washington D.C, USA pada tahun 2000-2003.

Dody Budi Waluyo resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 18 April 2018 sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69/P Tahun 2018 tanggal 13 April 2018, dan dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK ex-officio dari Bank Indonesia oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 25 September 2019. Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 82/P tahun 2019 tanggal 3 September 2019.

Born in Jakarta on 19th September 1961, Dody Budi Waluyo completed his undergraduate education in Economic Science & Development Studies at the University of Indonesia (UI). Thereafter, Dody continued his education at the University of Colorado, USA, obtaining a Master of Business Administration (MBA).

Dody Budi Waluyo has held several notable positions during his career, heading the Economic and Monetary Policy Department from 2016 to 2018, the Strategic Management and Governance Department from 2014 to 2016, the Economic and Monetary Policy Department from 2013 to 2014, the Strategic Planning and Public Relations Department from 2012 to 2013 as well as the International Directorate in 2012 as Director and Bureau Head of the International Directorate from 2010 to 2012.

Starting his Bank Indonesia career as a staff member of the Human Resources Department in 1988, Dody Budi Waluyo has been assigned to Monetary and Finance Working Groups of the G20, BIS, IMF and World Bank. From 2003-2006, he was a member of the FDI Statistics Working Group in ASEAN as well as Advisor to the Executive Director for South East Asia Voting Group Office, International Monetary Fund, Washington D.C., USA in 2000-2003.

Dody Budi Waluyo was officially appointed Deputy Governor of Bank Indonesia on 18th April 2018 in accordance with Presidential Decree Number 69/P of 2018, dated 13th April 2018, and sworn in as the Ex-Officio Commissioner from Bank Indonesia before the Chief Justice of the Supreme Court on 25th September 2019 pursuant to Presidential Decree Number 82/P of 2019, dated 3rd September 2019.



Suahasil Nazara
Komisioner *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan
(23 December 2019 - Sekarang)
Ex-Officio Commissioner from the Ministry of Finance
(23 December 2019 - Present)

Suahasil Nazara lahir di Jakarta, 23 November 1970. Menempuh pendidikan Sarjana di bidang Ekonomi Universitas Indonesia (UI). Kemudian, Suahasil melanjutkan pendidikan di Cornell University USA dan meraih gelar Master of Science (MSc.) Pada tahun 2003, Suahasil meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD.) dari University of Illinois at Urbana-Champaign USA.

Mengawali karirnya sejak 1999 menjadi PNS sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, pada tahun 2009 mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Ekonomi. Jabatan lain yang pernah didudukinya adalah Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) pada Kantor Wakil Presiden RI (2010-2015), serta menjadi Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional (KEN) pada 2013-2014. Sejak 31 Oktober 2016 Suahasil dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Suahasil resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada tanggal 25 Oktober 2019, selanjutnya dilantik sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK ex-officio dari Kementrian Keuangan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 13 Januari 2020. Pelantikan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 142/P Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019.

Born in Jakarta on 23rd November 1970, Suahasil Nazara completed his undergraduate education in Economics at the University of Indonesia (UI) before furthering his education at Cornell University, USA, earning a Master of Science. In 2003, he received his Doctor of Philosophy from the University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.

Commencing his career in 1999 as a civil servant lecturer at the Faculty of Economics and Business of the University of Indonesia in 2019, Suahasil Nazara became a Professor of Economics in 2009. He has held a number of prominent positions, including as Working Group Policy Coordinator in the Secretariat of the National Team to Accelerate Poverty Alleviation (TNP2K) at the Office of the Vice President of the Republic of Indonesia from 2010 to 2015, as well as a member of the National Economics Committee (KEN) from 2013 to 2014. On 31st October 2016, Suahasil Nazara was installed by the Minister of Finance as the Head of the Fiscal Policy Office of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Suahasil Nazara was officially appointed Deputy Minister of Finance on 25th October 2019 and subsequently sworn in as the Ex-Officio Commissioner from the Ministry of Finance before the Chief Justice of the Supreme Court on 13th January 2020 in accordance with Presidential Decree Number 142/P of 2019, dated 23rd December 2019.



Mirza Adityaswara

Komisioner *Ex-Officio* dari Bank Indonesia
(20 Agustus 2015 - 24 Juli 2019)
Ex-Officio Commissioner from Bank Indonesia
(20 August 2015 - 24 July 2019)

Mirza Adityaswara, lahir di Surabaya pada 1965. Mirza Adityaswara mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia serta gelar Master of Applied Finance dari Macquarie University, Sydney, Australia.

Mirza Adityaswara mengawali karir sebagai Dealer di Bank Sumitomo Niaga pada tahun 1989. Sejak 2002-2005, Mirza Adityaswara menjabat sebagai Director, Head of Securities Trading & Research, Bahana Sekuritas. Pada tahun 2005 - 2008. Mirza Adtyaswara dipercaya menjadi Director, Head of Equity Research & Bank Analysis di Credit Suisse Securities Indonesia. Selama 2008 - 2010, Mirza Adityaswara bertugas sebagai Managing Director, Head of Capital Market, Mandiri Sekuritas, sekaligus sebagai Kepala Ekonom Bank Mandiri Group.

Sebelum diangkat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Mirza Adityaswara menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan sejak April 2012 ditugaskan sebagai Kepala Eksekutif LPS sekaligus Dewan Komisioner. Selanjutnya, sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.113/P Tahun 2013 tanggal 30 September 2013, diambil sumpahnya sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tanggal 3 Oktober 2013 untuk periode 2013 - 2014. Jabatan tersebut diperpanjang berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 62/P Tahun 2014 untuk periode 2014 - 2019.

Mirza Adityaswara menjabat sebagai Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ex-Officio Bank Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2015 tanggal 23 Juli 2015. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017, Mirza Adityaswara kembali ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio Bank Indonesia.

Born in Surabaya in 1965, Mirza Adityaswara graduated with a Bachelor of Economics from the University of Indonesia and subsequently received a Master of Applied Finance from Macquarie University, Sydney, Australia.

Mirza Adityaswara began his career as a Dealer at Bank Sumitomo Niaga in 1989. From 2002-2005, he served as Director of Securities Trading and Research at Bahana Securities and then from 2005-2008 Mirza Adityaswara was entrusted as Director of Equity Research and Bank Analysis at Credit Suisse Securities Indonesia. In 2008, Mirza Adityaswara was appointed Managing Director of the Capital Market at Mandiri Securities, serving until 2010, and concurrently functioned as a Chief Economist at Bank Mandiri Group.

Prior to his appointment as Senior Deputy Governor of Bank Indonesia, Mirza Adityaswara served on the Board of Commissioners of the Deposit Insurance Corporation (LPS) and in April 2012 was installed as Chief Executive of the Deposit Insurance Corporation (LPS) and concurrently as a member of the Board of Commissioners. Pursuant to Presidential Decree Number 113/P of 2013, dated 30th September 2013, Mirza Adityaswara was sworn in as Senior Deputy Governor of Bank Indonesia on 3rd October 2013 for the period from 2013-2014. His tenure was subsequently extended for the following period from 2014-2019 in accordance with Presidential Decree Number 62/P of 2014.

Mirza Adityaswara was appointed Ex-Officio Member of the OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia though Presidential Decree Number 61/P of 2015, dated 23rd July 2015. His tenure was extended based on Presidential Decree Number 87/P of 2017.



Mardiasmo

Komisioner *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan
(11 Desember 2014 - 23 Desember 2019)
Ex-Officio Commissioner from the Ministry of Finance
(11 December 2014 - 23 December 2019)

Mardiasmo Lahir di Solo, Jawa Tengah, 10 Mei 1958. Mardiasmo mendapatkan gelar sarjana dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada 1981 dan gelar master pada University of Bridgeport, Connecticut, Amerika Serikat, pada 1989. Gelar Doktor diperoleh dari School of Public Policy, University of Birmingham Inggris pada 1999.

Born in Solo, Central Java, on 10th May 1958, Mardiasmo pursued a tertiary education in accounting at the Faculty of Economics and Business of Gadjah Mada University in 1981 before earning a master's degree from the University of Bridgeport, Connecticut, in 1989 and a PhD from the School of Public Policy, Birmingham University, UK, in 1999.

Perjalanan di bidang birokrasi dimulai ketika beliau diamanahi jabatan sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara pada 2004-2006. Selanjutnya, Mardiasmo menjabat sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pada 2006-2010, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP-RI) pada 2010-2014. Mardiasmo dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 27 Oktober 2014. Selain itu, Mardiasmo sempat ditunjuk sebagai Plt. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada 1 Desember 2014 - 6 Februari 2015.

Beginning his career as a bureaucrat when appointed to the Expert Staff on State Expenditure of the Ministry of Finance from 2004-2006, Mardiasmo was subsequently installed as the Director General of Fiscal Balance of the Ministry of Finance from 2006-2010 and Controller of the Finance and Development Supervisory Agency of the Republic of Indonesia from 2010-2014. After excelling as the Deputy Finance Minister, Mardiasmo served as the Director General of Taxes, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, from 1st December 2014 until 6th February2015.

Pada 27 Oktober 2014 Mardiasmo diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Kerja 2014 - 2019 dan pada 11 Desember 2014, Mardiasmo ditetapkan sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK Ex-Officio Kementerian Keuangan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 143/P Tahun 2014. Pada 20 Desember 2019 Mardiasmo dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai Ketua Komite Pengawas Perpajakan, Kementerian Keuangan RI periode 2019-2022.

On 27th October 2014, Mardiasmo was inaugurated as the Deputy Finance Minister for the Working Cabinet for the period from 2014 to 2019 and on 11th December 2014 was appointed as the Ex-Officio Commissioner from the Ministry of Finance pursuant to Presidential Decree Number 143/P of 2014. On 20th December 2019, Mardiasmo was installed by the Minister of Finance as the Chairman of the Tax Supervision Committee, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, for the period from 2019 to 2022.

Dengan fokus pada bidang ilmu Akuntansi, beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Nasional (DPN) Ikatan Akuntan Indonesia dari tahun 2010 hingga sekarang. Selain itu, Mardiasmo merupakan Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada dan dikenal tetap aktif menulis menulis beberapa buku, di antaranya Perpajakan (2006, Edisi Terbaru 2018), Seri Otonomi Daerah: Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (2003, Edisi Terbaru, 2018), Akuntansi Sektor Publik (2003, Edisi Terbaru, 2018), dan Akuntansi Keuangan Dasar (2000).

With a strong focus on accountancy, Mardiasmo has chaired the National Committee of the Indonesian Association of Accountants since 2010. In addition, Mardiasmo is a Professor at the Faculty of Economics and Business (FEB), Gadjah Mada University, where he has made a name for himself as a prolific author, including Taxation (2006, latest edition 2018), Regional Autonomy Series: Regional Autonomy and Financial Management (2003, latest edition 2018), Public Sector Accounting (2003, latest edition 2018) as well as Basic Financial Accounting (2000).

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page intentionally left blank

Deputi Komisioner

Deputy Commissioners



1

SUKARELA BATUNANGGAR
Deputi Komisioner OJK Institute dan Keuangan Digital
Deputy Commissioner of OJK Institute and Digital Financial

2

ANTO PRABOWO
Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Manajemen Strategis
Deputy Commissioner of Public Relations and Strategic Management

3

TEGUH SUPANGKAT
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan IV
Deputy Commissioner of Banking Supervision IV

4

DJUSTINI SEPTIANA
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I
Deputy Commissioner of Capital Market Supervision I

BAMBANG WIDJANARKO
Deputi Komisioner Penyidikan, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Deputy Commissioner of Investigation, Organization and Human Resources

10

SLAMET EDY PURNOMO
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III
Deputy Commissioner of Banking Supervision I

11



5

ANGGAR BUDHI NURAINI
Deputi Komisioner Pengawas IKNB I
Deputy Commissioner of Non-Banking Financial Industry Supervision I

6

FAKHRI HILMI
Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
Deputy Commissioner of Capital Market Supervision II

7

MOCH. IHSANUDDIN
Deputi Komisioner Pengawas IKNB II
Deputy Commissioner of Non-Banking Financial Industry Supervision II

8

HIDAYAT PRABOWO
Deputi Komisioner Audit Internal Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas
Deputy Commissioner of Internal Audit, Risk Management and Quality Control

9

SARJITO
Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen
Deputy Commissioner of Education and Consumer Protection

ETTY RETNO WULANDARI
Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan
Deputy Commissioner of Information Technology and Finance

12

IMANSYAH
Deputi Komisioner Internasional dan Riset
Deputy Commissioner of International and Research

13

Advisor Senior

Senior Advisor



DUMOLY F. PARDEDE
Advisor Senior Strategic Committee
Senior Advisor of Strategic Committee

AGUS EDY SIREGAR
Advisor Senior Strategic Committee
Senior Advisor of Strategic Committee

IRWAN LUBIS
Advisor Senior Strategic Committee
enior Advisor of Strategic Committee

HERNAWAN B. SASONGKO
Advisor Senior Strategic Committee
Senior Advisor of Strategic Committee

Kebijakan Strategis 2019

Strategic Policies In 2019

Jan/*Jan*

15

OJK Terapkan Perhitungan Risiko Pasar Basel III Terbaru

OJK Implemented the Latest Basel III Market Risk Requirements

OJK menghadiri pertemuan para Gubernur Bank Sentral dan Pimpinan Otoritas Pengawas Sektor Jasa Keuangan (*The Group of Governors and Heads of Supervision/GHOS*) dari 28 negara yang tergabung dalam "The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)". Dalam pertemuan tersebut disepakati dua hal yaitu penetapan revisi perhitungan permodalan minimum bank untuk risiko pasar (*minimum capital requirements for market risk*) dan program kerja serta prioritas strategis BCBS selama 2019.

OJK attended the Group of Governors and Heads of Supervision (GHOS) meeting of the 28 countries under the auspices of the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Two important matters were agreed at that meeting, namely a revision to the minimum capital requirements for market risk along with the work program, as well as the priority strategies for BCBS in 2019.

16

OJK Dorong Pengembangan Perusahaan Pembiayaan

OJK Advanced Finance Company Development

OJK mengeluarkan POJK Nomor.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. POJK tersebut diterbitkan sebagai penyempurnaan POJK sebelumnya khususnya dalam aspek pengaturan prudensial dan perlindungan konsumen serta secara umum meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan dalam perekonomian nasional.

OJK issued OJK Regulation (POJK) No. 35/POJK.05/2018 concerning Finance Companies as a refinement to the previous regulation, specifically in terms of prudential regulations and consumer protection, while simultaneously expanding the contribution of finance companies to the national economy.

30

OJK dan LPS Tingkatkan Kerja Sama dan Koordinasi

OJK and LPS Expanded Cooperation and Coordination

OJK dan LPS menandatangani perpanjangan nota kesepahaman yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja sama dan koordinasi dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas OJK dan LPS, serta penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan.

OJK and LPS signed an extension to the Memorandum of Understanding that aims to increase the effectiveness of cooperation and coordination in terms of implementing the tasks and functions of both institutions, and to hone Act No. 9 of 2016 concerning Financial System Crisis Prevention and Mitigation along with OJK and LPS regulations.

Feb/*Feb*

19

OJK Perkuat Kerja Sama Dengan Kemendagri dan PPATK

OJK Strengthened Cooperation with the Ministry of Home Affairs and Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC)

OJK melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Kemendagri dan PPATK. Kerja sama tersebut bertujuan untuk memajukan industri jasa keuangan melalui pemanfaatan potensi di daerah serta kolaborasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

OJK signed a Memorandum of Understanding with the Ministry of Home Affairs and Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC), which aims to advance the financial services industry through the utilisation of regional potential, while collaborating to prevent and eradicate money laundering.

Mar/*Mar*

6

OJK, BI, dan MA Terus Perkuat Koordinasi dan Kerjasama Peningkatan Wawasan Hakim

OJK, BI and Supreme Court Strengthened Coordination and Cooperation to Increase Insight into Central Banking and the Financial Services Sector amongst Judges

OJK dan BI berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan hakim di bidang kebanksentralan dan sektor jasa keuangan. Kerjasama ini juga akan dimanfaatkan sebagai media untuk bertukar pikiran dan memfasilitasi kesamaan pandang, serta memberikan masukan terkait aspek hukum yang bersinggungan dengan pelaksanaan tugas BI maupun OJK.

OJK and Bank Indonesia are firmly committed to strengthening coordination and cooperation with the Supreme Court of the Republic of Indonesia in order to increase the insight and knowledge of judges in terms of central banking and the financial services sector. Such cooperation will also serve as a media to exchange ideas and align viewpoints, while providing inputs concerning the legal aspects of task implementation at Bank Indonesia and OJK.

28

OJK Luncurkan Program Simplifikasi Pembukaan Rekening Efek Elektronik

OJK Launched a Simplification Program for Opening Securities Accounts Electronically

Program Simplifikasi Pembukaan Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah Secara Elektronik bertujuan untuk meningkatkan sisi permintaan di Pasar Modal. Kemudahan tersebut diharapkan menumbuhkan tingkat penggunaan ataupun inklusi di bidang pasar modal, namun tetap menjaga tingkat keamanan transaksi.

The simplification program aims to increase demand in the capital market. Greater convenience is expected to expand the user base and increase inclusion in the capital market, while maintaining transaction security.

Apr/*Apr*

2

Optimalisasi BMN: Kementerian Keuangan dan OJK Sepakati Pembangunan Gedung Indonesia Financial Center

BMN Optimisation: Ministry of Finance and OJK Agreed to Develop the Indonesia Financial Centre Building

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan OJK menyepakati penggunaan barang milik negara di lokasi Lot 1 kawasan Sudirman Central Business District (SCBD) Jakarta untuk pembangunan gedung Indonesia Financial Center melalui penandatanganan Nota Kesepahaman. Financial Center ini sebagian akan dimanfaatkan sebagai kantor pusat OJK.

Through a Memorandum of Understanding, the Ministry of Finance and OJK agreed to the utilisation of state property located at Lot 1 of the Sudirman Central Business District (SCBD) in Jakarta in order to develop the Indonesia Financial Centre building, part of which will be used as the OJK head office.

30

OJK Resmikan Bank Wakaf Mikro di Jayapura
OJK Established the Micro Waqf Bank in Jayapura

OJK meresmikan BWM Honai Sejahtera di Kampung Yoka, Jayapura, sebagai BWM pertama dan satu-satunya di Papua. Peluncuran BWM ini merupakan perwujudan komitmen OJK untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses keuangan kepada masyarakat kecil yang produktif di seluruh bagian Indonesia. BWM bertujuan meningkatkan permodalan usaha ultra mikro dengan skema sangat sederhana sehingga dapat diikuti oleh masyarakat kecil.

OJK inaugurated the Honai Sejahtera Micro Waqf Bank in Kampung Yoka as the first and only Micro Waqf Bank in Papua. This represents the manifestation of OJK commitment to increase financial inclusion through broader financial access for productive members of the community throughout Indonesia. Micro Waqf Banks aim to increase business capital for ultra-micro enterprises through simple schemes accessible to those towards the bottom of the pyramid.

Mei/*May*

15

OJK Perkuat Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi
OJK Strengthened Information Technology-based Supervision of Financial Services Sector

OJK meresmikan aplikasi OJK-Box atau OBOX sebagai upaya penguatan pengawasan sektor jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi, yang dimulai penerapannya di sektor perbankan. OBOX merupakan aplikasi yang memungkinkan Bank untuk meningkatkan alur informasi kepada OJK, terutama informasi yang bersifat transaksional. Informasi ini akan melengkapi laporan yang telah ada sehingga OJK dan Bank dapat meningkatkan perhatian terhadap potensi risiko yang timbul lebih dini.

OJK officially launched at the OJK-Box application, or OBOX, to strengthen IT-based supervision of the financial services sector, initially targeting the banking industry. OBOX is an application that allows banks to increase the flow of information to OJK, transactional information in particular. Such information will be used to complement existing reports, thus providing greater attention to the early identification of potential risks by OJK and the banking industry.

21

OJK Resmikan "*Market Standard*" Transaksi Repo Atas Efek Bersifat Ekuitas
OJK Officially Launched Market Standards for Repo Transactions of Equity Securities

OJK meresmikan "*Market Standard*" untuk memperjelas pemahaman mengenai prinsip perpindahan kepemilikan Efek atau "transfer of title" sebagai suatu standarisasi Repo yang diterapkan secara global dan memitigasi risiko rekarakterisasi. Selain itu, "*Market Standard*" ini akan dapat memberikan pemahaman yang sama antar pelaku pasar atas transaksi Repo sehingga dapat meningkatkan profesionalisme, integritas dan kepercayaan antar pelaku pasar.

OJK launched Market Standards to clarify the Transfer of Title principles as global repurchase agreement standards and to mitigate recharacterisation risk. Furthermore, market standards serve to provide universal understanding amongst market players concerning repo transactions, thus increasing professionalism, integrity and trust amongst market players.

Agu/*Aug*

1

OJK dan Kementerian Kelautan Luncurkan Asuransi Perikanan Lele dan Budidaya Udang
OJK and the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) Launched the Catfish and Shrimp Aquaculture Insurance Programs

OJK meluncurkan Asuransi Usaha Budidaya Udang Komersial dan Asuransi Perikanan Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (APPIK) komoditas ikan lele sebagai upaya OJK dan Kementerian Kelautan untuk mendukung sektor prioritas pemerintah serta mendorong kemajuan sektor kelautan dan perikanan. Selain itu, program ini diharapkan dapat mendorong tingkat inklusi keuangan di masyarakat khususnya komunitas nelayan dan pembudidaya ikan.

OJK launched the Commercial Catfish and Shrimp Aquaculture Insurance Programs (APPIK) in conjunction with the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) to support the government's priority sectors and advance the maritime and fishing sectors. In addition, the program intends to increase financial inclusion, particularly amongst fishing communities.

9

Strategi OJK dalam Pengawasan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital
OJK Supervision Strategy for Digital Financial Innovators

OJK menunjuk Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) sesuai amanat POJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Penunjukan tersebut bertujuan untuk simplifikasi mekanisme koordinasi dan pengawasan IKD. Dengan penunjukkan asosiasi tersebut diharapkan dapat menjembatani sinergi antar penyelenggara IKD dan tingkat kepatuhan IKD terhadap peraturan perundang-undangan meningkat.

OJK appointed the Indonesia FinTech Association (Aftech) as the Association of Digital Financial Innovators in accordance with OJK Regulation (POJK) No. 13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector. This aims to simplify the coordination and supervision mechanism for digital financial innovation and is expected to create synergy amongst digital financial innovators and increase compliance to prevailing regulations.

Sep/*Sep*

3

OJK Terapkan *Supervisory Technology* Awasi *Fintech*
OJK Implemented FinTech Supervisory Technology

Penerapan *SupTech* di IKD ditandai dengan peresmian laman mini di portal OJK yang diberi nama Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital (GESIT) sebagai media interaksi antara OJK, penyelenggara IKD dan masyarakat. *SupTech* ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemantauan terhadap penyelenggara terkait aspek kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

SupTech implementation for Digital Financial Innovation (IKD) was marked by the official launch of the mini site on the OJK portal, known as GESIT (Digital Financial Information System Electronic Gateway) as an interactive media between OJK and digital financial innovators. SupTech aims to increase monitoring effectiveness and efficiency in terms of compliance to prevailing regulations.

24

OJK Keluarkan Izin Penyelenggara Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowd Funding*)
OJK Licensed Equity Crowdfunding Provider

OJK mengeluarkan izin pertama perusahaan penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) untuk PT Santara Daya Inspiratama. Kegiatan usaha Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi ini, diatur dan diawasi OJK dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam kegiatan Layanan Urun Dana melalui penawaran saham berbasis Teknologi Informasi. Dengan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak tersebut, diharapkan dapat memberikan ruang bertumbuh bagi perusahaan perintis (*start up*) untuk memperoleh akses pendanaan di Pasar Modal serta meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia khususnya di Pasar Modal.

OJK licensed the first equity crowdfunding provider, namely PT Santara Daya Inspiratama. The operating activities associated with equity crowdfunding are regulated and supervised by OJK in order to provide legal assurance and protection for the parties involved. Legal assurance and protection are expected to provide space for start-ups to grow through access to funding in the capital market, while increasing financial inclusion in Indonesia, particularly in the capital market.

Okt/*Oct*

15

OJK Gelar Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2019
OJK Held the Islamic Economy and Finance Research Forum (FREKS) 2019

Forum Riset Ekonomi dan Keuangan Syariah (FREKS) 2019 merupakan forum untuk memfasilitasi akademisi ataupun masyarakat pelaku industri untuk menampilkan berbagai riset dan ide kreatif untuk pengembangan keuangan Syariah. FREKS 2019 mengusung tema "Peningkatan Daya Saing Keuangan Syariah Melalui Inovasi dan Sinergi Menuju *Responsible Finance and Investment* (RFI) dalam rangka Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional". Tema tersebut mengandung makna dan harapan agar Industri Keuangan Syariah dapat mengimplementasikan RFI sehingga mampu berdaya saing dan bersinergi dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

The Islamic Economy and Finance Research Forum (FREKS) 2019 aims to facilitate academics and industry players display their various research and creative ideas for the development of Islamic finance. FREKS 2019 raised the theme "Increasing the Competitiveness of Islamic Finance through Innovation and Synergy towards Responsible Finance and Investment to Accelerate National Economic Growth." The message behind the theme was one of hope that the Islamic financial industry could implement Responsible Finance and Investment (RFI) to achieve competitiveness and synergy in terms of stimulating national economic growth.

18

OJK dan IFC Sepakat Lanjutkan Pengembangan Program Keuangan Berkelanjutan
OJK and IFC Agreed to Continue the Sustainable Finance Development Program

OJK dan International Finance Corporation (IFC) berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama pengembangan program Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) yang sudah terjalin sejak 2018 sehingga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

OJK and the International Finance Corporation (IFC) committed to maintain cooperation for the Sustainable Finance development program that began in 2018, which is expected to accelerate sustainable economic growth by aligning economic, social and environmental interests.

19

Sinergi Aksi Indonesia Menabung
Synergic Indonesia Saving Action

OJK meluncurkan program Sinergi Aksi Indonesia Menabung sebagai puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2019. Sinergi Aksi Menabung merupakan salah satu implementasi dari diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) No 26 Tahun 2019 tentang Hari Indonesia Menabung. Sinergi aksi ini melibatkan OJK, BI, LPS dan Lembaga Jasa Keuangan dalam meningkatkan kepedulian masyarakat tentang pentingnya menabung untuk investasi, perlindungan dan masa depan.

OJK launched the synergic Indonesia Saving Action program at the culmination of Financial Inclusion Month 2019. The program is the manifestation of Presidential Decree (Keppres) No. 26 of 2019 concerning Indonesia Saving Day. The synergic action involved OJK, Bank Indonesia, the Deposit Insurance Corporation (LPS) and financial services institutions to increase public concern regarding the importance of saving for investment, protection and the future.

31

Satuan Tugas (Satgas) Buka "Warung Waspada Investasi"
Watchdog Opened the "Investment Alert Warong"

Satgas Waspada Investasi bersama 13 kementerian/lembaga anggotanya berinisiatif membuka layanan pengaduan, konsultasi dan sosialisasi langsung mengenai berbagai persoalan terkait investasi, *fintech lending* dan gadai swasta ilegal kepada masyarakat dengan membuka "Warung Waspada Investasi". Keberadaan "Warung Waspada Investasi" ini juga diharapkan semakin mempermudah akses masyarakat dalam meningkatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko layanan sektor jasa keuangan sehingga semakin mewaspadai maraknya tawaran investasi dan *fintech lending* ilegal.

In conjunction with 13 government ministries/agencies as members, the Investment Alert Task Force opened complaint and consultation services along with direct socialisation activities for members of the public concerning various issues relating to investment, FinTech lending and illegal private pawnbrokers through the "Investment Alert Warong". "The Warong" is also expected to facilitate public access to better understand the benefits and risks of financial services, thus raising awareness about the proliferation of illegal investment and FinTech lending activities.

Nov/*Nov*

1

OJK Terapkan Sistem *e-Registration* Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD")
OJK Implemented e-Registration System to Increase Capital through Limited Public Offerings with Pre-emptive Rights (HMETD)

Penerapan sistem pendaftaran elektronik ini merupakan kelanjutan dari penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 58/POJK.04/2017 tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran dan Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik, yang dilaksanakan sebagai bagian program pendalaman pasar di sektor Pasar Modal dan untuk memberikan kemudahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan OJK. Melalui pendaftaran elektronik ini, dokumen Pernyataan Pendaftaran dapat disampaikan kepada OJK secara elektronik, dimana saja dan kapan saja tanpa harus menyampaikan dokumen dalam bentuk cetak (*hard copy*). Penyampaian tersebut dilakukan dengan menggunakan website OJK melalui sistem pendaftaran dan registrasi terintegrasi (SPRINT OJK).

The e-registration system represents a continuation of OJK Regulation (POJK) No. 58/POJK.04/2017 implementation concerning e-Registration and e-Submission of Corporate Actions as part of the capital market deepening program to facilitate and improve the quality of OJK services. Through e-Registration, registration statements can be submitted to OJK electronically without the need to submit hard copies. The registration process is available on the OJK website through the SPRINT system.

7

OJK Pertegas Kebijakan Konsolidasi Perbankan
OJK Strengthened Bank Consolidation Policy

OJK mempertegas kebijakan konsolidasi perbankan untuk mendorong industri perbankan menjadi lebih efisien, berdaya saing dan kontributif bagi perekonomian nasional dalam waktu yang cepat. Kebijakan konsolidasi perbankan diperluas melalui pengambilalihan yang diikuti dengan pembentukan kelompok usaha bank tanpa adanya kewajiban penggabungan.

OJK strengthened bank consolidation policy in order to create a more efficient, competitive and contributive banking industry. Bank consolidation policy was expanded through mergers accompanied by the formation of voluntary bank business groups.

Des/*Dec*

9

OJK Terbitkan Peraturan Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah
OJK Issued Regulation on Bank Synergy under Sole Ownership towards Islamic Banking Development

OJK menerbitkan POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan syariah melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum oleh Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki hubungan kepemilikan.

OJK issued OJK Regulation (POJK) No. 28/POJK.03/2019 concerning Bank Synergy under Sole Ownership towards Islamic Banking Development in order to increase Islamic banking industry efficiency by optimising the resources of affiliated commercial banks.

20

OJK, BI, dan LPS Implementasikan Integrasi Pelaporan Perbankan
OJK, BI and LPS Implemented Integrated Bank Reporting

OJK, BI, dan LPS mengintegrasikan pelaporan dari sektor perbankan melalui mekanisme satu portal yang disebut Pelaporan.id. Integrasi dibangun untuk meminimalisir informasi yang redundan dan inkonsisten serta meningkatkan efisiensi dalam operasional bank. Selain itu, integrasi pelaporan ini juga bertujuan untuk menciptakan Satu Data Perbankan dalam mewujudkan sarana pertukaran dan akses data perbankan yang dibutuhkan setiap saat oleh masing-masing otoritas, serta meningkatkan kualitas data pelaporan.

OJK, Bank Indonesia and the Deposit Insurance Corporation (LPS) have integrated reporting in the banking sector through a single portal known as Pelaporan.id. Integrated reporting was developed to minimise redundant and inconsistent information, while increasing the operational efficiency of the banking industry. In addition, integrated reporting also aims to create One Banking Data as a means to exchange and access the banking data required by each respective authority and to simultaneously enhance the quality of the reported data.

Peristiwa Penting
Key Events

2 Jan/*Jan*

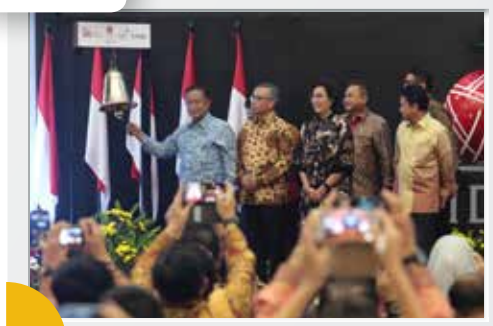

Pembukaan Bursa 2019
Opening Trading on Indonesia Stock Exchange

Menteri Koordinator Perekonomian membuka Perdagangan Perdana Bursa 2019 bersama Ketua Dewan Komisioner OJK, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Menteri Keuangan, Direktur Utama BEI, dan Deputi Gubernur Senior BI di Gedung BEI, Jakarta.

Flanked by the Chairman of the OJK Board of Commissioners, OJK Executive Head of Capital Market Supervision, Minister of Finance, President Director of the Indonesia Stock Exchange and Senior Deputy Governor of Bank Indonesia, the Coordinating Minister for Economic Affairs opened the first day of trading in 2019 of the Indonesia Stock Exchange.

11 Agu/*Aug*



Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2019
Financial Services Industry Annual Gathering 2019

Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner OJK bersama para peraih Penghargaan Tokoh Inspirator Inklusi Keuangan OJK 2019 pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2019 di Jakarta.

The Vice President of the Republic of Indonesia and Chairman of the OJK Board of Commissioners are photographed together at the OJK Financial Inclusion Inspirator Awards 2019 in Jakarta.

28 Jan/*Jan*



Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerja Sama antara OJK dan LPS
Signing of Memorandum of Understanding between OJK and LPS

OJK dan LPS menandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan fungsi dan tugas OJK dan LPS. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua OJK dan Ketua LPS di Jakarta.

OJK and LPS signed a Memorandum of Understanding (MoU) concerning task implementation at each respective organisation. The ceremony was attended by the Chairman of OJK and Chairman of LPS in Jakarta.

29 Jan/*Jan*



Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan 2019

Financial System Stability Committee Press Conference

Ketua Dewan Komisioner OJK bersama Menteri Keuangan selaku Ketua KSSK, Gubernur BI, dan Ketua Dewan Komisioner LPS menyampaikan keterangan pers terkait Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta.

The Chairman of the OJK Board of Commissioners, photographed together with the Minister of Finance as Chairman of the Financial System Stability Committee, Bank Indonesia Governor and Chairman of the LPS Board of Commissioners during a press conference in Jakarta.

31 Jan/*Jan*



Peresmian Kantor OJK Samarinda

Opening Ceremony for OJK Samarinda Office

Ketua Dewan Komisioner OJK dan Gubernur Kalimantan Timur meresmikan kantor baru OJK di Samarinda.

Chairman of OJK Board of Commissioners and the Governor of East Kalimantan photographed at the opening ceremony for the OJK Samarinda office.

18 Feb/*Feb*



Jumpa Pers Tentang Kebijakan Strategi Bidang Pengawasan Pasar Modal 2019

Press Conference on Capital Market Supervision Policy Strategy

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar menginformasikan terkait kebijakan strategis OJK khususnya di bidang Pasar Modal saat jumpa pers.

OJK Executive Head of Capital Market Supervision photographed informing the press about OJK's policy strategy for the capital market at a press conference.

19 Feb/*Feb*



Penandatangan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama OJK-MK-Kemendagri-KLHK-PPATK 2

Signing of Memorandum of Understanding and Cooperation Agreement between OJK-MK-Kemendagri-KLHK-PPATK 2

Ketua Dewan Komisioner OJK, Ketua MK, Menteri LHK, Mendagri, Kepala PPATK dalam Penandatangan MOU OJK-MK-Kemendagri-KLHK-PPATK terkait "Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Lingkup Tugas OJK" dan "Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Serta Perlindungan Konsumen Melalui Optimalisasi Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)".

Chairman of OJK Board of Commissioners photographed with Minister of Finance, Minister for the Environment and Forestry, Minister for Home Affairs and Head of Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) at the official signing of the Memorandum of Understanding (MoU).

21 Feb/*Feb*



OJK dan UGM Bahas Rencana Kerja Sama Program *Talent Scouting*

OJK and UGM discussion on Joint Talent Scouting Program

Ketua Dewan Komisioner OJK bersama Rektor Universitas Gajah Mada melakukan penandatangan MoU terkait program Talent Scouting, di Yogyakarta.

Chairman of OJK Board of Commissioners and Rector of Gajah Mada University signing a Memorandum of Understanding (MoU) in Yogyakarta concerning the Talent Scouting program.

25 Feb/*Feb*



OJK *Goes To* Campus dan Edu Expo di Politeknik Negeri Ambon

OJK Goes to Campus and Edu Expo at Ambon State Polytechnic

Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Direktur Politeknik Negeri Ambon, Wakil Walikota Ambon, dalam acara OJK Goes To Campus Dan Edu Expo di Politeknik Negeri Ambon.

OJK Commissioner in Charge of Consumer Protection and Education photographed together with the Director of Ambon State Polytechnic and Vice Mayor of Ambon during the OJK Goes to Campus and Edu Expo event held at the Ambon State Polytechnic.

6 Mar/*Mar*



OJK, BI, dan Mahkamah Agung Perkuat Koordinasi dan Kerjasama Peningkatan Wawasan Hakim

OJK, BI and Supreme Court Strengthen Coordination and Cooperation to increase Insight into Central Banking and the Financial Services Sector amongst Judges

Ketua Dewan Komisioner OJK bersama Gubernur BI, dan Ketua Mahkamah Agung dalam Penandatangan Nota Kesepahaman dan Temu Wicara OJK,BI dan MA.

The Chairman of OJK Board of Commissioners is photographed with the Governor of Bank Indonesia and Chief Justice of the Supreme Court at the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between OJK, BI and the Supreme Court.

8 Mar/*Mar*



OJK Resmikan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

Inauguration Ceremony for the FinTech Lenders Association (AFPI)

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank meresmikan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) di Bursa Efek Indonesia.

OJK Executive Head of Nonbank Financial Industry Supervision at the inauguration ceremony for the FinTech Lenders Association (AFPI) at the Indonesia Stock Exchange.

9 Mar/*Mar*



OJK dan UNS Kerjasama Dirikan Prodi Fintech dan Fintech *Center*

OJK and UNS Cooperation to Establish FinTech Study Program and FinTech Centre

Ketua Dewan Komisioner OJK dan Rektor UNS saat melakukan Kerjasama Dirikan Prodi Fintech dan Fintech Center di UNS.

Chairman of OJK Board of Commissioners is photographed together with the Rector of Sebelas Maret University at the signing ceremony for cooperation to establish a FinTech Study Program and FinTech Centre.

21 Mar/*Mar*



Seminar Pembiayaan Sektor Riil dan Infrastruktur Melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Investasi Infrastruktur dan Obligasi Daerah di Padang

Seminar on Real Sector and Infrastructure Financing through Private Equity Funds (RDPT), Infrastructure Investment Funds and Municipal Bonds in Padang

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal dalam Seminar Pembiayaan Sektor Riil dan Infrastruktur Melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Investasi Infrastruktur dan Obligasi Daerah di Padang.

OJK Executive Head of Capital Market Supervision is photographed addressing the seminar on Real Sector and Infrastructure Financing through Private Equity Funds (RDPT), Infrastructure Investment Funds and Municipal Bonds in Padang.

31 Mar/*Mar*



OJK *Goes to* Campus di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar

OJK Goes to Campus at Muhammadiyah University in Makassar

Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen saat menjadi pembicara OJK Gelar OJK Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar.

OJK Commissioner in Charge of Consumer Protection and Education photographed giving a speech during the OJK Goes to Campus event held at Muhammadiyah University in Makassar.

31 Mar/*Mar*



Peluncuran Program Simplifikasi Pembukaan Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah (RDN) Secara Elektronik

The Launch of Simplification Program for Opening Securities Accounts and Customer Fund Accounts Electronically

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal bersama Pemangku Kepentingan Lainnya meluncurkan Program Simplifikasi Pembukaan Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah (RDN) Secara Elektronik.

OJK Executive Head of Capital Market Supervision photographed with other stakeholders during the launching ceremony for the Simplification Program for Opening Securities Accounts and Customer Fund Accounts Electronically.

30 Apr/*Apr*



Groundbreaking Proyek Pembangunan Gedung Kantor OJK Solo

Groundbreaking Ceremony for OJK Office in Solo

Ketua Dewan Komisioner OJK bersama Wali Kota Solo, dan Rektor UNS melakukan pencanangan batu pertama Kantor OJK Solo.

Chairman of OJK Board of Commissioners photographed with the Mayor of Solo and Rector of Sebelas Maret University at the groundbreaking ceremony for the new OJK Office in Solo.

21 Mei/*May*



Fintech Days 2019 di Palembang

FinTech Day 2019 in Palembang

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank sebagai pembicara dalam acara Fintech Days 2019 di Palembang.

OJK Executive Head of Nonbank Financial Institution Supervision addressing the FinTech Day 2019 event in Palembang.

2 Mei/*May*



Seminar *Digital Disruption "Banking for The Future"*

Digital Disruption: Banking for the Future' Seminar

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK memberikan sambutan pada seminar Digital Disruption "Banking for The Future" di Jakarta.

Vice Chairman of OJK Board of Commissioners photographed giving a speech at the Digital Disruption: Banking for the Future seminar in Jakarta.

19 Jul/*Jul*



Bilateral *Meeting* OJK dan Bank of Thailand

Bilateral Meeting between OJK and Bank of Thailand

Ketua Dewan Komisioner OJK didampingi oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan dan Kepala Eksekutif Pengawas IKNB, beserta jajaran dalam pertemuan bilateral dengan Bank of Thailand (BoT).

The Chairman of the OJK Board of Commissioners is accompanied by the Executive Head of Banking Supervisor and Executive Head of NBFI Supervisor, along with the ranks in the meeting bilateral with the Bank of Thailand (BoT).

30 Jul/*Jul*



AKSiMUDA Menabung untuk Semua 2019

AKSiMUDA Saving for All 2019

OJK Gelar AKSiMUDA Menabung untuk Semua 2019 di Jakarta. Acara ini dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK, Anggota Dewan Komisioner OJK, Menko Perekonomian, Menristekdikti, Menpora, dan Country Director ADB.

OJK hosted AKSiMUDA Saving for All 2019 in the auditorium of the Agency for Technology Assessment and Application (BPPT). The event was attended by the Chairman of OJK Board of Commissioners, members of the OJK Board of Commissioners, Coordinating Minister for Economic Affairs, Minister of Research, Technology and Higher Education, Minister of Youth and Sport Affairs as well as ADB Country Director.

23 Agu/*Aug*



Pameran *Capital Market Summit* & Expo 2019

Capital Market Summit & Expo 2019

Ketua Dewan Komisioner OJK bersama Menko Perekonomian, Direktur Utama BEI seta anggota dewan komisioner membuka acara Pameran *Capital Market Summit* & Expo 2019 (CMSE 2019).

Chairman of OJK Board of Commissioners photographed with the Minister for Economic Affairs, President Director of Indonesia Stock Exchange and members of the OJK Board of Commissioners entertaining attendees during the opening ceremony for the CMSE 2019 Expo.

23 Sep/*Sep*



Indonesia *Fintech Summit* & Expo 2019

Indonesia FinTech Summit and Expo 2019

Ketua Dewan Komisioner OJK, Menteri Keuangan, Gubernur BI dan Ketua Aftech Indonesia Mengisi Visionary Talk dalam Opening Ceremony Fintech Summit & Expo 2019 di Jakarta.

Chairman of OJK Board of Commissioners, Minister of Finance, Bank Indonesia Governor and Chairman of Indonesia FinTech Association (Aftech) giving visionary talks during the opening ceremony of the Indonesia FinTech Summit and Expo 2019 in Jakarta.

2 Okt/*Oct*



Pengembangan Nasabah Klaster Batik Bank Wakaf Mikro

Batik Cluster Development through Micro Waqf Banks

Presiden RI dan Ketua Dewan Komisioner OJK menyaksikan Penandatangan Nota Kesepahaman antara Yayasan Batik Indonesia dengan dua Bank Wakaf Mikro di Solo.

The President of the Republic of Indonesia and the Chairman of OJK Board of Commissioners photographed witnessing the signing of a Memorandum of Understanding (MoU) between the Indonesia Batik Foundation and two Micro Waqf Banks in Solo.

15 Okt/*Oct*



Dongkrak Inklusi Keuangan melalui FinExpo 2019

OJK, BI, Government Ministries and Business Players increase Financial Inclusion through FinExpo 2019

Anggota Dewan Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen mengharapkan akselerasi penambahan rekening maupun penggunaan produk dan layanan jasa keuangan melalui FinExpo 2019 di Jakarta.

OJK Commissioner in Charge of Consumer Protection and Education as speaker at a press conference concerning FinExpo 2019 in Jakarta.

19 Okt/*Oct*



Sinergi Aksi Indonesia Menabung

Synergy for the Indonesia Saving Action

OJK meluncurkan program Sinergi Aksi Indonesia Menabung sebagai puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2019 yang pelaksanaannya digelar di Jakarta.

OJK launched the Indonesia Saving Action at the culmination of Financial Inclusion Month 2019 in Jakarta.

19 Okt/*Oct*



OJK dan IFC Sepakat Lanjutkan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan

OJK and IFC agree to continue the Sustainable Finance Development Program

Ketua Dewan Komisioner OJK dalam pertemuan IFC yang digelar di sela-sela IMF World Bank Annual Meetings 2019 di Washington D.C.

Chairman of OJK Board of Commissioners photographed during the IFC meeting as part of the IMF-World Bank Annual Meetings 2019 in Washington DC.

1 Nov/*Nov*



Sosialisasi SPRINT *e-Registration* HMETD

Socialisation Activities for HMETD e-Registration through SPRINT

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memberikan sambutan Sosialisasi SPRINT *e-Registration* HMETD di Jakarta.

OJK Executive Head of Capital Market Supervision addressing the audience at the socialisation activities for HMETD e-Registration through SPRINT in Jakarta.

8 Nov/*Nov*



"OJK Mengajar" Universitas Ngurah Rai, Denpasar Bali

OJK Mengajar (Teaching) at Ngurah Rai University, Denpasar, Bali

Ketua Dewan Audit OJK memberikan paparan materi tentang "Alternatif Pendanaan Guna Mendukung Inklusi Keuangan" dalam "OJK Mengajar" di Universitas Ngurah Rai, Denpasar Bali.

Chairman of the OJK Audit Board photographed giving a presentation on "Alternative Funding to Support Financial Inclusion" during the OJK Teaching event at Ngurah Rai University in Denpasar, Bali.

30 Des/*Dec*



Rapat Koordinasi Nasional TPKAD dan Silaturahmi Nasional BWM

National Coordination Meeting for Regional Financial Access Acceleration Teams and National Gathering of Micro Waqf Banks

Presiden RI didampingi Ketua Dewan Komisioner OJK, Menko Perekonomian, Menkeu, Mensesneg, dan Gubernur BI meninjau stan Bank Wakaf Mikro, Jakarta pada acara Rapat Koordinasi Nasional TPKAD dan Silaturahmi Nasional BWM

The President of the Republic of Indonesia, accompanied by the Chairman of OJK Board of Commissioners, Coordinating Minister for Economic Affairs, Minister of Finance, Minister of State Secretariat and Bank Indonesia Governor, photographed reviewing the Micro Waqf Bank stand during the National Coordination Meeting for Regional Financial Access Acceleration Teams and National Gathering of Micro Waqf Banks in Jakarta.

30 Des/*Dec*



Penutupan Bursa 2019

Close of Stock Exchange Trading 2019

Penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia 2019 di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI).

Close of trading in the main hall of the Indonesia Stock Exchange.

02

Fokus 2019

Focus in 2019

Dalam merumuskan bauran kebijakan dan program strategis, OJK mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Implementasi kebijakan dan program selama 2019 sejalan dengan ketiga pilar *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) yaitu stabil, kontributif dan inklusif. Kebijakan dan program strategis diutamakan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan berkelanjutan yang akan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat sehingga pemerataan dalam pembangunan dapat tercapai. Pelaksanaan dan pencapaian kebijakan dan program tersebut tentunya merupakan hasil sinergi bersama dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam akselerasi pertumbuhan dan kesejahteraan yang berkeadilan.

When formulating its policy mix and strategic programs, OJK refers to the Medium-Term National Development Plan (RPJMN) for 2015-2019. Policy and program implementation in 2019 were aligned with the third pillar of the Indonesia Financial Services Sector Masterplan (MPSJKI), namely stability, contributive and inclusive. The priority of OJK policies and strategic programs is to maintain financial system stability as a foundation of sustainable development to create financial independence as well as achieve equitable development. This demands synergy amongst all stakeholders in order to optimise the financial services sector's contribution to accelerate growth and ameliorate prosperity.





Tari Piring - Sumatra Barat
Piring Dance - West Sumatera

II.1 *MASTER PLAN* SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA

II.1.1 Latar Belakang

OJK sebagai regulator Sektor Jasa Keuangan (SJK) berkepentingan dalam perkembangan SJK nasional agar berjalan dengan baik, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menopang kegiatan pembangunan. Proses tersebut harus berjalan dengan efektif dan efisien tanpa menimbulkan gejolak yang berlebihan sehingga perlu dibuat rancang bangun arah pengembangan SJK nasional. Rancang bangun harus mengedepankan asas sinergisme antar sektor keuangan melalui pendekatan terintegrasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas SJK serta mengantisipasi berbagai perkembangan yang berpotensi mengubah bentuk, cara bertransaksi, dan pola operasional SJK di masa depan termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi di era digitalisasi.

II.1.2 Tujuan Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia

Penyusunan rancang bangun diharapkan dapat menjadi acuan penyediaan pendanaan bagi pembangunan dan menjadikan Indonesia sebagai sebagai salah satu tujuan utama investasi dengan tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan. Rancang bangun akan menjadi *guidelines* pengembangan SJK nasional sehingga diharapkan dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi pembangunan ekonomi nasional dan memberikan *platform* yang lebih holistik bagi penguatan perlindungan konsumen serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Beberapa poin penting dalam rangka pengembangan SJK sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu (1) SJK dapat menjadi salah satu penyedia pembiayaan pembangunan yang signifikan; (2) SJK dapat beradaptasi terhadap perubahan melalui penyediaan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat kelas menengah; (3) Perluasan produk dan layanan SJK dapat menjangkau berbagai kalangan masyarakat melalui perluasan akses pembiayaan usaha bagi usaha mikro dan kecil serta *start-up business*; dan (4) Pengembangan SJK nasional dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan melalui penyesuaian regulasi terkait SJK dan peningkatan sinergi kebijakan antar otoritas terkait.

II.1 INDONESIA FINANCIAL SERVICES SECTOR MASTER PLAN

II.1.1 Background

As regulator of the financial services sector, OJK is concerned with sound national financial services sector development, meeting the needs of the public and supporting development activity. That process must remain effective and efficient without creating excessive shocks, thus necessitating a master plan for national financial services sector development. The design of the master plan must prioritise synergy amongst financial sectors through an integrated approach that aims to boost financial services sector capacity and anticipate various developments that could potentially change the form, method of transacting and operating activities of the financial services sector moving forward, including the utilisation of information technology in the digitalisation era.

II.1.2 Goal of Financial Sector Development in Indonesia

The master plan is expected to be used as a reference for providing funding development and positioning Indonesia as a major investment destination by maintaining financial system stability. The master plan, as guidelines for national financial services sector development, is expected to introduce a multiplier effect for national economic development, while providing a holistic platform to strengthen consumer protection and contribute significantly towards sustainable economic growth for the prosperity of the Indonesian people.

In accordance with the Medium-Term National Development Plan (RPJMN) 2015-2019, the salient points of financial services sector development are recapitulated as follows: (i) the financial services sector is a significant contributor to development financing; (ii) the financial services sector is responsive and can adapt to change by providing financial products and services tailored to the middle class; (iii) the financial services sector can expand products and services to reach all social strata through broader access to business financing for micro and small enterprises as well as start-ups; and (iv) national financial services sector development can achieve development targets by refining financial services sector regulations, while increasing policy synergy amongst the relevant authorities.

Rincian Pemenuhan Pendanaan Pembangunan 2015-2019

Composition of Development Funding 2015-2019

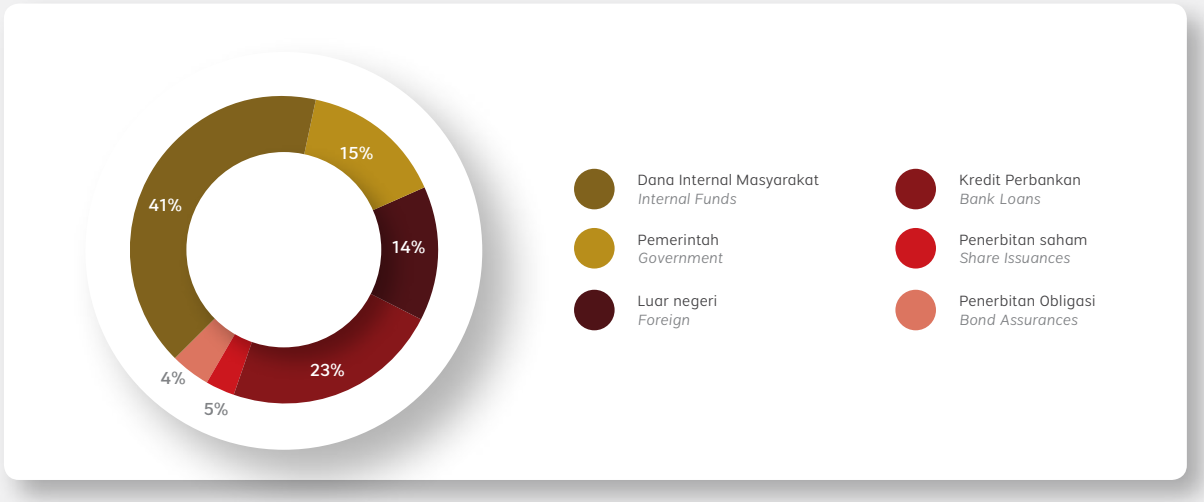

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019, Bappenas

Source: technocratic draft of the Medium-Term National Development Plan (RPJMN) 2015-2019, National Development Planning Agency

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, OJK menyusun rancang bangun yang komprehensif bagi pengembangan SJK nasional agar mampu mendukung upaya memacu pertumbuhan ekonomi dan menjawab tantangannya. Rancang bangun ini dinamakan "***Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019**". Keberadaan rancang bangun SJK domestik tersebut diarahkan untuk dapat menjadi payung bagi sejumlah *roadmap* yang dikembangkan masing-masing sektor di industri jasa keuangan seperti:

- *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan di Indonesia 2015-2019;
- *Roadmap* Pasar Modal Syariah 2015-2019;
- *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019;
- *Roadmap* Pengembangan Perbankan Indonesia 2015-2019;
- *Roadmap* Tata Kelola Perusahaan Indonesia;
- Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia; dan *roadmap* lainnya

*Based on those considerations, OJK formulated a comprehensive master plan for national financial services sector development to support efforts to spur economic growth and respond to the challenges, known as the **Indonesia Financial Services Sector Master Plan 2015-2019**. The master plan is oriented towards providing an umbrella for the various roadmaps developed for each financial services industry as follows:*

- *Roadmap to Sustainable Finance in Indonesia 2015-2019;*
- *Roadmap to the Islamic Capital Market 2015-2019;*
- *Roadmap to Islamic Banking in Indonesia 2015-2019*
- *Roadmap to Banking Development in Indonesia 2015-2019*
- *Roadmap to Corporate Governance in Indonesia;*
- *Roadmap to National Financial Literacy in Indonesia; and Other roadmaps.*

Peran SJK dalam Transformasi Ekonomi Nasional

Role of Financial Services Sector in National Economic Transformation

- **Terbentuknya Fundamental yang kuat untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.**
- **Terpenuhinya Infrastruktur Utama**
- **Terpenuhinya Kebutuhan Pembiayaan pembangunan**
- **Meningkatkan induksi keuangan**
- *Creation of strong fundamentals towards solid and sustainable economic growth*
- *Fulfilment of main infrastructure*
- *Fulfilment of development financing requirements*
- *Improvement in financial inclusion*

- **Ekonomi nasional denhan produktivitas dan nilai tambah tinggi.**
- **Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan**
- **Era digitalasi sektor jasa keuangan**
- *National economy with high productivity and value added*
- *Solid and sustainable economic growth -> sustainable/green financing*
- *Era of financial services sector digitalisation*

Bagaimana sektor jasa keuangan berperan untuk memacu pertumbuhan dan menjawab tantangan kini dan nanti
How the financial services sector contribute to growth and respond to the challenges now and moving forward

?

Masterplan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2015-2019
Indonesia Financial Services Sector Master Plan 2015-2019

II.1.3 Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia

1. **Menjaga stabillitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan**
   Dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, fokus utama upaya pengembangan adalah untuk memitigasi gangguan pada stabilitas sistem keuangan. Untuk itu, SJK harus memiliki daya tahan yang memadai dalam mengantisipasi goncangan yang dapat muncul. Stabilitas sistem keuangan merupakan landasan wajib bagi proses pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan.

2. **Mengoptimalkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi nasional**
   SJK nasional diupayakan untuk meningkatkan kontribusinya dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui optimalisasi peran dalam pembangunan ekonomi serta peningkatan kapasitas sehingga mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkualitas.

3. **Mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan**
   SJK diarahkan untuk dapat mengambil peran dalam mewujudkan kemandirian finansial masyarakat melalui program keuangan yang inklusif.

II.1.3 Direction of Financial Services Sector Development in Indonesia

1. ***Maintaining financial system stability as a foundation of sustainable development***
   Disruptions to financial system stability must be minimised in order to accelerate economic growth. Therefore, a resilient financial services sector is necessary to anticipate the shocks and disruptions that may occur. Consequently, financial system stability is a prerequisite for healthy and sustainable growth.

2. ***Optimising the role of the financial services sector to accelerate national economic growth***
   The national financial services sector is strived to increase its contribution to stimulating economic activity by optimising its role in terms of economic development, increasing capacity and achieving quality growth.

3. ***Realising financial independence and supporting equitable development***
   The financial services sector contributes to financial independence through financial inclusion.

Arah pengembangan SJK nasional memerlukan dukungan yang memadai dari aspek sumber daya manusia dan teknologi informasi. Berbagai inisiatif diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di SJK, baik secara kuantitas maupun kualitas, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kegiatan di SJK.

The direction of national financial services sector development requires the support of adequate human resources and information technology. Several initiatives are required to fulfil demand for quality human resources in the financial services sector, while optimising the use of information technology in financial services sector activities.

Arah Pengembangan Sektor Jasa Keuangan Indonesia
Direction of Financial Services Sector Development in Indonesia

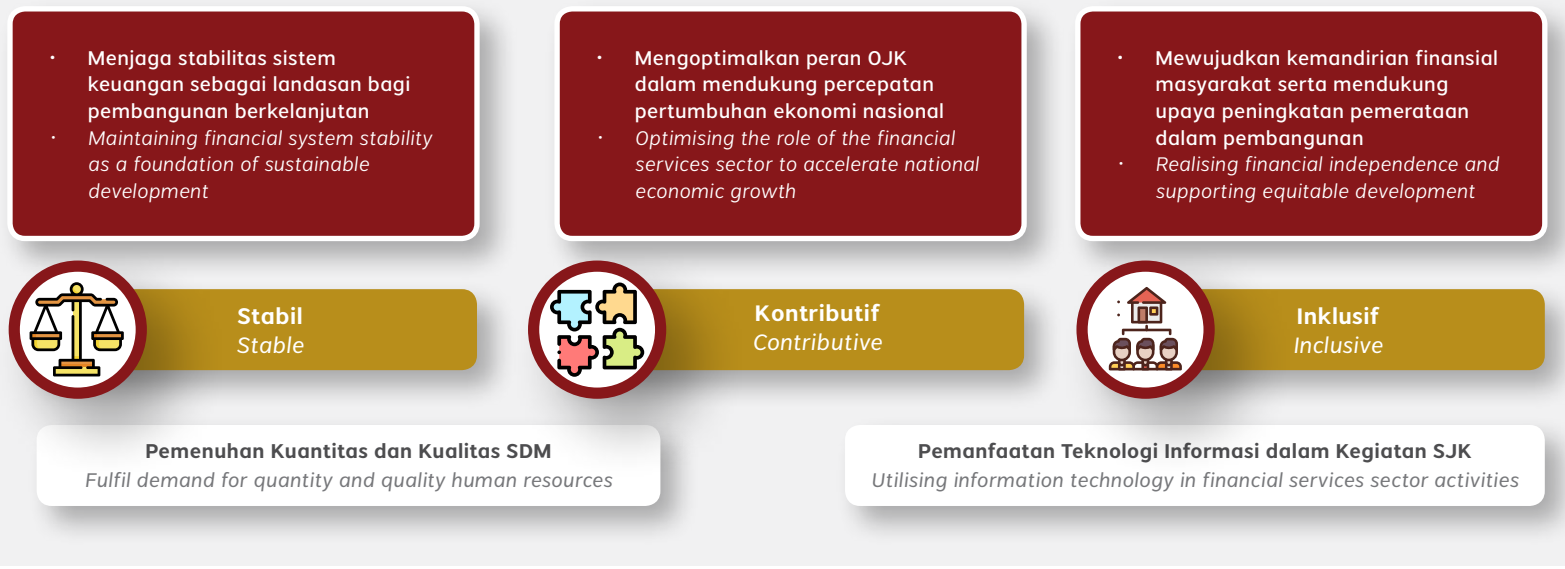

II.2 MENJAGA STABILITAS SISTEM KEUANGAN SEBAGAI LANDASAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN

II.2.1 Penerapan Kebijakan Khusus untuk Menjaga Stabilitas SJK

II.2.1.1 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

OJK senantiasa berkordinasi dengan lembaga dan otoritas terkait, terutama melalui wadah KSSK. Sepanjang 2019, OJK berpartisipasi pada rapat berkala triwulanan KSSK sebanyak empat kali sebagai bentuk koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

II.2 MAINTAINING FINANCIAL SYSTEM STABILITY AS A FOUNDATION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT

II.2.1 Special Policies to Maintain Financial Services Sector Stability

II.2.1.1 Financial System Stability Committee

OJK constantly coordinates with other relevant institutions, primarily through the Financial System Stability Committee. In 2019, OJK participated in four quarterly Financial System Stability Committee meetings to monitor and maintain financial system stability as mandated by Act No. 9 of 2016 concerning Financial System Crisis Prevention and Mitigation (PPKSK).

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memiliki agenda rutin untuk melaksanakan simulasi pencegahan dan penanganan krisis. Selama 2019, telah dilaksanakan simulasi secara *full dressed* pada 3 Oktober 2019 untuk menguji efektivitas Protokol Manajemen Krisis (PMK) pada level KSSK. Selain itu, KSSK juga melaksanakan simulasi secara tematik untuk menguji kelengkapan kerangka kerja pencegahan dan penanganan krisis sistem secara lebih detail. Simulasi tematik tersebut diselenggarakan pada 26 November 2019 dan 28 November 2019 dengan mensimulasikan perizinan pendirian Bank Perantara.

One of the regular agenda items of the Financial System Stability Committee is to implement an annual crisis prevention and management simulation. In 2019, a full-dressed simulation was held on 3rd October 2019 to test the effectiveness of the Crisis Management Protocol at the committee level. In addition, the Financial System Stability Committee also implemented a thematic simulation to rigorously test the comprehensiveness of the crisis prevention and management framework. The thematic simulation ran from 26-28th November 2019 and simulated the licensing process for the establishment of bridge banks.

II.2.1.2 Penerbitan Kebijakan Perusahaan Efek Daerah

Perusahaan Efek Daerah (PED) adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi.

Pengaturan PED diatur dalam POJK Nomor 18 /POJK.04/2019 tentang Perusahaan Efek Daerah. Pengaturan PED bertujuan untuk:

a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan pekerjaan baru di daerah
b. Mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan jumlah investor retail di daerah
c. Meningkatkan tingkat literasi dan inklusi Pasar Modal di daerah
d. Mencegah terjadinya investasi bodong yang sebagian besar terjadi di daerah
e. Menjangkau calon investor daerah yang belum terlayani oleh Perusahaan Efek Anggota Bursa

Selain itu, OJK telah melaksanakan program dukungan pendirian PED, antara lain:

a. Sosialisasi dan promosi pendirian PED di kota Padang, Jakarta, Medan, Bali, Banjarmasin
b. Pendampingan Pendirian PED: Bank BJB, Pemkot Yogyakarta, BPD Jatim

II.2.1.2 Regional Securities Companies

Regional securities companies (PED) act as intermediaries for securities traders established specifically at the provincial level that administrate customers' accounts.

PED provisions are contained in OJK Regulation (POJK) No. 18/POJK.04/2019 concerning Regional Securities Companies. The PED regulation aims to:

a. Increase regional economic growth through new local job creation;
b. Accelerate the growth and equitable distribution of local retail investors;
c. Increase capital market literacy and inclusion in local areas;
d. Prevent illegal investment activity, most of which occurs in local areas;
e. Reach prospective local investors unserved by securities companies as members of the stock exchange.

With promulgation of the PED regulation, OJK has initiated various programs to support PED establishment as follows:

a. Socialisation and promotional activities for the establishment of regional securities companies in Padang, Jakarta, Medan, Bali and Banjarmasin.
b. Assistance for the establishment of regional securities companies, provided to Bank BJB, Yogyakarta City Administration (Pemkot) and BPD Jatim.

II.2.1.3 Penerbitan Kebijakan Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah

OJK menerbitkan POJK Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi industri perbankan syariah melalui optimalisasi sumber daya Bank Umum oleh Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki hubungan kepemilikan. Penerbitan POJK ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing BUS dalam memberikan pelayanan kepada nasabah serta memperluas akses layanan perbankan syariah bagi masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan/atau mendapatkan layanan perbankan syariah (inklusi keuangan). POJK ini juga memperluas ruang kerja sama yang dapat dilakukan oleh BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan,

II.2.1.3 Bank Synergy under Sole Ownership towards Islamic Banking Development

OJK has issued a regulation (POJK) number 28/POJK.03/2019 concerning banks synergy under single ownership to support Islamic banks expanding as an effort to increase the efficiency of Islamic banks by optimizing the utilization of the commercial bank's resources. This POJK is expected to raise the competitiveness of Islamic bank's sevices and broadening the access to the unbanked (financial inclusion). Furthermore, this POJK could enlarge the scope of partnership between affiliated Islamic bank and commercial banks.

POJK ini juga memungkinan nasabah BUS dapat dilayani di jaringan kantor Bank Umum melalui kerja sama Layanan Syariah Bank Umum (LSBU). Selain itu, BUS juga dapat melakukan kegiatan usaha berdasarkan BUKU dan/ atau modal inti Bank Umum induknya dengan tetap memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam masing-masing kegiatan usaha tersebut.

This POJK allows the customer of Islamic Banks to be served in commercial bank network offices through the cooperation of commercial banks in providing Islamic banks services. In addition, Islamic banks could also run the business activity based on the commercial bank's BUKU (Bank's Product/activity-ies classification by the size of core capital) and/or the core capital of the commercial banks yet comply with each specific regulations.

II.2.1.4 Penerbitan Peraturan Terkait Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

OJK menetapkan POJK Nomor 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB). POJK dimaksud mengatur sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis dan menjadi salah satu acuan bagi pengawas LJKNB dalam menyusun rencana pengawasan yang optimal dan efektif.

II.2.1.4 Business Plan of Non-Bank Financial Services Institutions

OJK issued OJK Regulation (POJK) No. 24/POJK.05/2019 concerning the Business Plan of Non-Bank Financial Services Institutions (LJKNB). The regulation contains the strategic targets and values broken down into a business plan as a reference for supervisors of non-bank financial services institutions in the preparation of an optimal and effective supervision plan.

II.2.2 Penguatan Pengawasan SJK

II.2.2 Strengthening Financial Services Sector Supervision

II.2.2.1 Reformasi Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)

OJK berkomitmen untuk mempercepat proses reformasi Industri Keuangan Non-Bank yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, melalui peningkatan standar pengaturan dan kualitas pengawasan, membangun IKNB yang sehat, kokoh, dan berkontribusi bagi perekonomian nasional serta meningkatkan daya saing IKNB dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Berbagai kebijakan telah dilakukan dari reformasi IKNB ini yaitu reformasi pengaturan dan pengawasan, reformasi institusi dan reformasi infrastruktur.

Selama 2019, OJK telah melakukan tahapan reformasi antara lain meliputi pengaturan dan pengawasan yaitu:

1) *Supporting Draft* RUU LP, Pegadaian, dan Dana Pensiun;
2) Kelembagaan (*Entry dan Exit Policy*, serta *Single Presence Policy*);
3) Manajemen Risiko IKNB;
4) Rencana Bisnis, dan Rencana Strategi Teknologi Informasi IKNB;
5) Sistem Pengawasan Berbasis Risiko;
6) Sistem Peringatan Dini *Early Warning System* / EWS.

Selain itu, dalam rangka pengembangan produk dan pasar IKNB telah dikembangkan perluasan saluran distribusi produk IKNB.

II.2.2.1 Non-Bank Financial Industry (NBFI) Reform

OJK is firmly committed to accelerating the non-bank financial industry reform process that aims to increase public trust, improve the quality of regulatory standards and supervision, develop a healthy and solid non-bank financial industry that contributes to the national economy as well as enhance industry competitiveness in response to the global economic challenges. Several NBFI reform policies have been initiated, including regulatory and supervisory reforms, institutional reforms and infrastructure reforms.

In 2019, OJK focused on regulatory and supervisory reforms as follows:

1) *Draft Bill for finance companies, pawnbrokers and pension funds;*
2) *Institutional reforms (entry and Exit Policy, Single Present Policy);*
3) *NBFI Risk Management;*
4) *NBFI business plan and information technology strategy;*
5) *Risk-Based Supervision; and*
6) *Early Warning System Early Warning System / EWS.*

In addition, OJK has expanded the distribution channels for NBFI products in order to develop NBFI products and markets.

II.2.2.2 OJK-BOX (OBOX) dan *Condensed Report*

Sebagai langkah awal dalam mendukung metode pengawasan sektor jasa keuangan berbasis IT, OJK mengembangkan aplikasi pelaporan bank OJK-BOX (OBOX) dan *Condensed Report*. Melalui kedua jalur pelaporan tersebut, pengawas dapat menerima data bersifat transaksi (OBOX) dan data keuangan utama bank (CR) secara lebih cepat.

.

II.2.2.2 OJK-BOX (OBOX) and Condensed Report

Seeking to expand a reliable and comprehensive supervisory toolkit in order to earlier detect issues at banks, OJK has developed new bank reporting methods, known as the OBOX application and Condensed Report. The two new reporting channels afford supervisors faster access to transaction data (OBOX) and core bank financial data (CR).

OBOX merupakan aplikasi pintar yang memungkinkan Bank berbagi data dan informasi bersifat transaksi dalam periode waktu tertentu melalui wadah *repository*. Saat ini, data yang terdapat dalam OBOX mencakup data terkait dengan risiko kredit (5 *form*), risiko likuiditas (2 *form*), dan risiko pasar (6 *form*). Jenis data yang disimpan pada OBOX ada 2, yaitu data *structured* (nominal pagu kredit, sektor kredit, dan lainnya) dan data *unstructured* (analisis kredit dan dokumen agunan).

OBOX is a smart application that allows banks to share transaction data and information for specific periods through a repository. The data currently contained in OBOX relates to credit risk (5 forms), liquidity risk (2 forms) and market risk (6 forms). Two types of data are stored in the OBOX application, namely structured data (outstanding credit, sectoral credit and others) as well as unstructured data (credit analysis and collateral documents).

Condensed report adalah jalur pelaporan Bank baru yang memungkinkan Pengawas dapat menerima data dan rasio keuangan utama Bank secara lebih cepat dan ringkas melalui APOLO. Data yang disampaikan oleh Bank mencakup antara lain data pos-pos utama neraca (total kredit, aset, DPK), rasio keuangan utama (kredit, likuiditas, rentabilitas), serta data pendukung lainnya (jaringan kantor, data deposan inti, kredit per sektor).

The Condensed Report offers a new reporting channel that allows supervisors to quickly receive a summary of bank financial data and ratios through the APOLO system. Through the system, banks report the main balance sheet entries (total credit, assets, deposits), financial ratios (credit, liquidity, profitability) as well as other supporting data (office network, core depositors, credit by sector).

Pada 2019, telah dilakukan sosialisasi dan implementasi OBOX kepada seluruh Bank Umum. Adapun proses pengembangan aplikasi *Condensed Report* telah selesai dilakukan pada 2019 dan akan dilakukan sosialisasi serta implementasi pada 2020.

In 2019, OJK rolled out the OBOX application to all commercial banks and provided corresponding socialisation activities. Development of the condensed report was completed in 2019 for implementation and socialisation in 2020.

II.2.2.3 Sistem Informasi *Risk Based Supervision* IKNB (SIRIBAS)

Sistem Informasi *Risk Based Supervision* (SIRIBAS) merupakan sistem informasi berbasis *web* untuk mendukung kegiatan pengawasan IKNB oleh OJK. Tujuan pengembangan aplikasi Sistem Informasi *Risk Based Supervision* (SIRIBAS) antara lain memudahkan Pengawas dalam memperoleh data/ informasi yang diperlukan untuk kegiatan pengawasan, khususnya dalam menyusun *know your financial institutions*, kertas kerja pemeriksaan dan laporan hasil pengawasan, serta menjaga integritas dan ketersediaan data terkait dengan pengawasan.

II.2.2.3 NBFI Risk-Based Supervision Information System (SIRIBAS)

The NBFI Risk-Based Supervision Information System (SIRIBAS) is a web-based information system to support NBFI supervision conducted by OJK. The objectives of SIRIBAS development include broader supervisor access to the data/ information required for supervision activity, improving 'Know Your Financial Institutions', assisting supervisors prepare working papers on inspections and supervisory outcomes as well as maintaining data integrity and availability in terms of supervision activities.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan terkait pengembangan aplikasi Sistem Informasi *Risk Based Supervision* (SIRIBAS) pada 2019 meliputi *System Integration Test* (SIT), *User Acceptance Test* (UAT), dan Bimbingan Teknis kepada semua pengawas di bidang IKNB.

In 2019, SIRIBAS development focused on the System Integration Test (SIT), User Acceptance Test (UAT) and technical support for all NBFI supervisors.

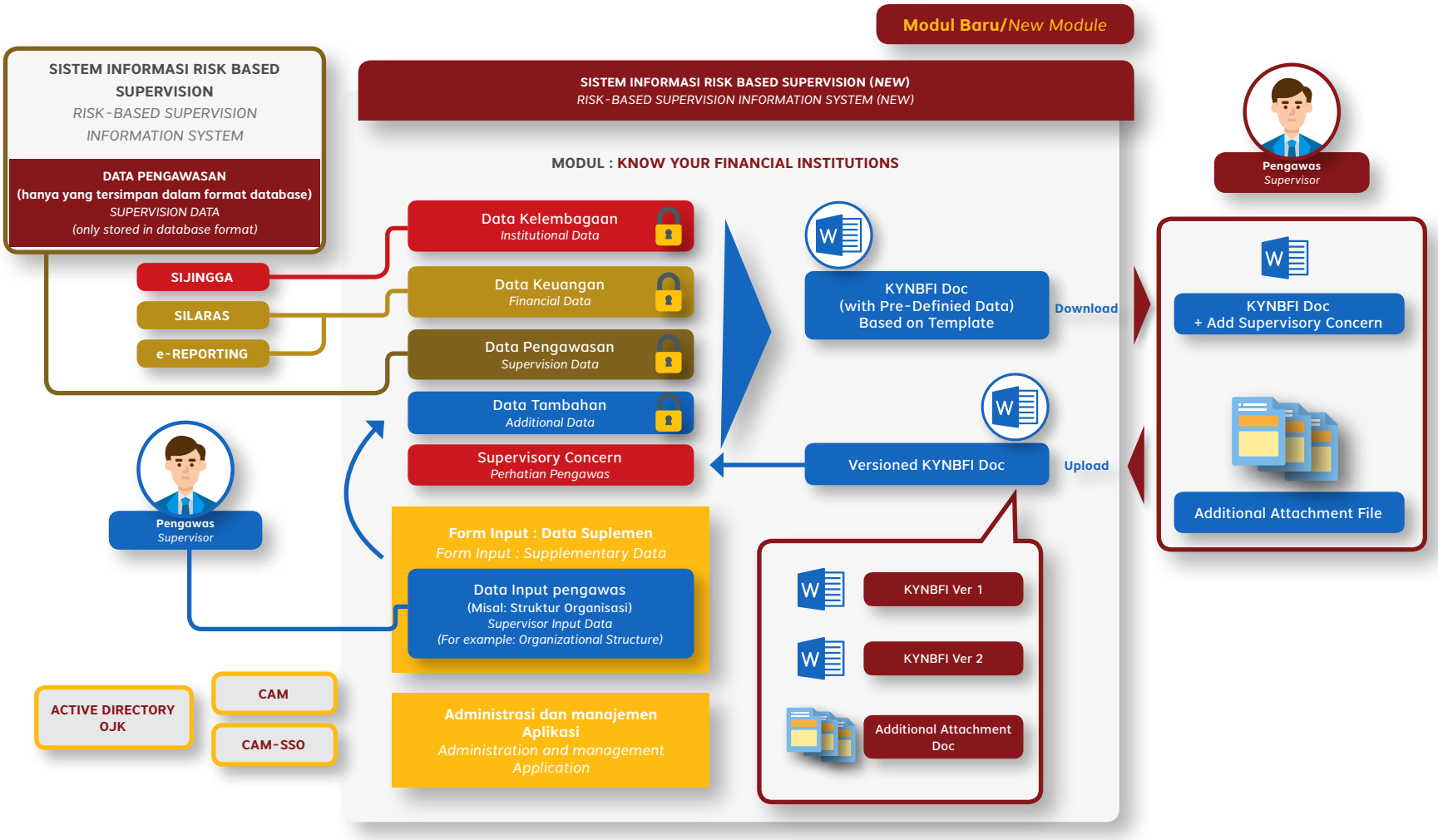

II.2.2.4 Integrasi Sistem OJK dan Bursa Efek Indonesia

Dalam rangka menyempurnakan hasil pengembangan aplikasi SPRINT untuk integrasi perizinan Penawaran Umum dan Pencatatan Efek antara OJK dengan BEI , OJK telah mempersiapkan integrasi untuk tahap ke-2. Persiapan tersebut akan digunakan sebagai acuan untuk pengembangan yang akan dilakukan pada 2020. Tujuan integrasi tahap 2 yaitu meningkatkan daya saing pasar modal Indonesia di tingkat Internasional dengan mengedepankan proses yang lebih mudah, cepat dan efisien.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara proses bisnis integrasi BEI dan OJK Tahap 1 dengan Tahap 2, yakni pada tahap ke-2 integrasi dilakukan secara dua arah antara OJK dengan BEI, sehingga selain OJK memberikan data terkait perizinan yang dibutuhkan oleh BEI kepada sistem BEI, OJK juga dapat menerima data terkait perizinan yang dikeluarkan oleh BEI pada sistemnya. Selain itu, terdapat juga penambahan cakupan yaitu, yang semula hanya untuk efek bersifat ekuitas, sekarang dapat dilakukan untuk efek bersifat ekuitas serta efek bersifat utang.

II.2.2.4 OJK and Indonesia Stock Exchange System Integration

To refine SPRINT application development towards integrated licensing of public offerings and listed securities between OJK and the Indonesia Stock Exchange (BEI), OJK has prepared second stage integration. The preparations will be used as a reference for development efforts in 2020. The goal of second stage integration is to increase capital market competitiveness in Indonesia at the international level by prioritising simpler, faster and more efficient processes.

There are significant differences between the first and second stage integration of BEI and OJK business processes. During the second stage, two-way integration not only provides access to licensing data required by BEI in the BEI system but also provides OJK access to licensing data in the BEI system. Furthermore, the scope of integration has expanded beyond equity securities to also include debt securities.

II.2.2.5 Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital (GESIT)

II.2.2.5 Digital Financial Information System Electronic Gateway (GESIT)



Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital (GESIT)

OJK mulai menerapkan *Supervisory Technology* (*SupTech*) untuk mengembangkan ekosistem perusahaan *financial technology* (*fintech*) yang masuk dalam ranah Inovasi Keuangan Digital (IKD). Penerapan *SupTech* di IKD ditandai dengan peluncuran Gerbang Elektronik Sistem Informasi Keuangan Digital (GESIT) sebagai media interaksi antara OJK, penyelenggara IKD dan masyarakat.

OJK starts implementing Supervisor Technology (SupTech) to develop a financial technology (fintech) corporate ecosystem that is included in the realm of Digital Financial Innovation (IKD). The application of supTech in IKD was marked by the launch of the Electronic Gate of the Digital Financial Information System (GESIT) as interaction media between OJK, IKD organizers and the public.

GESIT merupakan suatu *minisite* pada portal OJK yang memuat informasi dan kabar terkini seputar IKD. GESIT merupakan bentuk awal dari pengembangan *SupTech* untuk IKD sehingga nantinya pemantauan terhadap penyelenggara IKD terdaftar akan dilakukan menggunakan teknologi. *SupTech* ditujukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemantauan terhadap penyelenggara terkait aspek kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

GESIT is a forum on the OJK portal which contains the latest information and news about IKD. GESIT is the initial form of SupTech development for IKD so that later monitoring of registered IKD providers will be carried out using technology. Suptech is intended to improve the effectiveness and efficiency of monitoring of the Provider regarding aspects of compliance with applicable rules.

Melalui GESIT penyelenggara IKD dapat mengajukan permohonan pencatatan maupun menjadwalkan konsultasi secara elektronik. Selain itu, masyarakat umum dapat mengakses dan berkomunikasi seputar perkembangan IKD maupun menggunakan *co-working space* OJK Infinity.

Through GESIT, IKD organizers can submit applications for recording and schedule consultations electronically. In addition, the general public can access and communicate about the development of IKD or use the OJK Infinity co-working space.

II.2.2.6 Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT).

SPRINT merupakan sistem perizinan elektronik satu pintu dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sesuai dengan peraturan POJK No. 26/POJK.01/2019 tentang Perizinan Secara Elektronik Di Sektor Jasa Keuangan.

II.2.2.6 Integrated Licensing and Registration System (SPRINT)

SPRINT is a one-stop electronic licensing system using information technology in accordance with OJK Regulation (POJK) No. 26/POJK.01/2019 concerning Electronic Licensing in the Financial Services Sector.

Jumlah Izin Lembaga Number of Licensed Institution		Jumlah Izin Perseorangan Number of Licensed Individual	
Perbankan / Banking	113	WAPERD / Investment Fund Selling Agent Representatives	20.371
APERD / Investment Fund Selling Agent	74	WPPE / Broker Dealer Representatives	6.126
Asuransi / Insurance	155	WPEE / Underwriter Representatives	841
Manajer Investasi / Investment Managers	109	WMI / Investment Manager Representatives	3.395
Kantor Akuntan Publik / Public Accountants	363	Akuntan Publik / Public Accountant	1.912
Konsultan Hukum / Legal Consultants	419	Ahli Syariah Pasar Modal / Islamic Capital Market Expert	127
Notaris / Notaries	302	Penilai / Appraisers	272
Biro Administrasi Efek / Securities Administration Agencies	11	Jumlah Izin *e-Registration* Number of Licensed e-Registration	
Penasihat Investasi / Investment Advisor	18	IPO, Obligasi, Sukuk / IPO, Bonds, Sharia Compliant Bonds	308
Penjamin Emisi Efek / Underwriter	57		
Wali Amanat / Trustee	9		

Jumlah Izin Produk/Aktivitas Number of Licensed Product/Activity	
Pemasaran Reksa Dana / Investment Fund Marketing	849
Reksa Dana / Investment Fund	3.931
Bancassurance / Bancassurance	1.867
Exchange Trade Fund / Exchange Trade Fund	60
Investasi pada Efek Bersifat Ekuitas / Investment on Equity Securities	51
Investasi pada Efek Bersifat Utang / Investment on Debt Securities	197
Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate / Real Estate Investment Funds Collective Investment Contract	17
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset / Asset Backed Securities Collective Investment Contract	18

Layanan Informasi Satu Pintu SPRINT

Layanan informasi dan pengaduan perizinan serta registrasi melalui SPRINT saat ini dapat diakses melalui Kontak OJK 157. Selain itu, dalam rangka mendukung pelayanan satu pintu, OJK membangun SPRINT *Corner* (*Walk In Submission* SPRINT) di Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 26. SPRINT *Corner* tersebut dapat dimanfaatkan bagi para pelaku jasa keuangan yang memerlukan asistensi/panduan dalam menyelesaikan kendala teknis saat menggunakan aplikasi SPRINT.

II.2.2.7 Sistem Informasi Perbankan (SIP)

Sistem Informasi Perbankan (SIP) adalah sistem informasi yang digunakan Pengawas bank untuk melakukan kegiatan analisis terhadap kondisi bank dan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan (TKS) Bank dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating* / RBBR), mempercepat diperolehnya informasi kondisi keuangan bank, meningkatkan keamanan dan integritas data serta informasi perbankan.

SPRINT Integrated Information Services

Information as well as licensing and registration services through SPRINT can now be accessed through Kontak OJK 157. In addition, OJK has also developed the SPRINT Corner for walk-in submissions located on the 26th floor of Wisma Mulia 2. SPRINT Corner is available to anyone requiring assistance/guidance and also to help financial services providers overcome technical difficulties when using the SPRINT application.

II.2.2.7 Banking Information System (SIP)

The Banking Information System (SIP) is used by bank supervisors to analyse bank conditions and evaluate bank soundness (TKS) using a risk-based bank rating (RBBR). SIP also provides faster access to information concerning banks' financial conditions, while enhancing data security and integrity as well as bank information.

Selama 2019, OJK telah melakukan pengembangan SIP antara lain: (i) Penambahan menu penyajian informasi dari laporan baru pada Aplikasi Pelaporan *Online* OJK (APOLO); (ii) Penambahan konten Laporan Analisis Bulanan / Triwulanan bagi Pengawas Bank; dan (iii) Penyempurnaan fitur eksisting dan peningkatan performansi sistem informasi.

In 2019, OJK made the following refinements to the SIP system: (i) additional menus to present information from new reports in the APOLO Online Reporting System; (ii) additional content of the monthly/quarterly Analysis Report for Bank Supervisors; and (iii) improvements to the existing features along with performance gains.

II.2.2.8 Pengawasan *Market Conduct*

Pemeriksaan *Market Conduct*

Dalam kerangka penegakan disiplin pelaku pasar, OJK melaksanakan pemeriksaan *market conduct* terkait Perjanjian Baku terhadap tujuh Bank Umum, satu Bank Umum Syariah, dan dua Perusahaan Pembiayaan sepanjang 2019. Sampel ini belum termasuk pemeriksaan *offsite* yang dilaksanakan terhadap perjanjian baku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Perjanjian baku adalah perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada Konsumen secara massal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kebijakan, implementasi, dan evaluasi perjanjian baku, masih ditemukan klausula yang belum memenuhi ketentuan dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku. Menindaklanjuti hal tersebut, OJK melanjutkan tema Perjanjian Baku dalam Pemeriksaan *Market Conduct* agar sampel yang diperoleh dapat menggambarkan praktik perlindungan konsumen dalam perjanjian baku secara umum.

Hasil pemeriksaan *market conduct* diharapkan dapat menjadi pelengkap, sehingga PUJK tidak hanya kuat dari sisi bisnis, tapi juga menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Hal ini dimaksudkan agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia semakin meningkat.

Pemantauan Iklan

OJK melaksanakan pemantauan iklan produk dan layanan jasa keuangan melalui Sistem Informasi Pelaporan *Market Intelligence* (SIPMI). Sehubungan dengan hal itu, OJK mengembangkan SIPMI 2.0 untuk memperluas jangkauan pemantauan. Selain media cetak nasional dan daerah, OJK menambahkan media sosial dan media *online* sebagai sumber iklan pada SIPMI 2.0.

Sepanjang 2019 terdapat 1.104 iklan berkaitan dengan produk/jasa Keuangan dengan 483 iklan di antaranya belum sesuai ketentuan yang tertuang dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 12/SEOJK.07/2013 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan.

II.2.2.8 Market Conduct

Market Conduct Inspections

Seeking to enforce market discipline, OJK performed market conduct inspections in relation to the Standard Agreement with seven Commercial Banks, one Islamic Bank and two Finance Companies in 2019. That sample does not include the off-site inspections performed by OJK in relation to the standard agreements with financial services providers. A standard agreement is a written agreement unilaterally determined by financial services providers containing standard clauses concerning the contents, form and procedures used to offer and promote products and/or services to the consumer.

Based on inspections of the policies, as well as implementation and evaluation of the standard agreements, a number of clauses were identified that failed to meet the provisions contained in OJK Regulation (POJK) No. 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and Circular Letter (SEOJK) No. 13/SEOJK.07/2014 concerning Standard Agreements. As a follow-up action, OJK continued the theme of standard agreements in the market conduct inspections to ensure the sample received clear guidelines of consumer protection practices in the standard agreements.

The results of the market conduct inspections are expected to complement financial services providers, thus ensuring strength not only from a business perspective but also in terms of sound consumer relations. This intends to bolster public trust in financial services institutions in Indonesia.

Monitoring Advertisements

OJK monitors financial product and services advertisements through its Market Intelligence Reporting Information System (SIPMI). To that end, OJK has developed SIPMI 2.0 in order to expand the monitoring reach. In addition to national and regional print media, OJK has now included advertisements that appear on social media and online media in the SIPMI 2.0 system.

In 2019, OJK monitored 1,104 advertisements for financial products/services, of which 483 failed to meet OJK Regulation (POJK) No.1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector and Circular Letter (SEOJK) No.12/SEOJK.07/2013 concerning Submission of Information on Financial Product and/or Services Marketing.

Iklan dan Pelanggaran 2019

Advertisement Violations in 2019

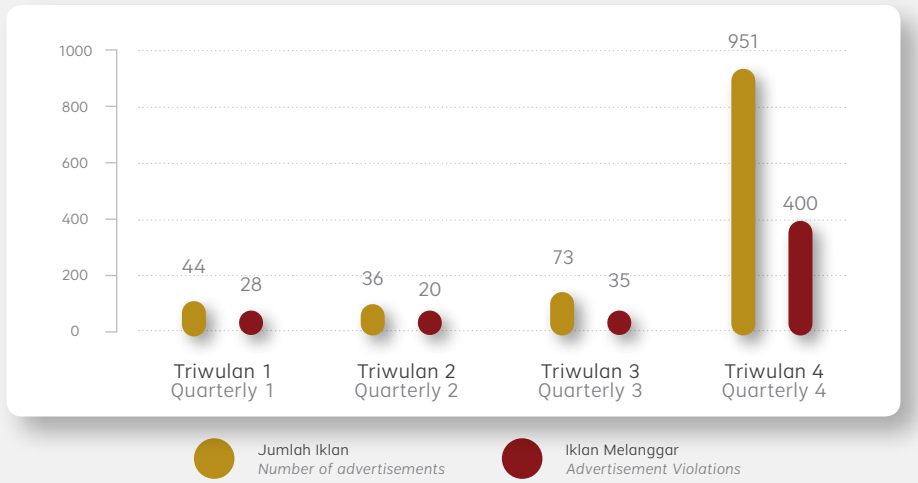

Sejak implementasi SIPMI 2.0, jumlah iklan meningkat drastis. Hal ini menunjukkan bahwa tren iklan saat ini sangat masif melalui media sosial dan media daring. Kategori yang paling banyak dilanggar adalah kategori "Tidak Jelas", yaitu informasi tidak disampaikan secara lengkap, antara lain terkait manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan berlaku.

Since implementation of SIPMI 2.0, the total number of advertisements has increased significantly, indicating the massive presence of advertisements through social and online media. The most violated category is the "No."Clear ", that is, the information was not conveyed in full, including related benefits, costs, risks, and terms and conditions apply.

Kategori Pelanggaran 2019

Violations Category in 2019

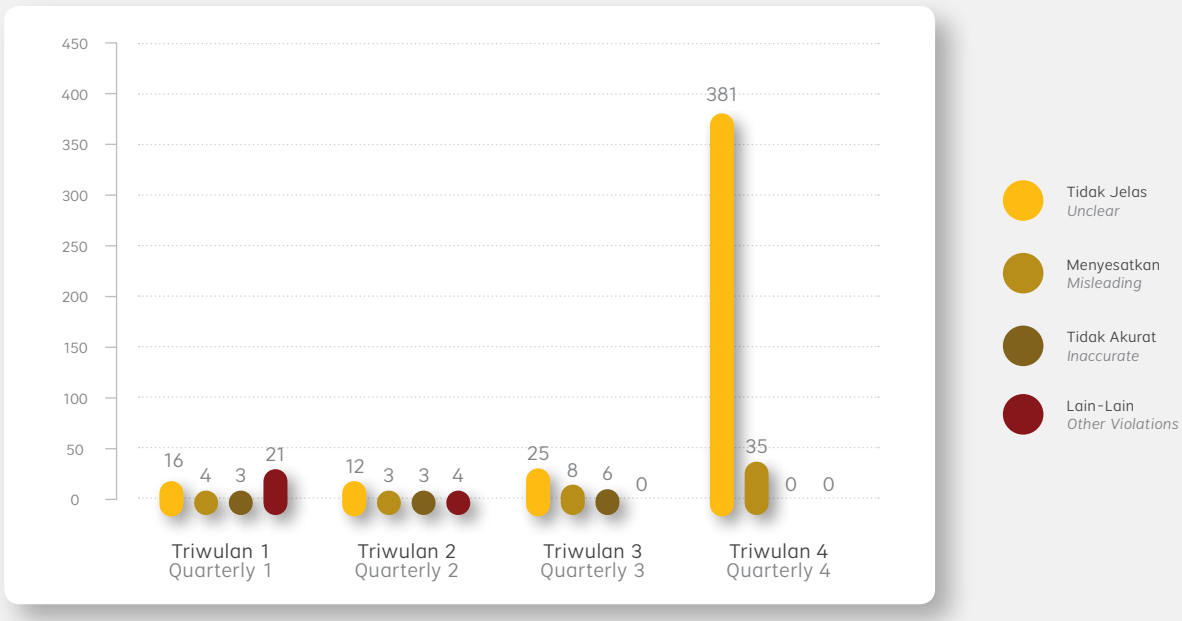

Langkah yang telah dilaksanakan OJK untuk memastikan LJK menyampaikan informasi secara jelas, akurat, dan tidak menyesatkan antara lain: (i) Meluncurkan dan mengimplementasikan Pedoman Iklan Jasa Keuangan; (ii) Memberikan Surat Pembinaan kepada LJK yang melakukan pelanggaran iklan; dan Memberikan apresiasi terhadap LJK yang telah mengimplementasikan Pedoman Iklan Jasa Keuangan sebagai *awareness* bagi LJK lainnya melalui Malam Penganugerahan Jasa Keuangan.

OJK measures to ensure financial services institutions provide clear and accurate information that is not misleading include: (i) launching and implementing financial services advertisement guidelines; (ii) providing advisory letters to financial services institutions that violate advertisement guidelines; and (iii) appreciating and recognising financial services institutions that have effectively implemented the financial services advertisement guidelines in order to raise awareness amongst other financial services institutions through the Financial Services Awards Evening.

Operasi Intelijen Pasar

Selama 2019, OJK melakukan kegiatan operasi intelijen pasar (OIP) terkait "Praktik Pemasaran Produk Investasi Reksa Dana" yang bertujuan memperoleh informasi mengenai praktik pemasaran produk investasi Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi (MI) dan dipasarkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana (Agen) yang menjadi sampel dari OJK. Secara umum, hasil dari kegiatan tersebut adalah ditemukannya Agen MI yang yang terindikasi melanggar ketentuan, yaitu menawarkan produk Reksa Dana dengan menjanjikan *fixed return* kepada investor dan ketika terjadi ketidaksesuaian atau kerugian di kemudian hari, Manajer Investasi dan Agen tidak menanggung risiko tersebut. Hasil dari kegiatan OIP ini selanjutnya akan menjadi bahan dan pertimbangan OJK dalam memetakan potensi kerawanan dari produk Reksa Dana terhadap penerapan prinsip perlindungan konsumen.

Market Intelligence Operations

In 2019, Market Intelligence Operations (MIO) targeted the Marketing Practices for Investment Fund Products, which aimed to collect information concerning the marketing practices used by Investment Managers (IM) for their investment fund products, which are marketed by Investment Fund Selling Agents as the sample. In general, MIO identified investment fund selling agents in violation of the regulations by offering investment fund products promising fixed returns to the investor averaging 9-11% per annum. When losses inevitably emerged, the investment manager and agent failed in their responsibility to bear the risk. The output of market intelligence operations is used by OJK to map potential vulnerabilities in terms of applying consumer protection principles to investment fund products.

Self Assessment

Dalam meningkatkan kepatuhan penerapan aspek perlindungan konsumen, OJK mendorong PUJK untuk melakukan pelaporan *Self Assessment* di mana hasil penilaian sendiri tersebut akan dibandingkan dengan hasil Pemeriksaan *Market Conduct* yang dilaksanakan OJK.

Hasil *Self Assessment* akan dijadikan bahan masukan dalam pemetaan potensi risiko penerapan praktik perlindungan konsumen sektor jasa keuangan dan menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penegakan disiplin pelaku pasar.

Self-Assessment

In improving compliance with the implementation of consumer protection aspects, OJK encourages PUJK to report Self Assessment in which the results of the self-assessment will be compared with the results of Market Conduct Examination conducted by OJK.

The results of the Self Assessment will be used as input in mapping the potential risks of the implementation of consumer protection practices in the financial services sector and are taken into consideration in the implementation of disciplined market participants.

II.2.2.9 Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

II.2.2.9 Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF)

Penyempurnaan Kerangka Hukum Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan

OJK menerbitkan POJK Nomor 23/POJK.01/2019 Tentang Perubahan Atas POJK Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh:

Refinement of the Legal Framework for implementation of the AML/CTF Program in the Financial Services Sector

OJK issued OJK Regulation (POJK) No. 23/POJK.01/2019 as an amendment to OJK Regulation (POJK) No. 12/POJK.01/2017 concerning Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) in the Financial Services Sector. The amendment was motivated by:

- Komitmen Indonesia untuk memenuhi standar internasional terkait APU PPT yaitu:
  a. *Financial Action Task Force* (FATF) *Recommendation*
  b. *Principles on Exchange of Information on Request for Tax Purposes* (EOIR)
- Persiapan menghadapi *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia sebagai syarat keanggotaan penuh Indonesia pada FATF.

- Penerbitan Peraturan Bersama Menlu RI, Kapolri, Kepala PPATK, dan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan Pemblokiran Serta Merta Atas Dana Milik Orang atau Korporasi yang Tercantum dalam Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

- *Indonesia's firm commitment to meet international standards concerning AML/CTF, namely:*
  a. FATF Recommendations
  b. Principles on Exchange of Information on Request for Tax Purposes (EOIR)
- *Preparations for the Mutual Evaluation Review (MER) of Indonesia by the Financial Action Task Force (FATF) in 2019/2020 as a prerequisite for Indonesia's full membership in the FATF.*
- *Promulgation of regulations with the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, head of the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC), and head of the Nuclear Energy Regulatory Agency of Indonesia concerning recording the identity of individuals and corporations on the List of Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction as well as freezing all funds belonging to individuals or corporations recorded on the list.*

Adapun pokok ketentuan yang diatur dalam POJK tersebut mencakup (a) kewajiban bagi Penyedia Jasa Keuangan untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut atas Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal antara lain pemeliharaan data, identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas, dan pemblokiran secara serta merta; (b) penilaian risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme yang mengacu pada *National Risk Assessment* dan *Sectoral Risk Assessment*; (c) penyempurnaan ketentuan verifikasi dan penatausahaan dokumen pada kegiatan transfer dana; (d) dukungan percepatan penyampaian informasi kepada penegak hukum; serta (e) penetapan batas maksimal pengenaan sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran ketentuan APU PPT selain keterlambatan penyampaian laporan.

The key provisions of the amendment include: (a) requirements for financial services providers to take follow-up actions concerning the List of Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction, including maintaining the data, identification and inspection in line with the identity as well as freezing funds; (b) risk assessments of money laundering and terrorism financing activities referring to the National Risk Assessment and Sectoral Risk Assessment; (c) refinements to the document verification and administration regulations for fund transfer activities; (d) support to accelerate the submission of information to law enforcement; and (e) determining the maximum administrative penalties in the form of fines for violations of AML/CTF beyond late report submission.

Selanjutnya, sebagai pedoman teknis penerapan ketentuan APU PPT, OJK menerbitkan SEOJK Nomor 29/SEOJK.01/2019 tentang Perubahan Atas SEOJK Nomor 38/SEOJK.01/2019 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris. Penerbitan Surat Edaran ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk mempercepat proses penyampaian Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) disertai permintaan pemblokiran secara serta merta kepada seluruh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) melalui Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP).

To provide technical guidelines concerning AML/CTF program implementation, OJK also issued Circular Letter (SEOJK) No. 29/SEOJK.01/2019 as an amendment to Circular Letter (SEOJK) No. 38/SEOJK.01/2019 as guidelines concerning the Freezing of Customer Funds in the Financial Services Sector Identified on the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organisations. The circular letter was issued because of the need to accelerate submission of the List of Suspected Terrorists and Terrorist Organisations (DTTOT) and applications to freeze funds by all Financial Services Providers through the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Information System (SIGAP).

Untuk mendukung komitmen Indonesia dalam pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan memenuhi amanat ketentuan Pasal 46 ayat (4) juncto Pasal 68 POJK Nomor 12/POJK.01/2017 sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 23/POJK.01/2019, OJK juga menerbitkan SEOJK Nomor 31/SEOJK.01/2019 Tentang Pedoman Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Nasabah di Sektor Jasa Keuangan yang Identitasnya Tercantum dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Melalui kedua Surat Edaran, penggunaan SIGAP dioptimalkan untuk mempercepat dan mempermudah penyampaian DTTOT secara elektronik. SIGAP memungkinkan OJK untuk menyampaikan DTTOT atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal serta setiap perubahannya disertai dengan permintaan pemblokiran secara serta merta terhadap seluruh dana yang dimiliki atau dikuasai, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang atau Korporasi, dari OJK kepada PJK secara cepat. Dengan begitu, PJK dapat segera menjalankan kewajiban untuk tidak menyediakan dana dan melakukan pemblokiran secara serta merta (*freezing without delay*).

SIGAP juga memungkinkan PJK untuk menyampaikan tembusan berita acara Pemblokiran secara serta merta dan laporan Pemblokiran secara serta merta, dari PJK kepada OJK, dan laporan nihil terkait DTTOT atau Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dari PJK kepada OJK secara tepat waktu. Berdasarkan laporan tersebut, pengawas OJK dapat memastikan bahwa PJK yang diawasinya telah memiliki, mengelola, dan menindaklanjuti DTTOT dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Penggunaan SIGAP tersebut akan berlaku efektif pada 2020.

Pengembangan Kebijakan APU PPT pada Industri *Financial Technology*

Saat ini, industri *financial technology* khususnya *Peer to Peer Lending* (P2P *Lending*) dan *Equity Crowdfunding* (ECF) berkembang begitu pesat. Namun demikian, perkembangan ini juga diiringi dengan adanya potensi risiko tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) pada industri dimaksud. Oleh karena itu, perlu dilakukan penilaian risiko TPPU dan TPPT pada industri tersebut yang juga sejalan dengan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF) Nomor 15 - *New Technologies*.

Dilatarbelakangi kondisi tersebut, pada 2019, OJK menyusun dua kajian yaitu "Tingkat Kerentanan Industri Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*) terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme" dan "Tingkat Kerentanan Industri Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme".

To support Indonesia's commitment to prevent financing the proliferation of weapons of mass destruction and to fulfil its mandate pursuant to Article 46, Paragraph (4) and Article 68 of OJK Regulation (POJK) No. 12/POJK.01/2017 as amended by OJK Regulation (POJK) No. 23/POJK.01/2019, OJK issued Circular Letter (SEOJK) No. 31/POJK/01/2019 concerning the Freezing of Customer Funds in the Financial Services Sector Identified on the List of Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction.

Promulgation of both circular letters has optimised the SIGAP system in terms of accelerating and facilitating DTTOT submission electronically. SIGAP allows OJK to submit each amendment to the DTTOT and List of Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction and Freezing of Customer Funds in the Financial Services Sector directly or indirectly by individuals or corporations quickly from OJK to financial services providers. Consequently, financial services providers can freeze funds without delay.

SIGAP also allows financial services providers to submit copies of reports concerning funds that have been frozen to OJK along with DTTOT reports and reports concerning the List of Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction in a timely manner. Based on those reports, OJK supervisors can ensure that financial services providers under their supervision maintain, manage and follow-up DTTOT and List of Financing the Proliferation of Weapons of Mass Destruction. The SIGAP system will become effective in 2020.

AML/CTF Policy in the FinTech Industry

The FinTech industry, Peer-to-Peer (P2P) Lending and Equity Crowdfunding (ECF) in particular, is currently developing rapidly. Nevertheless, FinTech industry development is accompanied by the potential risk of money laundering (TPPU) and terrorism financing (TPPT). Therefore, TPPU and TPPT risk assessments are required in line with the recommendations of the Financial Action Task Force (FATF), specifically Recommendation No. 15 - New Technologies.

Motivated by such conditions, OJK prepared two studies in 2019, namely Vulnerabilities in the Peer-to-Peer Lending Industry to Money Laundering and Terrorism Financing as well as Vulnerabilities in the Equity Crowdfunding Industry to Money Laundering and Terrorism Financing.

Penyusunan dua kajian tersebut dilakukan secara sinergi antara OJK dengan melibatkan Asosiasi Fintech Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Kajian ini akan menjadi bahan dan masukan awal bagi OJK dalam mengembangkan kebijakan APU PPT pada industri *financial technology* antara lain penyusunan Rancangan SEOJK tentang Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko bagi Penyelenggara *Peer to Peer Lending* dan *Equity Crowdfunding* yang direncanakan akan disusun pada 2020, sebagai persiapan berlaku efektifnya POJK APU PPT bagi Penyelenggara *Peer to Peer Lending* pada 2021, serta bagi Penyelenggara *Equity Crowdfunding* pada 2022.

OJK conducted the studies in synergy with the Indonesia FinTech Association and the Indonesia Peer-to-Peer Lending Association. The studies will be used as preliminary materials and inputs for OJK to develop AML/CTF policies for the FinTech industry, including a draft circular letter concerning implementation of a Risk-Based AML/CTF Program for Peer-to-Peer Lending and Equity Crowdfunding Providers, planned for 2020 in preparation for enforcement of the OJK Regulation on AML/CTF for Peer-to-Peer Lending Providers in 2021 and Equity Crowdfunding Providers in 2022.

Penguatan Pengawasan APU PPT Berbasis Risiko

Sebagai upaya dan komitmen OJK untuk terus melakukan penguatan pengawasan APU PPT berbasis risiko, OJK melakukan penyempurnaan pedoman pengawasan penerapan program APU PPT khususnya di IKNB.

Strengthening Risk-Based AML/CTF Supervision

As part of the efforts and commitment to strengthen risk-based AML/CTF supervision, OJK has amended it is supervision guidelines concerning AML/CTF implementation in the non-bank financial industry.

Penyempurnaan pedoman pengawasan penerapan program APU PPT diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengawas dalam mengukur tingkat risiko Penyedia Jasa Keuangan (PJK) terhadap potensi terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme; dapat membantu pengawas dalam melakukan tinjauan berkala untuk memastikan efektivitas penerapan program APU PPT berbasis risiko yang dilaksanakan oleh PJK; dan dapat memberikan panduan bagi pengawas dalam menyusun strategi dan rencana pengawasan yang terkait dengan pengawasan penerapan program APU PPT baik secara keseluruhan maupun pengawasan yang bersifat tematik.

The refined supervision guidelines concerning AML/CTF program implementation provide guidance for supervisors to measure the risk profile of financial services providers in terms of potential money laundering and terrorism financing; help supervisors perform periodic reviews to ensure effective risk-based AML/CTF program implementation by financial services providers; and provide guidance for supervisors when compiling general and thematic supervision strategies and plans in terms of AML/CTF program implementation.

Salah satu penyempurnaan pedoman pengawasan dimaksud adalah terkait pelaksanaan penilaian tingkat risiko PJK terhadap potensi terjadinya pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dilakukan oleh OJK (pengawas) dengan mengacu pada *National Risk Assessment* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA). Hasil identifikasi dan penilaian risiko tersebut akan menjadi dasar bagi pengawas untuk melakukan *supervisory action* terkait penerapan program APU dan PPT kepada PJK meliputi penentuan frekuensi, intensitas, dan cakupan pengawasan *offsite* dan *onsite*.

One of the refinements concerns the risk assessment of financial services providers in terms of potential money laundering and terrorism financing by OJK supervisors referring to the National Risk Assessment (NRA) and Sectoral Risk Assessment (SRA). The results of risk assessment and identification will be used by supervisors as the basis for supervisory actions regarding AML/CTF program implementation at financial services providers, including the frequency, intensity and scope of off-site and on-site inspections.

Melalui pengawasan berbasis risiko, pengawas mengalokasikan sumber dayanya untuk melakukan pengawasan penerapan program APU dan PPT berdasarkan pemahaman atas risiko TPPU/TPPT yang ada. Dengan menerapkan pengawasan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko, memungkinkan pengawas untuk mengalokasikan sumber daya pada area-area yang berisiko lebih tinggi. Dengan demikian, Pengawas dapat menggunakan sumber dayanya dengan lebih efektif.

Through risk-based supervision, supervisors can allocate their resources to oversee AML/CTF program implementation based on comprehensive understanding of the existing TPPU/TPPT risks. Risk-based supervision of AML/CTF program implementation allows supervisors to allocate their resources to higher risk areas, thus facilitating more effective use of such resources.

Penguatan pengawasan program APU PPT berbasis risiko juga dilakukan melalui pelaksanaan sejumlah pelatihan bagi pengawas OJK. Selama 2019, telah diselenggarakan 10 pelatihan penguatan pengawasan APU PPT berbasis risiko baik dalam bentuk pelatihan tematik dan kegiatan diseminasi, yang diikuti oleh 477 pengawas di kantor pusat maupun daerah.

Risk-based AML/CTF supervision has also been strengthened through training for OJK supervisors. In 2019, OJK provided 10 training courses to strengthen risk-based AML/CTF supervision, encompassing thematic training and dissemination activities, attended by 477 supervisors from head office as well as regional offices.

Penyusunan *Sectoral Risk Assessment* (SRA) Sektor Jasa Keuangan 2019

TPPU dan TPPT merupakan suatu kejahatan yang berdimensi internasional dan merupakan ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang semakin kompleks yang melintasi batas yurisdiksi, pelaku TPPU dan TPPT telah menggunakan modus yang semakin variatif dan merambah ke berbagai sektor ekonomi, baik dengan memanfaatkan Sektor Jasa Keuangan (SJK), maupun memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan.

Sectoral Risk Assessment (SRA) of the Financial Services Sector in 2019

Money laundering and terrorism financing (TPPU and TPPT) are international crimes and represent a grave threat to various countries, including Indonesia. In this era of globalisation and complex advancement of information technology across jurisdictions, TPPU and TPPT criminals are resorting to a variety of methods to penetrate various economic sectors, including the financial services sector as well as institutions outside of the financial system.

Untuk mengantisipasi hal itu, Rekomendasi Nomor 1 FATF mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko TPPU dan TPPT atas negara tersebut, mengambil tindakan, serta memutuskan otoritas yang akan mengkoordinasikan kegiatan penilaian atas risiko dan pendayagunaan sumber daya yang bertujuan untuk memastikan bahwa risiko yang ada telah dimitigasi dengan efektif. Sebagai turunannya, perlu pula dilakukannya penilaian risiko TPPU dan TPPT di masing-masing sektor atau *Sectoral Risk Assessment* (SRA), termasuk SRA untuk SJK sebagai penopang utama dalam kegiatan perekonomian negara.

In anticipation, FATF Recommendation No. 1 requires each country to identify, analyse and evaluate TPPU and TPPT risk and determine which authorities will coordinate risk assessment activities and utilise resources to effectively mitigate the risks. Therefore, TPPU and TPPT risk must be assessed in each respective sector through a Sectoral Risk Assessment (SRA), including the financial services sector as the backbone of economic activity.

SRA di sektor jasa keuangan merupakan kebutuhan nasional dalam upaya melakukan pemetaan risiko yang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah mitigasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Bagi industri di sektor jasa keuangan, SRA akan menjadi acuan sangat penting dalam membantu kegiatan identifikasi, penilaian, dan mitigasi risiko TPPU dan TPPT yang dihadapi dalam rangka penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk-based approach*). Bagi OJK, SRA dapat dijadikan sebagai salah satu dasar dalam melakukan pengawasan penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (*risk-based supervision*). OJK selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur di Sektor Jasa Keuangan bertanggungjawab menerbitkan dan mengkinikan SRA dilakukan secara berkala.

The financial services sector SRA is a national requirement to map the risks and subsequent mitigation measures to prevent and eradicate money laundering and terrorism financing. For industries operating in the financial services sector, the SRA is an important reference to help identify, assess and mitigate the risks associated with money laundering and terrorism financing through a risk-based approach. For OJK, the SRA forms an important basis for risk-based supervision of AML/CTF program implementation. As the financial services sector supervisor and regulator, OJK is responsible for periodically issuing and updating the SRA.

Pada 2019, OJK telah menerbitkan SRA Sektor Jasa Keuangan - Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). SRA Tahun 2019 ini merupakan pengkinian dari SRA yang telah diterbitkan tahun 2017.

In 2019, OJK published the Financial Services Sector SRA - Money Laundering as an update to the SRA published in 2017.

Proses penyusunan SRA Sektor Jasa Keuangan dimaksud mencakup kegiatan identifikasi, penilaian, serta pemahaman terhadap risiko TPPU dan TPPT baik terkait dengan ancaman, kerentanan, dan dampak yang ditinjau dari lima *point of concern* (POC), yaitu profil nasabah, jenis produk/layanan, area geografis/wilayah, saluran distribusi (*delivery channel*), dan modus operandi. SRA Sektor Jasa Keuangan Tahun 2019 menampilkan hasil penilaian risiko TPPU dan TPPT pada masing-masing *point of concern* tersebut yang terjadi melalui sarana industri perbankan, perusahaan efek, manajer investasi, perasuransian, dan pembiayaan.

The financial services sector SRA includes the identification, assessment and understanding of TPPU and TPPT risk in terms of the threats, vulnerabilities and impacts based on five points of concern (POC), namely customer profile, types of products/services, geographical area, delivery channel and modus operandi. The financial services sector SRA in 2019 delivered the risk assessment results based on each respective point of concern in the banking industry, securities companies, investment managers, insurance companies and finance companies.

Hasil pengkinian SRA Sektor Jasa Keuangan Tahun 2019 telah disosialisasikan kepada pelaku industri pada 13-14 November 2019 dengan total peserta mencapai 1.292 peserta. Materi SRA Sektor Jasa Keuangan Tahun 2019 akan selalu menjadi bagian kegiatan sosialisasi APU PPT ke depan. Selanjutnya, publikasi SRA Sektor Jasa Keuangan Tahun 2019 juga dilakukan melalui *minisite* APU PPT (https://www.ojk.go.id/apu-ppt/) yang dapat diakses secara luas oleh para pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Secara khusus, dokumen dan informasi kesimpulan SRA Sektor Jasa keuangan Tahun 2019 juga disampaikan melalui *email* kepada seluruh *person in charge* APU PPT dari PJK yang diawasi OJK.

The updated Financial Services Sector SRA 2019 was socialised to industry players on 13-14th November 2019, with participants totalling 1,292. The socialisation materials are always accompanied by socialisation activities. Furthermore, the Financial Services Sector SRA 2019 is also published on the AML/CTF minisite, https://www.ojk.go.id/apu-ppt/, which is accessible to all stakeholders and the public. Furthermore, the conclusions of the Financial Services Sector SRA in 2019 are also delivered through email to all persons in charge (PIC) of the AML/CTF program at financial services providers under the supervision of OJK.

Peningkatan Kapasitas Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

Peningkatan kapasitas penerapan program APU PPT berbasis risiko oleh Penyedia Jasa Keuangan dilakukan oleh OJK melalui sinergi dengan asosiasi-asosiasi di sektor jasa keuangan, antara lain Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP), Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Asurasi Jiwa Indonesia (AAJI), Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), dan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH). Sinergi ini penting untuk memastikan kebutuhan pelaku industri, mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta untuk menghindari adanya duplikasi kegiatan. Melalui sinergi tersebut, selama 2019, telah diselenggarakan 23 kegiatan peningkatan kapasitas penerapan program APU PPT bagi PJK, dalam bentuk *workshop* pendampingan, sosialisasi, pelatihan, dan kegiatan diseminasi, dengan total 2.834 peserta dari sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB.

Increasing Implementation Capacity for the Risk-Based AML/CTF Program by Financial Services Providers

Implementation capacity for the risk-based AML/CTF program by financial services providers has been increased by OJK through synergy with financial services sector associations, including the Bank Compliance Directors Communication Forum (FKDKP), Association of Indonesian Securities Companies (APEI), Indonesian Life Insurance Association (AAJI), Indonesian General Insurance Association (AAUI) and Indonesia FinTech Association (AFTECH). Synergy is crucial to ensure the needs of industry players are met, while optimising existing resources and avoiding duplicate activities. In 2019, a total of 23 activities to increase implementation capacity for the risk-based AML/CTF program by financial services providers were conducted in the form of workshops, socialisation activities, training and dissemination, attended by 2,834 participants from the banking sector, capital markets and non-bank financial industry.

Secara khusus, kegiatan *Workshop* Pendampingan Penerapan Program APU PPT Berbasis Risiko bagi Sektor Jasa Keuangan yang telah diselenggarakan sejak 2017 hingga 2019 telah mampu menjangkau perwakilan dari 692 Penyedia Jasa Keuangan (PJK) sebagai peserta. Dari total PJK tersebut telah mencakup 100% Bank Umum, 12% BPR/BPRS, 81% PJK di Sektor Pasar Modal, dan 33% PJK di Sektor IKNB. *Workshop* pendampingan memaparkan materi penerapan APU PPT berbasis risiko sekaligus memberikan simulasi dan studi kasus sehingga dapat membantu PJK segera mengimplementasikan penerapan program APU PPT berbasis risiko secara efektif.

Workshops concerning implementation of the risk-based AML/CTF program have been organised since 2017 and, thus far, have reached representatives from 692 financial services providers as participants. Of the total participants, 100% of commercial banks, 12% of rural banks, 81% of financial services providers in the capital market and 33% of financial services providers in the non-bank financial industry have been represented at the workshops. The workshops present materials and explain risk-based AML/CTF program implementation, while running simulations and providing case studies to help financial services providers effectively and immediately implement the risk-based AML/CTF program. OJK plans to continue organising such workshops.

Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT

Koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT dilakukan oleh OJK dalam ruang lingkup multilateral dan bilateral. Dalam ruang lingkup multilateral, telah dibentuk Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT (Komite TPPU) yang diketuai oleh Menkopolhukam dan beranggotakan Kementerian/Lembaga terkait termasuk OJK serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI.

Peran aktif OJK dalam Komite tersebut dituangkan dalam penyusunan dan pemenuhan Rencana Aksi pada Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU TPPT (Stranas TPPU). Selama 2019, OJK berhasil memenuhi 100% atas 31 Rencana Aksi yang menjadi tanggung jawab OJK meliputi: a) pengkinian SRA; b) penyusunan SRA pada FinTech; c) pencegahan dan pemberantasan investasi ilegal berbasis layanan teknologi; d) penyempurnaan regulasi program APU PPT; e) penyediaan pedoman APU PPT; f) efektivitas pengawasan APU PPT berbasis risiko; g) penerapan program APU PPT pada FinTech; h) peningkatan tingkat inklusi keuangan dalam rangka mitigasi risiko TPPU dan TPPT; i) identifikasi *legal arrangements* di Indonesia; j) kerja sama antar instansi dalam dan luar negeri untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT; k) efektivitas peran Indonesia dalam forum FATF.

Selanjutnya, dalam ruang lingkup koordinasi bilateral, telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara OJK dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 19 Februari 2019 di Jakarta. Nota Kesepahaman antara OJK dan PPATK merupakan perpanjangan dari kesepakatan sebelumnya. Kerjasama antara OJK dengan PPATK merupakan bentuk sinergi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, sekaligus upaya meningkatkan integritas dan kredibilitas sistem keuangan Indonesia. Dengan Nota Kesepahaman ini diharapkan OJK dan PPATK dapat melanjutkan kerja sama yang efektif sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Kerja sama OJK dan PPATK dilakukan dalam ruang lingkup antara lain pertukaran informasi, penyusunan ketentuan hukum dan/atau pedoman, koordinasi pemeriksaan (audit), edukasi dan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian atau riset, serta pengembangan sistem teknologi informasi.

II.2.3 Penguatan dan Penataan SJK Sesuai Standar Internasional

II.2.3.1 *Mutual Evaluation Review*

Berdasarkan hasil sidang *Financial Action Task Force* (FATF) *Plenary Meeting* pada Oktober 2018 di Paris, rangkaian *Mutual Evaluation Review* (MER) Indonesia oleh FATF dimulai pada September 2019. MER merupakan salah satu prosedur yang harus dilalui Indonesia untuk memperoleh keanggotaan penuh dalam FATF. Proses MER fokus pada penilaian kecukupan pengaturan

National Coordination for the Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing

Multilateral and bilateral national coordination for the prevention and eradication of money laundering and terrorism financing has been performed by OJK. Multilaterally, the National Coordination Committee for the Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing (TPPU Committee) was established, headed by the Coordinating Minister for Politics, Law and Security, which is directly responsible to the President of the Republic of Indonesia and membership is made up of relevant government ministries and agencies, including OJK.

OJK's active role in the TPPU Committee includes compiling and fulfilling the Action Plan of the National TPPU/TPPT Prevention and Eradication Strategy (Stranas TPPU). In 2019, OJK successfully fulfilled 100% of the 31 action plans under its responsibility, including: a) updating the sectoral risk assessment; b) compiling the sectoral risk assessment for FinTech; c) preventing and eradicating digital-based illegal investment activity; d) refining regulations concerning the AML/CTF program; e) providing AML/CTF guidelines; f) implementing effective risk-based AML/CTF supervision; g) implementing the AML/CTF program in the FinTech industry; h) increasing financial inclusion to mitigate the risk of money laundering and terrorism financing; i) identifying the legal arrangements in Indonesia; j) cooperating with domestic and international institutions to prevent and eradicate money laundering and terrorism financing; k) increasing the effectiveness of Indonesia's contribution in the FATF forum.

Bilaterally, OJK signed a Memorandum of Understanding with the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC) on 19th February 2019 in Jakarta. The Memorandum of Understanding between OJK and INTRAC is an extension of the previous agreement as a form of synergy to prevent and eradicate money laundering and terrorism financing, while simultaneously enhancing the integrity and credibility of the financial system in Indonesia. The Memorandum of Understanding facilitates effective cooperation between OJK and INTRAC in terms of implementing the tasks, functions and authority of each respective institution towards efforts to prevent and eradicate money laundering and terrorism financing. The scope of cooperation between OJK and INTRAC includes exchanging information, compiling legal regulations and/or guidelines, coordinated audits, education and socialisation activities, education and training, research as well as information technology system development.

II.2.3 Strengthening and Structuring the Financial Services Sector in accordance with International Standards

II.2.3.1 Mutual Evaluation Review

Based on the results of the Financial Action Task Force (FATF) Plenary Meeting held in October 2018 in Paris, the Mutual Evaluation Review (MER) of Indonesia by the Financial Action Task Force (FATF) began in September 2019. The Mutual Evaluation Review is prerequisite for Indonesia's full membership of FATF, which evaluates the regulatory scope and implementation effectiveness of AML/CTF

dan efektivitas implementasi program APU PPT di Indonesia dengan standar FATF. Hasil MER Indonesia akan ditetapkan pada FATF *Plenary Meeting* yang direncanakan diselenggarakan pada Juni 2021.

Selama 2019, OJK secara intensif mempersiapkan pelaksanaan MER FATF dengan berkoordinasi aktif dengan industri jasa keuangan dan asosiasi sektor jasa keuangan khususnya terkait penilaian efektivitas implementasi program APU PPT dalam konteks pencegahan (*preventive measures*). Koordinasi dilakukan dalam bentuk *Focus Group Discussion* persiapan MER, rapat pembahasan, dan partisipasi OJK sebagai narasumber pada pelatihan APU PPT yang diselenggarakan oleh asosiasi.

Upaya persiapan MER FATF oleh OJK juga difokuskan pada penyusunan jawaban atas kuesioner *Technical Compliance* dan kuesioner efektivitas implementasi rekomendasi FATF (*Immediate Outcomes*) yang relevan dengan tugas dan fungsi OJK serta penerapan APU PPT di sektor jasa keuangan. Dengan berbagai upaya intensif tersebut, OJK telah menyampaikan jawaban atas kuesioner *Technical Compliance* dan kuesioner *Immediate Outcome* kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selaku koordinator nasional persiapan MER FATF, melalui surat resmi masing-masing pada tanggal 21 Juni 2019 dan 23 September 2019.

Adapun salah satu agenda penting MER FATF pada 2019 adalah pelaksanaan FATF *Indonesia Country Training - Pre Mutual Evaluation Workshop* pada 8 - 9 Agustus 2019 di Bandung yang bertujuan untuk membahas metodologi penilaian MER dan melakukan *mock-up interview*. Narasumber pada kegiatan ini adalah perwakilan FATF Secretariat yaitu David Lewis - FATF Executive Secretary, Ashish Kumar dan Ailsa Hart, serta dihadiri oleh perwakilan Kementerian/Lembaga yang berperan dalam rezim APU PPT di Indonesia, termasuk OJK.

OJK, sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur terbesar di APU PPT Indonesia, memanfaatkan kegiatan FATF *Country Training* tersebut untuk menggali informasi dan menyusun strategi menghadapi MER FATF, serta memberikan impresi yang baik kepada perwakilan FATF *Secretariat* tentang kesiapan OJK khususnya saat *mock-up interview*. Sebelum pelaksanaan FATF *Country Training* tersebut, OJK bersama dengan tim *technical assistance* dari *International Monetary Fund* (IMF) telah terlebih dahulu melakukan *mock-up interview* pada 15-16 Juli 2019 di Jakarta yang bertujuan untuk memberikan pengalaman dan mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan saat pelaksanaan wawancara pada *on-site visit* yang sebenarnya.

OJK juga turut berpartisipasi dalam training persiapan menjadi *assessor* yang diselenggarakan oleh FATF dan *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG) pada 2-6 September 2019 di Bandung. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kewajiban Indonesia, sebagai anggota APG dan nantinya sebagai anggota FATF, untuk melakukan *peer review* atas kepatuhan rezim APU PPT di negara anggota lainnya.

program implementation in Indonesia based on FATF standards. The results of Indonesia's MER will be delivered at the Plenary Meeting planned for June 2021 in Paris.

In 2019, OJK undertook intensive preparations for MER implementation, including active coordination with the financial services industry and financial services sector associations in terms of evaluating the implementation effectiveness of the AML/CTF program in the context of preventative measures. Coordination was achieved through Focus Group Discussions (FGD), discussion meetings and OJK participation as speakers at the AML/CTF training organised by financial services sector associations.

MER preparations by OJK also focused on responding to the technical compliance questionnaire and effective implementation of FATF recommendations (immediate outcomes) questionnaire relevant to the tasks and function of OJK as well as AML/CTF preparations in the financial services sector. Through intensive efforts, OJK submitted its response to the Technical Compliance and Immediate Outcome questionnaires to the Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC), as national coordinator of MER preparations, through official letters dated 21st June 2019 and 23rd September 2019.

A salient MER agenda item in 2019 was implementation of the Indonesia Country Training - Pre-Mutual Evaluation Workshop held on 8-9th August 2019 in Bandung to discuss the assessment methodology and conduct mock-up interviews. Speakers at the event included representatives from the FATF Secretariat, namely David Lewis as the FATF Executive Secretary, Ashish Kumar and Alisa Hart, which was and also attended by representatives from government ministries and agencies involved with the AML/CTF regime in Indonesia, including OJK.

As the dominant supervisory and regulatory institution involved with Indonesia's AML/CTF regime, OJK maximised the benefits of FATF Country Training to collect information and prepare an MER strategy, while simultaneously presenting a good impression to representatives from the FATF Secretariat in terms of OJK's preparedness, particularly during the mock-up interviews. Prior to FATF Country Training, OJK had already implemented mock-up interviews with a technical assistance team from the International Monetary Fund (IMF) on 15-16th July 2019 in Jakarta, which provided valuable experience and identified potential areas for improvement before the real interviews during the actual on-site visit.

OJK also participated in assessor training organised by FATF and the Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG), held on 2-6th September 2019 in Bandung. Assessor training is mandatory for Indonesia as a member of the APG and prospective member of FATF and includes a peer review of AML/CTF regime compliance in member countries.

II.2.3.2 *Regulatory Consistency Assessment Programme* (RCAP)

Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS) dengan tujuan untuk melihat konsistensi dari regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas suatu negara dengan standar perbankan internasional yang diterbitkan oleh BCBS. RCAP dilakukan terhadap seluruh negara anggota BCBS (28 yurisdiksi), termasuk Indonesia. Berdasarkan hasil RCAP tersebut, BCBS akan mengeluarkan penilaian yang terdiri atas *compliant*, *largely compliant*, *materially non-compliant* dan *non-compliant*.

Pada 2016, Indonesia telah meraih nilai *compliant* untuk RCAP kerangka *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *largely compliant* untuk RCAP kerangka Permodalan (Capital). Sejak 2018, OJK telah mempersiapkan pelaksanaan RCAP untuk kerangka *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan *Large Exposures* (LEX) dengan membentuk *task force* dan melakukan *self-assessment* yang bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka Basel dengan ketentuan yang berlaku. Pada 2019, OJK telah melakukan pertemuan *on-site assessment* dengan tim *asesor* RCAP NSFR dan LEX yang menghasilkan *preliminary grading* dan *draft report* RCAP NSFR dan LEX. Hasil akhir penilaian RCAP NSFR dan LEX Indonesia akan ditetapkan pada pertemuan Komite Basel pada triwulan I-2020.

II.2.3.2 Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP)

The Regulatory Consistency Assessment Program (RCA) is performed by the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) to assess regulatory consistency in a member country against international banking standards issued by BCBS. RCAP is applicable to all BCBS members (28 jurisdictions), including Indonesia. Based on the RCAP, BCBS gives the member country a grade, namely compliant, largely compliant, materially non-compliant or non-compliant.

In 2016, Indonesia received a compliant grade in terms of the Liquidity Coverage Ratio (LCR) and a largely compliant grade in terms of capital. In 2018, OJK prepared for a RCAP on the Net Stable Funding Ratio (NSFR) and Large Exposures (LEX) by establishing a task force and conducting a self-assessment to identify gaps between the Basel framework and prevailing regulations in Indonesia. In 2019, OJK organised an on-site assessment with the NSFR and LEX RCAP assessor team, which conducted a preliminary grading and draft report. The final assessment will be determined at a Basel Committee meeting in the first quarter of 2020.

II.3 OPTIMALISASI PERAN SEKTOR JASA KEUANGAN DALAM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

II.3.1 Mendorong Perkembangan Sektor Ekonomi Prioritas Pemerintah

II.3.1.1 Sektor Infrastruktur

Infrastruktur merupakan salah satu aspek vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Dengan tersedianya infrastruktur yang baik, diharapkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi akan semakin baik. Saat ini pembangunan infrastruktur menjadi prioritas Pemerintah di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Selama 2019, kredit infrastruktur tercatat tumbuh 14,82% (*yoy*) menjadi Rp794,29 triliun. Porsi kredit infrastruktur didominasi oleh sektor bangunan sipil (23,57%), ketenagalistrikan (22,94%), dan jalan raya (20,63%). Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah yaitu Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW dan pembangunan jalan tol serta sarana transportasi guna meningkatkan daya saing nasional dan pemerataan hasil pembangunan. Secara umum, NPL kredit infrastruktur masih terjaga yaitu sebesar 2,17% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,60%.

II.3 FINANCIAL SERVICES SECTOR OPTIMISATION TO ACCELERATE NATIONAL ECONOMIC GROWTH

II.3.1 Fostering Development of Priority Economic Sectors

II.3.1.1 Sectors Infrastructure

Infrastructure is an essential aspect of accelerating the national development process. The availability of adeqaute infrastructure it is expected to foster equitable economic growth. Currently, infrastructure development is a government priority, as stipulated in the Medium-Term National Development Plan (RPJMN) for 2015-2019.

In 2019, infrastructure loans recorded 14.82% (yoy) growth to a level of Rp794.29 trillion. Infrastructure loans were dominated by civil buildings (23.57%), electrical power (22.94%) and the road network (20.63%). This is consistent with the large-scale government program to construct a 35,000MW power plant project, build additional toll road sections as well as other transportation modes in order to increase national competitiveness and ensure equitable development. In general, the NPL of infrastructure loans was contained at 2.17%, down from 2.60% in the previous year.

Tren dan Kualitas Kredit Infrastruktur

Trend and Quality of Infrastructure Loans

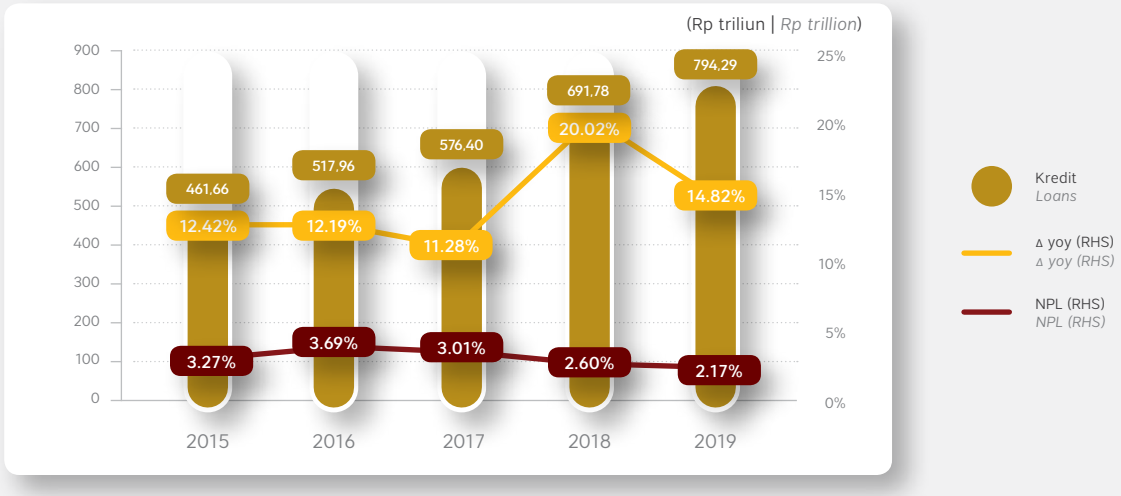

Sumber: OJK
Source: OJK

Perkembangan Kredit Sektor Infrastruktur

Loan Performance by Infrastructure Subsector

Kelompok Infrastruktur Berdasarkan RPJMN	Nominal (Rp miliar) Nominal (Rp billions)		Pertumbuhan Growth		NPL NPL		Infrastructure
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
Transportasi Sungai dan Penyebrangan	4.071	3.874	-1,13%	-4,83%	2,18%	7,19%	River Transportation and Crossing
Bangunan Sipil	185.882	187.236	12,41%	0,73%	4,91%	5,36%	Civil Buildings
Energi dan Gas	6.628	9.025	2,48%	36,17%	19,63%	10,41%	Energy and Gas
Informasi dan Telekomunikasi	80.109	92.598	35,75%	15,59%	0,81%	0,95%	Information and Telecommunications
Jalan Kereta Api	14.070	16.069	15,08%	14,20%	0,37%	0,30%	Railways
Jalan Raya	116.314	163.883	54,37%	40,90%	1,73%	0,88%	Roads
Ketenagalistrikan	156.211	182.201	15,14%	16,64%	0,61%	0,45%	Electrical Power
Pengadaan dan Penyaluran Air Bersih	3.753	4.127	45,30%	9,97%	0,26%	0,44%	Water Supply and Distribution
Perairan	5.845	5.673	47,82%	-2,94%	0,53%	1,16%	Irrigation
Transportasi Laut	59.307	60.588	0,09%	2,16%	3,85%	3,42%	Sea Transportation
Transportasi Publik	32.504	33.079	-1,97%	1,77%	1,07%	1,28%	Public Transportation
Transportasi Udara	27.090	35.939	40,75%	32,67%	4,08%	0,47%	Air Transportation
Total	**691.784**	**794.291**	**20,02%**	**14,82%**	**2,60%**	**2,17%**	**Total**

Sumber: OJK
Source: OJK

Melalui berbagai instrumennya, sektor Pasar Modal juga menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan Infrastruktur antara lain:

In addition, the Capital Market contributed as an alternative source of infrastructure funding through various instruments, as follows:

Pembiayaan Infrastruktur Melalui Pasar Modal
Infrastructure Financing Through Capital Market

(Rp triliun | *Rp trillion*)

Instrumen Pasar Modal	Jumlah Total	Capital Market Instrument
Penawaran Umum	15,40	Public Offerings
Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Sektor Riil	27,43 (72 RDPT)	Private Equity Funds (RDPT) - Real Sector
Efek Beragun Aset - Surat Partisipasi (EBA SP)	4,69	Asset-Backed Securities - Participatory Notes (EBA-SP)
Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Saham (KIK-EBA)	6,78 (8 KIK-EBA)	Asset-Backed Securities - Collective Investment Contracts (KIK-EBA)
Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estate (KIK-DIRE)	11,34 (7 KIK-DIRE)	Real Estate Investment Funds - Collective Investment Contracts (KIK-DIRE)
Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA)	6,98 (8 KIK-DINFRA)	Infrastructure Investment Fund - Collective Investment Contracts (DINFRA)

Penyaluran pembiayaan infrastruktur oleh sektor IKNB dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur dengan rincian sebagai berikut:

Infrastructure financing was also extended by the non-bank financial industry through finance companies and infrastructure finance companies summarised as follows:

Pembiayaan Infrastruktur Oleh Perusahaan Pembiayaan
Infrastructure Financing Disbursed by Finance Companies

(Rp triliun | *Rp trillion*)

Pembiayaan Infrastruktur	2019	Infrastructure Financing
Pelabuhan Laut dan Sungai	0,06	Sea and River Ports
Jalan	0,01	Roads
Instalasi Pengolahan Air Minum	0,01	Drinking Water Management Installations
Jaringan Telekomunikasi	1,22	Telecommunications Network
Pembangkit Listrik	12,84	Electricity Power Plants
Instalasi Minyak dan Gas	0,003	Oil and Gas Installations
Total	**14,13**	**Total**

Pembiayaan Infrastruktur Oleh Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur
Infrastructure Financing Disbursed by Infrastructure Finance Companies

(Rp triliun | *Rp trillion*)

Pembiayaan Infrastruktur	2019	Infrastructure Financing
Air Minum	0,62	Drinking Water
Aircraft Maintenance	0,46	Aircraft Maintenance
Energi	0,56	Energy
Fuel Terminal Automatization System	0,14	Fuel Terminal Automatization System
Infrastruktur Kawasan	0,01	Regional Infrastructure
Jalan dan Transportasi	27,85	Roads and Transportation
Ketenagalistrikan	20,02	Electrical Power
Lainnya	3,11	Other Infrastructure
Minyak dan Gas	2,60	Oil and Gas
Multisektor	0,30	Multisector
Sosial	3,11	Social
Telekomunikasi	4,79	Telecommunications
Instalasi Pengairan	1,26	Irrigation
Total	**64.83**	**Total**

II.3.1.2 Sektor Pariwisata

Kredit sektor pariwisata tumbuh 8,08% (*yoy*) lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh subsektor hotel bintang (porsi 38,90%) yang tumbuh 4,48% (*yoy*), dengan NPL sebesar 4,68% turun dari 5,03% di 2018. Secara keseluruhan, NPL kredit pariwisata sebesar 4,59%, menurun dari 5,30% pada tahun sebelumnya.

II.3.1.2 Tourism Sector

In 2019, growth of tourism loans accelerated to 8.08% (yoy), dominated by loans allocated to star-rated hotels, accounting for 38.90% of the total and expanding 4.48% (yoy), with NPL declining to 4.68% from 5.03% in 2018. Overall, the NPL of tourism loans was recorded at 4.59% in 2019, down from 5.30% in the previous year.

Tren dan Kualitas Kredit Pariwisata

Trend and Quality of Tourism Loans

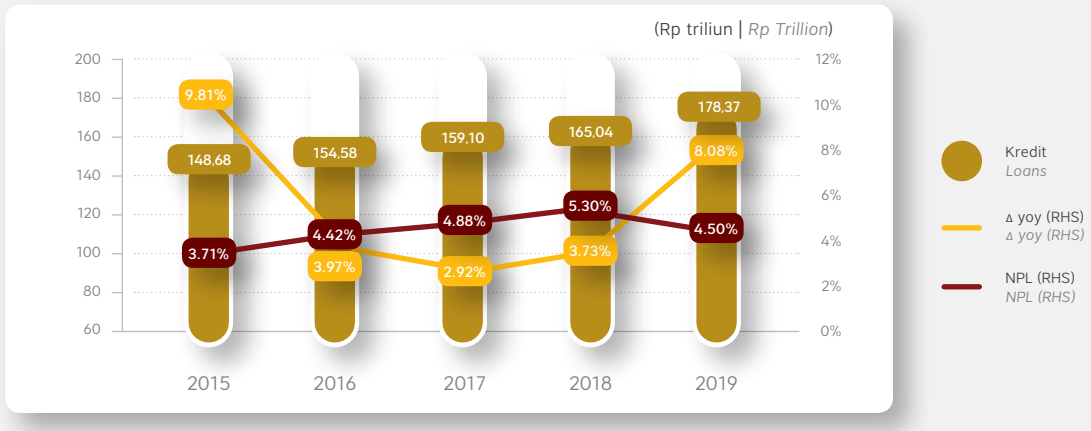

Sumber: OJK
Source: OJK

Perkembangan Kredit Sektor Pariwisata

Loan Performance by Tourism Subsector

Sektor Ekonomi	Nominal (Rp miliar) Nominal (Rp billions)		Δ yoy Δ yoy		NPL NPL		Economic Sector
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
Hotel Bintang	66.409	69.382	0,43%	4,48%	5,03%	4,68%	Star-Rated Hotels
Hotel Melati	3.634	3.783	1,18%	4,08%	5,16%	3,64%	Budget Hotels
Jasa Akomodasi Lainnya	12.059	14.619	6,10%	21,23%	13,28%	12,03%	Other Accommodation Services
Penyediaan Makan Minum Lainnya	3.631	6.519	-0,61%	79,53%	2,50%	1,50%	Other Food and Beverage Services
Restoran / Rumah Makan	13.987	15.539	6,24%	11,10%	2,80%	5,61%	Restaurants
Angkutan Jalan Rel	9.371	10.935	3,85%	16,69%	0,13%	0,13%	Rail Transportation
Angkutan Jalan Tidak Dalam Trayek Untuk Penumpang	4.229	4.186	13,06%	-1,02%	15,33%	3,00%	Road Freight
Angkutan Laut Domestik	42.080	43.816	7,24%	4,13%	4,60%	3,08%	Domestic Sea Transportation
Angkutan Sungai dan Danau	1.622	1.549	-4,13%	-4,53%	5,42%	13,36%	River and Lake Transportation
Jasa Perjalanan Wisata	4.907	5.313	12,28%	8,28%	6,56%	4,42%	Travel Services
Kawasan Pariwisata dan Penyediaan Sarana Wisata Tirta Kawasan Pariwisata	2.129	1.977	-4,40%	-7,11%	5,95%	6,97%	Travel Destinations and Services
Perpustakaan, Arsip, Museum, dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya	982	753	8,69%	-23,28%	0,50%	1,10%	Library, Archives, Museums and Other Cultural Activities
Total	**165.039**	**178.371**	**3,73%**	**8,08%**	**5,30%**	**4,59%**	**Total**

Sumber: OJK
Source: OJK

II.3.1.3 Sektor Perumahan

Pada 2019, Kredit sektor perumahan tumbuh 7,32% (*yoy*). Kredit perumahan didominasi subsektor pemilikan rumah tinggal tipe 22 s.d 70 (57,68%) dan tipe di atas 70 (28,85%). Secara umum, risiko kredit sektor perumahan masih terjaga dengan NPL sebesar 2,62%.

II.3.1.3 Housing Sector

In 2019, housing loans grew 7.32% (yoy), dominated by residences measuring 22-70m2 (57.68%) as well as those exceeding 70m2. In general, credit risk in the housing sector was contained, as reflected by an NPL ratio of 2.62%

Tren dan Kualitas Kredit Perumahan

Trend and Quality of Housing Loans

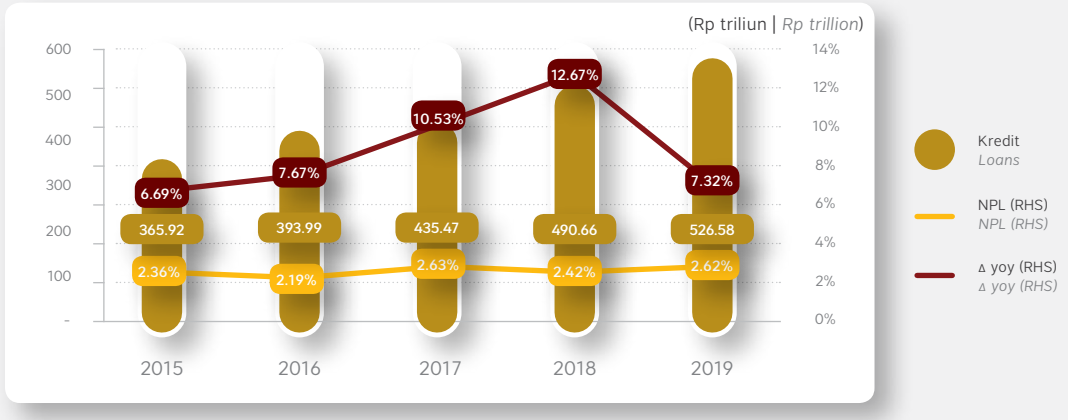

Sumber: OJK

Source: OJK

Perkembangan Kredit Sektor Perumahan

Loan Performance by Housing Subsector

Sektor Perumahan	Nominal (Rp triliun) Nominal (Rp trillion)		Δ yoy Δ yoy		NPL NPL		Housing Subsector
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
Pemilikan Rumah Tinggal s.d. Tipe 21	27,34	24,27	2,41%	-11,20%	2,10%	2,60%	Houses up to 21m2
Pemilikan Rumah Tinggal Tipe 22 s.d. 70	274,57	303,73	17,65%	10,62%	1,97%	2,26%	Houses of 22-70m2
Pemilikan Rumah Tinggal Tipe Diatas 70	143,29	151,92	7,87%	6,02%	3,00%	3,05%	Houses larger than 70m2
Pemilikan Flat atau Apartemen s.d. Tipe 21	0,95	1,06	2,82%	11,15%	7,39%	2,44%	Flats or Apartments up to 21m2
Pemilikan Flat atau Apartemen Tipe 22 s.d. 70	11,07	12,54	35,85%	13,29%	1,71%	1,70%	Flats or Apartments of 22-70m2
Pemilikan Flat atau Apartemen Tipe Diatas 70	7,90	8,72	23,97%	10,38%	1,32%	1,25%	Flats or Apartments larger than 70m2
Pemilikan Rumah Toko (Ruko) atau Rumah Kantor (Rukan)	25,55	24,34	-5,79%	-4,73%	4,80%	5,56%	Shophouses/Office H
Total	**490,66**	**526,58**	**12,67%**	**7,32%**	**2,42%**	**2,62%**	**Total**

Sumber: OJK

Source: OJK

II.3.1.4 Sektor Ekonomi Kreatif

Kredit ekonomi kreatif tumbuh 5,73% (*yoy*) atau lebih rendah dari 7,25% (*yoy*) di 2018. Perlambatan kredit ekonomi kreatif utamanya disebabkan turunnya kredit subsektor bidang usaha arsitektur yang turun -15,14% (*yoy*) dan bidang usaha penerbitan yang turun -2,94% (*yoy*). Secara keseluruhan, risiko kredit ekonomi kreatif meningkat dengan NPL sebesar 5,94% (Desember 2019) atau naik dari 3,26% (Desember 2018).

II.3.1.4 Creative Economy

Loans extended to the creative economy grew 5.73% (yoy) in 2019, down from 7.25% (yoy) in 2018, held back by architecture and publishing, which shrank -15.14% (yoy) and -2.94% (yoy) respectively. NPL in the creative economy, as a measure of credit risk, increased to 5.94% in December 2019 from 3.26% in December 2018.

Tren Kredit dan Kualitas Kredit Ekonomi Kreatif

Trend and Quality of Creative Economy Loans

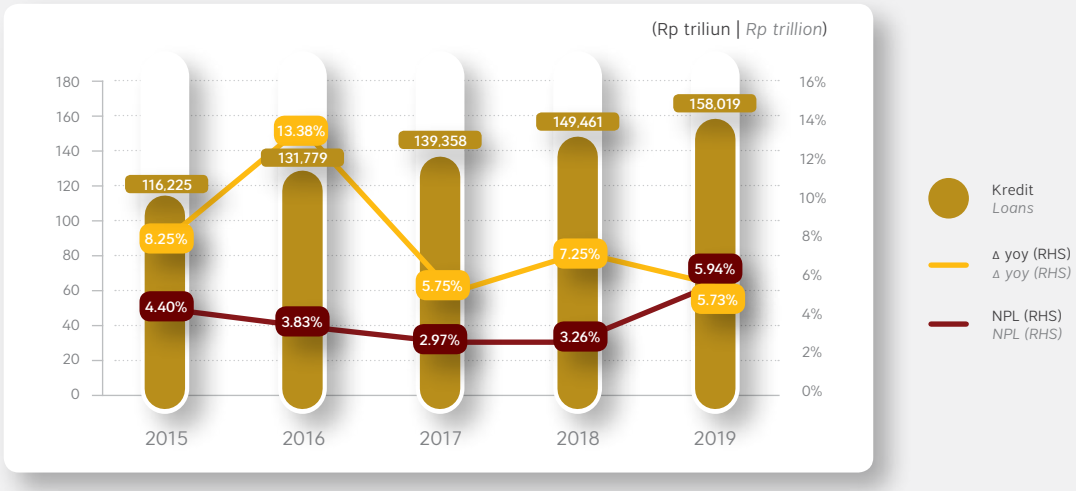

Sumber: OJK
Source: OJK

Perkembangan Kredit Sektor Ekonomi Kreatif

Trend and Quality of Creative Economy Loans

Bidang Usaha	Nominal (Rp miliar) Nominal (Rp billions)		Pertumbuhan Growth		NPL NPL		Subsector
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
Fashion	22.315	25.786	11,58%	15,55%	2,76%	4,37%	Fashion
Penerbitan	12.227	11.868	-4,57%	-2,94%	6,61%	6,88%	Publishing
Film, Animasi dan Video	657	664	-38,80%	1,13%	1,21%	0,03%	Film, Animation and Video
Televisi dan Radio	1.710	1.959	-1,64%	14,56%	10,36%	2,92%	Television and Radio
Fotografi	41.162	42.196	9,01%	2,51%	3,16%	5,66%	Photography
Kriya	1.405	1.208	58,76%	-14,00%	5,43%	5,03%	Handicrafts
Kuliner	17.618	22.058	4,75%	25,20%	2,74%	4,40%	Culinary
Aplikasi dan Game Developer	2.296	3.252	31,79%	41,62%	0,20%	0,42%	Application and Game Developers
Arsitektur	5.161	4.380	39,64%	-15,14%	2,48%	3,90%	Architecture
Periklanan	4.430	4.522	24,84%	2,07%	2,60%	1,87%	Advertising
Musik	40.479	40.127	3,04%	-0,87%	2,88%	9,23%	Music
Total	**149.461**	**158.019**	**7,25%**	**5,73%**	**3,26%**	**5,94%**	**Total**

Sumber: OJK
Source: OJK

Pembiayaan Ekonomi Kreatif juga dilakukan di bidang IKNB yang bertujuan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan Perusahaan Pembiayaan pada Sektor Produktif khususnya di sektor industri kreatif berorientasi ekspor dan UMKM, meningkatkan sinergi antar industri di IKNB, dan mendukung program Pemerintah dalam rangka meningkatkan pembiayaan ekspor pada ekonomi kreatif. Pada 2019, total penyaluran pembiayaan di sektor ekonomi kreatif sebesar Rp46,68 triliun. Sektor pembiayaan ekonomi kreatif mayoritas berasal dari subsektor kriya dengan porsi mencapai 34,23% serta subsektor kuliner sebesar 27,72%.

Creative Economy Financing Program is also carried out in the aim of IKNB to increase disbursed financing from Financing Companies allocated to export-oriented creative industries as well as micro, small and medium enterprises (MSME), build synergy between industries under the umbrella of the non-bank financial industry and support government programs to increase export financing in the creative economy. In 2019, total disbursed financing in the creative economy stood at Rp46.68 trillion, dominated by handicrafts at 34.23% as well as culinary at 27.72%.

Penyaluran Pembiayaan Ekonomi Kreatif
Disbursed Financing in the Creative Economy



(Rp triliun | *Rp trillion*)

Ekonomi Kreatif	2019	Creative Economy
Arsitektur	0,89	Architecture
Desain Interior, Desain Komunikasi Visual, dan Desain Produk	3,11	Interior Design, Visual Communication Design and Product Design
Film, Animasi, dan Video	0,16	Film, Animation and Video
Fotografi	1,46	Photography
Kriya	15,98	Handicrafts
Kuliner	12,94	Culinary
Musik	0,97	Music
Fashion	5,61	Fashion
Pengembang Aplikasi dan Permainan	0,78	Application and Game Developers
Penerbitan	1,73	Publishing
Periklanan	1,17	Advertising
Televisi dan Radio	1,00	Television and Radio
Seni Pertunjukan	0,09	Performing Arts
Seni Rupa	0,78	Fine Arts
Total	**46,68**	**Total**

II.3.1.5 Sektor Pertanian

Kredit pertanian tumbuh melambat di 2019 yaitu sebesar 1,17% (*yoy*) jauh lebih rendah dari 12,03% (*yoy*) di 2018. Perlambatan kredit pertanian didorong oleh turunnya kredit subsektor perkebunan kelapa sawit sebesar -1,25% (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 11,12% (*yoy*). Penurunan tersebut ditengarai akibat isu *black campaign* terhadap penggunaan minyak kelapa sawit oleh Eropa dan berdampak pada turunnya ekspor kelapa sawit domestik sehingga mempengaruhi pendapatan usaha industri kelapa sawit. Secara keseluruhan, kredit pertanian memiliki risiko kredit yang rendah dengan NPL sebesar 1,48% meskipun meningkat dari 1,24% pada tahun sebelumnya.

II.3.1.5 Agricultural Sector

Loans extended to the agricultural sector decelerated significantly in 2019 to 1.17% (yoy) from 12.03% (yoy) in 2018. The main drag on growth was the palm oil subsector, to which loans contracted -1.25% (yoy) after expanding 11.12% (yoy) one year earlier. The significant decline was triggered by a black campaign against palm oil use in Europe, which impacted domestic palm oil exports and severely undermined business revenue in the subsector. Overall, agricultural loans maintained a low NPL ratio at 1.48% despite increasing from 1.24% in the previous year.

Tren dan Kualitas Kredit Pertanian
Trend and Quality of Agricultural Loans

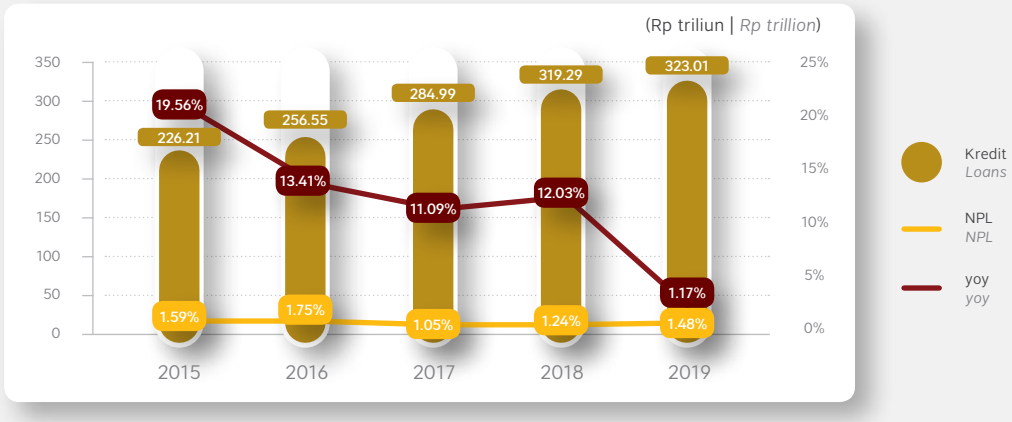

Sumber: OJK
Source: OJK

Perkembangan Kredit Sektor Pertanian
Loan Performance by Agricultural Subsector

Subsektor	Nominal (Rp miliar) Nominal (Rp billions)		Pertumbuhan Growth		NPL NPL		Subsector
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	
Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan	38.066	44.064	15,76%	18,14%	3,69%	3,57%	Food and Plantation Crops
Pertanian Hortikultura Sayuran dan Bunga-bungaan	5.015	6.047	20,58%	20,04%	1,64%	1,58%	Horticulture
Pertanian Buah-buahan, Perkebunan Kelapa, Tanaman Untuk Minuman, Jambu Mete, dan Tanaman Untuk Rempah	12.551	12.551	0,01%	10,85%	1,25%	1,34%	Fruit, Coconut, Crops for Beverages, Cashew, Herbs
Perkebunan Kelapa Sawit	263.654	260.352	-1,25%	11,12%	1,11%	0,89%	Palm Oil
Total	**319.286**	**323.015**	**1,17%**	**12,03%**	**1,48%**	**1,24%**	**Total**

Sumber: OJK
Source: OJK

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dibentuk untuk memberikan bantuan modal kerja kepada petani akibat kegagalan panen akibat kerusakan pertanian. Tanggungan kerugian atas kerusakan usaha tani padi diharapkan dapat menstabilkan pendapatan petani. AUTP diperuntukkan untuk areal tanam padi seluas 1 juta ha lahan pertanian, dengan harga pertanggungan sebesar Rp 6 juta/ha. Sementara itu, suku premi asuransi adalah sebesar 3% dari harga pertanggungan, sehingga premi yang dibebankan kepada pemerintah adalah sebesar Rp144.000,00/ha (80%) dan tanggungan kepada petani sebesar Rp36.000,00/ha (20%).

In accordance with Act No. 19 of 2013 concerning Farmer Empowerment and Protection, Rice Farm Insurance (AUTP) was created to provide assistance in the form of working capital for farmers impacted by failed harvests. Such compensation is expected to stabilise farm income. AUTP is intended for farmers with a crop area of 1 million hectares, and the cost of coverage is Rp6 million per hectare. Meanwhile, the premium is 3% of the insurance price. Therefore, the Government bears 80% or Rp144,000.00/hectare and the farmer 20% or Rp36,000.00/hectare.

Sejak peluncuran program AUTP, jumlah peserta petani tertanggung AUTP telah mengalami peningkatan sebesar 243,88% yang sejalan dengan peningkatan total luas lahan pertanian terdaftar sebesar 315,94% di 27 provinsi. Pada 2019, terjadi penurunan jumlah peserta petani. Namun demikian luas lahan pertanian meningkat 7,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah premi yang dibayarkan sebesar 8,09%.

Since launch, the number of participating farmers in the AUTP program has increased 243.88% in line with the 315.94% increase of registered arable land in 27 provinces. In 2019, however, the number of participating farmers experienced a decline, yet total arable land increased by 7.74% on the previous year. This was in line with an 8.09% increase in total premiums.

Perkembangan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)
AUTP Program Developments

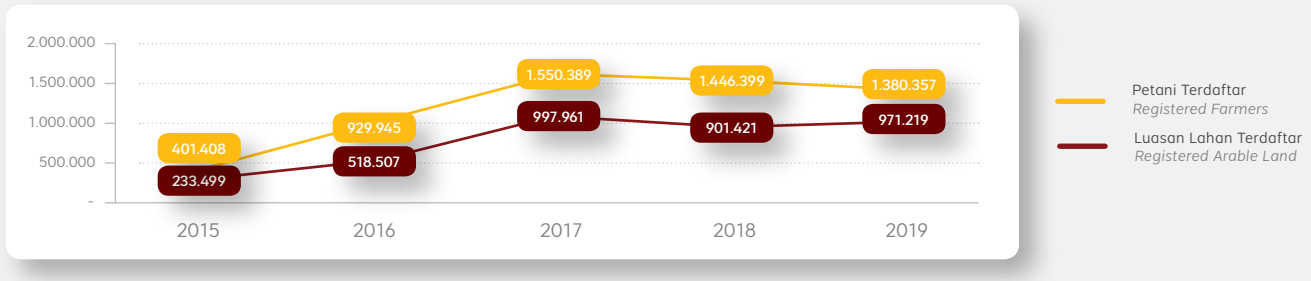

Premi dan Klaim AUTP
AUTP Program Premiums and Claims

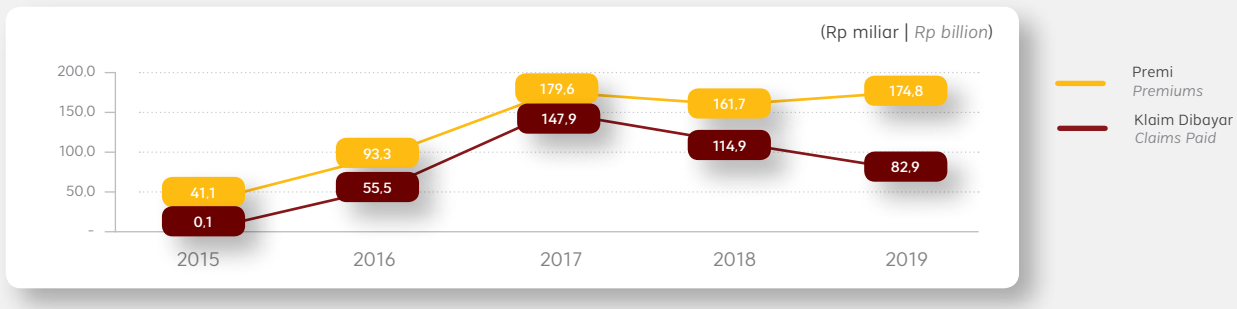

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada peternak sapi dari kejadian kematian maupun kehilangan sapi dengan pemberian dana ganti rugi asuransi sebagai modal untuk membeli penggantian sapi. Jumlah peternak yang mengikuti program AUTS pada 2019 mengalami penurunan sebesar 10,50% dari tahun sebelumnya. Namun demikan, jumlah sapi yang ditanggung mengalami peningkatan sebesar 16,83% hingga mencapai target yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian.

In addition, Cattle Insurance (AUTS) was also launched to provide protection to cattle breeder against death or loss of cattle through compensation as working capital to replace beef cattle. The number of participating farmers in the AUTS program declined 10.50% in 2019 compared with conditions in the previous year. Nevertheless, head of cattle insured increased by 16.83% to reach the target set by the Ministry of Agriculture.

Perkembangan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)
AUTS Program Developments

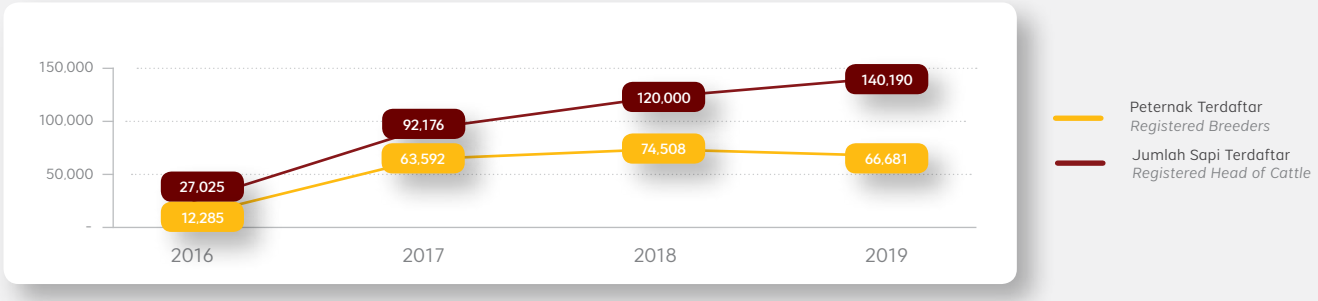

Jumlah premi yang dibayarkan pada 2019 mengalami peningkatan sebesar 16,83% dari tahun sebelumnya. Sementara klaim mengalami penurunan sebesar 60,73%.

Total premiums paid in 2019 increased 16.83% on the previous year, contrasting the 60.73% decline of claims.

Premi dan Klaim AUTS
AUTS Program Premiums and Claims

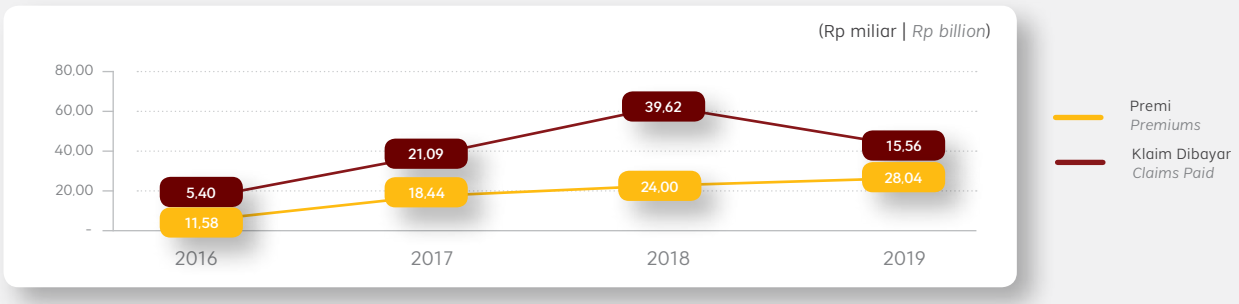

II.3.1.6 Sektor Kelautan dan Perikanan

Program JARING (Jangkau, Sinergi, dan *Guideline*) merupakan program inisiatif OJK dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam pembiayaan pada sektor Kelautan dan Perikanan. Sampai akhir 2019, penyaluran kredit program JARING sebesar Rp34,06 triliun atau tumbuh 6,06% (*yoy*), melambat dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 12,77% (*yoy*). Risiko kredit JARING juga masih terjaga dibawah 5% yaitu sebesar 3,19%, meskipun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (1,38%).

II.3.1.6 Maritime and Fishing Sector

The JARING program (reach, synergy and guidelines) is an OJK initiative in conjunction with the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP) to allocate financing to the maritime and fishing sector. At the end of 2019, disbursed loans through the JARING program totalled Rp34.06 trillion, with growth decelerating to 6.06% (yoy) from 12.77% (yoy) one year earlier. Credit risk was maintained below the 5% threshold at 3.19% despite increasing from 1.38% in the previous year.

Kredit & NPL Sektor Maritim terkait JARING

Maritime Sector Loans and NPL (JARING Program)

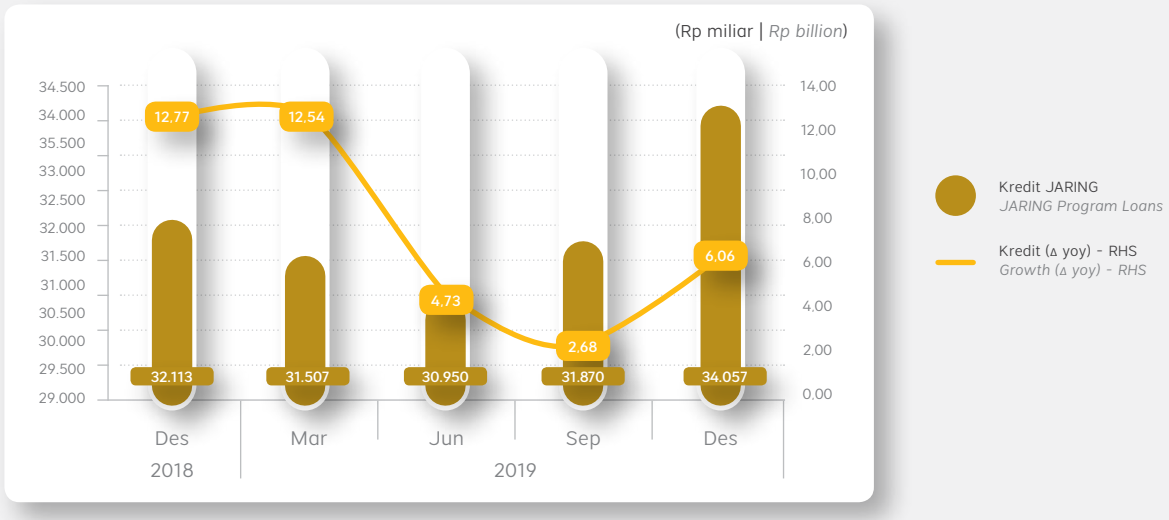

Sumber: OJK
Source: OJK

NPL Kegiatan Usaha Kredit Maritim

Maritime Sector NPL

Kegiatan Usaha	2018 (%)	2019 (%)		Business Activity
	Desember December	September September	Desember December	
Penangkapan Ikan	2,16	9,20	8,76	Fishing
Budidaya	1,20	1,53	1,49	Aquaculture
Jasa sarana produksi	2,92	2,73	3,44	Production Services
Industri Pengolahan	0,33	0,48	0,37	Processing Industry
Perdagangan	1,75	2,79	2,83	Trade
Total NPL	**1,38**	**3,34**	**3,19**	**Total NPL**

Sumber: OJK
Source: OJK

Program Asuransi Nelayan ditargetkan untuk 600.000 nelayan dengan jumlah premi sebesar Rp175.000,00 yang sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Asuransi Nelayan menanggung santunan kecelakaan pada saat melakukan aktivitas penangkapan ikan maupun kecelakaan di luar aktivitas melaut. Pada 2019 jumlah nelayan yang mengikuti asuransi nelayan mengalami peningkatan sebesar 8,02%. Di sisi lain premi dan klaim program ASNEL masing-masing turun sebesar 13,58% dan 88,82% dibandingkan tahun sebelumnya.

The Fishermen Insurance Program targets 600,000 fishermen with each premium totalling Rp175,000,00 fully covered by the Government through the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP). The program provides accident insurance during and outside maritime activities.In 2019, total fishermen participating in the insurance program increased 8.02% due to broad interest in the program. In addition, premiums and claims declined 13.58% and 88.82% respectively on the previous year.

Jumlah Nelayan
Total Fishermen

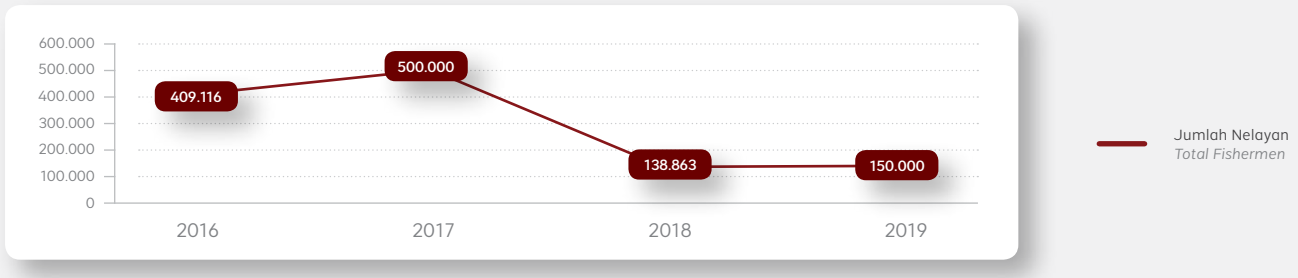

Premi dan Klaim Asuransi Nelayan (ASNEL)
Fishermen Insurance Premiums and Claims

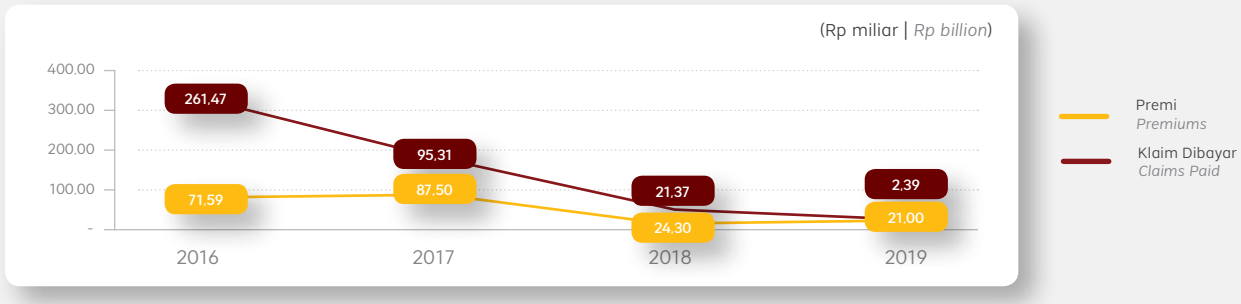

OJK juga mendorong industri untuk memberikan perlindungan risiko pada pembudidaya atas penyakit yang dapat mengakibatkan matinya komoditas perikanan atau kegagalan usaha akibat bencana alam melalui Asuransi Perikanan. Komoditas perikanan yang diasuransikan terdiri dari udang, ikan bandeng, ikan nila payau, ikan nila tawar, ikan patin dan polikultur.

OJK also encourages the industry to provide risk protection for aquaculture farmers against disease resulting in death or losses due to natural disaster. The fishing commodities insured include shrimp, milkfish, brackish tilapia, freshwater tilapia, catfish and polyculture.

Pada 2019, luas lahan terdaftar pada Asuransi Perikanan untuk Pembudidaya Ikan Kecil adalah 72,96 juta m2 dengan total premi sebesar Rp2,73 miliar dengan klaim sebesar Rp3,09 miliar.

In 2019, total registered area under the Fisherman Insurance Program for aquaculture was recorded at 72.96 million m2, with total premiums of Rp2.73 billion and claims of Rp3.09 billion.

II.3.1.7 Sektor Ekspor

Pendirian Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) bertujuan untuk meningkatan kemampuan ekspor nasional. Nilai pembiayaan dan piutang syariah LPEI 2019 mengalami penurunan sebesar 10,11% dari tahun sebelumnya menjadi Rp97,85 triliun.

II.3.1.7 Export Sector

Establishment of Indonesia Eximbank intends to increase national export capacity. The value of Islamic financing and receivables through Indonesia Eximbank declined 10.11% in 2019 compared with conditions in the previous year to Rp97.85 trillion.

Perkembangan Pembiayaan dan Piutang Syariah
Islamic Financing and Receivables Developments

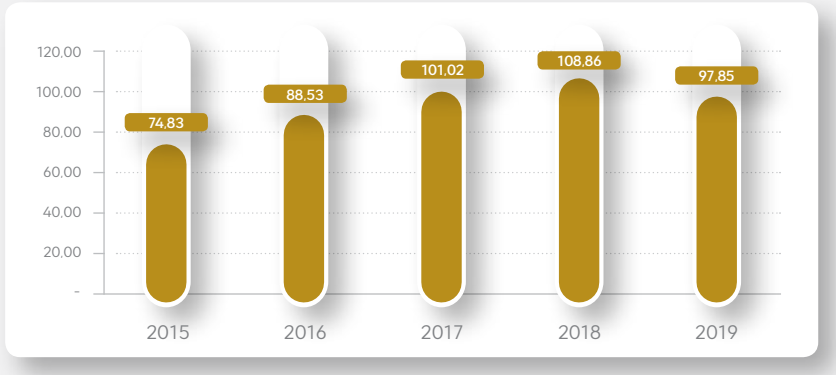

II.3.1.8 Keuangan Berkelanjutan

Terdapat dua agenda besar dunia yang saling terkait dan dimana Indonesia terlibat dalam proses penyusunan agenda hingga menyatakan komitmen untuk melaksanakan agenda tersebut, yaitu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) dan Perubahan Iklim (*Climate Change*). Komitmen Indonesia tersebut, oleh OJK diimplementasikan melalui Program Keuangan Berkelanjutan (KB)/ *sustainable finance*. Untuk pertama kali Program KB telah dijabarkan dalam *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I (2015 - 2019) yang berfokus pada *raising awareness* bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Saat ini OJK sedang menyusun pengembangan *Roadmap* KB Tahap II yang berfokus pada ketersediaan ekosistem pendukung untuk implementasi Program KB di Indonesia. Dalam perkembangan implementasinya, Indonesia telah dinilai sebagai negara yang telah "*mature*" (bersama-sama dengan Tiongkok) dan merupakan *first movers* dalam perkembangan inisiatif KB.

II.3.1.8 Sustainable Finance

There are two major and interrelated global agendas in which Indonesia is involved and committed to implement, namely the Sustainable Development Goals (SDGs) and Climate Change. OJK has translated Indonesia's commitment through the Sustainable Finance (SF) program. As an initial move, Sustainable Finance has been outlined in the Phase I Sustainable Finance Roadmap (2015 - 2019) which focuses on raising Financial Services Institutions' (LJK) awareness towards the issue. At the moment, OJK is developing a Phase II Sustainable Finance Roadmap that focuses on the availability of supporting ecosystems for the implementation of the Sustainable Finance program in Indonesia. In the development of its implementation, Indonesia has been rated as a "mature" country (together with China) and is the first movers in the development of Sustainable Finance initiatives.

Dalam hal potensi pasar investasi hijau di negara berkembang diprediksikan sekitar USD 23 triliun (tahun 2016 - 2030); dengan perincian sebagai berikut: Sektor Energi terbarukan sekitar USD 1.76 triliun; Sektor Bangunan Hijau (*Green Building*) sekitar USD 16.33 triliun; Sektor Pengolahan Limbah sekitar USD 0,11 triliun, dan Sektor Transportasi sekitar USD 3.7 triliun. Sedangkan khusus Indonesia, terdapat peluang untuk investasi hijau sebesar USD 22,18 triliun (2019 s.d 2024).

Green investment market potential in developing countries is predicted at around USD 23 trillion (in 2016-2030); with the following details: Renewable Energy Sector around USD 1.76 trillion; Green Building Sector (Green Building) around USD 16.33 trillion; The Waste Management Sector is around USD 0.11 trillion, and the Transportation Sector is around USD 3.7 trillion. Specifically for Indonesia, there is an opportunity for green investment of USD 22.18 trillion (2019 to 2024).

Hingga 2019, OJK telah melakukan koordinasi baik secara internal maupun eksternal dengan beberapa Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dan lembaga Internasional. Adapun perincian kegiatan sebagai berikut:

1. Koordinasi internal yang bertujuan menyamakan visi untuk pengembangan ekosistem KB kedepan. Melalui pelaksanaan koordinasi dimaksud, diharapkan program kerja dan ketentuan ke depan sejalan dengan pengembangan implementasi KB khususnya dalam rangka penyusunan *Roadmap* KB Tahap II (2020 - 2024).

2. Koordinasi dengan beberapa K/L pemerintah maupun non pemerintah baik skala nasional maupun internasional untuk bertukar informasi mengenai arah dan implementasi terhadap dukungan pada Keuangan Berkelanjutan pasca berakhirnya *Roadmap* KB Tahap I (2015 - 2019).
3. Pelaksanaan *capacity building* mengenai KB, telah mulai ditekankan untuk Pengawas LJK. Oleh karena itu dalam pengembangan pelaksanaan tersebut, telah dilakukan kerjasama dengan melibatkan Lembaga Internasional IFC dalam pengembangan ketersediaan materi pelatihan. Sebagai informasi, terdapat beberapa topik yang disampaikan, a.l: 1) Pendalaman Materi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/ POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik; 2) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), 3) Laporan Keberlanjutan (*sustainability report*) dan 4). *Sharing session* dari regulator keuangan China (CBIRC) serta salah satu bank nasional mengenai implementasi KB.
4. Fasilitasi pertemuan tahunan yang dilaksanakan oleh IFC - World Bank, *Rare Global* (fokus pada *Blue Finance*), dan *Sustainable Banking Network* (SBN) di Washington DC.

II.3.2 Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah

II.3.2.1 Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2019

Total Realisasi penyaluran KUR dari awal 2015 sampai dengan akhir 2019 sebesar Rp473,3 triliun dengan *outstanding* Rp153,1 triliun, dan NPL 1,06%. Penyaluran KUR masih didominasi oleh skema KUR Mikro (63,22%), diikuti skema KUR Kecil (36,36%) dan KUR TKI (0,42%). Sedangkan penyaluran KUR selama 2019 mencapai Rp139,9 triliun (99,98% dari target sebesar Rp140 triliun, dengan jumlah debitur sebanyak 4.728.330.

Penyaluran KUR masih didominasi di Pulau Jawa yaitu sebesar Rp257,2 triliun (54,35% dari total penyaluran KUR), utamanya Jawa Tengah (17,53%), Jawa Timur (16,63%), dan Jawa Barat (12,65%). Realisasi penyaluran KUR sektor produksi pada 2019 sebesar 51,56%, meningkat dibandingkan pencapaian pada 2018 sebesar 47%. Penyaluran tersebut sebagian besar di dominasi oleh sektor perdagangan.

Until 2019, OJK has coordinated both internally and externally with a number of relevant Ministries/Institutions (K/L) and international institutions. The details of the activities are as follows:

1. *Internal coordination which aims to equalize the vision for the future development of the SF ecosystem. Through the implementation of the said coordination, it is hoped that work programs and future provisions are in line with the development of SF implementation, especially in the context of the preparation of the Phase II Sustainable Finance Roadmap (2020 - 2024).*
2. *Coordination with several governmental and non-governmental ministries/ institutions both nationally and internationally to exchange information on the direction and implementation of support for Sustainable Finance after the end of the Phase I SF Roadmap (2015 - 2019).*
3. *Capacity building on SF, has begun to be emphasized for LJK Supervisors. Therefore, in the development of this implementation, collaboration has been carried out by involving IFC, an international institution specializes in developing the availability of training materials. For information, there are a number of topics presented, including: 1) Deepening of Financial Service Authority Regulation Material Number 51 / POJK.03 / 2017 concerning the Application of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies; 2) Sustainable Financial Action Plans, 3) Sustainability Reports and 4). Sharing session from the Chinese financial regulator (CBIRC) as well as one of the national banks regarding the implementation of SF.*
4. *Facilitation of annual meetings held by IFC - World Bank, Rare Global (focusing on Blue Finance), and the Sustainable Banking Network (SBN) in Washington DC.*

II.3.2 Development of Regional Economic Potential

II.3.2.1 People's Business Loan (KUR) Disbursements in 2019

Total realisation of People's Business Loan (KUR) disbursements from the beginning of 2015 until the end of 2019 was recorded at Rp473.3 trillion, with Rp153.1 trillion outstanding and a gross NPL ratio of 1.06%. KUR disbursements were dominated by micro enterprises (63.22%), followed by small enterprises (36.36%) and Indonesian migrant workers (0.42%). In 2019, KUR disbursements totalled Rp139.9 trillion, equivalent to 99.98% of the Rp140 trillion target, reaching 4,728,330 borrowers.

KUR disbursements were still concentrated on Java island, dominating Rp257.2 trillion or 54.35% total KUR disbursements, led by Central Java 17.53%, East Java (16.63%) and West Java (12.65%). KUR disbursements to productive sectors accounted for 51.56% in 2019, up from 47% in 2018, dominated by the trade sector.

Penyebaran KUR

Distribution of People's Business Loans (KUR)

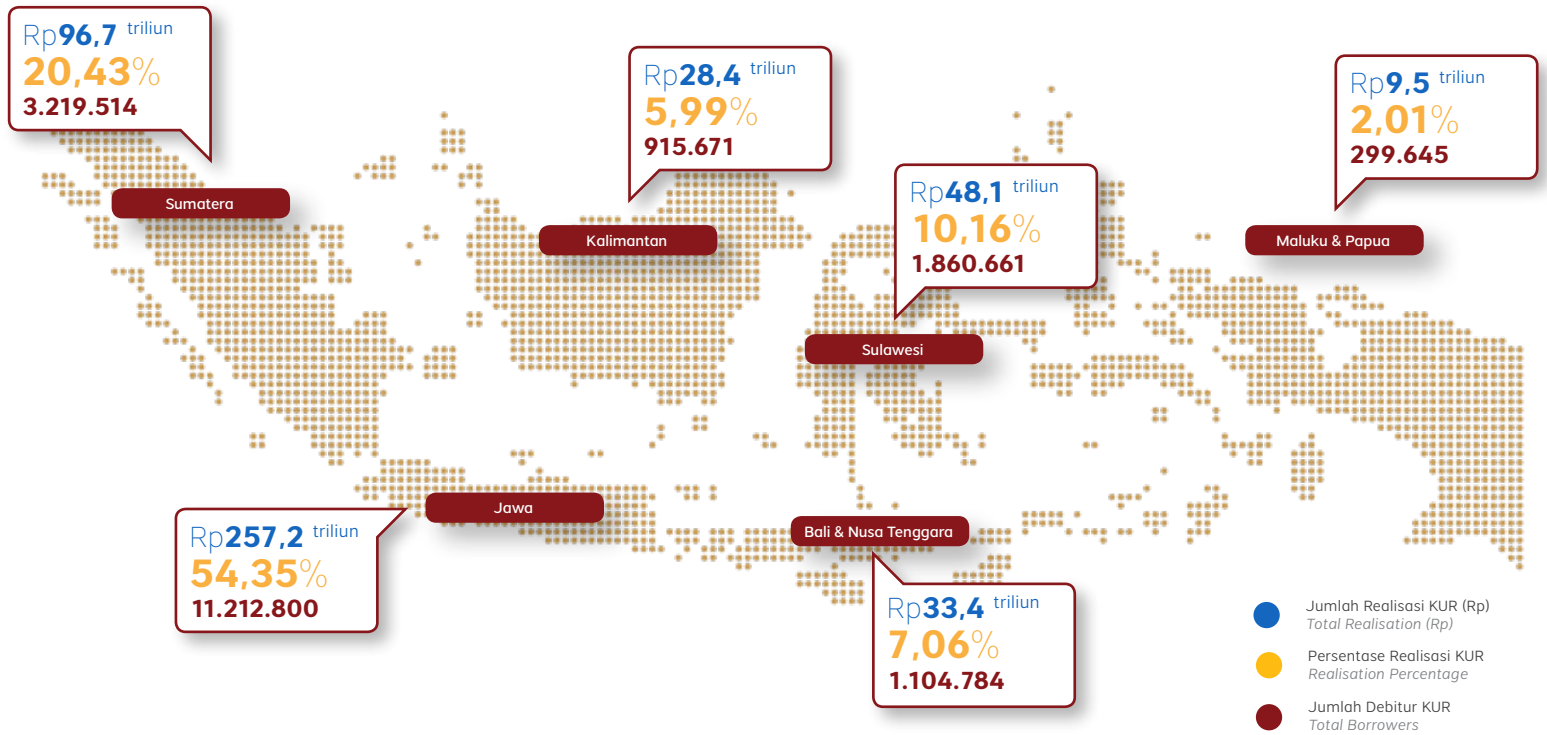

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian

Source: Coordinating Ministry of Economic Affairs

II.3.2.2 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) merupakan forum koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

II.3.2.2 Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD)

The Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD) are a coordination forum between institutions and stakeholders in relation to accelerating broader financial access in regional areas in order to stimulate regional economic growth and local public prosperity.



Sampai dengan akhir 2019, OJK telah mengukuhkan 120 TPAKD dengan rincian 32 TPAKD provinsi dan 88 TPAKD kabupaten/kota. Selain hal tersebut, terdapat 46 TPAKD kabupaten/kota yang telah terbentuk sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah namun belum dikukuhkan. Dengan demikian, total TPAKD yang telah terbentuk tercatat 166 TPAKD.

At the end of 2019, a total of 120 Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD) had been established, consisting of 32 provincial teams and 88 teams at the regency/city administrative level. In addition, 46 regency/city teams have been approved by regional heads but not established, bringing the total to 166 Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD).

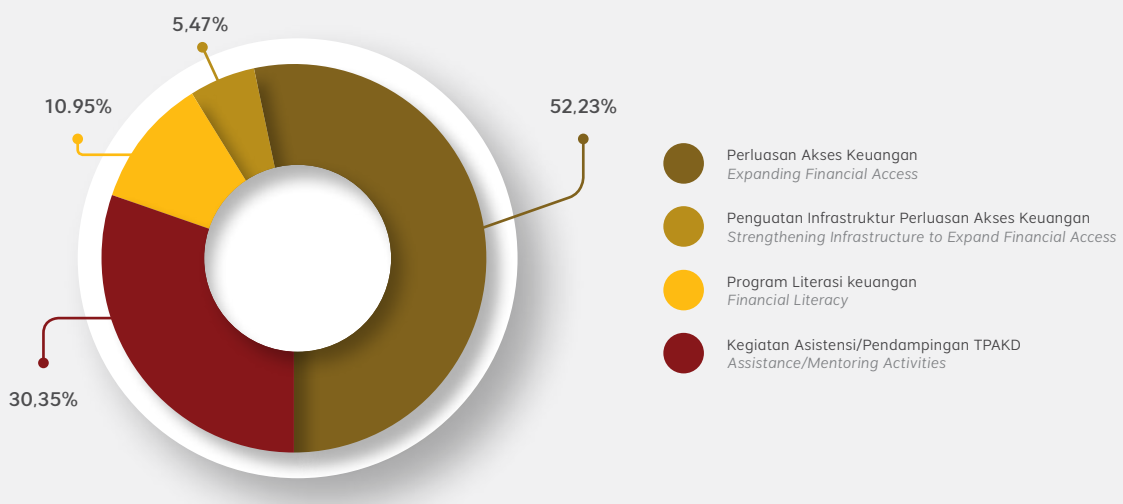

Dalam rangka optimalisasi peran TPAKD, OJK melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Menteri Dalam Negeri Nomor MoU-2/D.01/2019 tentang Penguatan Tugas dan Kewenangan OJK dan Kemendagri, serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor PRJ-1/EP.1/2019 terkait Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Perlindungan Konsumen melalui Optimalisasi Peran TPAKD.

Optimising the Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD), OJK signed a Memorandum of Understanding with the Minister of Home affairs, No. MoU-2/D.01/2019, to strengthen the Function and Authority of OJK and the Ministry of Home Affairs, as well as Cooperation Agreement (PKS) No. PRJ-1/EP.1/2019 concerning Increasing Financial Literacy and Inclusion as well as Consumer Protection through TPAKD Optimisation.

Program tematik TPAKD pada 2019 adalah Akselerasi Peningkatan Jumlah Rekening Tabungan dan Penyaluran Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh TPAKD setiap triwulan

The thematic TPAKD program in 2019 focused on accelerating the number of savings accounts and disbursed credit/financing to combat loan sharking activities. Based on the quarterly reports submitted by Regional Financial

selama 2019, 18 TPAKD di antaranya telah mengimplementasikan program tematik Akselerasi Peningkatan Jumlah rekening tabungan, dan 12 TPAKD di antaranya telah mengimplementasikan program Penyaluran Kredit/ Pembiayaan Melawan Rentenir.

Di samping itu, OJK melalui TPAKD juga telah melaksanakan kegiatan *Business Matching* dan menyusun Kajian Potensi Ekonomi dan Akses Keuangan Di Daerah (KPAKD). Kegiatan *Business Matching* merupakan bagian dari upaya perluasan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat, sedangkan penyusunan KPAKD merupakan bagian dari upaya untuk mengetahui potensi unggulan daerah agar dapat dimaksimalkan melalui pelaksanaan program TPAKD. Sepanjang 2019, telah terlaksana 54 kegiatan *Business Matching* yang dilakukan oleh 35 Kantor Regional (KR)/Kantor OJK (KOJK) dengan pencapaian inklusi pada kegiatan tersebut sebanyak 2.922 debitur dengan nominal pencairan sebesar Rp74,59 miliar, dan juga telah tersusun 35 KPAKD.

Selain itu, OJK juga telah mengembangkan Sistem Informasi TPAKD (SiTPAKD) dengan link sitpakd.ojk.go.id, dan telah dilakukan sosialisasi tentang tata cara penggunaan SiTPAKD sebagai media pelaporan pelaksanaan program TPAKD kepada perwakilan dari seluruh KR dan KOJK pada 5 Desember 2019 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Sebagai bentuk apresiasi bagi TPAKD, telah diselenggarakan TPAKD *Award* 2019 yang diberikan kepada TPAKD tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang telah melaksanakan program TPAKD secara optimal sampai dengan 2018. TPAKD *Award* 2019 ini dinilai oleh juri yang terdiri dari OJK, Kementerian Dalam Negeri, akademisi, Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), dan World Bank. Selanjutnya, pemenang TPAKD *Award* 2019 diumumkan dalam pertemuan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD pada 10 Desember 2019. TPAKD *Award* 2019 diserahkan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK dan disaksikan oleh Presiden RI. Pemenang TPAKD *Award* 2019 adalah sebagai berikut:

Tingkat Provinsi
- TPAKD Provinsi Jawa Barat, untuk kategori "Pendorong Akses Keuangan Melalui Sektor Unggulan Daerah".
- TPAKD Provinsi Sulawesi Selatan, untuk kategori "Penggerak Akses Keuangan dengan Pola Kemitraan".
- TPAKD Provinsi Sumatera Barat, untuk kategori "Pengembangan Kawasan Inklusi Keuangan di Daerah".
- TPAKD Provinsi DKI Jakarta, untuk kategori "Pendorong Inovasi Budaya Menabung".

Tingkat Kabupaten/Kota
Pemberian *award* untuk kategori "Inovasi Pembiayaan Mikro Berbiaya Rendah Bagi UMKM" diberikan kepada TPAKD Kabupaten Tabalong, Kota Surakarta, Kabupaten Kebumen dan Kota Kediri.

Access Acceleration Teams (TPAKD) in 2019, 18 teams had implemented thematic programs to accelerate the number of savings accounts and 12 teams had implemented programs to disburse credit/financing against loan sharking activities.

In addition, OJK also implemented business matching activities in 2019 through Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD) and compiled a Study on Regional Economic Potential and Financial Access (KPAKD). Business matching seeks to expand financial access for micro, small and medium enterprises (MSME) and members of the public, while the KPAKD studies explore potential regional comparative advantage for maximisation through the TPAKD program. In 2019, OJK implemented 54 business matching activities at 35 regional offices, involving 2,922 borrowers with a value of Rp74.59 billion while conducting 35 KPAKD studies.

Furthermore, OJK also developed the TPAKD Information System (SiTAPKD), with the following link, sitpakd.ojk.go.id, while also providing socialisation on the procedures for using SiTPAKD as a media reporting on the implementation of the TPAKD program activities for all OJK regional and branch representatives on 5th December 2019 in Lombok, West Nusa Tenggara.

As form of appreciation, OJK also organised the TPAKD Awards in 2019, which were awarded to TPAKD at the provincial as well as regency/city administrative levels for the 2018 work program. The awards were assessed by a jury consisting of OJK, the Ministry of Home Affairs, academics, the National Financial Inclusion Board and World Bank. The winners were announced at the National TPAKD Coordination Meeting on 10th December 2019. The awards were presented by the Chairman of the OJK Board of Commissioners and witnessed by the President of the Republic of Indonesia. The awardees were as follows:

Provincial Level:
- *TPAKD West Java for "Increasing Financial Access through Featured Regional Sectors"*
- *TPAKD South Sulawesi for "Stimulating Financial Access through Partnership Models"*
- *TPAKD West Sumatra for "Developing Regional Financial Inclusion Zones"*
- *TPAKD Jakarta for "Stimulating Innovative Culture of Saving"*

Regency/City Level:
Awards for "Innovative Low-Cost Microfinancing for MSMEs" were presented to TPAKD Tabolong, Surakarta, Kebumen and Kediri.

II.3.3 Pengembangan Produk Dan Layanan SJK Dalam Rangka Perluasan Akses Keuangan

II.3.3.1 Perkembangan LAKU PANDAI dan *e-Warong*

LAKU PANDAI atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam rangka Keuangan Inklusif, merupakan program OJK untuk penyediaan layanan perbankan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank), dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Produk-produk yang disediakan dalam program ini adalah tabungan dengan karakteristik *Basic Saving Account* (BSA), kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan produk keuangan lainnya seperti Asuransi Mikro.

II.3.3 Product and Services Development in the Financial Services Sector to Expand Financial Access

II.3.3.1 Branchless Banking and e-Warong Development

Branchless banking is an OJK initiative to provide banking services and other financial services through bank agents, while supporting the utilisation of information technology. Several products are available through branchless banking, including basic savings accounts (BSA), micro-loans/financing as well as other financial products, such as microinsurance.

Realisasi LAKU PANDAI

Realisation of Branchless Banking

Agen Laku Pandai Agents	
Perorangan Individuals	Badan Hukum Outlets
1.160.232	**42.008**
Nasabah Laku Pandai Customers	
Jumlah Nasabah Total Customers	*Outstanding* Tabungan BSA Outstanding BSA
25.421.716	**Rp1,71 Trilliun**

Dalam rangka mendukung program pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan inklusi keuangan, agen Laku Pandai Bank Himbara telah diamanatkan sebagai elektronik warung gotong royong (*e-warong*) dalam penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Di samping itu, agen Laku Pandai juga berperan sebagai salah satu *channel* penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Sampai dengan Desember 2019, terdapat 86.968 Agen Laku Pandai yang berperan sebagai *e-warong* penyalur Bantuan Sosial Non-Tunai.

To support poverty alleviation and increase financial inclusion, branchless banking agents under the umbrella of the Association of State-Owned Banks (HIMBARA) have been mandated as e-warongs to disburse the Noncash Food Assistance Program (BPNT). In addition, branchless banking agents are also a channel to disburse social assistance under the auspices of the Family Hope Program (PKH). As of December 2019, a total of 86,968 branchless banking agents were operating as e-warongs to disburse Noncash Food Assistance (BPNT).

II.3.3.2 Asuransi Mikro

Dalam rangka pengembangan asuransi mikro, OJK menyelenggarakan kegiatan Seminar Asuransi Mikro dengan tema "Sinergi Pengembangan Asuransi Mikro di Indonesia". Kegiatan tersebut dihadiri oleh 100 peserta yang mewakili Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki produk asuransi mikro dan asuransi mikro syariah.

II.3.3.2 Microinsurance

OJK organised a seminar entitled "Microinsurance Development Synergy in Indonesia" in order to develop the microinsurance industry in Indonesia. The seminar was attended by 100 participants representing life insurance and general insurance companies offering microinsurance and Islamic microinsurance products.

Sampai dengan akhir 2019, pengembangan Asuransi Mikro menunjukkan peningkatan kepesertaan yang cukup baik sebesar 9,24% (*yoy*), yaitu sebanyak 24.004.869 peserta pada 2018 meningkat menjadi 26.266.491 peserta di 2019, dengan jumlah premi/kontribusi peserta sebesar Rp3.361,31 miliar.

At the end of 2019, microinsurance expanded 9.24% (yoy) from 24,004,869 to 26,266,491 participants in 2019, with total premiums/contributions recorded at Rp3,361.31 billion.

II.3.3.3 Tabungan SimPel

SimPel/SimPel iB merupakan program inklusi keuangan yang bertujuan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Perkembangan program SimPel/SimPel iB hingga akhir 2019 tercatat sebanyak 381 bank yang telah menjadi peserta SimPel/SimPel iB. Sebanyak 381.867 sekolah telah menjalin kerja sama dengan bank dalam rangka program SimPel/SimPel iB dengan jumlah rekening tercatat 21,86 juta rekening dan nominal Rp9 triliun.

II.3.3.3. SimPeL Savings Accounts

SimPel/iB SimPel are part of the financial inclusion program to foster a culture of saving from an early age. At the end of 2019, a total of 381 banks had signed up for the SimPel/iB SimPel program, along with 381,867 schools, bringing the number of accounts to 21.86 million and a value of Rp9 trillion.

Perkembangan SimPel/SimPel iB
SimPel/iB SimPel Developments

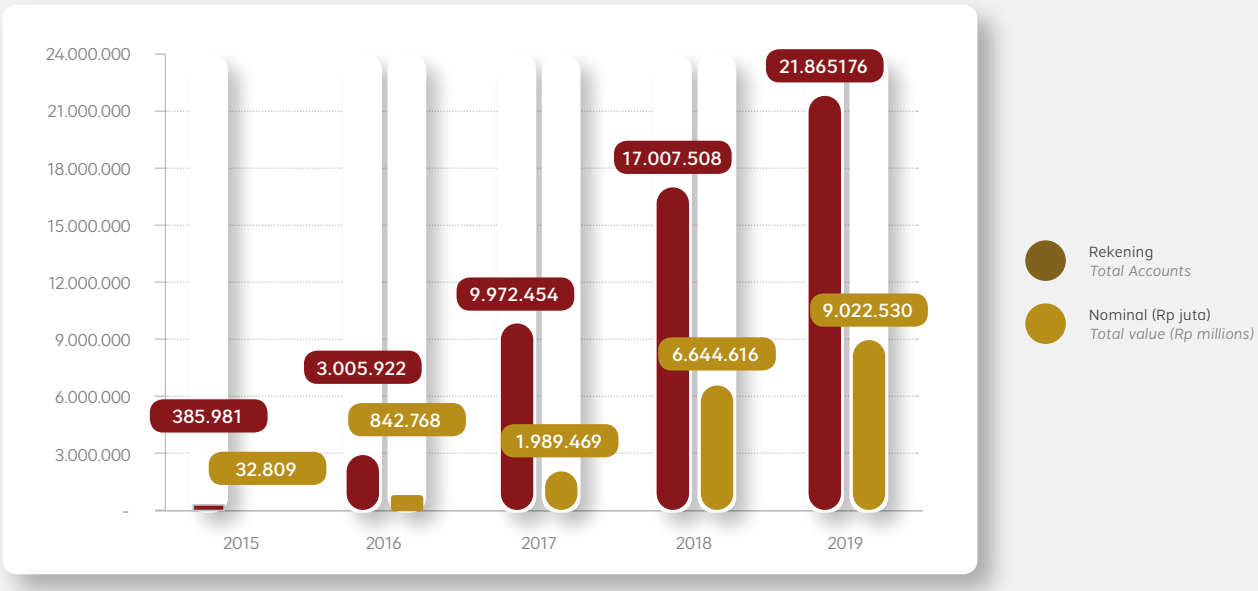

OJK telah menyelenggarakan SimPel *Day* 2019 pada 2 Mei 2019 di Jakarta yang bekerja sama dengan 29 bank peserta SimPel/SimPel iB. Kegiatan diikuti oleh 1.500 siswa SD sampai dengan SMA dan guru serta dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ADK OJK Bidang EPK, dan direksi bank peserta SimPel/SimPel iB. Sebagai salah satu kegiatan utama, dilakukan pembacaan Ikrar Aksi Pelajar Indonesia Menabung oleh pelajar yang hadir. Kegiatan tersebut juga dilakukan secara serentak oleh pelajar di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, OJK juga melaksanakan SimPel/SimPel iB *Award*, yaitu penghargaan yang diberikan oleh OJK kepada sekolah, bank peserta SimPel/SimPel iB, dan individu yang dinilai telah berpartisipasi aktif dalam mendukung implementasi program SimPel/SimPel iB. Adapun pengumuman pemenang SimPel/SimPel iB *Award* disampaikan pada puncak kegiatan Bulan Inklusi Keuangan.

OJK also organised SimPel Day 2019 on 2nd May 2019 in Jakarta in conjunction with 29 participating banks. A total of 1,500 primary and secondary school students attended the event along with their teachers. Furthermore, the Chairman of the OJK Board of Commissioners, Coordinating Minister for Economic Affairs, OJK BoC member in charge of Education and Consumer Protection as well as directors from participating banks were also in attendance. One of the main activities was a pledge to save by the students in attendance. The activity was also conducted simultaneously by students in various regions of Indonesia. In addition, OJK also presented the SimPel/iB SimPel Awards to recognise schools, participating banks and individuals that have actively supported SimPel/iB SimPel program implementation. The awardees were announced at the culmination of the Financial Inclusion Month.

Selama 2019, telah dilaksanakan kegiatan *bank goes to school* sebanyak 8.144 kunjungan. Total transaksi setor sebanyak 170.954 rekening dengan nominal Rp16,97 miliar. Adapun jumlah pembukaan rekening baru sebanyak 23.095 rekening dengan nominal Rp1,32 miliar.

In 2019, the "Bank Goes to School" activity was continued, amassing 8,144 visits. In total, 170,954 accounts have been opened with a value of Rp16.97 billion. New accounts in 2019 totalled 23,095 with a value of Rp1.32 billion.

II.3.3.4 Tabungan SiMUDA

Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA) merupakan program tabungan bagi kelompok usia 18-30 tahun dengan dilengkapi fitur asuransi dan/atau produk investasi yang ditawarkan oleh perbankan di Indonesia. Hingga akhir 2019, total rekening SiMUDA sebanyak 12.712 dengan nominal sebesar Rp27 miliar.

II.3.3.4 SiMUDA Savings Accounts

SiMUDA is a savings program targeting 18 to 30-year-olds, complemented with insurance features and/or investment products offered by the banking industry in Indonesia. At the end of 2019, SiMUDA accounts totalled 12,712 with a value of Rp27 billion.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran mahasiswa dan pemuda terkait program Simpanan Mahasiswa dan Pemuda (SiMUDA), OJK menyelenggarakan kegiatan Aksi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Menabung (AKSiMUDA) di Jakarta. Kegiatan yang dihadiri oleh 1.500 pemuda, mahasiswa, dan para undangan ini bersinergi dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), 14 Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), *Asian* Development Bank (ADB), Kementerian/Lembaga terkait, serta 47 Perguruan Tinggi.

Seeking to raise student and youth awareness of the SiMUDA program, OJK organised the Indonesia Student and Youth Savings Action (AKSiMUDA) on 30th July 2019 in Jakarta. Approximately 1,500 students attended the event organised in conjunction with the National Financial Inclusion Board, 14 financial services institutions, Indonesia Stock Exchange, Asian Development Bank (ADB), relevant government ministries and agencies as well as 47 universities.

Sebagai puncak kegiatan AKSiMUDA 2019, telah dilakukan pengukuhan terhadap enam orang Duta Literasi dan Inklusi Keuangan yang merupakan mahasiswa berprestasi terpilih dari LJK dan perwakilan *Youth Financial Inclusion Ambassador* dari ADB. Duta Literasi dan Inklusi Keuangan tersebut diharapkan dapat berperan sebagai penggerak pemuda di sekitarnya dalam melaksanakan program inklusi keuangan, edukasi keuangan hingga perlindungan konsumen. Selanjutnya, keenam duta memimpin pembacaan "Ikrar Aksi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Menabung" sebagai simbolisasi komitmen dan semangat pemuda untuk menjadi *role model* budaya menabung serta mendukung implementasi Aksi Indonesia Menabung. Kegiatan AKSiMUDA diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengelola keuangan sejak dini, serta mendorong budaya menabung di kalangan mahasiswa dan pemuda di seluruh Indonesia.

As the culmination of the AKSiMUDA campaign in 2019, six outstanding students were selected and named as Financial Literacy and Inclusion Ambassadors by the financial services institutions and representatives of the Youth Financial Inclusion Ambassador from ADB. The Financial Literacy and Inclusion Ambassadors are expected to motivate other young people towards financial inclusion, financial education and consumer protection. The six Financial Literacy and Inclusion Ambassadors subsequently led the pledge to save by the students in attendance as a symbol of commitment and motivation to become role models for a culture of saving, while supporting the Indonesia Saving Action. AKSiMUDA is expected to raise public awareness concerning the importance of financial management from an early age, while nurturing a culture of saving amongst students and young people throughout Indonesia.

II.3.4 Penguatan Peran SJK Syariah

II.3.4 Strengthening the Role of the Islamic Financial Services Sector

II.3.4.1 Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Bank Wakaf Mikro)

Pendirian LKM Syariah BWM merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan di masyarakat. Selain itu, pendirian LKM Syariah BWM di lingkungan pesantren diharapkan dapat meningkatkan literasi keuangan syariah. Sampai dengan akhir 2019, jumlah LKM Syariah BWM adalah sebanyak 56 dengan pembiayaan kumulatif yang disalurkan sebesar Rp36,57 miliar serta nasabah *outstanding* sebanyak 13.995 orang.

II.3.4.1 Micro Waqf Banks

The establishment of Microfinance institutions in the form of Micro Waqf Banks represent one effort to overcome inequality and poverty. In addition, the establishment of Micro Waqf Banks in the Islamic boarding school (pesantren) environment is expected to increase Islamic financial literacy. At the end of 2019, a total of 56 Micro Waqf Banks had been established and disbursed financing had reached a cumulative total of Rp36.57 billion, while total outstanding customers stood at 13,995.

Daftar LKM Syariah (Bank Wakaf Mikro) per tahun 2019

List of Micro Waqf Banks in 2019

Nama LKM syariah Micro Waqf Banks Names	Provinsi Province
Koperasi LKMS Bankwakaf Al Muttaqien Pancasila Sakti	Jawa Tengah
Koperasi LKMS Amanah Berkah Nusantara	Jawa Tengah
Koperasi LKMS Ranah Indah Darussalam	Jawa Barat
Koperasi LKMS Berkah Bersama Baiturrahman	Jawa Barat
Koperasi LKMS Buntet Pesantren	Jawa Barat
Koperasi LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah	Jawa Timur
Koperasi LKMS Berkah Rizqi Lirbowo	DIY
Koperasi LKM Syariah KHAS Kempek	Jawa Timur
Koperasi LKMS Pesantren An Nawawi Tanara	Jawa Barat
Koperasi LKM Syariah Almuna Berkah Mandiri	Banten
Koperasi LKMS Amanah Makmur Sejahtera	Jawa Timur
Koperasi LKMS Assa Berkah Sejahtera	Jawa Tengah
Koperasi LKMS El-Manahij	Banten
Koperasi LKMS Al Ihya Baitul Auqof	Jawa Tengah
Koperasi LKMS Lan Taburo	Banten
Koperasi LKM Nahdlatul Wathon Cijantung	Jawa Tengah
Koperasi LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera	Jawa Barat
Koperasi LKMS Bankwakaf Al Manshur Barokahing Gusti	Jawa Timur
Koperasi LKMS Al Fitrah Wava Mandiri	Jawa Timur
Koperasi LKMS Bahrul Ulum Barokah Sejahtera	Jawa Timur
Koperasi LKMS Pondok Pesantren Modern Al Kautsar	Sumatera Barat
Koperasi LKMS UNISA	DIY
Koperasi LKMS BWM Ponpes Futuhiyyah	Jawa Tengah
Koperasi LKMS Sinar Sukses Bersama	Jawa Timur
Koperasi LKMS Bankwakaf Imam Syuhodo	Jawa Tengah
Koperasi LKMS Alpen Barokah Mandiri	Jawa Timur
Koperasi LKMS Ummul Mukminin Aisyiyah	Sulawesi Selatan
Koperasi LKMS Berkah Umat Ciganitri	Jawa Barat
Koperasi LKMS Bank Wakaf Mikro Taawun Mitra Ummat Ponpes Al-Mujahidin Balikpapan	Kalimantan Timur

Nama LKM syariah Micro Waqf Banks Names	Provinsi Province
Koperasi LKMS Pondok Pesantren Minhadlul Ulum	Lampung
Koperasi LKMS Al Azhar Jember	Jawa Timur
Koperasi LKMS Al-Falah	Jawa Timur
Koperasi LKMS Pondok Pesantren Mawaridussalam	Sumatera Utara
Koperasi LKMS Sinar Mandiri Sejahtera	Jawa Timur
Koperasi LKMS BWM Sunan Pandan Aran	DIY
Koperasi LKMS Pondok Pesantren As'ad	Jambi
Koperasi LKMS Sunan Gunung Jati Ba'alawy Semarang	Jawa Tengah
Koperasi LKMS Barokah Pesantren Al-Masthuriyah	Jawa Barat
Koperasi LKMS Amal Dana Bergulir	Jawa Barat
Koperasi LKMS Minhajut Thullab	Jawa Timur
Koperasi LKMS Honai Sejahtera Papua	Papua
Koperasi LKMS BWM Fajar Pelita Harapan	Riau
Koperasi LKMS Al Hidayah Rokan Hulu	Riau
Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah BWM Apik Kaliwungu Kendal	Jawa Tengah
Koperasi LKMS BWM Al Anshor Peduli	Maluku
Koperasi LKMS BWM Pondok Pesantren Syubbanul Wathon Maslahah	Jawa Tengah
Koperasi LKMS Kariman Birajuda Al Karimiyyah	Jawa Timur
Koperasi LKMS Mantenan Aman Makmur	Jawa Timur
Koperasi LKMS BWM Ahmad Taqiuddin Mansur "ATQIA"	NTB
Koperasi LKMS BWM Bangkit Nusantara	Jawa Tengah
Koperasi LKMS Pensantren Hidayatulloh Trenggalek	Jawa Timur
Koperasi LKMS Bank Wakaf Mikro Babul Maghfirah	Aceh
Koperasi LKMS Bita Amanah Ummat	Jawa Barat
Koperasi Jasa Lembaga Keuangan Mikro Ssyariah Bank-Wakaf Mikro Al Hijrah Cindai Alus	Kalimantan Selatan
Koperasi LKMS Aulia Cendekia Palembang	Sumatera Selatan
Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Bank Wakaf Mikro Al Fadlu Kendal	Jawa Tengah

II.4 MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN FINANSIAL MASYARAKAT SERTA MENDUKUNG UPAYA PENINGKATAN PEMERATAAN DALAM PEMBANGUNAN

II.4.1 Pengembangan *Financial Technology (Fintech)*

II.4.1.1 OJK *Innovation Centre for Digital Financial Technology* (Infinity Center)

Sampai dengan akhir periode laporan, dari total permohonan pencatatan penyelenggara Inovasi Keuangan DIgital (IKD) sebanyak 142 telah ditetapkan 74 IKD mendapatkan status tercatat di OJK dan 46 diantaranya menjadi sampel uji coba *regulatory sandbox*. 74 IKD tersebut terbagi menjadi 17 kluster model bisnis yang telah ditentukan oleh forum panel IKD.

II.4 REALISING PUBLIC FINANCIAL INDEPENDENCE AND SUPPORTING EQUITABLE DEVELOPMENT

II.4.1 Financial Technology (FinTech) Development

II.4.1.1 OJK Innovation Centre for Digital Financial Technology (Infinity Centre)

At the end of the reporting period, of the 142 Digital Financial Innovation (IKD) requests received, 74 had been recorded at OJK and 46 were included as a sample for regulatory sandbox trials. The 74 IKD were divided into 17 business model clusters determined by the IKD panel forum.

Komposisi Permohonan IKD (Batch 1-4)
Composition of IKD Requests

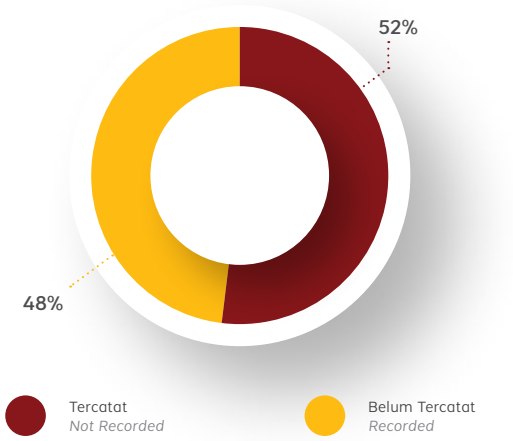

Permohonan Pencatatan Penyelenggara IKD Per Batch
Recorded IKD Requests per Batch

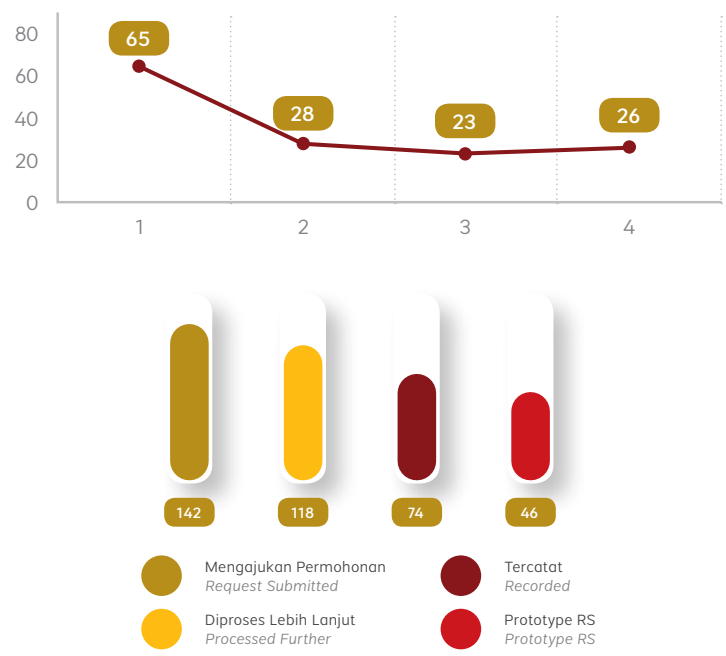

Total Permohonan Pencatatan Penyelenggara IKD (Batch 1-4)
Total Requests to Register IKD Providers

142

Adapun 17 kluster tersebut sebagai berikut:

The 17 clusters are as follows:

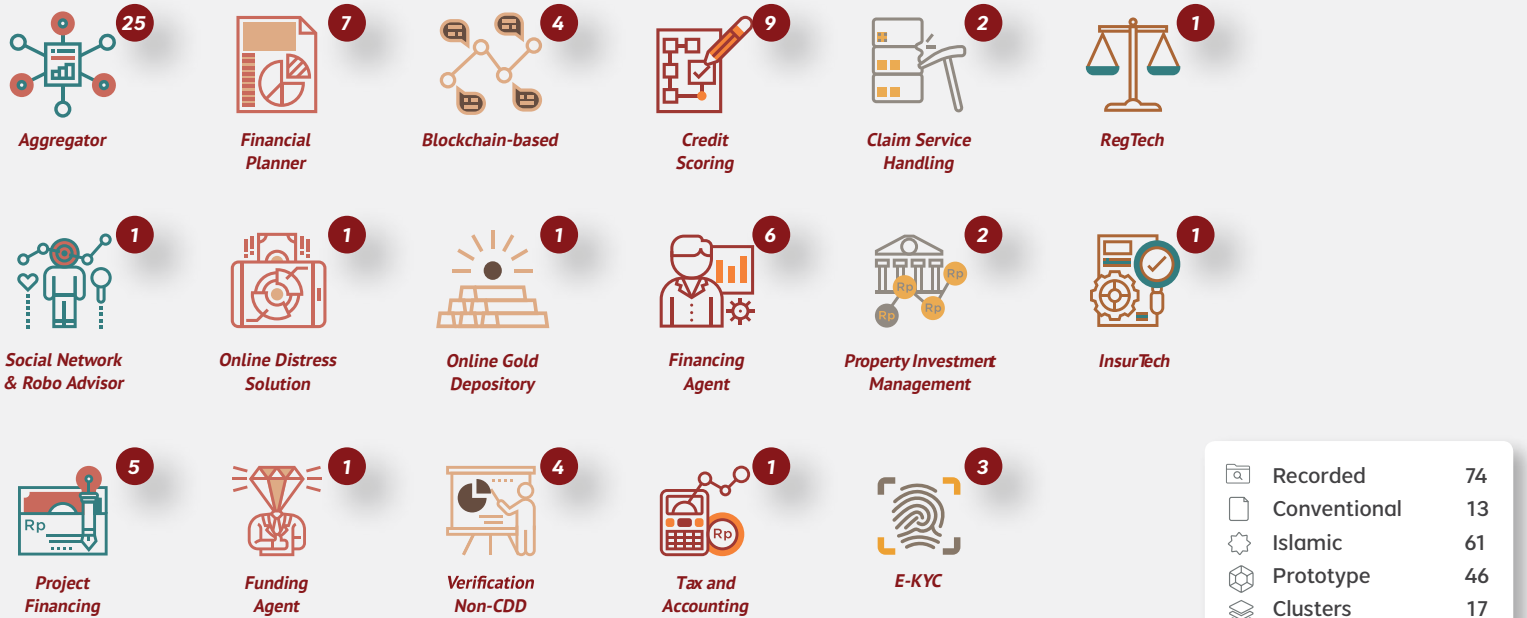

Jumlah pengguna IKD tercatat di Indonesia sebanyak 1.665.060 pengguna, sedangkan total transaksi mencapai Rp17,526 triliun yang masih didominasi di pulau jawa.

Total IKD users recorded in Indonesia currently stand at 1,665,060, with total transactions reaching Rp17,526 trillion, concentrated on the island of Java.

Komposisi Pengguna IKD
IKD users Composition

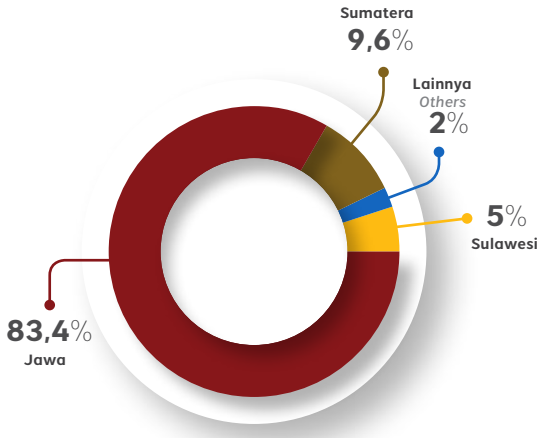

Jumlah Pengguna IKD
Total IKD Users
1.665.060

Total Transaksi
Total Transactions
Rp17,526 Trilliun

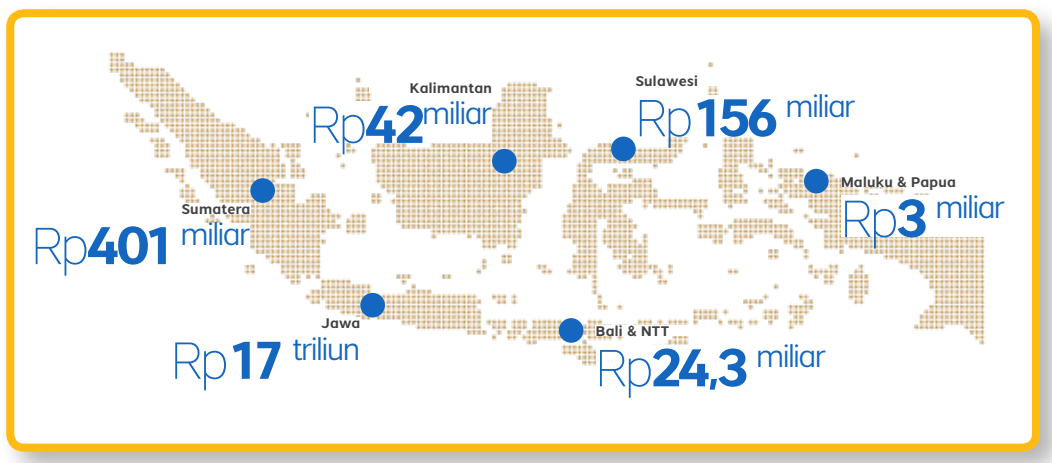



Jumlah event
Total Events

19



Peserta
Participants

12.593

- Knowledge Sharing Session (Blockchain Untokenized)
- UIN Walisongo Semarang Visit
- Pengarahan Pencatatan Penyelenggara IKD
- Knowledge Sharing Session (Fintech Industry Lifecycle)
- Knowledge Sharing Session (Implementasi Blockchain pada LJK)
- Pengarahan Pencatatan IKD Batch 2
- Knowledge Sharing Session: Global Technology Trends
- Prasetiya Mulya Campus Visit
- Knowledge Sharing Session P2P Insurance
- Workshop Suptech & Regtech Forum Panel by Regtech Lab
- Peresmian Penunjukan Aftech sebagai Asosiasi IKD
- FGD Libra
- Seminar Parametric Insurance & Milad OJK INFINITY
- Indonesia Fintech Summit & Expo
- Pengarahan Pencatatan IKD Batch 3
- Sosialisasi Gesit 1
- Sosialisasi Gesit 2
- Knowledge Sharing Session: Virtual Banking
- Kunjungan Mahasiswa IBS

Terkait Inovasi Keuangan Digital pada 2019, OJK menerbitkan tiga Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (POJK 13/2018) yang telah diterbitkan sebelumnya. Adapun ketiga SEOJK tersebut terdiri atas:

a. SEOJK Nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan Inovasi Keuangan Digital;
b. SEOJK Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang *Regulatory Sandbox*; dan
c. SEOJK Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital.

In terms of Digital Financial Innovation (IKD) in 2019, OJK issued three Circular Letters (SEOJK) in accordance with the mandate stipulated in OJK Regulation (POJK) No. 13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the Financial Services Sector issued previously. The three circular letters issued by OJK are recapitulated as follows:

a. Circular Letter (SEOJK) No. 20/SEOJK.02/2019 concerning the Digital Financial Innovation Recording Mechanism;
b. Circular Letter (SEOJK) No. 21/SEOJK.02/2019 concerning the Regulatory Sandbox; and
c. Circular Letter (SEOJK) No. 22/SEOJK.02/2019 concerning the Appointment of an Association of Digital Financial Innovation Providers.

II.4.1.2 Ekosistem Keuangan Digital

II.4.1.2 Digital Financial Ecosystem

Ekosistem *Fintech Lending*
FinTech Lending Ecosystem

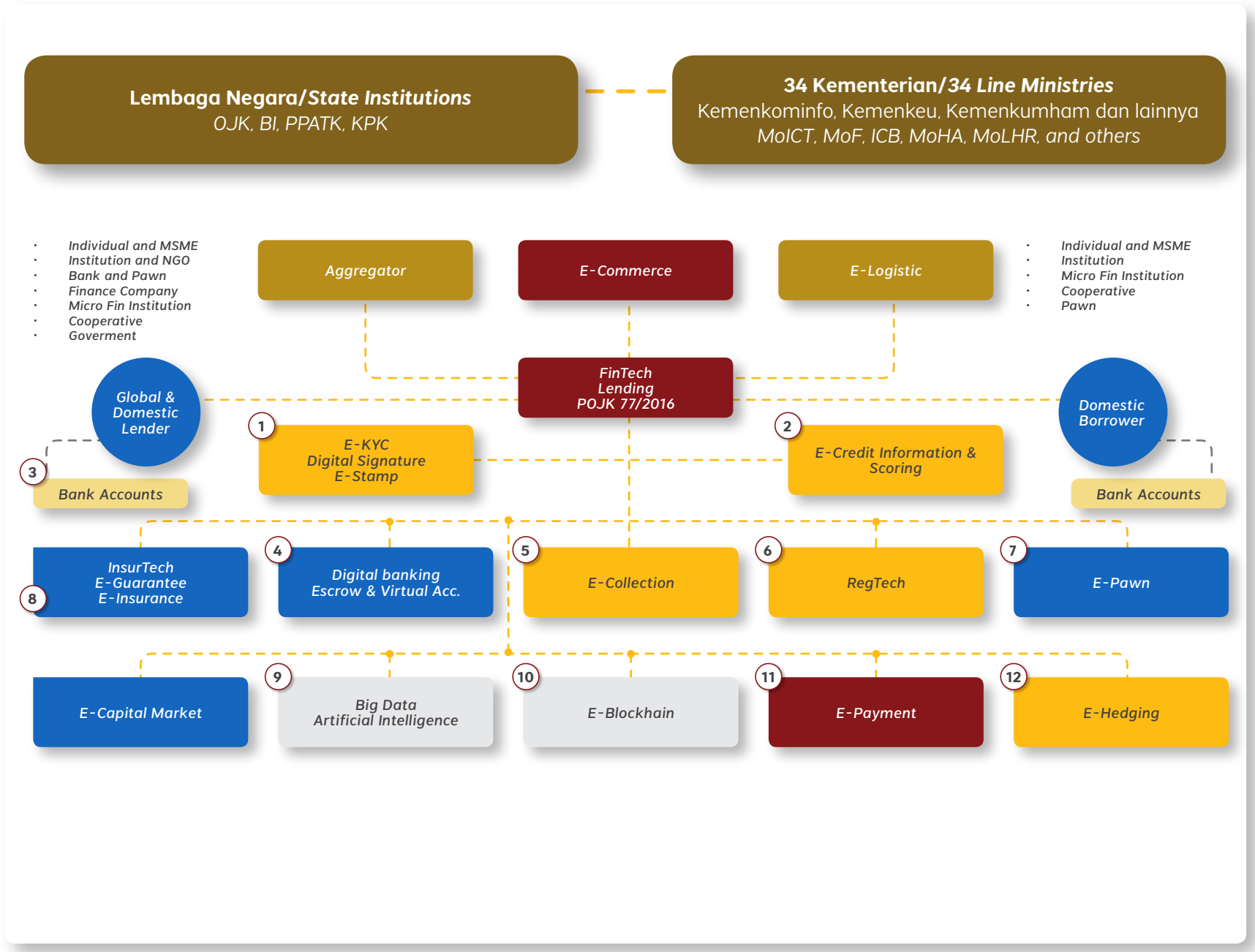

Penyelenggara *fintech lending* merupakan badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Penerima pinjaman (*borrower*) berasal dari dalam negeri (*domestic borrower*). Sementara, pemberi pinjaman (*lender*) dapat berasal dari luar negeri (*global*) atau dalam negeri (*domestic*).

FinTech lenders are legal entities incorporated in Indonesia that provide, manage and operate financial services which bring together lenders and borrowers directly using loan agreements denominated in rupiah through electronic systems on the internet. The borrowers are domestic borrowers, while lenders may be global or domestic lenders.

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan, penyelenggara *fintech lending* dapat mengembangkan ekosistemnya dengan cara melakukan kerja sama dengan *aggregator*, *e-commerce*, *e-logistic*, dan penyedia layanan pendukung *fintech* lainnya. Dalam ekosistem tersebut, penyelenggara *fintech lending* dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak/penyelenggara dalam rangka menunjang layanan mereka. Kerja sama tersebut diantaranya dalam rangka penggunaan *e-KYC, digital signature, e-stamp, e-credit information & scoring, insurtech, digital banking, escrow & virtual account, e-collection, regtech, e-pawn, capital market* secara elekronik, *e-payment, e-hedging*, dan lainnya. Melalui kolaborasi dalam suatu ekosistem tersebut, *fintech lending* juga diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja baru bagi masyarakat, menciptakan lingkungan bisnis digital yang sehat, kuat, dan mudah untuk diakses khususnya bagi para pelaku usaha.

To increase the quality of services, FinTech lenders may develop an ecosystem through cooperation with aggregators, e-commerce, e-logistics and other providers of FinTech supporting services. Within the ecosystem, FinTech lenders can collaborate with various other parties/providers to support their services. Cooperation includes e-KYC, digital signature, e-stamp, e-credit information & scoring, insurtech, digital banking, escrow & virtual account, e-collection, regtech, e-pawn, e-capital market, e-payment, e-hedging and others. Through collaboration within an ecosystem, FinTech lenders are also expected to provide new job opportunities, create a healthy and solid digital business environment that is simple to access, particularly for business players.

OJK secara aktif melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/ lembaga negara, diantaranya Bank Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan lainnya. Koordinasi tersebut dilakukan dengan tujuan mendorong agar ekosistem *fintech lending* dapat diimplementasikan dengan baik.

OJK actively coordinates with various government ministries and agencies, including Bank Indonesia, the Ministry of Communications and Information Technology, Ministry of Finance, Ministry of Law and Human Rights and others in order to create a sound FinTech lending ecosystem.

II.4.1.3 Perkembangan Industri *Fintech Peer to Peer Lending* (P2P) di Indonesia

Jumlah Perusahaan *Financial Technology Peer to Peer Lending* (P2P) yang terdaftar atau berizin pada 2019 mengalami peningkatan sejumlah 86,36% (*yoy*) menjadi sebanyak 164 perusahaan, yang terdiri dari 152 Perusahaan *Fintech Peer to Peer Lending* (P2P) konvensional dan 12 perusahaan menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip syariah. Berdasarkan profil perusahaan, *Fintech Peer to Peer Lending* (P2P) di Indonesia per 2019 mayoritas berkembang di Jabodetabek dan sebesar 68,90% dimiliki dengan permodalan lokal.

II.4.1.3 FinTech Peer-to-Peer Lending (P2P) Industry Development in Indonesia

The number of FinTech Peer-to-Peer Lending (P2P) companies registered or licensed increased 86.36% (yoy) in 2019 to a total of 164, consisting of 152 conventional Peer-to-Peer Lending (P2P) companies and 12 compliant with Islamic principles. Based on company profile, most Peer-to-Peer Lending (P2P) companies have been developed in the Jakarta Metropolitan Area (Jabodetabek) and 68.90% are funded with local capital.

Profil Domisili Perusahaan Fintech P2P
Location of Peer-to-Peer Lending (P2P) Companies

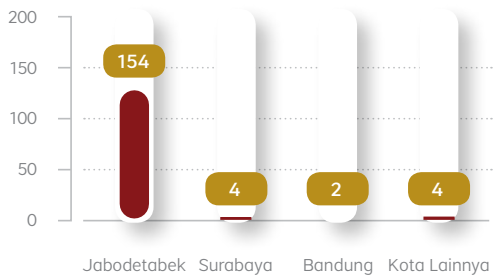

Profil Status Permodalan Perusahaan Fintech P2P Lending
Capital Funding of Peer-to-Peer Lending (P2P) Companies

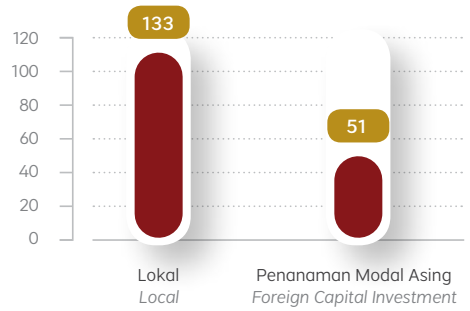

II.4.2 Peningkatan Inklusi & Literasi Keuangan Melalui Program Dan Kebijakan

II.4.2.1 Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan

Survei Nasional Literasi Keuangan 2019 (yang merupakan survei nasional literasi dan inklusi keuangan ketiga yang dilakukan OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 38,03% dan indeks inklusi keuangan 76,19%. Hasil tersebut menunjukkan peningkatan pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8,33%, serta peningkatan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8,39% apabila dibanding hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016. Pencapaian tersebut melampaui target indeks literasi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres No. 50 tahun 2017 mengenai Strategi Nasional Perlindungan Konsumen sebesar 35% dan target indeks inklusi keuangan yang dicanangkan pemerintah melalui Perpres Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) sebesar 75% pada tahun 2019.

Survei OJK 2019 ini mencakup 12.773 responden di 34 provinsi dan 67 kota/kabupaten dengan mempertimbangkan *gender* dan strata wilayah perkotaan/perdesaan. Penentuan jumlah sampel menggunakan metode Krejcie dan Morgan (1970) dengan *margin of error* 1% pada tingkat kepercayaan 95%. SNLIK 2019 juga menggunakan metode, parameter dan indikator yang sama, yaitu indeks literasi keuangan yang terdiri dari parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (*usage*).

Berdasarkan strata wilayah, untuk perkotaan indeks literasi keuangan mencapai 41,41% dan inklusi keuangan masyarakat perkotaan sebesar 83,60%, sementara indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat perdesaan adalah 34,53% dan 68,49%. Hasil survei juga menunjukkan bahwa berdasarkan *gender* indeks literasi dan inklusi keuangan laki-laki sebesar 39,94% dan

II.4.2 Increasing Financial Inclusion and Literacy through Programs and Policies

II.4.2.1 National Financial Literacy and Inclusion Survey

National Financial Literacy Survey 2019 (which is a national survey literacy and third financial inclusion by OJK) revealed that the Financial Literacy Index has reached 38.03% in Indonesia, with the Financial Inclusion Index recorded at 76.19%. Therefore, financial literacy has improved 8.33% and financial inclusion 8.39% compared with the first survey conducted in 2016. Those achievements exceed the targets set for 2019 by the Government in accordance with Presidential Regulation (Perpres) No. 50 of 2017 concerning the National Consumer Protection Strategy, namely 35% for the Financial Literacy Index, and Presidential Regulation (Perpres) No. 82 of 2016 concerning the National Financial Inclusion Strategy, namely 75% for the Financial Inclusion Index.

The National Financial Literacy and Inclusion Survey (SNLIK) in 2019 included 12,773 respondents in 34 provinces and 67 cities/regencies based on gender as well as urban/rural stratification. The sample size was determined using the method developed by Krejcie and Morgan (1970) with a 1% margin of error and 95% confidence interval. Furthermore, SNLIK 2019 also used the same methods, parameters and indicators, namely a financial literacy index consisting of knowledge, skills, confidence, attitude and behaviour, while the financial inclusion index relied on usage parameters.

Based on urban/rural stratification, the Urban Financial Literacy Index stood at 41.41% and the Urban Financial Inclusion Index at 83.60%, while the Rural Financial Literacy Index and Rural Financial Inclusion Index were recorded at 34.53% and 68.49% respectively. The survey also revealed that financial literacy and inclusion for males stood at 39.94% and 77.24%, relatively higher

77,24%, relatif lebih tinggi dibanding perempuan sebesar 36,13% dan 75,15%. OJK akan menggunakan hasil SNLIK tahun 2019 ini untuk penyempurnaan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang lebih efektif dan tepat sasaran.

II.4.2.2 Bulan Inklusi Keuangan

Bulan Inklusi Keuangan (BIK) yang diadakan pada bulan Oktober setiap tahunnya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan serta mendorong akselerasi penambahan jumlah rekening maupun penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Kegiatan BIK 2019 dilaksanakan dengan melibatkan Kantor Regional (KR) dan Kantor OJK (KOJK) bekerja sama dengan kantor cabang LJK dan *stakeholders* terkait di daerah. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain expo inklusi keuangan, pasar keuangan rakyat, seminar, *financial experience festival*, dan OJK *goes to school*.

Berdasarkan Sistem Informasi Pelaporan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (SiPEDULI), tercatat sebanyak 265 PUJK ikut berpartisipasi dalam rangka BIK dengan melaksanakan 401 kegiatan yang dihadiri oleh 404.414 peserta di seluruh daerah di Indonesia.

Puncak kegiatan BIK adalah kegiatan "FinEXPO & *Sundown Run* 2019" yang diinisiasi oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan didukung oleh OJK. Kegiatan tersebut mengambil tema "Sinergi Aksi dalam Mewujudkan Inklusi Keuangan Untuk Semua dan Perlindungan Konsumen yang Optimal". Adapun *tagline* pada kegiatan tersebut adalah "Gapai Puncak Inklusi, Perlindungan Makin Pasti." Total pembukaan jumlah rekening saat penyelenggaraan Finexpo mencapai 23.849 rekening dengan total transaksi Rp100 Miliar.

II.4.2.3 Sinergi Edukasi Keuangan

Sebagai upaya peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat dan dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) khususnya Pilar I Edukasi Keuangan, OJK bersinergi dengan Kementerian/lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lain dalam menyelenggarakan program literasi dan edukasi keuangan bagi masyarakat.

Sepanjang 2019, OJK menginisiasi terselenggaranya 55 kegiatan literasi dan edukasi keuangan kepada 37.566 orang dengan perolehan peningkatan pemahaman sebesar 18,18%. Adapun bentuk kegiatan edukasi keuangan yang telah dilaksanakan antara lain: (i) Edukasi Komunitas; (ii) OJK *Goes to School/ Campus*; (iii) Peluncuran Galeri Investasi *Mobile* (GIM); (iv) *Outreach Program*; (v) ToT Guru dan Dosen; dan (vi) Pameran/Expo Keuangan (iB Vaganza)

than females at 36.13% and 75.15% respectively. OJK will use the results of the latest National Financial Literacy and Inclusion Survey (SNLIK) performed in 2019 to further refine the National Financial Literacy Strategy in terms of effectiveness and target groups.

II.4.2.2 Financial Inclusion Month

Financial Inclusion Month (BIK) is an annual event during the month of October that aims to increase public understanding (literacy) concerning financial products and services, while increasing the number of account holders as well as end users of financial products and services (inclusion).

In 2019, Financial Inclusion Month was implemented with the participation of OJK regional and branch offices in cooperation with financial services institutions and relevant stakeholders in local areas. The activities included a financial inclusion expo, community financial markets, seminars, the Financial Experience Festival and OJK Goes to School.

Based on the Education and Consumer Protection Reporting Information System (SiPEDULI), a total of 265 financial services providers participated in the Financial Inclusion Month, organising 401 activities attended by 404,414 participants across Indonesia.

The culmination of Financial Inclusion Month was the FinEXPO and Sundown Run 2019, initiated by financial services providers and supported by OJK. The activity was entitled "Synergic Action to Create Financial Inclusion for All and Optimal Consumer Protection". The tagline of the event roughly translates as "Peak Inclusion, More Protection". During the FinEXPO, a total of 23,849 new accounts were opened, with total transactions exceeding Rp100 billion.

II.4.2.3 Synergic Financial Education

Striving to raise the financial literacy and inclusion indexes as well as implement Presidential Regulation (Perpres) No. 82 of 2016 concerning the National Financial Inclusion Strategy (SNKI), specifically Pillar I - Financial Education, OJK cooperates in synergy with relevant government ministries and agencies, the financial services industry and various other parties to organise the public financial literacy and education program.

In 2019, OJK initiated 55 financial literacy and education activities targeting 37,566 people, effectively raising understanding by 18.18%. The activities included: (i) community education; (ii) OJK Goes to School/Campus; (iii) launching the Mobile Investment Gallery (GIM); (iv) outreach program; (v) training of trainers (ToT) for teachers and lecturers; and (vi) financial exhibitions (iB Vaganza).

Target peserta literasi keuangan 2019 sebagaimana yang telah ditetapkan pada Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*Revisit* 2017) adalah: (i) Pelajar/mahasiswa dan pemuda; (ii) Profesional; (iii) Karyawan; (iv) Petani dan nelayan; (v) Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan calon PMI; (vi) Masyarakat daerah tertinggal, terpencil dan terluar; (vii) Penyandang disabilitas; (viii) Pensiunan/ibu rumah tangga; (ix) Perempuan; dan (x) UMKM.

Latar belakang pemilihan lokasi edukasi keuangan berdasarkan indeks literasi dan inklusi keuangan daerah yang masih rendah dibandingkan dengan angka indeks secara nasional. Untuk menunjang upaya peningkatan literasi keuangan, peserta edukasi keuangan mendapatkan materi yang disesuaikan dengan latar belakang dan kebutuhan peserta. Adapun materi yang disampaikan adalah:

1. Pengenalan tugas dan fungsi OJK
2. Waspada berinvestasi
3. Perencanaan keuangan
4. Pengenalan produk/layanan jasa keuangan yang mencakup:
   a. Fitur produk
   b. Manfaat dan risiko
   c. Hak dan kewajiban
   d. Cara mengakses/memperoleh produk
   e. Biaya-biaya yang timbul atas perolehan produk
   f. Cara untuk melakukan pencairan produk, penebusan, klaim atau pelunasan produk
   g. Informasi mekanisme transaksi
   h. Perpajakan terkait produk/jasa keuangan

II.4.2.4 Pengembangan Materi Edukasi Keuangan

Selama 2019, dalam rangka mengikuti perkembangan industri jasa keuangan yang dinamis, OJK kembali melakukan penyempurnaan data dan informasi terkini buku Seri Literasi Keuangan Tingkat Perguruan Tinggi dan juga menambahkan buku (10) Aspek Perpajakan Sektor Jasa Keuangan, untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan aplikatif tentang produk dan jasa keuangan, yang merupakan hasil kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan.

Pada revisi seri buku perguruan tinggi terbitan 2019 ini atas bantuan Asian Development Bank (ADB), buku seri literasi keuangan tersebut kemudian dapat diakses secara bebas melalui www.sikapiuangmu.ojk.go.id dalam bentuk modul *e-book*.

Based on the National Financial Literacy Strategy (2017 Revisit), the financial literacy program targeted the following groups in 2019: (i) students and youth; (ii) professionals; (iii) workers; (iv) farmers and fishermen; (v) Indonesian migrant workers and prospective migrant workers; (vi) communities in disadvantaged, remote and outlying regions; (vii) people with disabilities; (viii) pensioners/ housewives; (ix) women; and (x) micro, small and medium enterprises (MSME).

The locations targeted for financial education were based on areas with financial literacy and inclusion indexes below the national average. Supporting efforts to increase financial literacy, the participants of financial education received materials tailored to their specific needs as follows:

1. *Introduction to OJK tasks and functions*
2. *Prudent Investment*
3. *Financial planning*
4. *Introduction to financial products and services, including*
   a. *Product features*
   b. *Benefits and risks*
   c. *Rights and responsibilities*
   d. *Access to products*
   e. *Cost of financial products*
   f. *Methods to liquidate, redeem, claim or repay financial products*
   g. *Information concerning transaction mechanisms*
   h. *Taxes on financial products and services*

II.4.2.4 Development of Financial Education Materials

In 2019, to remain abreast of dynamic financial services industry development, OJK refined and updated the data and information contained in the Financial Literacy Series as part of the university curriculum and also added Book No. 10 - Financial Services Sector Taxes in order to provide a more comprehensive and applicable representation of financial products and services in conjunction with the Directorate General of Taxes of the Ministry of Finance.

The revised university book series issued in 2019 with assistance from the Asian Development Bank (ADB) is freely accessible in the form of an e-book module from www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

II.4.2.5 SiMolek

Operasionaliasasi SiMOLEK merupakan salah satu upaya OJK untuk melakukan kegiatan literasi dan edukasi keuangan secara lebih *mobile* bersinergi dengan Industri Jasa Keuangan khususnya untuk menjangkau daerah-daerah yang membutuhkan informasi mengenai keuangan tetapi metode penyampaiannya lebih informal seperti area sekolahan, parkiran pasar, sekitaran perkantoran, dan lainnya.

Pada 2019, OJK telah bersinergi dengan 388 Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam Operasional SiMOLEK. Dari sisi aktivitas, pelaksanaan program literasi dan edukasi keuangan bersama SiMOLEK baik yang diinisiasi oleh OJK sendiri maupun berkolaborasi dengan PUJK telah menghasilkan:

1. Sebanyak 459 kegiatan edukasi yang telah dilakukan;
2. Terdapat 83.610 orang telah diedukasi yang terdiri dari pelajar/akademisi, ibu rumah tangga, pelaku UMKM, profesional, masyarakat umum; dan
3. Dilakukan pada 1.267 lokasi kegiatan yang terdiri dari sekolah, universitas, pasar, perumahan, kantor, alun-alun, event, dan lainnya (seperti *Car Free Day* dan tempat ibadah).

Adapun operasionalisasi SiMOLEK sepanjang 2019 yang mengikutsertakan mobil layanan gerak telah membantu masyarakat untuk bertransaksi keuangan dengan nominal mencapai Rp9,01 miliar.

II.4.2.6 Galeri Investasi *Mobile*

Dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di sektor Pasar Modal, OJK bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) merevitalisasi dan meningkatkan fungsi galeri investasi yang telah didirikan dibeberapa perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia agar lebih proaktif tidak hanya menjangkau civitas akademika tetapi memberikan manfaat juga bagi masyarakat disekitarnya agar lebih mengenal dan mampu mengakses produk pasar modal melalui Galeri Investasi *Mobile* (GIM). Tujuan dari peluncuran GIM bagi masyarakat adalah untuk menanamkan pentingnya merencanakan keuangan, mendorong peningkatan pemahaman masyarakat mengenai produk dan jasa di sektor pasar modal, membuka akses keuangan masyarakat atas sektor dimaksud, serta menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih produk investasi.

Sepanjang 2019, OJK telah merevitalisasi galeri investasi yang berada di beberapa perguruan tinggi menjadi GIM di Universitas Jambi, Universitas Muhammadiyah Palembang dan Universitas Pembangunan Jaya. Sebagai tindak lanjut dari peluncuran GIM tersebut, OJK bersinergi bersama BEI untuk melakukan *monitoring* terhadap kinerja seluruh Galeri Investasi yang ada untuk memantau perkembangan transaksi yang dilakukan di GIM.

II.4.2.5 SiMOLEK (Financial Literacy Car)

SiMOLEK is operated by OJK for mobile financial literacy and educational activities in synergy with the Financial Services Industry, particularly to access regions in need of financial information through informal delivery channels, such as around schools, market car parks, office spaces and so on.

In conjunction with 388 financial services providers, OJK operated SiMOLEK in 2019 for financial literacy and educational activities initiated by OJK and in collaboration with financial services providers as follows:

1. *459 educational activities*
2. *83,610 people have been educated, including students/academics, housewives, MSMEs, professionals and members of the public; and*
3. *1,267 locations, including schools, universities, markets, housing estates, offices, plazas and other places, such as the Car Free Day and places of worship.*

In 2019, SiMOLEK provided mobile services helping members of the public in terms of financial transactions with a value of Rp9.01 billion.

II.4.2.6 Mobile Investment Gallery

Seeking to increase financial literacy and inclusion in the capital market, OJK in conjunction with the Indonesia Stock Exchange revitalised and expanded the function of the Investment Gallery established at a number of universities in various regions of Indonesia in order to proactively reach academia and also help the surrounding communities understand and access capital market products through the Mobile Investment Gallery (GIM). GIM aims to instil the importance of financial planning, while raising public understanding of capital market products and services, broadening public access to capital market finance and encouraging caution when choosing investment products.

In 2019, OJK revitalised investment galleries at several universities into Mobile Investment Galleries (GIM), namely at the University of Jambi, Muhammadiyah University of Palembang and Pembangunan Jaya University. Following the launch of GIM, OJK in conjunction with the Indonesia Stock Exchange regularly monitors the performance of all GIM and the transactions facilitated therein.

II.4.2.7 Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU)

Kompetisi Inklusi Keuangan (KOINKU) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendapatkan model inklusi keuangan yang dapat menjadi barometer model inklusi keuangan. Model tersebut diharapkan dapat diimplementasikan di sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, industri keuangan non-bank, serta pasar modal. Tema pelaksanaan KOINKU yang diangkat pada tahun 2019 adalah "Mendorong Inklusi Keuangan Melalui Teknologi Digital."

Tujuan dari pelaksanaan KOINKU tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong adanya inovasi ide model inklusi keuangan yang bermanfaat bagi tumbuh kembangnya sektor jasa keuangan serta memberikan manfaat bagi peningkatan taraf hidup konsumen melalui digitalisasi.
2. Mendapatkan model inklusi keuangan melalui keuangan digital untuk dapat diimplementasikan pada sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, industri keuangan non bank, maupun pasar modal.
3. Mendorong adanya rekomendasi gagasan inovatif dan solutif di era digital dalam rangka meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat serta mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Sampai dengan batas waktu pengumpulan, jumlah proposal model inklusi keuangan yang diterima oleh panitia hingga batas waktu pengumpulan adalah sebanyak 114 proposal. Berdasarkan hasil penilaian dan diskusi para juri, telah ditetapkan pemenang KOINKU tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

Juara	Nama Tim	Judul Proposal
Juara 1	Youth for SDGs	*Waste Coin*, Satu Juta Masyarakat Terakses Fasilitas Keuangan melalui *Mobile Apps* Pengelolaan Sampah Waste Coin, One Million People Accessed through Financial Facilities Waste Management Mobile Apps
Juara 2	Galau	Inklusi Keuangan Digital kepada Kelompok Tani Area Rural melalui Permodalan Lembaga Keuangan, Edukasi dan Penerapan Teknologi Smart Farming 4.0 Digital Financial Inclusion to Rural Area Farmers Groups through Capital Financial Institutions, Education and Application of Smart Technology Farming 4.0
Juara 3	i-PNS	Pengembangan Aplikasi Investasi bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai Aksi Peningkatan Akses Keuangan Development of Investment Applications for Civil Servants as an Action to Increase Financial Access
Juara Harapan 1	KerjaLink	Kerja Link sebagai Platform Pendorong Inklusi Pekerja Informal di Sektor Jasa Keuangan Employment Link as a Platform for Promoting Informal Worker Inclusion in the Financial Services Sector
Juara Harapan 2	Pactum Serva	Platform Inklusi Keuangan Penyandang Disabilitas (PINTAS) dan Model Investasi ala IMPIANKU Platform for Financial Inclusion of Persons with Disabilities (PINTAS) and Investment Models in the style of IMPIANKU

Adapun pengumuman dan penyerahan hadiah kepada pemenang KOINKU 2019 dilaksanakan pada acara AKSiMUDA 2019. Pelaksanaan KOINKU diharapkan dapat menjaring ide-ide masyarakat dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan Indonesia.

II.4.2.7 KOINKU (Financial Inclusion Competition)

The Financial Inclusion Competition (KOINKU) is organised to find financial inclusion models as a barometer of financial inclusion that can be implemented in the financial services sector, including the banking industry, non-bank financial industry and capital market. The theme of KOINKU in 2019 was "Nurturing Financial Inclusion through Digital Technology".

The objectives of KOINKU in 2019 were as follows:

1. *To foster innovative financial inclusion models that can grow and develop the financial services sector, while raising standards of living through digitalisation.*
2. *To find financial inclusion models through digital finance for implementation in the financial services sector, including the banking industry, non-bank financial industry and capital market.*
3. *To cultivate innovative recommendations and solutions in the digital era in order to broaden public access to finance and stimulate economic growth in Indonesia.*

At the deadline, a total of 114 proposals of financial inclusion models had been received. Based on discussions and assessments by the jury, the following winners of KOINKU 2019 were announced:

The winners were announced and prizes awarded at the AKSiMUDA event in 2019. The KOINKU financial inclusion competition is expected to capture ideas from the public about how to raise financial inclusion in Indonesia.

II.4.2.8 Sosialisasi Pasar Modal Terpadu

Sosialisasi Pasar Modal Terpadu di 2019 telah dilaksanakan di delapan kota yakni Denpasar, Semarang, Surabaya, Bandung, Makassar, Yogyakarta, Medan, dan Malang.

Kegiatan Sosialisasi Pasar Modal Terpadu antara lain seminar Pasar Modal bagi civitas mahasiswa, media gathering dengan wartawan, *business meeting* dengan pemilik atau pengendali kelompok usaha, dan *workshop go public*.

II.4.3 Penguatan Perlindungan Konsumen

II.4.3.1 Layanan Kontak 157

Pada 2019, Layanan Konsumen OJK menerima 117.099 layanan yang terdiri dari: 15.683 informasi (13,39%), 100.710 pertanyaan (86,00%) , dan 706 pengaduan (0,60%). Jumlah total layanan tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan layanan pada tahun 2018 yaitu naik sebanyak 34.387 layanan (41,57%).

Untuk memberikan kemudahan akses kepada Konsumen dan masyarakat, OJK telah menyediakan beberapa akses kanal layanan yang meliputi:

- Telepon *contact center* atau yang sering disebut dengan Kontak OJK 157;
- Email konsumen dengan alamat: konsumen@ojk.go.id;
- Formulir pengaduan elektronik yang dapat diakses melalui situs: konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan;
- Surat tertulis;
- Penerimaan layanan secara langsung (*walk-in*); dan
- Penerimaan layanan percakapan melalui .

Sampai dengan akhir 2019, kanal yang telah digunakan oleh Konsumen dan masyarakat dalam menyampaikan layanan ke OJK adalah:

- Melalui *e-mail* sebanyak 40.853 layanan (34,89%);
- Melalui telepon atau Kontak OJK 157 sebanyak 35.506 layanan (30,32%);
- Melalui penerimaan secara langsung (*walk-in*) sebanyak 32.205 layanan (27,50%);
- Melalui surat sebanyak 8.535 layanan (7,29%); dan
- Sejak 2019, OJK menerima pesan melalui *WhatsApp* untuk sebanyak 19,733 layanan.

II.4.2.8 Integrated Capital Market Socialisation

In 2019, integrated capital market socialisation activities were organised in eight cities, namely Denpasar, Semarang, Surabaya, Bandung, Makassar, Yogyakarta, Medan and Malang.

Integrated capital market socialisation activities included a capital market seminar for students, media gatherings with journalists, business meetings and Go Public workshops.

II.4.3 Strengthening Consumer Protection

II.4.3.1 Contact 157 Services

In 2019, OJK consumer services received 117,099 services requests consisting of 15,683 requests for information (13.39%), 100,710 questions (86.00%) and 706 complaints (0.60%). In total, services requests increased 41.57% or by 34,387 compared with 2018.

To provide more convenient access for consumers and the public, OJK provides a number of access channels as follows:

- *A telephone contact centre known as Kontak OJK 157;*
- *A consumer email channel: konsumen@ojk.go.id;*
- *An electronic complaint form: konsumen.ojk.go.id/FormPengaduan;*
- *In writing (mail);*
- *Walk-In services; and*
- *WhatsApp services*

At the end of 2019, consumers and members of the public had used the following access channels to OJK services:

- *Email: 40,853 service requests (34.89%);*
- *Kontak OJK 157: 35,506 service requests (30.32%);*
- *Walk-in: 32,205 service requests (27.50%);*
- *In writing: 8,535 service requests (7.29%); and*
- *WhatsApp messages: 19,733 service requests.*

Layanan Konsumen OJK dan Media Penyampaian
OJK Consumer Services and Delivery Channels

Layanan Konsumen/*Service Request*

86,00%
100,710 Pertanyaan
Question

13,39%
15.683 Laporan
Report

0,06%
706 Pengaduan
Complaint

Layanan Pengaduan/*Complaint Service*

34,89%
40.853 E-mail
E-mail

30,32%
35.506 Telepon
Telephone

27,50%
32.205 Walk-in
Walk-in

7,29%
8.535 Surat
Mail

Dari keseluruhan jumlah layanan yang diterima oleh Layanan Konsumen OJK, jika dikategorikan berdasarkan masing-masing sektor industri jasa keuangan adalah sebagai berikut:

The composition of total service requests received through OJK Consumer Services in 2019 by sector is as follows:

Layanan Konsumen per Sektor
Service Requests by Sector

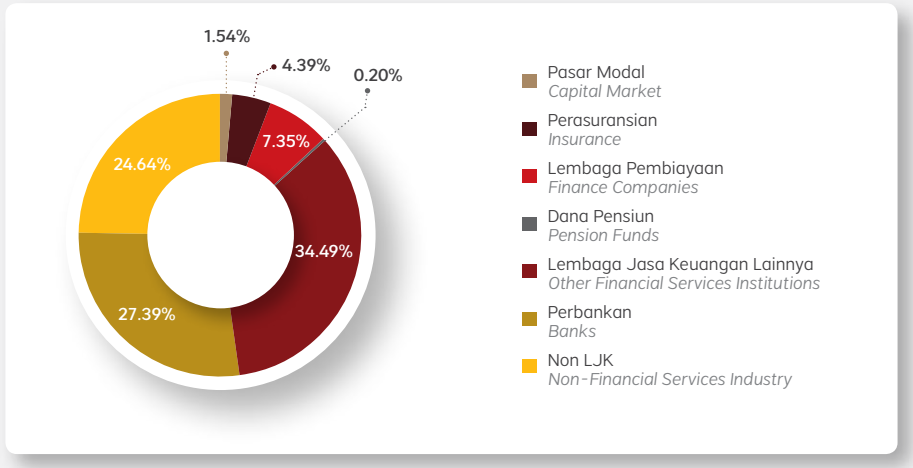

Sumber: OJK Integrated Consumer Services System, 2019
Source: OJK Integrated Consumer Services System, 2019

II.4.3.2 Sistem Informasi Pelaporan dan Perlindungan Konsumen

Analisis pelayananan konsumen sektor keuangan yang dilakukan oleh OJK juga memperhatikan atas data dan informasi dari seluruh PUJK yang dikirimkan secara elektronik dan berkala kepada OJK melalui SIPEDULI (Sistem Informasi Pelaporan dan Perlindungan Konsumen). Hal ini didasarkan pada POJK No. 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Satu dari empat format laporan yang wajib disampaikan berdasarkan peraturan tersebut adalah Laporan Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan, yang disampaikan setiap tiga bulan sekali, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dari hasil rekap laporan 2019, didapatkan informasi sebagai berikut:

II.4.3.2 Consumer Protection and Reporting Information System

OJK analysis of financial sector consumer services also looks at the data and information sent electronically and periodically by all financial services providers to OJK through the Consumer Protection and Reporting Information System (SiPEDULI). This is in accordance with OJK Regulation (POJK) No. 18/POJK.07/2018 concerning Consumer Complaint Services in the Financial Services Sector and Circular Letter (SEOJK) No. 2/SEOJK.07/2014 concerning Consumer Complaint Services and Resolution at Financial Services Providers.

One of the four reporting formats mandatorily submitted in accordance with the regulations is the Complaint Services and Resolution Report, which is submitted on a quarterly basis no later than the 10th day of the subsequent month. The following information was identified from those reports in 2019:

Kepatuhan Pelaporan Perlindungan Konsumen
Consumer Protection Reporting Compliance

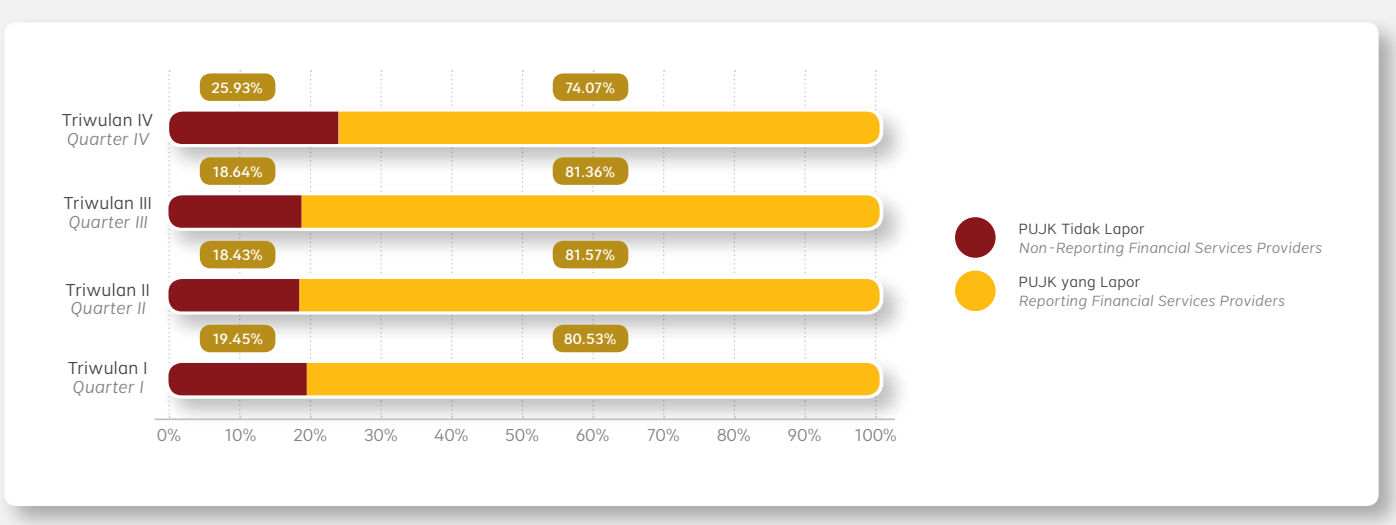

Secara rinci pada setiap sektor, tingkat kepatuhan laporan IDR setiap triwulan ditampilkan pada tabel berikut :

By sector, IDR reporting compliance on a quarterly basis is presented as follows:

Kepatuhan Pelaporan Perlindungan Konsumen Bedasarkan Sektor
Consumer Protection Reporting Compliance by Sector

Sektor	Triwulan I Quarter I	Triwulan II Quarter II	Triwulan III Quarter III	Triwulan IV Quarter IV	Sector
IKNB	70.49%	69.99%	77.01%	65.09%	NBFI
Pasar Modal	73.91%	75.49%	75.98%	70.59%	Capital Market
Perbankan	85.30%	86.88%	83.75%	78.06%	Banking Industry

Dari seluruh data yang telah disampaikan, pada 2019 terdapat 3.437.383 total pengaduan yang diterima oleh seluruh PUJK. Dari total pengaduan tersebut sebesar 92,81% (3.190.084) dilaporkan telah telah diselesaikan oleh PUJK.

From the data submitted, a total of 3,437,383 complaints were received by all financial services providers in 2019. Of the total, 92.81% (3,190,084) have been resolved by financial services providers.

Tingkat Penyelesaian Pengaduan melalui IDR

Complaint Resolution through Internal Dispute Resolution (IDR)

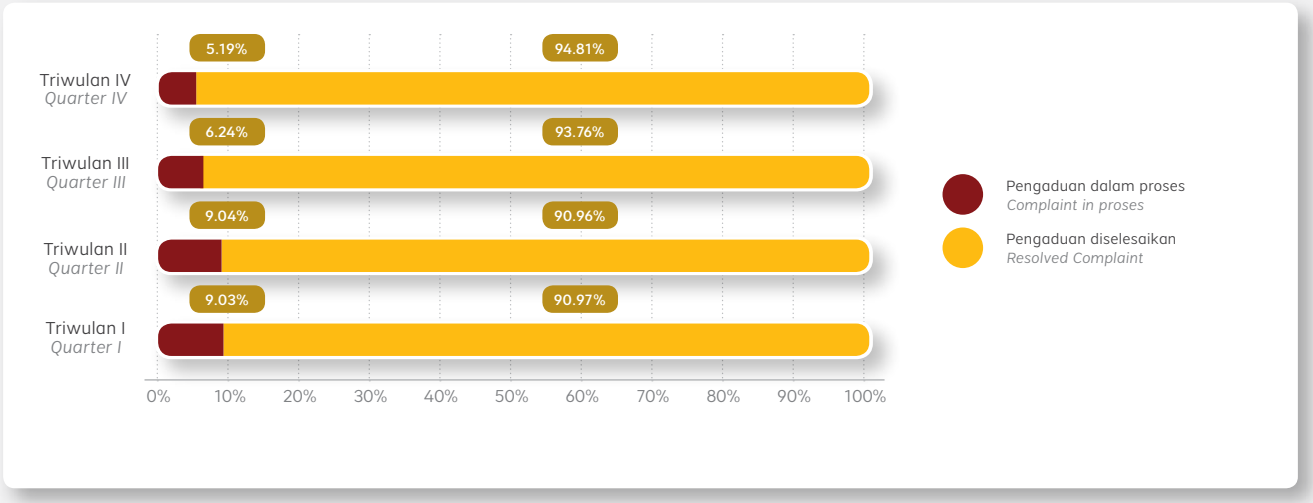

Sumber : SIPEDULI OJK

Source : SIPEDULI OJK

Penanganan Pengaduan per Sektor pada SIPEDULI

Complaint Handling by Sector in SiPEDULI System

Sektor	2019			Sector
	Jumlah Pengaduan Total Complaints	Selesai Resolved	% Selesai Percentage	
IKNB	823,963	814,678	98.87%	NBFI
Pasar Modal	2,678	2,432	90.81%	Capital Market
Perbankan	2,610,742	2,372,974	90.89%	Banking Industry
Total	3,437,383	3,190,084	92.81%	Total

Sumber: SIPEDULI, Tahun 2019

Source: SiPEDULI, 2019

II.4.3.3 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)

Selama 2019, terdapat 139 permohonan penyelesaian sengketa yang diterima oleh LAPS pada 2019. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) menerima paling banyak permohonan yakni sebanyak 72 permohonan. Jenis sengketa diterima LAPSPI pada 2019 sebagian besar terkait restrukturisasi atau *rescheduling* kredit yakni sebesar 55,3% dan disusul permasalahan penyalahgunaan kartu kredit.

II.4.3.3 Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS)

In 2019, a total of 139 dispute resolution requests were received by Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS) in 2019, dominated by the banking industry with 72 requests through Alternative Dispute Resolution Institutions for the Banking Sector (LAPSPI). Most of the disputes received by LAPSPI in 2019 related to loan restructuring or rescheduling (55.3%), followed by credit card issues.

Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diterima oleh LAPS

Dispute Resolution Requests received by LAPS

Lembaga	Persetujuan Permohonan Requests received		Jumlah Keseluruhan Grand Total	Institution
	Disetujui Approved	Tidak Disetujui Rejected		
Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)	48	1	49	Indonesian Insurance Mediation and Arbitration Board (BMAI)
Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPI)	2	0	2	Indonesian Guarantee Company Arbitration Board (BAMPI)
Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)	0	0	0	Pension Fund Mediation Agency (BMDP)
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)	18	54	72	Alternative Dispute Resolution Institutions for the Banking Sector (LAPSI)
Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)	0	0	0	Indonesian Guarantee Company Arbitration Board (BAMPPI)
Badan Mediasi Pembiayaan, Pergadaian dan Ventura Indonesia (BMPPVI)	9	7	16	Indonesian Financing, Pawnbroker and Venture Capital Mediation Agency (BMPPVI)
Total	**77**	**62**	**139**	**Total**

Dari total 139 permohonan penyelesaian sengketa yang diterima dan diproses oleh LAPS tersebut di atas, terdapat total 62 permohonan yang ditolak karena beberapa hal yakni sengketa belum diselesaikan melalui mekanisme *Internal Dispute Resolution* (IDR), tidak memenuhi persyaratan administratif di LAPS, bukan merupkan sengketa keperdataan, bukan kewenangan penyelesaian sengketa LAPS, termohon menolak penyelesaian sengketa melalui LAPS dan lainnya. Dari 77 permohonan yang disetujui LAPS untuk ditindaklanjuti, sebanyak 44 permohonan ditindaklanjuti melalui layanan mediasi, 5 permohonan ditindaklanjuti melalui layanan ajudikasi, dan 7 permohonan ditindaklanjuti melalui layanan arbitrase. Sisanya sebanyak 21 permohonan ditindaklanjuti dengan layanan lain seperti pemberian penjelasan dan rekomendasi.

Of the 139 total requests for dispute resolution received and processed by Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS), 62 were rejected based on a number of factors, including unresolved through the Internal Dispute Resolution (IDR) mechanism, failure to meet the administrative requirements of LAPS, not meeting the requirements as a civil dispute, beyond the dispute resolution authority of LAPS, rejected by the respondent through LAPS and other factors. Of the 77 requests approved by LAPS for follow-up action, 44 were forwarded to mediation services, 5 to adjudication services and 7 to arbitration services. The remaining 21 were actioned through other services, such as providing clarification and recommendations.

Layanan yang Disetujui LAPS

Services Approved by LAPS

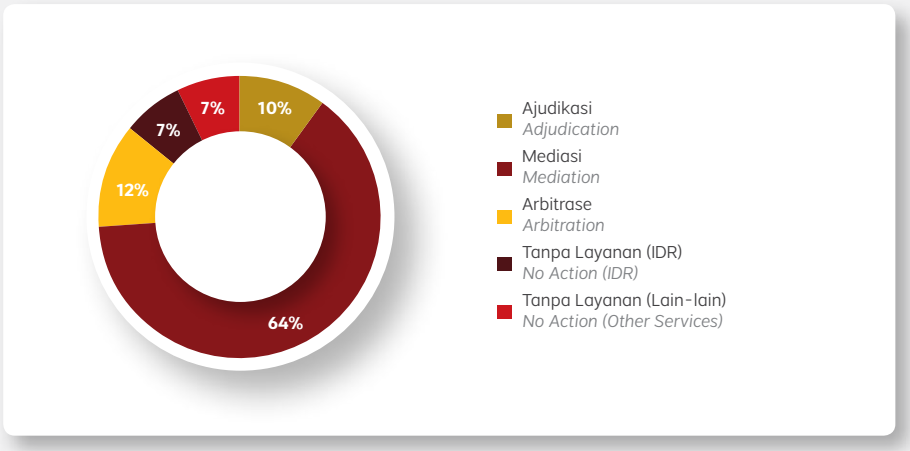

Sampai dengan periode pelaporan, permohonan layanan yang diselesaikan LAPS sebanyak 35 permohonan dari 77 permohonan yang disetujui untuk ditindaklanjuti. Sebanyak 42 permohonan masih dalam proses karena beberapa hal yakni menunggu kelengkapan dokumen, menunggu jawaban termohon, dan menunggu konfirmasi waktu pelaksanaan layanan dari kedua belah pihak.

At the end of the reporting period, LAPS had resolved 35 of the 77 requests approved for follow-up action. The remaining 42 requests are still being processed due to several reasons, including awaiting complete documentation, awaiting a response and awaiting confirmation from both parties in the dispute to initiate the services.

Penilaian Kembali LAPS dan Penetapan Daftar LAPS
Sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 54/SEOJK.07/2016 tentang Monitoring Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (SEOJK Monitoring LAPS), Daftar LAPS akan ditinjau kembali dan dilakukan penilaian berkala setiap dua tahun sekali. Mempertimbangkan hal tersebut, maka OJK melakukan penilaian kembali 2019 kepada LAPS yang masuk dalam Daftar LAPS tahun 2017 dan BMPPVI dengan pertimbangan efektivitas pelaksanaan penilaian kembali yang dilakukan oleh OJK.

Review of LAPS and LAPS List
In accordance with Circular Letter (SEOJK) No. 54/SEOJK.07/2016 concerning Monitoring Alternative Dispute Resolution Institutions (LAPS), the LAPS List must be reviewed every two years. In 2019, therefore, OJK reviewed the LAPS included on the list in 2017 and BMPPVI based on the effectiveness of the review conducted by OJK.

Berdasarkan hasil penilaian, OJK menetapkan BMAI, BAPMI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI dan BMPPVI ke dalam Daftar LAPS melalui Keputusan Anggota Dewan Komisoner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Nomor KEP-3/D.07/2019 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan Pengumuman Anggota Dewan Komisoner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Nomor PENG-1/D.07/2019 tentang Daftar Lembaga Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. Daftar LAPS yang baru tersebut telah diumumkan kepada masyarakat melalui surat kabar berperedaran nasional.

Based on the review, OJK included BMAI, BAPMI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI and BMPPVI on the LAPS List through Commissioner in Charge of Education and Consumer Protection Decree No. KEP-3/D.07/2019 concerning the List of Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector and Commissioner in Charge of Education and Consumer Protection Announcement No. PENG-1/D.07/2019 concerning the List of Alternative Dispute Resolution Institutions in the Financial Services Sector. The updated LAPS List was published in a national newspaper.

II.4.3.4 Pelaksanaan Penyidikan & Warung Waspada Investasi
Bahwa dalam rangka mewujudkan kegiatan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki wewenang untuk melaksanakan fungsi penyidikan, pengembangan kebijakan penyidikan, pelaksanaan kerja sama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penegakan hukum dan pemberian dukungan penyidikan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan.

II.4.3.4 Implementation of Investigations and Investment Alert Warong
To investigate crime in the financial services sector as mandated by Act No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, OJK is authorised to investigate, develop investigation policies, cooperate with relevant law enforcement agencies and support criminal investigations in the financial services sector.

OJK juga telah berkoordinasi dengan pihak Kementerian dan/atau Lembaga terkait lainnya untuk mendatangkan Penyidik dan/atau Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi formasi efektif Penyidik OJK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan akhir 2019, terdapat 20 orang Penyidik yang ditugaskan di OJK, terdiri dari 12 orang Penyidik yang berasal dari Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) dan delapan orang Penyidik yang berasal dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PPNS).

OJK has also coordinated with other relevant government ministries and/or agencies to recruit investigators and/or civil servants to fulfil an effective formation of OJK investigators in accordance with Act No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. At the end of 2019, a total of 20 investigators were tasked to OJK, consisting of 12 investigators from the National Police and 8 from the civil service.

Pada 2019, berdasarkan kriteria prioritas, OJK telah menerbitkan 22 Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang terdiri dari:

In 2019, OJK ordered 22 investigations based on priority criteria as follows:

Surat Perintah Penyidikan Investigation Warrant		
Perbankan Banking Industry	1 BPD, 2 Bank Umum & 14 BPR/S 1 Regional Bank, 2 Commercial Banks and 14 (Islamic) Rural Banks	17
Pasar Modal Capital Market	4 perkara Emiten/PP 4 Issuer/Public Company cases	4
IKNB NBFI	1 perkara Pembiayaan Penjaminan 1 Guarantee Company case	1
	Total	**22**

Dari hasil penyidikan dan gelar perkara, OJK selanjutnya telah mengirimkan 19 berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan RI sebagai berikut:

Based on the investigations, OJK forwarded 19 cases to the Public Prosecutor Unit (JPU) as follows:

Pemberkasan Kejaksaan Prosecutors' Cases		
Perbankan Banking Industry	1 BPD, 2 Bank Umum & 13 BPR/S 1 Regional Bank, 2 Commercial Banks and 13 (Islamic) Rural Banks	16
Pasar Modal Capital Market	3 perkara Emiten/PP 3 Issuer/Public Company cases	3
IKNB NBFI	-	-
	Total	**19**

Selanjutnya terdapat 20 berkas perkara telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Kejaksaan RI.

In total, 20 cases were confirmed as complete (P-21) by the Attorney General's Office as follows:

P-21		
Perbankan Banking Industry	1 BPD, 2 Bank Umum & 12 BPR/S 1 Regional Bank, 2 Commercial Banks and 12 (Islamic) Rural Banks	15
Pasar Modal Capital Market	4 perkara Emiten/PP 4 Issuer/Public Company cases	4
IKNB NBFI	1 perkara Pembiayaan 1 Financing Company case	1
	Total	**20**

Atas P-21 tersebut, OJK telah melaksanakan fungsi penyidikan sebagaimana dimaksud pasal 49 dan pasal 50 UU No 21 tahun 2011 tentang OJK.

Based on the P-21, OJK implemented its investigation function in accordance with Article 49 and Article 50 of Act No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority.

Selain itu, sebagai salah satu strategi OJK yaitu membuka pelayanan masyarakat melalui "Warung Waspada Investasi" dalam rangka mengedukasi masyarakat, konsultasi pengaduan dan sosialisasi mengenai berbagai persoalan terkait investasi, *fintech lending* dan gadai swasta ilegal kepada masyarakat melalui "Warung Waspada Investasi" di Kedai Kopi The Gade Coffee & Gold-Jakarta, dan selanjutnya dilaksanakan secara berkala setiap hari Jumat. Kegiatan "Warung Waspada Investasi" tersebut dihadiri oleh anggota Satgas Waspada Investasi, Media, dan masyarakat umum.

In addition, OJK also initiated a strategy to provide public services through an Investigation Alert Warong in order to educate the public as well as provide complaint consultation and socialisation activities concerning the various issues surrounding investment, FinTech lending and illegal private pawnbrokers. The Investigation Alert Warong is located at The Gade Coffee and Gold in Jakarta and operates every Friday with members of the investigation watchdog, media and public.

II.4.3.5 Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi (SWI) - Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID)

Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kegiatan penawaran investasi yang diduga ilegal, Satgas Waspada Investasi (SWI) memiliki program kerja melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan pembekalan KR/KOJK. Kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan di beberapa wilayah dengan skala prioritas terhadap daerah yang terindikasi banyak beroperasi penawaran kegiatan investasi yang diduga ilegal. Peserta kegiatan sosialisasi dan edukasi di masing-masing wilayah berasal dari segenap unsur masyarakat antara lain adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, TNI. Dengan narasumber dari OJK, Bareskrim Polri, Kementerian Perdagangan RI dan Kementerian Koperasi & UKM RI. Berikut kegiatan SWI terkait sosialisasi dan edukasi di daerah:

II.4.3.5 Investment Alert Task Force - Regional Investment Alert Task Force

Seeking to prevent illegal investment activity, the Investment Alert Task Force has a work program to provide socialisation activities and public education as well as brief OJK regional and branch offices. Socialisation and education activities have targeted areas identified with high incidences of illegal investment activity. The participants in each area include public figures, religious leaders, academics and army personnel. The speakers are from OJK, National Police, Ministry of Trade and the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (SMEs). The Investment Alert Task Force conducted the following regional socialisation and education activities in 2019:

Sosialisasi dan Edukasi Waspada Investasi Tahun 2019 *Investment Alert Socialization and Education in 2019*	
Kota *City*	Jakarta
	Pekanbaru
	Surabaya
	Semarang
	Medan
	Bali
Pembekalan Tim Kerja SWID Tahun 2019 *Provision of 2019 SWID Work Team*	
Kantor OJK *OJK's Office*	Kupang
	Palembang
	Cirebon
	Tasikmalaya
	Denpasar
	Malang
	Tegal
	Padang
Kuliah Umum Waspada Investasi Tahun 2019 *Investment Alert Public Lecture in 2019*	
Perguruan Tinggi *College*	STIE TPBI Cakung, Jakarta
	Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
	Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
	Universitas Tanjungpura, Pontianak
	Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
	Universitas Negeri Udayana, Bali
	Universitas Sumatera Utara, Medan

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, OJK melakukan sosialisasi melalui Videotron atau Media Luar Ruang milik Dinas Kominfo Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat ini sudah ditayangkan di 5 lokasi videotron yaitu Taman Ismail Marzuki, Jalan Hang Lekir, Kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Mall Kelapa Gading.

To provide consumer protection, OJK also conducted socialisation activities through Videotron and outdoor media workspaces owned by the Provincial Government of Jakarta. There are currently five Videotron locations in Jakarta, namely at Ismail Marzuki Park, Jalan Hang Lekir, Tax and Levy Office, as well as Kelapa Gading Mall.

Berdasarkan laporan pengaduan dan/atau pertanyaan yang diterima, selama periode 2019 OJK telah melakukan penghentian terhadap 444 kegiatan investasi ilegal, 1.494 entitas Fintech *Peer To Peer Lending* ilegal, dan 68 gadai ilegal.

Dari jumlah tersebut yang telah diproses hukum oleh Kepolisian sebanyak empat Entitas dan satu Entitas telah mendapatkan putusan hukum tetap (inkracht) sesuai dengan putusan pengadilan.

Based on the reports received in 2019, OJK closed 444 illegal investment activities, 1,494 illegal peer-to-peer lending entities and 68 illegal pawnbrokers.

Of the total processed by the police department, four entities and one entity have received legal rulings in accordance with the court verdict.

Penghentian Entitas Ilegal oleh Satgas Waspada Investasi (SWI)
Activity Cessation of Illegal Investment Entities by SWI

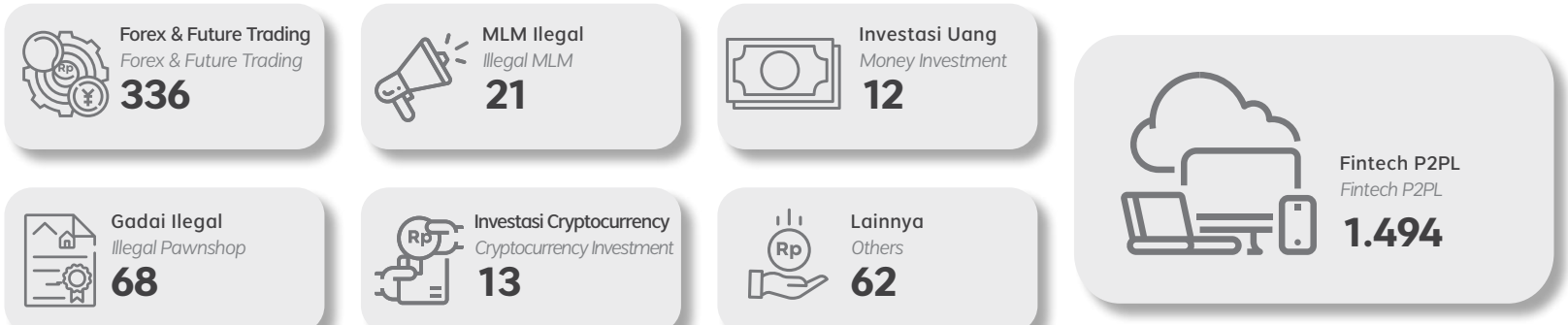

II.4.3.6 Pedoman Standar Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Sektor Jasa Keuangan

Transparansi dan keterbukaan informasi merupakan salah satu prinsip perlindungan konsumen yang diamanatkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.04/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dalam rangka memperkuat implementasinya, OJK pada tahun 2019 menerbitkan Pedoman Standar Ringkasan Informasi Produk dan Layanan sebagai *guideline* bagi Industri Jasa Keuangan dalam menyusun dan menyampaikan ringkasan informasi produk dan layanan kepada konsumen.

Adanya Pedoman Standar Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Sektor Jasa Keuangan ini diharapkan dapat membantu konsumen dan masyarakat dalam menentukan pilihan produk dan layanan jasa keuangan yang akan digunakan. Selain itu, perilaku *misconduct* dan *asymmetric* information dalam proses pemasaran dapat diminimalisasi sehingga potensi permasalahan dan sengketa menurun. Di sisi lain, implementasi transparansi dan keterbukaan informasi dimaksud diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan kualitas produk dan layanan jasa keuangan.

II.4.3.6 Standard Guidelines for Summary of Information Products and Services in the Financial Services Sector

Transparency and disclosure of information is one of the principles of consumer protection mandated by the Financial Services Authority Regulation No. 1 / POJK.04 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. In order to strengthen its implementation, OJK published a Standard Guide for Summary of Product and Service Information as a guideline for financial services industry in compiling and submitting a summary of product and service information to consumers.

The existence of the Standard Guidelines for Summary of Information on Products and Services in the Financial Services Sector is expected to be able to help consumers and the public in determining the choice of financial products and services to be used. In addition, misconduct behavior and asymmetric information in the marketing process can be minimized so that potential problems and disputes decrease. On the other hand, the implementation of the transparency and disclosure of information referred to is expected to be a driver for improving the quality of financial products and services.

II.4.4 *Capacity Building* Sumber Daya Manusia Sektor Jasa Keuangan

II.4.4.1 OJK Mengajar

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk kontribusi OJK kepada masyarakat, khususnya mahasiswa dan pihak lain yang terkait dalam sektor jasa keuangan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia. Tujuan program ini adalah meningkatkan pemahaman kepada sektor jasa keuangan terhadap tugas dan fungsi OJK, mengenalkan produk dan jasa sektor jasa keuangan kepada masyarakat.

II.4.4.2 Program Manfaat Balik

Program ini bertujuan untuk mendorong sektor jasa keuangan memiliki SDM yang profesional. Sasaran dari pelaksanaan program pengembangan kompetensi SDM SJK ini adalah untuk para pelaku di berbagai industri jasa keuangan, baik itu Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), serta para pihak lainnya yang terkait dengan sektor jasa keuangan.

Selama 2019 telah dilaksanakan 28 program pengembangan SDM SJK dengan jumlah peserta mencapai 2.943 orang. Dengan susunan program bidang kegiatan sebagai berikut :

II.4.4 *Human Resources Capacity Building in the Financial Services Sector*

II.4.4.1 OJK Teaching

This activity represents a tangible public contribution by OJK, specifically targeting students and other parties in relation to the financial services sector, to improve the competencies of human resources. The program aims to increase understanding of the financial services sector in terms of OJK's duties and functions, as well as introduce financial products and services to the public.

No.	Waktu Date	Lokasi Location	Peserta Participant
1.	20 Februari 2019	SMA Daar El Qolam Kelas Internasional, Serang	150
2.	14 Maret 2019	Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin	287
3.	28 Maret 2019	Universitas Islam Negeri Palangkaraya	278
4.	11 April 2019	Universitas Muhammadiyah Pontianak	210
5.	29 Agustus 2019	Universitas Halu Oleo, Kendari	200
6.	11 Oktober 2018	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	200
7.	18 Oktober 2019	Universitas Islam Nusantara	200
8.	22 Oktober 2019	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Aceh	500
9.	24 Oktober 2019	Universitas Airlangga	200
10.	1 November 2019	Universitas Negeri Semarang	300
11.	7 November 2019	Universitas Islam Sumatera Utara	200
12.	8 November 2019	Universitas Ngurah Rai	200
13.	15 November 2019	Politeknik Negeri Kupang	500
TOTAL			**3.225**

II.4.4.2 Giving Back Program

This program aims to foster professional human resources in the financial services sector. The program targets various financial services industries, including the banking sector, capital market, non-bank financial industry as well as other parties linked to the financial services sector.

In 2019, OJK organised 28 human resources development programs for the financial services sector, with attendees totalling 2,943 as follows:



II.4.4.3 Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian Mahasiswa

Program ini merupakan salah satu bentuk manfaat balik kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa dengan memberikan kesempatan magang/ penelitian di OJK. OJK telah memberikan kesempatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) kepada 429 pelajar/mahasiswa. Penelitian Mahasiswa, Jumlah permohonan penelitian sebanyak 160 pengajuan dengan kategori pendidikan S1 96 orang, S2 24 orang dan S3 10 orang.

II.4.4.3 Student Fieldwork and Research

This program aims to give back to the community, students in particular, by offering the opportunity for internship and fieldwork positions at OJK. Thus far, OJK has given 429 students the opportunity to conduct fieldwork. In total, 160 applications were received in 2019, consisting of 96 from bachelor's degree students, 24 from master's students and 10 from doctoral students.

Kerja Lapangan 2019
Fieldwork in 2019

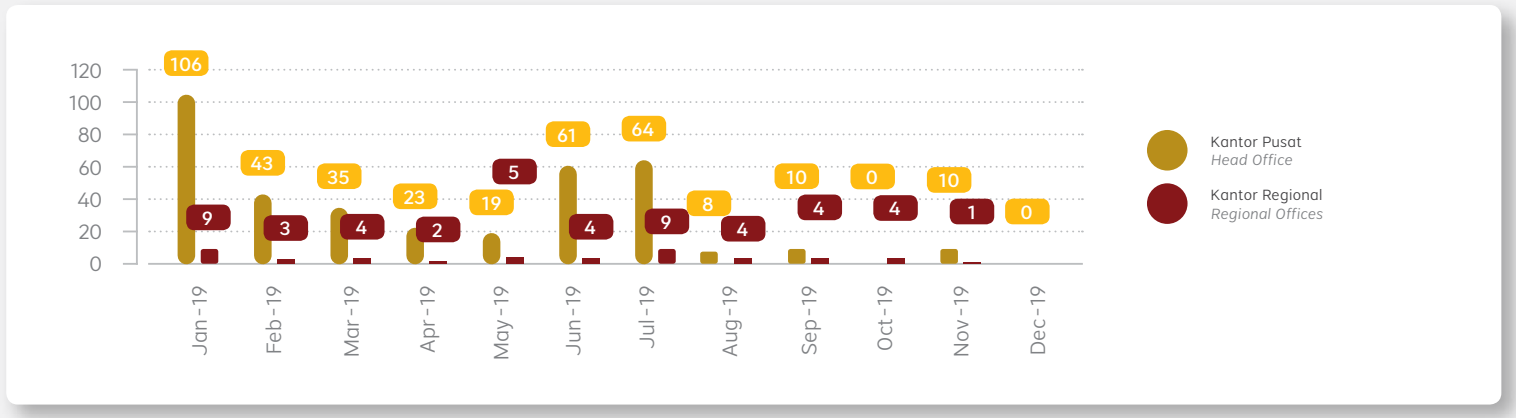

II.4.4.4 *Visit* OJK

Program Kunjungan atau Visit OJK adalah program pengenalan organisasi, tugas dan fungsi OJK dan diseminasi mengenai kebijakan OJK yang ditujukan kepada masyarakat khususnya pelajar/mahasiswa atau instansi/lembaga lain yang melakukan kegiatan studi banding ke OJK. Materi yang disampaikan pada Program Visit OJK adalah materi tentang Perbankan, Pasar Modal, IKNB, EPK, dan materi lainnya mengenai OJK sesuai dengan permohonan topik yang diajukan oleh peserta kunjungan. OJK telah melaksanakan 59 program Visit OJK dengan 3844 peserta dari SMA/SMK/Perguruan Tinggi.

II.4.4.5 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Dalam rangka mengembangkan kompetensi SDM SJK, perlu disusun suatu standar kompetensi untuk penyetaraan kompetensi SDM SJK menghadapi persaingan global. OJK sebagai instansi teknis yang berwenang menetapkan jenjang kualifikasi di SJK, telah melaksanakan beberapa tahapan kegiatan dalam rangka penyusunan/kaji ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang SJK.

II.4.4.4 OJK Visit

The OJK Visit program introduces the organisation as well as tasks and functions, and disseminates information concerning OJK policies to students as well as institutions conducting comparative studies. The materials cover the banking industry, capital market, NBFI, consumer protection and education as well as other materials on topics requested by the visitors. OJK has received 59 visits, totalling 3,844 participants from schools and universities.

II.4.4.5 Indonesian National Work Competence Standards (SKKNI) and Indonesia Qualification Framework (KKNI)

In order to develop HR competencies in the financial services sector, it becomes necessary to develop a competency standard for equalization of financial services sector HR competencies in facing global competition. OJK as the institution that has the authority to set the qualification level in financial services sector has carried out several stages of activities in the framework of arranging/reviewing Indonesian National Work Competence Standards (SKKNI) and Indonesia Qualification Framework (KKNI).

SKKNI	Status	Indonesian National Work Competence Standards (SKKNI)
Pasar Modal	Telah ditetapkan oleh KEMNAKER pada tanggal 10 September 2019 Approved by Ministry of Manpower on September 10, 2019	Capital Market
Penjaminan	Telah ditetapkan oleh KEMNAKER pada tanggal 25 November 2019 Approved by Ministry of Manpower on November 25, 2019	Guarantee
Manajemen Risiko	Telah ditetapkan oleh KEMNAKER pada tanggal 16 Desember 2019 Approved by Ministry of Manpower on December 16, 2019	Risk Management

KKNI	Status	Indonesia Qualification Framework (KKNI)
BPR	Dalam proses penetapan OJK In the process of stipulation by OJK	Rural Banks
BPRS	Dalam proses penetapan OJK In the process of stipulation by OJK	Islamic Rural Banks
Pasar Modal	Telah ditetapkan OJK Stipulated by OJK	Capital Market
Pembiayaan	Dalam proses penetapan OJK In the process of stipulation by OJK	Financing

Halaman ini sengaja dikosongkan

This page intentionally left blank

03

Tinjauan Sektor Jasa Keuangan

Financial Sector Overview

Sepanjang 2019, perekonomian global masih menghadapi sejumlah gejolak yang berpengaruh terhadap laju pertumbuhan, antara lain ialah eskalasi perang dagan Amerita Serikat (AS) - Tiongkok dan penurunan harga komoditas. Meskipun gejolak tersebut cukup berdampak bagi kinerja ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi domestik terpantau stabil walaupun sedikit mengalami perlambatan dibanding dengan periode sebelumnya. Tingkat inflasi relatif terkendali dan kinerja perdagangan masih terjaga ditunjukan dengan penurunan defisit. Sejalan dengan hal tersebut, fungsi intermediasi sektor jasa keuangan juga menunjukkan kinerja positif, tecermin oleh permodalan perbankan yang solid dan aset lembaga keuangan non-bank baik konvensional maupun Syariah bergerak positif. Perkembangan pasar modal juga semakin membaik, tecermin dari peningkatan IHSG dan penghimpunan dana yang meningkat. Fitch Ratings kembali mengafirmasi peringkat *sovereign credit rating* Indonesia pada level BBB/outlook stabil (*Investment Grade*) dan lembaga rating Standard & Poor's menaikkan *sovereign rating* Indonesia ke level BBB dengan outlook stabil. OJK bersama seluruh pemangku kepentingan terus memantau pergerakan ekonomi baik secara global maupun domestik yang akan berpengaruh terhadap kinerja sektor jasa keuangan untuk menetapkan kebijakan sinergi yang strategis untuk mendorong perekonomian yang bertumbuh secara berkelanjutan.

In 2019, the global economy experienced several shocks that influenced the pace of growth, including a furtherance of the trade war between the United States and China together with sliding commodity prices. Although the shocks spilled over into the national economy, stable domestic economic growth was maintained despite moderating slightly on the previous period. Inflation was kept under control and trade performance was maintained, as reflected by a narrower deficit. Congruently, the financial services sector intermediation function performed favourably, as confirmed by solid capital maintained in the banking industry, coupled with positive asset movements amongst conventional and Islamic nonbank financial institutions. Improvements were also noted in the capital market, with the Jakarta Composite Index (JCI) trading higher and fund accumulation increasing. Fitch ratings reaffirmed Indonesia's sovereign credit rating at a level of BBB with a stable outlook (investment grade), while Standard and Poor's (S&P) upgraded the sovereign rating to BBB with a stable outlook. In conjunction with all stakeholders, OJK continues to monitor global and domestic economic movements that could impact financial services sector performance in order to create strategic policy synergy and drive sustainable economic growth.



Tari Gandrung - Jawa Timur
Gandrung Dance - East Java

III.1 KONDISI PEREKONOMIAN GLOBAL DAN DOMESTIK

III.1.1 Perkembangan Ekonomi Global

Perekonomian dunia pada 2019 tumbuh melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya eskalasi perang dagang AS-Tiongkok yang pada akhirnya berdampak pada pelemahan *demand* global yang menyebabkan pelemahan harga komoditas. Kebijakan moneter global yang akomodatif belum mampu menahan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia.

Sepanjang 2019, eskalasi aksi saling balas pengenaan tarif impor antara AS dan Tiongkok yang bermula pada Mei 2019 masih terus terjadi. Dampak perang dagang tersebut mendorong penurunan volume perdagangan dunia di 2019, yang sampai dengan akhir 2019 diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1,1% *yoy* atau terendah sejak krisis keuangan global 2008.

Dengan adanya *trade war*, para pelaku ekonomi menahan ekspansinya sampai ada kejelasan tarif yang akan berlaku. Hal inilah yang mendorong pelemahan *demand* yang pada akhirnya mendorong pelemahan harga komoditas dunia. Indeks harga komoditas di 2019 tercatat sebesar 79,4, lebih rendah dibandingkan rata-rata harga di tahun sebelumnya sebesar 86,1. Penurunan harga komoditas ini antara lain dipengaruhi oleh restriksi penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan oleh negara-negara maju. Pelemahan harga komoditas memberikan tekanan terhadap *commodity-exporting countries* seperti Indonesia.

III.1 GLOBAL AND DOMESTIC ECONOMIC CONDITIONS

III.1.1 Global Economic Developments

The global economy moderated in 2019 compared with conditions in the previous year, held back by an escalation in the trade war between the United States and China, which in turn had an impact on weakening global demand which led to weakening commodity prices. The accommodative global monetary policy response has thus far been unable to stem the pace of global economic moderation.

The tit-for-tat and retaliatory imposition of import tariffs between the United States and China, which began in May 2019, continued throughout the year. The ensuing trade war weighed heavily on world trade volume in 2019, expanding at its slowest pace since the global financial crisis in 2008 at just 1.1% (yoy) by the end of 2019.

The existence of a trade war, economic providers are holding back their expansion until there is clarity on the rates that will apply. This is what drives weakening demand which in turn encourages weakening prices world commodity. The commodity price index in 2019 was recorded at 79.4, lower than the average price in the previous year of 86.1. The decline in commodity prices was partly affected by restrictions the use of energy that is not environmentally friendly by developed countries. Weakening commodity prices put pressure on commodity exports countries like Indonesia.

Rata-Rata Harga Komoditas Utama Dunia

Average International Commodity Prices

	Minyak Oil	Batubara Coal	Emas Gold	Nikel Nickel	Minyak Sawit Mentah CPO	Tembaga Copper	BCOM BCOM
2017	51,4	87,4	1258,4	10414,1	2661,5	280,8	84,9
2018	59,0	105,6	1269,1	13110,4	23301,3	293,0	86,1
2019	56,4	78,5	1393,4	13916,8	2246,5	272,0	79,4

Sumber: Bloomberg
Source: Bloomberg

Menyikapi perlambatan perkonomian dunia, kebijakan moneter global berbalik dari kontraktif menjadi akomodatif. The Fed berbalik dengan menurunkan suku bunga kebijakannya sebanyak tiga kali yaitu pada Juli, September, dan Oktober 2019. Selain itu, The Fed juga menyatakan akan melakukan pembelian obligasi sebesar USD60 miliar per bulan hingga triwulan II-2020.

Kebijakan yang akomodatif juga diikuti oleh beberapa bank sentral utama lainnya. Europan Central Bank (ECB) menyatakan akan tetap mempertahankan suku bunga kebijakannya pada level 0% sampai dengan akhir 2019 serta melanjutkan kebijakan pembelian obligasi sebesar EUR20 miliar per bulan. Bank of Japan juga mempertahankan suku bunganya di level -0,1% serta melakukan pembelian obligasi sebesar JPY80 triliun per tahun.

In response to global economic moderation, global monetary policy reversed from contractive to accommodative. The US Federal Reserve changed policy stance by lowering its reference rate three times, namely in July, September and October 2019. In addition, the Fed also announced its intention to purchase USD60 billion worth of bonds per month through to the second quarter of 2020.

An accommodative policy stance was also adopted by several other major central banks. The European Central Bank (ECB) announced plans to hold the policy rate at 0% until the end of 2019, while purchasing EUR20 billion of bonds each month. The Bank of Japan also held its policy rate at -0.1% and planned to purchase bonds worth JPY80 trillion per year.

Timeline Perang Dagang AS-Tiongkok

Timeline of US - China Trade War

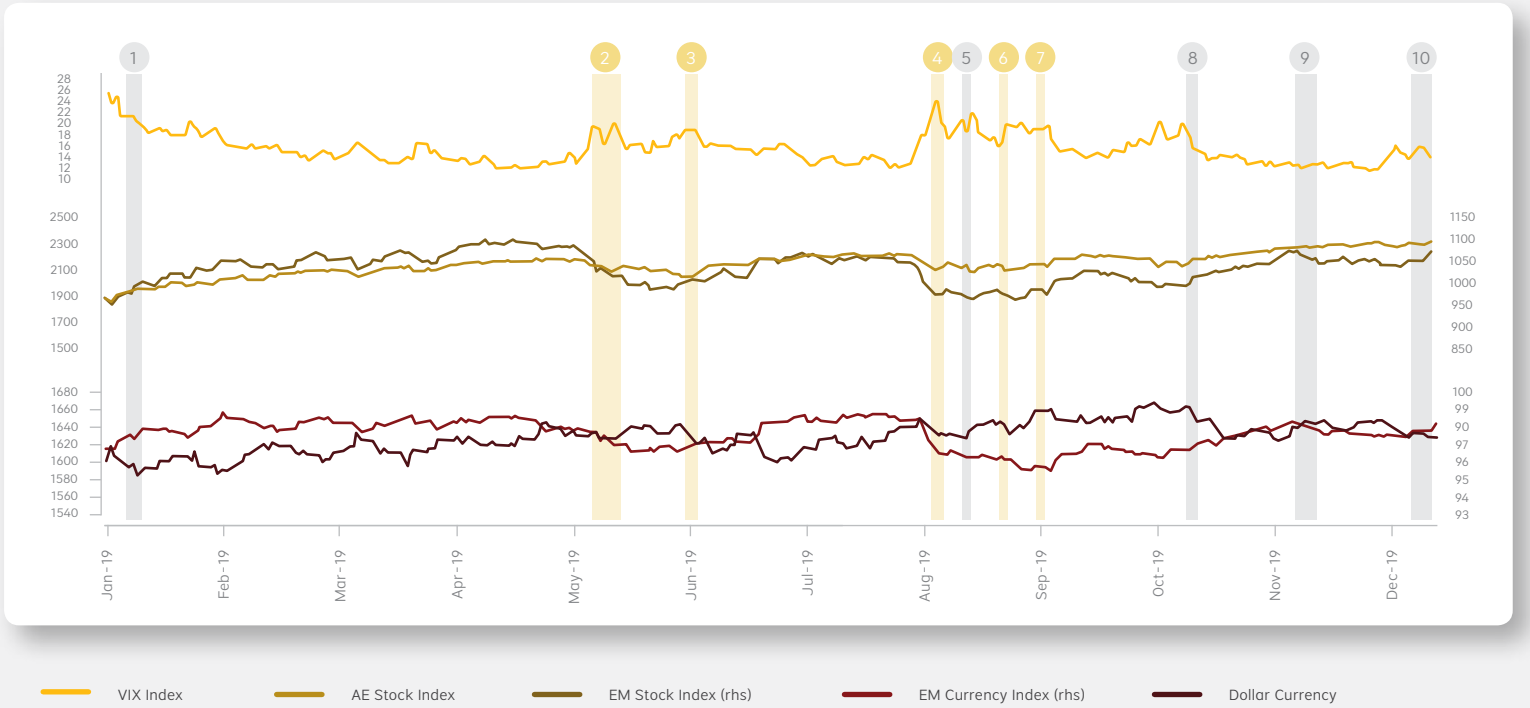

1

7-9 Januari
Negoisasi perdagangan AS dan Tiongkok di Beijing. Negoisasi ini pertama kali dilakukan sejak kedua negara menyepakati 90-day truce.
US-China trade negotiations in Beijing. The first negotiations since both sides agreed a 90-day truce.

2

10 Mei 2019
As meningkatkan tariff pada barang-barang asal Tiongkok senilai USD200 miliar dari 10% menjadi 25%.
US raises tariffs on USD200 billion of Chinese goods from 10% to 25%.

13 Mei
Tiongkok mengumumkan akan menaikan barang-barang AS senilai USD60 miliar mulai 1 Juni 2019.
China announces plans to raise tariffs on USD60 billion of US goods, commencing 1st June 2019.

3

1 Juni 2019
Tiongkok menaikan tariff atas barang-barang AS senilai USD60 milliar.
China increases tariffs on USD60 billion of US goods.

4

1 Agustus 2019
Trump mengatakan bahwa tariff tambahan sebesar 10% akan dikenakan pada barang-barang Tiongkok senilai USD300 miliar mulai 1 September 2019.
President Trump announces an additional 10% of tariffs on USD300 billion of Chinese goods, commencing 1st September 2019.

4

6 Agustus 2019
Pemerintah AS menyatan Tionkok sebagai "currency manipulator" Beberapa perusahaan Tiongkok menghentikan pembelian pada produk agrikultur AS.
US Administration accuses China of being a "currency manipulator". Several Chinese firms stop buying US agricultural products.

5

13 Agustus
Pemerintah menunda penerapan tariff hingga 15 Desember 2019 serta menghapus beberapa item dari daftar produk yang akan dikenakan tariff tambahan.
US Administration postpones enforcement of tariffs until 15th December 2019 and removes several items from the list of products earmarked for additional tariffs.

6

23 Agustus
Komisi Tarif Bea CUkai Dewan Negara Tiongkok mengumumkan tariff USD75 miliar untuk barang-barang AS.
The Import and Export Tariff Commission of China's State Council announces USD75 billion of tariffs on US goods.

7

1 September 2019
AS menggenakan tariff kepada barang senilai $125 miliar. Tiongkok melakukan retaliasi dengan mengenakan tariff kepada barang asal AS senilai $75 miliar.
US enforces tariffs on USD125 billion of Chinese goods. In retaliation, China enforces tariffs on USD75 billion of US goods.

8

10-11 Oktober 2019
AS mengumumkan kesepakatan "fase 1" berupa penundaan pengenaan tariff kepada produk tiongkok senilai USD250 miliar yang awalnya akan dikenakan pada 15 Oktober 2019 denhan kesepakatan bahwa Tiongkok akan melakukan pembelian kepada USD40-50 miliar kepada produk argikultur AS secara tahunan.
US announces the Phase One Trade Deal by postponing tariffs on USD250 billion of Chinese products targeted for tariffs on 15th October 2019 with an agreement that China would purchase USD40-50 billion of US agricultural products annually.

9

7-8 November 2019
AS-Tiongkok mendiskusikan tariff rollback.
US and China discuss tariff rollbacks.

10

13 Desember 2019
Tercapainya Kesepakatan dagang fase I AS-Tiongkok.
US and China agree Phase I Trade Deal.

Perubahan Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral Utama Dunia

Changes in Policy Rates at Major Central Banks

	Perubahan 2018 *Change in 2018*	Perubahan 2019 *Change in 2019*	
Amerika Serikat	107 bps	-75 bps	United States of America
Uni Eropa	0 bps	0 bps	Europe Union
Inggris	25 bps	0 bps	United Kingdom
Jerman	0 bps	0 bps	Germany
Jepang	0 bps	0 bps	Japan
Tiongkok	0 bps	0 bps	China
India	50 bps	-135 bps	India
Indonesia	**175 bps**	**-100 bps**	**Indonesia**
Thailand	25 bps	-50 bps	Thailand
Malaysia	25 bps	-25 bps	Malaysia
Vietnam	0 bps	-25 bps	Vietnam
Filipina	175 bps	-75 bps	Philippines
Singapura	90 bps	-40 bps	Singapore
Australia	0 bps	-75 bps	Australia
Selandia Baru	0 bps	-75 bps	New Zealand

Sumber: CEIC

Source: CEIC

Kendati demikian, kebijakan akomodatif moneter tersebut belum mampu menahan penurunan pertumbuhan global. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia di 2019 sebesar 2,4%, turun dari 3,0% di 2018.

Notwithstanding, the accommodative monetary policy stance was unsuccessful in terms of preventing global economic moderation. Consequently, the World Bank projected global economic growth in 2019 at 2.4%, down from 3.0% in 2018.

Pertumbuhan Ekonomi Dunia

World Economic Growth

Pertumbuhan Tahunan (% *yoy*) *Annual Growth (% yoy)*				
	2017	2018	2019	
Global	3,2	3,0	2,4	Global
Negara Maju	2,4	2,2	1,6	Advanced Economies
Amerika Serikat	2,4	2,9	2,3	United States of America
Zona Eropa	2,5	1,9	1,1	Eurozone
Jepang	1,9	0,8	1,1	Japan
Negara Berkembang	4,5	4,3	3,5	Emerging Countries
Tiongkok	6,8	6,6	6,1	China
Harga Minyak	23,3	29,4	-10,3	Oil Price
Harga Komoditas Non Migas	5,5	1,7	-4,7	Non-Oil and Gas Commodity Prices

Sumber: Bank Dunia

Source: World Bank

III.1.2 Perkembangan Ekonomi Domestik

Perlambatan ekonomi global, khususnya penurunan harga komoditas, sangat memengaruhi kinerja perekonomian domestik. Momen Pemilu dan Pilpres yang secara historis mampu mendorong peningkatan konsumsi domestik ternyata hanya memberikan dampak yang terbatas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tumbuh moderat di 2019 sebesar 5,02% *yoy* (2018: 5,17% *yoy*). Pertumbuhan ini masih didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh relatif stabil di kisaran 5%. Momen Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden berdampak terbatas terhadap konsumsi domestik. Sementara itu, investasi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) terpantau tumbuh melambat di sepanjang 2019 didorong oleh penurunan investasi mesin dan kendaraan. Penurunan harga komoditas sangat berdampak pada kinerja eksternal Indonesia. Ekspor impor bahkan terkontraksi dan pada akhir tahun tercatat pada angka -0,39% yoy dan -8,05% yoy

III.1.2 Domestic Economic Developments

The slowdown in the global economy, especially the decline in commodity prices, greatly affects the performance of the domestic economy. The local and general elections contested in Indonesia, which historically stimulate domestic consumption, had a more restrained impact.

Moderate national economic growth was recorded in 2019 at 5.02% (yoy), down from 5.17% (yoy) in 2018. Domestic economic growth in 2019 was still driven by household consumption, which maintained relatively stable growth at around 5%. The legislative and presidential elections contested in 2019 had a subdued impact on domestic consumption. Meanwhile, Gross Domestic Fixed Capital Formation (GDFCF) experienced slower growth throughout 2019 as investment in machinery and vehicles was observed to fade. Decline in commodity prices greatly impacted Indonesia's external performance. Imports and exports even contracted and by the end of the year recorded at -0.39% yoy and -8.05% yoy

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Economic Growth in Indonesia

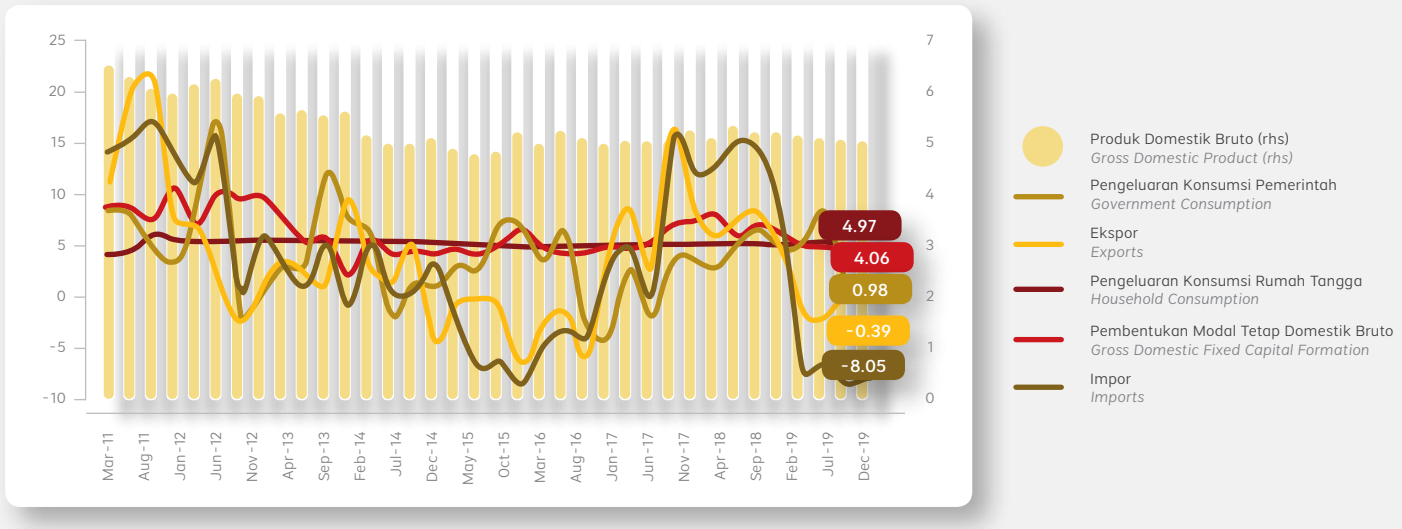

Sumber: BPS
Source: Indonesia's Central Bureau of Statistics

Indikator sektor riil mengonfirmasi terjadinya perlambatan perekonomian. Di akhir 2019, indikator Markit *Purchasing Managers Index* (PMI) manufaktur menunjukkan bahwa perusahaan domestik masih berada dalam zona kontraksi di level 49,5. Penjualan kendaraan bermotor terkontraksi di 2019. Pertumbuhan Indeks Penjualan Riil dari Survei Penjualan Eceran (SPE) Desember 2019 juga turun -0,18% yoy. Pergerakan indeks tersebut sejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen hasil Survei Konsumen Desember 2019 yang terkontraksi -0,51% yoy.

Real sector indicators also confirmed the ongoing trend of economic moderation. At the end of 2019, the Markit Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) was recorded below the 50-point threshold that separates contraction from expansion in the manufacturing sector at a level of 49.5. Furthermore, automotive sales experienced a contraction in 2019. Based on the Retail Sales Survey (SPE) conducted by Bank Indonesia, the Real Sales Index (RSI) also contracted by -0.18% (yoy) in December 2019, mirroring the -0.51 % (yoy) decline recorded in the Consumer Confidence Index (CCI) during the same period.

Indeks Penjualan Riil dan Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini
Real Sales Index (RSI) and Current Economic Condition Index (CECI)

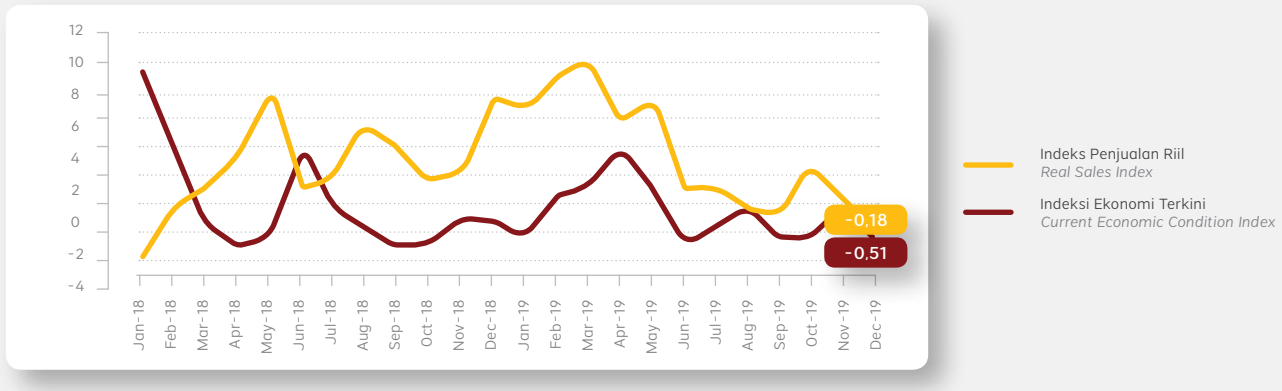

Sumber: Bank Indonesia
Source: Bank Indonesia

Di sisi lain, inflasi tetap terjaga di level yang rendah, sehingga daya beli masyarakat dapat dijaga. Inflasi tercatat sebesar 2,72% *yoy* (2018: 3,13% *yoy*). Penurunan inflasi ini terutama disebabkan tren perlambatan *administered price*, yang hanya naik 0,51% *yoy* (2018: 3,36% *yoy*). Sementara itu, inflasi inti cenderung melandai dan tercatat sebesar 3,02% *yoy* (2018: 3,07% *yoy*).

On the other hand, low and stable inflation was maintained throughout 2019, thus preserving public purchasing power. Headline inflation was recorded at 2.72% (yoy) in 2019, down from 3.13% (yoy) in 2018. Administered prices, which increased just 0.51% (yoy) in 2019 compared with 3.36% (yoy) in 2018, were the main contributor to lower inflation in 2019. Meanwhile, core inflation decreased to 3.02% (yoy) in 2019 from 3.07% (yoy) in 2018.

Tingkat Inflasi Indonesia
Inflation in Indonesia

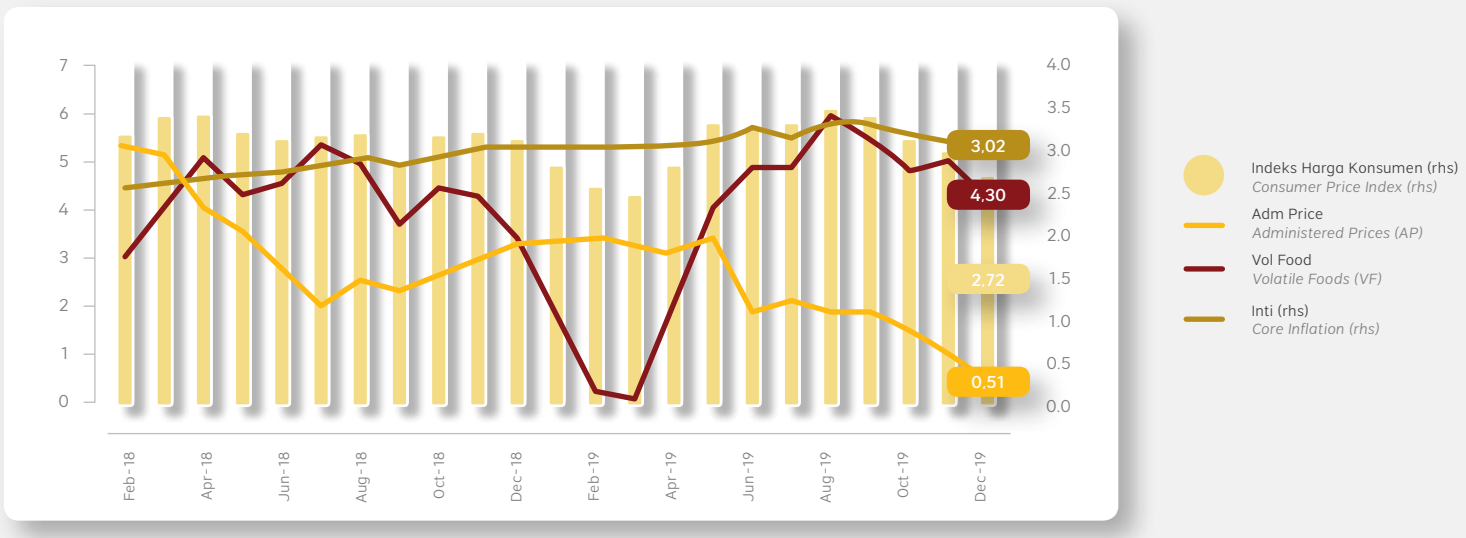

Sumber: BPS
Source: Indonesia's Central Bureau of Statistics

Defisit neraca transaksi berjalan menyempit menjadi USD30,4 miliar atau 2,72% terhadap PDB (2018: 2,94% terhadap PDB). Perbaikan ini didorong oleh kinerja neraca perdagangan yang membaik. Neraca perdagangan Indonesia pada 2019 mencatatkan defisit sebesar USD3,2 miliar (2018: Defisit USD8,6 miliar). Hal ini disebabkan oleh penurunan impor yang lebih dalam dibandingkan ekspor. Secara sektoral, defisit neraca migas tercatat menyempit menjadi USD9,38 miliar (2018: defisit USD12,7 miliar). Sementara itu, surplus neraca non migas meningkat menjadi USD6,2 miliar (2018: surplus USD4,0 miliar), disebabkan oleh turunnya impor non migas.

The current account deficit narrowed to USD30.4 billion or 2.72% of GDP from 2.94% of GDP in 2018. The narrower current account deficit stemmed from improvements in the trade balance, which recorded a smaller USD3.2 billion deficit in 2019 compared with USD8.6 billion in 2018 as the import decline exceeded that of exports. By sector, the oil and gas trade deficit reduced to USD9.38 billion in 2019 from USD12.7 billion in 2018, while the non-oil and gas trade surplus increased to USD6.2 billion from USD4.0 billion over the same period as non-oil and gas imports were effectively controlled.

Neraca Perdagangan Indonesia
Indonesia's Trade Balance

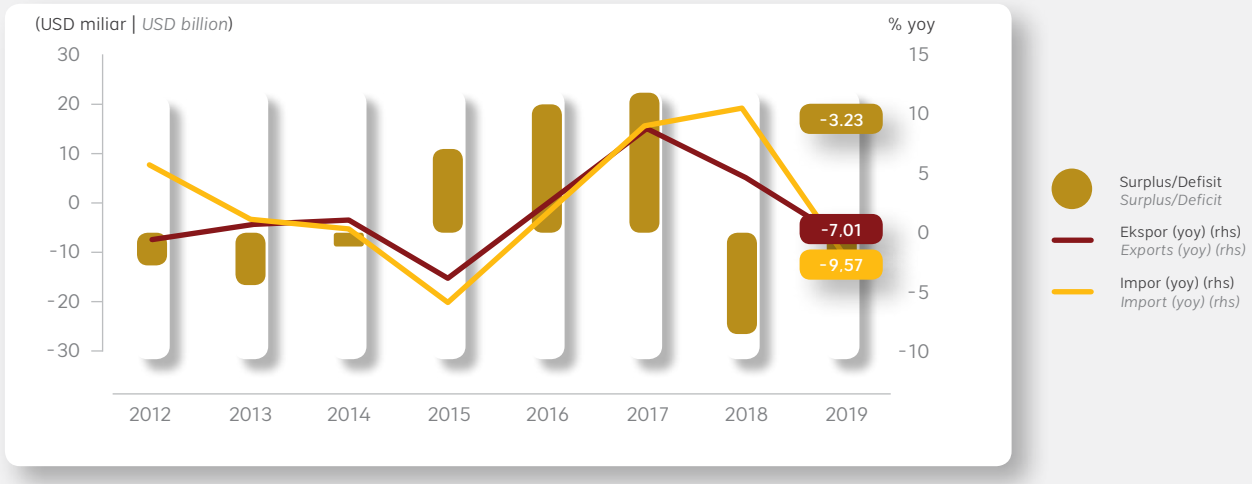

Sumber: BPS
Source: BPS-Statistics Indonesia

Neraca pembayaran mengalami surplus, didorong oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat menjadi USD36,3 miliar (2018: USD25,2 miliar). Sejalan dengan hal tersebut, cadangan devisa Indonesia terpantau meningkat menjadi sebesar USD129,2 miliar (Desember 2018: USD120,7 miliar).

Indonesia's balance of payments recorded a surplus in 2019 on the back of a significant capital and financial account surplus totalling USD36.3 billion, up from USD25.2 billion in 2018. Congruently, the position of reserve assets increased to USD129.2 billion in December 2019 compared with USD120.7 billion in December 2018.

Neraca Pembayaran Indonesia
Indonesia's Balance of Payments

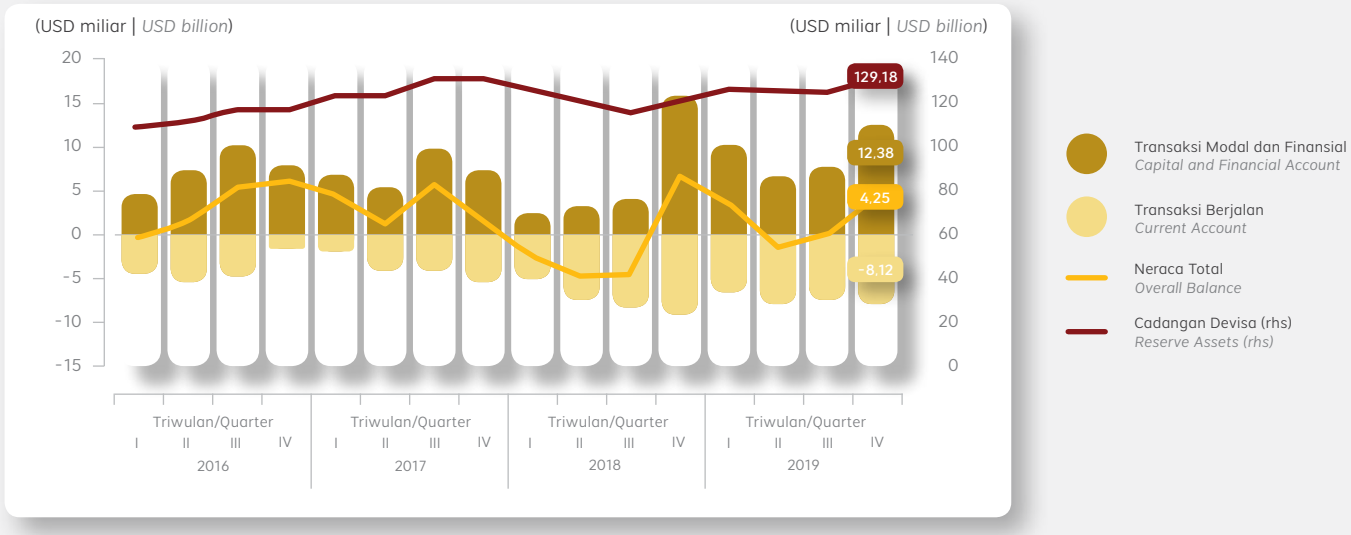

Sumber: Bank Indonesia
Source: Bank Indonesia

III.1.3 Perkembangan Pasar Keuangan

Di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi global, pasar keuangan dunia secara umum membaik di 2019 yang merupakan dampak dari kebijakan moneter yang ekspansif dari bank sentral dunia. Tingginya liukuiditas juga berdampak pada perbaikan pasar keuangan domestik.

Pasar Saham Global dan Domestik

Masuknya dana asing yang signifikan pada akhir 2019 membawa IHSG kembali positif. IHSG menguat sebesar 1,70% *yoy* dengan investor nonresiden mencatatkan *net buy* sebesar Rp49,1 triliun.

III.1.3 Financial Market Developments

In the midst of slowing global economic growth, global financial markets have generally improved in 2019 as a result of the expansionary monetary policies of the world's central banks. The high liquidity also had an impact on improving the domestic financial market.

Global and Domestic Stock Market

Significant influx of foreign funds at the end of 2019 brought JCI back positive. The Jakarta Composite Index (JCI) traded up 1.70% (yoy) with non-resident investors booking a net buy totalling Rp49.1 trillion.

Perkembangan Pasar Saham Global
Global Stock Market Performance

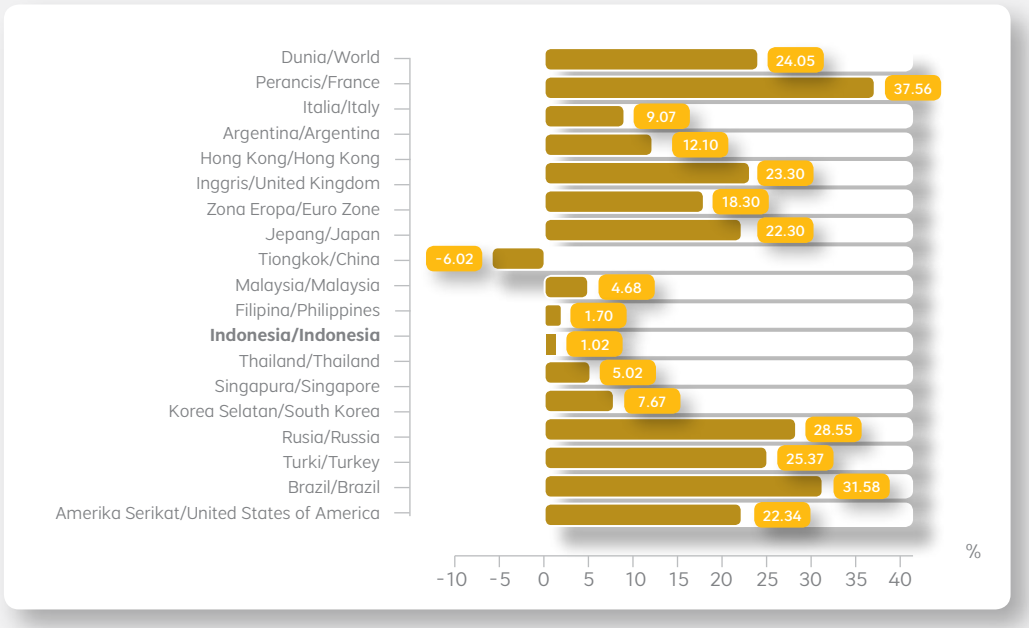

Sumber: Bloomberg
Source: Bloomberg

Pasar Surat Utang Global dan Domestik

Pasar surat utang kawasan ASEAN-5 di 2019 terpantau menguat. *Risk appetite investor* cenderung pada investasi pada surat utang, khususnya surat utang negara *emerging market economies* (EM) yang menawarkan *yield* yang lebih kompetitif dibandingkan negara *Advanced Economies* (AE).

Global and Domestic Bond Markets

Bond markets in the ASEAN-5 region trended higher in 2019. Investors' risk appetite favoured debt instruments, particularly in emerging market (EM) economies with more competitive and attractive yields than advanced economies (AE).

Perkembangan *Yield* 10Y Pasar Surat Utang Global
10-Year Global Bond Yields

	2018	2019	Δyoy (bps)	
Indonesia	8,03	7,06	-96,2	Indonesia
Filipina	7,01	4,34	-266,8	Philippines
Malaysia	4,07	3,30	-77,4	Malaysia
Thailand	2,61	1,55	-105,7	Thailand
Tiongkok	3,31	3,14	-16,6	China
Jepang	0,00	-0,01	-1,4	Japan
Inggris	1,28	0.82	-45,5	United Kingdom
Amerika Serikat	2,69	1,92	-77,0	United States

Sumber: Bloomberg
Source: Bloomberg

Aliran Dana Nonresiden dan Nilai Tukar

Sepanjang 2019, investor nonresiden secara umum mencatatkan *net buy* di pasar saham dan obligasi negara kawasan ASEAN-5. Thailand merupakan satu-satunya negara ASEAN yang mencatatkan *net sell*, yakni sebesar USD1,99 miliar, seiring perlambatan perekonomian domestik Thailand. *Yield* surat utang Indonesia (SBN) turun 96,2 *bps* sepanjang 2019, namun masih kompetitif dibandingkan negara ASEAN lain, sehingga menyebabkan Indonesia mampu membukukan *net buy* sebesar USD15,23 miliar di 2019, terutama bersumber dari pasar surat utang sebesar USD11,76 miliar.

Non-Resident Capital Flows and Exchange Rates

In 2019, non-resident investors booked a net buy in the stock and bond markets of ASEAN-5 countries. Thailand was the only jurisdiction to record a net sell, totalling USD1.99 billion, in line with domestic economic moderation in the country. The yield of tradeable government securities (SBN) in Indonesia fell 96.2bps in 2019, yet remained competitive against other ASEAN countries, which led to a net buy of USD15.23 billion in 2019, primarily originating from the debt market, amounting to USD11.76 million.

Aliran Dana Nonresiden di Pasar Keuangan Kawasan ASEAN-5

Foreign Capital Flows to Financial Markets in ASEAN-5

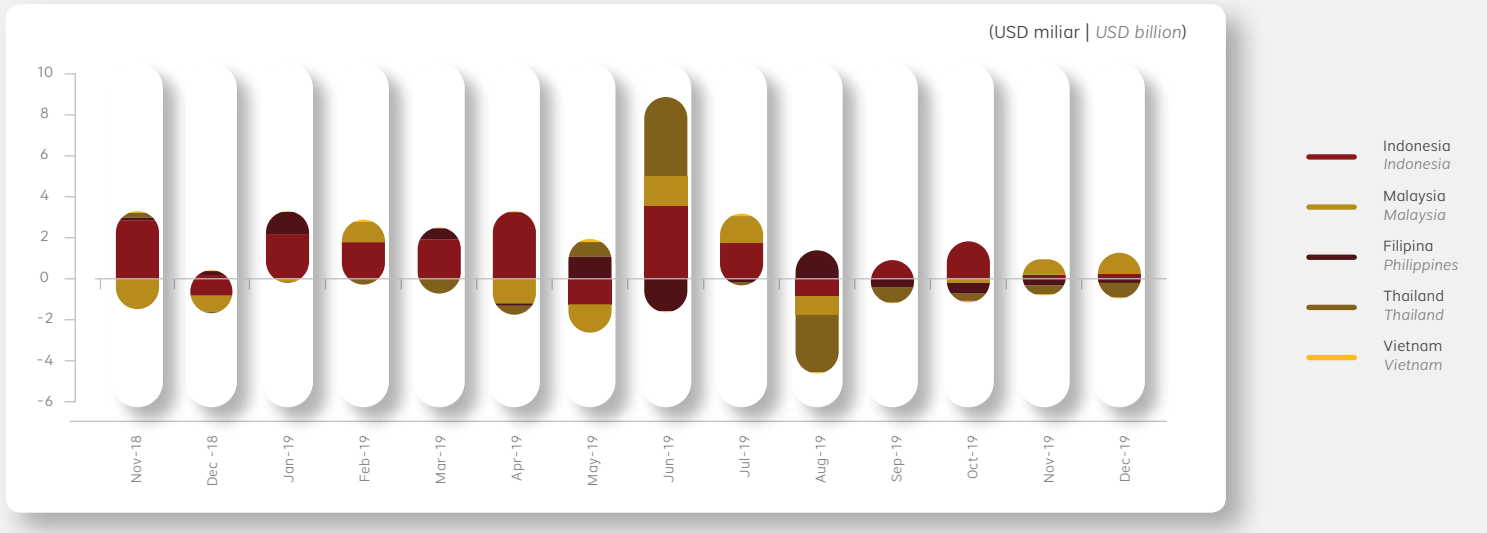

Sumber: Bloomberg

Source: Bloomberg

Nilai tukar global di 2019, termasuk ASEAN-5 secara umum bergerak menguat terhadap USD. Rupiah terapresiasi sebesar 3,57% *yoy* ke level Rp13.880/USD pada 2019.

Global currencies, including ASEAN-5, experienced broad-based appreciation against the US dollar in 2019, with the rupiah strengthening 3.57% (yoy) to a level of Rp13,880 per US dollar in 2019.

Perkembangan Pasar Nilai Tukar Global

Global Exchange Rates

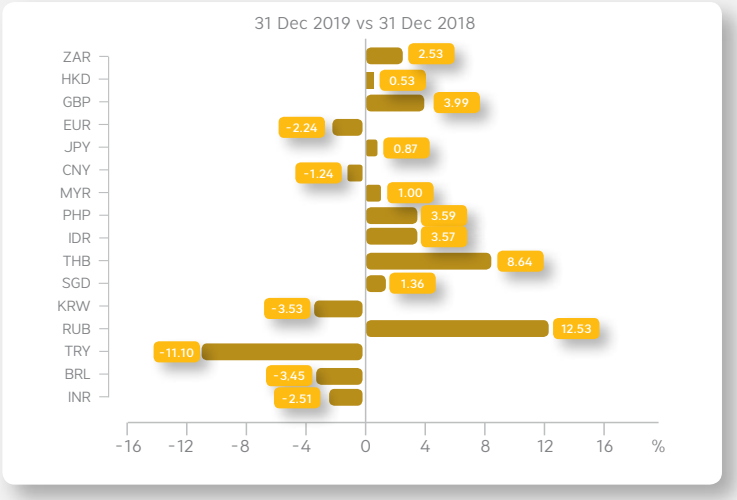

Sumber: Reuters

Source: Reuters

III.2 PERKEMBANGAN INDUSTRI PERBANKAN

Fungsi intermediasi perbankan cukup solid tecermin dari kredit dan DPK yang terus bertumbuh walaupun mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya.

III.2 BANKING INDUSTRY

The banking intermediation function has shown solid performance reflected in the loan dan deposits growth even though the growth rate exhibit a sign of slowing down compared to the previous year.

Kondisi Bank Umum

Conditions at Commercial Banks

Indikator	Nominal / Value					yoy / Annual Growth		Indicator
	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	
Total Aset (Rp miliar)	**6.129.146**	**6.729.799**	**7.387.634**	**8.068.346**	**8.562.974**	**9,21%**	**6,13%**	**Total Assets (Rp billions)**
Kredit (Rp miliar)	**4.057.904**	**4.377.195**	**4.737.944**	**5.294.882**	**5.616.992**	**11,75%**	**6,08%**	**Loans (Rp billions)**
DPK (Rp miliar)	**4.413.056**	**4.836.758**	**5.289.377**	**5.630.448**	**5.998.648**	**6,45%**	**6,54%**	**Deposits (Rp billions)**
- Giro (Rp miliar)	987.532	1.124.235	1.233.480	1.315.034	1.465.848	6,61%	11,47%	Demand Deposits (Rp billions) -
- Tabungan (Rp miliar)	1.396.011	1.551.809	1.701.224	1.825.259	1.945.185	7,29%	6,57%	Savings Deposits (Rp billions) -
- Deposito (Rp miliar)	2.029.513	2.160.714	2.354.673	2.490.155	2.587.615	5,75%	3,91%	Term Deposits (Rp billions) -
CAR (%)	**21,16**	**22,71**	**23,18**	**23,42**	**23,31**	**24**	**(10)**	**Capital Adequacy Ratio (%)**
ROA (%)	**2,26**	**2,17**	**2,38**	**2,50**	**2,44**	**12**	**(6)**	**Return on Assets (%)**
NIM (%)	**5,23**	**5,47**	**5,15**	**5,00**	**4,80**	**(15)**	**(20)**	**Net Interest Margin (%)**
BOPO (%)	**82,17**	**82,85**	**79,28**	**78,33**	**79,58**	**(95)**	**126**	**BOPO Efficiency Ratio (%)**
NPL Gross (%)	**2,49**	**2,93**	**2,59**	**2,37**	**2,53**	**(23)**	**16**	**Gross NPL (%)**
NPL Net (%)	**1,21**	**1,24**	**1,17**	**1,04**	**1,19**	**(13)**	**15**	**Nett NPL (%)**
LDR (%)	**91,95**	**90,50**	**89,57**	**94,04**	**93,64**	**447**	**(40)**	**Loan-to-Deposit Ratio (%)**

III.2.1 Perkembangan Bank Umum Konvensional

Pada akhir 2019, kondisi ketahanan Bank Umum Konvensional (BUK) masih solid tecermin dari rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 23,40%. Fungsi intermediasi BUK melandai namun dibarengi dengan pertumbuhan DPK yang lebih besar dibanding kredit. Hal tersebut mengakibatkan turunnya rasio LDR. Secara umum kondisi likuiditas perbankan masih terjaga, terefleksi dari rasio AL/NCD dan AL/DPK yang masing-masing tercatat 97,61% dan 20,86%, atau jauh di atas *threshold* 50% dan 10%.

III.2.1 Conventional Commercial Banks

At the end of 2019, Conventional Commercial Bank had maintained a Minimum Capital Adequacy Ratio of 23.40%, pointing to solid resilience. The bank intermediation function moderated in 2019 yet deposit growth outpaced that of outstanding loans disbursed by the banking industry, prompting a lower loan-to-deposit ratio (LDR). In general, adequate liquidity was also maintained in the banking industry, as reflected by the ratios of liquid assets to non-core deposits and liquid assets to deposits at 97.61% and 20.86% respectively, well above the 50% and 10% thresholds.

Kondisi Bank Umum Konvensional

Conditions at Conventional Commercial Banks

Indikator	Nominal / Value					yoy / Annual Growth		Indicator
	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	
Total Aset (Rp miliar)	**5.919.390**	**6.475.602**	**7.099.564**	**7.751.655**	**8.212.611**	**9,18%**	**5,95%**	**Total Assets (Rp billions)**
Kredit (Rp miliar)	**3.903.936**	**4.199.713**	**4.548.155**	**5.092.584**	**5.391.846**	**11,97%**	**5,88%**	**Loans (Rp billions)**
DPK (Rp miliar)	**4.238.167**	**4.630.352**	**5.050.984**	**5.372.841**	**5.709.670**	**6,37%**	**6,27%**	**Deposits (Rp billions)**
- Giro (Rp miliar)	972.671	1.104.583	1.207.069	1.287.480	1.423.773	6,66%	10,59%	Demand Deposits (Rp billions) -
- Tabungan (Rp miliar)	1.343.274	1.487.077	1.626.595	1.737.216	1.844.526	6,80%	6,18%	Savings Deposits (Rp billions) -
- Deposito (Rp miliar)	1.922.222	2.038.692	2.217.321	2.348.146	2.441.372	5,90%	3,97%	Term Deposits (Rp billions) -
CAR (%)	**21,39**	**22,93**	**23,18**	**22,97**	**23,40**	**(21)**	**43**	**Capital Adequacy Ratio (%)**
ROA (%)	**2,32**	**2,23**	**2,45**	**2,55**	**2,47**	**10**	**(8)**	**Return on Assets (%)**
NIM (%)	**5,39**	**5,63**	**5,32**	**5,14**	**4,91**	**(18)**	**(23)**	**Net Interest Margin (%)**
BOPO (%)	**81,49**	**82,22**	**78,64**	**77,86**	**79,39**	**(78)**	**153**	**BOPO Efficiency Ratio (%)**
NPL Gross (%)	**2,49**	**2,86**	**2,50**	**2,33**	**2,50**	**(17)**	**17**	**Gross NPL (%)**
NPL Net (%)	**1,14**	**1,20**	**1,11**	**1,00**	**1,16**	**(11)**	**15**	**Nett NPL (%)**
LDR (%)	**92,11**	**90,70**	**90,04**	**94,78**	**94,43**	**474**	**(35)**	**Loan-to-Deposit Ratio (%)**

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan LBU, Desember 2019

Source: Indonesia Banking Statistics and Commercial Bank Reports, December 2019

a. Aset

Total aset BUK tumbuh 5,95% (*yoy*), melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9,18% (*yoy*). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga. Secara kepemilikan, aset kelompok bank BUMN dan BUSN Devisa yang memiliki porsi aset terbesar melambat, sehingga menarik ke bawah pertumbuhan aset. Di sisi lain, BPD dan BUSN Non Devisa mencatatkan peningkatan pertumbuhan, meskipun dalam porsi yang masih kecil sebesar 9,29% dari total aset BUK.

a. Assets

Total assets of commercial banks grew 5.95% (yoy) in 2019, down from 9.18% (yoy) in 2018. Slower growth was primarily due to flatter loan and deposit expansion. Overall, the assets of state-owned banks and national private commercial foreign exchange banks dominated the slowdown, which weighed on total asset growth. In contrast, the assets of regional banks and national private commercial non-foreign exchange banks posted positive growth in 2019, nevertheless accounting for a small 9.29% share of the total.

Kondisi Aset Bank Umum Konvensional

Total Assets of Conventional Commercial Banks

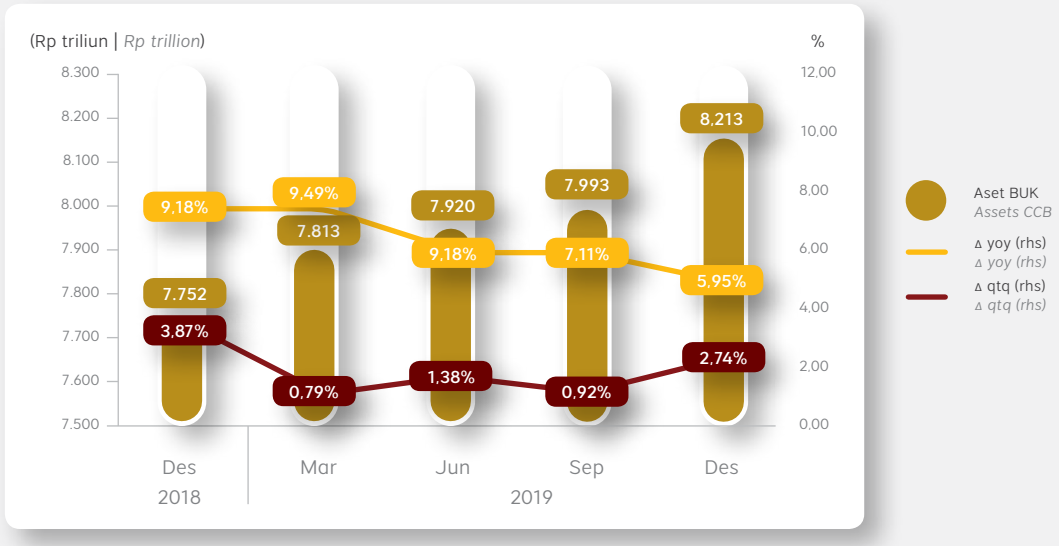

Sumber: Statistik Perbankan Indonesia (SPI) dan LBU

Source: Indonesia Banking Statistics, December 2019

b. Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) BUK terdiri dari deposito, tabungan, dan giro dengan komposisi masing-masing sebesar 42,76%, 32,31%, dan 24,94% dari total DPK.

Pada akhir 2019, DPK tumbuh 6,27% (*yoy*) sedikit melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 6,37% (*yoy*). Perlambatan DPK terjadi pada deposito dan tabungan yang masing-masing hanya tumbuh sebesar 3,97% (*yoy*) dan 6,18% (*yoy*). Di sisi lain, giro justru tumbuh 10,59% (*yoy*) meningkat dari tahun sebelumnya (6,66%, *yoy*).

b. Deposits

The deposits of commercial banks consist of term deposits, savings deposits and demand deposits, accounting for 42.76%, 32.31% and 24.94% respectively of total deposits.

At the end of 2019, deposit growth was recorded at 6.27% (yoy), down slightly from 6.37% (yoy) in the same period of the previous year. The slowdown affected term deposits and savings deposits, which grew just 3.97% (yoy) and 6.18% (yoy) respectively. Bucking the downward trend, however, demand deposits accelerated to 10.59% (yoy) in 2019 from 6.66% (yoy) in 2018.

Perlambatan DPK utamanya dipengaruhi oleh penurunan deposito kelompok bank BUMN. Namun demikian, giro pada kelompok bank ini justru tercatat tumbuh seiring dengan gencarnya upaya bank untuk mendorong pertumbuhan *current account saving account* (CASA) yang biaya dananya lebih rendah dibandingkan deposito.

In general, a decline of term deposits at state-owned banks was the main drag on slower overall deposit growth. Nonetheless, demand deposits at state-owned banks expanded in line with aggressive efforts to stimulate current account saving account (CASA) growth, the cost of which on the banking industry is lower than term deposits.

Tren Pertumbuhan DPK
Deposits Growth Trend

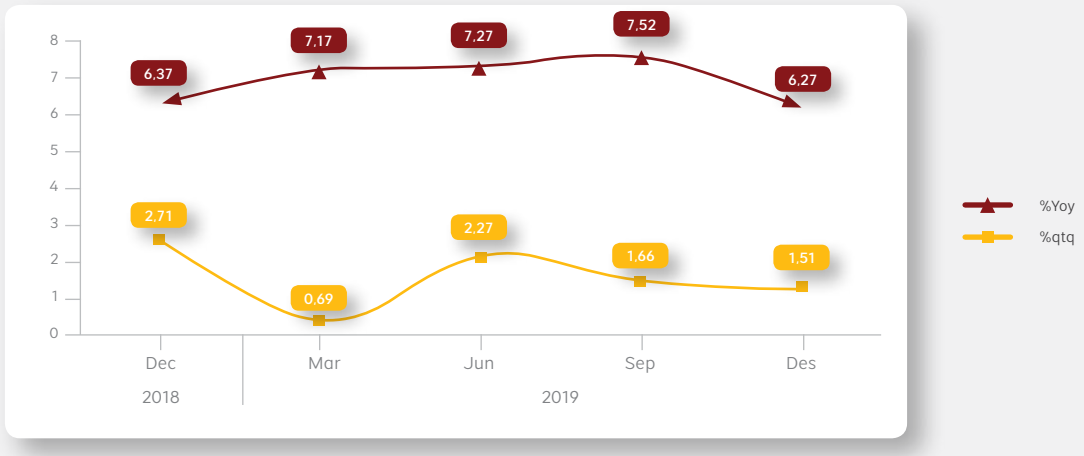

Sumber: SPI, Desember 2019
Sumber: Indonesia Banking Statistics, December 2019

c. Kredit

Pada 2019, kredit BUK tumbuh 5,88% (*yoy*), melambat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 11,97% (*yoy*). Kredit produktif hanya tumbuh sebesar 6,07% (*yoy*) setelah tahun sebelumnya tumbuh 12,70% (*yoy*), terutama dipengaruhi oleh melambatnya Kredit Modal Kerja (KMK) sebagai kredit dengan porsi terbesar yang yang hanya tumbuh 2,31% (*yoy*) dibandingkan 13,46% (*yoy*) pada tahun sebelumnya. Namun demikian, Kredit Investasi (KI) tercatat tumbuh 13,34% (*yoy*), di atas kinerja tahun sebelumnya yang tumbuh seharusnya 11,28% (*yoy*). Tingginya pertumbuhan kredit investasi di tengah perlambatan pertumbuhan KMK ini memberikan sinyal optimisme jangka panjang pelaku usaha di tengah ketidakpastian perekonomian global.

c. Loans

In 2019, outstanding loans disbursed by commercial banks grew 5.88% (yoy), half the 11.97% (yoy) recorded in the previous year. In addition, productive loans only grew 6.07% (yoy) in 2019 after posting 12.70% (yoy) in the previous year, primarily due to slower growth of dominant working capital loans, from 13.46% (yoy) to 2.31% (yoy) in the reporting period. Conversely, investment loans accelerated to 13.34% (yoy) in 2019 from seharusnya 11,28% (yoy) in 2018. The trend of slower working capital loan growth and faster investment loan growth signalled long-term optimism amongst business players despite ubiquitous global economic uncertainty.

Tren Pertumbuhan Kredit
Loan Growth Trend

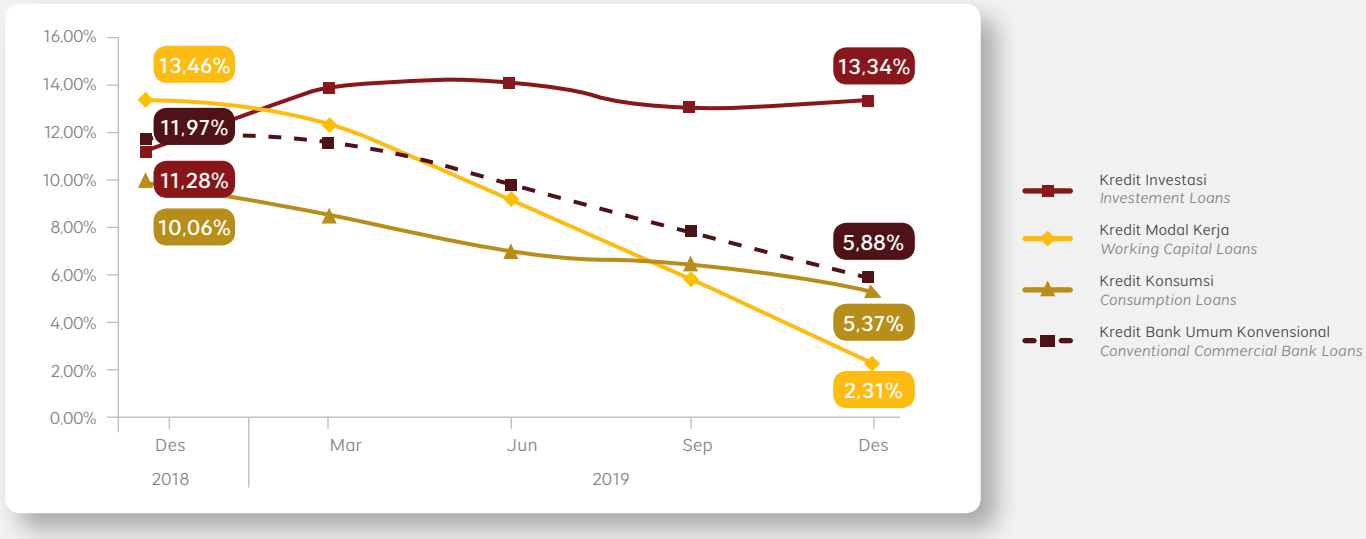

Sumber: SPI, Desember 2019
Source: Indonesia Banking Statistics, December 2019

Kualitas kredit menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya tecermin dari rasio *Non-Performing Loan* (NPL) *gross* dan *net* BUK yang sedikit meningkat masing-masing menjadi 2,50% dan 1,16%. Berdasarkan jenis penggunaan, rasio NPL KMK dan KK secara tahunan masing-masing meningkat 38 *bps* dan 6 *bps* menjadi 3,18% dan 1,59%. Di sisi lain, NPL KI tercatat turun 8 *bps* menjadi 2,23%.

Slight increases in the gross and nett non-performing loan (NPL) ratios of conventional commercial banks to 2.50% and 1.16% respectively were indicative of deteriorating loan quality compared with conditions in the previous year. By segment, the annual NPL ratios of working capital loans and consumer loans increased 38bps and 6bps respectively to 3.18% and 1.59%. In contrast, the NPL ratio of investment loans fell 8bps to 2.23%.

Tren NPL (%)
NPL Trend (%)

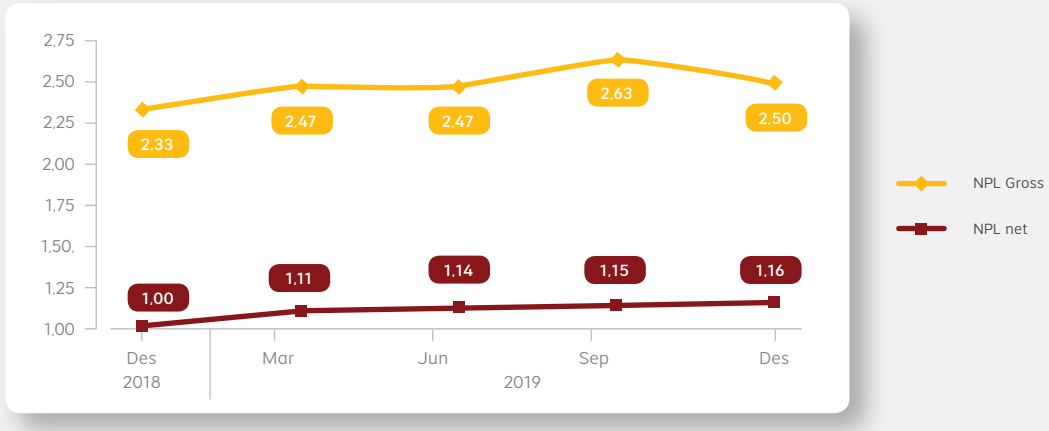

Sumber: SPI, Desember 2019
Source: Indonesia Banking Statistics, December 2019

d. Rentabilitas

Rentabilitas BUK stabil meskipun rasio *Return on Asset* (ROA) pada periode laporan sedikit menurun menjadi 2,47%. dari tahun sebelumnya sebesar 2,55%. Capaian ROA yang lebih rendah disebabkan oleh laba yang melambat pada periode laporan.

Dari sisi pendapatan bunga bersih, rasio *Net Interest Margin* (NIM) tercatat sebesar 4,91%, di bawah capaian tahun sebelumnya sebesar 5,14%. Tingginya tingkat suku bunga deposito meningkatkan *cost of fund* dan menurunkan pendapatan bunga bersih BUK.

Sementara itu, rasio BOPO perbankan juga tercatat meningkat menjadi 79,39% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 77,86%.

d. Profitability

Commercial banks maintained profitability in 2019 despite a moderate decline in the return on assets (ROA) to 2.47% from 2.55% in the previous year. A lower ROA was attributable to lower profit growth in the reporting period.

In terms of net interest income, the net interest margin (NIM) dropped to 4.91% from 5.14% in 2018. High deposit rates raised the cost of funds and reduced net interest income at conventional commercial banks.

Meanwhile, the BOPO efficiency ratio deteriorated to 79.39% from 77.86% over the reporting period.

Tren Rentabilitas dan Efisiensi

Profitability and Efficiency at Conventional Commercial Banks

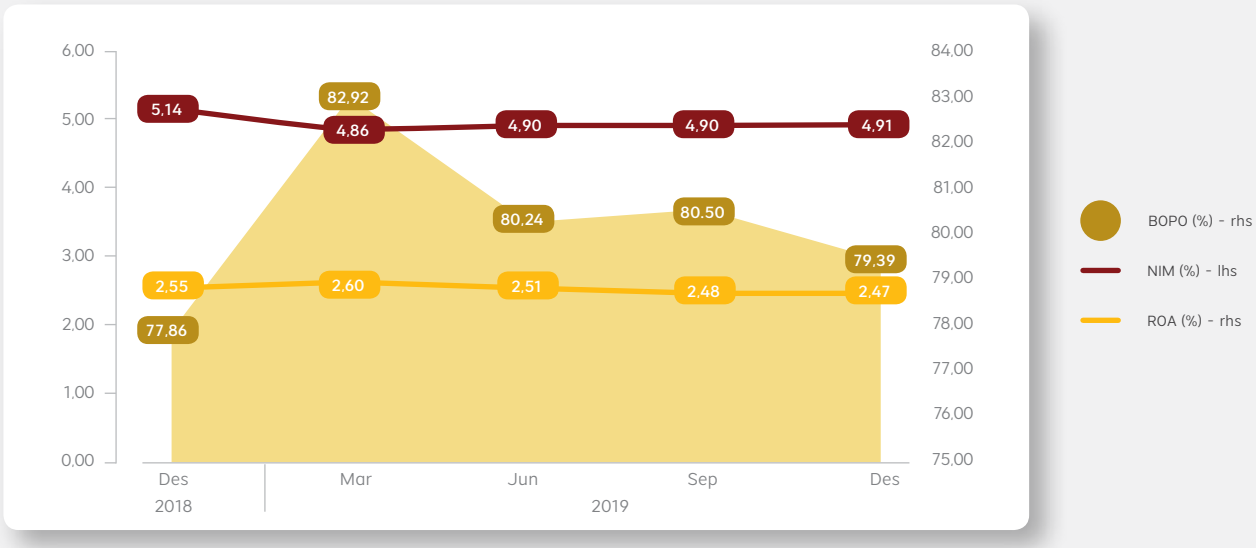

Sumber: SPI, Desember 2019

Source: Indonesia Banking Statistics, December 2019

e. Permodalan

Kondisi permodalan BUK masih solid, tecermin dari meningkatnya rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) menjadi 23,40%. Peningkatan rasio permodalan tersebut dipengaruhi oleh turunnya pertumbuhan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), khususnya pada ATMR kredit yang tercatat hanya tumbuh 7,48% (*yoy*) atau melambat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 8,20% (*yoy*).

e. Capital

Conventional commercial banks maintained solid capital in 2019, as reflected by an increase in the Minimum Capital Adequacy Ratio to 23.40%. The increase was driven by declining growth of risk-weighted assets (RWA), credit RWA in particular, which only grew 7.48% (yoy) in the reporting period compared with 8.20% (yoy) in 2018.

III.2.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pada akhir 2019, kinerja industri BPR meningkat, tecermin dari meningkatnya intermediasi, diikuti oleh pertumbuhan aset, kredit, dan DPK yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Ketahanan BPR juga cukup solid didukung dengan permodalan yang cukup tinggi meskipun masih dibayangi oleh kenaikan risiko kredit dan melambatnya kinerja rentabilitas.

III.2.2 Rural Banks

At the end of 2019, the performance of rural banks had improved in terms of intermediation, followed by assets, loans and deposits, the growth of which accelerated on the previous year. Furthermore, rural bank resilience was solid, supported by a robust capital base despite increasing credit risk and flatter profitability growth.

Kondisi Umum BPR

Conditions at Rural Banks

Indikator	Nominal / Value					yoy / Annual Growth		Indicator
	2015	2016	2017	2018	2019	2018	2019	
Total Aset (Rp miliar)	**101.713**	**113.501**	**125.945**	**135.693**	**149.623**	**7,74%**	**10,27%**	**Total Assets (Rp billions)**
Kredit (Rp miliar)	**74.807**	**81.684**	**89.482**	**98.220**	**108.784**	**9,77%**	**10,76%**	**Loans (Rp billions)**
Dana Pihak Ketiga (Rp miliar)	**67.266**	**75.725**	**84.861**	**91.956**	**102.538**	**8,36%**	**11,51%**	**Deposits (Rp billions)**
- Tabungan (Rp miliar)	20.959	23.748	26.723	29.491	32.132	10,36%	8,95%	Savings Deposits (Rp billions) -
- Deposito (Rp miliar)	46.307	51.977	58.137	62.465	70.406	7,44%	12,71%	Term Deposits (Rp billions) -
CAR (%)	**21,93**	**22,77**	**22,95**	**23,35**	**28,88**	**40**	**553**	**Capital Adequacy Ratio (%)**
ROA (%)	**2,71**	**2,59**	**2,55**	**2,48**	**2,31**	**(7)**	**(17)**	**Return on Assets (%)**
BOPO (%)	**81,59**	**81,19**	**80,50**	**80,74**	**81,50**	**24**	**76**	**BOPO Efficiency Ratio (%)**
NPL Gross (%)	**5,37**	**5,83**	**6,15**	**6,37**	**6,81**	**22**	**44**	**Gross NPL (%)**
NPL Net (%)	**3,34**	**4,20**	**4,52**	**4,74**	**5,22**	**22**	**47**	**Nett NPL (%)**
LDR (%)	**77,81**	**76,24**	**75,36**	**76,54**	**79,09**	**118**	**255**	**Loan-to-Deposit Ratio (%)**
CR (%)	**19,14**	**19,01**	**19,86**	**18,84**	**17,08**	**(103)**	**(176)**	**CR (%)**

Sumber: SPI, Desember 2019

Source: Indonesia Banking Statistics, December 2019

a. Aset

Aset BPR tumbuh 10,27% (*yoy*), meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 7,74% (*yoy*). Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan pertumbuhan DPK dan modal.

Berdasarkan lokasi, aset BPR terkonsentrasi di Pulau Jawa (58,18%) dengan porsi terbesar di Jawa Tengah dan Jawa Barat masing-masing dengan komposisi 23,74% dan 13,68%. Pertumbuhan aset BPR tertinggi berada di wilayah Maluku Utara dan Sulawesi Utara yang masing-masing tumbuh sebesar 32,37% (*yoy*) dan 29,89% (*yoy*). Sementara itu, pertumbuhan aset BPR di Jawa Tengah tumbuh sebesar 13,60% (*yoy*).

a. Assets

Total assets of rural banks expanded 10.27% (yoy) in 2019, up from 7.74% (yoy) in the previous year on faster deposit growth and capital.

By location, the assets of rural banks were concentrated on the island of Java (58.18%), dominated by Central Java and West Java with 23.74% and 13.68% respectively. Asset growth was strongest in North Maluku and North Sulawesi, reaching 32.37% (yoy) and 29.89% (yoy) respectively. Meanwhile, the assets of rural banks located in Central Java posted 13.60% (yoy) growth in the reporting period.

Tren Aset BPR

Total Assets of Rural Banks

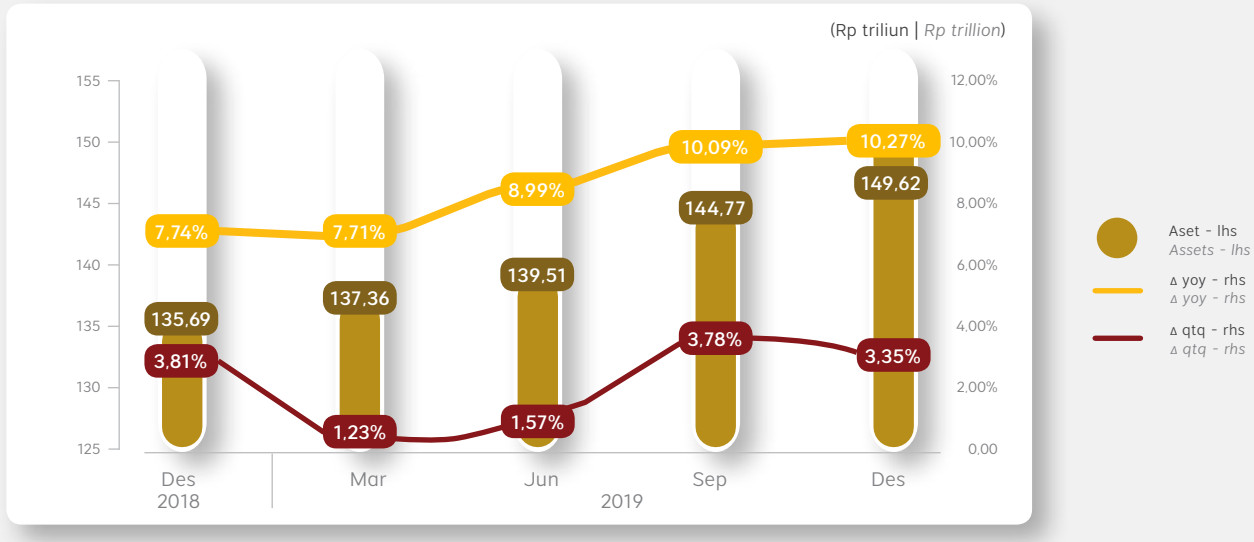

Sumber: SPI BPR, Desember 2019

Source: Indonesia Rural Banking Statistics, December 2019

b. DPK

DPK BPR tumbuh 11,51% (*yoy*) menjadi Rp102,54 triliun, meningkat dibandingkan pertumbuhan 2018 sebesar 8,36% (*yoy*). Peningkatan tersebut didorong oleh pertumbuhan deposito sebagai komponen DPK terbesar (68,66% dari total DPK BPR), yang tumbuh 12,71% (*yoy*), di atas pertumbuhan tahun sebelumnya sebesar 7,44% (*yoy*). Di sisi lain, tabungan tumbuh melambat dari 10,36% (*yoy*) menjadi 8,95% (*yoy*).

b. Deposits

Deposits at rural banks grew 11.51% (yoy) in 2019 to reach Rp102.54 trillion, improving from 8.36% (yoy) in 2018. The main contributor to faster deposit growth at rural banks in 2019 were term deposits, dominating 68.66% of total deposits at rural banks, which accelerated to 12.71% (yoy) from 7.44% (yoy) in 2018. In contrast, rural banks confirmed slower growth of savings deposits from 10.36% (yoy) to 8.95% (yoy) in the reporting period.

Tren Pertumbuhan DPK BPR

Deposit Growth at Rural Banks

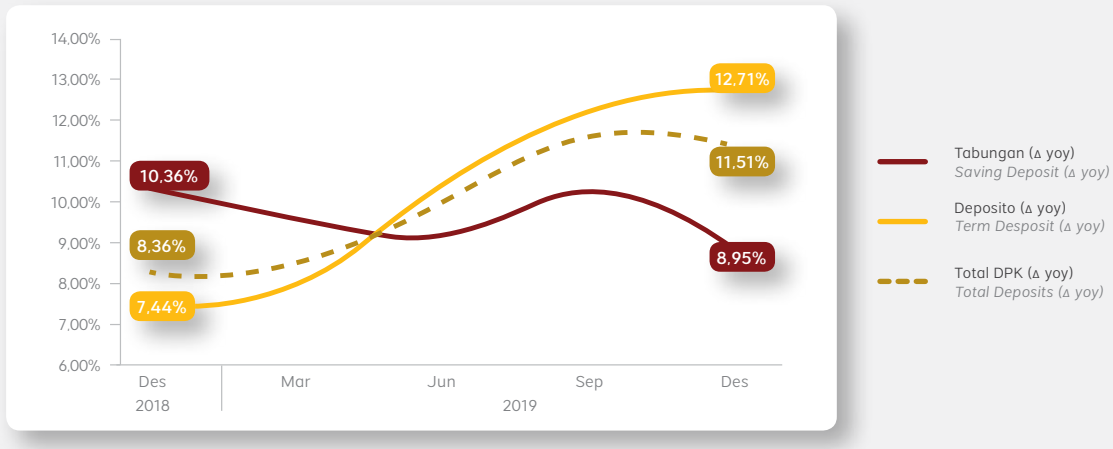

Sumber: SPI BPR, Desember 2019

Source: Indonesia Rural Banking Statistics, December 2019

c. Kredit

Penyaluran kredit tumbuh 10,76% (*yoy*), meningkat dibandingkan 9,77% (*yoy*) pada tahun sebelumnya. Berdasarkan jenis penggunaan, sebagian besar kredit BPR disalurkan untuk kredit produktif (52,85%) yang terdiri dari KMK (45,20%) dan KI (7,65%), sedangkan sisanya untuk KK (47,15%). Pertumbuhan kredit BPR utamanya didorong oleh pertumbuhan KMK dan KK yang tumbuh masing-masing sebesar 11,04% (*yoy*) dan 10,17% (*yoy*). Selain itu, KI juga tumbuh sebesar 12,76% (*yoy*) meskipun melambat dari tahun sebelumnya (14,20%, *yoy*).

c. Loans

Outstanding loans disbursed by rural banks grew 10.76% (yoy) in 2019, increasing from 9.77% (yoy) in 2018. By segment, productive loans tended to dominate total loans disbursed by rural banks (52.85%), consisting of working capital loans (45.20%) and investment loans (7.65%), with consumer loans accounting for the remaining 47.15%. The main drivers of credit growth at rural banks in 2019 were working capital loans and consumer loans, which expanded by 11.04% (yoy) and 10.17% (yoy) respectively in the reporting period. In addition, investment loans grew 12.76% (yoy) in 2019, despite moderating from 14.20% (yoy) in 2018.

Kredit BPR berdasarkan Jenis Penggunaan
Loan Growth By Segment at Rural Banks

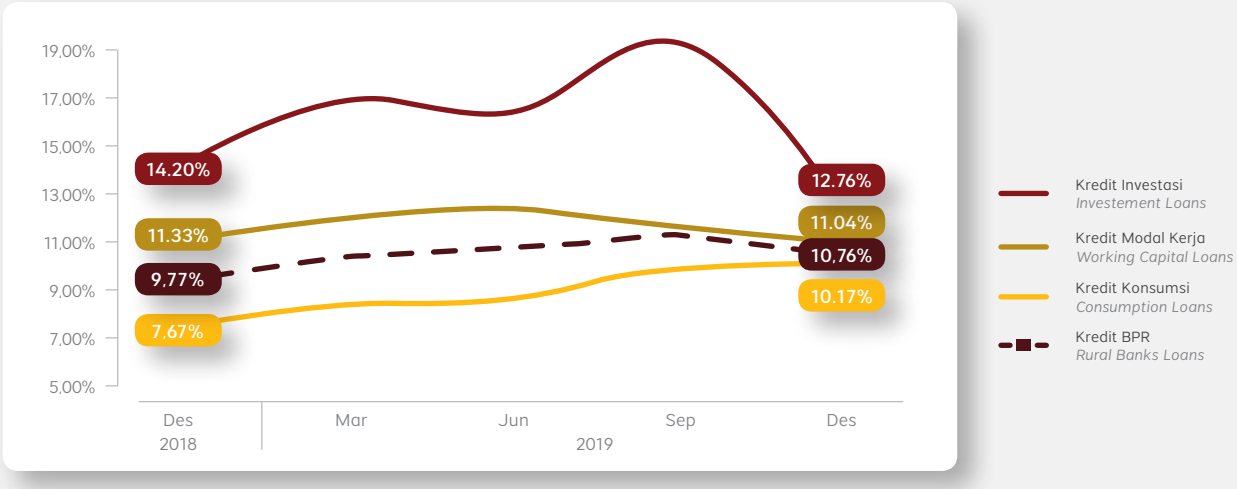

Sumber: SPI, Desember 2019
Source: Indonesia Rural Banking Statistics, December 2019

d. Rentabilitas

Rentabilitas BPR menurun dibanding tahun sebelumnya, tecermin dari ROA yang turun menjadi 2,31% atau lebih rendah sebesar 17 *bps* dibandingkan tahun sebelumnya (2,48%). Turunnya ROA disebabkan oleh melambatnya laba dari 5,03% (*yoy*) menjadi 2,53% (*yoy*). Di samping itu, efisiensi BPR juga menurun tecermin dari peningkatan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 76 *bps* menjadi 81,50%.

d. Profitability

A 17bps (2.48%) decline in the return on assets (ROA) to a level of 2.31% pointed to lower profitability at rural banks in 2019 compared with the previous year. The lower ROA was attributable to softer profit growth in the reporting period from 5.03% (yoy) to 2.53% (yoy). In addition, efficiency at rural banks was also observed to deteriorate in line with a 76bps bump in the BOPO efficiency ratio to 81.50%.

Tren ROA dan BOPO BPR

BOPO Efficiency Ratio and ROA Trend

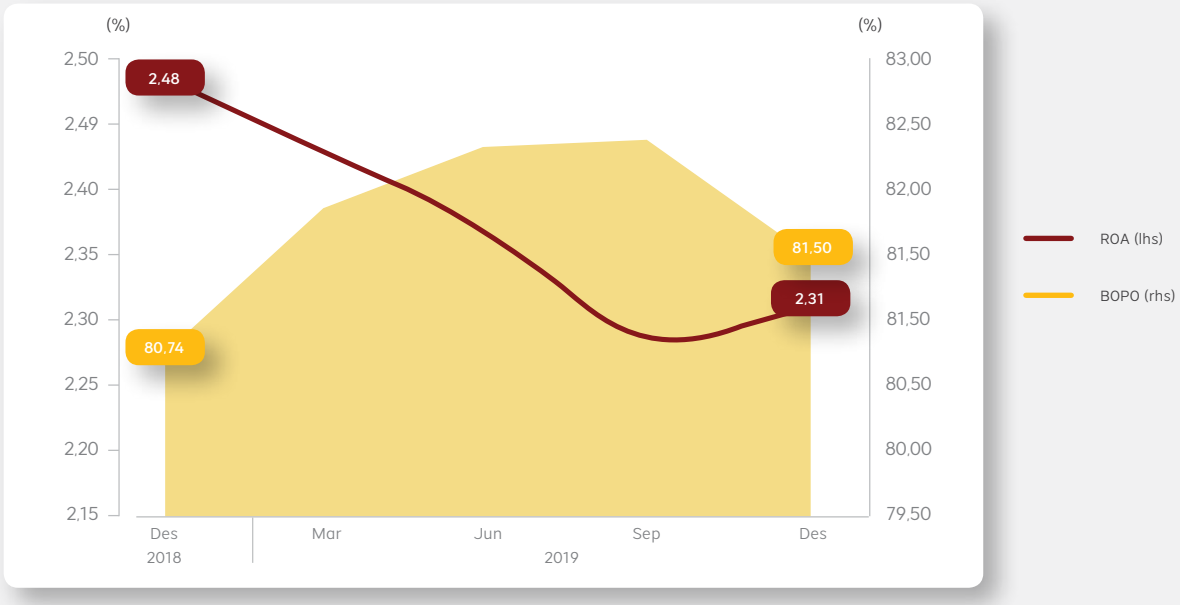

Sumber: SPI, Desember 2019

Source: Indonesia Banking Statistics, December 2019

e. Permodalan

Di tengah laba yang tumbuh melambat, permodalan BPR relatif cukup solid dan memadai untuk menyerap potensi risiko. Hal tersebut terlihat dari rasio KPMM BPR yang tinggi, yaitu sebesar 28,88%, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 23,35%. Penguatan aspek permodalan dilakukan oleh BPR dalam rangka persiapan penerapan POJK terkait pembentukan PPAP untuk aset produktif dengan kualitas dalam perhatian khusus sebesar 0,5% yang berlaku per 1 Desember 2019 (POJK Nomor 33/POJK.03/2018 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat).

III.3 PERKEMBANGAN INDUSTRI PASAR MODAL

III.3.1 Perkembangan Perdagangan Efek

Kinerja Pasar Modal Indonesia pada 2019 masih mencatatkan pertumbuhan yang positif di tengah pelemahan perekonomian yang terjadi di global dan domestik.

Pada akhir perdagangan 2019, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup pada posisi 6.299,54 atau mengalami peningkatan sebesar 105,04 poin (1,70%). Secara *ytd* Indonesia masih mencatatkan kinerja yang positif.

e. *Capital*

Despite slower profit growth, rural banks maintained relatively solid capital, adequate to absorb the potential risks. The already high Minimum Capital Adequacy Ratio of 23.35% recorded in 2018 improved to 28.88% in 2019. Rural banks were inclined to bolster capital in preparation for implementation of the OJK Regulation (POJK) requiring 0.5% provisions for loan losses under special mention, effective from 1st December 2019 (OJK Regulation (POJK) No. 33/POJK.03/2018 concerning Quality of Productive Assets and Formation of Provision for Write-off of Productive Assets of Rural Banks.

III.3 CAPITAL MARKET

III.3.1 Securities Trading

The capital market in Indonesia maintained positive growth in 2019 despite global and domestic economic moderation.

At the end of 2019, the Jakarta Composite Index (JCI) traded up 105.04 points (1.70%) to close at a level of 6,299.54. Year-to-date, the capital market in Indonesia also maintained positive performance.

Kinerja Indeks di Beberapa Bursa Utama (*ytd*)

Performance of Major Stock Exchanges

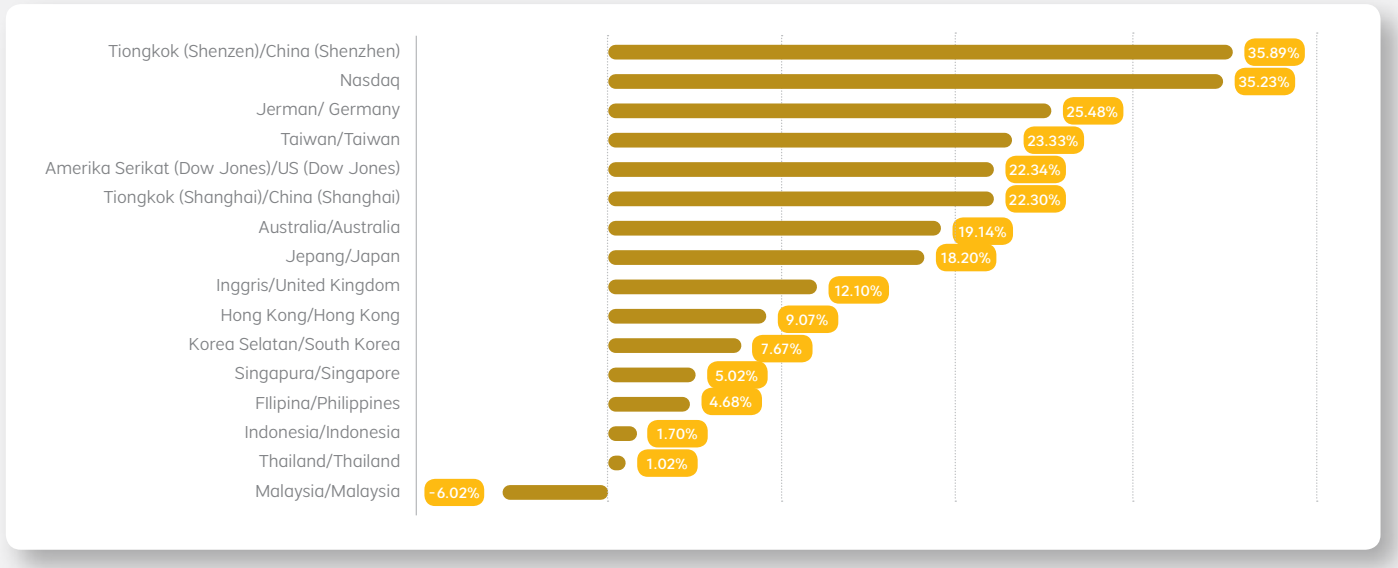

Indeks konstituen yang mengalami peningkatan tertinggi yaitu indeks sektor properti sebesar 15.57%, sedangkan indeks konstituen yang mengalami penurunan terdalam yaitu sektor industri konsumsi -20.11%. Peningkatan pada sektor properti dipengaruhi oleh kebijakan Bank Indonesia merelaksasi ketentuan uang muka bagi kredit pemilikan rumah (KPR) untuk rumah kedua dan kredit kendaraan bermotor. Sedangkan penurunan sektor industri konsumsi dipengaruhi oleh kenaikan cukai rokok.

Of the constituent indexes, the property sector index posted the strongest 15.57% gain, contrasting the deepest -20.11% contraction experienced by the consumption sector index. The property sector index was boosted by Bank Indonesia policy to relax down payment requirements on housing loans for a second residential property and automotive loans. In contrast, the consumption sector index was undermined by a hike in the excise tax on tobacco products.

Perkembangan Indeks Konstituen (*ytd*)

Constituent Index Performance

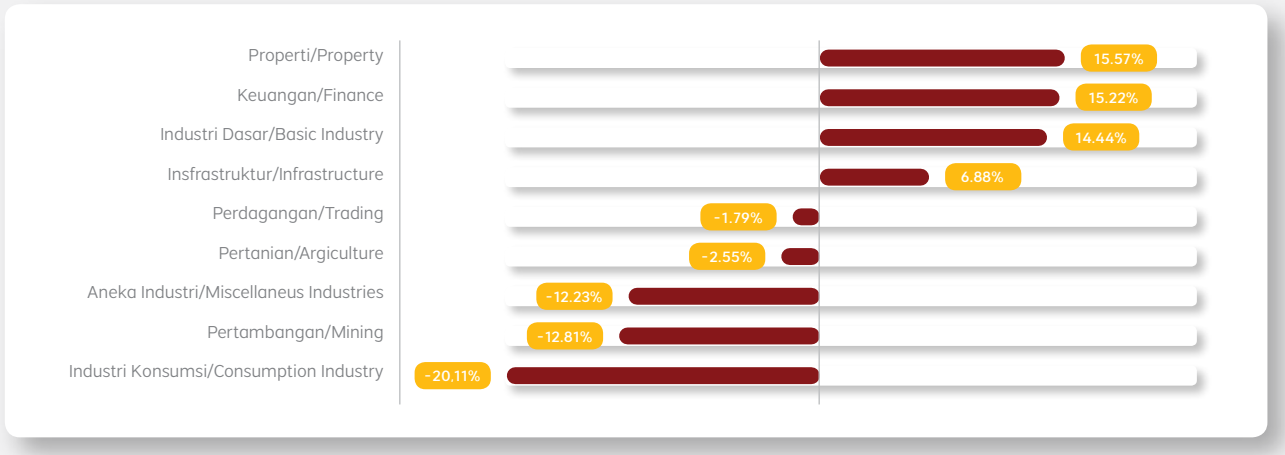

Nilai kapitalisasi pasar saham mengalami peningkatan sebesar 3,44% dibandingkan dengan posisi akhir periode sebelumnya menjadi Rp7.265,01 triliun. Rata-rata nilai perdagangan perhari mengalami kenaikan sebesar 7,12% dari tahun sebelumnya, menjadi Rp9,10 triliun per hari pada 2019. Rata-rata frekuensi perdagangan saham per hari meningkat sebesar 21,20%.

Stock market capitalisation value increased 3.44% on the final position of the previous period to a level of Rp7,265.01 trillion. Furthermore, the average daily trade value climbed 7.12% on the previous year to Rp9.10 trillion per day in 2019. In addition, the average daily trade frequency increased 21.20%.

Perkembangan IHSG dan Nilai Rata-Rata Perdagangan Saham Harian
JCI Performance and Average Daily Trade Value

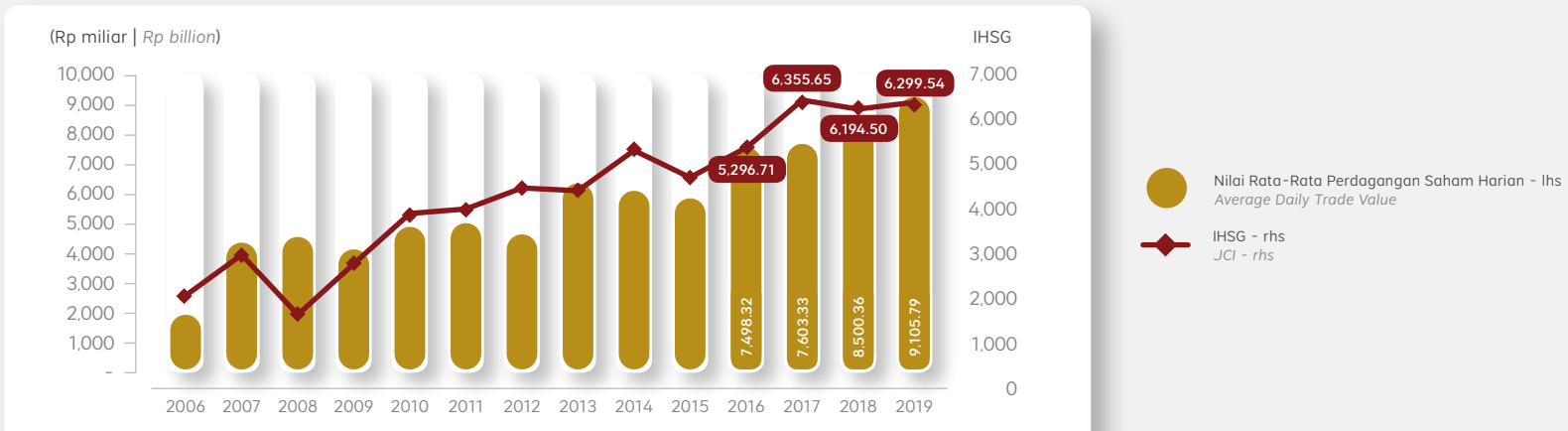

Perkembangan Perdagangan Saham Oleh Pemodal Asing dan Domestik
Stock Trading Performance by Foreign and Domestic Investors

Indikator (Rata-rata harian)	2015	2016	2017	2018	2019	Indicator (Daily Average)
Nilai Perdagangan Saham Harian (Rp miliar)	5.763,78	7.498,32	7.603.33	8.500,36	9.105,79	Daily Trade Value (Rp billions)
Investor Asing (Rp miliar)						Foreign Investors (Rp billions)
- Beli	2.443,97	2.798,75	2.701,45	3.037,24	3.065,27	Buy -
- Jual	2.536,55	2.733,02	2.868,97	3.248,68	2.863,65	Sell -
Investor Domestik (Rp miliar)						Domestic Investors (Rp billions)
- Beli	3.319,81	4.699,58	4.901,87	5.463,12	6.077,85	Buy -
- Jual	3.227,23	5.765,30	4.734,35	5.251,68	6.279,46	Sell -
Frekuensi Perdagangan Saham Harian	221.583	264.127	312.485	386.804	468.804	Daily Trade Frequency

Selama 2019, transaksi investor asing membukukan *net buy* sebesar Rp49,20 triliun, nilai ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode sebelumnya yang mencatatkan *net sell* sebesar Rp50,75 triliun.

Foreign investors booked a net buy totalling Rp49.20 trillion in 2019, reversing the net sell of Rp50.75 trillion recorded in the previous year.

Perkembangan IHSG dan Net Asing
JCI Performance and Net Foreign Transactions

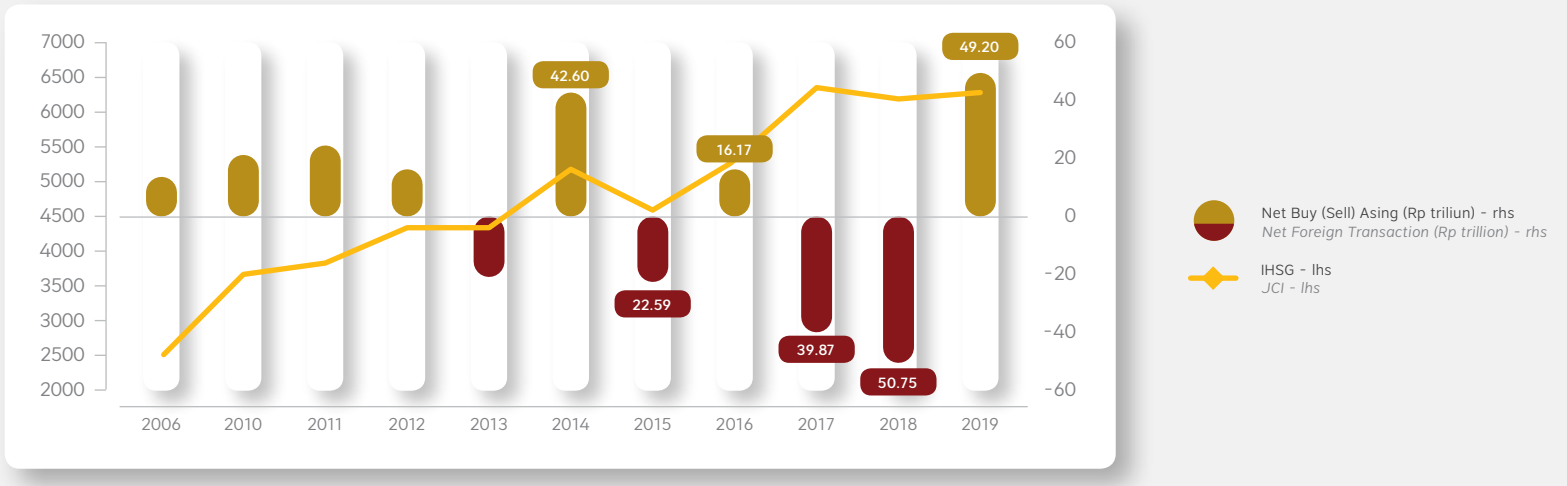

Selama 2019, kinerja pasar Surat Utang secara komposit (*Indonesia Composite Bond Index*) mengalami peningkatan sebesar +13,89% (*mtm)* ke level 274,5329 apabila dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya.

In 2019, the Indonesia Composite Bond Index increased +13.89% (mtm) compared with conditions in the previous year to a level of 274.5329.

Peningkatan kinerja pasar Surat Utang juga ditandai dengan turunnya INDOBeX-*Effective Yield* sebesar -1,166 poin *yoy* ke level 7,0889. Berdasarkan pergerakan kurva imbal hasil (*yield*) Surat Utang Pemerintah (IBPA-IGSYC), kinerja pasar Surat Utang Pemerintah juga menunjukkan peningkatan ditandai dengan *trend* penurunan *yield* untuk seluruh tenor dengan rata-rata sebesar -97,547*bps*. Rata-rata *yield* untuk tenor pendek (1-4 tahun), menengah (5-7 tahun), dan panjang (>7 tahun) mengalami penurunan masing-masing sebesar -143,852*bps*, -128,062*bps*, dan -85,515*bps*.

Stronger bond market performance was also signalled by a -1.166-point decline in the INDOBeX - Effective Yield index to a level of 7.0889. Based on the government bond yield curve (IBPA-IGSYC), government bond market performance improved in 2019, as reflected by lower yields across all tenors with an average decline of -97.547bps. Average yields on short tenors (1-4 years), medium tenors (5-7 years) and long tenors (>7 years) decreased by -143.842 bps, -128.062bps and -85.515bps respectively.

***Indonesia Composite Bond Index* (ICBI)**

Indonesia Composite Bond Index (ICBI)

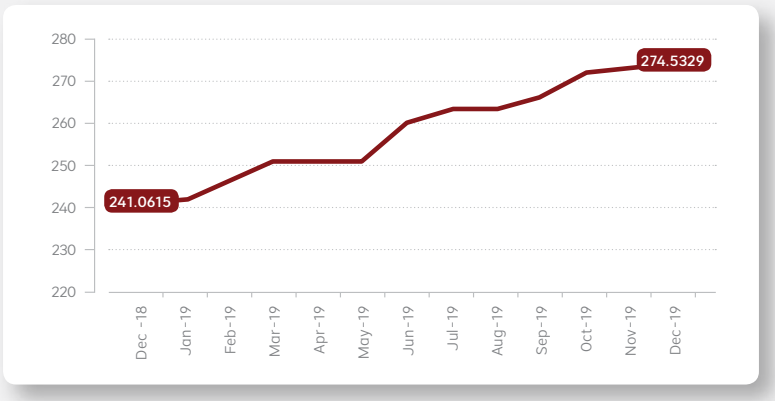

Indonesia Bond Index - Effective Yield

Indonesia Bond Index - Effective Yield

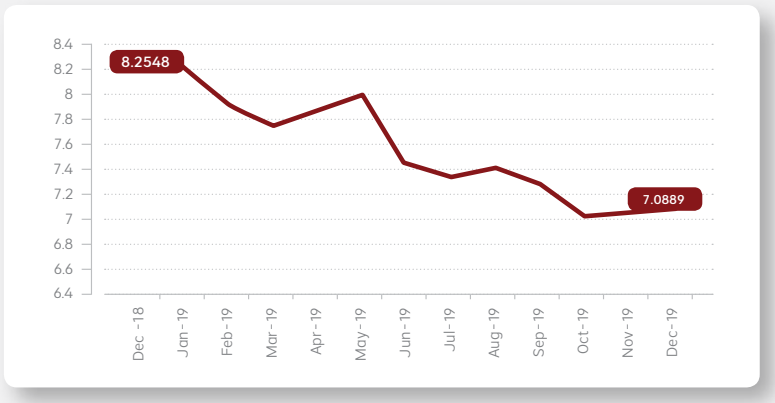

Aktivitas perdagangan Surat Utang Pemerintah dan Korporasi mengalami peningkatan baik volume maupun nilai perdagangan. Volume dan nilai perdagangan Surat Utang Pemerintah masing-masing meningkat sebesar 37,83% dan 38,82% masing-masing menjadi Rp6.902,46 triliun dan Rp6.804,39 triliun. Selain itu, Perdagangan Surat Utang Korporasi juga mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh volume yang meningkat sebesar 18,56% menjadi Rp388,44 triliun dan nilai perdagangannya meningkat sebesar 17,85% menjadi Rp386,12 triliun.

Trading activity of government and corporate bonds increased in terms of volume and value in 2019. The trading volume and value of government bonds increased respectively by 37.83% and 38.82% to Rp6,902.46 trillion and Rp6,804.39 trillion. In addition, trading activity of corporate bonds also increased by 18.56% and 17.85% in terms of volume and value respectively to Rp388.44 trillion and Rp386.12 trillion.

Perkembangan Pelaporan Perdagangan Efek bersifat Utang dan Sukuk

Debt Securities and Sukuk Trading Report

(Rptriliun | *Rptrillion*)

Jenis Efek	2018		2019		Security
	Volume *Volume*	Nilai *Value*	Volume *Volume*	Nilai *Value*	
Surat Utang dan Sukuk:					Debt Securities and Sukuk
- Korporasi	327,62	327,63	388,44	386,12	Corporate -
- Pemerintah	5.007,80	4.901,44	6.902,46	6.804,39	Government -
Total	5.335,42	5.229,07	7.290,89	7.190,51	Total
Repo	774,64	671,27	1.809,82	1.632,21	Repo

1 *Total Return* (TR) : Menggambarkan pergerakan tingkat pengembalian keseluruhan obligasi yang dihitung berdasarkan kenaikan/penurunan harga obligasi, akumulasi perolehan bunga berjalan dan perolehan kupon tahunan yang reinvestasikan kembali.
2. *Effective Yield* (EY) : Menggambarkan pergerakan tingkat imbal hasil keseluruhan obligasi yang dihitung berdasarkan kenaikan/penurunan tingkat *yield* obligasi dan telah memperhitungkan akumulasi perolehan bunga berjalan.

1. Total Return (TR): A measure of the rate of return of all bonds based on increasing/decreasing bond prices, accrued interest and reinvested annual coupon income.
2. Effective Yield (EY): A measure of total yield of all bonds based on increasing/decreasing bond prices and accrued interest

Selama 2019 pergerakan pasar Surat Utang Indonesia masih dipengaruhi oleh kondisi di pasar global terutama terkait perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Selain itu, faktor global lainnya adalah keputusan The Fed yang akhirnya menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25,0 *bps* ke kisaran 2,00%-2,25% pada bulan Juli menjadi sentimen positif pasar.

Dari dalam negeri, faktor politik mempengaruhi pergerakan Surat Utang Indonesia yaitu pelaksanaan Pemilihan Umum yang sempat diwarnai aksi demonstrasi di Jakarta.

Selama 2019, Fitch Ratings mengafirmasi peringkat *sovereign credit rating* Indonesia pada level BBB/*outlook* stabil (*Investment Grade*) dan lembaga rating Standard & Poor's menaikkan *sovereign rating* Indonesia ke level BBB dengan *outlook* stabil. Bank Indonesia juga menurunkan BI 7-day (*reverse*) *repo rate* sebanyak 4 kali, yang terakhir di level 5,00%.

III.3.2 Perkembangan Perusahaan Efek (PE)

Sampai akhir 2019, tercatat sebanyak 124 PE yang beroperasi sesuai jenis usahanya. Selain itu, OJK mencatat pelaporan pembukaan 35 lokasi kantor meskipun terjadi penutupan 17 lokasi kantor, sehingga total lokasi kegiatan kantor PE selain kantor pusat tercatat sebanyak 713 kantor di seluruh Indonesia.

In 2019, the debt securities market in Indonesia was influenced by global market conditions, particularly the trade war between the United States and China. In addition, other global factors, including the US Federal Reserve's decision to lower its policy rate by 25.0bps to 2.00%-2.25% in July, evoked positive market sentiment.

At home, political factors influenced the domestic debt securities market, including the general election that was marked by large demonstrations held in Jakarta.

In 2019, Fitch Ratings affirmed Indonesia's sovereign credit rating at a level of BBB with a stable outlook (investment grade), while Standard and Poor's upgraded Indonesia's sovereign rating to BBB with a stable outlook. Bank Indonesia reduced the BI 7-Day (Reverse) Repo Rate four times in 2019 to a level of 5.00%.

III.3.2 Securities Companies

At the end of 2019, a total of 124 securities companies were operating in Indonesia. In addition, OJK recorded the opening of 35 additional office locations and the closure of 17 offices, thus bringing total office locations, excluding head office, to 713 branches throughout Indonesia.

Jumlah Perusahaan Efek

Total Securities Companies

No	Jenis Izin Usaha	Jumlah Total	License
1	Perantara Pedagang Efek	33	Broker-Dealer
2	Penjamin Emisi Efek *)	3	Underwriter *)
3	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek	83	Broker-Dealer + Underwriter
4	Perantara Pedagang Efek + Manajer Investasi	2	Broker-Dealer + Investment Manager
5	Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	-	Underwriter + Investment Manager
6	Perantara Pedagang Efek + Penjamin Emisi Efek + Manajer Investasi	3	Broker-Dealer + Underwriter + Investment Manager
Total		**124**	**Total**

*) Khusus izin Penjamin Emisi Efek yang tidak melakukan aktivitas sebagai Perantara Pedagang Efek
*) *Specialised Underwriter license not acting as a Broker-Dealer*

Terkait izin Wakil Perusahaan Efek, selama 2019, OJK menerbitkan izin orang perorangan sebanyak 559 izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan sebanyak 111 Izin Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE) sehingga jumlah pemegang izin mencapai 10.447 WPPE dan 2.255 WPEE. Sedangkan untuk Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P) dan Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran Terbatas (WPPE-PT), OJK menerbitkan izin sebanyak 1.257 izin WPPE-P dan 25 WPPE-PT sehingga jumlah izin yang telah diterbitkan untuk WPPE-P sebanyak 2.238 dan WPPE-PT sebanyak 107.

Concerning the licence for a Securities Company Representative, OJK granted 559 individual licenses for Broker-Dealer Representatives and 111 for Underwriter Representatives, bringing the totals to 10,447 and 2,255 respectively. In addition, OJK also licensed 1,257 Marketing of Securities Broker Representatives (WPPE-P) and 25 Limited Marketing of Securities Broker Representatives (WPPE-PT), thus totalling 2,238 and 107 licences respectively.

III.3.3 Perkembangan Pengelolaan Investasi

Selama 2019 Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana menunjukkan peningkatan sebesar 7,28% menjadi sebesar Rp542,20 triliun. OJK mencatat terdapat tiga Reksa Dana dengan NAB terbesar yaitu Reksa Dana Pasar Uang sebesar Rp20,12 triliun, diikuti oleh Reksa Dana Syariah sebesar Rp19,24 triliun, dan Reksa Dana Pendapatan Tetap sebesar Rp13,3 triliun.

III.3.3 Investment Management

In 2019, the net asset value (NAV) of investment funds increased 7.28% to Rp542.20 trillion. The three largest investment funds in terms of NAV recorded by OJK in 2019 were Money Market Funds with Rp20.12 trillion, followed by Islamic Funds with Rp19.24 trillion and Fixed Income Funds with Rp13.3 trillion.

Perkembangan NAB per Jenis Reksa Dana
NAV by Investment Fund

(Rp triliun | *Rp trillion*)

NAB Per Jenis Reksa Dana	2018	2019				NAV by Investment Fund
	Triwulan IV Quarter IV	*Triwulan* I Quarter I	*Triwulan* II Quarter II	*Triwulan* III Quarter III	*Triwulan* IV Quarter IV	
RD Pasar Uang	42,79	49,71	53,75	57,39	62.91	Money Market Funds
RD Pendapatan Tetap	101,60	105,02	106,58	109,67	114.90	Fixed Income Funds
RD Saham	143,80	142,60	142,39	137,32	133.36	Equity Funds
RD Campuran	24,40	25,49	26,90	27,44	28.34	Discretionary Funds
RD Terproteksi	141,41	137,63	130,53	132,91	126.23	Protected Funds
RD Indeks	5,33	4,80	5,25	6,27	8.55	Indexed Funds
ETF	11,56	12,75	14,12	14,37	14.16	Exchange Traded Funds (ETF)
RD Syariah *	34,49	37,08	33,06	55,54	53.73	Islamic Funds *
Total	**505,39**	**515,09**	**512,58**	**540,91**	**542.20**	**Total**

Di tengah fluktuasi pergerakan IHSG, kepercayaan investor untuk melakukan investasi pada Reksa Dana tetap tinggi tecermin dari *net subscription* sebesar Rp54,89 triliun selama 2019. Selain itu, terdapat 72 Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) dengan dana kelolaan sebesar Rp27,43 triliun. Jumlah RDPT dan jumlah dana kelolaan tersebut masing-masing meningkat sebesar 16,13% dan 2,93% dibandingkan tahun sebelumnya.

Despite JCI fluctuations, investors remained confident in investment funds, as evidenced by a net subscription totalling Rp54.89 trillion in 2019. In addition, Private Equity Funds (RDPT) totalled 72 with managed funds amounting to Rp27.43 trillion, increasing by 16.13% and 2.93% respectively on the previous year.

Perkembangan Reksa Dana dan Produk Investasi Lainnya

Investment Funds and Other Investment Products

(Rp triliun | *Rp trillion*)

Jenis Produk Investasi	2018	2019				Investment Product
	Triwulan IV Quarter IV	*Triwulan* I Quarter I	*Triwulan* II Quarter II	*Triwulan* III Quarter III	*Triwulan* IV Quarter IV	
Reksa Dana						***Investment Fund***
Jumlah	2.098	2.089	2.094	2.188	2.181	Total
Total NAB	505,39	515,09	512,58	540,91	542,20	Total NAV
Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT)						***Private Equity Funds (RDPT) *****
Jumlah	62	64	60	71	72	Total
Total NAB	26,65	23,96	23,59	27,36	27,43	Total NAV
Efek Beragun Aset (EBA)						***Asset-Backed Securities (EBA)***
Jumlah	8	7	7	8	8	Total
Nilai Sekuritisasi	7,21	6,98	6,72	6,99	6,73	Securitisation Value
Efek Beragun Aset (EBA) berbentuk Surat Partisipasi (SP)						***EBA-SP*** ***Asset-Backed Securities Participation Note***
Jumlah	5	5	5	5	6	Jumlah
Nilai Sekuritisasi	3,46	3,26	3,13	2,89	4,69	Securitisation Value
Dana Investasi Real Estate (DIRE)						***Real Estate Investment Trust (REIT)***
Jumlah	7	7	7	7	7	Total
Total Nilai	0,72	0,92	11,34	11,34	11,34	Total Value
Kontrak Pengelolaan Dana (KPD)						***Fund Management Contracts***
Jumlah	494	502	514	531	591	Total
Total Nilai	204,77	214,00	217,18	214,10	217,43	Total Value

OJK menerbitkan satu izin baru untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset-Surat Partisipasi (EBA-SP) dengan nilai Rp2,0 triliun dan satu izin baru Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) dengan nilai Rp1,30 triliun. Sehingga pada akhir 2019, EBA-SP berjumlah enam EBA-SP dengan nilai sekuritisasi sebesar Rp4,69 triliun dan KIK-EBA berjumlah delapan KIK EBA dengan nilai sekurtitisasi sebesar Rp6,73 triliun. Pada akhir 2019, nilai Kontrak Pengelolaan Dana (KPD) mengalami peningkatan sebesar 6,18% menjadi Rp217,43 triliun. Selain itu, jumlah kontrak KPD juga mengalami peningkatan sebesar 19,63% menjadi 591 kontrak.

Selama 2019, OJK menerbitkan 409 Surat Efektif pernyataan pendaftaran Reksa Dana yang unit penyertaannya ditawarkan melalui penawaran umum. Selain itu, OJK juga menerbitkan 325 surat pembubaran Reksa Dana yang terdiri dari 289 Reksa Dana Konvensional dan 36 Reksa Dana Syariah.

In 2019, OJK granted one new license for asset-backed securities - participation notes worth Rp2.0 trillion and one license for asset-backed securities - collective investment contracts totalling Rp1.30 trillion. At the end of 2019, OJK recorded six asset-backed securities - participation notes with a securitisation value of Rp4.69 trillion and eight asset-backed securities - collective investment contracts with a securitisation value of Rp6.73 trillion. The value of fund management contracts increased 6.18% in 2019 to Rp217.43 trillion. In addition, the number of fund management contracts increased by 19.63% to a total of 591.

In 2019, OJK issued 409 effective statements to register investment funds through public offerings, while terminating 325 investment funds, consisting of 289 conventional investment funds and 36 Islamic investment funds.

Jenis Reksa Dana Yang Mendapat Surat Efektif

Investment Funds with Effective Statements

Jenis Reksa Dana	Jumlah Surat Efektif Effective Statements Issued	Investment fund
Reksa Dana Saham	26	Equity Funds
Reksa Dana Campuran	15	Discretionary Funds
Reksa Dana Pendapatan Tetap	27	Fixed-Income Funds
Reksa Dana Pasar Uang	40	Money Market Funds
Reksa Dana Terproteksi	206	Protected Funds
Reksa Dana Indeks	4	Indexed Funds
ETF-Indeks	12	Indexed Exchange Traded Funds
ETF-Indeks Syariah	1	Islamic Indexed Exchange Traded Funds
ETF-Saham	1	Equity Exchange Traded Funds
ETF-Pendapatan Tetap	1	Fixed-Income Exchange Traded Funds
Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap	3	Fixed Income Islamic funds
Reksa Dana Syariah Campuran	5	Islamic Discretionary Funds
Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Luar Negeri	3	Islamic Foreign Security-Based Funds
Reksa Dana Syariah Saham	8	Islamic Equity funds
Reksa Dana Syariah Pasar Uang	19	Islamic Money Market Funds
Reksa Dana Syariah Terproteksi	37	Islamic Protected Funds
Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk	1	Sukuk-Based Funds
Total	**409**	**Total**

Jumlah pelaku individu industri Pengelolaan Investasi juga mengalami peningkatan. Selama 2019 OJK memberikan 447 izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan terdapat 356 WMI yang tidak melakukan perpanjangan izin sehingga jumlah WMI meningkat sebesar 3,82%. Selain itu, OJK memberikan satu izin PI Individu sehingga PI Individu mengalami peningkatan sebesar 25%.

The number of institutional Investment Advisors increased in 2019. OJK issued 447 licenses for Investment Manager Representatives in 2019, with 356 Investment Manager Representatives opting not to renew their operating licence, thus raising the total number of investment manager representatives by 3.82%. In addition, OJK also issued one individual licence to an Investment Adviser, which increased the total by 25%.

Selain itu, OJK juga memberikan 1.935 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) dan 6.441 WAPERD yang dicabut izinnya. Pencabutan 6.441 izin WAPERD tersebut dikarenakan tidak melakukan Program Pendidikan Lanjutan (PPL) sebagaimana diamanatkan dalam POJK nomor 50/POJK.04/2015 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.

In 2019, OJK issued 1,935 licences to Investment Fund Selling Agent Representatives and 6,441 licences were revoked as a result of failing to provide Continuing Professional Education (CPE) as required in accordance with OJK Regulation (POJK) No. 50/POJK.04/2015 concerning Investment Fund Selling Agent Representative Licenses.

Perkembangan Pelaku di Industri Pengelolaan Investasi yang Memperoleh Izin

Licensed Investment Managers

	2018	2019			
	Triwulan IV Quarter IV	*Triwulan* I Quarter I	*Triwulan* II Quarter II	*Triwulan* III Quarter III	*Triwulan* IV Quarter IV
INDIVIDU INDIVIDUALS					
Wakil Manajer Investasi (WMI) Investment Manager Representatives	2.377	2.430	2.550	2.637	2.468
Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD) Investment Fund Selling Agent Representatives	27.586	27.970	28.525	22.330	23.110
Penasehat Investasi Investment Advisors	6	4	4	5	5
INSTITUSI INSTITUTIONS					
Manajer Investasi (MI) Investment Manager	92	93	93	98	98
Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) Investment Fund Selling Agents					
- Bank & PPE Khusus Banks and Specialised Broker-Dealers	37	41	41	42	42
- PE sebagai APERD Securities Companies as Investment Fund Selling Agents	21	21	21	21	21
Penasehat Investasi (PI) Investment Advisors	5	5	5	5	5
MI sebagai PI Investment Managers as Investment Advisors	6	7	12	12	16
APERD sebagai PI Investment Fund Selling Agents as Investment Advisors	1	1	2	2	2

III.3.4 Perkembangan Emiten dan Perusahaan Publik

Selama 2019, jumlah Penawaran Umum meningkat 6,55% (*yoy*) menjadi sebesar 179 meskipun dari segi nilai emisi tidak mengalami perubahan banyak. Penambahan jumlah tersebut sejalan dengan kebijakan OJK yang memberikan kemudahan bagi perusahaan dengan skala kecil dan menengah untuk dapat melakukan penawaran umum di pasar modal.

III.3.4 Issuers and Public Companies

In 2019, the number of public offerings increased 6.55% (yoy) to a total of 179, although the issuance value remained relatively unchanged. The increase of public offerings in 2019 was in line with OJK policy that provided greater convenience for small and medium enterprises to initiate public offerings in the capital market.

Perkembangan Penawaran Umum (Emisi)

Public Offerings

Jenis Penawaran Efek Offering Type	2018		2019		Δ (%) Jumlah Emisi Number of Issuance	Δ (%) Nilai Emisi Issuance Value
	Jumlah Emisi Number of Issuances	Nilai Emisi (Rp miliar) Issuance Value (Rp billions)	Jumlah Emisi Number of Issuances	Nilai Emisi (Rp miliar) Issuance Value (Rp billions)		
Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Initial Public Offerings (IPO)	58	16.429	59	14.696	2%	-11%
Penawaran Umum Terbatas (PUT/Rights Issue) Rights Issues	28	35.455	21	29.172	-25%	-18%
Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang Public Offerings of Bonds						
a. Obligasi/ Sukuk +Subordinasi Bonds/Sukuk + Subordination	11	11.726	7	7.050	-36%	-40%
b. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap I Phase I Shelf Registration of Bonds/Sukuk	30	28.719	28	30.278	-6,67%	5%
c. PUB Obligasi/ Sukuk Tahap II dst Phase II Shelf Registration of Bonds/Sukuk	41	73.502	64	85.649	56,10%	17%
Total **Total**	**168**	**165.831**	**179**	**166.845**	**6,55%**	**1%**

Perkembangan Nilai Emisi Berdasarkan Sektor Industri

Issuance Value by Industry

(Rp jutaan | *Rp millions*)

Sektor Industri	Penawaran Umum Perdana Initial Public Offerings	Penawaran Umum Terbatas Rights Issues	Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang Public Offerings of Bonds	Sector
Perbankan	209.856	1.872.283	21.694.500	Banking
Asuransi dan Pembiayaan	4.811.483	600.931	60.909.623	Insurance and Financing
Sekuritas dan Investasi	644.121	1.744.690	-	Securities and Investment
Perdagangan	372.940	577.904	10.723.020	Trade
Perhubungan dan Telekomunikasi	73.500	880.748	11.131.000	Transportation and Telecommunication
Media Massa, Teknologi Informasi, Pari-wisata dan Perusahaan Jasa Lainnya	2.664.035	262.443	850.000	Mass Media, Information Technology, Tourism and Other Services
Properti dan Perhotelan	999.776	13.950.995	700.000	Property and Accommodation
Real Estate dan Konstruksi	1.119.533	2.965.482	4.478.750	Real Estate and Construction
Tekstil, Garmen, dan Alas Kaki	195.200	-	-	Textiles, Garments and Footwear
Barang Konsumsi	1.442.755	117.000	-	Consumer Goods
Aneka Industri Lainnya	285.160	4.707.294	890.000	Other Miscellaneous Industries
Industri Dasar	156.420	200.750	4.900.000	Basic Industry
Industri Logam	1.183.947	255.000	2.500.000	Metal Industry
Industri Kimia	-	583.000	1.900.000	Chemical Industry
Agrobisnis	350.500	-	-	Agribusiness
Pertambangan dan Kehutanan	187.000	453.408	2.300.000	Mining and Forestry
Total	**14.696.226**	**29.171.928**	**122.976.893**	**Total**

III.3.4.1 Penawaran Umum Perdana Saham

Pada 2019, terdapat 93 perusahaan yang mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, di mana sebanyak 59 Perusahaan telah mendapat surat efektif dan 34 Perusahaan masih dalam proses. Nilai emisi dari 59 Perusahaan tersebut sebesar Rp14,7 triliun.

III.3.4.2 Penawaran Umum Terbatas (*Right Issue*)

Sebanyak 28 perusahaan menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Terbatas pada tahun 2019, di mana 21 perusahaan di antaranya telah mendapatkan Pernyataan Efektif. Nilai emisi Penawaran Umum Terbatas dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") atau *right issue* dari perusahaan tersebut sebesar Rp29,2 triliun.

III.3.4.3 Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang

Selama 2019, terdapat tujuh Perusahaan melakukan Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk, 28 Perusahaan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi/Sukuk Tahap I, dan 64 Perusahaan melakukan PUB Obligasi/Sukuk Tahap II dan seterusnya. Total nilai emisi Penawaran Umum Efek Bersifat Hutang tersebut sebesar Rp122,97 triliun.

III.3.4.1 Initial Public Offerings

In 2019, a total of 93 companies registered initial public offerings (IPO), consisting of 59 with an Effective Statement and 34 still in process, with a total issuance value of Rp14.7 trillion.

III.3.4.2 Rights Issues

A total of 28 companies registered rights issues in 2019, 21 of which received an Effective Statement, with a total issuance value of Rp29.2 trillion.

III.3.4.3 Public Offerings of Bonds

Seven companies initiated public offerings of bonds and/or sukuk in 2019, with a further 28 initiating a phase I shelf registration of bonds/sukuk and 64 initiating a phase II and subsequent phase shelf registration of bonds/sukuk, creating a combined total value of Rp122.97 trillion.

III.3.5 Perkembangan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal

III.3.5 Capital Market Supporting Institutions and Professions

III.3.5.1 Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga Penunjang Pasar Modal merupakan Lembaga yang memberikan jasa pada satu pihak atau lebih sesuai izin kegiatan usahanya di Pasar Modal, terdiri dari Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat dan Pemeringkat Efek. Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal yang tercatat di OJK sebagai berikut:

III.3.5.1 Capital Market Supporting Institutions

Capital market supporting institutions provide services to one or more parties in accordance with the operating license held, including Securities Administration Agencies (SAA), Custodian Banks, Trust Agents and Securities Rating Agencies. The number of capital market supporting institutions registered at OJK is as follows:

Jumlah Lembaga Penunjang Pasar Modal

Capital Market Supporting Institutions

Lembaga Penunjang	2018	2019	Supporting Institutions
Biro Administrasi Efek	10	10	Securities Administration Agencies (SAA),
Bank Kustodian	20	23	Custodian Banks
Wali Amanat	12	13	Trust Agents
Pemeringkat Efek	2	3	Securities Rating Agencies
Ahli Syariah Pasar Modal (Badan Usaha)	0	0	Islamic Capital Market Experts (Institutional)

III.3.5.1.1 Biro Administrasi Efek (BAE)

Biro Administrasi Efek (BAE) adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.

III.3.5.1.1 Securities Administration Agencies

Securities Administration Agencies (SAA) are parties contracted by issuers to record holdings of securities and distribute rights in relation to the securities.

BAE berdasarkan Jumlah Klien

Securities Administration Agencies by Total Clients

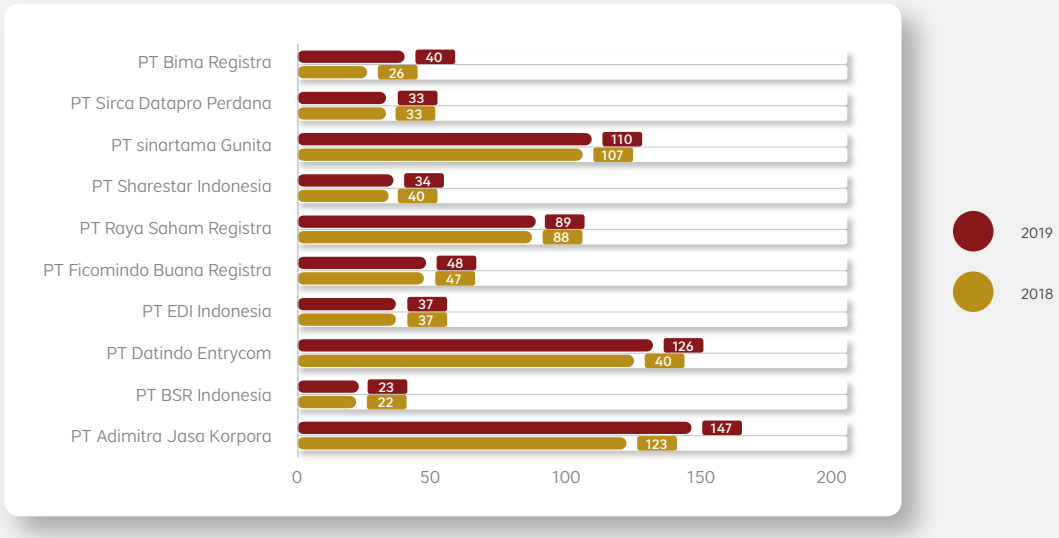

III.3.5.1.2 Bank Kustodian

Bank Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Sepanjang 2019, terdapat dua Bank Umum dan satu Bank Umum Syariah yang telah mendapatkan persetujuan sebagai Kustodian di Pasar Modal. Sampai akhir 2019 terdapat 23 Bank Kustodian yang telah memiliki persetujuan OJK dengan detail sebagai berikut:

III.3.5.1.2 Custodian Banks

Custodian banks are parties entrusted to hold securities and other assets linked to securities as well as provide other services, such as receiving dividend and interest payments as well as other claims, settle securities transactions and represent client accounts. In 2019, OJK approved two commercial banks and one Islamic bank as custodian banks in the capital market. At the end of 2019, therefore, OJK had licensed 23 custodian banks in Indonesia as follows:

Daftar Bank Kustodian Berizin

List of Licensed Custodian Banks

1	PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk	13	PT. Bank Panin Tbk
2	PT. BPD Jawa Barat Dan Banten Tbk	14	PT. Bank Permata Tbk
3	PT. Bank Bukopin Tbk	15	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
4	PT. Bank Central Asia Tbk	16	PT. Bank Sinarmas Tbk
5	PT. Bank CIMB Niaga	17	PT. Bank UOB Indonesia
6	PT. Bank Danamon Indonesia Tbk	18	Citibank
7	PT. Bank DBS Indonesia	19	Deutsche Bank AG Jakarta
8	PT. Bank HSBC Indonesia	20	Standard Chartered Bank
9	PT. Bank Maybank Indonesia Tbk	21	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
10	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	22	PT. Bank Syariah Mandiri
11	PT. Bank Mega Tbk	23	PT. KEB Hana Indonesia
12	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		

III.3.5.1.3 Wali Amanat

Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Kontrak Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan.

Sepanjang 2019, terdapat satu Bank Umum Syariah yang mendapatkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat di Pasar Modal. Berikut pangsa pasar industri Wali Amanat di Indonesia:

III.3.5.1.3 Trust Agents

Trust Agents represent the interests of bond/sukuk holders when prosecuting in or outside the court system in accordance with trust agent contracts and prevailing regulations.

In 2019, one Islamic bank was registered as a trust agent in the capital market. The respective market shares of trust agents in Indonesia is presented as follows:

Pangsa Pasar Wali Amanat

Market Share of Trust Agents

No	Nama Wali Amanat Trust Agent	Efek yang Diwaliamanatkan (2018) Total Securities Represented (2018)	%	Efek yang Diwaliamanatkan (2019)*) Total Securities Represented (2019)	%
1	PT. Bank BRI Syariah Tbk	0	0,00%	0	0,00%
2	PT. Bank Bukopin Tbk	42	4,95%	47	2,12%
3	PT. Bank CIMB Niaga Tbk	11	1,30%	9	5,23%
4	PT. Bank DKI	0	0,00%	0	0,00%
5	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk	162	19,10%	164	16,50%
6	PT. Bank Mega Tbk	230	27,12%	155	33,01%
7	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	58	6,84%	22	5,23%
8	PT. BPD Jawa Barat dan Banten Tbk	44	5,19%	53	3,92%
9	PT. Bank Permata Tbk	68	8,02%	57	9,48%
10	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	139	16,39%	147	18,79%
11	PT. Bank Sinarmas Tbk	0	0,00%	0	0,16%
12	PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	94	11,08%	115	5,56%
13	PT. Bank Syariah Mandiri	0	0,00%	0	0,00%
	Total	**848**	**100,00%**	**729**	**100,00%**

*) Berdasarkan Laporan Tengah Tahunan 2019
*) *Based on the Semi-Annual (mid-year) Financial Statements of 2019*

III.3.5.1.4 Pemeringkat Efek

Perusahaan Pemeringkat Efek adalah Penasihat Investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat baik untuk Efek yaitu Efek bersifat utang, Sukuk, Efek Beragun Aset atau Efek lain yang dapat diperingkat maupun Pihak sebagai entitas (*company rating*), termasuk Reksa Dana dan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Sepanjang 2019, terdapat satu Perusahaan yang telah mendapatkan Surat Keputusan Izin sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek, sehingga sampai akhir 2019, terdapat tiga Perusahaan Pemeringkat Efek yang mendapatkan izin OJK yaitu PT. Pemeringkat Efek Indonesia, PT. Fitch Ratings Indonesia dan PT. Kredit Rating Indonesia. Pangsa pasar perusahaan pemeringkat efek sebagai berikut:

III.3.5.1.4 Securities Rating Agencies

Securities Rating Agencies are Investment Advisors incorporated as a limited liability company that rate various securities, namely debt securities, sukuk, asset-backed securities and other rateable securities as well as company ratings, including investment funds and real estate investments based on collective investment contracts.

In 2019, one company was licensed as a securities rating agency, thus bringing the total at the end of 2019 to three, namely PT. Pemeringkat Efek Indonesia, PT. Fitch Ratings Indonesia and PT. Kredit Rating Indonesia. The market share of securities rating agencies in Indonesia is presented as follows:

Pangsa Pasar Perusahaan Pemeringkat Efek di Indonesia
Market Share of Securities Rating Agencies in Indonesia

Nama Perusahaan Pemeringkat Efek Rating Agency	Jumlah Perusahaan yang Diperingkat (2018) Total Companies Rated (2018)	%	Jumlah Perusahaan yang Diperingkat (2019) Total Companies Rated (2019)	%
PT. Pemeringkat Efek Indonesia	74	42,53%	81	44,26%
PT. Fitch Ratings Indonesia	100	57,47%	99	54,10%
PT. Kredit Rating Indonesia	-	-	3	1,64%
Total	**174**	**100,00%**	**183**	**100,00%**

III.3.5.2 Profesi Penunjang Pasar Modal

Profesi Penunjang Pasar Modal adalah profesi yang menyediakan jasa pada satu pihak atau lebih di bidang Pasar Modal, terdiri dari Akuntan, Konsultan Hukum, Penilai, Notaris, Penilai Pemerintah dan Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).

Sepanjang 2019, OJK menerbitkan STTD kepada 1.543 Profesi Penunjang Pasar Modal, 277 STTD KAP dan 23 Surat Keputusan pemberian izin sebagai ASPM. Adapun data Profesi Penunjang Pasar Modal sebagai berikut:

III.3.5.2 Capital Market Supporting Professions

Capital Market Supporting Professions provide services to one or more parties in the capital market, consisting of Accountants, Legal Consultants, Appraisers, Notaries, Government Appraisers and Islamic Capital Market Experts.

In 2019, OJK registered 1,543 capital markets supporting professions and 277 public accountants, and licensed 23 Islamic capital market experts. The data on capital market supporting professions is presented as follows:

Permohonan Profesi Penunjang Pasar Modal
Capital Markets Supporting Professions

Profesi	Jumlah Profesi memperoleh STTD Total Registered Professions	Profession
Akuntan	674	Accountants
Kantor Akuntan Publik	277	Public Accountants
Penilai	241	Appraisers
Konsultan Hukum	389	Legal Consultants
Notaris	239	Notaries
Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)	114	Islamic Capital Market Experts

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme Profesi Penunjang Pasar Modal, tahun 2019 OJK bekerjasama dengan asosiasi menyelenggarakan Pendidikan Profesi dan Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) bagi Profesi Penunjang Pasar Modal. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

To increase professionalism amongst capital market supporting professions in 2019, OJK coordinated with associations that provide Professional Education and Continuing Professional Education (CPE) for capital market supporting professions as follows:

Pendidikan Profesi Penunjang Pasar Modal

Education Provided to Capital Market Supporting Professions

No.	Profesi Profession	Jumlah Kegiatan Total Activities	Mitra Penyelenggara Partner	Jumlah Peserta Total Participants
1.	Akuntan Accountants	1 Pendidikan Profesi dan 5 Pendidikan Profesi Lanjutan 1 Professional Education and 5 Continuing Professional Education	Forum Akuntan Sektor Jasa Keuangan (FASJK) Financial Services Sector Accountant Forum (FASJK)	428
2.	Penilai Appraisers	1 Pendidikan Profesi dan 5 Pendidikan Profesi Lanjutan 1 Professional Education and 5 Continuing Professional Education	Forum Penilai Pasar Modal Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (FPPM-MAPPI) Indonesia Capital Market Appraiser Forum (FPPM-MAPPI)	95
3.	Konsultan Hukum Legal Consultants	9 Pendidikan Profesi Lanjutan 9 Continuing Professional Education	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) Association of Capital Market Legal Consultants (HKHPM)	45

III.4 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK (IKNB)

Kinerja IKNB selama 2019 bergerak positif tecermin dari peningkatan total aset sebesar 6,52% menjadi Rp2.501,72 triliun. Proporsi aset terbesar IKNB terdapat pada industri perasuransian, diikuti oleh lembaga pembiayaan dan dana pensiun. Total jumlah pelaku sebanyak 1.329 entitas dengan 209 perusahaan menyelenggarakan usaha dengan prinsip syariah yang terdiri dari 117 dalam bentuk *full fledge* syariah dan 92 dalam bentuk unit syariah.

III.4 NONBANK FINANCIAL INDUSTRY

A 6.52% bump in total assets to Rp2,501.72 trillion in 2019 indicated positive nonbank financial industry performance. Insurance continued to dominate the nonbank financial industry, followed by finance companies and pension funds. In total, the nonbank financial industry consisted of 1,329 entities in 2019, with 209 based on Islamic principles, consisting of 117 full-fledged Islamic non-bank financial institutions and 92 Islamic business units.

Perkembangan Aset IKNB

Non-Bank Financial Industry Asset Performance

(Rp triliun | *Rp trillion*)

Jenis Industri	2015	2016	2017	2018	2019*	Industry
Perasuransian	853,42	1.002,83	1.176,97	1.249,05	1.325,75	Insurance
Dana Pensiun	208,12	236,29	262,51	269,51	291,65	Pension Fund
Lembaga Pembiayaan	473,42	510,31	556,99	589,57	624,98	Finance Companies
Lembaga Jasa Keuangan Khusus	147,83	185,55	207,65	228,50	243,91	Special Financial Services Institutions
Industri Jasa Penunjang IKNB	6,79	6,84	8,11	9,61	11,32	Supporting Services of NBFI
Lembaga Keuangan Mikro	0,05	0,26	0,45	0,75	1,07	Microfinance Institutions
Fintech				1,55	3,04	Fintech
Total Aset	**1.689,63**	**1.942,08**	**2.212,68**	**2.348,54**	**2.501,72**	**Total Aset**

*) Berdasarkan data keuangan unaudited per 31 Desember 2019
- Aset Perasuransian per 31 Desember 2019, konvensional
- Aset Dana Pensiun per 31 Desember 2019, konvensional
- Aset Lembaga Pembiayaan per 31 Desember 2019, termasuk syariah;
- Aset Lembaga Jasa Keuangan Khusus per 31 Desember 2019, termasuk syariah;
- Aset Lembaga Keuangan Mikro per 31 Desember 2019, termasuk syariah;
- Aset Jasa Penunjang IKNB per 31 Desember 2019.

**) Based on unaudited financial data as of 31st December 2019*
- *Insurance Assets as of 31st December 2019, conventional;*
- *Pension Fund Assets as of 31st December 2019 conventional;*
- *Finance Company Assets as of 31st December 2019, including Islamic-compliant companies;*
- *Specialised Financial Services Institution Assets as of 31st December 2019, including Islamic-compliant companies;*
- *Microfinance Institution Assets as of 31st December 2019, including Islamic-compliant companies;*
- *Other Supporting Services Assets as of 31st December 2019, conventional*

Pelaku Usaha IKNB

Composition of Nonbank Financial Industry

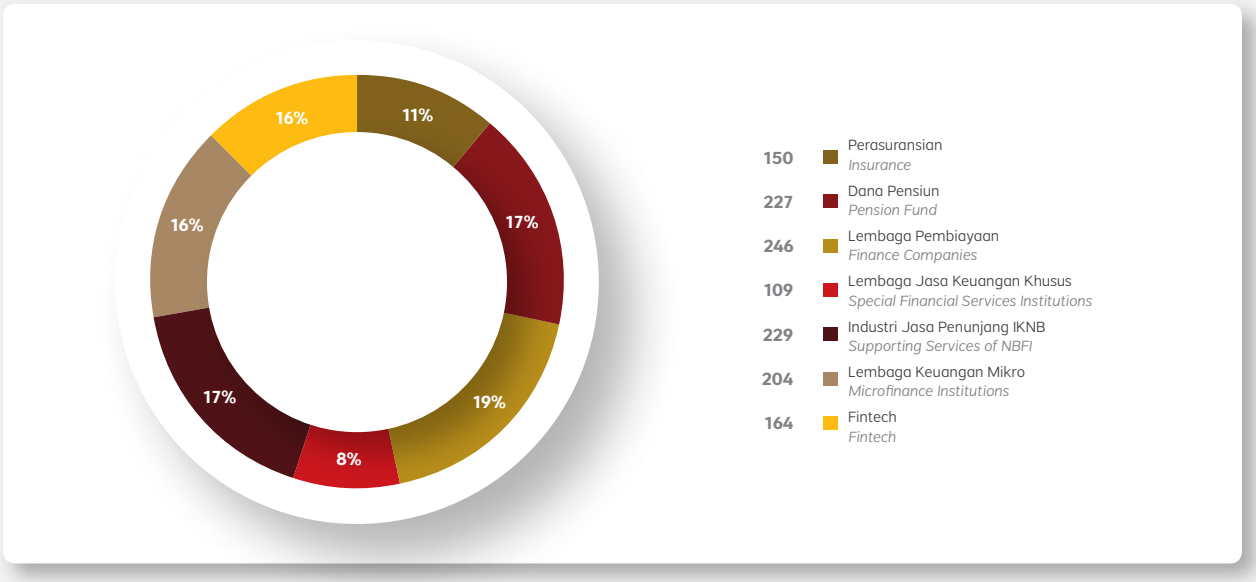

1. Data Pelaku IKNB per Desember 2019
2. Pelaku Lembaga Pembiayaan, Lembaga Jasa Keuangan Khusus dan Lembaga Keuangan Mikro termasuk syariah

1. Data as of December 2019
2. The data includes Islamic-compliant Finance Companies, Specialised Financial Services Institutions and Microfinance Institutions

III.4.1 Perkembangan Industri Perasuransian

III.4.1 Insurance Industry

Premi Bruto, Aset, Investasi dan Klaim Industri Asuransi

Gross Premiums, Assets, Investments and Claims of the Insurance Industry

(Rp triliun | *Rp trillion*)

Produk Asuransi Insurance Product	Premi Bruto Gross Claims			Aset Assets			Investasi Investments			Klaim Claims		
	2017*	2018*	2019**	2017*	2018*	2019**	2017*	2018**	2019**	2017*	2018*	2019**
Asuransi Jiwa Life Insurance	194,42	196,92	185,33	546,64	555,38	553,22	489,27	495,14	488,18	118,58	150,35	153,26
Asuransi Umum dan Reasuransi General Insurance and Reinsurance	70,42	77,46	102,10	154,46	173,36	182,64	80,61	87,47	92.13	35,26	38,84	46,09
Asuransi Wajib (JR, TASPEN, dan ASABRI) Compulsory Insurance	12,21	11,92	12,01	135,30	132,18	132,54	113,65	114,7	121,71	12,13	13,80	14,81
Asuransi Sosial (BPJS Kesehatan dan Ketenaga Kerjaan) Social Insurance	130,66	147,07	179,22	340,57	457,35	457,35	322,58	370,11	439,82	109,64	121,90	143,86
Total	**407,71**	**433,38**	**478,66**	**1.176,97**	**1.325,75**	**1.325,75**	**1.006,12**	**1.067,44**	**1.141,84**	**275,61**	**324,88**	**358,02**

*) Berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018;
**) Berdasarkan laporan keuangan bulanan (unaudited) per 31 Desember 2019

**) Based on audited financial reports as of 31st December 2017 and 31st December 2018;*
***) Based on unaudited monthly financial reports as of 31st December 2019.*

Pada 2019, densitas asuransi yang menggambarkan rata-rata pengeluaran tiap penduduk untuk pembayaran premi asuransi per tahun adalah sebesar Rp1.677.707,00 meningkat 8,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun tingkat penetrasi asuransi, yang menggambarkan kontribusi premi bruto terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pada 2019 adalah sebesar 3,00%, meningkat 0,23% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pendapatan premi Asuransi Sosial dan Asuransi Umum yang tumbuh masing-masing sebesar Rp24,8 triliun dan Rp9,6 triliun. Total investasi industri asuransi sebesar Rp1.141,84 triliun yang sebagian besar investasinya terdapat pada SBN.

Insurance density, as a measure of average insurance premiums paid by each adult in Indonesia, increased 8.2% in 2019 to a total of Rp1,677,707.00 On the other hand, insurance penetration, which describes the contribution of gross premiums to gross domestic product (GDP), increased by 0.23% to 3.00% in 2019, The increase was due to premium income in Social Insurance and General Insurance which grew by Rp24.8 trillion and Rp9.6 trillion respectively. Total investment in the insurance industry stood at Rp1,141.84 trillion in 2019, dominated by government bonds (SBN).

Distribusi Investasi Industri Asuransi
Investment Distribution of the Insurance Industry

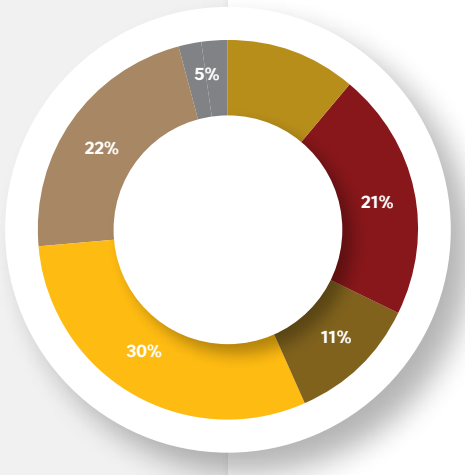

(Rp triliun | *Rp trillion*)

Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI *Government Bonds*	**334,48**
Reksa Dana *Investment Funds*	**247,84**
Saham *Stocks*	**232,88**
Deposito *Term Deposits*	**129,38**
Surat Utang Korporasi *Corporate Bonds*	**128,66**
Lainnya *Others*	**68,60**

- Penyertaan Langsung
  Direct Investment
- Properti Investasi
  Property Investment
- Sertifikat Deposito
  Certificate of Deposits
- Medium Term Notes (MTN)
  Medium Term Notes
- Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI
  Foreign Bonds
- Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional
  Global Bonds
- Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset
  Assets Backed Securities Collective Investment Contract
- Dana Investasi Real Estat
  Real Estate Investment Trust
- Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain
  Other Parties Financing Partnership
- Pinjaman yang Dibangun dengan Hak Tanggungan
  Mortage Loans
- Pinjaman Polis
  Policy Loans
- Investasi Lain
  Others Investment

III.4.2 Perkembangan Industri Dana Pensiun (Konvensional)

Industri Dana Pensiun terdiri dari Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Manfaat Pasti (DPPK PPMP), Dana Pensiun Pemberi Kerja Program Pensiun Iuran Pasti (DPPK PPIP), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Sampai akhir 2019, aset industri Dana Pensiun meningkat 8,17% (*yoy*) menjadi Rp291,65 triliun. Peningkatan aset ini, sejalan dengan meningkatnya nilai investasi yang mengalami kenaikan 7,10% (*yoy*) menjadi Rp282,64 triliun.

III.4.2 Conventional Pension Funds

The Pension Fund Industry consists of Pension Funds for Defined Benefit Pension Program (DPPK PPMP), Pension Funds for Employees of Defined Contribution Pension Plan (PPPK PPIP) and Financial Institution Pension Funds (DPLK). At the end of 2019, total assets of the pension fund industry increased 8.17% (yoy) to a level of Rp291.65 trillion, boosted by a 7.10% (yoy) surge of investment volume to Rp282.64 trillion.

Aset Dana Pensiun Berdasarkan Program Pensiun

Pension Fund Industry Assets by Program

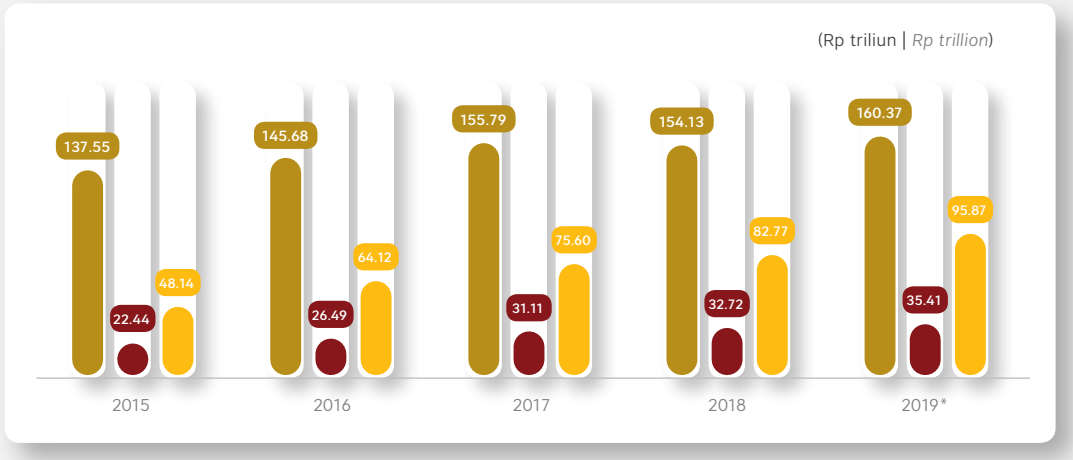

* data unaudited 31 Des 2019

Berdasarkan portofolio investasi, terdapat empat jenis investasi yang mendominasi portofolio investasi industri Dana Pensiun, yaitu Deposito (28,90%), SBN (23,85%), Obligasi (22,16%), dan Saham (10,82%).

Based on the investment portfolio, four types of investment dominated the pension fund industry in 2019, namely term deposits (28.90%), Government Bonds - SBN (23.85%), bonds (22.16%) and stocks (10.82%).

Portofolio Investasi Industri Dana Pensiun

Investment Portfolio of the Pension Funds Industry

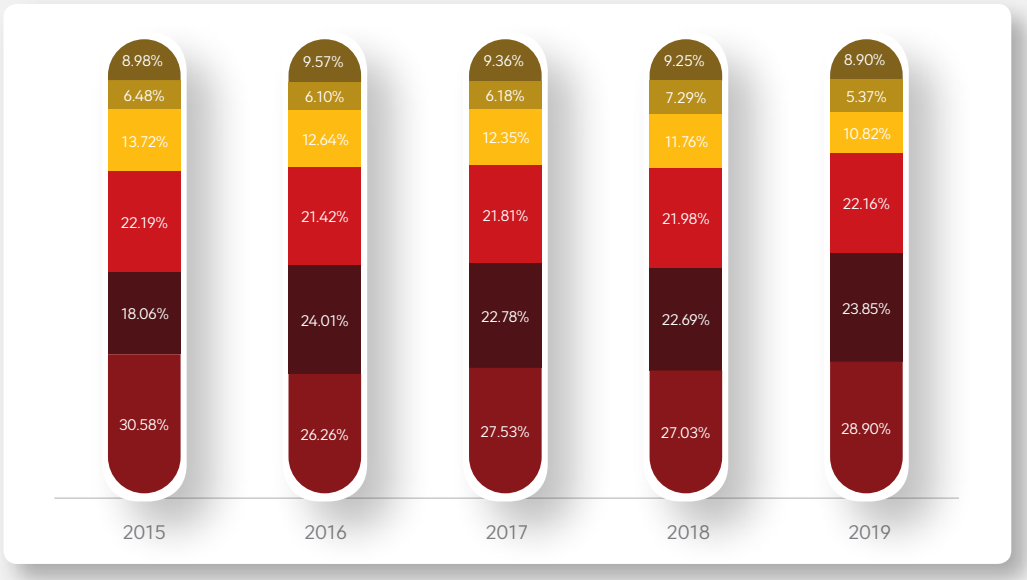

* data unaudited 31 Des 2019
- Deposito terdiri dari Tabungan, deposito on call, deposito berjangka dan sertifikat deposito;
- Obligasi terdiri dari Obligasi korporasi, sukuk korporasi, dan obligasi/sukuk daerah;
- Properti dan lainnya terdiri dari Surat berharga Bank Indonesia, KIK-EBA, DIRE, Dana Infrastruktur berbentuk KIK, kontrak opsi saham, MTN, REPO, penyertaan langsung, tanah, bangunan, tanah dan bangunan

* *unaudited data as of 31st December 2019*
- *Term Deposits consist of savings deposits, on-call deposits, time deposits and certificates of deposit;*
- *Bonds consist of corporate bonds, corporate sukuk and municipal bonds/sukuk;*
- *Property and others consist of Bank Indonesia securities, asset-backed securities - collective investment contracts (KIK-EBA), real estate investment funds (DIRE), collective investment contracts for infrastructure funds, stock option contracts, medium-term notes (MTN), repo transactions, direct investment, land, buildings, land and buildings.*

III.4.3 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan

Selama 2019, aset, ekuitas, dan laba bersih perusahaan pembiayaan masing-masing tumbuh sebesar 2,65%, 11,97%, dan 13,14% (*yoy*). Sementara itu, liabilitas perusahaan pembiayaan mengalami penurunan sebesar 0,24% (*yoy*).

III.4.3 Finance Companies

The assets, equity and net income of finance companies increased by 2.65%, 11.97% and 13.14% (yoy) respectively in 2019. In contrast, the liabilities of finance companies declined 0.24% (yoy) in the same period.

Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan
Growth of Finance Company Assets, Liabilities and Equity

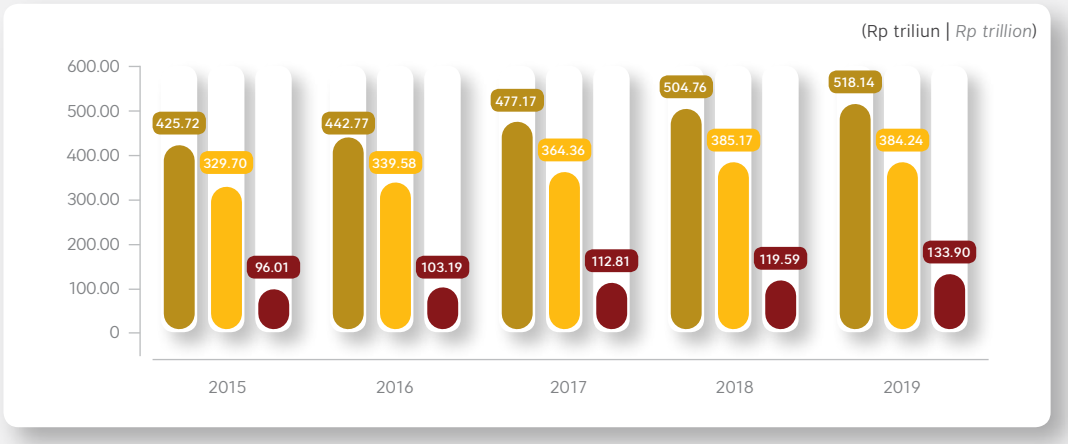

Laba Rugi Perusahaan Pembiayaan
Profit and Loss of Finance Companies

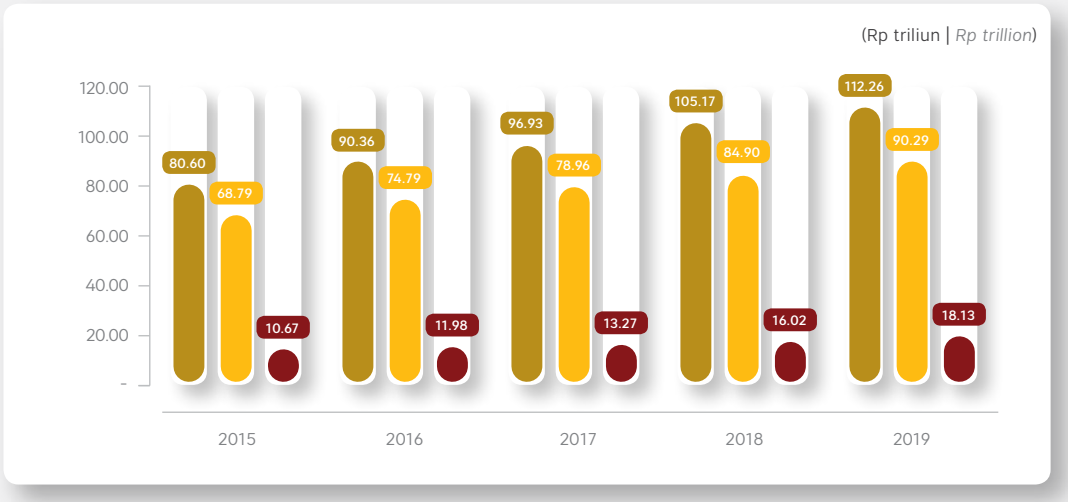

Komposisi piutang pembiayaan pada 2019 didominasi oleh pembiayaan multiguna dan investasi masing-masing sebesar 60,78% dan 29,81%. Kegiatan industri perusahaan pembiayaan mengalami peningkatan, tecermin dari naiknya piutang pembiayaan sebesar 3,66% menjadi Rp452,22 triliun.

The composition of financing receivables in the financing industry was dominated in 2019 by multipurpose financing and investment, accounting for 60.78% and 29.81% respectively. Furthermore, a 3.66% increase of financing receivables to a total of Rp452.22 trillion signalled expansive business activity in the reporting period.

Piutang Perusahaan Pembiayaan
Finance Company Receivables

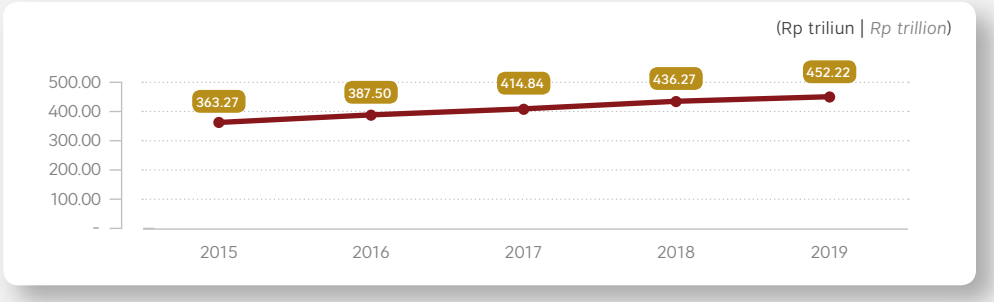

Jumlah pinjaman yang diterima perusahaan pembiayaan pada 2019 sebesar Rp279,08 triliun dengan komposisi 51,78% berdenominasi Rupiah, diikuti Dollar Amerika sebesar 41,04%, Yen Jepang sebesar 6,89%, Euro sebesar 0,26%, dan Dollar Singapura sebesar 0,02%. *Exposure* terhadap fluktuasi mata uang asing ke perusahaan pembiayaan relatif aman karena perusahaan melakukan *natural hedging* melalui pendekatan *matching currency* antara sumber pendanaan dan pembiayaan serta melalui *cross-currency swap* dan *interest rate swap*.

Total loans received by finance companies in 2019 stood at Rp279.08 trillion, composed of 51.78% denominated in rupiah, followed by 41.04% in US dollars, 6.89% in Japanese yen, 0.26% in euros and 0.02% in Singaporean dollars. Finance company exposure to foreign currency fluctuations was minimised through natural hedging using a matching currency approach between funding sources and financing as well as through cross-currency swaps and interest-rate swaps.

Pinjaman Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Jenis Valuta
Finance Companies Loans Based on Type of Currency

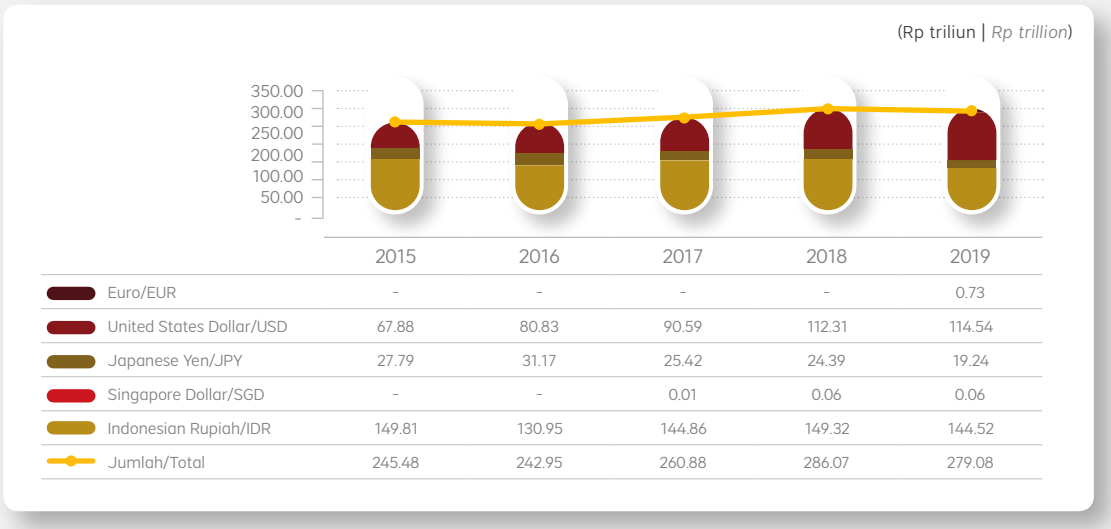

	2015	2016	2017	2018	2019
Euro/EUR	-	-	-	-	0.73
United States Dollar/USD	67.88	80.83	90.59	112.31	114.54
Japanese Yen/JPY	27.79	31.17	25.42	24.39	19.24
Singapore Dollar/SGD	-	-	0.01	0.06	0.06
Indonesian Rupiah/IDR	149.81	130.95	144.86	149.32	144.52
Jumlah/Total	245.48	242.95	260.88	286.07	279.08

III.4.4 Perkembangan Industri Perusahaan Modal Ventura

Perusahaan modal ventura adalah lembaga pembiayaan dengan kegiatan usaha berupa penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Selama 2019, aset, liabilitas, dan ekuitas industri perusahaan modal ventura naik masing-masing sebesar 58,67%, 38,03%, dan 88,73%.

III.4.4 Venture Capital Industry

Venture capital firms engage in equity participation through purchases of convertible bonds and profit-sharing based financing. Total assets, liabilities and equity of venture capital firms grew 58.67%, 38.03% and 88.73% respectively in 2019.

Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Modal Ventura
Growth of Venture Capital Industry Assets, Liabilities and Equity

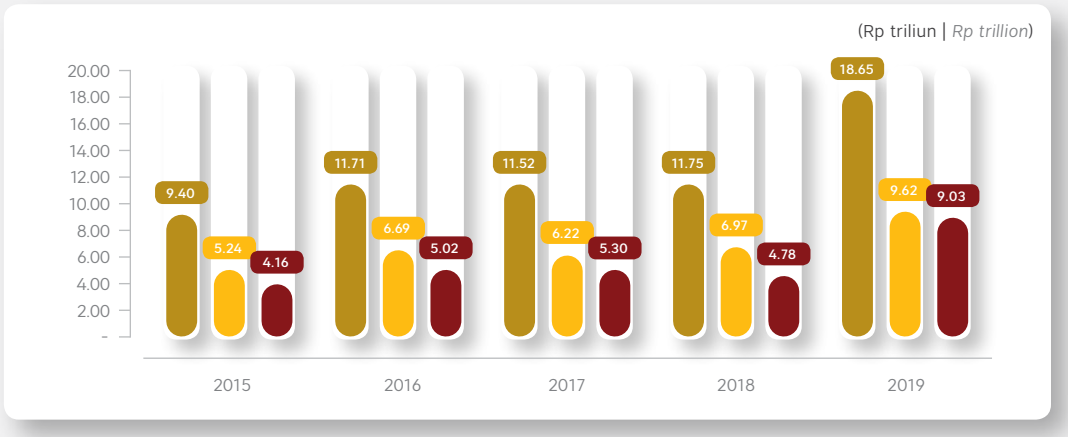

Sampai dengan akhir 2019, pembiayaan/penyertaan modal industri modal ventura naik sebesar 50,40% menjadi Rp12,72 triliun di mana porsi dengan skema pembagian atas hasil usaha mencakup 81,03% dari total pembiayaan/penyertaan modal.

In 2019, capital financing/investment in the venture capital industry increased 50.40% to Rp12.72 trillion, dominated by profit-sharing schemes with an 81.03% share of the total.

Pertumbuhan Pembiayaan/Penyertaan Modal
Financing/Investment Growth

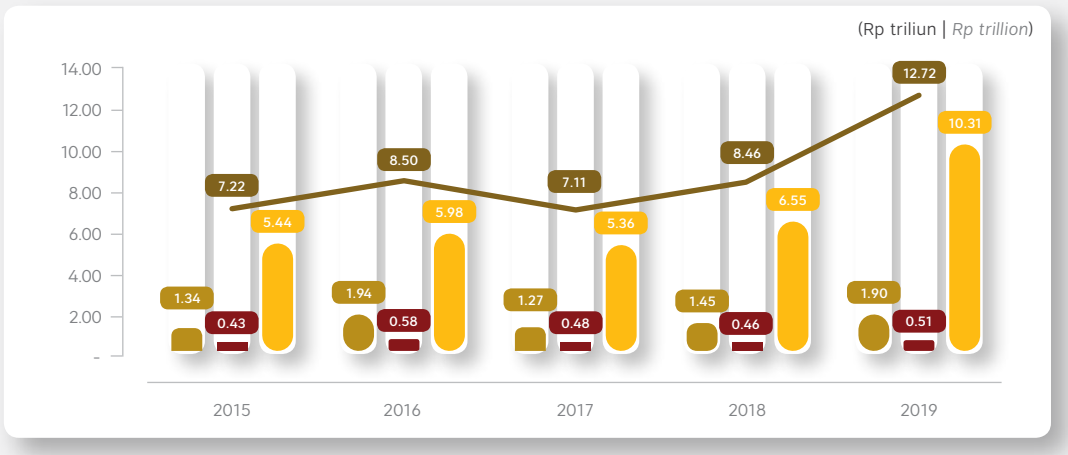

Kinerja modal ventura diukur dengan rasio keuangan, yaitu Beban Operasi terhadap Pendapatan Operasi (BOPO), rasio investasi terhadap total aset (IFAR), *Return on Asset* (ROA), dan *Return on Equity* (ROE) dengan rasio masing-masing pada 2019 adalah 89,85%; 68,23%; 3,22%; dan 5,81%. Penurunan BOPO pada 2019 dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan operasional yang lebih siginifikan dibanding pertumbuhan beban operasionalnya. Sedangkan peningkatan ROA dan ROE menunjukan bahwa pertumbuhan aset dan ekuitas yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Financial ratios are used to measure venture capital industry performance, including the BOPO efficiency ratio, investments-to-total assets ratio (IFAR), return on assets (ROA) and return on equity (ROE), which stood at 89.85%, 68.23%, 3.22% and 5.81% respectively in 2019. The decline in BOPO in 2019 is influenced by the growth of operating income which is more significant than the growth of operating expenses. While the increase in ROA and ROE shows that asset and equity growth is better than the previous year.

Rasio Keuangan Perusahaan Modal Ventura
Financial Ratios for the Venture Capital Industry

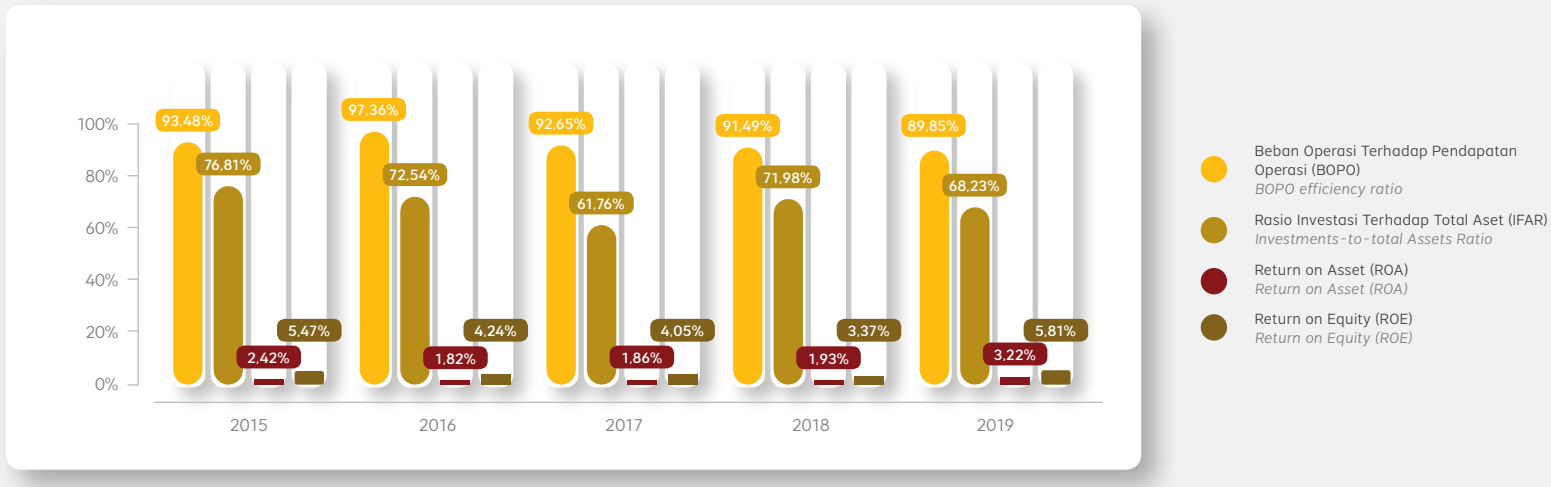

III.4.5 Perkembangan Industri Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Dalam rangka mengemban amanat untuk membangun infrastruktur, pemerintah mendirikan dua perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan infrastruktur, yaitu PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT. Indonesia Infrastructure Finance. Sampai dengan akhir 2019, total aset, liabilitas, dan ekuitas dari kedua perusahaan tersebut masing-masing meningkat sebesar 20,72% (*yoy*), 38,98% (*yoy*), dan 3,61% (*yoy*) menjadi Rp88,19 triliun, Rp49,12 triliun, dan Rp39,07 triliun. Peningkatan pada aset didominasi oleh besarnya kenaikan pada pinjaman yang diberikan menjadi sebesar Rp64,83 triliun atau naik sebesar 23,97% (*yoy*).

III.4.5 Infrastructure Finance Companies

In accordance with a mandate to develop infrastructure, the Government established two companies to finance infrastructure, namely PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT. Indonesia Infrastructure Finance. In 2019, the total assets, liabilities and equity of both infrastructure finance companies grew 20.72% (yoy), 38.98% (yoy) and 3.61% (yoy) respectively to reach Rp88.19 trillion, Rp49.12 trillion and Rp39.07 trillion. The increase in assets was dominated by the size of the increase in loans extended to Rp64.83 trillion or an increase of 23.97% (yoy).

Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Growth of Infrastructure Finance Industry Assets, Liabilities and Equity

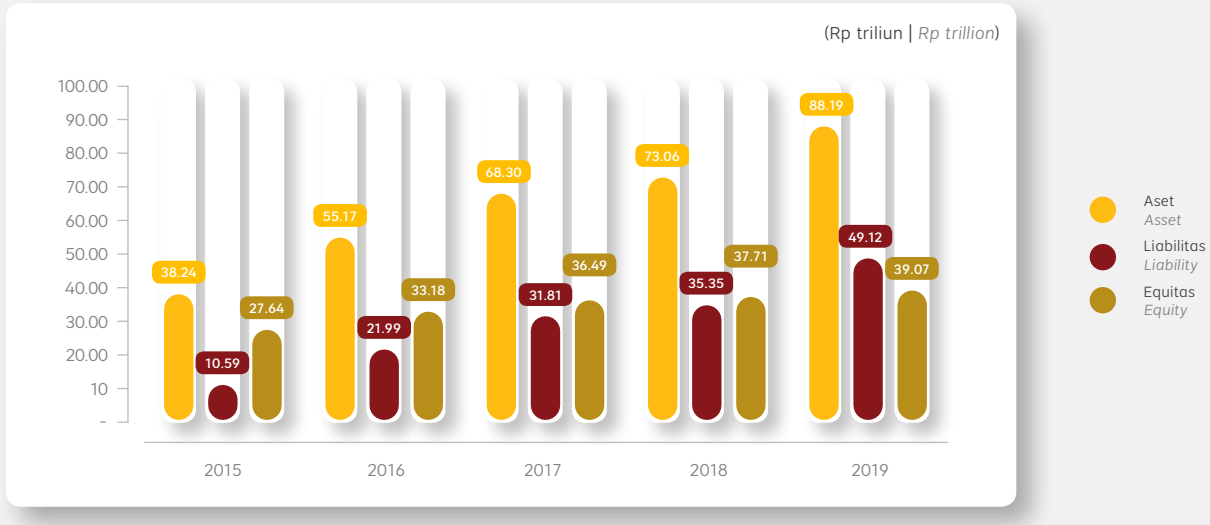

III.4.6 Perkembangan Industri Jasa Keuangan Khusus

Total aset industri jasa keuangan khusus, yang terdiri dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, PT. Permodalan Nasional Madani/PT. PNM (Persero), pada 2019 mengalami kenaikan 4,87% dibandingkan 2018. Persentase pertumbuhan aset tertinggi dimiliki oleh SMF, yaitu naik 38,01% (*yoy*). Akan tetapi, secara nominal, pertumbuhan aset tertinggi dimiliki oleh Perusahaan Pergadaian dengan kenaikan aset sebesar Rp12,58 triliun (*yoy*).

III.4.6 Specialised Financial Services Institutions

Total assets of specialised financial services institutions, consisting of Indonesia Eximbank, pawnbrokers, guarantee companies, PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) or SMF, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM), increased 4.87% in 2019. The strongest annual asset growth was reported by SMF at 38.01% (yoy). In terms of value, however, pawnbrokers dominated annual asset growth with Rp12.58 trillion.

Pertumbuhan Aset Lembaga Jasa Keuangan Khusus

Asset growth of Specialised Financial Services Institutions

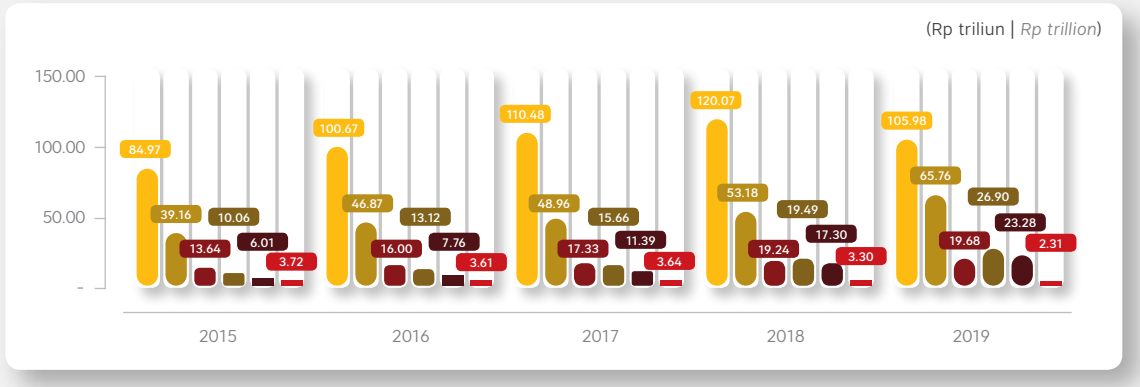

*) Berdasarkan data bulan Desember 2019 (unaudited);
Termasuk data perusahaan syariah
*) *based on monthly report data from December 2019 (unaudited);*
Including Islamic-compliant companies

III.4.6.1 Perkembangan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Indonesia Eximbank

Nilai piutang dan pembiayaan syariah LPEI selama 2019 mengalami penurunan sebesar 10,11% (*yoy*) menjadi Rp97,85 triliun, yang disebabkan adanya pelunasan fasilitas pembiayaan yang cukup besar di 2019 dan tidak diimbangi dengan peningkatan penyaluran pembiayaan baru.

III.4.6.1 Indonesia Eximbank

The value of Islamic financing and receivables at Indonesia Eximbank declined 10.11% (yoy) to Rp97.85 trillion. The decline in financing was due to the large repayment of financing facilities in 2019 and was not offset by an increase in the distribution of new financing.

Pertumbuhan Nilai Piutang dan Pembiayaan Syariah yang Disalurkan LPEI
Growth of Receivables and Islamic Financing at Indonesia Eximbank

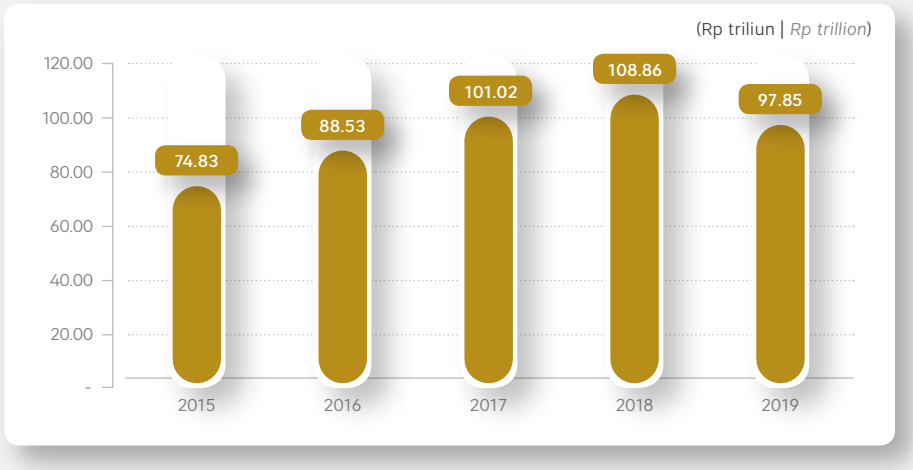

III.4.6.2 Perkembangan Perusahaan Pergadaian

Selama 2019, penyaluran pinjaman oleh Perusahaan Pergadaian meningkat sebesar 21,73% (*yoy*) menjadi sebesar Rp50,76 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini terjadi karena adanya penambahan sumber dana yang berasal dari pinjaman bank.

III.4.6.2 Pawnbrokers

In 2019, outstanding loans disbursed by pawnbrokers increased 21.73% (yoy) on the previous year to Rp50.76 trillion. This increase occurred due to the addition of funding sources from bank loans.

Pertumbuhan Nilai Pinjaman yang Disalurkan oleh Pegadaian
Loan Growth at Pawnbrokers

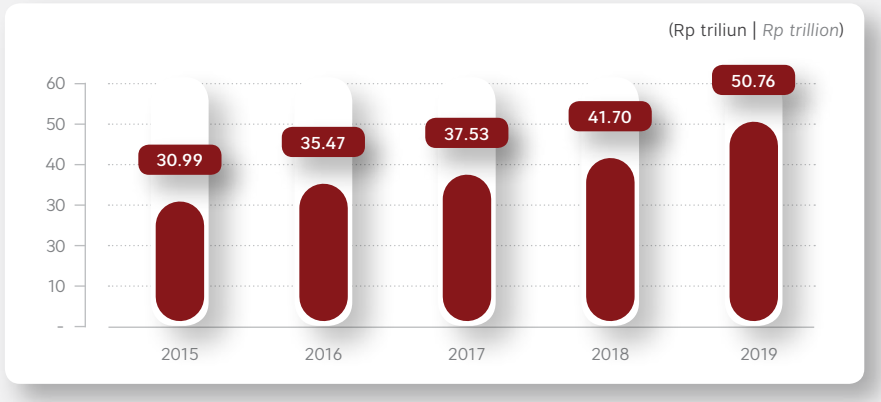

III.4.6.3 Perkembangan Lembaga Penjamin

Selama 2019, *outstanding* penjaminan mengalami kenaikan sebesar 16,20% (*yoy*) menjadi Rp238,00 triliun. Kenaikan tersebut berasal dari naiknya nilai penjaminan usaha non produktif dari tahun sebelumnya sebesar 17,22%. Hal ini terjadi karena adanya penambahan kontrak penjaminan baru, baik untuk usaha produktif maupun usaha non produktif.

III.4.6.3 Guarantee Companies

In 2019, outstanding guarantees increased 16.20% (yoy) to Rp238.00 trillion on the back of 17.22% growth in the value of non-productive business guarantees over the previous year. This occurs because of the addition of new guarantee contracts, both for productive and non-productive businesses.

Pertumbuhan Nilai *Outstanding* Perusahaan Penjaminan

Value of Outstanding Guarantees

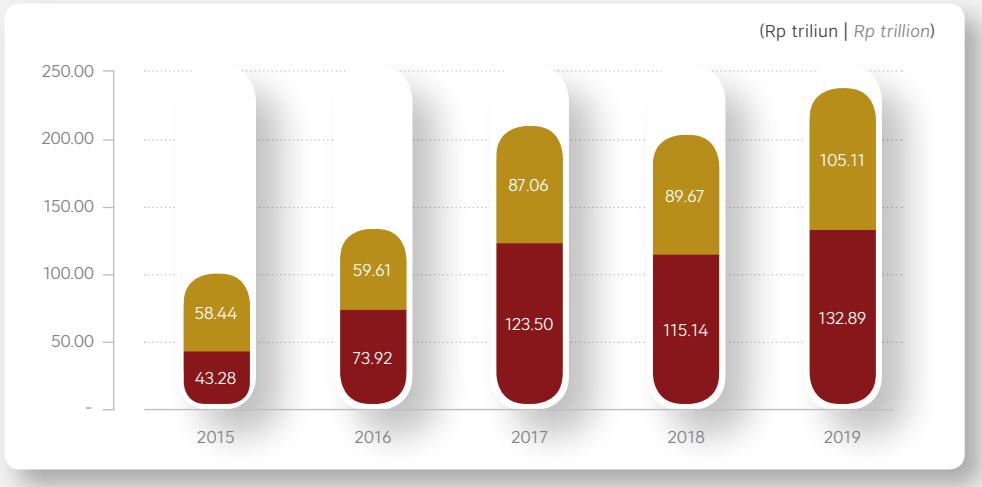

III.4.6.4 Perkembangan Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan - PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF

Kegiatan penyaluran pinjaman oleh PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF di 2019 mengalami peningkatan, tecermin dari peningkatan pinjaman sebesar 44,43% menjadi Rp22,21 triliun, yang disebabkan oleh bertambahnya sumber dana yang diperoleh dari penerbitan surat utang.

III.4.6.4 PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) or SMF

Outstanding loans disbursed by PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) or SMF increased 44.43% in 2019 to Rp22.21 trillion. This was caused by the increase in the source of funds obtained from the issuance of debt securities.

Pertumbuhan Nilai Penyaluran Pinjaman oleh SMF

Loan Growth at PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) or SMF

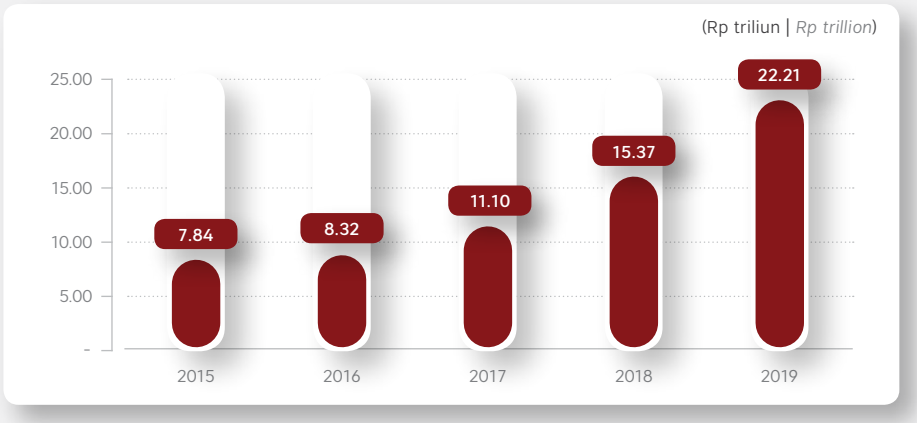

III.4.6.5 Perkembangan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)

Pada akhir periode laporan, total aset perusahaan PT. PNM (Persero) mengalami peningkatan sebesar 43,11% (*yoy*) menjadi Rp24,76 triliun. Kenaikan ini terjadi karena naiknya pinjaman yang disalurkan.

III.4.6.5 PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)

At the end of the reporting period, total assets of PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) or PNM increased 43.11% (yoy) to a level of Rp24.76 trillion. This increase occurred because of the increase in loans extended.

Perbandingan Aset PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)

Total assets of PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)

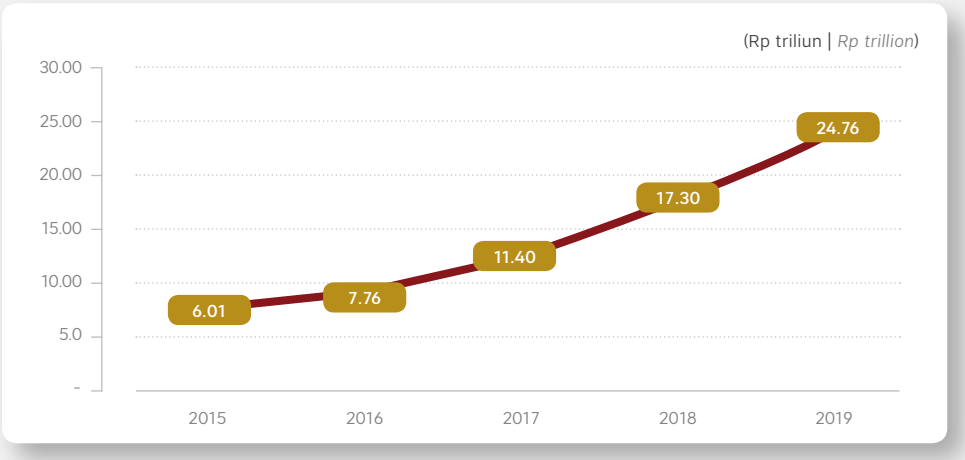

Pinjaman yang disalurkan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) meningkat sebesar 42,26% (*yoy*) menjadi Rp17,76 triliun pada 2019. Peningkatan ini terjadi karena adanya peningkatan sumber dana yang berasal dari pinjaman.

Loans disbursed by PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) increased by 42.26% (yoy) to Rp17.76 trillion in 2019. This increase was due to an increase in funding from loans.

Outstanding Pinjaman dan PT. Pembiayaan Modal PNM Persero

Outstanding Loans and Capital Financing at PT. Permodalan Nasional Madani (Persero)

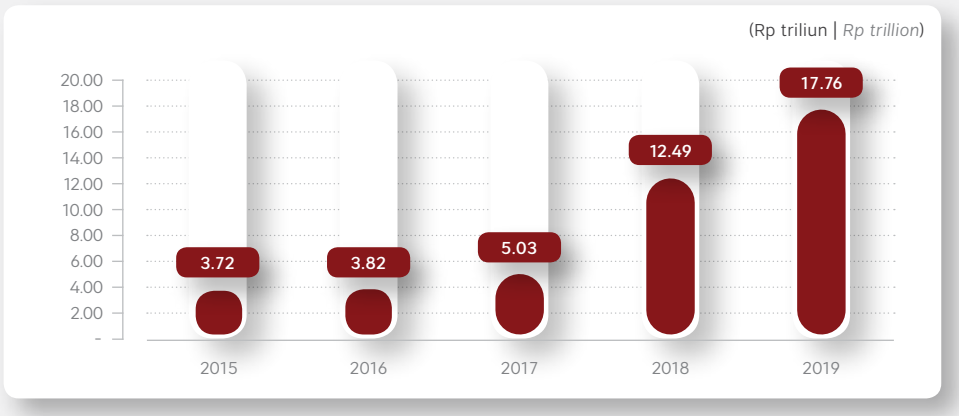

III.4.6.6 Perkembangan PT. Danareksa (Persero)

Sampai dengan akhir 2019, Aset PT. Danareksa (Persero) mengalami penurunan 26,44% (*yoy*) menjadi Rp2,42 triliun. Penurunan tersebut seiring dengan turunnya jumlah aset tetap, investasi dalam bentuk deposito, serta berkurangnya jumlah penyertaan modal akibat pelepasan dua anak usaha PT. Danareksa (Persero), yaitu PT. Danareksa Sekuritas dan PT. Danareksa Investment Management kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

III.4.6.6 PT. Danareksa (Persero)

Total assets of PT. Danareksa (Persero) experienced a 26.44% (yoy) decline in 2019 to Rp2.42 trillion. The decrease was in line with the decrease in the number of fixed assets, investment in deposits, as well as a reduction in the number of equity participation due to the release of 2 (two) subsidiaries of PT. Danareksa (Persero), namely PT. Danareksa Sekuritas and PT. Danareksa Investment Management to PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Perbandingan Aset PT. Danareksa (Persero)
Total assets of PT. Danareksa (Persero)

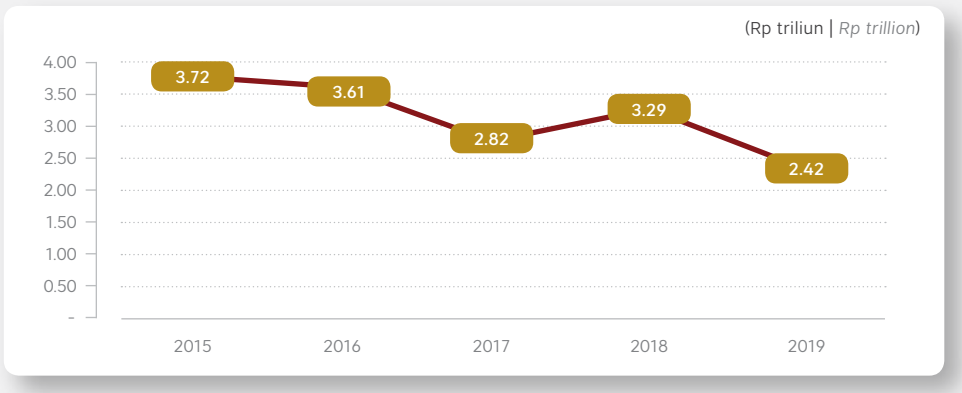

Portofolio efek PT. Danareksa (Persero) di 2019 turun 47,21% menjadi Rp0,07 triliun. Sedangkan piutang usaha turun 29,26% menjadi Rp0,25 triliun.

The securities portfolio of PT. Danareksa (Persero) shrank 47.21% in 2019 to Rp0.07 trillion, while accounts receivable declined 29.26% to Rp0.25 trillion.

Perbandingan Portofolio Efek dan Piutang Usaha Bersih PT. Danareksa (Persero)
Securities Portfolio and Net Accounts Receivable of PT. Danareksa (Persero)

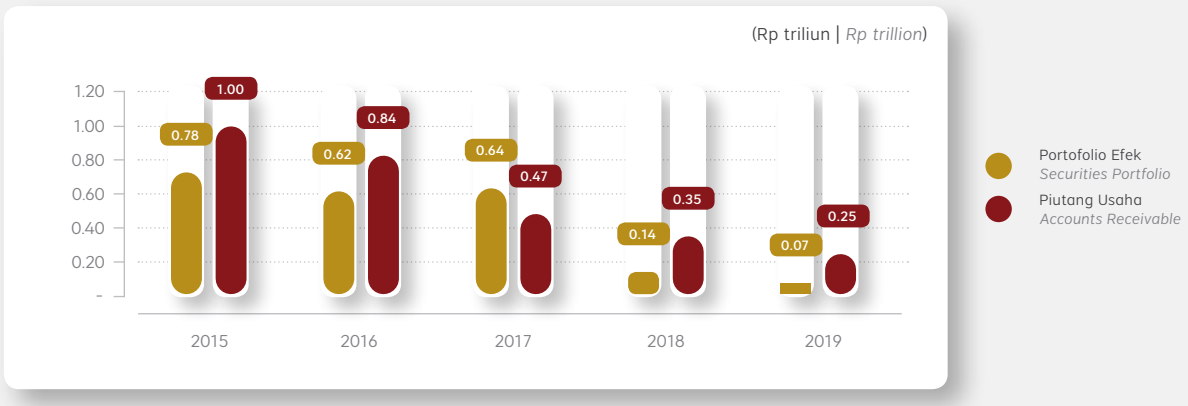

III.4.7 Perkembangan Industri Jasa Penunjang IKNB

Total aset perusahaan pialang asuransi dan pialang reasuransi mengalami peningkatan 19,54% menjadi Rp11,32 triliun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan aset tersebut dikarenakan adanya peningkatan volume bisnis. Berikut ini merupakan faktor utama peningkatan volume bisnis pada 2019:

a. pertumbuhan sektor infrastruktur selama tiga tahun terakhir dengan adanya program pemerintah terkait infrastruktur yang berdampak pada peningkatkan kebutuhan asuransi lini usaha rekayasa/*engineering*;
b. pertumbuhan sektor pertambangan sedikit mulai pulih di 2019 yang berdampak pada asuransi lini usaha pengangkutan/*cargo* dan rangka kapal/*marine hull*; dan
c. pertumbuhan sektor industri 2019 yang berdampak khususnya pada peningkatkan kebutuhan terhadap asuransi lini usaha harta benda/properti.

III.4.7 Supporting Industries for NBFI

Total assets of insurance and reinsurance brokers increased 19.54% in 2019 on the previous year to Rp11.32 trillion. The increase in assets was due to an increase in business volume. The following are the main factors in increasing business volume in 2019:

a. the growth of the infrastructure sector during the last three years with the government program related to infrastructure which has an impact on increasing the need for insurance business lines engineering/engineering;
b. the growth of the mining sector has begun to recover in 2019, which has an impact on insurance business lines for transportation/cargo and marine hull; and
c. the growth of the industrial sector in 2019 which particularly impacted on increasing the need for property/property business line insurance.

Perbandingan Aset Industri Jasa Penunjang IKNB
Asset Comparison for NBFI Supporting industries

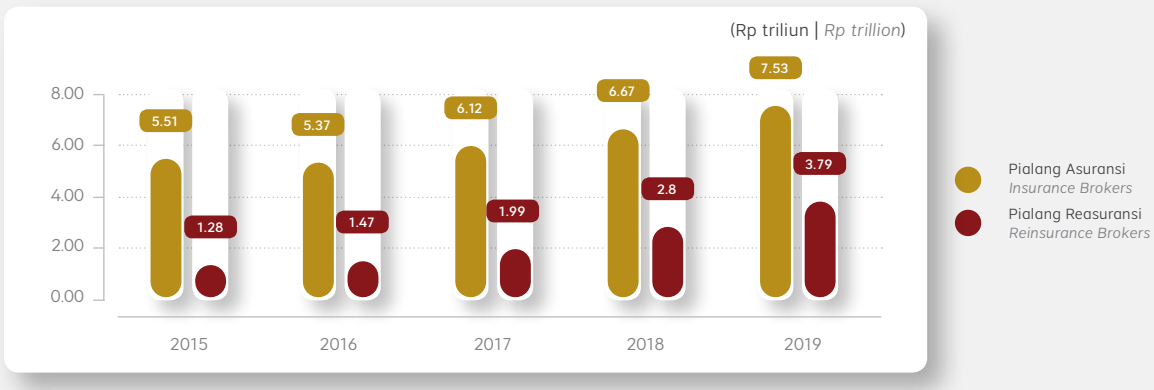

* Data Tahun 2019 berdasarkan data keuangan semester II 2019
* *Based on financial data for semester II 2019*

III.4.8 Perkembangan Industri Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

Sampai akhir 2019, total aset Lembaga Keuangan Mikro mengalami peningkatan sebesar 42,98% (*yoy*) menjadi Rp1.069,98 miliar. Peningkatan tersebut seiring dengan penambahan jumlah LKM yang terdaftar di OJK.

III.4.8 Microfinance Institutions

Total assets of microfinance institutions expanded 42.98% (yoy) in 2019 to a level of Rp1,069.98 billion in line with an increase in the number of microfinance institutions registered at OJK.

Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Lembaga Keuangan Mikro
Growth of Assets, Liabilities and Equity at Microfinance Institutions

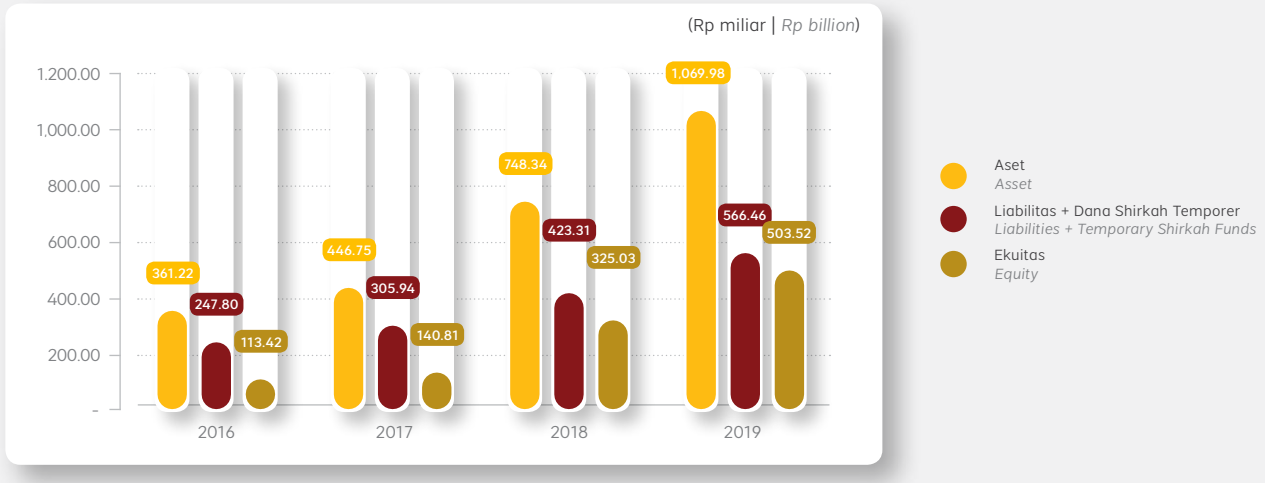

III.4.9 Perkembangan Industri Fintech *Peer To Peer lending*

Sampai dengan periode laporan, sebanyak 25 entitas mendapatkan izin dan 139 entitas terdaftar di OJK, dengan jumlah pinjaman tersalurkan sebesar Rp81,5 triliun atau naik 259,56% (*yoy*) dari periode sebelumnya sebesar Rp22,7 triliun.

III.4.9 FinTech Peer-to-Peer Lending

At the end of the reporting period, a total of 25 FinTech entities had been licensed by OJK and 139 FinTech operators were registered, with outstanding loans disbursed by FinTech totalling Rp81.5 trillion, increasing significantly by 259.56% (yoy) from Rp22.7 trillion in the previous year.

Perkembangan Industri Fintech (*Peer To Peer Lending*)
Fintech Industry Performance (Peer-to-Peer Lending)

	2016	2017	2018	2019	
Penyelenggara Terdaftar	0	29	88	164	Registered Operators
Pemberi Pinjaman	12.145	100.940	207.507	605.935	Lenders
Penerima	37.967	259.635	4.359.448	18.236.123	Borrowers
Pinjaman Tersalurkan (Rp triliun)	0,185	2,5	22,7	81,5	Disbursed Loans (Rp trillions)

III.5 PERKEMBANGAN INDUSTRI JASA KEUANGAN SYARIAH

III.5.1 Perkembangan Industri Perbankan Syariah

Perbankan Syariah memiliki ketahanan modal yang terjaga, ditunjukkan oleh rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Syariah (BUS) sebesar 20,59%. Fungsi intermediasi perbankan syariah juga berjalan baik tecermin dari pertumbuhan Pembiayaan Yang Disalurkan (PYD) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) masing-masing sebesar 10,89% (*yoy*) dan 11,93% (*yoy*), sehingga pertumbuhan aset perbankan syariah selama periode tersebut sebesar 9,93% (*yoy*).

Likuiditas perbankan syariah juga memadai, yang ditunjukkan oleh rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang terjaga pada kisaran 80-90%. Selain itu, likuiditas memadai juga ditunjukkan oleh rasio likuiditas harian, AL/NCD dan AL/DPK, yang selama 2019 selalu berada di atas *threshold* (*threshold* 50% untuk AL/NCD dan 10% untuk AL/DPK), yaitu masing-masing sebesar 102,07% dan 19,61%. Risiko kredit perbankan syariah terjaga di bawah *threshold* 5% dengan rasio NPF *Gross* sebesar 3,10%.

III.5 ISLAMIC FINANCIAL SERVICES INDUSTRY

III.5.1 Islamic Banking

The Islamic banking industry maintained solid capital resilience in 2019, as confirmed by a high Capital Adequacy Ratio (CAR) of 20.59%. Furthermore, the Islamic bank intermediation function also performed well, as reflected by 10.89% (yoy) growth of disbursed financing coupled with 11.93% (yoy) deposit growth, which was also accompanied by 9.93% (yoy) growth of total assets.

The Islamic banking industry also maintained adequate liquidity, as evidenced by a financing-to-deposit ratio (FDR) in the 80-90% range. Additionally, adequate liquidity was also confirmed by daily liquidity ratios, namely liquid assets to non-core deposits and liquid assets to deposits, which remained above the respective 50% and 10% thresholds throughout 2019 at 102.07% and 19.61% correspondingly. Finally, credit risk in the Islamic banking industry was maintained below the 5% gross NPF threshold at 3.10%.

Indikator Perbankan Syariah

Islamic Banking Indicators

Indikator	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan (yoy) 2018 Annual Growth in 2018		Pertumbuhan (yoy) 2019 Annual Growth in 2019		Indicator
					Nominal Value	%	Nominal Value	%	
BUS + UUS + BPRS									Islamic banks + Islamic Business Units + Islamic Rural Banks
Total aset Perbankan Syariah (Rp triliun)	365,66	435,02	489,69	538,32	54,67	12,57	48,63	9,93	Total Assets of Islamic banking Industry (Rp trillions)
Share Aset Perbankan Syariah (BUS+UUS+BPRS) terhadap Total Perbankan Indonesia (BUS+BUK+BPRS+BPR)	5,34	5,78	5,96	6,17		0,17		0,21	Share of Islamic Banking Industry Assets (Islamic Banks + Islamic Business Units + Islamic Rural Banks) to Total Banking Industry Assets (Conventional Islamic Banks + Conventional Commercial Banks + Islamic Rural Banks + Conventional Rural Banks)
DPK (Rp triliun)	285,16	341,71	379,96	425,29	38,26	11,20	45,33	11,93	Deposits (Rp trillions)
Pembiayaan (Rp triliun)	254,67	293,46	329,28	365,13	35,82	12,21	35,85	10,89	Financing (Rp trillions)
Jumlah NPF (Rp triliun)	0,58	11,82	9,98	11,03	-1,85	-15,61	1,05	10,55	Total NPF (Rp trillions)
Jumlah Bank									Total Banks
- BUS	13	13	14	14	1,00	7,69	0,00	0,00	Islamic Banks
- UUS	21	21	20	20	-1,00	-4,76	0,00	0,00	Islamic Business Units
- BPRS	166	167	167	164	0,00	0,00	-3,00	-1,80	Islamic Rural Banks
Jumlah Kantor	2.654	2.610	2.724	2300	114,00	4,37	-424,00	-15,57	Total Branch Offices;

Indikator	2016	2017	2018	2019	Pertumbuhan (yoy) 2018 Annual Growth in 2018		Pertumbuhan (yoy) 2019 Annual Growth in 2019		Indicator
					Nominal Value	%	Nominal Value	%	
Rasio Keuangan BUS & UUS									Financial Ratios for Islamic Banks and Islamic Business Units
NPF Gross (%)	4,16	3,87	2,85	3,10		-1,02		0,25	Gross NPF (%)
NPF Net (%)	2,07	2,13	1,74	1,89		-0,39		0,15	Nett NPF (%)
ROA (%)	0,95	1,17	1,59	1,83		0,41		0,24	ROA (%)
BOPO (%)	93,62	89,62	85,49	82,52		-4,13		-2,97	BOPO (%)
FDR (%)	88,78	85,31	86,11	85,27		0,80		-0,84	FDR (%):
BUS									Islamic Banks
Total aset BUS (Rp triliun)	254,18	288,03	316,69	350,36	28,66	9,95	33,67	10,63	Total Assets (Rp trillions)
DPK (Rp triliun)	206,41	238,22	257,61	288,98	19,38	8,14	31,37	12,18	Deposits (Rp trillions)
Pembiayaan (Rp triliun)	177,48	189,79	202,30	225,15	12,51	6,59	22,85	11,29	Financing (Rp trillions)
Jumlah NPF (Rp triliun)		9,05	6,60	7,26	-2,45	-27,09	0,67	10,09	Total NPF (Rp trillions)
CAR (%)		17,91	21,39	20,59		3,48		-0,80	CAR (%)
NPF Gross (%)		4,77	3,26	3,23		-1,50		-0,04	Gross NPF (%)
ROA (%)		0,63	1,28	1,73		0,64		0,45	ROA (%)
BOPO (%)		94,91	89,18	84,45		-5,74		-4,72	BOPO (%)
FDR (%)		79,65	78,53	77,91		-1,12		-0,62	FDR (%)
Jumlah Kantor	1.869	1.825	1.875	1919,00	50,00	2,74	44,00	2,35	Total Branches;
UUS									Islamic Business Units
Total aset UUS (Rp triliun)	102,32	136,15	160,64	174,20	24,48	17,98	13,56	8,44	Total Assets (Rp trillions)
DPK (Rp triliun)	72,93	96,49	114,22	127,58	17,73	18,37	13,36	11,70	Deposits (Rp trillions)
Pembiayaan (Rp triliun)	70,53	95,91	117,89	130,04	21,99	22,93	12,14	10,30	Financing (Rp trillions)
Jumlah NPF (Rp triliun)		2,02	2,53	3,77	0,51	25,25	1,23	48,60	Total NPF (Rp trillions)
NPF Gross (%)		2,11	2,15	2,90		0,04		0,75	Gross NPF (%)
ROA (%)		2,47	2,24	2,04		-0,23		-0,21	ROA (%)
BOPO (%)		74,15	75,38	78,01		1,23		2,63	BOPO (%)
FDR (%)		99,39	103,22	101,93		3,83		-1,29	FDR (%)
Jumlah Kantor	332	344	354	381	10,00	2,91	27,00	7,63	Total Branches;
BPRS									Islamic Rural Banks
Total aset BPRS (Rp triliun)	9,16	10,84	12,36	13,76	1,52	14,03	1,40	11,31	Total Assets (Rp trillions)
DPK (Rp triliun)	5,82	6,99	8,13	8,73	1,15	16,42	0,60	7,31	Deposits (Rp trillions)
Pembiayaan (Rp triliun)	6,66	7,76	9,08	9,94	1,32	17,01	0,86	9,42	Financing (Rp trillions)
Jumlah NPF (Rp triliun)	0,58	0,75	0,84	0,70	0,09	12,60	-0,14	-17,16	Total NPF (Rp trillions)
CAR (%)	21,73	20,81	19,33	17,99		-1,48		-1,34	CAR (%)
NPF Gross (%)	8,63	9,68	9,30	7,05		-0,38		-2,25	Gross NPF (%)
ROA (%)	2,27	2,55	1,87	2,61		-0,68		0,74	ROA (%)
BOPO (%)	87,09	85,34	87,66	84,12		2,32		-3,54	BOPO (%)
FDR (%)	114,40	111,12	111,67	113,59		0,56		1,92	FDR (%)
Jumlah Kantor	453	441	495	617	54,00	12,24	1,25	0,25	Total Branches;

Sumber : OJK, diolah
Source: OJK, processed

III.5.1.1 Aset Perbankan Syariah

Pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga (9,93%, *yoy*), dengan pangsa aset mencapai 6,17% terhadap perbankan nasional. BUS dan Unit Usaha Syariah (UUS) masing-masing mengalami pertumbuhan aset yang tertahan sebesar 10,63% (*yoy*) dan 8,44% (*yoy*). Dari total aset perbankan syariah, BUS, UUS, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) masing-masing memiliki porsi sebesar 66,07%, 32,35%, dan 2,58%.

III.5.1.1 Assets of Islamic Banking Industry

The Islamic banking industry maintained asset growth at 9.93% (yoy) in 2019, thus accounting for 6.17% of the national banking industry. Islamic banks and business units experienced more moderate growth in 2019 at 10.63% (yoy) and 8.44% (yoy) respectively. In terms of the overall Islamic banking industry, Islamic banks, Islamic business units and Islamic rural banks accounted for 66.07%, 32.35% and 2.58% shares respectively.

Tren Aset Perbankan Syariah

Islamic Bank Asset Trends

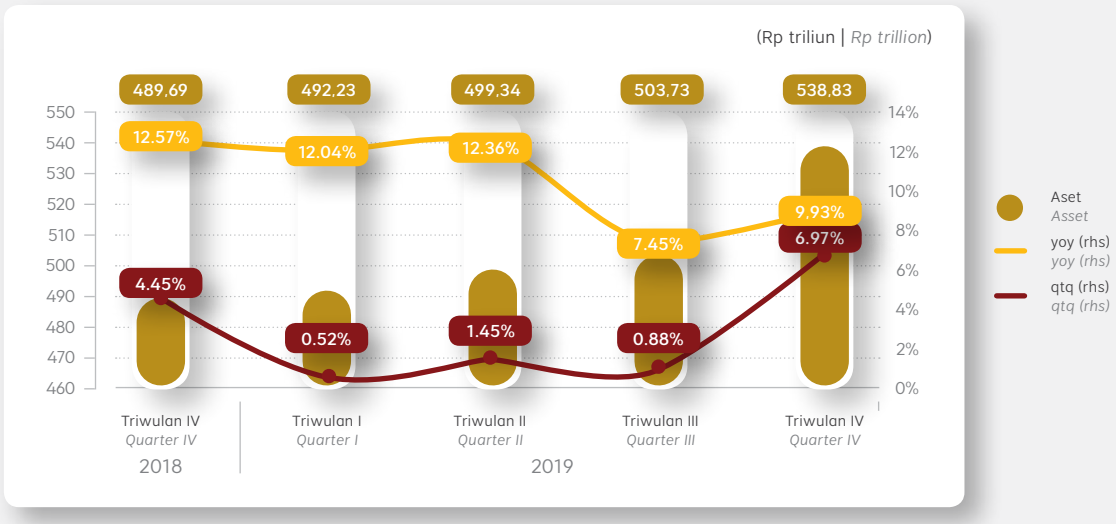

Sumber : SPS, Desember 2019

Source: Islamic banking Statistics (SPS), December 2019

III.5.1.2 Sumber Dana dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Perbankan Syariah

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan sumber dana utama bagi perbankan syariah dengan kontribusi sebesar 87,12% dari total sumber dana perbankan syariah (selain modal), diikuti oleh komponen rupa-rupa liabilitas sebesar 8,60%, surat berharga yang diterbitkan sebesar 1,87% dan liabilitas kepada bank lain sebesar 1,32% sebagaimana tercatat dalam neraca keuangan perbankan syariah tahun 2019.

III.5.1.2 Sources of Funds and Deposits of Islamic Banking Industry

Deposits continued to dominate Islamic banks' sources of funds, contributing 87.12% of the total (excluding capital), followed by miscellaneous liabilities with 8.60%, securities issued with 1.87% and obligations to other banks with 1.32% as recorded on the balance sheet of Islamic banks in 2019.

Komposisi Sumber Dana Perbankan Syariah

Composition of Funding Sources in the Islamic Banking Industry

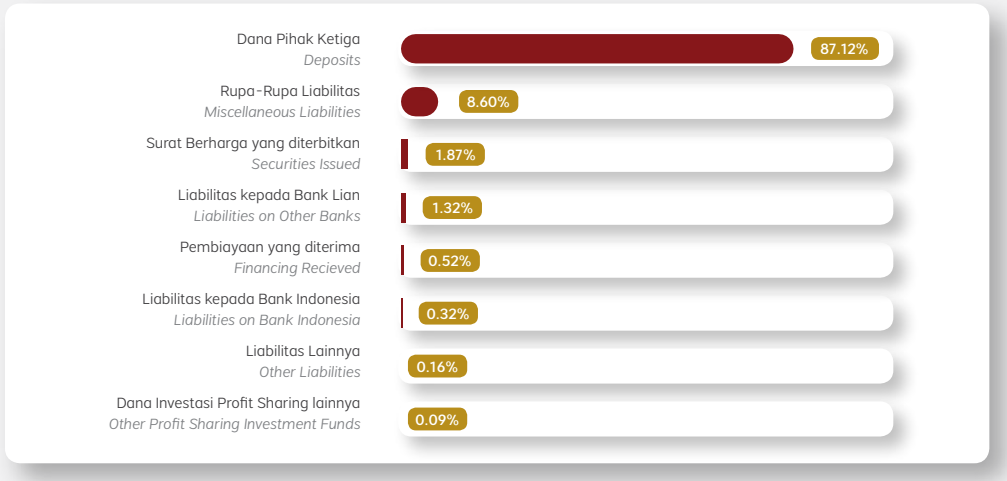

Sumber : SPS, Desember 2019

Source: Islamic banking Statistics (SPS), December 2019

Sumber dana perbankan syariah pada 2019 tumbuh sebesar 11,93% (*yoy*). Pertumbuhan DPK sangat dipengaruhi oleh Deposito yang komposisinya merupakan mayoritas dibandingkan instrumen DPK lainnya. Deposito memiliki porsi sebesar 54,36%, diikuti Tabungan yang memiliki porsi sebesar 32,09%, dan sisanya merupakan instrumen Giro yang memiliki porsi sebesar 13,55%.

Funding sources in the Islamic banking industry grew 11.93% (yoy) in 2019, driven primarily by term deposits as the dominant deposit instrument, accounting for 54.36%, followed by savings deposits with 32.09% and demand deposits with the remaining 13.55%.

Pertumbuhan DPK Bank Syariah (qtq)

Quarterly Deposit Growth in the Islamic Banking Industry

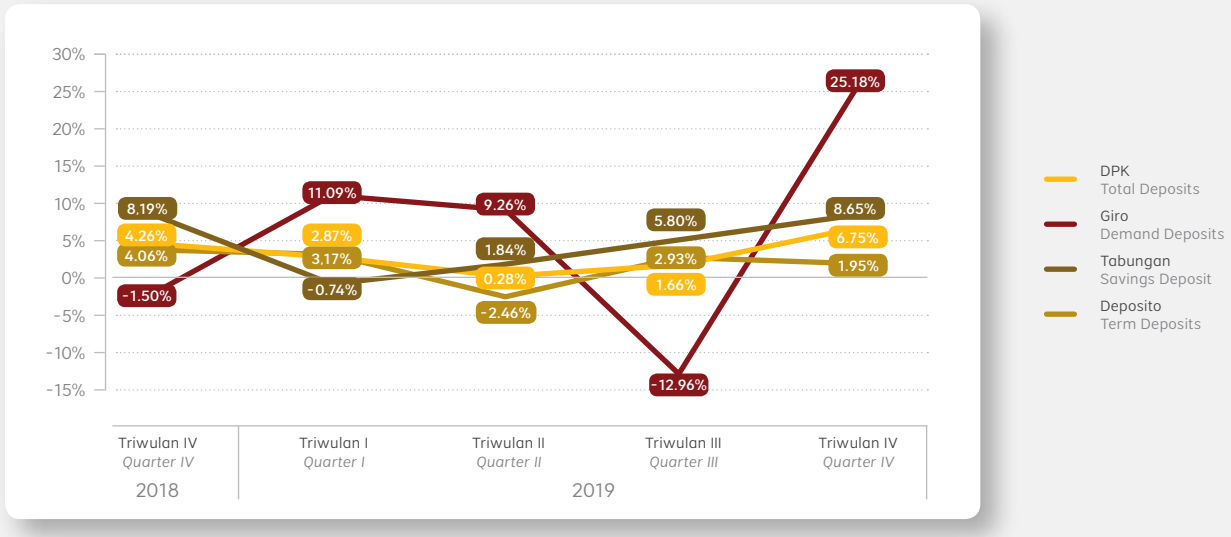

Sumber : SPS, Desember 2019

Source: Islamic banking Statistics (SPS), December 2019

Pada periode 2019, Deposito tumbuh 5,61% (*yoy*). Di sisi lain, Tabungan mengalami peningkatan secara tahunan 16,21% (*yoy*). Sementara Giro menunjukkan percepatan pertumbuhan sebesar 32,24% (*yoy*).

In 2019, the Islamic banking industry reported term deposit growth of 5.61% (yoy), with savings expanding 16.21% (yoy) and demand deposits accelerating to 32.24% (yoy).

III.5.1.3 Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) Perbankan Syariah

Penyaluran pembiayaan Bank Syariah pada 2019 tumbuh 10,90% (*yoy*), lebih rendah dibandingkan 2018 yang tumbuh sebesar 12,21% (*yoy*). Moderasi pertumbuhan ini terjadi pada jenis penggunaan Konsumsi. Pada periode laporan, pembiayaan Modal Kerja, Investasi, dan Konsumsi masing-masing menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,01% (*yoy*), 14,84% (*yoy*), dan 12,47% (*yoy*). Berdasarkan porsinya, pembiayaan Bank Syariah masih didominasi untuk konsumsi sebesar 44,27% diikuti modal kerja dan investasi yang masing-masing sebesar 31,49% dan 24,23%.

III.5.1.3 Disbursed Financing of Islamic Banking Industry

Outstanding financing disbursed by the Islamic banking industry grew 10.90% (yoy) in 2019, down from 12.21% (yoy) in 2018. Moderation was attributable to consumer financing. In the reporting period, working capital financing, investment financing and consumer financing posted 6.01% (yoy), 14.84% (yoy) and 12.47% (yoy) growth respectively, with consumer financing dominating 44.27% of the total, followed by working capital financing and investment financing with 31.49% and 24.23% respectively.

Pembiayaan Bank Syariah Berdasarkan Penggunaan

Total Financing by Segment in the Islamic Banking Industry

Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp miliar)	2018	2019	Porsi (%) Share (%)	Δ yoy (%) 2019	Outstanding Financing of Islamic Banks, Islamic Business Units and Islamic Rural Banks (Rp billions)
Modal Kerja	108.483	115.003	31,14	6,01	Working Capital Financing
Investasi	77.047	88.483	23,85	14,84	Investment Financing
Konsumsi	143.747	161.676	45,01	12,47	Consumer Financing
TOTAL	329.277	365.163	100,00	10,90	TOTAL FINANCING

Sumber : SPS, Desember 2019

Source: Islamic banking Statistics (SPS), December 2019

Pembiayaan perbankan syariah berdasarkan ekonomi ditunjukkan oleh tabel Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi, menunjukkan 55,62% PYD perbankan syariah disalurkan pada sektor lapangan usaha (produktif) yang pada 2019 meningkat sebesar Rp16,78 triliun (*yoy*) atau 9,28% (*yoy*). Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh sektor Konstruksi yang tumbuh sebesar 26,45% (*yoy*). Kontributor peningkatan pembiayaan lapangan usaha terbesar berikutnya adalah Perdagangan Besar dan Eceran yang mengalami pertumbuhan sebesar Rp1,83 triliun (10,81% *yoy*).

Outstanding financing disbursed by the Islamic banking industry based on economic sector is presented in the table on Islamic Bank Financing by Economic Sector, which shows that disbursed financing to productive sectors remained dominant at 55.62% of the total in 2019. Disbursed financing to productive sectors increased Rp16.78 trillion or 9.28% (yoy) in 2019, dominated by Construction with 26.45% (yoy), followed by Wholesale and Retail Trade with 10.81% (yoy) or Rp1.83 trillion.

Pembiayaan BUS dan UUS berdasarkan Sektor Ekonomi

Islamic Bank Financing by Economic Sector

Penyaluran Pembiayaan BUS, UUS, BPRS (Rp Miliar)	2018	2019	Porsi (%) Share (%)	Δ yoy (%) 2019	Outstanding Financing of Islamic Banks/Business Units (Rp billions)
Lapangan Usaha	180.785	197.558	54,85	9,28	Economic Sector
Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	11.497	13.717	3,81	19,30	Agriculture, Hunting and Forestry
Perikanan	1.204	1.307	0,39	8,49	Fishing
Pertambangan dan Penggalian	5.410	5.086	1,51	-5,99	Mining and Quarrying
Industri Pengolahan	24.363	26.488	7,64	8,72	Manufacturing Industry
Listrik, gas dan air	16.600	14.055	3,91	-15,33	Utilities (Electricity, Gas and Water Supply)
Konstruksi	24.648	31.167	8,99	26,45	Construction
Perdagangan Besar dan Eceran	33.166	36.752	10,34	10,81	Wholesale and Retail Trade
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	4.728	4.988	1,31	5,50	Accommodation and Food Services Activities
Transportasi, pergudangan dan komunikasi	9.374	9.925	2,88	5,88	Transportation, Storage and Communication
Perantara Keuangan	19.569	19.388	5,22	-0,93	Financial Intermediaries
Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	13.315	13.404	3,42	0,67	Real Estate, Leasing and Corporate Services
Admistrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4	18	0,00	364,45	Government Administration, Defence and Compulsory Social Security
Jasa Pendidikan	5.460	6.640	1,72	21,62	Education Services
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.788	7.269	1,82	51,81	Health and Social Services
Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya	5.353	6.036	1,59	12,77	Public, Cultural, Entertainment and Other Individual Services
Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	369	885	0,20	140,10	Individual Services Serving Households
Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	0	0,00		International Bodies and Other International Organisations
Kegiatan yang belum jelas batasannya	938	434	0,10	-53,67	Unspecified Activities
Bukan Lapangan Usaha (Rumah Tangga)	133.611	151.958	43,01	13,73	Non-Commercial Sectors (Households)
Untuk Pemilikan Rumah Tinggal	71.887	81.215	23,15	12,98	Housing Financing for a House
Untuk Pemilikan Flat atau Apartemen	2.670	3.078	0,88	15,27	Housing Financing for a Flat or Apartment
Untuk Pemilikan Ruko atau Rukan	3.272	3.515	1,03	7,41	Housing Financing for a Home Store or Home Office
Untuk Pemilikan Kendaraan Bermotor	9.919	9.386	2,52	-5,37	Automotive Financing
Untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna)	45.862	54.763	15,43	19,41	Multipurpose Financing
Bukan Lapangan Usaha Lainnya	5.797	5.665	2,14	-2,27	Other Non-Commercial Sectors
TOTAL	**320.193**	**355.182**	**100,00**	**10,93**	**Total**

Sementara itu, sektor Rumah Tangga (non-produktif) berkontribusi sebesar 42,78% pada pembiayaan BUS dan UUS. Sektor Rumah Tangga meningkat sebesar 13,73% (*yoy*). Pertumbuhan ini dikontribusikan oleh pembiayaan untuk Pemilikan Rumah Tinggal yang tumbuh sebesar 12,98% (*yoy*). Kontributor terbesar berikutnya adalah pembiayaan untuk Pemilikan Peralatan Rumah Tangga Lainnya (termasuk multiguna) yang tumbuh sebesar 19,41% (*yoy*).

Meanwhile, households (non-productive sector) contributed 42.78% of the financing disbursed by Islamic banks/business units, with growth accelerating to 13.73% (yoy) in 2019. The main driver of growth in the reporting period was housing financing for a landed house, expanding 12.98% (yoy), followed by financing to purchase other household equipment (including multipurpose financing) that grew 19.41% (yoy) in 2019.

Kualitas pembiayaan perbankan syariah cukup terjaga yang ditunjukkan oleh rasio NPF *Gross* BUS dan UUS pada tahun 2019 di bawah *threshold* 5%, yaitu sebesar 3,10%.

The Islamic banking industry maintained sound financing quality in 2019, as reflected by a gross NPF ratio of 3.10%, which is well below the 5% threshold.

Secara spasial, sebagian besar pembiayaan masih terpusat di wilayah Jawa sebesar 72,59%, khususnya DKI Jakarta (46,05%), Jawa Barat (11,37%), Jawa Timur (8,59%), dan Jawa Tengah (6,13%). Sementara provinsi di luar Pulau Jawa yang masuk 5 besar dalam hal penyaluran pembiayaan perbankan syariah adalah Nanggroe Aceh Darussalam dengan kontribusi sebesar 5,00%.

Regionally, most financing was concentrated on the island of Java, accounting for 72.59%, dominated by Jakarta (46.05%), followed by West Java (11.37%), East Java (8.59%) and Central Java (6.13%). Outside of Java, Nanggroe Aceh Darussalam (5.00%) was the fifth largest contributor to outstanding financing disbursed by the Islamic banking industry in 2019.

Pembiayaan Perbankan Syariah berdasarkan Lokasi Bank Penyalur
Financing Distribution based on Location of Lender

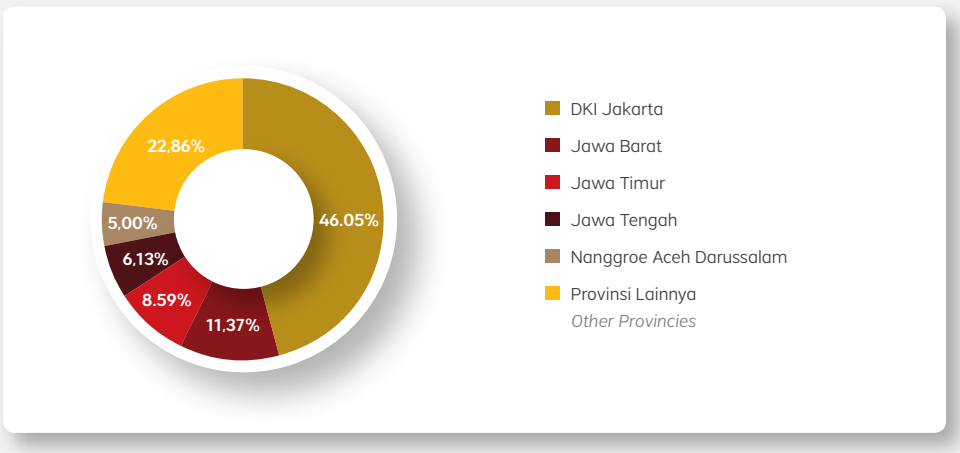

Sumber : SPS, Desember 2019
Source: Islamic banking Statistics (SPS), December 2019

III.5.1.4 Likuiditas Perbankan Syariah

Likuiditas perbankan syariah memadai. Hal ini ditunjukkan oleh rasio FDR perbankan syariah yang selalu terjaga dalam *threshold*. Pada 2019, FDR perbankan syariah mengalami penurunan sebesar 84 *bps* (*yoy*) menjadi sebesar 85,27 %. Penurunan FDR selama 2019 didorong oleh penurunan FDR BUS sebesar 62 *bps* (*yoy*) menjadi sebesar 77,91%. FDR UUS mengalami penurunan sebesar 129 *bps* (*yoy*) menjadi sebesar 101,93%. FDR BPRS mengalami peningkatan menjadi sebesar 113,59%.

Selain dilihat dari rasio FDR, indikator likuiditas harian BUS yaitu rasio Aset Likuid (AL) terhadap *Non-Core Deposit* (NCD) dan terhadap DPK juga menunjukkan likuiditas yang memadai. Rata-rata harian rasio AL/NCD selama 2019 sebesar 102,70%, menurun dibandingkan pada 2018 sebesar 131,86%. Hal yang sama juga terjadi pada rata-rata harian rasio AL/DPK yang pada 2019 sebesar 19,61%, menurun dibandingkan 2018 yang sebesar 24,30%.

III.5.1.4 Liquidity of Islamic Banking Industry

The Islamic banking industry maintained a financing-to-deposit ratio (FDR) within the threshold, thus implying adequate liquidity. In 2019, FDR was reported to decline 84bps (yoy) to a level of 85.27%, with the ratio decreasing 62bps (yoy) to 77.91% at Islamic banks and 129bps (yoy) to 101.93% at Islamic business units. In contrast, the FDR at Islamic rural banks increased to 113.59%.

In addition to the FDR ratio, other daily liquidity indicators for Islamic banks, namely liquid assets to non-core deposits and liquid assets to deposits, also revealed adequate liquidity. Liquid assets to non-core deposits stood at 102.70% in 2019, down from 131.86% in 2018. Similarly, liquid assets to deposits decreased to 19.61% from 24.30% over the same period.

Rata-Rata Indikator Likuiditas Harian BUS

Daily Liquidity Indicators for Islamic Banks

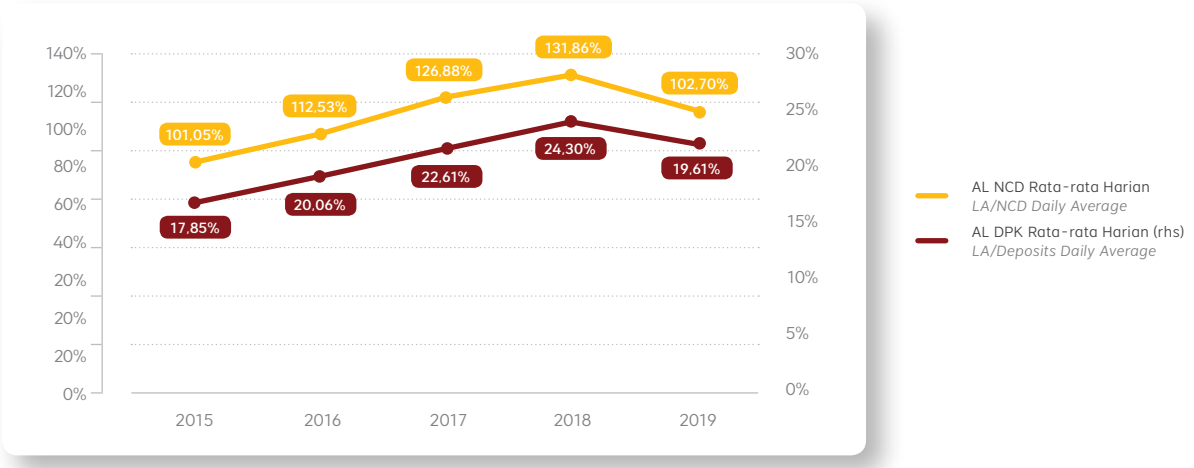

Sumber: OJK, Desember 2019
Source: Financial Services Authority (OJK), December 2019

III.5.1.5 Rentabilitas

Rentabilitas BUS dan UUS meningkat, tecermin dari rasio ROA pada 2019 sebesar 1,83%, cukup stabil jika dibandingkan 2018 sebesar 1,59%. Hal tersebut dipengaruhi oleh pembiayaan dan efisiensi bank syariah yang terjaga. Sementara itu, pada BPRS, rasio ROA mengalami peningkatan 74 *bps* (*yoy*) dari 1,87% menjadi 2,61% dari 2018.

III.5.1.5 Profitability

Profitability at Islamic banks/business units increased in 2019, as signalled by a relatively stable return on assets (ROA) of 1.83% compared with 1.59% in 2018. This was accounted for by maintained efficiency and financing in the Islamic banking industry. Meanwhile, Islamic rural banks recorded a 74bps (yoy) bump in the ROA to 2.61% from 1.87% in 2018.

Laba dan ROA Perbankan Syariah
Islamic Bank Profit and ROA

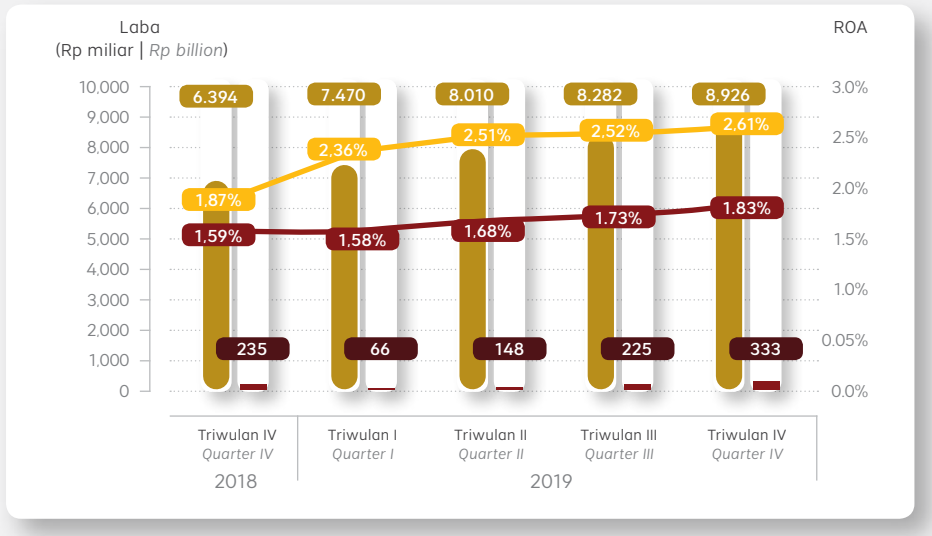

Sumber : SPS, Desember 2019
Source: Islamic Banking Statistics (SPS), December 2019

III.5.1.6 Permodalan Perbankan Syariah

Pada 2019, KPMM BUS mengalami penurunan 80 *bps* dari posisi tahun sebelumnya menjadi 20,59%. Di lain pihak, rasio KPMM pada BPRS mengalami penurunan menjadi 17,99% pada 2019.

III.5.1.6 Capital

In 2019, Islamic banks maintained a high Capital Adequacy Ratio (CAR) of 20.59%, despite decreasing 80bps on the previous year. On the other hand, the CAR of Islamic rural banks dropped to 17.99% in 2019.

III.5.2 Perkembangan Pasar Modal Syariah

Selama 2019, perkembangan produk syariah di pasar modal mengalami peningkatan, baik dari saham syariah, sukuk korporasi, maupun Reksa Dana Syariah dari sisi jumlah maupun dari sisi nilai *outstanding* atau dana kelolaan jika dibanding 2018.

III.5.2 Islamic Capital Market

In 2019, Islamic-compliant products in the capital market, namely Islamic shares, corporate sukuk and Islamic investment funds, expanded in terms of total, outstanding value and managed funds.

III.5.2.1 Perkembangan Saham Syariah

Sebagai salah satu implementasi upaya strategis pengembangan produk berbasis syariah di Pasar Modal, OJK menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) secara periodik dua kali dalam setahun dan menerbitkan DES secara insidentil di saat terdapat aksi korporasi khususnya penawaran perdana saham. Efek syariah yang termuat dalam DES periode I meliputi 408 Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya dan DES periode II meliputi 435 Saham Emiten dan Perusahaan Publik serta Efek syariah lainnya. Sejak diterbitkannya DES Periode II pada akhir 2019, terdapat penambahan 10 saham yang masuk dalam DES sehingga secara keseluruhan, saham yang termasuk dalam DES berjumlah 445 saham.

Per akhir 2019, mayoritas saham syariah berasal dari sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi (28,09%). Selanjutnya diikuti oleh sektor Properti, Real Estate & Konstruksi (15,06%), Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi (12,81%), sektor Industri Dasar dan Kimia (11,91%), dan sektor-sektor lainnya masing-masing di bawah 10%.

III.5.2.1 Islamic Shares

As part of its strategy to develop Islamic-compliant products for the capital market, OJK publishes the Islamic Securities List (DES) biannually and also incidentally when a corporation is initiating an Initial Public Offering (IPO). In period I, a total of 408 issuer and public company shares as well as other Islamic securities were contained on the periodic Islamic Securities List (DES), with 435 listed in period II. Since publication of the periodic Islamic Securities List (DES) at the end of 2019, an additional 10 shares have been included on the list, bringing the total to 445.

At the end of 2019, most Islamic shares originated from the Trade, Services and Investment sector (28.09%), followed by Property, Real Estate and Construction (15.06%), Infrastructure, Utilities and Transportation (12.81%), Basic Industries and Chemicals (11.91%) as well as various other sectors with less than 10% each.

Sektor Industri Saham Syariah di Indonesia
Islamic Shares in Indonesia by Sector

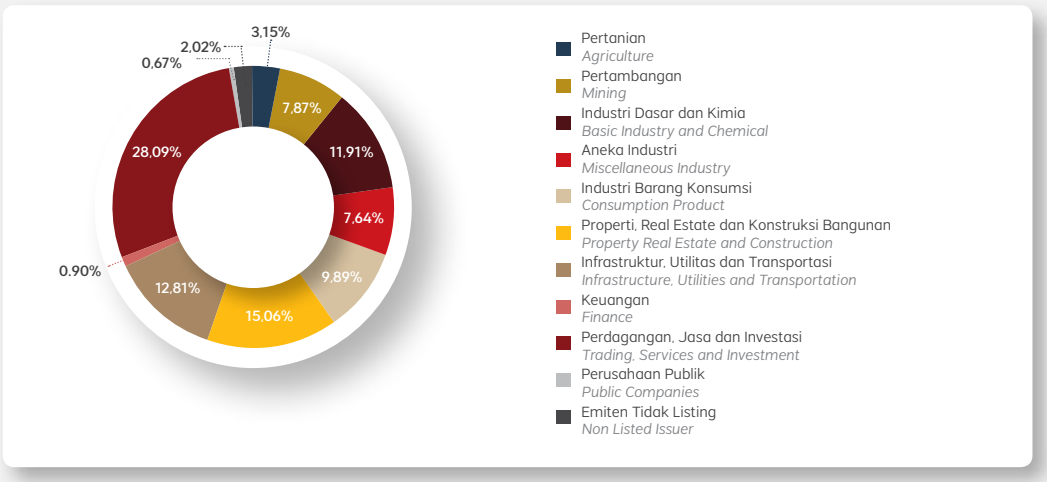

Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) ditutup pada level 187,73 atau meningkat sebesar 2,03% dibanding akhir 2018. Indeks Jakarta Islamic Index (JII) juga mengalami peningkatan sebesar 1,88% jika dibandingkan akhir 2018, yaitu dari 685,22 poin menjadi 698,09 poin. Selain itu, indeks Jakarta Islamic Index 70 (JII70) juga mengalami peningkatan sebesar 2,56% dibandingkan akhir 2018.

The Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) traded up 2.03% in 2019 to close at a level of 187.73. Furthermore, the Jakarta Islamic Index (JII) rallied 1.88% on the position at yearend in 2018 from 685.22 points to 698.09 points. Meanwhile, the Jakarta Islamic Index 70 (JII70) also charged 2.56% higher than at the end of 2018.

Perkembangan Indeks Saham Syariah

Islamic Stock Market Indexes

Tahun *Year*		Jakarta Islamic Index *Jakarta Islamic Index*	Indeks Saham Syariah Indonesia *Indonesia Sharia Stock Index*	Jakarta Islamic Index 70 *Jakarta Islamic Index 70*	Indeks Harga Saham Gabungan *Jakarta Composite Index*
2015		603,35	145,06	-	4.593,01
2016		694,13	172,08	-	5296,711
2017		759,07	189,86	-	6355,65
2018		685,22	184,00	227,55	6.194,50
2019	Triwulan I *Quarter I*	704,69	190,17	234,11	6.468,76
	Triwulan II *Quarter II*	682,65	186,01	226,08	6.358,63
	Triwulan III *Quarter III*	685,92	188,93	231,77	6.169,10
	Triwulan IV *Quarter IV*	698,09	187,73	233,38	6.299,54

Perkembangan Kapitalisasi Saham Syariah

Islamic Stock Market Capitalisation

(Rp triliun | *Rp trillion*)

Tahun *Year*		Jakarta Islamic Index *Jakarta Islamic Index*	Indeks Saham Syariah Indonesia *Indonesia Sharia Stock Index*	Jakarta Islamic Index 70 *Jakarta Islamic Index 70*	Indeks Harga Saham Gabungan *Jakarta Composite Index*
2015		1.737,29	2.600,85	-	4.872,70
2016		2.041,07	3.175,05	-	5.759,38
2017		2.288,02	3.704,54	-	7.052,39
2018		2.239,50	3.666,70	2.715,85	7.023,50
2019	Triwulan I *Quarter I*	2.302,45	3.798,99	2.794,25	7.356,38
	Triwulan II *Quarter II*	2.114,41	3.699,47	2.707,71	7.243,05
	Triwulan III *Quarter III*	2.124,18	3.794,16	2.788,41	7.090,42
	Triwulan IV *Quarter IV*	2.318,57	3.744,82	2.800,00	7.265,02

III.5.2.2 Perkembangan Sukuk Korporasi

Selama 2019, OJK menerbitkan 57 seri sukuk korporasi dengan total nilai penerbitan sebesar Rp12,12 triliun. Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 13 seri sukuk korporasi jatuh tempo dengan total nilai Rp3,59 triliun, sampai akhir Desember 2019, jumlah sukuk korporasi *outstanding* mencapai 143 seri sukuk dengan proporsi jumlah sukuk mencapai 17,59% dari 813 seri jumlah total sukuk dan obligasi korporasi yang beredar. Dari sisi nilai nominal, nilai sukuk korporasi *outstanding* mencapai Rp29,83 triliun dengan proporsi nilai sukuk dari jumlah total sukuk dan obligasi korporasi *outstanding* sebesar Rp457,02 triliun.

Secara kumulatif, sampai dengan akhir Desember 2019, total sukuk korporasi yang sudah diterbitkan di Indonesia sebanyak 232 seri dengan nilai nominal sebesar Rp48,24 triliun. Selain itu, terdapat 46 emiten yang telah menerbitkan sukuk korporasi.

III.5.2.2 Corporate Sukuk

In 2019, OJK issued 57 series of corporate sukuk with a total value of Rp12.12 trillion. During the same period, 13 series of corporate sukuk matured with a total value of Rp3.59 trillion. At the end of December 2019, therefore, total outstanding corporate sukuk stood at 143 series, accounting for 17.59% of the 813 series of outstanding corporate sukuk and bonds. The value of outstanding corporate sukuk was recorded at Rp29.83 trillion in 2019 of the Rp457.02 trillion of total outstanding corporate sukuk and bonds.

Cumulatively, at the end of December 2019, corporate sukuk issued in Indonesia totalled 232 series with a value of Rp48.24 trillion. In addition, 46 issuers have issued corporate sukuk.

Perkembangan Penerbitan Sukuk Korporasi Dan Sukuk Korporasi *Outstanding*

Corporate Sukuk Issuances and Outstanding

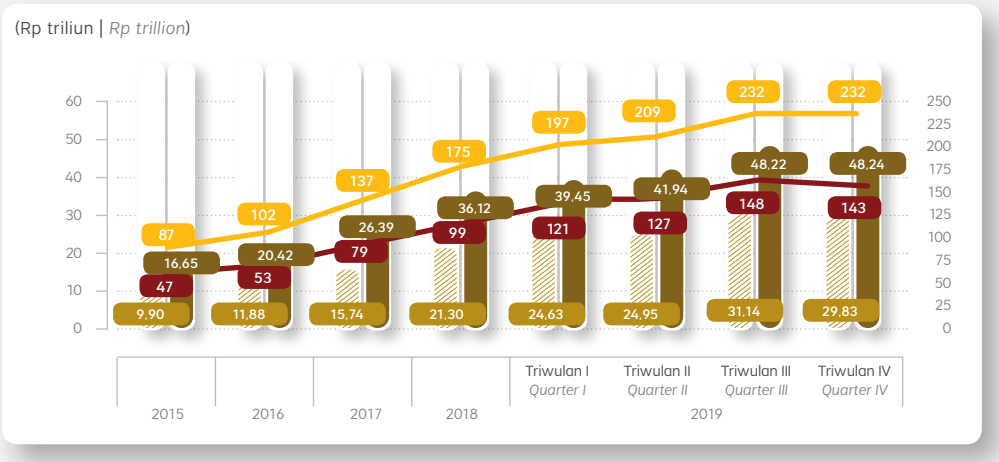

Pada umumnya di Indonesia, akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk korporasi adalah akad ijarah, mudharabah, dan akad wakalah. Dari 143 Sukuk korporasi yang *outstanding* saat ini terdapat 96 seri sukuk korporasi (67,13%) yang menggunakan akad ijarah, 41 seri sukuk korporasi (28,67%) menggunakan akad mudharabah, dan 6 seri sukuk korporasi (4,20%) menggunakan akad wakalah. Masing-masing akad tersebut mencapai nilai Rp16,62 triliun (55,71%) untuk ijarah, Rp11,76 triliun (39,43%) untuk mudharabah, dan Rp 1,45 triliun (4,86%) untuk akad wakalah.

In Indonesia, ijarah, mudharabah and wakalah contracts are used to issue corporate sukuk. Of the 143 series of corporate sukuk currently outstanding, 96 are based on ijarah contracts (67.13%), 41 on mudharabah contracts (28.67%) and six on wakalah contracts (4.20%), with respective values of Rp16.62 trillion (55.71%), Rp11.76 trillion (39.43%) and Rp1.45 trillion (4.86%).

Komposisi Jumlah Sukuk *Outstanding* Berdasarkan Jenis Akad

Composition of Total Outstanding Corporate Sukuk Contracts

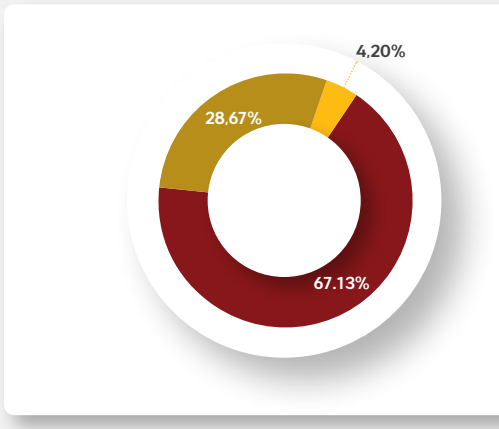

Komposisi Nilai Sukuk *Outstanding* Berdasarkan Jenis Akad

Composition of Outstanding Corporate Sukuk Value

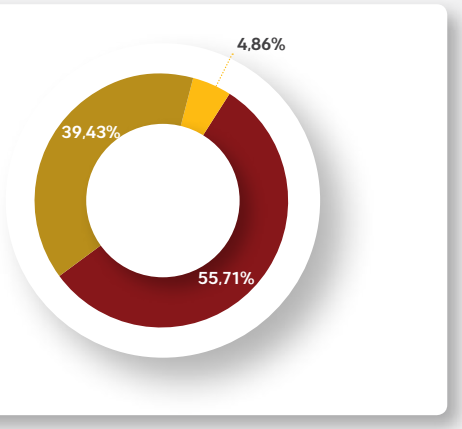

III.5.2.3 Perkembangan Reksa Dana Syariah

Selama 2019 terdapat 77 Reksa Dana Syariah efektif terbit. Sementara itu, pada periode yang sama, terdapat 36 Reksa Dana Syariah efektif bubar. Secara kumulatif sampai akhir 2019 terdapat 265 Reksa Dana Syariah beredar dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) mencapai Rp53,73 triliun.

III.5.2.3 Islamic Investment Funds

In total, 77 Islamic investment funds were issued and 36 were redeemed in 2019, bringing the cumulative total to 265 outstanding Islamic investment funds with a net asset value (NAV) of Rp53.73 trillion.

Perkembangan Reksa Dana Syariah
Islamic Investment Funds

Tahun Year	Perbandingan Jumlah Reksa Dana Total Investment Funds Outstanding				Perbandingan NAB (Rp miliar) Net Asset Value (Rp billions)			
	Reksa Dana Syariah Islamic Investment Funds	Reksa Dana Konv. Conventional Investment Funds	Reksa Dana Total Total Investment Funds	%	Reksa Dana Syariah Islamic Investment Funds	Reksa Dana Konv. Conventional Investment Funds	Reksa Dana Total Total Investment Funds	%
2015	93	998	1.091	8,52%	11.019,43	260.949,57	271.969,00	4,05%
2016	136	1.289	1.425	9,54%	14.914,63	323.835,18	338.749,81	4,40%
2017	182	1.595	1777	10,24%	28.311,77	429.194.80	457.506,57	6,19%
2018	224	1.875	2.099	10,67%	34.491,17	470.899,50	505.390,67	6,82%
2019 Triwulan I Quarter I	242	1.847	2.089	11,58%	37.114,19	478.502,93	515,617,12	7,20%
Triwulan II Quarter II	256	1.837	2.093	12,23%	33.056,75	479.528,56	512,585,31	6,45%
Triwulan III Quarter III	264	1.924	2.188	12,07%	55.543,29	485,368,79	540,912,08	10,27%
Triwulan IV Quarter IV	265	1.916	2.181	12,15%	53.735,58	488.460,78	542.196,36	9,91%

Perkembangan Jumlah dan NAB Reksa Dana Syariah
Total Islamic Investment Funds Outstanding and NAV

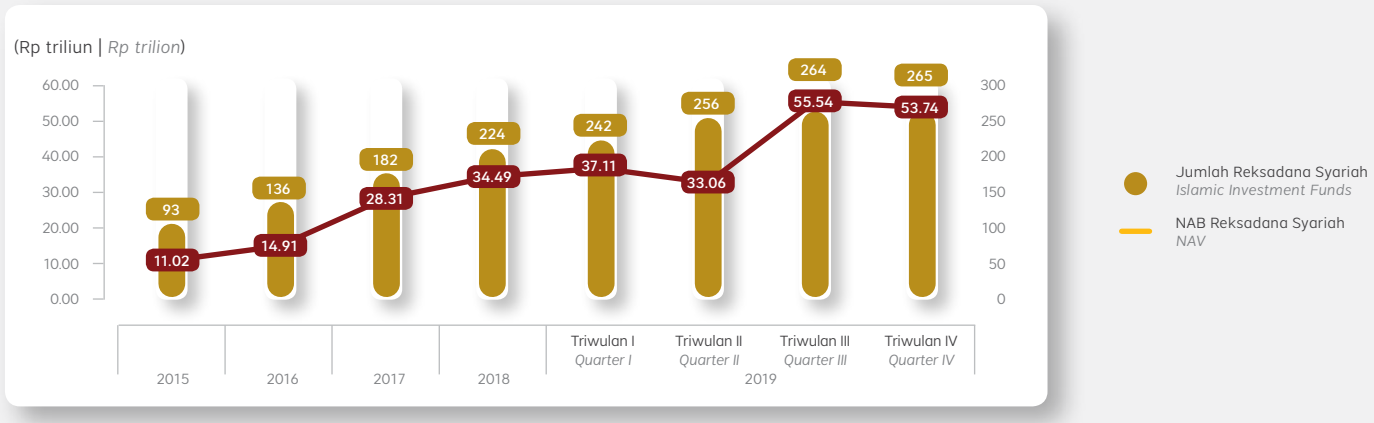

Berdasarkan jenisnya, Reksa Dana Syariah yang memiliki proporsi dari sisi NAB terbesar pada akhir 2019 yakni Reksa Dana Syariah Terproteksi sebesar 45,67%, diikuti dengan Reksa Dana Syariah berbasis Efek Luar Negeri sebesar 13,54%, dan Reksa Dana Syariah Pasar Uang sebesar 11,66%.1

As of yearend 2019, protected funds dominated Islamic investment funds in terms of net asset value, accounting for 45.67%, followed by international funds (13.54%) and money market funds (11.66%).

Reksa Dana Syariah Berdasarkan Jumlah
Composition of Islamic Investment Funds by Number

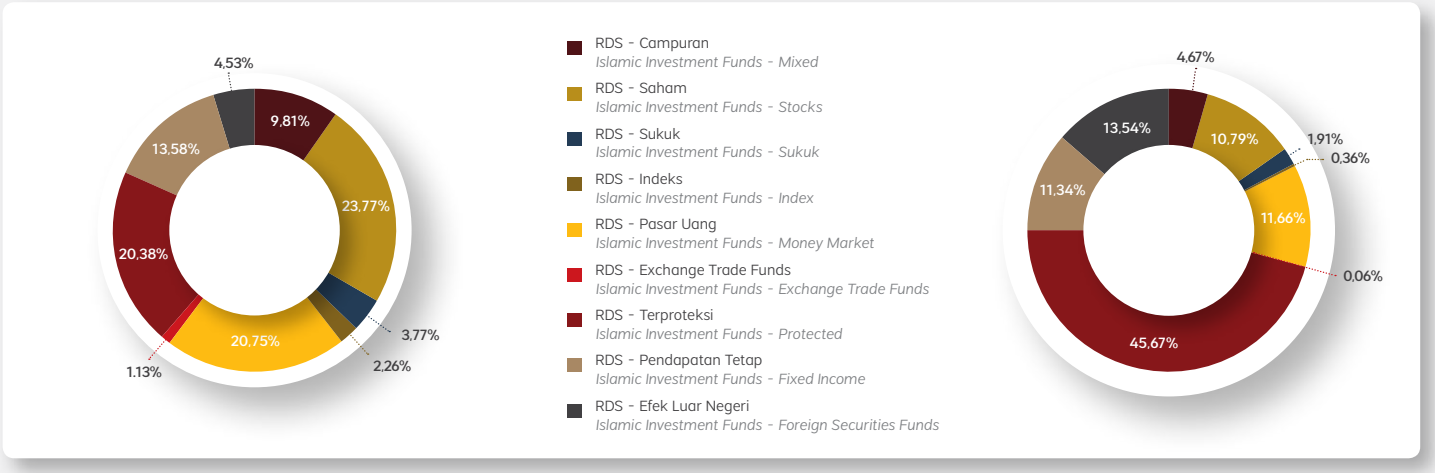

Reksa Dana Syariah Berdasarkan Proporsi NAB
Composition of Islamic Investment Funds by NAV

III.5.2.4 Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara yang Diperdagangkan

Sampai dengan akhir 2019, jumlah keseluruhan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang *outstanding* sebanyak 67 seri, meningkat 3,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, dari nilai sukuk negara *outstanding* terjadi peningkatan sebesar 14,82% *yoy* menjadi sebesar Rp 740,62 triliun.

III.5.2.4 Tradeable Government Islamic Securities

At the end of 2019, outstanding tradeable Government Islamic Securities (SBSN) totalled 67 series, up 3.08% on the previous year. In addition, the value of outstanding government sukuk increased 14.82% (yoy) in the reporting period to Rp740.62 trillion.

Perkembangan Sukuk Negara *Outstanding*

Outstanding Government Sukuk

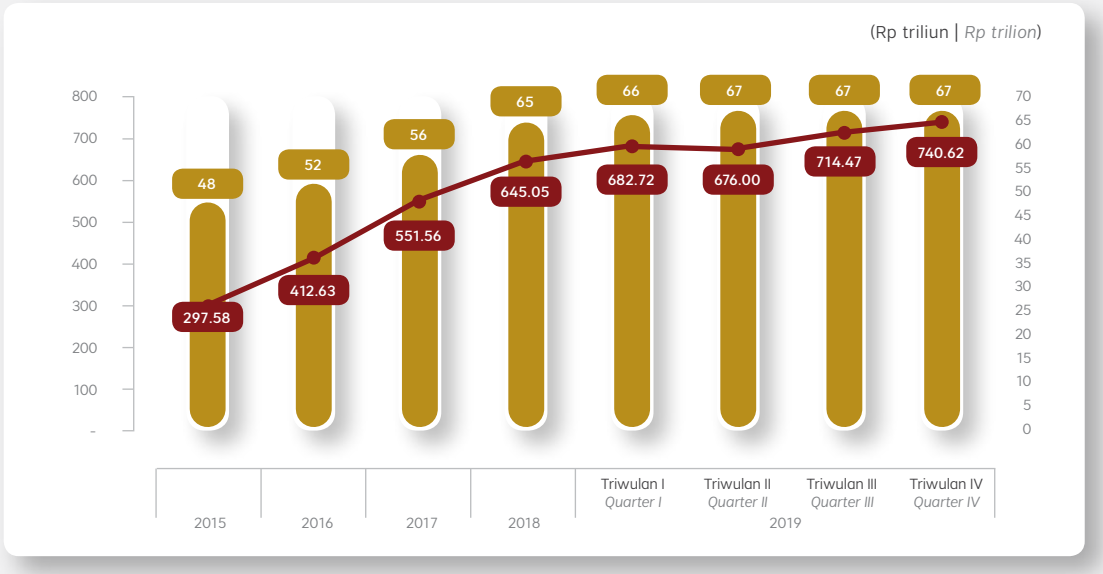

III.5.2.5 Perkembangan Jasa Syariah di Pasar Modal

Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal memerlukan jasa dari para pihak yang mempunyai pengalaman dan kompetensi yang cukup dari sisi penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam penerbitan Efek tersebut. Para pihak tersebut antara lain meliputi Penjamin Emisi Efek, Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Wali Amanat. Sampai dengan dengan akhir 2019, para pihak yang terlibat atau telah mempunyai jasa layanan syariah meliputi:

a. 56 Manajer Investasi yang memiliki Unit Pengelolaan Investasi Syariah (UPIS)
b. 1 Manajer Investasi Syariah.
c. 28 Penjamin Emisi Efek yang turut serta sebagai penjamin Emisi dalam penerbitan Sukuk Korporasi.
d. 13 Pihak Penerbit DES.
e. 15 Bank Kustodian yang mengelola Reksa Dana Syariah
f. 15 Perusahaan Efek yang telah mengembangkan dan melaksanakan perdagangan online saham berdasarkan prinsip syariah (sistem *online trading* syariah)
g. 8 Wali Amanat yang telah terlibat dalam perwaliamanatan penerbitan Sukuk Korporasi
h. 115 Ahli Syariah Pasar Modal

III.5.2.5 Islamic Capital Market Services

Issuing Islamic securities in the capital market requires services from third parties with sufficient experience and competence in the application of Islamic principles. Such parties include Underwriters, Investment Managers, Custodian Banks and Trust Agents. At the end of 2019, the following parties were providing Islamic capital market services:

a. 56 investment managers with an Islamic Investment Management Unit (UPIS);
b. One Islamic investment manager;
c. 28 underwriters for issuers of corporate sukuk;
d. 13 issuers of the Islamic Securities List (DES);
e. 15 custodian banks to manage Islamic investment funds;
f. 15 securities companies developing and executing Islamic-compliant online trading (Islamic online trading system);
g. eight trust agents representing issuers of corporate sukuk; and
h. 115 Islamic capital market experts.

III.5.3 Perkembangan IKNB Syariah

Sampai dengan 2019, terdapat 12 jenis industri Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) syariah dengan jumlah entitas 209 perusahaan dengan total aset sebesar Rp105,612 triliun. Aset tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,85% (*yoy*) dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan total aset tersebut berasal dari sektor pergadaian syariah, asuransi jiwa syariah, dan USS perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah. Dari sektor pergadaian syariah, peningkatan total aset perusahaan pergadaian syariah tercatat sebesar Rp3,489 triliun. Peningkatan tersebut disebabkan adanya peningkatan pinjaman yang diberikan kepada nasabah (terutama yang berasal dari produk Rahn unit usaha syariah PT. Pegadaian (Persero).

Selain itu, peningkatan total aset perusahaan asuransi jiwa syariah sebesar Rp3,013 triliun disebabkan adanya peningkatan penjualan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI), Reksa Dana Syariah, deposito, saham, dan Surat Berharga Negara maupun IHSG.

Sedangkan peningkatan dari USS perusahaan pembiayaan infrastruktur disebabkan adanya peningkatan pembiayaan musyarakah dan sukuk mudharabah.

III.5.3 Islamic Nonbank Financial Industry

Twelve types of Islamic nonbank financial services institutions were operating in Indonesia in 2019, totalling 209 business entities, with total assets Rp105.612 trillion. The assets increased by 8.85% yoy compared to the previous year.

The main contributors to the increase in total assets were Islamic pawnbrokers, Islamic life insurance and the Islamic business units of infrastructure finance companies. In terms of Islamic pawnbrokers, total assets increased by Rp3,489 trillion in 2019 on a surge of financing disbursed to customers, most of which originated from the Rahn financing product offered by PT. Pegadaian (Persero).

In addition, total assets in the Islamic life insurance industry increased Rp3.013 trillion in 2019, induced by sales of investment-based insurance products (PAYDI), Islamic investment funds, term deposits, shares as well as tradeable government securities (SBN) and JCI.

Meanwhile, musyarakah financing and mudharabah sukuk were the main contributors to the increase in total assets recorded by the Islamic business units of infrastructure finance companies.

Perkembangan Total Aset IKNB Syariah

Assets of the Islamic Nonbank Financial Industry

(Rp miliar | *Rp billions*)

Jenis Industri Industry	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Perasuransian Syariah Islamic Insurance Industry						
a. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Islamic Life Insurance Industry	18.052	21.614	27.079	33.484	34.474	37.487
b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah Islamic General Insurance Industry	3.317	3.786	4.797	5.370	5.621	5.903
c. Perusahaan Reasuransi Syariah Islamic Reinsurance Industry	1.003	1.119	1.368	1.666	1.864	2.063
Lembaga Pembiayaan Syariah Islamic Finance Industry						
a. Perusahaan Pembiayaan Syariah Islamic Finance Companies	23.768	22.350	35.741	32.257	22.179	20.016
b. Perusahaan Modal Ventura Syariah Islamic Venture Capital Firms	384	481	1.092	1.109	1.233	2.734
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (UUS) Islamic Infrastructure Finance Business Units	-	-	105	1.111	2.301	4.446
Dana Pensiun Syariah Islamic Pension Funds	-	-	-	1.296	3.388	3.973
Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus Specialised Islamic Financial Services Institutions						
a. Perusahaan Penjaminan Syariah Islamic Guarantee Companies	377	618	742	1.072	1.376	2.225
b. Perusahaan Pergadaian Syariah Islamic Pawnbrokers	-	-	4.572	5.222	7.764	11.253
c. Eximbank (UUS) Indonesia Eximbank (Islamic Business Unit)	8.180	11.137	13.115	16.447	14.660	13.383
d. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (UUS) Secondary Housing Finance Company (Islamic Business Unit)	-	-	-	-	1.914	1.676
Lembaga Keuangan Mikro Syariah Islamic Microfinance Institution	-	27	83	100	247	403
Finansial Teknologi Financial Technology	-	-	-	-	-	51
Jumlah **Total**	**55.081**	**61.132**	**88.694**	**99.134**	**97.021**	**105.612**

Perkembangan Jumlah Pelaku IKNB Syariah

Total Business Entities in the Islamic Nonbank Financial Industry

Jenis Industri Industry	2015		2016		2017		2018		2019	
	Full-fledged Full-fledged	UUS Islamic Unit	Full-fledged Full-fledged	UUS Islamic Unit	Full-fledged Full-fledged	UUS Islamic Unit	Full-fledged Full-fledged	UUS Islamic Unit	Full-fledged Full-fledged	UUS Islamic Unit
Perasuransian Syariah Islamic Insurance Industry										
Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah Islamic Life Insurance Industry	5	19	6	21	7	23	7	23	7	23
Perusahaan Asuransi Umum Syariah Islamic General Insurance Industry	3	25	4	24	5	25	5	24	5	24
Perusahaan Reasuransi Syariah Islamic Reinsurance Industry	-	3	1	2	1	2	1	2	1	2
Lembaga Pembiayaan Syariah Islamic Finance Industry										
Perusahaan Pembiayaan Syariah Islamic Finance Companies	3	37	3	38	3	34	3	32	5	29
Perusahaan Modal Ventura Syariah Islamic Venture Capital Firms	4	2	4	3	4	3	4	4	4	2
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur Syariah (UUS) Islamic Infrastructure Finance Business Units	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1
Dana Pensiun Syariah Islamic Pension Funds	-	-	1	-	1	2	2	2	3	3
Lembaga Jasa Keuangan Syariah Khusus Specialised Islamic Financial Services Institutions										
Perusahaan Penjaminan Syariah Islamic Guarantee Companies	2	1	2	2	2	4	2	4	2	5
Perusahaan Pergadaian Syariah Islamic Pawnbrokers	-	1	-	1	2	1	6	1	3	1
Eximbank (UUS) Indonesia Eximbank (Islamic Business Unit)	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1
Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (UUS) Secondary Housing Finance Company (Islamic Business Unit)	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
Lembaga Keuangan Mikro Syariah Islamic Microfinance Institution	5	-	14	-	29	-	56	-	75	-
Finansial Teknologi Financial Technology	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
Jumlah **Total**	**22**	**89**	**35**	**93**	**54**	**96**	**86**	**95**	**117**	**92**

04

Tata Kelola dan Manajemen Strategis

Governance and Strategic Management

OJK senantiasa melakukan penguatan diberbagai aspek internal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan Undang-Undang. Pada 2019, beberapa langkah strategis melalui sinergi bersama pemangku kepentingan dilakukan untuk penguatan infrastruktur pendukung, antara lain penyediaan gedung kantor pusat yang memanfaatkan aset milik pemerintah dan integrasi sistem informasi lintas Lembaga dalam rangka penguatan pengawasan.

Salah satu aspek yang secara konsisten dilakukan adalah penguatan SDM, dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing pegawai khususnya peningkatan kualitas tenaga pengawas melalui berbagai program dan pelatihan yang relevan dengan perkembangan dan standar terbaru.

OJK continually strengthens various internal aspects to support task and function implementation. In 2019, OJK undertook several strategic measures in synergy with various stakeholders to strengthen supporting infrastructure, including utilising state property to secure a head office building as well as integrating the information systems across institutions to bolster supervision.

Furthermore, OJK consistently raises the competencies and competitiveness of its employees, supervisors in particular, through various programs and training based on current competencies and the latest standards.



IV.1 DEWAN KOMISIONER

IV.1.1 Anggota Dewan Komisioner

Sebagaimana tercantum dalam UU OJK, Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi OJK yang bersifat kolektif kolegial, yaitu setiap Anggota Dewan Komisioner (ADK) memiliki hak suara yang sama. Dalam rangka mendukung koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan Sektor Jasa Keuangan (SJK), komposisi ADK didukung oleh ADK *Ex-Officio* yang berasal dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan. Pada 2019 terdapat penggantian ADK *Ex-Officio*. Dody Budi Waluyo ditunjuk sebagai ADK *Ex-Officio* Bank Indonesia ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 82/P 2019, menggantikan Mirza Adityaswara. Adapun penggantian ADK *Ex-Officio* Kementerian Keuangan ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 142/P tahun 2019 yang menunjuk Suahasil Nazara menggantikan Mardiasmo.

Dengan penggantian tersebut, susunan ADK OJK saat ini adalah sebagai berikut:

a. Wimboh Santoso sebagai Ketua merangkap anggota;
b. Nurhaida sebagai Wakil Ketua merangkap anggota dan Ketua Komite Etik;
c. Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
d. Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
e. Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
f. Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
g. Tirta Segara sebagai anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
h. Dody Budi Waluyo sebagai anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia; dan
i. Suahasil Nazara sebagai anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan.

IV.1.2 Rapat Dewan Komisioner (RDK)

Rapat Dewan Komisioner (RDK) merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi untuk menetapkan atau melakukan evaluasi kebijakan OJK yang bersifat strategis, dan/atau menerima laporan atas kebijakan yang wajib diketahui sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dewan Komisioner melaksanakan RDK secara berkala sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 UU OJK.

Selama 2019, terdapat 59 kali penyelenggaraan RDK yang terdiri dari RDK pengambilan keputusan sebanyak 150 materi (69%) dan RDK Laporan sebanyak 68 materi (31%). Materi yang disampaikan dalam RDK di antaranya terkait dengan fungsi dan tugas OJK sebagaimana UU OJK, yaitu melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di SJK, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

IV.1 BOARD OF COMMISSIONERS

IV.1.1 Members of the Board of Commissioners

In accordance with the OJK Act, the collective collegial Board of Commissioners is the highest leadership forum of OJK, where each respective member of the board has the same voting rights. To support coordination, cooperation and policy harmonisation, the composition of the Board of Commissioners is supported by Ex-officio members from Bank Indonesia and the Ministry of Finance. In 2019, the Ex-officio members of the OJK Board of Commissioners were replaced. Dody Budi Waluyo was appointed the Ex-officio member from Bank Indonesia in accordance with Presidential Decree No. 82/P of 2019, replacing Mirza Adityaswara. Meanwhile, Suahasil Nazara was installed as the Ex-officio member from the Ministry of Finance in accordance with Presidential Decree No. 82/P of 2019, replacing Mardiasmo.

Consequently, the current the OJK Board of Commissioners is composed as follows:

a. Wimboh Santoso as Chairman and member of the Board;
b. Nurhaida as Vice Chairman, member of the Board and Chairman of the Ethics Committee;
c. Heru Kristiyana as member of the Board and Executive Head of Banking Supervision;
d. Hoesen as member of the Board and Executive Head of Capital Market Supervision;
e. Riswinandi as member of the Board and Executive Head of Nonbank Financial Institution Supervision;
f. Ahmad Hidayat as member of the Board and Chairman of the Audit Board;
g. Tirta Segara as member of the Board and Commissioner in Charge of Consumer Education and Protection;
h. Dody Budi Waluyo as Ex-Officio member of the Board from Bank Indonesia; and
i. Suahasil Nazara as Ex-Officio member of the Board from the Ministry of Finance.

IV.1.2 Board of Commissioners Meeting

The Board of Commissioners Meeting is the highest decision-making forum at OJK to determine and evaluate strategic policies, and/or updating the current status or progress to the Board on existing policies in line with prevailing regulations. The Board of Commissioners holds regular meetings as mandated by Article 24 of the OJK Act.

A total of 59 BOC meetings were held in 2019, consist of 150 topics (69%) Board of Commissioners Meeting for Decision Making Process and 68 topics (31%) Board of Commissioners Meeting for Update Report. The materials presented at the meetings encompasses OJK's function and duties as mandated by the OJK Act, namely to regulate and supervise financial services activity in the financial services sector, while protecting the interests of consumers and the public.

Substansi Materi RDK Pengambilan Keputusan

Substance of the Board of Commissioners Decision-Making Meetings

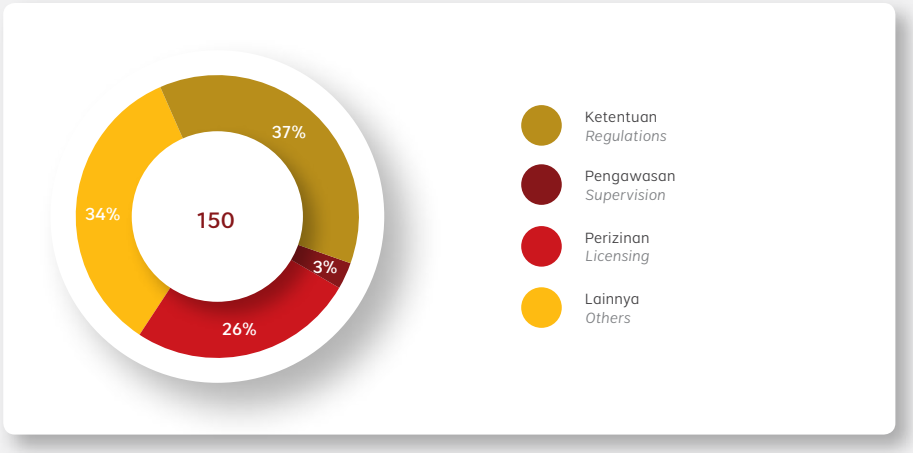

Pada RDK pengambilan keputusan, sebanyak 55 materi (37%) merupakan pembahasan terkait dengan ketentuan OJK yang mengatur industri Perbankan, Pasar Modal, dan IKNB. Sepanjang 2019 telah diterbitkan 122 ketentuan yang terdiri dari 44 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 31 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, 9 Peraturan Dewan Komisioner, dan 38 Surat Edaran Dewan Komisioner. Topik pembahasan perizinan sebanyak 39 materi (26%), yang membahas tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pengurus pada Industri Jasa Keuangan (IJK). Adapun topik pembahasan RDK mengenai pengawasan sebanyak 5 materi (3%). Selain itu, terdapat juga pembahasan topik lainnya sebanyak 51 materi (34%) yang membahas mengenai kebijakan strategis internal OJK.

In terms of Board of Commissioners Meeting for Decision Making Process, 55 topics (37%) were discussed in 2019 concerning regulation of the banking industry, capital market and nonbank financial industry. Furthermore, 122 regulations were issued in 2019, consisting of 44 OJK regulations (POJK), 9 BOC regulations and 38 BOC Circulars. Licensing featured as a discussion topic 39 times (26%) concerning the results of Fit and Proper Tests for candidate leaders of the financial services industry. Supervision was discussed as a topic five times (3%), while other topics were raised 51 times (34%) regarding the internal policy strategy.

Pada materi RDK Laporan, sebanyak 51 materi (75%) merupakan laporan *surveillance* terhadap kondisi perekonomian dan perkembangan terkini IJK, yang disampaikan dalam Laporan *Market Update*. Selain itu, terdapat 17 materi laporan lainnya (25%) dengan substansi pembahasan yang bervariasi dan memerlukan arahan ADK, misalnya laporan tindak lanjut pengawasan oleh OJK terhadap IJK, dan laporan hasil Survei Nasional Literasi Keuangan 2019.

In terms of Board of Commissioners Meeting for Update Report, 51 (75%) were surveillance reports concerning the latest economic conditions and developments in the financial services industry, delivered as a Market Update. In addition, 17 other reports (25%) were also submitted with various topics for discussion and guidance required by members of the Board of Commissioners, for instance follow-up supervisory actions by OJK regarding the financial services industry as well as the report of the National Financial Literacy Survey 2019.

IV.1.3 *Board Seminar* (BS)

Selain RDK, terdapat forum *Board Seminar* (BS) yang ditujukan untuk pendalaman dan pematangan materi RDK. Selama 2019, telah diselenggarakan 41 kali BS dengan sebagian besar topik pembahasan mengenai Ketentuan OJK yaitu sebanyak 42 materi (55%). Pembahasan mengenai ketentuan dalam BS bertujuan untuk mendapatkan arahan dan pandangan dari ADK dan satuan kerja terkait lainnya, sebelum peraturan tersebut diputuskan dalam RDK. Topik pembahasan lainnya yaitu mengenai pengawasan sebanyak 10 materi (13%) yang membahas mengenai kewenangan OJK dalam melakukan pengawasan IJK, dan 4 materi (5%) pembahasan terkait kerja sama kelembagaan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi OJK. Selain itu, terdapat juga pembahasan topik lainnya sebanyak 21 materi (27%) yang membahas mengenai kebijakan strategis internal OJK, serta kajian dan riset IJK.

IV.1.3 Board Seminar

Substansi Materi *Board Seminar*
Substance of the Board Seminar

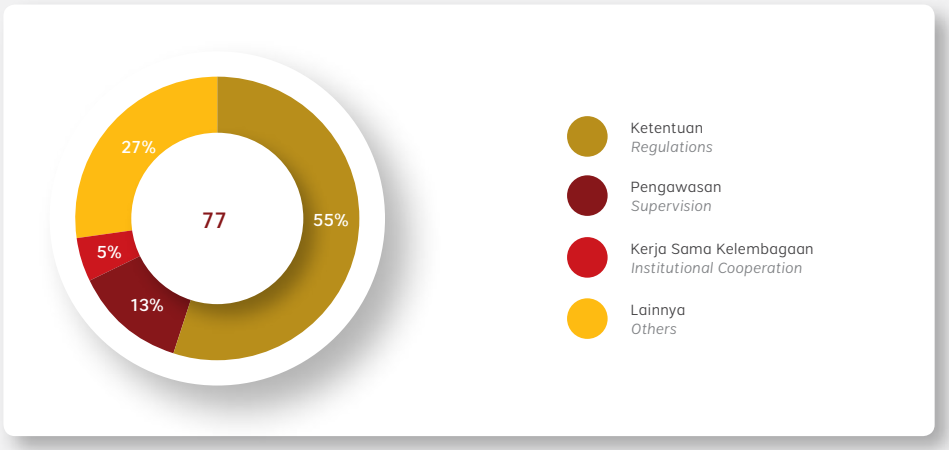

In addition to the regular Board of Commissioners meeting, the Board of Commissioners also hosts a Board Seminar (BS) to develop and explore the materials for the Board of Commissioners meeting. In 2019, Board Seminars were held 41 times, with discussions on regulatory matters dominating 55% of the topics. Regulatory materials are discussed at the Board Seminar in order to formulate the board's perspective and to receive inputs from the respective members and work units before a decision is taken at the Board of Commissioners meeting. Other discussion topics included supervision (13%), to discuss OJK's authority in terms of supervising the financial services industry, and institutional cooperation (5%), to support task and function implementation at OJK. A further 21 topics were discussed (27%) in 2019 regarding internal strategic policies as well as studies and research into the financial services industry.

IV.2 KOMITE-KOMITE OJK

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan efektivitas, konsistensi, transparansi dan efisiensi proses pengambilan keputusan, Dewan Komisioner didukung oleh rekomendasi yang memetakan isu lintas bidang di OJK dan masukan eksternal. Menindaklanjuti hal tersebut, OJK membentuk organ khusus yang disebut Komite. Tujuan pembentukan Komite adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses pengambilan keputusan; meningkatkan kualitas keputusan; dan
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisioner atas materi yang bersifat kebijakan strategis maupun bersifat kebijakan operasional.

IV.2 OJK COMMITTEES

Seeking to create and maintain an effective, consistent, transparent and efficient decision-making process, the Board of Commissioners is supported by recommendations that map issues across different areas of OJK and external inputs. OJK has formed special organs known as Committees, the goals of which are as follows:

1. *Increase accountability and transparency in the decision-making process; improve decision quality; and*
2. *Provide recommendations to the Board of Commissioners concerning the strategic policies or operational policies.*

OJK memiliki delapan komite yaitu yaitu:
a) Komite Etik;
b) Komite Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi, dan Remunerasi;
c) Komite Manajemen Risiko;
d) Komite Manajemen Strategi, Anggaran, dan Kinerja;
e) Komite Pengawasan Terintegrasi Berdasarkan Risiko Terhadap Konglomerasi Keuangan;
f) Komite Penyesuaian Kewajiban Pembayaran Pungutan;
g) Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah; dan
h) Komite Teknologi Informasi.

IV.3 KODE ETIK

Kode Etik OJK adalah norma dan asas mengenai kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam pelaksanaan tugas.

Kode Etik antara lain bertujuan: (i) menjaga citra, martabat, integritas dan independensi Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam menjalankan tugas sesuai dengan nilai strategis organisasi OJK; (ii) memberikan kejelasan pedoman perilaku Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab; dan (iii) mencegah pelanggaran Kode Etik OJK guna melindungi Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK dari risiko hukum dan/atau risiko reputasi yang mungkin timbul akibat perilaku yang menyimpang dari norma sosial atau tidak sejalan dengan persepsi publik terhadap penyelenggaraan lembaga negara yang baik, serta (iv) memperjelas mekanisme penanganan informasi dan proses penyelesaian dugaan pelanggaran Kode Etik OJK oleh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK.

Kode Etik OJK berlaku untuk seluruh Anggota Dewan Komisioner, Pejabat dan Pegawai OJK. Kode Etik OJK dilaksanakan tanpa toleransi dan pengecualian atas penyimpangannya serta mengandung sanksi bagi yang melanggarnya.

Nilai Dasar Kode Etik OJK dicerminkan dalam perilaku yang sesuai dengan Nilai Strategis Organisasi OJK.

OJK currently has eight committees as follows:
a) Ethics Committee;
b) Human Resources, Organisation and Remuneration Committee;
c) Risk Management Committee;
d) Strategic, Budget and Performance Management Committee;
e) Integrated Risk-Based Supervision of Financial Conglomerates Committee;
f) Adjustments to Mandatory Levy Committee;
g) Islamic Financial Services Development Committee; and
h) Information Technology Committee.

IV.3 CODE OF ETHICS

The OJK Code of Ethics represents the norms and principles of professional behaviour expected from all board members, officers and employees when executing their duties.

The Code of Ethics aims to: (i) maintain the image, dignity, integrity and independence of the members of the Board of Commissioners, officers and employees when executing their duties in line with the strategic values of the OJK organisation; (ii) provide clear guidelines concerning the behaviour of members of the Board of Commissioners, officers and employees when executing their duties and responsibilities; (iii) prevent violations of the OJK Code of Ethics to protect members of the Board of Commissioners, officers and employees from legal risks and/or reputational risks that could emerge due to behaviour that deviates from social norms or contradicts public perception of a state organ; and (iv) clarify the information handling mechanism and settlement process for alleged violations of the Code of Ethics by members of the Board of Commissioners, officers and employees.

The Code of Ethics is applicable to all members of the Board of Commissioners, officers and employees, enforced with zero tolerance and no exceptions, and contains the penalties for infractions.

The Core Values of the OJK Code of Ethics are reflected in behaviour commensurate with the strategic values of OJK.

IV.4 AUDIT INTERNAL, MANAJEMEN RISIKO DAN PENGENDALIAN KUALITAS

IV.4.1 Pelaksanaan Audit Internal

OJK melaksanakan 33 penugasan audit yang terdiri dari 22 penugasan audit di Kantor Regional dan Kantor OJK daerah, 11 penugasan audit di Kantor Pusat dalam bentuk tema asurans serta satu penugasan *probity audit*. Dari pelaksanaan audit internal tersebut, sebanyak 35 Laporan Hasil Audit (LHA) telah diterbitkan.

IV.4.2 Profil Risiko

Profil risiko utama OJK tahun 2019 terdiri atas tujuh jenis risiko dan 14 tema risiko dengan level risiko "Sedang" dan "Tinggi". Tujuh jenis risiko utama OJK antara lain kecurangan, strategis, hukum, reputasi, operasional, kepatuhan, dan keuangan. Adapun terkait tema risiko utama OJK antara lain pengaturan, pengawasan, perizinan, penyidikan, edukasi dan perlindungan konsumen, laporan keuangan, tata kelola, penanganan gugatan, indeks kepuasan *stakeholders*, indeks integritas, hubungan kelembagaan, sumber daya manusia, sistem informasi, dan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan profil risiko utama 2019 yang telah ditetapkan, OJK menyusun 846 rincian mitigasi yang dikelompokkan ke dalam tiga area/kelompok mitigasi yaitu 669 terkait proses bisnis (80%), 137 terkait sumber daya manusia (16%) dan 34 terkait teknologi informasi (4%).

IV.4.3 Indikator Risiko Utama

Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko yang efektif dan efisien, OJK mengembangkan *tools* Indikator Risiko Utama (IRU). IRU adalah parameter yang digunakan untuk memprediksi perubahan profil risiko secara dini sehingga diharapkan tindakan yang diambil tepat waktu dan sesuai untuk menangani masalah yang akan terjadi. Penyusunan IRU mempertimbangkan identifikasi urutan sebab akibat dari rantai peristiwa, akar permasalahan, skala prioritas dan manfaat informasi. Selain itu pemantauan atas IRU dilakukan secara berkala.

IV.4.4 Sistem Pengendalian Kualitas (SPK)

Standar Pengendalian Kualitas (SPK) direncanakan dan diterapkan secara sistematis untuk memberikan keyakinan bahwa produk, jasa, proses, sistem tata kelola dan manajemen OJK telah memenuhi kualitas standar. SPK diperlukan agar terjalin perbaikan berkesinambungan. Implementasi SPK diawali dengan: (1) internalisasi SPK di lingkungan Satuan Kerja; (2) memberikan konsultasi kepada Satuan Kerja dalam penerapan SPK; dan (3) menyampaikan *points of improvement* (POI).

Selanjutnya dilakukan *self assessment* sebagai analisis yang kemudian menjadi dasar proses pengendalian kualitas di tahun berikutnya. Secara keseluruhan proses pendampingan dan *self assessment* yang dilakukan membangun sistem pengendalian kualitas yang berkesinambungan untuk seluruh proses bisnis di OJK.

IV.4 INTERNAL AUDITS, RISK MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE

IV.4.1 Internal Audits

OJK has implemented 33 internal audits, consisting of 22 regional and branch office audits as well as head office 11 audits in the form of assurance audits and probity audits. Of the internal audits implemented, OJK has published 35 Audit Reports.

IV.4.2 Risk Profile

OJK's risk profile in 2019 consisted of seven types of risk and 14 risk themes with 'moderate' and 'high' risk. The seven main types of risk in 2019 were fraud, strategic, legal, reputational, operational, compliance and financial risks. Meanwhile, the other risk themes included regulation, supervision, licensing, research, consumer protection and education, financial reports, governance, legal handling, stakeholder satisfaction index, integrity index, institutional relationships, human resources, information systems and financial management.

Based on the risk profile for 2019, OJK formulated 846 mitigation measures divided into three groups, with 669 relating to business processes (80%), 137 relating to human resources (16%) and 34 relating to information technology (4%).

IV.4.3 Main Risk Indicators

Supporting effective and efficient risk management, OJK has developed Main Risk Indicator (MRI) tools. MRI are parameters used to predict changes in the risk profile early in order to ensure that appropriate follow-up measures may be taken in a timely manner to quickly resolve the outstanding issues. MRI are formulated based on identifying the causal sequence in a chain of events, the root cause, priority scale and use of information. Furthermore, the MRI are monitored periodically.

IV.4.4 Quality Control System

Quality control standards are planned and applied systematically in order to ensure confidence that the products, services, processes, governance and management systems at OJK meet specific quality standards. A quality control system is necessary for continuous improvement. The quality control system is implemented by: (1) internalising the quality control system at the work unit level; (2) providing consultation to the work units concerning quality control system implementation; and (3) delivering the points of improvement (POI).

A self-assessment is subsequently conducted that forms the basis of the quality control process in the subsequent year. In general, the mentoring and self-assessment process helps to build a sustainable quality control system for all business processes at OJK.

IV.4.5 *Audit Surveillance* ISO 9001:2015

Untuk menjaga kualitas pelaksanaan asurans oleh bidang Audit, Manajemen Risiko, Pengendalian Kualitas, *Whistle Blowing System*, dan Program Pengendalian Gratifikasi, OJK melakukan sertifikasi ISO 9001:2015 pada proses bisnis pelaksanaan asurans secara periodik oleh pihak eksternal.

Dalam mempersiapkan *audit surveillance* tersebut, telah dilakukan *Internal Quality Audit* (IQA) untuk memastikan operasional bidang asurans OJK sudah sesuai standar kualitas. Berdasarkan hasil IQA diperoleh sejumlah rekomendasi perbaikan untuk Audit Internal, Manajemen Risiko, Pengendalian Kualitas, dan Program Pengendalian Gratifikasi.

IV.4.6 Program Pengendalian Gratifikasi (PPG)

Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik di OJK. UPG melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) melalui beberapa aktivitas yaitu pengelolaan laporan gratifikasi, sosialisasi melalui berbagai media, pengelolaan risiko gratifikasi dan kegiatan lainnya.

Pada tahun 2019, jumlah laporan gratifikasi yang dikelola oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) OJK sejumlah 299 laporan dengan nilai ±Rp1,4 milyar. Laporan gratifikasi tersebut dapat diartikan semakin tingginya *awareness* pegawai untuk melaporkan penerimaan atau penolakan gratifikasi. Hal ini didukung dengan program sosialisasi penguatan integritas yang dilakukan secara berkelanjutan.

IV.4.5 Surveillance Audit - ISO 9001:2015

To maintain quality assurance in terms of the Internal Audit, Risk Management, Quality Control, Whistleblowing System and Gratification Control Program, OJK has implemented periodic ISO 9001:2015 certification by an external party.

In preparation for the surveillance audit, OJK implemented an Internal Quality Audit (IQA) to ensure OJK assurance complied with quality standards. Based on the results of the IQA, several recommendations were made to improve the Internal Audit, Risk Management, Quality Control and Gratification Control Program.

IV.4.6 Gratification Control Program

The Gratification Control Unit (UPG) is an OJK endeavour to create good governance. UPG implements the Gratification Control Program through several activities, namely gratification report management, socialisation through various media, gratification risk management and various other activities.

In 2019, the Gratification Control Unit (UPG) received 299 gratification reports with a total value of approximately Rp1.4 billion. The reports are an indication of high employee awareness about the need to report gratification, which has been supported by a continuous socialisation program to strengthen integrity.

Total Laporan Gratifikasi
Total Gratification Reports

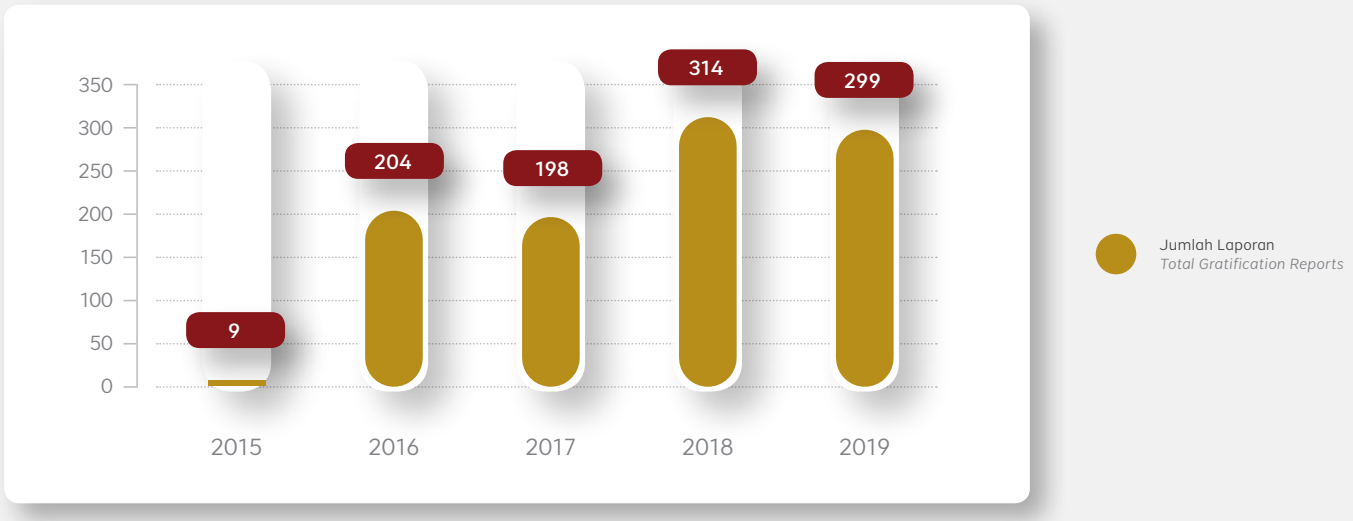

IV.4.7 OJK *Whistle Blowing System* (OJK WBS)

Laporan OJK WBS

Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau disebut juga *Whistleblowing System* (WBS) OJK merupakan salah satu media untuk menyampaikan, mengelola dan menindaklanjuti laporan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak internal OJK baik Anggota Dewan Komisioner, Pegawai, Calon Pegawai, Tenaga Kerja melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan/ atau Tenaga Kerja *Outsourcing*. Jumlah laporan OJK WBS dibandingkan tahun 2018 mengalami penurunan 27,3%. Pada 2018 jumlah laporan cukup tinggi dikarenakan banyaknya laporan yang tidak terkait Insan OJK. Pada 2019 Insan OJK dan *stakeholder* lebih *aware* bahwa laporan yang disampaikan melalui OJK WBS adalah indikasi pelanggaran yang dilakukan Insan OJK.

IV.4.7 *OJK Whistleblowing System (OJK WBS)*

The OJK Whistleblowing

System is a mechanism to submit, manage and follow-up alleged infractions by internal parties, including members of the Board of Commissioners, employees, candidate employees, fixed-term workers and outsourced contractors. Compared with 2018, the number of OJK WBS reports decreased significantly by 27.3% in 2019. The high number of reports submitted in 2018 was not related to human resources at OJK, however. In 2019, OJK human resources and stakeholders were more aware that the reports submitted through the whistleblowing system must pertain to indications of violations by human resources at OJK.

Total Laporan WBS
Total WBS Reports

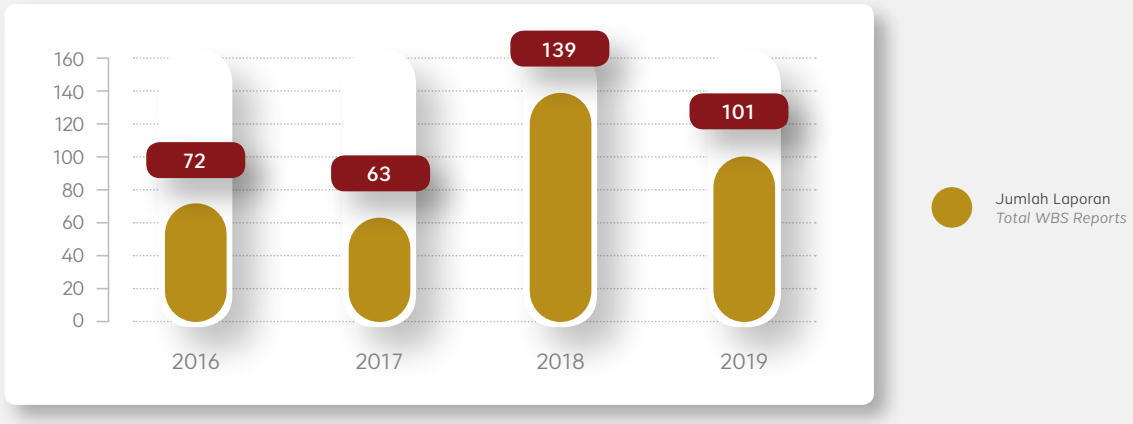

***Maturity Level* OJK WBS**

Secara periodik, dilakukan pengukuran *maturity level* OJK WBS dan tahun 2019 hasil *maturity assessment* OJK WBS yaitu pada poin 4,30 (*level managed*) dari skala 5 (naik 0,7 poin dari 2018). Hal ini menunjukkan adanya perbaikan salah satunya di keamanan sistem dan *improvement*.

OJK WBS Maturity Level

The maturity level of the OJK Whistleblowing System is periodically assessed and in 2019, the maturity assessment scored the WBS 4.3 (managed) out of 5.0 (up 0.7 points from 2018), indicating an improvement in terms of system security, amongst others.

Maturity Level OJK WBS

OJK WBS Maturity Level from

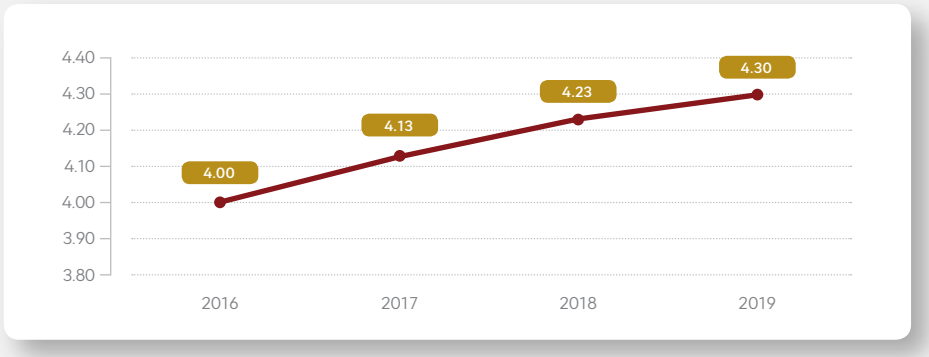

IV.4.8 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola yang bersih dan transparan, OJK mewajibkan pelaporan LHKPN oleh seluruh pegawai OJK mulai dari Anggota Dewan Komisioner sampai dengan staf, dan berlaku untuk pegawai organik serta PKWT. Pada 2019, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN oleh pegawai OJK sebesar 100%.

IV.4.8 Management of Report on Assets of State Officials (LHKPN)

As the embodiment of good governance and transparency, OJK requires all employees to report their assets, from members of the Board of Commissioners to staff, organic employees and fixed-term contractors. In 2019, OJK implemented LHKPN management with a 100% compliance record.

IV.4.9 Sosialisasi Program Penguatan Integritas

OJK melaksanakan sosialisasi program penguatan integritas secara berkelanjutan, baik melalui tatap muka maupun non tatap muka (*email blast*, akun resmi sosial media OJK, media cetak, video, dan lain-lain). Materi yang disampaikan yaitu integritas, OJK WBS, PPG, LHKPN, dan *Fraud Risk Assessment*. Total sosialisasi tatap muka yang dilakukan pada 2019 yaitu 37 kegiatan, dengan rincian 26 sosialisasi kepada internal OJK dan 11 sosialisasi kepada IJK dan *stakeholder* lainnya.

IV.4.9 Integrity Enforcement Program

OJK continuously implements socialisation programs to strengthen integrity through face-to-face methods and other media, such as email blasts, official social media accounts, print media, videos and other media. The materials are dominated by integrity, whistleblowing, gratification control, asset management and fraud risk assessments.In total, 37 face-to-face socialisation activities were conducted in 2019, 26 of which targeted internal OJK employees and 11 activities targeted the financial services industry and other stakeholders.

IV.4.10 Survei Penilaian Integritas

Pada 2019, OJK kembali menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi integritas dan capaian upaya pencegahan KKN di OJK serta memberikan penilaian terhadap integritas layanan kepada pihak eksternal.

Berdasarkan hasil SPI tahun 2019, Indeks Integritas OJK adalah 82,66 dari rentang interval 0-100. Skor SPI tersebut menunjukkan OJK termasuk institusi dengan risiko korupsi rendah, namun terdapat peluang perbaikan integritas institusi agar menjadi lebih transparan, akuntabel dan terbebas dari praktek korupsi. Indeks integritas ini meningkat dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 78,84.

IV.4.10 Integrity Assessment Survey

In conjunction with the Corruption Eradication Commission (KPK), OJK conducted the Integrity Assessment Survey (SPI) again in 2019 in order to gauge institutional integrity and help prevent corruption, collusion and nepotism (KKN), while assessing the integrity of services offered to external parties.

Based on the results of the Integrity Assessment Survey (SPI) in 2019, OJK's Integrity Index was recorded at 82.66 on a scale of 0-100. The score demonstrates a low risk of corruption at OJK, yet the opportunity remains to improve institutional integrity and become a more transparent and accountable institution free from corruption. The Integrity Index improved from 78.84 in 2018.

Integrity Index from
Integrity Index from

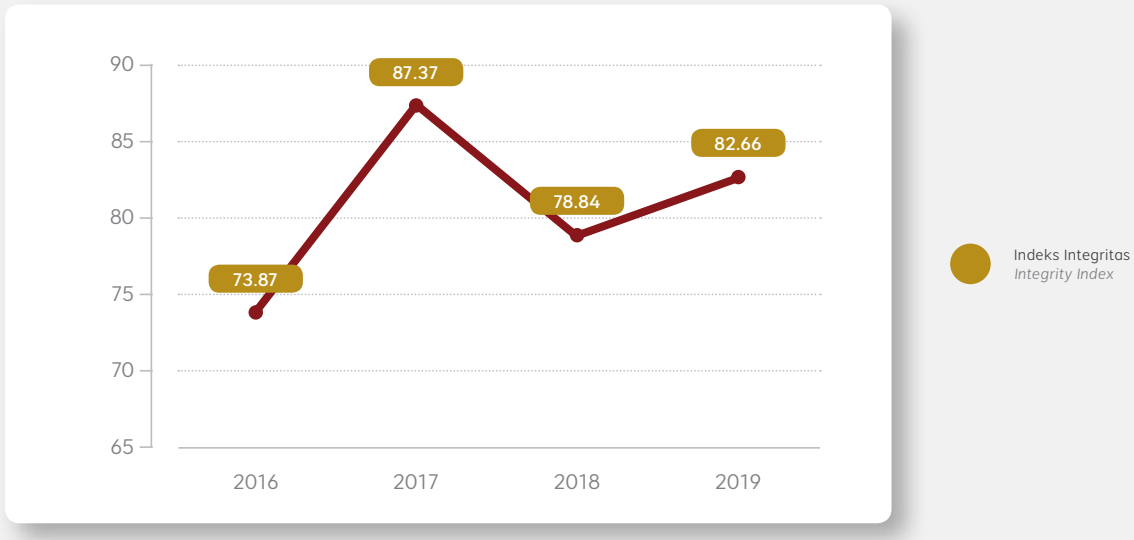

IV.4.11 *Fraud Risk Assessment*

Fraud Risk Assessment (FRA) OJK merupakan salah satu bentuk pencegahan *fraud* dengan melakukan proses identifikasi risiko *fraud* di proses bisnis OJK, serta menentukan mitigasinya. Pada 2019 sebagai *pilot project* telah dilaksanakan FRA di satuan kerja di bidang Audit Internal, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Kualitas. Selanjutnya, pada 2020 ditargetkan FRA di seluruh satuan kerja dan proses bisnis di OJK.

IV.5 MANAJEMEN STRATEGI, ANGGARAN DAN KINERJA

IV.5.1 Perencanaan Strategis

Dalam melaksanakan kegiatan perencanaan strategis, OJK memiliki sistem Manajemen Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK) yang merupakan acuan proses formulasi strategi jangka pendek dan menengah, penyelarasan alokasi sumber daya, monitoring pelaksanaan hingga evaluasi pencapaian sasaran strategis. Sistem MSAK mengintegrasikan aspek keuangan dalam perumusan dan pelaksanaan strategi serta penilaian kinerja organisasi.

IV.4.11 Fraud Risk Assessment

OJK's Fraud Risk Assessment (FRA) aims to prevent fraud by identifying fraud risks in the business processes as well as determining the appropriate mitigation measures. In 2019, FRA was implemented as a pilot project in the work units tasked with the Internal Audit, Risk Management and Quality Assurance. OJK plans to expand the FRA to all work units and business processes in 2020.

IV.5 STRATEGIC, BUDGET AND PERFORMANCE MANAGEMENT

IV.5.1 Strategic Planning

In terms of strategic planning, OJK utilises the Strategic, Budget and Performance Management System (MSAK) as a reference point for the formulation of short and medium-term strategies, harmonising resource allocation, monitoring implementation and evaluating achievement of the strategic targets. Furthermore, MSAK also integrates financial aspects into strategy formulation and implementation as well as the organisational performance appraisal.

Siklus Manajemen, Strategi, Anggaran dan Kinerja (MSAK)

Strategic, Budget, and Performance Management Cycle

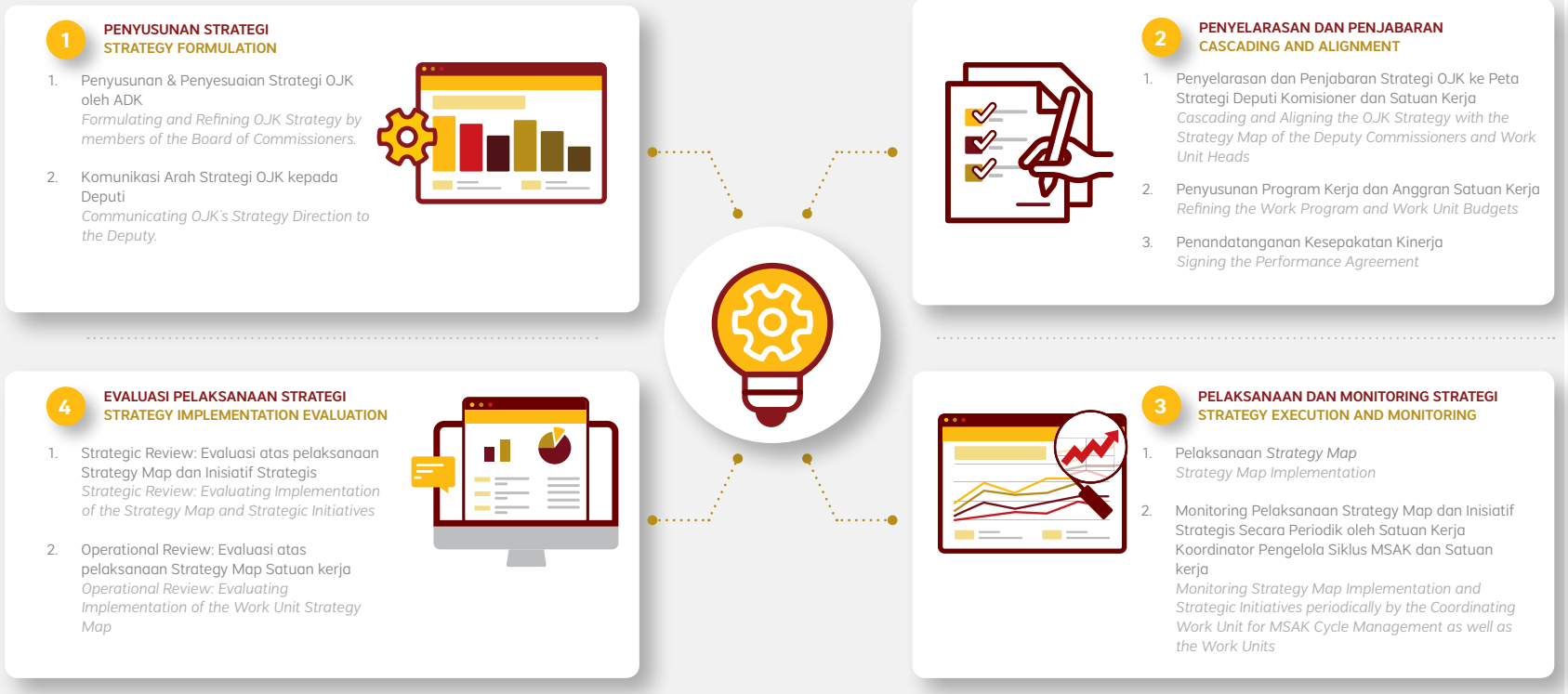

Sebagai *tools* pendukung pengelolaan dan *monitoring* pencapaian kinerja organisasi, OJK menggunakan Peta Strategi yang diperbarui setiap tahunnya, beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan tolak ukur keberhasilan eksekusi strategi organisasi. Penyusunan Peta Strategi OJK dilakukan dengan mempertimbangkan aspek penting terkait pengembangan organisasi dan sektor jasa keuangan antara lain program prioritas pemerintah, *Destination Statement* OJK 2017 - 2022, hasil *environmental scanning*, serta hasil survei persepsi kinerja. Peta Strategi 2019 mempertahankan upaya optimalisasi peran OJK dalam mewujudkan SJK yang tangguh, stabil dan berdaya saing; mewujudkan SJK yang kontributif terhadap pemerataan kesejahteraan; dan mewujudkan keuangan inklusif bagi masyarakat melalui perlindungan konsumen yang kredibel serta mewujudkan ekonomi syariah melalui peningkatan keuangan syariah. Fokus strategi tersebut juga didukung oleh upaya mewujudkan tata kelola dan komunikasi yang kredibel serta kapasitas organisasi yang andal.

As a supporting tool to manage and monitor organisational performance, OJK uses a Strategy Map that is updated annually along with Key Performance Indicators (KPI) as benchmarks for the effective execution of the organisational strategy. OJK formulates its strategy map based on important aspects of organisational and financial services sector development, including the government's priority programs, the OJK Destination Statement 2017-2020, environmental scanning and the Performance Perception Survey. The Strategy Map for 2019 maintains efforts to optimise OJK's role in creating a solid, stable and competitive financial services sector; creating a financial services industry that contributes to economic equality; increasing financial inclusion through credible consumer protection; and creating an Islamic economy by increasing Islamic finance. The focus of the current Strategy Map is also supported by efforts to create good governance and credible communication as well as reliable organisational capacity.

Peta Strategi OJK 2019
OJK Strategy Map 2019

Pemangku Kepentingan dan keuangan *Stakeholder and Financial*

SS.1. **Terwujudnya lembaga Pengawas SJK yang Independen dan Kredibel**
Create an Independent and Credible Institution to Supervise the Financial Services Sector

IKU/*KPI*:
IKU 1.1 Tingkat Kepuasan *Stakeholder* terhadap Kinerja OJK
IKU 1.2 Indeks Integritas
IKU 1.3 Pengelolaan Keuangan yang Andal

KPI.1.1 Stakeholder Satisfaction concerning OJK Performance
KPI.1.2 Integrity Index
KPI.1.3 Reliable Financial Management

SS.2. **Terwujudnya Sekto Jasa Keuangan yang Tangguh dan Tumbuh Berkelanjutan**
Create a Solid and Sustainable Financial Services Sector

IKU/*KPI*:
IKU 2.1 Indeks Kinerja SJK
IKU 2.2 Indeks Inklusi Keuangan
IKU 2.3 Indeks Literasi keuangan

KPI.2.1 Financial Services Sector Performance Index
KPI.2.2 Financial Inclusion Index
KPI.2.3 Financial Literacy Index

SS.3. **Mewujudkan SJK yang Tangguh, Stabil dan Berdaya Saing**
Create a Solid, Stable and Competitive Financial Services Sector

IKU/*KPI*:
IKU 3.1 Penguatan Pengawasan OJK
IKU 3.2 Peningkatan SLA Pelayanan SJK
IKU 3.3 Penguatan *Surveillance* Stabilitas Sistem Keuangan
IKU 3.4 Pendalaman Pasar Keuangan
IKU 3.5 Penerapan *Best Fit International Standard*

KPI.3.1 Strengthen OJK Supervision
KPI.3.2 Raise the Service Level Agreement (SLA) for the Financial Services Sector
KPI.3.3 Strengthen Surveillance of Financial System Stability
KPI.3.4 Deepen the Financial Markets
KPI.3.5 Apply Best Fit International Standards

SS.4. **Mewujudkan SJK yang Kontributif terhadap Pemerataan Kesejahteraan**
Create a Financial Services Industry that Contributes to Economic Equality

IKU/*KPI*:
IKU 4.1 Peningkatan Kontribusi SJK pada Sektor Ekonomi Prioritas
IKU 4.2 Peningkatan Kontribusi SJK bagi Pembangunan Daerah
IKU 4.3 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelaku SJK

KPI.4.1 Increase the Contribution of the Financial Services Sector to Priority Economic Sectors
KPI.4.2 Increase the Contribution of the Financial Services Sector to Local Development
KPI.4.3 Increase the Quality and Quantity of Financial Services Sector Players

SS.5. **Mewujudkan Keuangan Inklusif bagi Masyarakat melalui Perlindungan Konsumen yang Kredibel**
Increase Financial Inclusion through Credible Consumer Protection

IKU/*KPI*:
IKU 5.1 Perlindungan Konsumen yang Kredibel
IKU 5.2 Optimalisasi Penerapan *Fintech* untuk Meningkatkan Inklusi Keuangan

KPI.5.1 Credible Consumer Protection
KPI.5.2 Optimise FinTech to Increase Financial Inclusion

SS.6. **Mewujudkan Ekonomi Syariah Melalui Penginkatan Keuangan Syariah**
Create an Islamic economy through Islamic Finance

IKU/*KPI*:
IKU 6.1 Akselerasi Pertumbahan SJK Syariah

KPI.6.1 Accelerate Growth of the Islamic Financial Services Sector

Proses Internal *Internal Process*

Dukungan Strategis *Strategic Support*

SS.7. **Mewujudkan Tata kelola dan Komunikasi yang Kredibel**
Implement Good Governance and Credible Communication

IKU/*KPI*:
IKU 7.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola
IKU 7.2 Penguatan Koordinasi dengan Otoritas Fiskal dan Moneter

KPI.7.1 Increase Governance Quality
KPI.7.2 Strengthen Coordination with Fiscal and Monetary Authorities

SS.8. **Mewujudkan Kapasitas Organisasi yang Andal**
Create Reliable Organisational Capacity

IKU/*KPI*:
IKU 8.1 Penguatan Kapasitas SDM
IKU 8.2 Penguatan Sistem Informasi untuk Mendukung Proses Bisnis OJK

KPI 8.1 Strengthen Human Resource Capacity
KPI 8.2 Strengthen Information Systems to support OJK Business Processes

IV.5.2 Kinerja Organisasi

Sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam memperkokoh stabilitas sektor jasa keuangan, OJK senantiasa menyempurnakan pedoman manajemen kinerja organisasi, antara lain dengan melakukan penyesuaian metode penghitungan indikator kinerja dengan mengakomodasi faktor kompleksitas seperti inovasi dan risiko kendala internal maupun eksternal. Perubahan ini diharapkan dapat memacu Insan OJK untuk selalu menunjukkan kinerja terbaiknya.

Berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja organisasi, Nilai kinerja OJK *Wide* 2019 adalah 105,64% atau lebih dari target yang ditetapkan.

IV.5.3 Realisasi Anggaran & Kebijakan Tata Kelola Keuangan

Pagu anggaran OJK 2019 adalah sebesar Rp5.529.742.476.307,00 dengan realisasi sebesar Rp5.470.911.724.870,00 atau 98,94% dari pagu anggaran. Persentase realisasi tersebut relatif sama dengan realisasi anggaran Tahun 2018 yaitu sebesar 99,07%. OJK terus berupaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran sehingga dapat merealisasikan seluruh program kerja yang telah direncanakan.

IV.5.2 Organisational Performance

As a tangible form of commitment in the execution of duties and function to strengthen financial services sector stability, OJK regularly refines the management guidelines for organisational performance, including how performance indicators are calculated to accommodate complexity, such as innovation as well as internal and external constraints. The adjustments are expected to motivate OJK staff towards achieving their best performance.

Based on an evaluation of organisational performance, the OJK Performance Index stood at 105.64% in 2019, thereby exceeding the target.

IV.5.3 Budget Realisation and Finance Management Policy

OJK budget in 2019 was Rp5,529,742,476,307.00 with a realisation of Rp5,470,911,724,870.00 or 98.94% . It is relatively similar to the 99.07% realisation in 2018. OJK constantly strives to optimise budget utilisation in order to realise all planned work programs.

Realisasi Anggaran
Budget Realisation

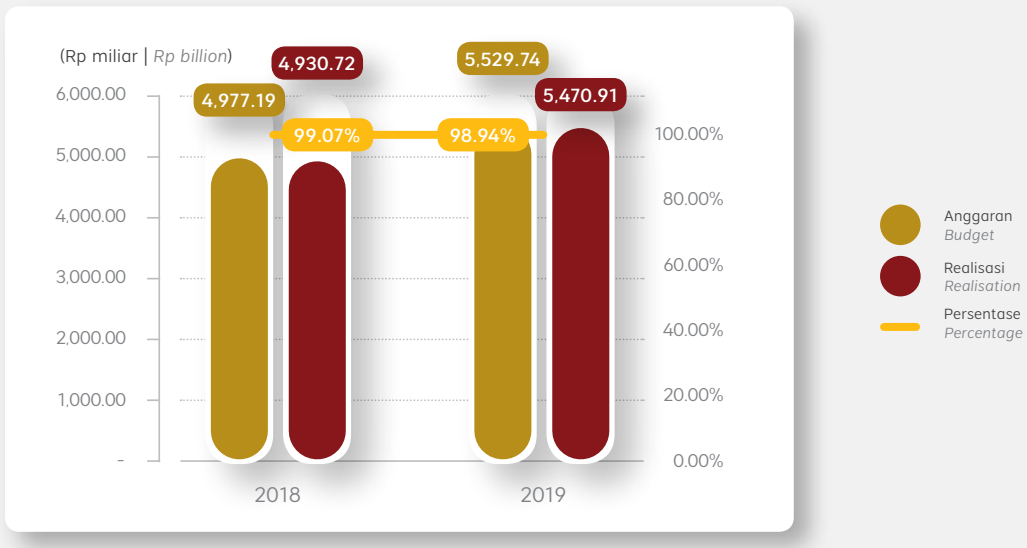

Saldo anggaran sebesar Rp58.830.751.437,00 disetorkan ke Kas Negara untuk memenuhi kewajiban perpajakan OJK (PPh Badan dan PPh Pasal 21) sebesar Rp58.747.622.387,- pada tanggal 31 Desember 2019 dan 10 Januari 2020, dan di setorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp83.129.050,00 pada tanggal 22 Januari 2020. Dengan pemanfaatan saldo anggaran untuk pembayaran PPh Badan dan setoran PNBP tersebut, maka realisasi anggaran tahun 2019 menjadi 100%.

The budget balance of Rp58,830,751,437.00 was deposited into the State Treasury to meet OJK's tax obligations (corporate tax and income tax) totalling Rp58,747,622,387.00 on 31st December 2019 and 10th January 2020 and also deposited into the State Treasury as Non-Tax State Revenues totalling Rp83,129,050.00 on 22nd January 2020. By depositing the budget balance into the State Treasury for tax and revenue purposes, budget realisation in 2019 reached 100%.

IV.5.4 Penerapan ISO 9001:2015 untuk Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan, OJK mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan ISO 9001:2015 dengan ruang lingkup Administrasi, Pengaturan Pengelolaan Keuangan, Penyusunan Anggaran, Pengendalian Keuangan, Pelaksanaan Anggaran, Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Penerimaan dan Perpajakan.

Penerapan Implementasi ISO 9001:2015 tersebut diawali dengan penandatanganan Kebijakan Kualitas pada *Kick-Off* ISO 9001:2015. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pelatihan *Awareness of ISO* 9001:2015, *pre-assessment* ISO 9001:2015, internal audit kualitas, tinjauan manajemen serta audit sertifikasi ISO 9001:2015 *stage* I dan II.

Dengan dedikasi dan komitmen yang tinggi, Implementasi ISO 9001:2015 tersebut mendapatkan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu *International Organization for Standardization* (ISO) 9001:2015 dari *British Standard Institute* (BSI) selaku lembaga sertifikasi independen. Penyerahan Sertifikat ISO 9001:2015 secara seremonial dilaksanakan pada 12 September 2019.

IV.5.4 ISO 9001:2015 Implementation for Financial Planning and Management

To improve the quality of financial planning and management, OJK has implemented a Quality Management System in accordance with ISO 9001:2015 covering Administration, Financial Management Regulations, Budget Formulation, Financial Assurance, Budget Implementation, Financial Reporting, Revenue Management and Taxation.

ISO 9001:2015 implementation began with the signing of Quality Policy at the kick-off event, followed by Awareness of ISO 9001:2015 training, preassessment, internal quality audit, management review as well as stage I and II ISO 9001:2015 audit certification.

Through unwavering dedication and commitment, ISO 9001:2015 implementation at OJK received International Organisation for Standardisation (ISO) 9001:2015 Quality Management System Certification from the British Standard Institute (BSI) as an independent certification institute. The ISO 9001:2015 certificate was ceremonially presented to OJK on 12 September 2019.

IV.5.5 Survei Kinerja

Sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan mengukur dampak atas kinerja OJK kepada seluruh pemangku kepentingan, OJK secara aktif menggali pendapat, masukan dan harapan dari pemangku kepentingan melalui survei persepsi kinerja. Survei tersebut dilaksanakan setiap tahun kepada responden yang berada di kota wilayah kerja Kantor Pusat, Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah. Responden survei terdiri dari (i) Pelaku Lembaga Jasa Keuangan (Perbankan, Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank); (ii) Kalangan *Influencer* (Media, Akademisi, Pengamat Ekonomi dan Asosiasi); (iii) *Policy Maker* (Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah dan DPRD); (iv) konsumen Lembaga Jasa Keuangan peserta edukasi/sosialisasi OJK; dan (v) konsumen pengguna *Financial Customer Care* (FCC).

IV.5.5 Performance Survey

Striving to improve services and measure the impact of OJK performance on all stakeholders, OJK actively seeks the opinions, inputs and expectations of its stakeholders through a Performance Perception Survey (PPS). The Survey is held annually and disseminated to respondents located in towns and cities around OJK head office, regional offices and branch offices. The respondents consist of: (i) financial services institutions (banks, capital market and nonbank financial industry); (ii) influencers (media, academics, economists and associations); (iii) policymakers (local government, government agencies and the regional legislative councils); (iv) financial services consumers as participants of OJK's educational/socialisation activities; and (v) consumers of Financial Customer Care (FCC).

Pelaksanaan survei dilakukan secara *daring* dan *Focus Group Discussion* (FGD) oleh konsultan independen. Survei difokuskan pada aspek utama pelayanan OJK yaitu pengawasan, pengaturan, pelayanan perizinan, pelaksanaan edukasi/sosialisasi dan pelayanan konsumen keuangan. Secara umum hasil survei persepsi kinerja OJK 2019 cukup baik, yakni dengan nilai 4,99 dari skala 1-6. Nilai ini lebih baik dibandingkan nilai survei serupa pada 2018 yaitu 4,90.

The Survey is implemented online and through Focus Group Discussions (FGD) by independent consultants. The Survey focuses on the main functions of OJK, namely supervision, regulation, licensing, education/socialisation and financial consumer services. In general, the Performance Perception Survey was executed well in 2019, with OJK scoring 4.99 on a 1-6 scale, improving from 4.90 in 2018.

IV.6 INSIATIF STRATEGIS

IV.6 STRATEGIC INITIATIVES

Sehubungan dengan pelaksanaan inisiatif strategis (IS) dan proyek khusus (PK), sampai dengan akhir 2019 telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

In 2019, OJK implemented the following strategic initiatives (SI) and special projects (SP):

1. **IS-1 Inovasi Keuangan Digital Untuk Peningkatan Efisiensi Dan Inklusi Sektor Jasa Keuangan**
   Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mendorong inklusi, efisiensi dan pertumbuhan industri jasa keuangan, sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pada 2019, telah dilakukan empat *batch* forum panel dengan total 74 penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) tercatat, 17 klaster model bisnis, dan 43 sampel *regulatory sandbox*.

   OJK bersama forum panel dan *Technical Assisstant* dari *Asian Development Bank* (ADB) melaksanakan pengujian *regulatory sandbox* terhadap 23 sampel dalam 12 klaster bisnis model yang terdiri dari *Aggregator, Claim Service Handling, Credit Scoring, Digital Dana Investasi Real Estat (DIRE), Financial Planner, Financing Agent, Funding Agent, Online Distress Solution, Online Gold Depository, Project Financing, Social Network & Robo Advisor,* dan *Blockchain-based*, yang selanjutnya akan mengikuti proses uji coba *regulatory sandbox*. OJK bekerja sama dengan *RegTechLab* telah menyusun kajian/strategic *framework* terkait penerapan *RegTech* dan *SupTech* di Indonesia untuk mengidentifikasi area prioritas pengembangan *RegTech* dan *SupTech* yang perlu menjadi *concern* OJK.

1. ***IS-1 Digital Financial Innovation to Increase Financial Services Sector Efficiency and Inclusion***
   This strategic initiative aims to increase financial services industry inclusion, efficiency and expansion in order to accelerate sustainable economic growth. In 2019, four panel forum batches were implemented with a total of 74 digital financial innovation providers, 17 business model clusters and 43 sample regulatory sandboxes.

   In conjunction with the forum panel and technical assistants from the Asian Development Bank (ADB), OJK tested the regulatory sandbox for 23 samples in 12 business model clusters, consisting of Aggregators, Claim Service Handling, Credit Scoring, Digital Real Estate Investment Funds (DIRE), Financial Planners, Financing Agents, Funding Agents, Online Distress Solutions, Online Gold Depository, Project Financing, Social Networking and Robo Adviser, and Blockchain-based Solutions, followed by regulatory sandbox trials. In cooperation with RegTechLab, OJK has formulated a strategic framework for the application of RegTech and SupTech in Indonesia by identifying priority areas for RegTech and SupTech development as an OJK concern.

2. **IS-2 Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi**
   Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mewujudkan pengawasan SJK yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi permasalahan SJK secara dini, memberikan respon pengawasan yang cepat, dan pemanfaatan sumber daya yang efisien melalui penyediaan sistem informasi pengawasan sektor jasa keuangan (SJK) berbasis teknologi informasi (TI) yang handal dan aman. Tahun 2019 ini, OJK menyelesaikan pengembangan aplikasi

2. ***IS-2 Strengthen Information Technology-based Financial Services Sector Supervision***
   This strategic initiative aims to create effective and efficient financial services sector supervision in order to detect issues early, discharge a quick supervisory response and utilise resources efficiently through a reliable and secure information technology-based financial services sector supervision information system. In 2019, OJK completed development of the OJK-BOX (O-BOX) application, accompanied by socialisation and

OJK-BOX (O-BOX) serta melakukan sosialisasi dan implementasi O-BOX dengan seluruh bank umum. Selanjutnya, OJK melakukan evaluasi penerapan O-BOX dalam bentuk *focus group discussion* (FGD) dengan 10 bank *pilot project* dan pengawas bank untuk mengidentifikasi kendala, tanggapan, dan masukan bank maupun pengawas atas implementasi O-BOX.

implementation activities at all commercial banks. OJK then evaluated O-BOX implementation through Focus Group Discussions (FGD) with 10 pilot project banks and bank supervisors to identify the constraints, response and inputs regarding O-BOX implementation.

OJK juga telah selesai mengembangkan aplikasi *Condensed Report* untuk menyediakan data dan rasio keuangan utama Bank sesuai kebutuhan Pengawas Bank secara lebih cepat melalui APOLO, sehingga Pengawas Bank dapat melakukan analisis atas perkembangan dan kinerja Bank secara lebih dini. Implementasi *Condensed Report* akan dilakukan pada 2020.

OJK has also completed development of the Condensed Report application that provides financial ratios and granular data for the banking industry as required by bank supervisors through APOLO. This allows bank supervisors to conduct early analyses of bank performance and developments. Condensed Report implementation will take place in 2020.

3. IS-3 Pendalaman Pasar Keuangan

Inisiatif Strategis ini merupakan serangkaian kegiatan pemetaan isu, potensi dan tantangan terkait regulasi kebijakan, proses bisnis, dan infrastruktur pasar yang dihadapi dalam upaya pendalaman pasar keuangan serta menyusun rekomendasi dan upaya konkret yang perlu dilakukan dalam mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut. Terkait upaya tersebut, pada 2019 OJK melakukan 11 *high level meeting* (HLM) sebagai upaya percepatan pemanfaatan obligasi/sukuk daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan di daerah dengan Pimpinan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Aceh dalam rangka peningkatan kualitas pemahaman manfaat penerbitan Obligasi/Sukuk Daerah.

3. IS-3 Financial Market Deepening

This strategic initiative consists of various activities to map the issues, potentials and challenges confronting financial market deepening efforts in terms of the regulations, policies, business processes and market infrastructure, as well as formulating recommendations and the concrete measures required to overcome the constraints and challenges. To that end, OJK conducted 11 high-level meetings (HLM) in 2019 to accelerate municipal bond/sukuk issuances as a source of local development financing with local government leaders from South Sulawesi, Bali, West Sumatra, West Java, Central Java, East Java and Aceh in order to create awareness and increase understanding concerning the benefits of municipal bonds/ sukuk.

OJK juga melaksanakan *workshop* dengan internal Pemda Provinsi Jawa Barat, Bali, Jawa Tengah, Aceh, dan Bogor untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan dalam menerbitkan dan mengelola ObDa yang meliputi strategi dan kebijakan pengelolaan ObDa, pemilihan kegiatan/proyek, dan pengelolaan pendapatan dan barang milik daerah yang dibiayai dari ObDa.

OJK also organised internal workshops with local government officials in West Java, Bali, Central Java, Aceh and Bogor to increase capacity and preparedness to issue and manage municipal bonds, covering the municipal bond management strategy and policies, activity/project selection as well as the management of revenues and state property funded through municipal bonds.

Selanjutnya OJK melakukan edukasi, promosi penerbitan dan investasi DINFRA kepada calon emiten potensial, pemerintah daerah, dan BUMD di Yogyakarta, Makassar dan Medan. Selain itu, salah satu upaya untuk mengembangkan infrastruktur jaring pemasaran, menjangkau dan mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan jumlah investor retail di daerah, telah diterbitkan POJK No. 18/POJK.04/2019 tentang Perusahaan Efek Daerah serta SEDK Pendelegasian Wewenang Perijinan PED.

OJK also provided educational activities to promote Infrastructure Investment Fund - Collective Investment Contracts (DINFRA) amongst potential issuers, local government and village-owned enterprises (BUMD) in Yogyakarta, Makassar and Medan. In addition, OJK issued OJK Regulation (POJK) No. 18/POJK.04/2019 concerning Regional Securities Companies and BOC Circular Letter (SEDK) regarding Delegation of PED Licensing Authority in order to develop marketing network infrastructure, reach prospective investors, particularly local retail investors, as well as accelerate growth and the equitable distribution of local retail investors.

Selain itu, untuk mendukung pendalaman pasar, OJK juga melengkapi fungsi *executive dashboard* pada *Dashboard* Strategi Nasional Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SNP3K) sejak Desember 2019.

4. IS-4 Reformasi Industri Keuangan Non-Bank

Inisiatif Strategis ini terdiri dari penyusunan pengaturan terhadap manajemen, kelembagaan, produk dan layanan serta meningkatkan kompetensi pengawasan dalam rangka pengembangan IKNB. Pada 2019, OJK telah menyusun naskah akademik dan RUU Lembaga Pembiayaan, Pergadaian dan Dana Pensiun. Selain itu, dalam konteks penguatan kelembagaan dan pengawasan, telah dilakukan kajian *Entry Policy* (terkait penguatan permodalan), *Exit Policy*, *Single Presence Policy*, serta rancangan peraturan OJK terkait Rencana Bisnis IKNB. Selanjutnya, telah dilakukan juga upaya Penguatan Pengawasan untuk memperkuat *pre-emptive supervisory process* di antaranya melalui pembangunan E*arly Warning System* dan berbagai kebijakan untuk penguatan pengawasan. OJK juga melakukan Pengembangan berbagai infrastruktur yang bertujuan untuk memperkuat sistem informasi melalui pengembangan *Early Warning Systems* (EWS) pada perusahaan asuransi dan reasuransi.

5. IS-5 Penyempurnaan Manajemen Sistem Keuangan

Inisiatif strategis ini bertujuan untuk memastikan keandalan sistem aplikasi keuangan OJK dalam penyajian laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu serta tersedianya infrastruktur dan kebijakan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja. Pada 2019, OJK telah melakukan pengembangan Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) Generasi-II untuk mengakomodir pelaksanaan pungutan secara efektif dan efisien melalui sistem dengan melakukan perbaikan struktur data yang akan mempengaruhi keakuratan dan kecepatan SIPO, penyederhanaan dan penyempurnaan proses bisnis pungutan pada SIPO, dan penambahan proses bisnis yang belum terakomodir pada SIPO. Terkait dengan *deliverable* rekonsiliasi pencatatan *Fixed Asset* SIAUTO dengan fisik di seluruh Satker OJK, satuan kerja Kantor Regional dan Kantor OJK telah menginformasikan bahwa seluruh aset fisik sejumlah 12.501 unit telah dicatatkan ke dalam SIAUTO. Untuk aset Teknologi Informasi di Kantor Pusat, sebanyak 14.687 unit aset telah selesai direkonsiliasi dan dicatatkan ke dalam SIAUTO.

6. IS-6 Penyederhanaan dan Otomasi Proses Bisnis

Inisiatif Strategis ini bertujuan terciptanya proses bisnis yang standar, efektif dan efisien guna memenuhi kebutuhan *stakeholders*. Pada 2019, beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan antara lain: (i) Pengembangan Data Terintegrasi Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

In addition, the National Financial Market Development and Deepening Strategy Dashboard (SNP3K) was complemented in December 2019 with an executive dashboard function.

4. IS-4 Nonbank Financial Industry Reforms

This strategic initiative consists of formulating regulations concerning nonbank financial industry management, institutions, products and services as well as improving supervisory competence in terms of NBFI development. In 2019, OJK formulated the academic materials and draft bill for Financing Institutions, Pawnbrokers and Pension Funds. In the context of institutional strengthening and supervision, OJK has reviewed Entry Policy (in relation to strengthening capital), Exit Policy, Single Presence Policy and OJK regulations concerning the NBFI Business Plan. Furthermore, OJK has strengthened supervision in order to reinforce pre-emptive supervisory processes through an Early Warning System and various policies to bolster supervision. Finally, OJK has developed various infrastructures to strengthen the information systems through development of Early Warning Systems (EWS) for insurance and reinsurance companies.

5. IS-5 Financial System Refinement

This strategic initiative aims to ensure a reliable financial application system at OJK for the submission of accurate and timely financial reports, while providing infrastructure and policies to implement performance-based budgeting. In 2019, OJK developed its second-generation OJK Revenue Information System (SIPO) to effectively and efficiently accommodate levies in the system by improving the data structure to increase data accuracy and system speed, simplify and refine the levy business process in the SIPO system and increase the number of business processes that were previously not accommodated in the system. In terms of deliverables, OJK has reconsolidated the recording of fixed assets in the SI-AUTO system with the physical assets of each work unit throughout OJK. Accordingly, the work units from regional and branch offices recorded physical assets totalling 12,501 units, which have been logged in the SI-AUTO system. Furthermore, 14,687 units of information technology assets at head office have been reconsolidated and recorded in the SI-AUTO system.

6. IS-6 Business Process Simplification and Automation

This strategic initiative aims to create standardised, effective and efficient business processes to meet the needs of OJK's major stakeholders. In 2019, OJK conducted the following salient activities: (i) development of an integrated track record database for fit and proper tests; (ii) promulgation of

(PKK) - *Database Track Record* Terintegrasi untuk Penilaian Kemampuan dan Kepatutan; (ii) Penerbitan Surat Edaran Dewan Komisioner (SEDK) OJK No. 7/SEDK.01/2019 tentang Perubahan Ketujuh SEDK OJK No. 33/SEDK.02/2013 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas OJK; (iii) *Draft* Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama antara OJK dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk implementasi tanda tangan digital.

BOC Circular Letter (SEDK) No. 7/SEDK.01/2019 as the seventh amendment to BOC Circular Letter (SEDK) No. 33/SEDK.02/2013 concerning Guidelines for Official OJK Documents; (iii) draft memorandum of understanding and work agreement between OJK and the National Cyber and Encryption Agency (BSSN) for the implementation of digital signatures.

Telah dilakukan revitalisasi *web* portal internal OJK (periskop.ojk.go.id) dengan fitur utama antara lain menyempurnakan pencarian peraturan OJK.

OJK has revitalised its internal web portal (periskop.ojk.go.id) by improving the regulation search function, amongst others.

IS-6 juga telah melakukan sosialisasi SEDK Nomor 14/SEDK.01/2019 tentang Pedoman Penyusunan Proses Bisnis dan Standar Prosedur Operasional (SPO) OJK dan pendampingan penyusunan SPO kepada seluruh Satker.

IS-6 also encompasses socialisation activities for BOC Circular Letter (SEDK) No. 14/SEDK.01/2019 concerning Formulation Guidelines for Business Processes and Standard Operating Procedures (SOP), as well as cascading the standard operating procedures to all work units.

Selanjutnya, OJK juga telah menyusun materi Rancangan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) tentang Manajemen Kelangsungan Bisnis (MKB) OJK dengan cakupan: (a) Pengaturan MKB OJK; (b) Ruang lingkup Protokol Manajemen Krisis (PMK) dan MKB OJK; (c) Mekanisme MKB di OJK; dan (d) Struktur Organisasi MKB. RPDK tersebut telah disampaikan pada Rapat Dewan Komisioner dengan arahan untuk menyempurnakan PDK Manajemen Kelangsungan Bisnis OJK dengan membentuk gugus tugas untuk memastikan efektivitas koordinasi antar satuan kerja terkait pelaksanaan MKB, mempertimbangkan keterkaitan lintas sektoral dan terhadap stabilitas sistem keuangan, serta menyesuaikan dengan standar International Organization for Standardization (ISO) terkait. Penyesuaian atas arahan tersebut akan dilaksanakan pada 2020.

OJK has also formulated materials for a draft BoC Regulation (PDK) concerning Business Continuity Management (BCM) as follows: (a) BCM regulations; (b) scope of Crisis Management Protocol (CMP) and Business Continuity Management (BCM); (c) BCM mechanism at OJK; and (d) organisational structure of BCM. The draft regulation has been submitted to the Board of Commissioners meeting for further refinement, including establishing a task force to ensure effective coordination between work units in relation to BCM implementation, considering sectoral interlinkages and the impact on financial system stability, as well as adjustment to the relevant ISO standards. This will be implemented in 2020.

7. **IS-7 Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018-2022**

   Inisiatif Strategis ini bertujuan untuk mengembangkan Sistem Informasi OJK yang terintegrasi, andal, aman, berkualitas, mendukung pencapaian visi dan misi OJK, serta memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*. Selama 2019, kegiatan terkait IS-7 antara lain Pengembangan *Mobile* Apps *Executive Information System Dashboard* SJK Terintegrasi (EXIST), *Big Data Analytics* untuk Waspada Investasi, Portal Bersama Integrasi Pelaporan dan OJK telah memberikan akses Portal Bersama kepada BI untuk dilakukan uji coba *Single Sign-On*.

7. ***IS-7 Implementation of the OJK Information Systems Development Plan for 2018-2022***

   This strategic initiative aims to develop integrated, reliable, secure and quality information systems at OJK that support achievement of the organisation's vision and mission, or provide value added for the stakeholders. In 2019, IS-7-related related activities included development of mobile apps for the Integrated Financial Services Sector Executive Information Systems Dashboard (EXIST), Big Data Analytics for the Investment Watchdog and an Integrated Reporting Portal, to which OJK has provided access for Bank Indonesia to trial the Single Sign-On mechanism.

8. IS-8 Percepatan Akses Keuangan

Inisiatif Strategis ini mempunyai misi untuk melakukan percepatan tingkat inklusi dan literasi keuangan melalui kelompok tertentu. Sampai akhir 2019, telah dilaksanakan kajian potensi unggulan/sektor prioritas di daerah sebagai acuan penyusunan program TPAKD, Penandatanganan Nota Kesepahaman perihal Penguatan Tugas dan Kewenangan OJK dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), serta Perjanjian Kerja Sama antara OJK dengan Kemendagri tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan serta Perlindungan Konsumen melalui Optimalisasi Peran TPAKD, *kick off* Sistem Informasi TPAKD (SI-TPAKD) dalam rangka pengembangan sistem pelaporan TPAKD yang terintegrasi, *Simpel Day* dan Aksi Ikrar Pelajar Indonesia Menabung secara serentak di seluruh wilayah Indonesia yang melibatkan KR/KOJK.

8. IS-8 Accelerate Financial Access Acceleration

This strategic initiative has a mission to accelerate financial inclusion and literacy gains through programs targeting specific groups. As of the end of 2019, OJK has reviewed potential priority sectors with competitive advantage in rural areas as a reference for the Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD), signed a memorandum of understanding concerning strengthening the duties and authority of OJK and the Ministry of Home Affairs, as well as a cooperation agreement between OJK and the Ministry of Home Affairs to increase financial literacy and inclusion and provide consumer protection by optimising the role of Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD), kicking off the TPAKD information system (SI-TPAKD) towards development of an integrated TPAKD reporting system, as well as organised simultaneous Simpel Day and Student Pledge to Save throughout Indonesia with the participation of OJK regional and branch offices.

Selain pelaksanaan delapan IS tersebut, OJK juga melaksanakan serangkaian kajian dalam Proyek Khusus (PK) OJK, antara lain sebagai berikut:

Consistent with implementation of the eight strategic initiatives, OJK also executed a number of special projects (PK) as follows:

1. PK-1 Pengembangan KUR

OJK telah menyusun manuskrip ilmiah "*Microcredit Effectiveness and Micro-Small Business Development: Lesson from Indonesia*" dan telah diajukan untuk di publikasi pada jurnal ilmiah berkualitas.

1. PK-1 People's Business Loan (KUR) Development

OJK has prepared and submitted the manuscript "Microcredit Effectiveness and Micro-Small Business Development: Lessons from Indonesia" for publication in quality scientific journals.

2. PK-2 Penguatan Riset Untuk Dasar Kebijakan Sektor Jasa Keuangan (*Research Based Policy*)

Dalam rangka menguatkan peran riset di organisasi sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang kontributif, inklusif, dan stabil, OJK melaksanakan *In-House Training* (IHT), penyusunan proposal riset, dan metodologi riset dengan fokus pada pada penggunaan metode ekonometrika di dalam penelitian ekonomi dan keuangan.

OJK juga melakukan koordinasi antar Satuan Kerja dan Unit Kerja yang memiliki fungsi riset untuk membahas *draft* aturan internal pengelolaan riset serta evaluasi riset 2019 dan perencanaan riset 2020.

Sebagai tahap awal penyusunan Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, dan Publikasi Riset OJK, telah dilakukan pertemuan lintas sektor untuk menyusun konsep peraturan dimaksud. Selanjutnya, telah dilakukan penyusunan *user requirement* sistem monitoring penelitian OJK *wide* (LMS-Riset) yang menatausahakan tahapan penyusunan riset dan koordinasi pelaksanaan riset di lingkungan OJK *wide*. LMS-RISET akan digunakan oleh seluruh satuan kerja (satker) pelaksana riset (SPR) dan satker koordinasi riset (SKR) OJK.

2. PK-2 Research-Based Policy

Seeking to strengthen the organisational contribution of research underlying sound policymaking and creating a contributive, inclusive and stable financial services sector, OJK has provided in-house training (IHT), as well as prepared research proposals and research methodologies with a focus on econometric methods for economic and financial research.

OJK has also coordinated between work units with a research function to discuss draft internal research management rules, research evaluation in 2019 and the research plan for 2020.

As a preliminary stage of formulating a Regulation (PDK) on Research Planning, Implementation and Publication Guidelines, OJK has conducted cross-sector meetings in order to formulate the concept. Furthermore, OJK has also compiled user requirements for the OJK-wide research monitoring system (LMS-RISET), which administrates the research stages and coordinated research within the OJK environment. LMS-RISET will be used by all work units to implement and coordinate research at OJK.

3. PK-3 *Digital Economy* dan Pengaruhnya Bagi Sektor Jasa Keuangan

OJK menyusun manuskrip ilmiah "*The Impact of E-Commerce Adoption on MSMEs Performance and Financial Inclusion in Indonesia*" dan telah diajukan untuk di publikasi pada jurnal ilmiah berkualitas.

4. PK-4.1 Bank Wakaf Mikro (BWM)

OJK melakukan fasilitasi pendirian 56 BWM dengan jumlah pembiayaan disalurkan sebesar Rp36,57 milyar. Selain itu, OJK juga melakukan pengembangan sistem informasi program BWM *Executive Information System* (EXIST).

Dalam rangka mendukung Fasilitasi Penambahan Donatur BWM, OJK melakukan: (i) pembuatan komik strip Bank Wakaf Mikro dengan tujuan untuk menarik minat *stakeholder* baik internal maupun eksternal OJK; (ii) penyusunan proposal kerja sama dengan Kuwait; dan (iii) pengembangan aplikasi untuk menarik donatur, baik individu maupun kelompok.

Selanjutnya, untuk memperkuat kelembagaan BWM agar dapat mendukung program pemerintah dalam memberdayakan ekonomi umat, telah dilakukan *capacity building* bagi SDM Bank Wakaf Mikro sebagai berikut:

a. Pelatihan lanjutan pengelola BWM di Bogor dan Surabaya,
b. Pelatihan Dewan Pengawas Syariah BWM di Tangerang,
c. Pelatihan tematik *Supervisor* BWM di Bogor.

5. PK-4.2 Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

OJK memfasilitasi pendirian 24 BUM-Desa Center. Materi panduan program Optimalisasi BUMDes telah disusun dan kerja sama dengan bisnis pemberdayaan desa telah dibangun sebagai opsi *business-matching* untuk BUMDes yang difasilitasi menjadi BUM-Desa *Center*.

OJK juga melaksanakan sosialisasi dan *workshop* pengembangan BUMDes di sembilan Provinsi yang mencakup 13 Kabupaten/Kota dan 896 Desa. Kegiatan ini dilakukan bersama dengan PT BUM Desa Indonesia.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengembangan pilar digitalisasi program Optimalisasi BUMDes, OJK bekerja sama dengan tim pengembang Bumdesakota.id telah mengembangkan *online marketplace* sebagai sarana penjualan produk BUMDes agar dapat mencapai target pasar yang lebih luas, dengan fitur *dashboard* untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja dan keuangan BUMDes. *Marketplace* tersebut berbasis *webpage* dan telah menggunakan metode pembayaran *Virtual Account*.

3. PK-3 The Digital Economy and its Impact on the Financial Services Sector

OJK has prepared and submitted the manuscript "The Impact of e-Commerce Adoption on MSME Performance and Financial Inclusion in Indonesia" for publication in quality scientific journals.

4. PK-4.1 Micro Waqf Banks

OJK has facilitated the establishment of 56 Micro Waqf Bank (BWM), with disbursed financing reaching Rp36.57 billion. In addition, OJK has also developed the BWM Executive Information System (EXIST).

To facilitate additional BWM donors, OJK has: (i) created a Micro Waqf Bank comic strip to pique the interest of internal and external stakeholders; (ii) prepared a proposal to cooperate with Kuwait; and (iii) developed an application to attract individual and group donors.

Towards institutional strengthening of Micro Waqf Banks in order to support government programs for economic empowerment, OJK has provided capacity building training for the human resources of Micro Waqf Bank as follows:

a. Advanced BWM Management Training in Bogor and Surabaya;
b. Islamic Supervisory Board Training in Tangerang; and
c. Thematic BWM Supervisor Training in Bogor.

5. PK-4.2 Optimisation of Village-Owned Enterprises (BUMDes)

OJK has facilitated the establishment of 24 BUMDes Centres. The guidelines for BUMDes optimisation have been formulated and OJK has cooperated with village empowerment businesses as a form of business matching for village-owned enterprises (BUMDes) seeking to become a BUMDes Centre.

OJK has also conducted socialisation activities and organised workshops for BUMDes development in nine Indonesian provinces, reaching 13 cities/regencies and 896 villages. This activity was conducted in conjunction with PT BUM Desa Indonesia.

Moving forward, as an endeavour to develop digitalisation pillar further under the BUMDes optimisation program, OJK cooperated with a team of developers to build an online marketplace at bumdesakota.id as a means to sell BUMDes products to a broader market, featuring a dashboard to monitor and evaluate BUMDes performance and finance. The web-based marketplace accommodate the uses of virtual payments.

IV.7 MANAJEMEN PERUBAHAN

IV.7.1 Program Budaya OJK

OJK menetapkan *Roadmap* Program Budaya Kerja OJK *Way* 2018-2022 pada akhir 2017. *Roadmap* ini disusun guna mengakselerasi pencapaian visi OJK *Way* 2022: "Menjadi Insan OJK yang Produktif, Profesional, dan Proaktif".

Mengacu kepada *roadmap* tersebut, dan berlandaskan nilai-nilai strategis organisasi, penyusunan dan pengelolaan Program Budaya OJK *Way* dilakukan melalui tiga aspek, yaitu perancangan program, pelaksanaan *monitoring*, dan pengelolaan media kampanye.

Pada Program Budaya Kerja 2019, OJK mengusung tema "Insan OJK Andal" yang difokuskan pada penguatan budaya belajar berkelanjutan. Tema ini ditujukan guna menguatkan kompetensi, konsistensi, kredibilitas dan ketangguhannya dalam bekerja. Sepanjang 2019, seluruh Insan OJK telah berpartisipasi dalam menjalankan program budaya yang terdiri dari:

a. OJK Cerdas
   Program pengembangan perilaku belajar berkelanjutan untuk memperkuat kompetensi dan memperluas wawasan Insan OJK yang dibutuhkan dalam melayani *stakeholders*. Sepanjang 2019, Insan OJK telah menjalankan:
   a) 1.730 program *knowledge sharing* serta program lainnya seperti *mini library*, *learning management system*, dll yang ditujukan guna memperkuat kompetensi dan memperluas wawasan Insan OJK.
   b) 146 OJK Mengajar oleh Satuan Kerja (Satker) dan gerakan edukasi oleh setiap Insan OJK yang ditujukan untuk peningkatan pengetahuan serta literasi dan edukasi keuangan bagi masyarakat Indonesia.
   c) Donasi buku anak dari Insan OJK di Kantor Pusat dan sejumlah buku lainnya oleh Insan OJK Kantor Regional dan OJK yang ditujukan untuk membangun budaya membaca sejak dini pada anak Indonesia
b. OJK Ringkas
   Program penyederhanaan proses kerja dan pengkinian informasi yang dibutuhkan untuk mempercepat proses kerja Satker atau yang memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* yang terdiri dari 146 inovasi yang ditujukan untuk mempercepat proses kerja atau memberikan nilai tambah kepada *stakeholder*, berupa:
   a. Pengembangan sistem atau aplikasi baru
   b. Pemanfaatan sistem atau aplikasi yang sudah ada
   c. Pengembangan sistem atau aplikasi yang sudah ada
   d. Perubahan proses bisnis guna percepatan kinerja

IV.7 CHANGE MANAGEMENT

IV.7.1 OJK Culture Program

OJK established its Culture Program Roadmap for 2018-2022 at the end of 2017. The roadmap was compiled to accelerate accomplishment of the OJK Way vision for 2022, to become Productive, Professional and Proactive Human Resources.

Referring to the roadmap and based on the organisation's strategic values, the OJK way culture program was formulated and managed in terms of three aspects, namely program planning, monitoring and campaign media management.

The Culture Program in 2019, entitled "Reliable OJK Staff", focused on strengthening a culture of continuous learning. The theme in 2019 aimed to strengthen competencies, consistency, credibility and resilience at work. All OJK human resources participated in the culture program in 2019 as follows:

a. OJK Cerdas
   A program to develop a culture of continuous learning in order to strengthen competencies and expand the insight necessary to serve OJK's stakeholders. In 2019, OJK employees undertook the following activities:
   a) 1,730 knowledge sharing programs and other programs, including mini libraries, learning management systems and others that aim to strengthen competency and expand insight.
   b) 146 teaching programs by work units and the education movement by each OJK employee, which aim to increase knowledge as well as financial literacy and education amongst Indonesians.
   c) Child book donations from OJK staff at head office along with various other books from regional and branch offices to create a culture of reading from an early age in Indonesia.
b. OJK Ringkas
   This program aims to simplify work processes and update information on what is required to accelerate work processes in each work unit or provide value added for the stakeholders, consisting of 146 innovations to expedite work processes or provide value added as follows:
   a) New system or application development
   b) Utilisation of existing systems or applications
   c) Development of existing systems or applications
   d) Refinement of business process to accelerate performance

c. OJK Tangkas
Program pengembangan perilaku Insan OJK yang mendukung gaya hidup *work-life balance* melalui kegiatan peningkatan kesehatan jasmani dan rohani dengan bersinergi bersama *stakeholder*/Satker/bidang lainnya. Selama 2019, 1.569 program tatap muka pendukung *work-life balance* melalui peningkatan kesehatan jasmani dan rohani dengan bersinergi bersama *stakeholder*/ Insan OJK dari Satker lain.

OJK menyelenggarakan sejumlah aktivitas guna mengakselerasi proses internalisasi kultur dan nilai-nilai strategis, yakni melalui penyelenggaraan:

1. Forum Budaya Kerja
Pertemuan tahunan yang menjadi wadah anggota Kelompok Mitra Perubahan Satker dalam bertukar pikiran dan menambah wawasan terkait metode pengelolaan program perubahan.
2. *Town Hall Meeting*
Salah satu forum komunikasi antara Anggota Dewan Komisioner (ADK) dengan Insan OJK mengenai budaya kerja dan kebijakan organisasi yang diselenggarakan secara periodik setiap triwulan. Wadah ini digunakan ADK dalam menyampaikan visi, harapan, serta pesan-pesan kepada Insan OJK dalam suasana yang santai dan bersifat kekeluargaan.

3. Inisiasi Transformasi Digital
OJK melakukan upaya dan inovasi guna mendorong transformasi proses bisnis operasional menjadi lebih cepat, fleksibel dan modern dengan dukungan sistem informasi yang handal, atau transformasi digital. Namun demikian, keberhasilan transformasi tersebut sangat tergantung pada kemampuan adaptasi Insan OJK dalam penerapan sistem baru. Upaya yang telah dilakukan antara lain:
   a. pengembangan dan distribusi media kampanye optimalisasi *virtual meeting*, dan
   b. penggunaan fitur *virtual meeting* untuk koordinasi lintas Satker.
4. Lomba Budaya Kerja dan OJK *Awards*
Perlombaan ini ditujukan untuk menciptakan iklim kerja yang sehat dan kondusif, sehingga mampu mendorong Insan OJK untuk bertindak dan melakukan yang terbaik dalam menggapai prestasi kinerja yang tinggi. Adapun hasil Lomba Budaya Kerja disampaikan pada OJK *Awards* 2019, yang merupakan ajang pemberian penghargaan bagi Satuan Kerja dan Insan OJK yang berhasil menerapkan budaya kerja, *Good Corporate Governance* (GCG), dan mencapai kinerja terbaik sepanjang tahun 2019.

c. OJK Tangkas
This program aims to promote a healthy work-life balance through physical and spiritual wellness in conjunction with other stakeholders, work units and departments.
In 2019, a total of 1,569 face-to-face programs were implemented to support a healthy work-life balance through physical and spiritual health.

OJK organises a number of activities to accelerate the process of internalising culture and strategic values as follows:

1. *Work Culture Forum*
The annual meeting is a forum for Change Partners to exchange ideas and increase insight in terms of the change program.

2. *Town Hall Meeting*
Periodic town hall meetings are one of the communication platforms between members of the Board of Commissioners and OJK employees concerning office culture and organisational policies held on a quarterly basis. Members of the board use this forum to deliver their visions, expectations and messages to OJK employees in a relaxed and familial setting.
3. *Digital Transformation Initiation*
OJK innovates to encourage fast, flexible and modern operational business process transformation to support reliable information systems or digital transformation. Nevertheless, the success of digital transformation depends heavily on the ability of OJK employees to adapt to new systems. The following efforts have been implemented:

   a. development and distribution of a media campaign to optimise virtual meetings; and
   b. use of virtual meetings to coordinate across work units.
4. *Work Culture Competition and OJK Awards*
This competition aims to create a healthy and conducive work climate, thus encouraging OJK employees to act and perform their best in terms of achieving high performance accomplishments. The results of the Work Culture Competition were delivered at the OJK Awards in 2019, which recognises work units and personnel who successfully apply the work culture and good corporate governance, while achieving the best performance in 2019.

IV.7.2 Monitoring Program Budaya

Monitoring program budaya meliputi kegiatan evaluasi, pendampingan, dan konsultansi, yang dilakukan secara berkala (triwulanan) oleh konsultan budaya internal guna mengidentifikasi permasalahan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan program budaya dan memberikan rekomendasi terbaik untuk mengatasi kendala dimaksud.

OJK mengukur tingkat keberhasilan dan memantau *progress* implementasi Program Budaya Kerja OJK *Way* 2019 melalui:

1. *Onsite* dan *Offsite Monitoring*
   Mekanisme penilaian pelaksanaan Program Budaya Kerja OJK *Way* 2019 dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja melalui *self-assessment* secara daring. Hasil penilaian tersebut diverifikasi melalui telepon kepada perwakilan Insan OJK di masing-masing Satuan Kerja. Hasil monitoring menunjukkan Indeks Kinerja Utama (IKU) Budaya OJK *wide* mencapai nilai 5.81 dari skala 6.
2. Survei Implementasi Budaya Kerja
   Penilaian ini dilakukan terkait dampak dari implementasi program budaya yang dinilai oleh *stakeholders* OJK, yakni survei OJK Cerdas yang menilai kompetensi Insan dalan melayani *stakeholders* dengan hasil 5.46 dari skala 6 dan survei OJK Ringkas untuk mengukur kualitas layanan Satker dengan capaian 5.43 dari skala 6.
3. Survei *Worklife Balance*
   Survei ini dilakukan untuk mengukur kualitas *work-life balance* Insan OJK. Hasil dari survei ini menjadi dasar rekomendasi untuk meningkatkan *engagement level* dan kualitas *work-life balance* Insan OJK. Adapun aspek yang diukur mencakup waktu kerja, *commuting hours* (waktu tempuh dari rumah ke tempat kerja), penggunaan teknologi, waktu untuk pribadi dan keluarga, kesehatan, dan komunitas.

IV.7.3 Media Kampanye Program Budaya

Media komunikasi program budaya kerja OJK *Way* adalah segala bentuk alat kampanye yang digunakan untuk mengomunikasikan ide, program, informasi atau pesan yang bersifat persuasif, terencana, dan dilakukan secara berkelanjutan dalam waktu tertentu. Hal-hal yang telah dilakukan dalam mendukung internalisasi nilai-nilai strategis OJK, antara lain:

1. Majalah Integrasi
   Majalah Integrasi merupakan media komunikasi internal dalam bentuk majalah internal bulanan yang berisikan berbagai informasi, baik implementasi program budaya kerja, kinerja dan prestasi Satker, kebijakan-kebijakan terkini yang perlu diketahui seluruh Insan OJK, maupun kegiatan lainnya.

IV.7.2 Culture Program Monitoring

Culture program monitoring involves evaluating, mentoring and consulting on a quarterly basis with internal culture consultants to identify issues/constraints that have emerged in the implementation of the cultural program and to provide the best recommendations to overcome the constraints identified.

OJK measured success and monitored progress of the OJK Way Work Culture Program in 2019 through:

1. *On-Site and Off-Site Monitoring*
   The mechanism for evaluating implementation of the OJK Way Work Culture Program in 2019 at the work unit level was conducted through an online self-assessment. The assessment results were verified via telephone conversations with staff representatives from each work unit. Monitoring revealed a Key Performance Index of 5.81 out of 6 for the OJK Wide Work Culture.
2. *Work Culture Implementation Survey*
   The survey was conducted for OJK stakeholders to assess the impact of the culture program through the OJK Cerdas Survey, which scored employee competency in terms of serving the stakeholders at 5.46 out of 6, and the OJK Ringkas Survey, which scored the service quality of work units at 5.43 out of 6.
3. *Work-Life Balance Survey*
   This survey was performed to measure the quality of the work-life balance of OJK employees. The results of the survey are used as recommendations to increase employee engagement and the quality of work-life balance. The survey probes various aspects, including working hours, commuting hours, technology use, private and family time, health and community.

IV.7.3 Culture Program Media Campaign

The OJK Way culture program communication media consists of all campaign tools used to communicate the persuasive and planned ideas, programs, information or messages continuously over time. The following initiatives have been implemented to support internalisation of OJK's strategic values:

1. *Integrasi Magazine*
   Integrasi Magazine is a monthly internal communication medium that contains information about work culture program implementation, work unit performance and achievements, the latest policies relevant to OJK employees as well as other important activities.

2. Pesan Anggota Dewan Komisioner
   Pesan Anggota Dewan Komisioner merupakan salah satu media komunikasi antara Anggota Dewan Komisioner dengan Insan OJK. Pesan berkala ini disampaikan melalui *e-mail blast*, akun instagram @ojkway, dan *website* budaya internal OJK Way. Tradisi ini diharapkan mampu menginspirasi dan memotivasi Insan OJK untuk selalu semangat berkarya dalam mengimplementasikan nilai-nilai strategis OJK.
3. Konten Media Kampanye
   Secara berkala, OJK melakukan pengkinian konten program perubahan dan budaya pada *screen saver* komputer/laptop pegawai, *lift sticker*, OJK *Way* TV, dan akun instagram @ojkway. Hal ini dilakukan agar seluruh Insan OJK dapat dengan mudah memahami, mendukung, dan pada akhirnya menjalankan program perubahan dengan sepenuh hati.

IV.8 KOMUNIKASI

IV.8.1 Komunikasi Terintegrasi

Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri keuangan yang sehat, OJK melakukan serangkaian kegiatan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan melalui berbagai media, baik cetak, *online* maupun elektronik. Publikasi yang disampaikan antara lain berupa siaran pers, konferensi pers, laporan perkembangan industri keuangan terkini, regulasi, statistik, dan kegiatan OJK.

OJK memiliki analisa kuantitatif dan kualitatif untuk setiap pemberitaan OJK di media. Analisa ini dilakukan melalui monitoring terhadap *tone* berita mengenai OJK dan Industri Keuangan secara umum pada 18 media cetak, 1.175 media *online*, 14 stasiun televisi nasional. Selama 2019, pemberitaan terkait OJK dan industri keuangan mengalami peningkatan sebesar 22,1% yang sebelumnya 24.474 menjadi 29.890 pemberitan.

2. *Board of Commissioners Messages*
   Messages from the Board of Commissioners are a communication media for members of the Board of Commissioners to inspire and motivate OJK employees in line with the strategic values. The messages are delivered through email blasts, OJK's Instagram account (@ojkway) and the internal OJK Way Culture website.

3. *Media Campaign Content*
   OJK periodically updates its change and culture program content on employee screensavers, OJK Way TV and the @ojkway Instagram account in order to ensure all OJK employees understand, support and implement the change program wholeheartedly.

IV.8. COMMUNICATION

IV.8.1 Integrated Communication

OJK continuously performs a range of integrated communication activities through various media, including print, online and electronic media. The publications are delivered in the form of press releases, press conferences, financial industry development reports, regulations, statistics and OJK activities.

OJK has a quantitative and qualitative analysis program for all articles relating to OJK that appear in the media. OJK monitors the tone of each article about OJK and the financial industry in general appearing in 18 print media, 1,175 online media and 14 national television stations. In 2019, articles about OJK and the financial industry increased 22.1% from 24,474 to 29,890.

Tone Artikel Berita
Tone of Media Articles

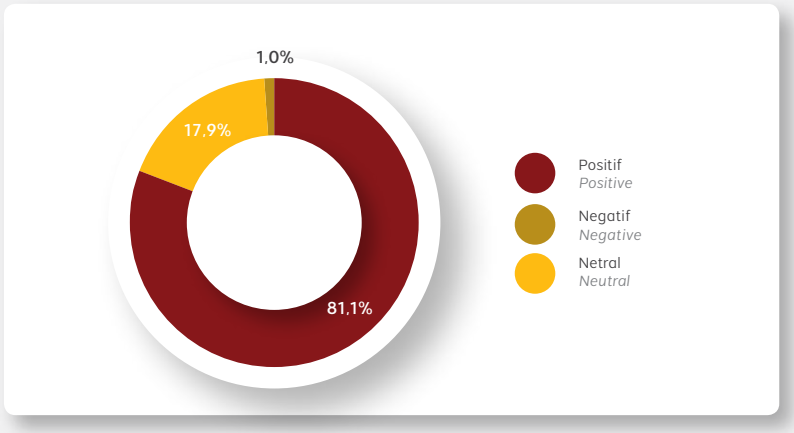

Selama periode 2019, *website* OJK mengunggah 1.151 materi yang meliputi siaran pers, regulasi, data dan statistik, pengumuman, foto kegiatan, info terkini, agenda dan sebagainya. Jumlah *page views website* OJK (www.ojk.go.id) mengalami peningkatan sebesar 42,1% menjadi 17.925.255 *page views*. Dari sisi pengguna yang mengakses *website* OJK juga mengalami peningkatan sebesar 47,5% menjadi 3.231.045 *users*.

In 2019, a total of 1,151 materials were uploaded to the official OJK website, consisting of press releases, regulations, data and statistics, announcements, activity photos, latest info, agenda items and so on. Total page views on the OJK website increased 42.1% in 2019 to 17,925,255 page views. In addition, a total of 3,231,045 users accessed the OJK website in 2019, up 47.5% on the previous year.

Statistik Pengunjung *Website* OJK Tahun 2019
OJK Website Statistics in 2019

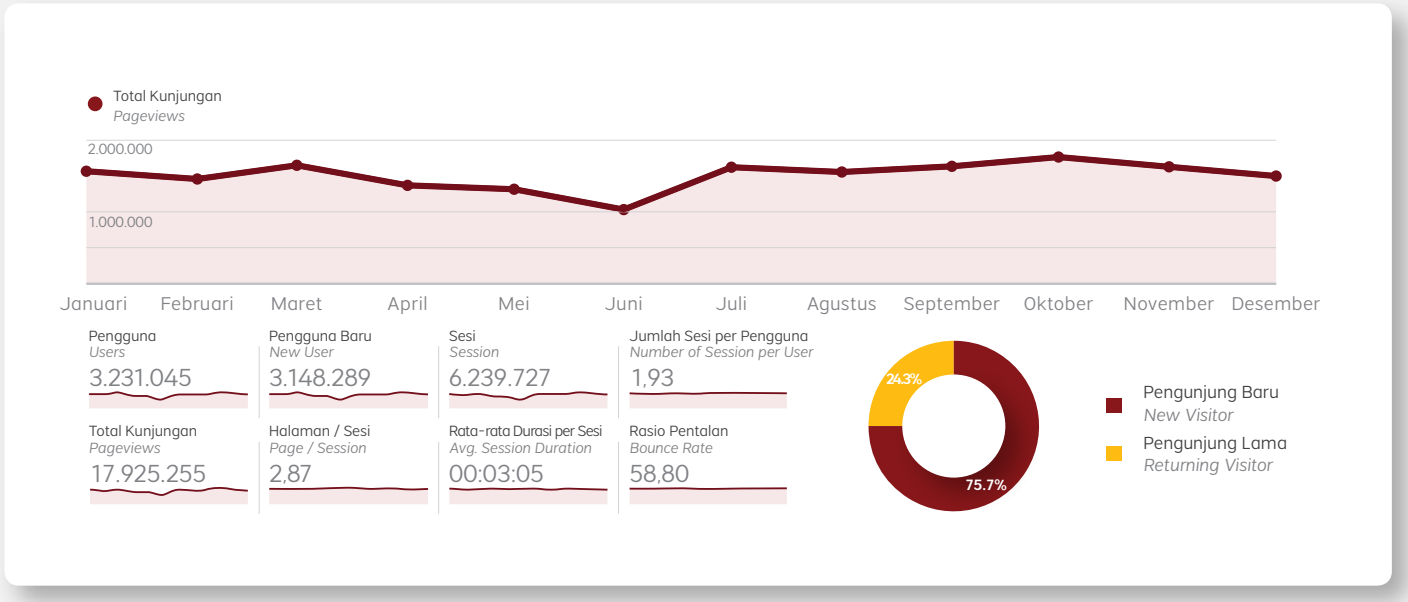

Terkait diseminasi informasi melalui media sosial, selama 2019 OJK melakukan publikasi sebanyak 1.783 materi yang meliputi infografis, kultweet, foto dan video kegiatan OJK. Sementara itu, perkembangan media sosial pada 2019 tercatat cukup baik, dengan akun twitter @ojkindonesia memiliki lebih dari 58.000 *followers*, akun instagram @ojkindonesia lebih dari 322.000 *followers*, dan akun facebook @official.ojk lebih dari 52.400 *followers*.

Concerning information dissemination through social media, OJK published 1,783 materials in 2019, including infographics, tweets, photos and videos of OJK activities. Meanwhile, OJK continued to develop its social media presence in 2019, with the official Twitter account, @ojkindonesia, garnering over 58,000 followers, the Instagram account, @ojkindonesia, more than 322,000 followers and the Facebook page, @official.ojk, more than 52,400 followers.

IV.8.2 OJK TV

OJK TV merupakan salah satu medium komunikasi OJK untuk menyiarkan kebijakan, program dan kegiatan OJK yang dikemas dalam bentuk video dokumentasi dan peliputan berita dan didiseminasikan melalui kanal Youtube dengan akun Jasa Keuangan dan disiarkan di IDX *Channel*.

IV.8.2 OJK TV

OJK TV is a communication media that broadcasts OJK policies, programs and activities as documentary and news videos disseminated through the official YouTube channel 'Financial Services' and broadcast on the IDX channel.

Selama 2019, OJK TV telah memproduksi 474 liputan yang terdiri dari 229 liputan OJK *Wide*, 91 liputan di bidang IKNB, 71 liputan di bidang EPK, 557 liputan di bidang Pasar Modal dan 28 liputan di bidang Perbankan. Selain itu, kanal youtube Jasa Keuangan mendapatkan 2.001 *subscribers* dengan jumlah *views* 119.939 dan durasi waktu 3.597,7 jam tayang.

In 2019, OJK TV produced 474 videos, including 229 OJK Wide, 91 NBFI, 71 CPE, 557 capital market and 28 banking industry videos. In addition, the Financial Services YouTube channel acquired 2,001 new subscribers and 119,939 total views with 3,597.7 hours of watch time (audience retention).

IV.8.3 Media *Briefing* (Bronis) dan Siaran Pers

OJK menerbitkan 63 siaran pers di berbagai bidang antara lain 30 OJK *Wide*, 10 EPK, 9 Pasar Modal, 9 Perbankan, dan 5 IKNB. Selain itu, OJK juga telah menyelenggarakan 24 jumpa pers atau media briefing yang terdiri dari 7 Pasar Modal, 6 OJK Wide, 5, IKNB, 5 EPK, dan 1 Perbankan. Selain dimuat pada media massa, materi siaran pers tersebut selengkapnya dapat diunduh melalui *website* www.ojk.go.id.

IV.8.3 Media Briefings (Bronis) and Press Releases

OJK published 63 press releases, consisting of 30 OJK Wide, 10 CPE, 9 Capital Market, 9 Banking Industry and 5 NBFI press releases. In addition, OJK also held 24 media briefings, consisting of 7 Capital Market, 6 OJK Wide, 5 NBFI, 5 CPE and 1 Banking Industry media briefing. In addition to mass media, the press releases were also uploaded in full to the official OJK website, ojk.go.id.

IV.9 HUBUNGAN KELEMBAGAAN

IV.9.1 Kerja Sama Domestik

Koordinasi hubungan kelembagaan merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara sehat, *sustainable*, dan stabil. OJK melakukan koordinasi dan bekerja sama aktif dengan berbagai institusi negara dan pemerintah, lembaga dan organisasi, serta komponen masyarakat di dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dengan tujuan memperkuat dan mengefektifkan peran OJK dalam mengatur dan mengawal SJK guna melindungi kepentingan masyarakat luas.

Selama 2019 OJK menyepakati 10 kerja sama dengan berbagai instansi dan perguruan tinggi, antara lain sebagai berikut:

IV.9 INSTITUTIONAL RELATIONSHIPS

IV.9.1 Domestic Cooperation

Coordinated institutional relationships are key to creating and maintaining healthy, sustainable and stable financial system growth. OJK actively coordinates and cooperates with various state and government apparatus, institutions and organisations as well as elements of the public to support task implementation by strengthening and enhancing OJK's role in terms of regulating and supervising the financial services sector in order to protect the wider public interest.

In 2019, OJK cooperated with various institutions and universities as follows:

Kerja Sama Kelembagaan Domestik
Domestic Institutional Cooperation

No	Perihal Regarding	Counterpart Counterpart
1	Pelaksanaan Fungsi dan Tugas Task Implementation and Function	Lembaga Penjamin Simpanan Deposit Insurance Corporation (LPS)
2	Penguatan Tugas dan Kewenangan Strengthening Duties and Authority	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia
3	Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Funding	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Centre (INTRAC)
4	Pelatihan Hakim di Bidang Kebanksentralan dan Sektor Jasa Keuangan Training for Judges on Central Banking and the Financial Services Sector	Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bank Indonesia, Dan Otoritas Jasa Keuangan Supreme Court of the Republic of Indonesia, Bank Indonesia, Financial Services Authority (OJK)
5	Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Financial Services Sector Development, Increasing Financial Literacy and Consumer Protection in the Financial Services Sector	Universitas Sebelas Maret Sebelas Maret University
6	Penggunaan Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Utilisation of State Property by the Ministry of Finance	Kementerian Keuangan Ministry of Finance
7	Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Peningkatan Literasi Keuangan dan Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan Financial Services Sector Development, Increasing Financial Literacy and Consumer Protection in the Financial Services Sector	Universitas Bengkulu Bengkulu University
8	Pengembangan Standar Akuntasi Keuangan dan Profesi Akuntan dalam Mendukung Pelaksanaan Sektor Jasa Keuangan Development of Financial Accounting Standards and Accountancy to support the Financial Services Sector	Ikatan Akuntan Indonesia Institute of Indonesian Chartered Accountants (IAI)

No	Perihal Regarding	Counterpart Counterpart
9	Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Serta Perlindungan Konsumen Melalui Optimalisasi Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Increasing Financial Literacy and Inclusion, and Consumer Protection by Optimising the Role of Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD)	Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Directorate General of Regional Finance, Ministry of Home Affairs
10	Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Eletronik Dalam Lingkup Tugas Otoritas Jasa Keuangan Utilisation of Citizenship Identity Numbers (NIK), Population Data and Electronic ID Cards within the Purview of the Indonesian Financial Services Authority (OJK)	Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Directorate General of Population and Civil Registration of the Republic of Indonesia

OJK juga menjalin hubungan kelembagaan dengan menyelenggarakan 334 kegiatan kelembagaan bersama yang melibatkan beberapa lembaga negara, antara lain:

- Dewan Perwakilan Rakyat;
- Kementerian Keuangan;
- Mahkamah Agung;
- Bank Indonesia;
- Lembaga Penjamin Simpanan;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pemerintah Daerah; dan
- Industri Jasa Keuangan.

OJK has also established and developed institutional relationships through 334 joint institutional activities with various state apparatus as follows:

- *People's Representative Council (DPR)*
- *Ministry of Finance*
- *Supreme Court*
- *Bank Indonesia*
- *Deposit Insurance Corporation (LPS)*
- *Regional Legislative Council (DPRD)*
- *Local Government*
- *Financial Services Industry*

Kegiatan kelembagaan yang telah dilakukan selama 2019 mencakup Rapat Kerja dan *Focus Group Discussion* bersama Komisi XI DPR RI yang dilakukan secara rutin, Sosialisasi dan Kunjungan Kerja bersama Anggota Komisi XI DPR RI ke wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau dan Sulawesi Selatan. Tema yang disampaikan dalam kegiatan tersebut antara lain terkait: Peran dan fungsi OJK melalui pagelaran wayang kulit, Perkembangan industri jasa keuangan terkini, Akses Pembiayaan, dan Perlindungan konsumen SJK penyelesaian sengketa.

Institutional activities in 2019 included regular work meetings and Focus Group Discussions (FGD) with Commission XI of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR RI) as well as socialisation activities and work visits to West Java, East Java, Bali, West Sumatra, North Sumatra, South Sumatra, Riau Islands and South Sulawesi in conjunction with members of Commission XI of the People's Representative Council. The theme of the activities included the role and function of OJK through puppet performances, latest financial services industry developments, access to finance, consumer protection and dispute resolution.

IV.9.2 Kerja Sama Internasional

a. Kerja Sama Bilateral dan Regional

OJK senantiasa memperkuat koordinasi dengan berbagai institusi internasional dalam hal kerja sama bilateral dan regional. Bentuk kerja sama yang dilakukan di antaranya adalah penguatan peran dan posisi OJK dalam perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI) terkait sektor jasa keuangan (SJK) dan perjanjian Kerja Sama kelembagaan OJK dengan otoritas pengawas lembaga jasa keuangan asing maupun lembaga internasional.

1) Penguatan Peran dan Posisi OJK dalam Perundingan PPI

OJK mendukung penyelesaian perundingan dua PPI bilateral dengan Australia dan EFTA. Kedua PPI yang sedang dalam proses ratifikasi di DPR-RI tersebut diharapkan dapat menciptakan *market access*

IV.9.2 International Cooperation

a. Bilateral and Regional Cooperation

OJK constantly strengthens coordination with various international institutions through bilateral and regional cooperation. International cooperation is pursued to strengthen OJK's role and position in terms of international trade agreement negotiations relating to the financial services sector as well as institutional cooperation agreements between OJK and other foreign financial services authorities and international institutions.

1) Strengthening OJK's role and position in terms of international trade agreement negotiations

OJK supports the completion of two bilateral economic partnership agreements with Australia and the European Free trade Association (EFTA). Both agreements, which are currently in the ratification process

baru bagi lembaga jasa keuangan (LJK) Indonesia untuk melakukan ekspansi usaha. OJK juga berperan aktif menjaga posisi SJK Indonesia dalam enam PPI bilateral/regional lainya yang sedang dalam proses perundingan.

with the People's Representative Council (DPR), are expected to create access to new markets for financial services institutions in Indonesia to expand into. In addition, OJK also actively protects and maintains the position of Indonesia's financial services sector in six other bilateral/ regional economic partnership agreements currently under negotiation.

Kerja Sama Kelembagaan Internasional
International Institutional Cooperation

Penguatan Peran dan Posisi dalam Perundingan Perjanjian Perdagangan Internasional (PPI) *Strengthening OJK's Role and Position in terms of International Trade Agreement Negotiations*			
No	PPI Economic Partnership Agreement	Counterpart Counterpart	Substansi Substance
1	Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) (telah ditandatangani) Indonesia - Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) (signed)	Australia Australia	Terbukanya *market access* bagi lembaga jasa keuangan (LJK) Indonesia untuk membuka jaringan kantor di Australia. Open market access for Indonesia's financial services institutions, including the office network in Australia.
2	Indonesia-EFTA CEPA (IE-CEPA) (telah ditandatangani) Indonesia - EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA) (signed)	European Free Trade Association (EFTA) States: Swiss, Norwegia, Liechtenstein dan Islandia European Free trade Association (EFTA) States: Switzerland, Norway, Lichtenstein and Iceland	Terbukanya *market access* bagi LJK Indonesia untuk membuka jaringan kantor di negara-negara EFTA. Open market access for Indonesia's financial services institutions to open office networks in EFTA states.
3	Indonesia-Korea CEPA (IK-CEPA) (dalam proses perundingan) Indonesia - South Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) (under negotiation)	Korea Selatan South Korea	Negosiasi teks perjanjian dan *market access* di negara mitra yang sesuai dengan kebutuhan LJK Indonesia. Negotiating the text of the agreement and market access in the partner country in line with the needs of Indonesia's financial services institutions.
4	Indonesia-European Union CEPA (IEU-CEPA) (dalam proses perundingan) Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) (under negotiation)	Uni Eropa European Union	Negosiasi teks perjanjian dan *market access* di negara-negara mitra yang sesuai dengan kebutuhan LJK Indonesia. Negotiating the text of the agreement and market access in partner countries in line with the needs of Indonesia's financial services institutions.
5	Amendment of the General Review of Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) (dalam proses perundingan) Amendment of the General Review of the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) (under negotiation)	Jepang Japan	Negosiasi pembukaan *market access* untuk tenaga kerja asal Indonesia di sektor perbankan Jepang. Negotiating market access for Indonesian workers in Japan's banking sector.
6	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) (dalam proses *legal scrubbing*) Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) (legal scrubbing)	Negara Anggota ASEAN dan 6 negara mitra (China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru) ASEAN member states and six trading partners (China, Japan, South Korea, India, Australia and New Zealand)	Negosiasi teks perjanjian dan *market access* di negara-negara mitra yang sesuai dengan kebutuhan LJK Indonesia. Negotiating the text of the agreement and market access in partner countries in line with the needs of Indonesia's financial services institutions.
7	Working Committee on Financial Services Liberalisation (WC-FSL) (dalam proses perundingan) Working Committee on Financial Services Liberalisation (WC-FSL) (under negotiation)	Negara Anggota ASEAN ASEAN member states	Negosiasi *market access* sektor jasa keuangan di negara-negara mitra untuk paket kesembilan ASEAN Framework Agreement on Services - Financial Services Liberalisation (AFAS-FSL). Negotiating market access for the financial services sector in Partner countries for the 9th Package of the ASEAN Framework Agreement on Services - Financial Services Liberalisation (AFAS-FSL).
8	Bilateral Agreement on ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) (dalam proses perundingan) Bilateral Agreement on ASEAN Banking Integration Framework (ABIF) (under negotiation)	Bank of Thailand Bank of Thailand	Negosiasi alternatif skema kehadiran LJK Indonesia di Thailand melalui skema ABIF. Negotiating alternative schemes for the presence of Indonesia's financial services institutions in Thailand through ABIF.

2) Penguatan Hubungan Kerja Sama Kelembagaan OJK dengan Otoritas Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Asing Maupun Lembaga Internasional

i. Penjajakan Perjanjian Kerja Sama Internasional
OJK sebagai otoritas pengawas lembaga jasa keuangan, berupaya meningkatkan pengawasan lintas batas di sektor jasa keuangan. Pada 2019, telah dilakukan perundingan negosiasi dengan beberapa otoritas pengawas lembaga jasa keuangan asing yaitu:
- Hong Kong Monetary Authority,
- Monetary Authority Singapore,
- Securities Commission Malaysia,
- Commission de Surveillance du Secteur Financier,
- Bank of Thailand, dan
- Autoriti Monetari Brunei Darussalam.

Ruang lingkup kerja sama tersebut adalah antara lain pengawasan lintas batas, pendirian lembaga jasa keuangan lintas batas, pertukaran informasi, Kerja Sama bidang financial technology serta peningkatan kapasitas pegawai.

ii. Implementasi Kerja Sama Bilateral
Dalam rangka memperkuat kerja sama yang telah dimiliki OJK, telah dilaksanakan pertemuan rutin dengan otoritas pengawas lembaga jasa keuangan asing untuk membahas isu ekonomi dunia antara lain dengan:
Pengawas lembaga jasa keuangan:
- Korea Financial Services Commission,
- Korea Financial Supervisory Service,
- Bank of Thailand,
- Banco Sentral ng Pilipinas,
- China Banking and Insurance Regulatory Commission,
- Vietnam National Financial Supervisory Commission; dan
- Japan Financial Services Agency.

Dalam rangka ASEAN Banking Integration Framework (ABIF), Ketua Dewan Komisioner OJK melakukan *bilateral meeting* dengan Gubernur Bank of Thailand (BoT) membahas penguatan kerja sama peran sektor jasa keuangan di kedua negara.

iii. Organisasi internasional:
- OJK bekerja sama dengan *International Labour Organization* (ILO) menjalankan *Promoting Micro and Small Enterprises through Improved Entrepreneurs' Access to Financial Service* (PROMISE IMPACT) *project*, sebagai implementasi *Memorandum of Understanding* OJK dan ILO. PROMISE IMPACT merupakan *multi-years* program yang bertujuan meningkatkan kinerja usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) melalui peningkatan inklusi dan akses keuangan, yang pada akhirnya dapat memperluas kesempatan kerja.

2) Strengthening Institutional Cooperation between OJK and other Foreign Financial Services Authorities as well as International Institutions

i. International Cooperation Agreements
As the supervisory authority for the financial services sector, OJK strives to increase cross-border supervision of the financial services sector. In 2019, OJK negotiated with several foreign financial services sector supervisory authorities as follows:
- *Hong Kong Monetary Authority*
- *Monetary Authority of Singapore*
- *Securities Commission Malaysia*
- *Commission de Surveillance du Sectuer Financier*
- *Bank of Thailand*
- *Monetary Authority of Brunei Darussalam*

The scope of cooperation includes cross-border supervision, establishment of cross-border financial services institutions, information exchange/sharing, cooperation in the area of FinTech and increasing employee capacity.

ii. Bilateral Cooperation
Seeking to strengthen existing cooperation, OJK regularly holds meetings with foreign financial services industry supervisory authorities to discuss a range of global economic issues including:

Supervision of Financial Services Institutions:
- *South Korea Financial Services Commission*
- *South Korea Financial Supervisory Service*
- *Bank of Thailand*
- *Bangko Sentral ng Pilipinas*
- *China Banking and Insurance Regulatory Commission*
- *Vietnam National Financial Supervisory Commission*
- *Japan Financial Services Agency*

As part of the ASEAN Banking Integration Framework (ABIF), the Chairman of the OJK Board of Commissioners held a bilateral meeting with the Governor of the Bank of Thailand to discuss strengthening cooperation concerning the roles of the financial services sector in each country.

iii. International Organisations:
- *OJK cooperated with the International Labour Organisation (ILO) to Promote Micro and Small Enterprises through Improved Entrepreneurs' Access to Financial Services (PROMISE IMPACTS) as part of a Memorandum of Understanding between OJK and ILO. The PROMISE IMPACT is a multi-year program to improve the performance of micro, small and medium enterprises (MSME) by increasing financial inclusion and access, which will ultimately create job opportunities.*

- Dalam rangkaian acara IMF-*World Bank Annual Meetings* di Washington D.C., Amerika Serikat, OJK melakukan beberapa pertemuan bilateral untuk peningkatan kerja sama dengan beberapa otoritas dan lembaga internasional. OJK juga melakukan *bilateral meeting* dengan *International Finance Corporation* (IFC–World Bank Group) dan berkomitmen untuk melanjutkan Kerja Sama dalam *sustainable finance* di Indonesia khususnya pengembangan *Roadmap Sustainable Finance* Tahap II.
- Pada 2019, OJK melakukan *high level meetings* dengan *Vice President* dan *senior level management Asian Development Bank* (ADB) di Manila, Filipina serta melakukan diskusi untuk potensi Kerja Sama khususnya *municipal bonds* dan *infrastucture financing*.
- Selain itu, guna mendukung program pemerintah Indonesia, OJK secara aktif berpartisipasi dalam beberapa forum bilateral Indonesia dengan pemerintah asing (antara lain Rusia, Iran, dan Uganda), serta organisasi internasional (antara lain World Bank dan ADB).

b. Kerja Sama Multilateral

1) Penerapan *Best Practice* Standar Internasional

Sebagai anggota G-20, Indonesia menjadi anggota berbagai fora keuangan internasional dan berkomitmen mengimplementasikan inisiatif dan standar yang dibuat fora dalam kerangka *Global Financial Sector Reform* (GFSR). Keanggotaan OJK penting guna dapat memahami, memberi masukan, dan mempertimbangkan bentuk implementasi yang terbaik standar dimaksud dalam konteks Indonesia. Dalam hal ini, OJK mengacu pada prinsip *best fit*.

Dalam rangka penerapan *best practice* standar internasional tersebut, saat ini OJK menjadi anggota pada fora internasional antara lain sebagai berikut:

- Financial Stability Board (FSB);
- Basel Committee on Banking Supervision (BCBS);
- Islamic Financial Service Board (IFSB); International Organisation of Securities Commissions (IOSCO);
- The International Financial Consumer Protection Organisation (FinConet); International Capital Market Association (ICMA);
- International Association of Insurance Supervisors (IAIS);
- ASEAN Insurance Training and Reasearch Institute (AITRI);
- International Organization of Pension Supervisors (IOPS);
- International Network on Financial Education (INFE);
- International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation; dan
- The Insurance Information and Ratemaking Forum of Asia (IIRFA).

- *At the IMF-World Bank Annual Meetings in Washington DC, United States, OJK held several bilateral meetings to increase cooperation with international authorities and institutions. OJK also had a bilateral meeting with the International Finance Corporation (IFC), World Bank Group and committed to maintain cooperation concerning sustainable finance in Indonesia, particularly in terms of developing the Phase II Sustainable Finance Roadmap.*
- *In 2019, OJK conducted high-level meetings with the vice president and senior-level management of Asian Development Bank (ADB) in Manila, the Philippines, and discussed potential cooperation in terms of municipal bonds and infrastructure financing.*
- *To support government programs in Indonesia, OJK actively participated in several bilateral forums with foreign governments, including Russia, Iran and Uganda, as well as international organisations, including the World Bank and ADB.*

b. Multilateral Cooperation

1) Setting International Best Practices and Standards

As a G20 member, Indonesia is also a member of various international financial forums and committees to implement the initiatives and standards set as part of the Global Financial Sector Reforms (GFSR). OJK membership is important to understand, provide inputs and consider the best form of implementation for standards in the Indonesian context. To that end, OJK refers to best fit principles.

When applying best international practices and standards, OJK is currently a member of the following international forums:

- *Financial Stability Board (FSB)*
- *Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)*
- *Islamic Financial Services Board (IFSB) - International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)*
- *The International Financial Consumer Protection Organisation (FinConet) - International Capital Market Association (ICMA)*
- *International Association of insurance supervisors (IAIS)*
- *ASEAN Insurance Training and Research Institute (AITRI)*
- *International Organisation of Pension Supervisors (IOPS)*
- *International Network on Financial Education (INFE)*
- *International Financial Reporting Standards (IFRS) Foundation*
- *The Insurance Information and Ratemaking Forum of Asia (IIRFA)*

- *Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks* (EMEAP) dan
- *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) *Corporate Governance Committee*

Dalam rangka memantau implementasi standar oleh anggota fora tertentu, beberapa fora di atas melakukan asesmen berkala. Pada tahun 2019, Indonesia menjalani 2 (dua) asessmen yaitu IMF *Article* IV *Mission* dan *Regulatory Consistency Assessment Programme* (RCAP)

2) *Technical Assistance* dari Donor Asing
Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugasnya, OJK mengelola program *Technical Assistance* (TA) yang diberikan oleh berbagai lembaga internasional.

Sepanjang 2019 OJK menerima penawaran dan telah memanfaatkan beberapa TA dari berbagai lembaga internasional antara lain: (i) *Asian Development Bank* (ADB); (ii) *World Bank Group* (WB); (iii) *International Monetary Fund* (IMF); (iv) *Australian Securities & Investment Commission* (ASIC) melalui *Australia Indonesia Partnership for Economic Development* (PROSPERA); (v) *Bill and Melinda Gates Foundation* (BMGF); (vi) *International Finance Corporation* (IFC); (vii) ASEAN *Secretariat*.

Format kerja sama dengan lembaga Internasional meliputi berbagai kegiatan, antara lain dalam rangka memperkuat kerangka pengawasan dan pengaturan OJK, pengembangan industri di sektor jasa keuangan, program pengembangan kapasitas SDM maupun program kerja sama yang melibatkan beberapa kementerian dan institusi/lembaga lain.

Untuk menilai efektifitas program TA di Indonesia, beberapa lembaga donor melakukan program evaluasi yang dilakukan oleh konsultan independen. Pada 2019, ADB melaksanakan *Country Assistance Program Evaluation for Indonesia* (CAPE) dan *Sector Assistance Program Evaluation for Indonesia* (SAPE).

3) Penguatan Hubungan Investor dan Pemegang Kepentingan Global
Memahami pentingnya peran investor dan pemegang kepentingan (*stakeholder*) global, OJK berupaya untuk menjaga hubungan tersebut dengan melayani permintaan pertemuan dan informasi yang disampaikan oleh para investor dan seluruh pemegang kepentingan global dalam bentuk badan maupun perorangan.

Investor dan pemegang kepentingan global termasuk di antaranya Lembaga Pemeringkat Global seperti:
- Standard & Poor's Global Ratings (S&P),
- Fitch Ratings,
- Moody's,

- *Executives' Meeting of East Asia Pacific Central Banks (EMEAP)*
- *The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Corporate Governance Committee*

Several of the forums mentioned conduct periodic assessments to monitor standards implementation by the members. In 2019, Indonesia participated in two assessments, namely the IMF Article IV Mission and the Regulatory Consistency Assessment Program (RCAP).

2) Technical Assistance from Foreign Donors
Supporting task implementation, OJK also manages technical assistance programs provided by various international institutions.

In 2019, OJK received offers and accepted several technical assistance programs from various international organisations as follows: (i) Asian Development Bank (ADB); (ii) World Bank Group (WB); (iii) International Monetary Fund (IMF); (iv) Australian Securities and Investment Commission (ASIC) through the Australia-Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA); (v) Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF); (vi) International Finance Corporation (IFC); and (vii) ASEAN Secretariat.

The format of cooperation with international institutions involves various activities to strengthen OJK's supervisory and regulatory framework, develop industries in the financial services sector, develop HR capacity as well as other programs involving various government ministries and agencies, amongst others.

To evaluate the effectiveness of technical assistance programs in Indonesia, various donor institutions perform evaluations conducted by independent consultants. In 2019, ADB implemented its Country Assistance Program Evaluation for Indonesia (CAPE) and Sector Assistance Program Evaluation for Indonesia (SAPE).

3) Strengthening Global Investor and Stakeholder Relations
Understanding the important role global investors and stakeholders play, OJK forges mutually beneficial connections by servicing requests for meetings an information submitted by individual and institutional global investors and stakeholders.

Global investors and stakeholders include the following international rating agencies:
- *Standard & Poor's Global Ratings (S&P)*
- *Fitch Ratings*
- *Moody's*

- Rating & Investment Information (R&I),
- Japan Credit Rating Agency (JCR)

Bersama dengan *Investor Relation Unit* (IRU) Nasional, IRU OJK turut menjaga persepsi positif lembaga pemeringkat global atas IJK di Indonesia yang akan berdampak pada penentuan peringkat *Sovereign Credit Rating Indonesia*.

Pada 2019, OJK telah melayani kunjungan dan permintaan informasi dari berbagai lembaga dan individu dengan rincian sebagai berikut:
- 42 kunjungan investor.
- 34 kunjungan non-investor (organisasi/badan dunia, otoritas lain, kedutaan asing, lembaga riset, dsb)
- 9 kunjungan lembaga pemeringkat global

Untuk menilai efektifitas pelaksanaan pelayanan secara akurat, seluruh pihak yang dilayani OJK mengisi survei kepuasan yang dilaksanakan secara daring segera setelah pelayanan diberikan.

- *Rating & Investment Information (R&I)*
- *Japan Credit Rating Agency (JCR)*

In conjunction with the National Investor Relations Unit (IRU), the OJK IRU maintains a positive perception amongst global rating agencies concerning financial services institutions in Indonesia which are perceived plays an important role in determining the Sovereign Credit Rating of Indonesia.

In 2019, OJK received visitors and responded to requests for information from various institutions and individuals as follows:
- *42 visits by investors*
- *34 visits by non-investors (international organisations/agencies, other authorities, foreign embassies, research institutions)*
- *9 visits by global rating agencies*

To accurately evaluate the effectiveness of such services, all parties visiting OJK are required to complete an online satisfaction survey upon conclusion of the visit.

IV.10 PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

IV.10.1 Komposisi SDM

Jumlah Pegawai OJK berjumlah 3.868 Pegawai. Berikut adalah komposisi Pegawai OJK berdasarkan Penempatan Kantor Pusat dan Daerah.

IV.10 ORGANISATIONAL AND HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT

IV.10.1 Human Resource Composition

OJK employs a total staff of 3,868 as follows.

Komposisi SDM berdasarkan Bidang

Human Resource Composition by Sector

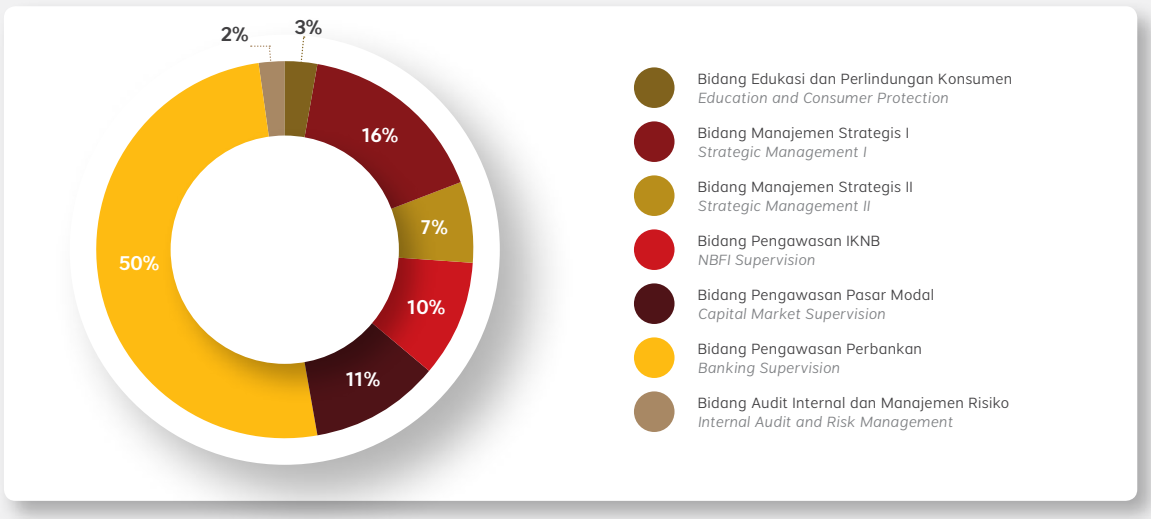

Komposisi SDM berdasarkan Usia

Human Resource Composition by Age

Usia Age	Jumlah Total	Persentase Percentage
20-30	1.413	36,53%
31-40	1.498	38,73%
41-50	544	14,06%
51-60	410	10,60%
>60	3	0,08%
TOTAL	3.868	100%

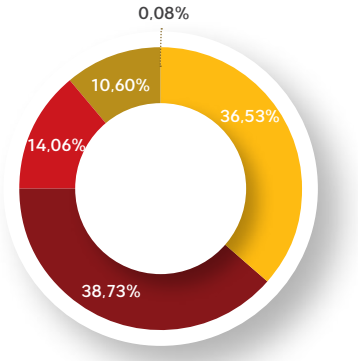

Komposisi SDM berdasarkan Jenis Kelamin

Human Resource Composition by Gender

Sektor Sector	Pria Male	Wanita Female
Bidang Manajemen Strategis I Strategic Management I	349	281
Bidang Manajemen Strategis II Strategic Management II	177	111
Bidang Pengawasan Perbankan Banking Supervision	1.010	915
Bidang Pengawasan IKNB NBFI Supervision	181	212
Bidang Pengawasan Pasar Modal Capital Market Supervision	215	204
Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko Internal Audit and Risk Management	37	41
Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Education and Consumer Protection	64	71

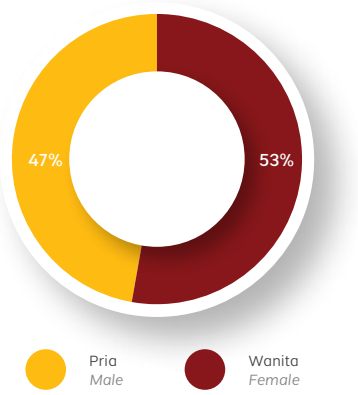

Komposisi SDM berdasarkan Tingkat Pendidikan

Human Resource Composition by Educational Background

Tingkat Pendidikan Education Level	Jumlah Total	Persentase Percentage
SLTA High School Diploma	82	2.12%
Diploma I-IV Associate/Baccalaureate Degree	265	6.85%
Sarjana Bachelor's Degree	2.562	66.24%
Pasca Sarjana Master's Degree	931	24.07%
Doktoral Doctoral Degree	28	0.72%
Total	3.868	100%

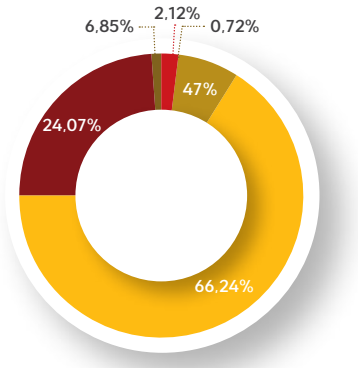

IV.10.2 Pengembangan Organisasi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsinya, OJK terus memperbaiki tata kelola internal, salah satunya dengan melakukan optimalisasi struktur organisasi. Pada 2019, OJK melakukan kajian mengenai penataan organisasi antara lain terkait hal-hal sebagai berikut:

1. Penguatan fungsi pengawasan pada Bidang Pengawasan IKNB
2. Penguatan fungsi statistik dan sistem informasi pada Bidang Pengawasan Pasar Modal.
3. Penyesuaian tugas pokok Satuan Kerja pada Bidang Manajemen Strategis I, Manajemen Strategis II, dan Perbankan Syariah; dan
4. Manajemen Kelangsungan Bisnis (*Business Continuity Plan*).

Selain itu, OJK juga melakukan penyesuaian peraturan penampilan pegawai yang meliputi pakaian kerja harian dengan mempertimbangkan dinamika organisasi, aspirasi, dan profil demografis terkini pegawai, serta tetap memperhatikan citra dan profesionalisme lembaga.

IV.10.3 Pengelolaan SDM

a. Pemenuhan SDM melalui *Talent Scouting*
   Dalam rangka menjaga kesinambungan kinerja organisasi, OJK melakukan pemenuhan SDM untuk mengisi lowongan jabatan melalui pola promosi, mutasi, dan rotasi. Di samping itu, untuk memenuhi kebutuhan SDM pada level staf, pada 2019 OJK juga melakukan penerimaan pegawai melalui jalur umum dengan metode penelusuran bakat (*talent scouting*).

   Sebanyak 112 Calon Pegawai OJK direkrut dari 33 perguruan tinggi negeri dengan memperhatikan keterwakilan daerah yang memiliki kantor OJK dan 10 perguruan tinggi swasta yang termasuk dalam Peringkat 10 Besar Nasional di Indonesia.

b. Pendidikan Formal Pegawai
   OJK senantiasa berupaya untuk mendorong pengembangan kompetensi pegawai, di antaranya melalui peningkatan basis pengetahuan akademis. Setiap tahun OJK melakukan seleksi bagi Pegawai yang akan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dengan skema pemberian beasiswa sesuai ketentuan. Pada 2019, sebanyak 21 pegawai lolos seleksi pendidikan formal sebagaimana tabel berikut:

IV.10.2 Organisational Development

To improve the effective and efficient implementation of duties and function, OJK constantly improves organisational governance by optimising the organisational structure. In 2019, OJK reviewed it is organisational structure in relation to the following aspects:

1. *Strengthening the NBFI supervision function;*
2. *Strengthening the statistical function and information systems in terms of capital market supervision;*
3. *Refining the core duties of work units in Strategic Management I, Strategic Management II and Islamic banking; and*
4. *Business Continuity Management (Business Continuity Plan).*

In addition, OJK also refined the employee dress code based on the dynamics, aspirations and demographic profile of the organisation, while maintaining the organisation's image and professionalism.

IV.10.3 Human Capital Management

a. *Recruiting Human Resources through Talent Scouting*
   To maintain organisational continuity, OJK recruits human resources to fill officer positions through promotions, transfers and rotation. In addition, OJK staff were recruited in 2019 through talent scouting.

   A total of 112 candidate employees were recruited from 33 state universities in regions represented by an OJK office as well as from 10 of the highest rated universities nationally in Indonesia.

b. *Formal Employee Education*
   OJK constantly strives to develop employee competencies by expanding academic knowledge. Each year, OJK selects various employees for formal higher education through scholarships in accordance with prevailing regulations. In 2019, a total of 21 employees passed the formal higher education selection process as follows:

Beasiswa Pendidikan Formal Pegawai

Employee Formal Education Scholarships

SKIM Beasiswa Scholarship Scheme	Jenjang Pendidikan Type of Degree	Jumlah Total
SKIM 1 (Program Pendidikan Formal Dengan Beasiswa OJK Secara Penuh / Formal Education Program With OJK Full Scholarship)	S2 (Master)	10
SKIM 2 (Program Pendidikan Formal Dengan Beasiswa Dari Pihak Lain, OJK Memberikan Selisih Antara Jumlah yang Diberikan Oleh Pihak Lain Dengan Beasiswa OJK / Formal Education Program With Scholarships From Other Parties, OJK Provides The Deviation Between The Amount Given By Other Parties With OJK Scholarships)	S2 (Master)	5
SKIM 3 (Program Pendidikan Formal Dengan Beasiswa Dari Pihak Lain Secara Penuh / Formal Education Program With Full Scholarship From Other Parties)	S2 (Master)	5
SKIM 4 (Program Pendidikan Formal Atas Inisiatif Sendiri Dengan Beasiswa Penggantian Biaya Pendidikan Formal (Penggantian) Dari OJK / Formal Education Program On Self Initiative With Reimbursement Scholarship From OJK)	S2 (Master)	1
Total		**21**

c. Program Penugasan
Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan peningkatan pengalaman, kompetensi teknis dan perilaku pada Pegawai melalui pemberian tanggung jawab pelaksanaan tugas tertentu atau penempatan posisi tertentu pada internal institusi maupun institusi eksternal dalam dan luar negeri. Selama 2019, OJK menugaskan 57 Pegawai untuk mengikuti program penugasan di lembaga/institusi baik di dalam atau di luar negeri antara lain Bank Indonesia *Institute*, Telkom Indonesia, APRA, Japan Financial Services Agency, Korea Financial Supervisory Service, dan GLOPAC.

d. Program Asesmen SDM
Selama 2019, OJK melaksanakan asesmen terhadap 87 pejabat. Tujuan dari penyelenggaraan asesmen adalah untuk melengkapi data profil pegawai dalam rangka pengembangan SDM di masa yang akan datang. Kompetensi yang dinilai adalah kompetensi perilaku yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi kepemimpinan dan kompetensi fungsi.

e. Program Pengembangan Kepemimpinan Berjenjang (PPKB)
PPKB bertujuan untuk mempersiapkan pegawai untuk menduduki jabatan dengan kompleksitas tugas dan tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi. PPKB diikuti oleh pegawai yang akan atau sedang menduduki level jabatan tertentu. Pada 2019, PPKB telah diikuti oleh 192 Pegawai.

f. Program Pengembangan Kompetensi (PPK)
Program pengembangan Kompetensi pegawai baik untuk kompetensi teknis (*hard skill*) maupun perilaku (*soft skill*) yang telah dilaksanakan pada 2019 sejumlah 2828 orang. Selain itu, OJK juga melaksanakan PPK untuk Sertifikasi Jasa Keuangan. Di 2019, 199 Pegawai telah mengikuti Program Sertifikasi Jasa Keuangan.

g. Program Pengenalan Calon Pegawai
Setelah melewati proses rekrutmen dengan metode/format *talent scouting*, OJK menyelenggarakan program pengenalan kepada 112 orang calon pegawai baru angkatan 4.

h. Program Purna Bakti
Program Pelatihan Persiapan Masa Purnabakti (Program PPMP) merupakan pelatihan yang diberikan untuk meningkatkan kemandirian pegawai dalam menghadapi masa purnabakti. Pada 2019, sebanyak 46 Pegawai untuk mengikuti pelatihan PPMP.

IV.10.4 *Learning Management System* (LMS)

LMS OJK adalah *software* pendukung kegiatan pengembangan SDM di OJK, yang digunakan untuk penyimpanan materi-materi kegiatan belajar mengajar secara daring, keperluan administrasi dan dokumentasi. Tujuan pembangunan LMS adalah untuk meningkatkan efisiensi pelatihan (dengan pemanfaatan *e-learning*), menciptakan suasana kompetisi yang sehat dalam proses pembelajaran, serta meningkatkan akurasi data pengembangan SDM. Dalam pemanfaatannya, LMS memiliki 5 fitur utama, yaitu :

c. Attachment/Secondment Program
This program provides employees the opportunity to broaden their experiences as well as technical and behavioural competencies through specific job responsibilities or placements internally and externally at domestic and international institutions. In 2019, OJK assigned 57 employees to the domestic and international attachment/secondment program in conjunction with the Bank Indonesia Institute, Telkom Indonesia, Australian Prudential Regulation Authority (APRA), Japan Financial Services Agency, South Korea Financial Supervisory Service and GLOPAC.

d. Human Resource Assessment Program
In 2019, a total of 87 OJK officers were assessed in order to build accurate employee profiles for future human resource development. Behavioural competencies were assessed, consisting of core, leadership and functional competencies.

e. Leadership Level Development Program
The leadership level development program aims to prepare employees for officer positions, involving more complex duties and a higher degree of decision-making responsibilities. The leadership level development program is available to candidate and current officers. In 2019, a total of 192 employees took part in the leadership level development program.

f. Competence Development Program
The competence development program aims to enhance technical competencies (hard skills) and behavioural competencies (soft skills). In total, 2,828 participants completed the competence development program in 2019. In addition, OJK also implements a competence development program for financial services certification, with 199 employees participating in 2019.

g. Onboarding Program
After recruitment through talent scouting, OJK officially accepted 112 candidate employees for the onboarding program in 2019.

h. Retirement Preparation Program
The retirement preparation program provides employee training to increase independence in preparation for retirement. In 2019, OJK assigned 46 employees to the program.

IV.10.4 Learning Management System

The OJK Learning Management System (LMS) is a support application for human resource development activity at OJK used to store learning materials online as well as for administration and documentation purposes. The learning management system aims to improve training efficiency through e-learning, create an atmosphere of healthy competition in the learning process and increase data accuracy concerning human resource development. LMS has five main features as follows:

Fitur LMS OJK
OJK LMS Features



Pada 2019, LMS sudah digunakan oleh seluruh pegawai OJK dalam rangka pengisian *Training Needs Analysis* 2020, pencarian materi-materi pembelajaran, *pre/post-test*, evaluasi kegiatan pelatihan, dan *e-Learning*. Modul *e-Learning* yang telah tersedia adalah sebagai berikut:

In 2019, all OJK employees used LMS to complete the Training Needs Analysis for 2020 and to search for learning materials, while also implementing pre-/post-tests, training evaluations and e-Learning. The following e-Learning modules were available in 2019:

Modul *e-Learning* LMS LMS e-Learning Modules		
IKNB		NBFI
1.	Bisnis dan Produk IKNB	NBFI Businesses and Products
2.	Tata Kelola dan Manajemen Risiko IKNB	NBFI Governance and Risk Management
Perbankan		Banking
1.	Produk dan Aktivitas Bank	Bank Products and Activities
2.	Siklus RBS Perbankan	Banking RBS Cycle
Pasar Modal		Capital Market
1.	Struktur dan Produk Pasar Modal	Capital Market Structure and Products
2.	Pengawasan Pasar Modal	Capital Market Supervision
Pengembangan Sumber Daya Manusia		Human Resources
1.	*Coaching Skill*	Coaching Skills

IV.11 SISTEM INFORMASI DAN LOGISTIK

IV.11.1 Sistem Informasi

Dalam rangka mengembangkan Sistem Informasi OJK yang terintegrasi, andal, aman, berkualitas, mendukung pencapaian visi dan misi OJK, serta memberikan nilai tambah bagi *stakeholders* baik internal maupun eksternal, OJK telah menyusun Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK Tahun 2018-2022.

Implementasi program strategis RBSI OJK Tahun 2018-2022 yang telah selesai dilaksanakan pada 2019 antara lain adalah pemanfaatan teknologi *Big Data Analytics* untuk mendukung pengambilan keputusan terkait perlindungan konsumen, di antaranya:

1. Pengembangan Aplikasi Waspada Investasi (AWAS).
   Merupakan Layanan *Big Data* Pemantauan dan Pelaporan Investasi Ilegal yang bertujuan untuk membantu Satgas Waspada Investasi dalam melakukan pencegahan dan penanganan atas dugaan penawaran investasi ilegal. AWAS memiliki fungsi antara lain:
   a. Mengintegrasikan dan menganalisis email aduan masyarakat ke waspadainvestasi@ojk.go.id dengan menggunakan teknik *Natural Language Processing* untuk mendeteksi Entitas yang dilaporkan secara otomatis;
   b. Mengumpulkan informasi mengenai Entitas yang dilaporkan dari sumber-sumber yang tersedia secara publik (*media online*, *social media*, *forum*, dan *blog*);
   c. Menampilkan profil Entitas berserta informasi terkait dalam bentuk yang mudah dipahami (deskripsi, grafik, tabulasi, *heatmap*); dan
   d. Menampilkan tawaran-tawaran penghimpunan dana yang beredar di masyarakat dalam media *online*, media sosial, forum, dan blog.

2. Pemantauan Iklan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK).
   Merupakan layanan yang digunakan untuk mendukung kegiatan penegakan disiplin pelaku pasar melalui pemantauan iklan Sektor Jasa Keuangan di berbagai media sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Fungsi Utama aplikasi ini antara lain:
   a. Membantu mengumpulkan iklan PUJK dari berbagai sumber, yaitu media cetak, media *online* dan media sosial;
   b. Memeriksa kesesuaian iklan yang dikeluarkan oleh PUJK dengan Panduan Iklan Jasa Keuangan OJK;
   c. Menyajikan hasil pengumpulan data dan informasi secara ringkas dan terstruktur dalam bentuk *dashboard* yang telah tersedia di aplikasi Layanan Pemantauan Iklan PUJK; dan
   d. Membuat surat pembinaan apabila PUJK melanggar Panduan Iklan Jasa Keuangan OJK.

IV.11 INFORMATION SYSTEMS AND LOGISTICS

IV.11.1 Information Systems

To develop integrated, reliable, secure and quality information systems that support OJK's vision and mission and provide value added to internal and external stakeholders, OJK has compiled the OJK Information System Development Plan (RBSI) for 2018-2022.

The finalised RBSI 2018-2022 was implemented in 2019 in terms of Big Data Analytics technology to support the decision-making process in relation to consumer protection as follows:

1. *Investment Alert Application (AWAS) Development*
   The AWAS application provides big data monitoring and reporting services for illegal investment activities in order to assist the Investment Alert Task Force (Investment Watchdog) with the prevention and handling of illegal investment activity. AWAS has the following functions:
   a. Integrating and analysing complaint emails sent to waspadainvestasi@ojk.go.id using Natural Language Processing techniques to automatically detect the entities reported;
   b. Group information concerning the entities reported based on publicly available sources (online media, social media, forums and blogs);
   c. Present straightforward entity profiles and relevant information (descriptions, graphs, tables, heatmaps); and
   d. Present investment offers currently circulating online through social media, forums and blogs.

2. *Advertisement Monitoring of Financial Services Providers*
   These services are used to enforce market discipline by monitoring advertisements from the financial services sector across various media in accordance with consumer protection principles. The main functions of this application are as follows:
   a. Collect and collate advertisements from various sources, namely print media, online media and social media;
   b. Check compliance of the advertisements published by financial services providers against the advertisement guidelines issued by OJK;
   c. Present a structured summary of the collated data and information as a dashboard available within the application; and
   d. Send a notification if an advertisement violates the OJK guidelines.

Pengembangan Sistem Informasi yang berkelanjutan terus dilakukan OJK untuk mengoptimalkan fungsi pengaturan, pengawasan dan perlindungan terhadap Industri Jasa Keuangan yang terintegrasi, baik di sektor Perbankan, Pasar Modal, Industri Keuangan Non Bank (IKNB), maupun dalam rangka mendukung kapabilitas internal organisasi. Sampai dengan 2019, OJK telah mengimplementasikan 96 Aplikasi. Berikut distribusi dari aplikasi yang telah diimplementasikan:

OJK continuously develops information systems in order to optimise the regulation, supervision and consumer protection functions for an integrated financial services industry, consisting of the banking sector, capital market and nonbank financial industry, as well as to support internal organisational capabilities. As of 2019, OJK has implemented 96 applications in total as follows:

Pengembangan Aplikasi dalam Pelaksanaan Tugas
Application Development for Job Execution

Fungsi Utama Core Function	Jumlah Total
Perbankan Banking	26
Pasar Modal Capital Market	13
Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Non-Bank Financial Industry (NBFI)	12
Fungsi Pendukung Supporting Function	**Jumlah Total**
Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) Consumer Protection and Education (CPE)	6
AIMRPK Internal Audit, Risk Management and Quality Assurance (AIMRPK)	5
Manajemen Strategis Strategic Management	34

IV.11.2 Logistik

a. Penyiapan Gedung Kantor

Dalam rangka mewujudkan gedung kantor pusat OJK yang mandiri sehingga dapat menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan, OJK telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Kementerian Keuangan pada tanggal 2 April 2019. PKS itu berupa penggunaan tanah yang terletak di Lot 1 *Sudirman Center Bussiness District* (SCBD). Hingga akhir 2019, OJK telah melakukan pemilihan penyedia untuk manajemen konstruksi dan melakukan *groundbreaking* di lokasi Lot 1 SCBD yang menandakan keseriusan OJK dalam mewujudkan ketersediaan kantor pusat OJK.

Selain itu, OJK juga telah melakukan penyiapan Gedung kantor OJK di daerah dengan detail sebagai berikut:

IV.11.2 Logistics

a. Preparations for Office Building

Seeking to establish an independent head office building to support the smooth implementation of government affairs, OJK signed a Memorandum of Understanding (MoU) and Cooperation Agreement (PKS) with the Ministry of Finance concerning the use of state property under the auspices of the Ministry of Finance on 2nd April 2019. The cooperation agreement permits the use of land located at Lot 1, Sudirman Central Business District (SCBD). By the end of 2019, OJK had selected a construction management company and held a groundbreaking ceremony at Lot 1, Sudirman Central Business District (SCBD) as an indication of OJK's earnestness to construct a head office building on the site.

In addition, OJK has also undertaken preparations for OJK branch offices in various regions as follows:

Lokasi Kantor Regional dan Kantor OJK Daerah

Location of OJK Regional and Branch Offices

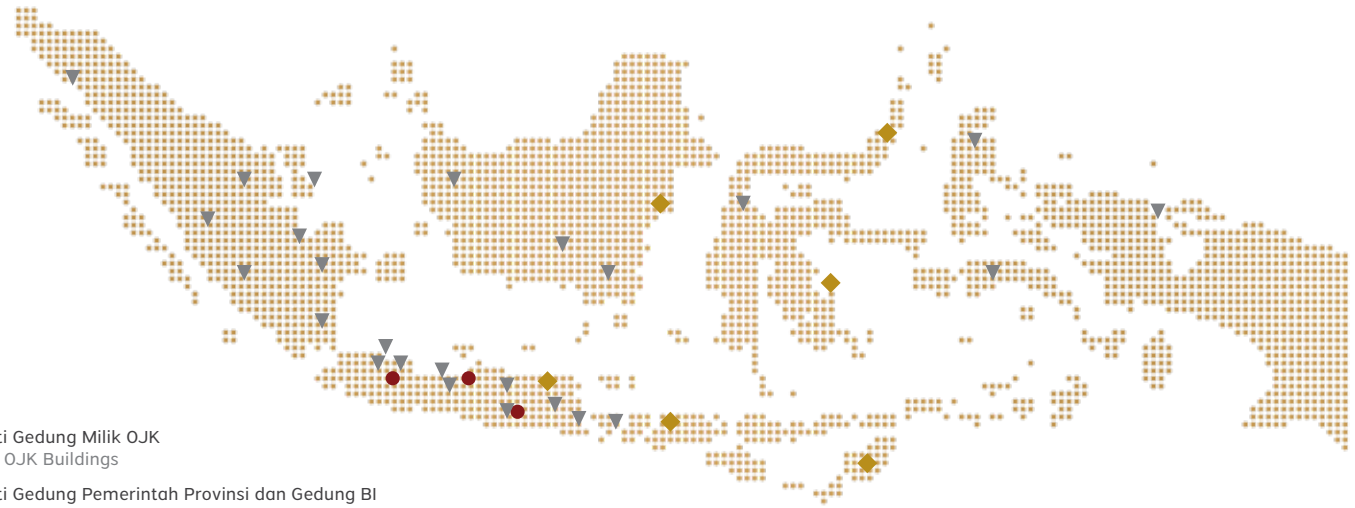

Menempati Gedung Milik OJK
Occupying OJK Buildings

Menempati Gedung Pemerintah Provinsi dan Gedung BI
Occupying Provincial Government and Bank Indonesia Buildings

Menempati Gedung Sewa
Occupying Leased Buildings

Menempati Gedung Milik OJK Occupying OJK Buildings	KR 2 Provinsi Jawa Barat - Bandung KR 3 Provinsi Jawa Tengah & D.I.Y - Semarang KOJK Malang - Malang	Menempati Gedung Sewa Occupying Leased buildings	KOJK Tegal - Tegal KOJK Purwokerto - Purwokerto KOJK Jember - Jember KOJK Kediri - Kediri KOJK Provinsi Kepulauan Riau - Batam KOJK Provinsi N.A.D - Banda Aceh KOJK Provinsi Sulawesi Tengah - Palu KOJK Provinsi Maluku - Ambon KOJK Provinsi Papua dan Papua Barat - Jayapura KOJK Provinsi Lampung - Bandar Lampung KOJK Provinsi Jambi - Jambi KOJK Provinsi Bengkulu - Bengkulu KOJK Provinsi Kalimantan Tengah - Palangkaraya KOJK Cirebon - Cirebon KOJK Provinsi Riau - Pekanbaru KOJK Provinsi Kalimantan Barat - Pontianak KOJK Provinsi Sumatera Barat - Padang KOJK Solo - Solo KOJK Provinsi D.I.Y - Yogyakarta
Menempati Gedung Pemerintah Provinsi dan menempati Gedung BI Occupying Provincial Government and Bank Indonesia Buildings	KR 4 Provinsi Jawa Timur - Surabaya KOJK Provinsi Sulawesi Tenggara - Kendari KOJK Provinsi Sulawesi Utara - Manado KOJK Provinsi Kalimantan Timur - Samarinda KOJK Provinsi Nusa Tenggara Barat - Mataram/Lombok KOJK Provinsi Nusa Tenggara Timur - Kupang		
Menempati Gedung Sewa Occupying Leased Buildings	KR 1 Provinsi DKI dan Banten - Jakarta KR 5 Provinsi Sumatera Bagian Utara - Medan KR 6 Provinsi Sulawesi, Maluku, dan Papua - Makassar KR 7 Provinsi Sumatera Bagian Selatan - Palembang KR 8 Provinsi Bali & Nusa Tenggara - Denpasar KR 9 Provinsi Kalimantan - Banjarmasin KOJK Tasikmalaya - Tasikmalaya		

b. Pengembangan Pengaturan dan Sistem Logistik

OJK telah mengimplementasikan sistem pengadaan mandirinya yaitu Sistem Informasi *Procurement* OJK (SIPROJEK) dan melakukan sosialisasi penggunaan baik kepada jajaran pengguna internal, maupun kepada calon penyedia barang dan jasa. Sampai akhir 2019, terdapat 180 paket pengadaan yang telah selesai dilakukan melalui SIPROJEK. Dengan adanya SIPROJEK diharapkan segala proses pengadaan barang dan jasa dalam organisasi menjadi transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Di samping itu, untuk mendukung pelaksanaan *digital office*, OJK mengimplementasikan pengiriman naskah dinas dan arsip secara digital melalui Sistem Naskah Dinas dan Arsip (SIPENA).

b. Development of Regulations and Logistics Systems

OJK has implemented an independent procurement system, namely the OJK Procurement Information System (SIPROJEK), and conducted socialisation activities for internal users and prospective suppliers of goods and services. By the end of 2019, a total of 180 procurement packages were settled through SIPROJEK. The new procurement system is expected to provide a transparent and accessible procurement process for goods and services. In addition, OJK has implemented a digital delivery service for official records, through the Records Management System (SIPENA) to support digital office implementation.

05

Outlook dan Arah Strategis OJK 2020

Outlook and OJK Strategic Direction in 2020

Meskipun masih dibayangi *downside risks*, perekonomian global pada 2020 disambut optimisme. Pertumbuhan ekonomi domestik diproyeksikan akan bergerak positif. Hal tersebut didukung oleh stabilitas peningkatan konsumsi rumah tangga yang menopang struktur perekonomian Indonesia. Sejalan dengan proyeksi perekonomian domestik, kinerja intermediasi sektor jasa keungan diproyeksikan akan terus meningkat dengan target ekspansi kredit bank yang lebih tinggi dan pertumbuhan piutang perusahaan pembiayaan yang diproyeksikan akan terus bertumbuh. Penghimpunan dana di Pasar Modal juga akan terus meningkat seiring peningkatan jumlah Emiten baru yang terdaftar di Bursa dan investor yang semakin luas. Untuk itu, OJK merumuskan lima kebijakan strategis yang diharapkan dapat memfasilitasi kinerja sektor jasa keuangan untuk membangun ekosistem keuangan yang berdaya saing demi menciptakan pertumbuhan yang berkualitas.

Despite the looming threat of various downside risks, there is much optimism in the global economy looking forward to 2020. Positive domestic economic growth has been projected on the back of increasing household consumption, thus underpinning the structure of the national economy. Consistent with domestic economic projections, the financial services sector intermediation function is expected to increase, targeting stronger credit expansion in the banking industry and further growth of finance company receivables. Fund accumulation in the capital market is forecast to increase in line with a spate of new issuers registered in the stock exchange and a broader investor base. To that end, OJK has formulated five strategic policies that are expected to facilitate the financial services sector build a competitive financial ecosystem and create quality growth.



Tari Kecak - Bali
Kecak Dance - Bali

VI.1 *OUTLOOK* EKONOMI 2020

Pada 2020, perekonomian dunia disambut dengan optimisme, namun masih terdapat *downside risks* perlambatan ekonomi global yang disebabkan antara lain perang dagang dan gejolak geopolitik di sejumlah kawasan. OJK memproyeksikan kinerja sektor jasa keuangan (SJK) tetap tumbuh sejalan dengan pertumbuhan ekonomi domestik di 2020. Proyeksi tersebut ditopang oleh kondisi likuiditas dan permodalan yang memadai. Dengan demikian, SJK memiliki peran penting dalam memacu pertumbuhan perekonomian nasional.

Outlook Ekonomi dan Pasar 2020

IMF dan Bank Dunia memprediksi perekonomian global 2020 tumbuh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 2019, namun lebih rendah dibandingkan proyeksi pada rilis sebelumnya. Hal ini didorong oleh ketidakpastian pemulihan tingkat investasi dan perdagangan global hingga akhir 2019. Pada *Global Economic Prospect* (GEP) Januari 2020, World Bank merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2020 menjadi 2,5% dibandingkan Juni 2019 yang diproyeksikan tumbuh 2,7%. Risiko penurunan tersebut diharapkan dapat diminimalisir dengan kebijakan seluruh bank sentral dunia yang semakin akomodatif dengan menurunkan suku bunga acuan maupun menyuntikkan likuiditas melalui pembelian surat berharga.

VI.1 *ECONOMIC OUTLOOK FOR 2020*

At the beginning of 2020, the global economy was characterised by widespread optimism despite various downside risks associated with global economic moderation, triggered by the trade war and geopolitical tensions in several regions, amongst others. At the time, OJK expected the financial services sector to continue expanding in line with domestic economic growth, supported by adequate liquidity and capital. Therefore, the financial services sector was predicted to provide an important contribution to national economic growth.

Economic and Market Outlook for 2020

The International Monetary Fund (IMF) and World Bank predicted stronger global economic growth in 2020 than that realised in 2019 despite downgrading their projections based on uncertainty concerning recoveries in investment and world trade towards the end of 2019. In its Global Economic Prospect (GEP), January 2020, the World Bank revised down its projection for global economic growth in 2020 to 2.5% from the 2.7% projected in June 2019. The downside risks were nevertheless expected to be minimised by an accommodative global policy response through lower policy rates and liquidity injections in the form of purchasing securities.

***Global Economic Prospect* (GEP) World Bank Januari 2020**

Global Economic Prospect (GEP), World Bank, January 2020

% yoy	2019e	2020f			(% yoy)
	GEP Januari 2020	GEP Januari 2019	GEP Juni 2019	GEP Januari 2020	
Global	2,4	2,8	2,7	2,5	Global
Negara Maju	1,6	1,6	1,5	1,4	Advanced Economies
Amerika Serikat	2,3	1,7	1,7	1,8	United States
Zona Eropa	1,1	1,5	1,4	1,0	Eurozone
Jepang	1,1	0,7	0,7	0,7	Japan
Negara Berkembang	3,5	4,5	4,6	4,1	Developing Economies
Tiongkok	6,1	6,2	6,0	5,1	China
Harga Minyak	-10,3	0,0	-2,9	-3,4	Oil Price
Harga Komoditas Non Migas	-4,7	1,2	1	-2,1	Non-Oil and Gas Commodity Prices

Sumber: Bank Dunia
Source: World Bank

Di tengah proyeksi global yang turun tersebut, pertumbuhan Indonesia juga mengalami revisi ke bawah. World Bank dan IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,1% (World Bank Juni 2019: 5,3%; IMF Oktober 2019: 5,2%). Hal tersebut seiring dengan dampak penurunan volume perdagangan dunia serta harga komoditas yang belum meningkat.

Namun secara umum, perekonomian Indonesia masih tumbuh dengan tingkat inflasi yang tetap terjaga. Hal tersebut didorong oleh stabilitas peningkatan konsumsi rumah tangga yang menopang struktur perekonomian Indonesia. Selain itu, selesainya beberapa proyek infrastruktur strategis akan mendorong peningkatan produktifitas. Peningkatan efisiensi juga berasal dari konsistensi pemerintah dalam menjalankan reformasi struktural, salah satunya melalui penyusunan Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Lapangan Kerja. Oleh karenanya, Pemerintah Indonesia menargetkan Indonesia akan tumbuh 5,3% (*yoy*) di 2020.

As global economic projections were being downgraded, national growth projections for Indonesia were also revised downwards. The World Bank and IMF revised their projections for national economic growth in Indonesia to 5.1%, from 5.3% in June 2019 (WB) and 5.2% in October 2019 (IMF) in line with declining world trade volume and low international commodity prices.

In general, however, Indonesia's national economy continued to expand with inflation kept under control, catalysed by stable household consumption growth, which underpinned the structure of the national economy. In addition, the completion of various strategic infrastructure projects was expected to increase productivity. Furthermore, efficiency gains also stemmed from government consistency when implementing structural reforms, including drafting the Omnibus Bill on Job Creation and Taxation. Therefore, the Indonesian government targeted 5.3% (yoy) economic growth for 2020.

Outlook Perekonomian Domestik 2020
Domestic Economic Outlook for 2020

	2020f				
	PDB GDP	Inflasi Inflation	Kredit Loans	DPK Deposits	
Kementerian Keuangan[1]	5,3%	3,1%	-	-	Ministry of Finance[1]
Bank Indonesia[2]	5,1% - 5,5%	3,0±1%	10% - 12%	8% - 10%	Bank Indonesia[2]
International Monetary Fund[3]	5,1%	3,1%	-	-	International Monetary Fund[3]
World Bank[4]	5,1%	3,1%	-	-	World Bank[4]

Sejalan dengan proyeksi perekonomian domestik, kinerja intermediasi perbankan diproyeksikan cukup baik di tahun 2020. Pelaku perbankan menargetkan ekspansi kredit sebesar 10%, lebih tinggi dari realisasi tahun 2019, sebagaimana tecermin dalam Rencana Bisnis Bank 2020. Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan diproyeksikan tumbuh 6% - 8% (*yoy*). Penghimpunan dana di pasar modal oleh korporasi diperkirakan mencapai Rp170-200 triliun. OJK juga menargetkan tambahan 70 emiten baru di 2020. Pertumbuhan aset industri jasa keuangan akan mengikuti pertumbuhan ekonomi domestik dan intermediasi SJK.

Consistent with domestic economic projections, a sound bank intermediation function was also predicted for 2020. In the Bank Business Plan for 2020, the banks targeted 10% credit growth, higher than that realised in 2019. Meanwhile, finance company receivables were projected to grow in the 6-8% (yoy) range and the capital market was expected to attract Rp170-200 trillion of corporate funds. OJK also targeted 70 additional new issuers in 2020, while asset growth in the financial services industry was expected to mirror domestic economic growth and the intermediation function.

[1] Asumsi makro pada APBN 2019 dan RAPBN 2020
[2] Siaran pers Rapat Dewan Gubernur BI 24 Januari 2020
[3] *World Economic Outlook* IMF (Update Januari 2020).
[4] *Indonesia Economic Quarterly Report* (Juni 2019) dan Global Prospect (Januari 2020)

[1] *Macroeconomic assumptions in the 2019 State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and Draft Budget for 2020.*
[2] *BI Board of Governors Meeting (RDG) Press Release, 24th January 2020.*
[3] *World Economic Outlook (WEO), IMF, (January 2020 Update).*
[4] *Indonesia Economic Quarterly Report (June 2019) and Global Economic Prospect (January 2020).*

Namun selain perang dagang dan tensi geopolitik yang masih tinggi di beberapa kawasan, terdapat *downside risk* lain berupa fenomena Covid-19 yang terjadi di Wuhan, Tiongkok sejak dilaporkan pada 31 Desember 2019 kepada WHO. Fenomena tersebut telah meningkatkan kewaspadaan global akan dampak yang ditimbulkan. Tiongkok merupakan salah satu negara mitra perdagangan Indonesia yang cukup besar, sehingga adanya wabah Covid-19 yang berpotensi menimbulkan gangguan terhadap perekonomian Tiongkok ditengarai juga akan berpengaruh pada perekonomian dan industri jasa keuangan domestik 2020.

Nevertheless, in addition to the ongoing trade war and geopolitical tensions marring various regions, the global economy was overshadowed by unknown unknowns in the form of the COVID-19 outbreak underway in Wuhan, China, as reported on the 31st December 2019 to the World Health Organisation (WHO). The COVID-19 outbreak triggered global vigilance concerning the emerging fallout. China is a major trading partner of Indonesia and the COVID-19 outbreak could potentially disrupt China's economy and spread through contagion to the domestic economy and financial services industry in 2020.

VI.2 ARAH STRATEGIS OJK 2020

Memasuki 2020, OJK telah menyiapkan lima kebijakan strategis yang diarahkan antara lain untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, mendorong inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Lima kebijakan dan inisiatif tersebut yaitu:

VI.2 OJK STRATEGIC DIRECTION IN 2020

At the beginning of 2020, OJK launched five strategic policies to support financing in the priority sectors set by the Government to stimulate economic growth, empower MSMEs and local communities, foster IT innovation in the financial services industry and expedite internal reforms concerning financial services sector regulation and supervision. The five policy initiatives are recapitulated as follows:

5 Kebijakan Strategis OJK 2020

OJK Strategic Policy for 2020



01
Peningkatan Skala Ekonomi Industri Keuangan

Increase Economies of Scale in the Financial Industry

- Meningkatkan modal minimum secara bertahap
- Mengakselerasi konsolidasi dengan kebijakan insentif & disinsentif termasuk kebijakan *exit policy*-nya
- Mempercepat reformasi industri keuangan non-bank
- Memperketat perizinan usaha perusahaan efek bedasarkan tingkat modal

- *Gradually raise minimum capital*
- *Accelerate consolidation through incentives and disincentives, including a viable exit policy*
- *Accelerate nonbank financial industry reforms*
- *Tighten capital-based operating licence requirements for securities companies*

02
Mempersempit *Regulatory* dan *Supervisory Gap* Antar Sektor Jasa Keuangan

Bridge the Regulatory and Supervisory Gap in the Financial Services Sector

- Harmonisasi pengaturan dan pengawasan, maupun *enforcement* di sektor jasa keuangan
- Melakukan pengaturan dan pengawasan *market maker* di bursa saham dengan kapitalisasi pasar kecil
- Prospek adopsi konsep *Investment Bank*
- Memperketat perizinan usaha perusahaan efek bedasarkan tingkat modal

- *Increase regulatory and supervisory harmony as well as enforcement in the financial services sector*
- *Regulate and supervise market makers with low market capitalisation*
- *Explore the prospect of adopting the investment bank concept*
- *Strengthen prudential principles in the non-bank financial industry*





03
Transformasi Digital Sektor Jasa Keuangan
Facilitate Digital Transformation of the Financial Services Sector

- Membangun ekosistem keuangan digital dan *start-up* fintech
- Mempercepat digitalisasi di sektor jasa keuangan
- Mempermudah perizinan produk dan layanan keuangan berbasis digital serta potensi membuka perizinan bagi *virtual banking*
- Mengembangkan pengaturan dan pengawasan berbasis teknologi
- Mengembangkan perizinan terintegerasi antar institusi dengan pemanfaatan teknologi

- *Develop a digital financial and FinTech start-up ecosystem*
- *Accelerate digitalisation of the financial services sector*
- *Streamline the licensing of digital-based financial products and services, and explore the potential of licensing virtual banking*
- *Develop technology-based regulation and supervision*
- *Develop integrated licensing through technology*

04
Mempercepat Penyediaan Akses Keuangan Serta Mendorong Penguatan Penerapan *Market Conduct* dan Perlindungan Konsumen
Accelerate Financial Access as Well as Strengthen Market Conduct and Consumer Protection Principles

- Mengembangkan instrumen keuangan yang mendukung sektor ekonomi strategis dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk instrumen keuangan syariah, obligasi daerah, serta instrumen keuangan berwawasan lingkungan
- Memfasilitasi orogram pengembangan UMKM melalui pemanfaatan KUR skema klaster, teknologi dan perluasan program Bank Wakaf Mikro
- Memfasilitasi program Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- Meningkatkan edukasi dan membuka akses layanan keuangan sejak usia dini
- Mengoptimalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) melalui pemanfaatan teknologi
- Memperkuat perlindungan konsumen melalui peningkatan pengawasan *market conduct*
- Mengoptimalisasi peran Satgas Waspada Investasi

- *Develop financial instruments to support strategic economic sectors and empower micro, small and medium enterprises (MSME), including Islamic financial instruments, municipal bonds and green finance*
- *Facilitate MSME development through cluster schemes for People's Business Loans (KUR), technology and expansion of the Micro Waqf Bank program*
- *Facilitate government programs to ameliorate public prosperity*
- *Increase early education and expand access to financial services*
- *Optimise the role of Regional Financial Access Acceleration Teams (TPAKD) through technology*
- *Strengthen consumer protection through market conduct*
- *Optimise the role of the investment watchdog (Investment Alert Task Force)*





05
Pengembangan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah
Develop an Ecosystem for the Islamic Economy and Finance

- Mendorong pengembangan industri halal unggulan di indonesia
- Mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan skala usaha dan adopsi teknologi
- Memperkuat sinergi antara pelaku industri halal dengan industri jasa keuangan dan Pemangku Kepentingan terkait lainnya

- *Foster halal industry development in Indonesia*
- *Encourage Islamic financial institutions to expand business scale and adopt technology*
- *Strengthen synergy between halal industry players, the financial services industry and other relevant stakeholders*

VI.3 PETA STRATEGI OJK 2020

VI.3 OJK STRATEGY MAP 2020

Pemangku Kepentingan dan keuangan
Stakeholder and Financial

SS.1 Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan (SJK) yang Independen dan Kredibel
Independent and Credible Financial Services Sector Supervision

IKU/KPI:
IKU 1.1 Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan Terhadap Kinerja OJK
IKU 1.2 Indeks Integritas
IKU 1.3 Pengelolaan Keuangan yang Andal

KPI 1.1 Stakeholder Satisfaction Concerning OJK Performance
KPI 1.2 Integrity Index
KPI 1.3 Reliable Financial Management

SS.2 SJK yang tangguh dan Tumbuh Berkelanjutan
A Solid and Sustainable Financial Services Sector

IKU/KPI:
IKU 2.1 Indeks Kinerja SJK

KPI 2.1 Financial Services Sector Performance Index

SS.3 SJK yang Stabil dan Berdaya Saing
A Stable and Competitive Financial Services Sector

IKU/KPI:
IKU 3.1 Penguatan Pengawasan OJK
IKU 3.2 Peningkatan SLA Pelayanan SJK
IKU 3.3 Penguatan Hubungan Internasional OJK dalam rangka Meningkatkan Daya Saing SJK
IKU 3.4 Pengawasan *Market Conduct* yang Kredibel

KPI 3.1 Strengthen OJK Supervision
KPI 3.2 Raise the Service-Level Agreement (SLA) for the Financial Services Sector
KPI 3.3 Strengthen International Relations to Boost the Competitiveness of the Financial Services Sector
KPI 3.4 Credible Market Conduct Supervision

SS.4 SJK yang Kontributif
A Contributive Financial Services Sector

IKU/KPI:
IKU 4.1 Peningkatan Kontribusi SJK pada Sektor Ekonomi Prioritas
IKU 4.2 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelaku SJK
IKU 4.3 Peningkatan *Market Access* SJK Syariah
IKU 4.4 Pendalaman Pasar Keuangan

KPI 4.1 Increase the Financial Services Sector's Contribution to Priority Economic Sectors
KPI 4.2 Increase the Quality and Quantity of Players in the Financial Services Sector
KPI 4.3 Expand Market Access to the Islamic Financial Services Sector
KPI 4.4 Deepen the Financial Markets

SS.5 SJK yang Inklusif
An Inclusive Financial Services Sector

IKU/KPI:
IKU 5.1 Peningkatan Akses Keuangan untuk Pembangunan Ekonomi Daerah

KPI 5.1 Increase Financial Access for Local Economic Development

Proses Internal
Internal Process

Dukungan Strategis
Strategic Support

SS.6 Tata Kelola dan Komunikasi yang Kredibel
Credible Governance and Effective Communication

IKU/KPI:
IKU 6.1 Peningkatan Kualitas Tata Kelola
IKU 6.2 Penguatan Koordinasi dengan Otoritas Fiskal dan Moneter

KPI 6.1 Increase Governance Quality
KPI 6.2 Strengthen Coordination with Fiscal and Monetary Authorities

SS.7 Kapasitas Organisasi yang Andal
Reliable Organisational Capacity

IKU/KPI:
IKU 7.1 Penguatan Kapasitas SDM
IKU 7.2 Penguatan Sistem Informasi
IKU 7.3 Kemadirian Keuangan OJK

KPI 7.1 Strengthen Human Resource Capacity
KPI 7.2 Strengthen Information Systems
KPI 7.3 OJK Financial Independence

Dalam rangka memastikan *Destination Statement* OJK 2017-2022 terlaksana dengan baik, perlu dijabarkan secara detail rencana aksi dan inisiatif yang akan dilaksanakan selama periode tersebut. Dengan mempertimbangkan *Outlook* 2020, analisa *Politics, Economy, Social, Technology, Environment, and Law* (PESTEL), analisa *Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats* (SWOT), hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan hasil survei persepsi kinerja dari seluruh pemangku kepentingan, OJK melakukan penajaman dan penguatan Sasaran Strategis OJK di 2020 yang tersusun dalam Peta Strategis OJK 2020.

To ensure sound implementation, the OJK Destination Statement for 2017-2022 has been translated into a detailed action plan accompanied with various initiatives for implementation during the period. Based on the Outlook for 2020; Political, Economic, Social, Technological, Environmental and Legal (PESTEL) analysis; Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) analysis; the outcome of Focus Group Discussions (FGD); and a performance perception survey completed by stakeholders, OJK has honed and strengthened its Strategic Targets for 2020, as contained in the OJK Strategy Map for 2020.

Peta Strategis OJK 2020 terdiri dari tujuh Sasaran Strategis yang terbagi menjadi tiga perspektif, yaitu perspektif Pemangku Kepentingan dan Keuangan, Proses Internal dan Dukungan Strategis. Pada perspektif Pemangku Kepentingan dan Keuangan, Sasaran Strategis OJK yang pertama adalah Terwujudnya Lembaga Pengawas SJK yang Independen dan Kredibel dengan indikator keberhasilan yang diukur dari tingkat kepuasan Pemangku Kepentingan terhadap kinerja OJK, indeks integritas dan pengelolaan keuangan yang handal. Sasaran strategis kedua adalah Terwujudnya Sektor Jasa Keuangan yang Tangguh dan Tumbuh Berkelanjutan dengan indikator keberhasilan diukur dari indeks kinerja SJK.

The OJK Strategy Map for 2020 consists of seven Strategic Targets divided into three perspectives, namely Stakeholder and Financial, Internal Processes and Strategic Support. From a stakeholder and financial perspective, the first Strategic Target is to realise independent and credible financial services sector supervision, with the key performance indicators of stakeholder satisfaction concerning OJK performance, an integrity Index and reliable financial management. The second Strategic Target is to realise a contributive financial services sector based on a performance index.

Untuk mewujudkan SJK yang Stabil dan Berdaya Saing, target kinerja diukur dari penguatan pengawasan OJK, peningkatan SLA pelayanan SJK, Peningkatan Hubungan Internasional OJK dalam rangka meningkatkan daya saing SJK, dan pengawasan *market conduct* yang kredibel. Dalam rangka mewujudkan SJK yang Kontributif, *target* kinerja diukur dari peningkatan kontribusi SJK pada Sektor Ekonomi Prioritas, peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku SJK, peningkatan akses pasar SJK Syariah, dan pendalaman pasar keuangan. Selain itu untuk mewujudkan SJK yang inklusif, target kinerja diukur dari peningkatan akses keuangan untuk pembangunan ekonomi daerah.

The realisation of a stable and competitive financial services sector is based on KPIs to strengthen OJK supervision, raise the service-level agreement (SLA) for the financial services sector, strengthen international relations to boost competitiveness of the financial services sector and implement credible market conduct supervision. With regard to realising a contributive financial services sector, performance is measured in terms of increasing the financial services sector's contribution to priority economic sectors, increasing the quality and quantity of players in the financial services sector, expanding market access to the Islamic financial services sector and deepening the financial markets. Furthermore, a KPI to increase financial access for local economic development will gauge the realisation of an inclusive financial services sector.

Sasaran Strategis level OJK *wide* tersebut selanjutnya diturunkan (*cascade*) ke level Satuan Kerja (Satker) dan KR/KOJK dengan memperhatikan prinsip keselarasan baik di level OJK maupun lintas Satker.

The OJK wide strategic targets are consistently cascaded down to all work units as well as regional and branch offices.

VI.4 INISIATIF STRATEGIS 2020 & PROGRAM KHUSUS 2020

VI.4 STRATEGIC INITIATIVES AND SPECIAL PROGRAMS FOR 2020

IS-1
Inovasi Keuangan Digital Untuk Pengingkatan Efisiensi dan Inklusi SJK
Digital Financial Innovation to Increase Financial Services Sector Efficiency and Inclusion

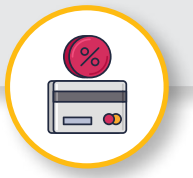

IS-2
Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis TI
Robust IT-based Financial Services Sector Supervision



IS-3
Pendalaman Pasar Keuangan
Financial Market Deepening



IS-4
Transformasi Industri Keuangan Non Bank
Nonbank Financial Industry Transformation



IS-5
Penyederhanaan Proses Bisnis
Simplification of Business Processes



IS-6
Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018-2022
Implementation of OJK's Information Systems Development Plan 2018-2022



IS-7
Percepatan Akses Keuangan dan Koordinasi Pengawasan *Market Conduct*
Accelerated Financial Access and Coordinated Market Conduct Supervision



IS-8
Akselerasi Pertumbuhan SJK Syariah
Accelerated Growth of Islamic Financial Services Industry

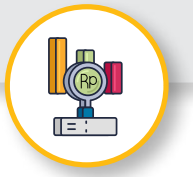

IS-9
Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2020-2024
Indonesia Financial Services Sector Master Plan 2020-2024



PK-1
Efektivitas Penyaluran KUR
Effective People's Business Loan (KUR) disbursements



Dalam rangka mengakselerasi pencapaian Sasaran Strategis, OJK menetapkan 9 Inisiatif Strategis (IS) dan 1 Proyek Khusus (PK). Di antara IS tersebut, 2 merupakan IS baru sementara 7 lainnya merupakan kelanjutan dari IS pada tahun sebelumnya yang akan mendukung pencapaian rencana jangka menengah (*Destination Statement*) OJK 2017-2022 serta pencapaian Peta Strategi OJK 2019. Detail proyek IS tersebut adalah sebagai berikut:

1. **IS-1 Inovasi Keuangan Digital untuk Peningkatan Efisiensi dan Inklusi SJK**: Inisiatif tersebut fokus dalam pengaturan dan pengawasan Fintech dengan penggunaan teknologi untuk memitigasi risiko dan mendorong pertumbuhan sistem keuangan secara berkelanjutan dan stabil. Selain itu, inisiatif tersebut juga bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan digital melalui pengembangan ekosistem dan kesiapan kapasitas pelaku.
2. **IS-2 Penguatan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi**: Inisiatif tersebut bertujuan untuk mendorong terciptanya sistem pengawasan SJK yang andal, efektif dan efisien untuk mendukung terciptanya industri jasa keuangan yang stabil, kontributif, dan memiliki daya saing yang tinggi melalui pemanfaatan IT.
3. **IS-3 Pendalaman Pasar Keuangan**: Inisiatif tersebut bertujuan untuk meningkatkan peran pasar modal melalui (i) upaya penerbitan Obligasi/ Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur, (ii) pendirian Perusahaan Efek Daerah (PED) sebagai upaya untuk meningkatkan investor *retail* di daerah, dan (iii) mempercepat proses Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Emiten dengan aset skala kecil atau menengah secara elektronik untuk mendukung pembiayaan bagi Emiten dengan aset skala kecil atau menengah.
4. **IS-4 Reformasi IKNB**: Bertujuan untuk mewujudkan sektor jasa keuangan non - bank yang efisien, kuat, dan inklusif melalui pengembangan dan pengaturan IKNB, penguatan pengawasan, dan pengembangan infrastruktur OJK-IKNB.
5. **IS-5 Penyederhanaan Proses Bisnis**: Inisiatif tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan proses bisnis OJK dan penguatan ketangguhan OJK antara lain melalui *Business Process Reengineering* (BPR), perizinan terintegrasi, manajemen kelangsungan bisnis (manajemen penanggulan insiden/krisis/bencana), serta penyempurnaan manajemen sistem keuangan.
6. **IS-6 Implementasi Rancang Bangun Sistem Informasi (RBSI) OJK 2018 - 2022**: Inisiatif tersebut bertujuan untuk menciptakan arah besar dan strategi pemenuhan kebutuhan Sistem Informasi, yaitu data, aplikasi, dan infrastruktur, yang terintegrasi untuk mendukung kinerja OJK.

To accelerate achievement of the Strategic Targets, OJK has designed nine Strategic Initiatives and one Special Project. Two of the Strategic Initiatives are new and seven have been continued from the previous year in order to support accomplishment of the OJK Destination Statement for 2017-2022 as well as the Strategy Map for 2019. The details of OJK's Strategic Initiatives are as follows:

1. ***IS-1 Digital Financial Innovation to Increase Financial Services Sector Efficiency and Inclusion**. The first initiative focuses on IT-based regulation and supervision of FinTech to mitigate risk and catalyse sustainable and stable financial system growth.*
2. ***IS-2 Robust IT-based Financial Services Sector Supervision**. This aims to create a reliable, effective and efficient financial services sector supervision system in order to support a stable, contributive and competitive financial services industry through technology.*
3. ***IS-3 Financial Market Deepening (FMD)**. FMD aims to increase the capital market's contribution through: (i) municipal bonds/sukuk issuances by local government as a source of infrastructure development financing; (ii) establishment of regional securities companies to grow the local retail investor base; and (iii) streamlined electronic IPO registration for small and medium-scale issuers to support financing for small and medium issuers.*
4. ***IS-4 Nonbank Financial Industry Reforms Transformation**. This aims to realise an efficient, solid and inclusive nonbank financial industry through development and regulation, robust supervision and infrastructure development.*
5. ***IS-5 Simplification of Business Processes**. This aims to streamline business processes and reinforce resilience at OJK through business process re-engineering (BPR), integrated licensing and business continuity management (incident/crisis/disaster management), as well as refine financial system management.*
6. ***IS-6 Implementation of OJK's Information Systems Development Plan 2018-2022**. This aims to guide the overall direction and strategy to meet information system requirements in terms of integrated data, applications and infrastructure to support OJK performance.*

7. **IS-7 Percepatan Akses Keuangan dan Koordinasi Pengawasan *Market Conduct***: Inisiatif tersebut bertujuan untuk membuka akses keuangan masyarakat dalam rangka mendorong tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Selain itu, inisiatif tersebut juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan *market conduct* yang kredibel dalam menciptakan kepercayaan masyarakat dan membangun *level playing field* di sektor jasa keuangan.
8. **IS-8 Perluasan Market Akses Industri Jasa Keuangan**: Inisiatif tersebut bertujuan untuk mendorong perluasan market akses industri jasa keuangan secara keseluruhan dalam rangka mempercepat penyediaan akses keuangan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi nasional antara lain melalui fasilitasi pendirian Bank Wakaf Mikro (BWM) dan Badan Usaha Milik Desa *Center* (BUMDes) serta pengembangan KUR klaster.
9. **IS-9 MPSJKI 2020-2024**: Inisiatif tersebut merupakan langkah OJK dalam menetapkan arah kebijakan ke depan untuk dapat membangun ekspektasi dan tujuan yang selaras dengan perkembangan sektor jasa keuangan. Arah kebijakan ke depan tersebut disajikan dalam *Master Plan* Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI). MPSJKI berisikan kerangka dasar arah strategis pengembangan sektor jasa keuangan terintegrasi dan komprehensif dalam periode lima tahun. MPSJKI berfungsi sebagai pedoman pengembangan sektor jasa keuangan untuk menciptakan industri keuangan yang stabil, kontributif dan inklusif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
10. **PK-1 Efektivitas Penyaluran KUR**: Proyek tersebut bertujuan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan terkait peningkatan penyaluran KUR dengan lebih efektif, efisien, dan bermanfaat, antara lain melalui (i) potensi penggunaan fintech dalam penyaluran KUR; (ii) dampak KUR dalam peningkatan inklusi keuangan masyarakat; dan peningkatan kesejahteraan penerima KUR dari pengusaha mikro menjadi pengusaha kecil dan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah.

7. ***IS-7 Accelerated Financial Access and Coordinated Market Conduct Supervision***. *This aims to expand public financial access in order to increase financial inclusion in Indonesia. This initiative is also expected to strengthen credible market conduct and create market confidence, while ensuring a level playing field in the financial services sector.*
8. ***IS-8 Accelerated growth of Islamic Financial Services Industry***. *This aims to comprehensively expand market access to the financial services industry in order to broaden public financial access and support national economic development, amongst others, by facilitating the establishment of Micro Waqf Banks and a Centre for Village-Owned Enterprises as well as developing KUR clusters.*
9. ***IS-9 Indonesia Financial Services Sector Master Plan 2020-2024***. *This determines the future policy direction in order to align expectations and objectives between OJK and financial services sector development. The policy direction is presented in the Medium-Term Financial Services Sector Master Plan, which contains the basic framework for the strategic direction of integrated and comprehensive financial services sector development for the upcoming five-year period, while also functioning as financial services sector development guidelines to create a stable, contributive and inclusive financial industry that supports national economic growth.*
10. ***PK-1 Effective People's Business Loan (KUR) Disbursements***. *This aims to formulate policy recommendations that increase the effectiveness, efficiency and usefulness of KUR disbursements through: (i) potential use of FinTech to disburse People's Business Loans (KUR); and (ii) the impact of KUR loans on financial inclusion. The project also aims to ameliorate prosperity amongst KUR beneficiaries, thus transforming micro enterprises into small enterprises and small enterprises into medium enterprises.*

06

Laporan Keuangan OJK

OJK 2019 Financial Report





Tari Yospan - Papua
Yospan Dance - Papua

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2019, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Keuangan

OJK bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan OJK untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern OJK. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh OJK, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan OJK tanggal 31 Desember 2019 dan aktivitas serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 18b/LHP/XV/05/2020 dan Nomor 18c/LHP/XV/05/2020 tanggal 18 Mei 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

Jakarta, 18 Mei 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Penanggung Jawab Pemeriksaan

Laode Nusriadi, Ak., CA., CPA., CSFA.
Register Negara Akuntan Nomor RNA-8888

THE AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

THE AUDITOR'S REPORT ON OJK FINANCIAL STATEMENTS

Report on the Financial Statements

Pursuant to Act No. 15 of 2004 concerning the State Financial Management and Accountability Audit, Act No. 15 of 2006 concerning the Audit Board of the Republic of Indonesia and Act No. 21 of 2011 concerning the Indonesian Financial Services Authority (OJK), the Audit Board of the Republic of Indonesia has audited the Statement of Financial Position of the Indonesian Financial Services Authority (OJK) dated 31st December 2019, the Statement of Cash Flows for the year then ended as well as the Notes to the Financial Statements.

OJK's Responsibility for the Financial Statements

The Indonesian Financial Services Authority is accountable for the preparation and fair presentation of the Financial Statements in accordance with the Accounting Policy of the Indonesian Financial Services Authority, including the maintenance of internal control deemed necessary by the Indonesian Financial Services Authority relevant to the preparation and fair presentation of the Financial Statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

The Auditor's responsibility is to express an opinion on these financial statements based on National Auditing Standards. Those standards require the Audit Board of the Republic of Indonesia to comply with the code of ethics as well as plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

The audit involves performing procedures to obtain audit evidence concerning the amounts and disclosures in the financial statements. The audit, based on professional consideration, including a risk-assessment of the materials presented in the financial statements, assesses the relevant internal controls when preparing and presenting the OJK Financial Statements but the evaluation conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia does not express an opinion on the effectiveness of OJK internal control. The Audit Board also evaluates the appropriateness of the accounting principles used and the reasonableness of the significant accounting estimates made by the Indonesian Financial Services Authority (OJK), evaluates compliance to prevailing regulations, evaluates the internal control system that influences the materials in the financial statements as well as evaluates the overall presentation of the financial statements.

The Audit Board of the Republic of Indonesia believes that sufficient and appropriate evidence has been obtained to provide a basis for an audit opinion.

Opinion

According to the opinion of the Audit Board of the Republic of Indonesia, the financial statements referred to above present fairly, in all materials respects, the financial position of the Indonesian Financial Services Authority (OJK) dated 31st December 2019, and the results of its operations and cash flows for the year then ended in accordance with the Accounting Policy of the Financial Services Authority.

Report on the Internal Control System and Compliance

As part of obtaining reasonable assurance about the financial statements, the Audit Board of the Republic of Indonesia also audited the internal control system and compliance to prevailing regulations. The report of the evaluation of the internal control system and report of compliance to prevailing regulations are presented in Report Number 18b/LHP/XV/05/2020 and Number 18c/LHP/XV/05/2020, dated 18th May 2018, as an integral part of this report.

Jakarta, 18th May 2020
AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Person in Charge of Audit



Laode Nusriadi, Ak., CA., CPA., CSFA.
State Register Number RNA-888

OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S-48/D.01/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Representasi Manajemen

Jakarta, 18 Mei 2020

Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Jl. Gatot Subroto Kavling 31
Jakarta Pusat – 10210

Bersama ini, kami menyampaikan surat representasi manajemen sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019, yang terdiri atas Laporan Posisi Keuangan Tahun 2019, Laporan Aktivitas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tidak hanya melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan, yaitu:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Otoritas Jasa Keuangan memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Otoritas Jasa Keuangan telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2019 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian internal.
12. Kami bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian internal.
13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian internal dalam hal:
    a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
    b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian internal yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Otoritas Jasa Keuangan dalam mencapai tujuan pengendalian internal dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019.

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN

WIMBOH SANTOSO

FINANCIAL SERVICES AUTHORITY

REPUBLIC OF INDONESIA

Jakarta, 18th May 2020

Number: S-48/D.01/2020
Effective: Immediately
Attached: 1 (one) Letter
Regarding: Management Representation Letter

Chairman of the Audit Board of the Republic of Indonesia
Jl. Gatot Subroto, Unit 31
Central Jakarta - 10210

This representation letter is provided in connection with the recent audit conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) on the Financial Statements of the Indonesian Financial Services Authority (OJK) for the year ended 31st December 2019, consisting of the Statement of Financial Positions for 2019, the Statement of Activities for the year ended 31st December 2019, the Statement of Cash Flow for the year ended 31st December 2019 and Notes to the Financial Statements. We acknowledge our responsibility for the fair presentation of the financial statements in accordance with accounting principles applicable in Indonesia.

The representations contained in this letter are described as being limited to matters that are material. Items are considered material, regardless of size, if they involve an omission or misstatement of accounting information that, in the light of surrounding circumstances, make it possible that the judgment of a reasonable person relying on the information would be changed or influenced by the omission or misstatement.

We confirm, to the best of our knowledge and belief, the following representations made to your team during your audit:

1. The Financial Statements have been presented in accordance with accounting principles applicable in Indonesia.
2. We have provided all material data and information required to the Audit Team of the Audit Board of the Republic of Indonesia.
3. All material transactions have been properly recorded and presented in the Financial Statements.
4. All official bank accounts of OJK officers have been disclosed and recorded in the Financial Statements.
5. The Financial Services Authority (OJK) reserves the rights to the assets owned, which may not be pawned or borrowed against.
6. We have no knowledge of any violations of laws and regulations, the impact of which should be disclosed in the Financial Statements.
7. All material liabilities have been recorded or disclosed in the Financial Statements.
8. There are no claims that have not been recognised or should have been recognised but have not been disclosed.
9. The Financial Services Authority (OJK) is in compliance with all contractual aspects that have a material impact on the Financial Statements.

10. There are no incidents or material transactions occurring after 31st December 2018 that have not been recorded and disclosed in the Financial Statements.
11. There are no cases of material fraud (deliberate errors, omissions or disclosures in the financial statements and misappropriation of assets with material impact on the Financial Statements) or other fraud involving the management or employees involved with internal control.
12. We are responsible for establishing and maintaining the internal control system.
13. We have evaluated the effectiveness of the internal control system as follows:
    a. Reliability of financial reporting: the transactions have been recorded, processed and summarised adequately to facilitate compilation of the Financial Statements in accordance with prevailing accounting principles in Indonesia and the assets have been protected from loss due to unauthorised removal, use or release.
    b. Regulatory compliance: the transactions have been processed in accordance with prevailing laws and regulations with a direct and material impact on the Financial Statements.
14. We have disclosed all significant weaknesses in the planning and implementation of internal control that could adversely impact the ability of the Financial Services Authority (OJK) to achieve the goals of internal control and indicated the material weaknesses.
15. We are responsible for implementing the financial management system in accordance with prevailing laws and regulations as well as accounting principles in Indonesia.
16. We have identified and disclosed all laws and regulations with a direct and material impact on the balances contained in the Financial Statements.
17. We have disclosed all noncompliance to prevailing laws and regulations.

This management representation letter was written to clarify the results of the audit conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia on the Financial Statements of the Financial Services Authority (OJK) 2018.

Chairman of the Board of Commissioners
Financial Services Authority



Wimboh Santoso

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

STATEMENT OF RESPONSIBILITY FROM OJK BOARD OF COMMISSIONERS ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY FOR THE PERIODS ENDING 31 DECEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018

Kami, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019.
2. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan;
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 telah dimuat secara lengkap;
   b. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material:
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, OJK Board of Commissioners find that:

1. *We are accountable for the preparation and presentation of OJK Financial Statements 2019;*
2. *OJK Financial Statements 2019 have been prepared and presented in accordance with OJK accounting policy and standards;*
3. *a. All information presented in the OJK Financial Statements 2019 is complete;*
   b. OJK Financial Statements 2019 do not contain incorrect information or material misstatement of facts nor omit information or material facts;
4. *We are accountable for the OJK internal control system.*

We hereby certify that the information contained herein is correct.

Jakarta, 18 Mei 2020/*Jakarta, 18th May 2020*

Wakil Ketua Dewan Komisioner/*Vice Chairman of the Board of Commissioners*
Otoritas Jasa Keuangan /*Financial Services Authority*

Nurhaida

Ketua Dewan Komisioner/*Chairman of the Board of Commissioners*
Otoritas Jasa Keuangan /*Financial Services Authority*

Wimboh Santoso

SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

STATEMENT OF RESPONSIBILITY FROM OJK BOARD OF COMMISSIONERS ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY 2018 FOR THE PERIODS ENDING 31 DECEMBER 2019 AND 31 DECEMBER 2018

Jakarta, 18 Mei 2020/*Jakarta, 18th May 2020*

Diketahui dan Disetujui oleh/*Acknowledged and approved by:*

Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK *Heru Kristiyana as Executive Head of Banking Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners*	
Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK *Hoesen as Executive Head of Capital Market Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners;*	
Riswinandi Sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Merangkap Anggota Komisioner OJK *Riswinandi as Executive Head of NBFI Supervision and concurrent member of the Board of Commissioners*	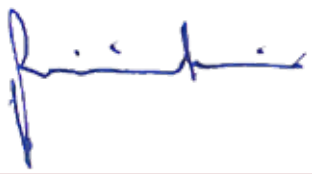
Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK *Ahmad Hidayat as Chairman of the Audit Board and concurrent member of OJK Board of Commissioners*	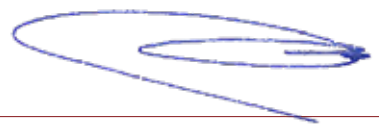
Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen *Tirta Segara as member of OJK Board of Commissioners in charge of Consumer Education and Protection*	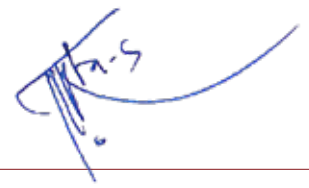
Dody Budi Waluyo sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia *Dody Budi Waluyo as Ex-Officio Member from Bank Indonesia*	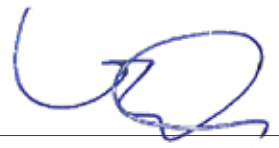
Suahasil Nazara sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan *Suahasil Nazara as Ex-Officio Member from the Ministry of Finance*	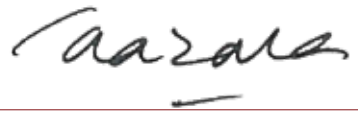

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN POSISI KEUANGAN
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2018 (AUDITED)
PERIOD ENDING 31ST DECEMBER 2019 (AUDITED) AND 31ST DECEMBER 2018 (AUDITED)

(dalam rupiah | *in rupiah*)

URAIAN	Catatan Notes	31 Desember 2019 31st December 2019	31 Desember 2018 31st December 2018	DESCRIPTION
ASET		Audited	Audited	ASSETS
ASET LANCAR				***CURRENT ASSETS***
Kas dan Setara Kas	2.5, 3.1	-	-	Cash and Cash Equivalents
Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya	2.6, 3.2	6.020.767.017.638	5.622.933.692.578	Restricted Cash and Securities
Piutang	2.7, 3.3	99.180.029.579	64.934.053.316	Receivables
Persediaan	2.8, 3.4	15.677.466.268	16.663.426.221	Inventories
Uang Muka	2.9, 3.5	28.133.965.259	-	Advance Payments
Beban Dibayar Dimuka	2.10, 3.6	356.626.494.298	451.932.891.208	Prepaid Expenses
JUMLAH ASET LANCAR		6.520.384.973.042	6.156.464.063.323	***TOTAL CURRENT ASSETS***
ASET TIDAK LANCAR				***NON-CURRENT ASSETS***
Aset Tetap	2.11, 3.7			***Fixed Assets***
Tanah		1.014.620.570.213	786.058.436.795	Land
Gedung dan Bangunan		50.122.906.331	65.100.338.153	Buildings
Peralatan dan Mesin		727.918.096.195	656.979.627.962	Equipment and Machinery
Aset Tetap Lain		129.551.806.475	76.806.324.781	Other Fixed Assets
Akumulasi Penyusutan		(600.186.294.849)	(453.937.866.230)	Accumulated Depreciation
Jumlah Aset Tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan		1.322.027.084.365	1.131.006.861.461	***Total Fixed Assets Less Accumulated Depreciation;***
Aset Takberwujud	2.12, 3.8			***Intangible Assets***
Aset Takberwujud				***Intangible Assets***
Aset Takberwujud		306.497.584.624	292.350.109.917	Intangible Assets
Amortisasi Aset Takberwujud		(217.679.838.973)	(185.176.063.258)	Amortisation of Intangible Assets
Jumlah Aset Takberwujud-setelah dikurangi amortisasi		88.817.745.651	107.174.046.659	***Total Intangible Assets Less Amortisation;***
Aset Dalam Penyelesaian	2.13, 3.9			***Assets Under Construction***
Aset Dalam Penyelesaian				***Assets Under Construction***
Aset Dalam Penyelesaian		100.660.394.196	2.303.642.000	Assets Under Construction
Jumlah Aset Dalam Penyelesaian		100.660.394.196	2.303.642.000	Total Assets Under Construction;

URAIAN	Catatan Notes	31 Desember 2019 31st December 2019	31 Desember 2018 31st December 2018	DESCRIPTION
Aset Lainnya	2.14, 3.10			***Other Assets***
Aset Pajak Tangguhan		601.178.905.612	442.315.027.899	Deferred Tax Assets
Jumlah Aset Lainnya		601.178.905.612	442.315.027.899	***Total Other Assets***
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		2.112.684.129.824	1.682.799.578.019	***TOTAL NON-CURRENT ASSETS***
JUMLAH ASET		8.633.069.102.866	7.839.263.641.342	***TOTAL ASSETS***
LIABILITAS				LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK				***CURRENT LIABILITIES***
Utang Operasional	2.15, 3.11	82.397.090.906	37.678.791.658	Operating Liabilities
Utang Pajak	2.15, 2.16, 3.12	86.310.361.235	196.794.620.952	Taxes Payable
Pendapatan Diterima Dimuka	2.15, 3.13	25.172.153.082	46.214.813.881	Unearned Revenue
Utang Setoran ke Kas Negara	2.15, 3.14	721.220.010	2.909.974.928	Debt to State Treasury
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK		194.600.825.233	283.598.201.419	***TOTAL CURRENT LIABILITIES***
LIABILITAS JANGKA PANJANG				***NON-CURRENT LIABILITIES***
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja	2,2, 2.15, 3.15	2.404.715.622.451	1.769.260.111.598	Long-Term Employee and Post-Employment Benefit Liabilities
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG		2.404.715.622.451	1.769.260.111.598	***TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES***
JUMLAH LIABILITAS		2.599.316.447.684	2.052.858.313.017	***TOTAL LIABILITIES***
ASET NETO				NET ASSETS
Aset Neto Tidak Terikat	2.17, 3.16	6.033.752.655.182	5.786.405.328.325	Unrestricted Net Assets
JUMLAH ASET NETO		6.033.752.655.182	5.786.405.328.325	***TOTAL NET ASSETS***
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		8.633.069.102.866	7.839.263.641.342	***TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS***

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN AKTIVITAS
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
STATEMENT OF ACTIVITIES

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2018 (AUDITED)
PERIOD ENDING 31ST DECEMBER 2019 (AUDITED) AND 31ST DECEMBER 2018 (AUDITED)

(dalam rupiah | *in rupiah*)

URAIAN	Catatan Notes	31 Desember 2019 31st December 2019	31 Desember 2018 31st December 2018	DESCRIPTION
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT		Audited	Audited	CHANGE IN UNRESTRICTED NET ASSETS
PENDAPATAN	2.3, 3.17			***INCOME***
Pendapatan Pungutan		6.027.949.391.897	5.569.587.680.495	Levy Income
Jumlah Pendapatan		**6.027.949.391.897**	**5.569.587.680.495**	***Total Income;***
BEBAN	2.4, 3.18			***EXPENSES***
Beban Kegiatan Operasional		470.357.727.971	438.803.713.298	Operating Expenses
Beban Kegiatan Administratif		4.848.302.219.693	4.357.779.595.716	Administrative Expenses
Beban Kegiatan Pengadaan Aset		231.672.956.305	204.307.428.277	Asset Procurement Expenses
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya		38.547.000.816	34.907.306.620	Other Supporting Expenses
Jumlah Beban		**5.588.879.904.785**	**5.035.798.043.911**	***Total Expenses***
PERUBAHAN ASET NETO		**439.069.487.112**	**533.789.636.584**	***CHANGE IN NET ASSETS***
SALDO ASET NETO AWAL PERIODE		**5.786.405.328.325**	**4.201.122.726.832**	***NET ASSET BEGINNING BALANCE***
Penyesuaian Aset Neto	2.17, 3.16	(191.722.160.255)	1.051.492.964.909	Net Asset Adjustments
SALDO ASET NETO AKHIR PERIODE		**6.033.752.655.182**	**5.786.405.328.325**	***NET ASSET ENDING BALANCE***

OTORITAS JASA KEUANGAN
LAPORAN ARUS KAS
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
STATEMENT OF CASH FLOWS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 (AUDITED) DAN 31 DESEMBER 2018 (AUDITED)
PERIOD ENDING 31ST DECEMBER 2019 (AUDITED) AND 31ST DECEMBER 2018 (AUDITED)

(dalam rupiah | *in rupiah*)

URAIAN	Catatan Notes	31 Desember 2019 31st December 2019	31 Desember 2018 31st December 2018	DESCRIPTION
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		Audited	Audited	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Arus Masuk	3.19	**5.972.708.744.800**	**5.583.408.179.907**	***Cash Inflow***
Pungutan OJK		5.971.740.311.860	5.582.899.949.823	OJK Levy Income
APBN		968.432.940	508.230.084	State Budget Income
Arus Keluar	3.19	**(5.125.460.501.804)**	**(4.886.401.432.348)**	***Cash Outflow***
Kegiatan Operasional		(470.246.639.577)	(376.458.925.236)	Operating Expenses
Kegiatan Administratif		(4.589.983.812.993)	(4.401.034.750.508)	Administrative Expenses
Kegiatan Pengadaan Aset		(24.325.454.099)	(18.728.799.381)	Asset Procurement Expenses
Kegiatan Pendukung Lainnya		(38.632.711.167)	(34.379.556.199)	Other Supporting Expenses
Penyetoran ke Kas Negara		(2.271.883.968)	(55.799.401.024)	State Treasury Payments
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		**847.248.242.996**	**697.006.747.559**	***Net Cash Flow from Operating Activities***
ARUS KAS BERSIH UNTUK AKTIVITAS INVESTASI				NET CASH FLOW FOR INVESTMENT ACTIVITIES
Arus Keluar	3.19			***Cash Outflow***
Perolehan Aset Tetap, Aset Takberwujud, dan Aset Dalam Penyelesaian		(449.414.917.936)	(667.285.370.719)	Acquisition of Fixed Assets, Intangible Assets and Assets Under Construction
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi		**(449.414.917.936)**	**(667.285.370.719)**	***Net Cash Flow for Investment Activities***
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		397.833.325.060	29.721.376.840	NET INCREASE (DECREASE) OF CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE		**5.622.933.692.578**	**5.593.212.315.738**	***OPENING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS***
JUMLAH SALDO KAS DAN SETARA KAS *)		6.020.767.017.638	5.622.933.692.578	TOTAL BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS*
Kas dan Setara Kas merupakan Jumlah Saldo Kas dan Setara Kas serta Kas dan Surat Berharga Yang Dibatasi Penggunaannya.		6.020.767.017.638	5.622.933.692.578	*Cash and Cash Equivalents are Total Balance of Cash and Cash Equivalents as well as Restricted Cash and Securities
cek		-	-	

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan

1. UMUM

1.1 Organisasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang ditetapkan tanggal 22 November 2011. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) beralih dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

Sesuai dengan Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa. Berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Anggaran dan penggunaan anggarannya ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APBN, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi. Penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

1. GENERAL

1.1 Organisation

OJK is an independent institution mandated with regulating, supervising, inspecting and investigating in accordance with Act Number 21 of 2011 concerning OJK, dated 22nd November 2011. The regulation and supervision of financial services in the Capital Market and Non-Bank Financial Industry were transferred to OJK from the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) on 31st December 2012, while the Banking Regulation and Supervision Function was transferred from Bank Indonesia to OJK on 31st December 2013.

In accordance with Article 4 of the OJK Act (No. 21) of 2011, OJK was established with the aim that all activities within the financial sector are executed in an orderly manner, fair, transparent, accountable and capable of realising a sustainable and stable financial system that protects the interests of consumers and society.

OJK administrates the integrated regulation and supervision system for all activities within the financial sector. In accordance with article 6 OJK Act (No. 21) of 2011, the overarching purpose of OJK is to regulate and supervise:

a. Financial services activities in the Banking sector;
b. Financial services activities in Capital Market sector;
c. Financial services activities in the Nonbank Financial Industry (NBFI), including the Insurance and Pension Funds industries as well as Financing and Other Financial Services Institutions.

The Board of Commissioners prepares and sets the OJK Work Plan and Budget pursuant to the OJK Act (No. 21) of 2011. The OJK Budget is sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and/or levy revenue from entities operating in the financial services sector. OJK Budget is used to finance operational, administrative, asset procurement and other supporting activities. The budget and its utilisation are determined according to reasonable standards in the financial sector and exclude general cost standards, goods and services procurement and the remuneration system as regulated by legislation concerning the State Revenue and Expenditure Budget, procurement of government goods and services as well as the remuneration system. The House of Representative's approval is required when setting the OJK budget.

OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

OJK charges levies on entities operating in the financial services sector. Entities operating in the financial services are obligated to pay levies imposed by OJK. The levies represent OJK revenues. OJK collects, manages and administrates the levies accountably and independently. If the Levy Revenue received in the current year exceeds the OJK requirement for the following fiscal year, the surplus is paid into the State Treasury.

OJK wajib menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan. Periode laporan keuangan tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Selain itu, OJK wajib menyusun laporan kegiatan yang terdiri dari laporan kegiatan bulanan, triwulanan, dan tahunan. OJK wajib menyampaikan laporan kegiatan triwulanan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sedangkan untuk laporan kegiatan tahunan disampaikan kepada Presiden dan DPR. Untuk penyusunan laporan keuangan, Dewan Komisioner menetapkan standar dan kebijakan akuntansi OJK.

OJK is required to prepare annual and biannual financial reports. The period of the report is from 1st January to 31st December. OJK is also required to prepare activity reports on a monthly, quarterly and annual basis. OJK is also required to submit the quarterly activity report to the House of Representatives as a form of public accountability. Meanwhile, the annual activity report is submitted to the President of the Republic of Indonesia and the House of Representatives. Specific accounting standards and policies are set by the Board of Commissioners for drafting the annual report.

Sesuai Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK yang telah diubah terakhir dengan PDK OJK Nomor 14/PDK.02/2014 tanggal 5 November 2014, tujuan utama pelaporan keuangan OJK adalah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Hal ini mengingat OJK didirikan berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa OJK wajib mengumumkan laporan keuangan OJK kepada publik melalui media cetak dan media elektronik. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BPK.

In accordance with Board of Commissioners (BOC) Regulation (PDK) Number 01/13/PDK/XII/2012 concerning OJK Accounting Standards and Policies, the overarching purpose of the OJK's financial statements is to ensure transparency and public accountability considering OJK was established in accordance with the OJK Act (No. 21) of 2011, which states that OJK is required to publish the financial statements through print and electronic media. The OJK Financial Statements are audited by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) or a public accounting firm appointed by the Audit Board of the Republic of Indonesia.

OJK telah melakukan perubahan struktur organisasi OJK sebagaimana terakhir ditetapkan melalui PDK Nomor 5/PDK.01/2018 tanggal 15 November 2018 tentang Organisasi OJK yang mulai berlaku pada, sebagaimana pada Lampiran I.

OJK has refined its organizational structure as stipulated in BOC Regulation Number 5/PDK.01/2018 concerning the Organizational Structure of OJK, effective from 15th November 2018, as presented in Appendix I.

Dewan Komisioner OJK Periode 2017-2022 resmi dilantik oleh Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2017 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

a. Wimboh Santoso sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
b. Nurhaida sebagai Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
c. Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
d. Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
e. Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;

The OJK Board of Commissioners for the period from 2017-2022 were officially sworn in before the Chief Justice of the Supreme Court on 20th July 2017 as follows:

a. Wimboh Santoso as Chairman and member of the Board of Commissioners;
b. Nurhaida as Vice Chairman, Chairman of the Ethics Committee and member of the Board of Commissioners;
c. Heru Kristiyana as member of the Board and Executive Head of Banking Supervision;
d. Hoesen as member of the Board and Executive Head of Capital Market Supervision;
e. Riswinandi as member of the Board and Executive Head of Nonbank Financial Institution Supervision;

f. Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
g. Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
h. Mirza Adityaswara sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
i. Mardiasmo sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82/P Tahun 2019 tanggal 3 September 2019, Dody Budi Waluyo ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK *Ex-Officio* dari Bank Indonesia menggantikan Mirza Adityaswara yang telah habis masa jabatannya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 142/P Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019, Suahasil Nazara ditetapkan menjadi Anggota Dewan Komisioner OJK *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan menggantikan Mardiasmo yang telah habis masa jabatannya.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisioner OJK per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

a. Wimboh Santoso sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
b. Nurhaida sebagai Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
c. Heru Kristiyana sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
d. Hoesen sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
e. Riswinandi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
f. Ahmad Hidayat sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
g. Tirta Segara sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
h. Dody Budi Waluyo sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia; dan
i. Suahasil Nazara sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan.

1.2 Dewan Audit dan Komite Etik

1.2.1 Dewan Audit

Dewan Audit dibentuk sejak tahun 2012 dan ditetapkan dengan PDK terakhir Nomor 04/PDK.02/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Dewan Audit OJK sebagai perwujudan independensi dan akuntabilitas OJK. Berdasarkan Rapat Dewan Komisioner OJK yang tertuang dalam Keputusan Rapat Dewan Komisioner (KRDK) Nomor 4/KRDK/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Laporan & Penetapan Anggota Dewan Audit OJK yang berasal dari

f. Ahmad Hidayat as member of the Board and Chairman of the Audit Board;
g. Tirta Segara as member of the Board and Commissioner in Charge of Consumer Protection and Education;
h. Mirza Adityaswara as Ex-Officio member of the OJK Board of Commissioners from Bank Indonesia; and
i. Mardiasmo as Ex-Officio member of the OJK Board of Commissioners from the Ministry of Finance.

In accordance with Presidential Decree No. 82/P of 2019, dated 3rd September 2019, Dody Budi Waluyo was appointed the ex-officio member from Bank Indonesia, replacing Mirza Adityaswara at the end of his tenure.

In accordance with Presidential Decree No. 142/P of 2019, dated 23rd December 2019, Suahasil Nazara was installed as the ex-officio member from the Ministry of Finance, replacing Mardiasmo at the end of his tenure.

As of 31 December 2019, therefore, the OJK board of commissioners was structured as follows:

a. Wimboh Santoso as Chairman and member of the Board of Commissioners;
b. Nurhaida as Vice Chairman, Chairman of the Ethics Committee and member of the Board of Commissioners;
c. Heru Kristiyana as member of the Board and Executive Head of Banking Supervision;
d. Hoesen as member of the Board and Executive Head of Capital Market Supervision;
e. Riswinandi as member of the Board and Executive Head of Nonbank Financial Institution Supervision;
f. Ahmad Hidayat as member of the Board and Chairman of the Audit Board;
g. Tirta Segara as member of the Board and Commissioner in Charge of Consumer Protection and Education;
h. Dody Budi Waluyo as Ex-Officio member from Bank Indonesia; and
i. Suahasil Nazara as Ex-Officio member from the Ministry of Finance.

1.2 Board of Auditors and Ethics Committee

1.2.1 Audit Board

The Audit Board was established in 2012 in accordance with BOC Regulation (PDK) No. 04/PDK.02/2015, dated 5th March 2015, concerning the Audit Board of OJK as a form of OJK independence and accountability. Based on a BoC meeting and contained in OJK BoC Meeting Decree No. 4/KDK.02/2018, dated 10th January 2018, regarding the Appointment of External Audit Board Members, the Audit Board was appointed for the period from 2018-

eksternal, ditetapkan Anggota Dewan Audit OJK untuk periode 2018 - 2020. Berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner (KDK) Nomor 3/D.06/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit OJK Periode Tahun 2018-2021, terhitung sejak 1 April 2018 sampai dengan 31 Maret 2021 susunan keanggotaan Dewan Audit adalah sebagai berikut.

a. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner, yaitu Ahmad Hidayat;
b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
   1. Dwi Martani;
   2. Ito Warsito;
   3. Lydia Wulan Tumbelaka; dan
   4. M. Jusuf Wibisana.

1.2.2 Komite Etik

Sebagai perwujudan integritas dan independensi serta mencegah pelanggaran Kode Etik OJK, telah dibentuk organ pendukung Dewan Komisioner yang bertugas mengawasi kepatuhan Dewan Komisioner, Pejabat, dan Pegawai OJK terhadap Kode Etik berdasarkan KDK Nomor 35/KDK.02/2017 tentang Pembentukan Komite Etik di OJK tanggal 14 Juli 2017. Susunan Komite Etik Level Governance di OJK terdiri dari:

a. Ketua : Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK
b. Anggota :
   1. Anggota Dewan Komisioner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;
   2. Anggota Eksternal:
      a) Ahmad Syafi'i Maarif;
      b) Abdullah Hehamahua; dan
      c) Roy Sembel

Sekretariat Komite Etik Level Governance adalah Departemen Organisasi dan Sumber Daya Manusia OJK c.q. Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Manusia.

1.3 Kantor dan Pegawai OJK

OJK berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kebutuhan. OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat. Berdasarkan PDK Nomor 5/PDK.01/2018 tentang Organisasi OJK, OJK memiliki 36 (tiga puluh enam) kantor yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat, 9 (sembilan) Kantor Regional OJK, dan 26 (dua puluh enam) Kantor OJK (KOJK). Saat ini OJK sedang dalam proses persiapan pembangunan gedung yang akan digunakan sebagai Kantor Pusat OJK di tanah milik Kementerian Keuangan yang terletak di Lot 1 Sudirman Center Bussiness District (SCBD) Jl Jenderal Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan.

2020. Pursuant to OJK BoC Decree No. 3/D.06/2018, dated 15th March 2018, concerning Appointment of the Audit Board of OJK for 2018-2021, the structure of Audit Board membership from 1st April 2018 - 31st March 2021 is as follows:

a. Chairman of the Audit Board and member of the Board of Commissioners, Ahmad Hidayat;
b. Members of the Audit Board, namely:
   1. Dwi Martani;
   2. Ito Warsito;
   3. Lydia Wulan Tumbelaka; and
   4. M. Jusuf Wibisana.

1.2.2 Ethics Committee

A supporting organ to the Board of Commissioners was established as the embodiment of integrity and independence as well as to prevent violations of the OJK Code of Ethics, charged with overseeing the compliance of the OJK BoC, officials and employees to the Code as stipulated in OJK BoC Decree No. 35/KDK.02/2017 concerning Establishment of the OJK Ethics Committee. Established on 14th July 2017, the structure of the governance-level Ethics Committee is as follows:

a. Chairman: Vice Chairman of the OJK Board of Commissioners
b. Members:
   1. Member of the OJK Board of Commissioners in charge of the Internal Audit and Risk Management;
   2. External Members:
a) Ahmad Syafi'i Maarif;
b) Abdullah Hehamahua; and
c) Roy Sembel.

The Secretariat of the Governance-Level Ethics Committee is the OJK Organisation and Human Resources Department, Directorate of HR Management.

1.3 OJK Offices and Employees

OJK is located in the capital of the Unitary State of the Republic of Indonesia and can have offices within and outside the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia as required. OJK is headquartered at the Sumitro Djohohadikusumo Building on Jalan Lapangan Banteng Timur Number 2-4 in Central Jakarta. Pursuant to BOC Regulation Number 5/PDK.01/2018 concerning the Organisational Structure of OJK, OJK currently has 36 (thirty-six) offices consisting of 1 (one) Head Office, 9 (nine) Regional Offices and 26 (twenty-six) Branch Offices. OJK is currently making preparations for a new head office building on land owned by the Ministry of Finance located at A lot 1, Sudirman Central Business District (SCBD) on Jalan Jenderal Sudirman, Kav 52-53, South Jakarta.

Pemanfaatan tanah tersebut berdasarkan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) Nomor (MOU-2/(MK.01)/2019)/(MOU-6/D.01/2019) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan Nomor (PER-33/SJ/2019)/(PRJ-1/MS.3/2019).

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, OJK didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 3.870 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh) orang dengan komposisi sebagai berikut.

Utilisation of land owned by the Ministry of Finance is based on Memorandum of Understanding No. (MOU-2/(MK.01)/2019)/(MOU-6/D.01/2019) and Cooperation Agreement No. (PER-33/SJ/2019)/(PRJ-1/MS.3/2019) between the Ministry of Finance and Financial Services Authority (OJK).

In the execution of its duties, OJK is supported by a staff of 3,870 employees as follows:

No	Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Description
1.	Pegawai Tetap	3.631	3.727	Permanent Employees
2.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pegawai Honorer	101	86	Fixed Term Contract Employees and Honorary Employees
3.	Pegawai instansi lain yang dipekerjakan di OJK	26	37	Employees Assigned to OJK from Other Institutions
4.	Calon Pegawai	112	-	Candidate Employees
Jumlah *)		**3.870**	**3.850**	**Total**

*) Jumlah data di atas tidak termasuk Anggota Dewan Komisioner OJK
*) *Data excludes members of the OJK Board of Commissioners*

1.4 Sumber Pembiayaan OJK

Sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner menyusun dan menetapkan rencana kerja dan anggaran OJK. Pada awal berdirinya OJK mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN. Namun, sejak tahun 2016 anggaran OJK hanya bersumber dari pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

Rincian sumber pendanaan OJK mulai Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut.

1.4 *OJK Source of Funds*

In accordance with Article 34 of the OJK Act (Number 21) of 2011, the Board of Commissioners prepares and drafts the OJK Work Plan and Budget. At its inception, the OJK Budget was funded by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN). Since 2016, however, OJK financing has been sourced solely by levy payments from entities operating in the financial services sector.

A summary of OJK funding sources from 2013 to 2019 is presented as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Tahun Anggaran Fiscal Year	APBN State Budget		Pungutan Levies		Jumlah Total
	Rp	Persentase	Rp	Persentase	Rp
2013	1.645.293.987.000	100 %	-	-	1.645.293.987.000
2014	2.408.282.840.000	100 %	-	-	2.408.282.840.000
2015	1.745.300.000.000	46 %	2.009.326.213.485	54 %	3.754.626.213.485
2016	-	-	3.938.899.360.221	100 %	3.938.899.360.221
2017	-	-	4.371.486.105.348	100 %	4.371.486.105.348
2018	-	-	4.977.186.842.281	100 %	4.977.186.842.281
2019	-	-	5.529.742.476.307	100 %	5.529.742.476.307

1.5 Anggaran dan Realisasi

Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 12 Desember 2018 tentang Anggaran OJK Tahun 2019 ditetapkan anggaran OJK sebesar Rp5.679.701.801.505,00. Selanjutnya, mengingat penerimaan OJK tahun 2018

1.5 *Budget and Realisation*

The OJK budget was set at Rp5,679,701,801,505.00 for 2019 based on a report of the meeting between Commission XI of the People's Representative Council of the Republic of Indonesia (DPR-RI) and the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK), dated 12th December 2018, concerning the

tidak mencapai target dan adanya struktur organisasi baru, OJK melakukan penyesuaian anggaran sesuai Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 10/KDK.01/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 23/KDK.01/2018 dan telah disampaikan kepada DPR melalui Surat Nomor S-111/D.01/2019 tanggal 28 Juni 2019. Dalam surat tersebut disampaikan bahwa Pagu Anggaran OJK Tahun 2019 dilakukan penyesuaian yang semula sebesar Rp5.679.701.801.505,00 menjadi sebesar Rp5.529.742.476.307,00.

OJK Budget in Fiscal Year 2019. Considering that OJK revenues in 2018 failed to meet the target and a new organisational structure was introduced, OJK adjusted its budget in accordance with OJK BoC Decree No. 10/KDK.01/2019, dated 28th June 2019, as an amendment to OJK BoC Decree No. 23/KDK.01/2018, which was submitted to the People's Representative Council (DPR) through Letter S-111/D.01/2019, dated 28th June 2019. According to the letter, the OJK Budget for 2019 was amended from Rp5,679,701,801,505.00 to Rp5,529,742,476,307.00.

Pada pengajuan anggaran ke DPR, pembayaran Pajak OJK dianggarkan sebagai beban pada Kegiatan Operasional mengingat bahwa pembayaran Pajak merupakan hasil dari kegiatan operasional sehari-hari dari satuan kerja terkait di lingkungan OJK. Dalam pelaksanaannya, pembayaran Pajak dikelompokkan sebagai beban pada Kegiatan Administratif sesuai dengan klasifikasi pada sistem dan Laporan Keuangan OJK Audited tahun sebelumnya. Untuk keperluan perbandingan dengan Laporan Singkat (Lapsing) DPR, pembayaran perpajakan disajikan pada Kegiatan Operasional. Perbandingan antara RKA OJK pada Lapsing DPR dengan Realisasi Anggaran sebagai berikut.

When submitting a budget to the People's Representative Council (DPR), OJK tax payments are budgeted as an Operating Expense because tax payments are generated as a result of daily operating activities by the relevant work units within OJK. In practice, tax payments are classified as an Administrative Expense in accordance with the classifications stipulated in the system and the Audited Financial Statements of the OJK of the previous year. For comparison purposes with the DPR report, tax payments are presented as Operating Activities. A comparison between the OJK budget contained in the report, budget realisation and the residual budget is presented as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Uraian	Pagu Anggaran pada Lapsing DPR *Budget in DPR Report*	Realisasi Anggaran *Budget Realisation*	Selisih *Residual*	*Description*
Beban Kegiatan Operasional				*Operating Expenses*
Operasional	496.374.391.528	470.883.398.057	25.490.993.471	*Operational*
PPh Pasal 21	458.943.450.440	477.493.559.912	(18.550.109.472)	*Income Tax*
PPh Badan	66.000.000.000	175.747.981.131	(109.747.981.131)	*Corporate Tax*
Subtotal	1.021.317.841.968	1.124.124.939.100	(102.807.097.132)	*Subtotal*
Beban Kegiatan Administratif				*Administrative Expenses*
Administrasi	606.894.807.309	605.587.834.024	1.306.973.285	*Administration*
Remunerasi	3.295.101.393.593	3.284.716.304.705	10.385.088.888	*Remuneration*
Subtotal	3.901.996.200.902	3.890.304.138.729	11.692.062.173	*Subtotal*
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	711.519.405.803	473.103.613.555	238.415.792.248	*Asset Procurement Expenses*
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	44.868.352.832	38.632.711.167	6.235.641.665	*Other Supporting Expenses*
Jumlah	**5.679.701.801.505**	**5.526.165.402.551**	**153.536.398.954**	**Total**

Dalam tabel di atas terlihat bahwa realisasi Kegiatan Operasional menjadi melebihi Pagu Anggaran Kegiatan Operasional pada Lapsing DPR. Hal ini disebabkan oleh adanya optimalisasi anggaran untuk pembayaran Pajak yang berasal dari seluruh kegiatan. Sedangkan selisih sebesar Rp153.536.398.954,00 merupakan sisa anggaran yang terdiri dari anggaran pembiayaan dari penerimaan tidak mencapai target sebesar Rp149.959.325.198,00 dan dana pembayaran PPh Pasal 25 yang dibayarkan pada tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp3.577.073.756,00.

From the table, Operating Expenses realisation exceeded the budget stipulated in the DPR report. This was caused by budget optimisation in terms of tax payments originating from all activities. The Rp153,536,398,954.00 residual consists of financing from receipts, which failed to meet the target of Rp149,959,325,198.00 and Article 25 Income Tax payments paid on 10th January 2020 totalling Rp3,577,073,756.00.

PPh Pasal 21 dan PPh Badan dianggarkan sebesar Rp458.943.450.440,00 dan Rp66.000.000.000,00. Perbandingan antara Pagu anggaran PPh Pasal 21 dan PPh Badan dengan Realisasi Anggaran yang berdasarkan Laporan Arus Kas (LAK), sebagai berikut.

Article 21 Income Tax and Corporate Tax were budgeted at Rp458,943,450,440.00 and Rp66,000,000,000.00 respectively. A comparison between the budget for Article 21 Income Tax and Corporate Tax and budget realisation based on the Statement of Cash Flows is as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Uraian	Pagu Anggaran pada Lapsing DPR Budget in DPR Report	Realisasi Anggaran Budget Realisation	Selisih Residual	Description
PPh Pasal 21	458.943.450.440	477.493.559.912	(18.550.109.472)	Article 21 Income Tax
PPh Badan	66.000.000.000	175.747.981.131	(109.747.981.131)	Corporate Tax
Jumlah	**524.943.450.440**	**653.241.541.043**	**(128.298.090.603)**	**Total**

Realisasi perpajakan yang melebihi Pagu Anggaran pada Lapsing DPR berdasarkan optimalisasi anggaran OJK sesuai dengan KRDK Nomor 104/KRDK/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Revisi Anggaran OJK Periode III (Oktober 2019) dan KRDK Nomor 150/KRDK/2019 tanggal 26 Desember 2019 tentang Realisasi dan Optimalisasi RKA OJK Tahun 2019 serta SEDK Nomor 2/SEDK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran OJK tanggal 4 Mei 2018.

Disamping itu, realisasi pembayaran PPh Pasal 21 dan PPh Badan OJK yang melebihi anggaran merupakan bagian dari pelaksanaan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak milik penanggung pajak yang meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak.

Tax realisation that exceeded the budget contained in the DPR report was based on OJK budget optimisation in accordance with OJK BoC Meeting Decree (KRDK) No. 104/KRDK/2019, dated 30th October 2019, concerning the Revised OJK Budget for Period III (October 2019) and KRDK No. 150/KRDK/2019, dated 26th December 2019, concerning OJK Budget Optimisation and Realisation in 2019 as well as BOC Circular Letter (SEDK) No. 2/SEDK.02/2018 concerning OJK Budget Revision Procedures, dated 4th May 2018.

In addition, the realisation of Article 21 Income Tax and Corporate Tax payments, which exceeded the budget, represents part of Article 21, paragraph (1) and (2) of Act No. 28 of 2007 concerning General Tax Provisions and Procedures, which states that the State shall be entitled the privileged right for tax debt upon the properties belong to the Tax Guarantor, including principal tax, administrative penalties in the form of interest, fines, increases and tax collection expense.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan OJK sebagaimana diamanatkan Pasal 38 ayat (7) UU Nomor 21 Tahun 2011, Dewan Komisioner telah menetapkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 14/PDK.02/2014 tanggal 5 November 2014 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK. Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PDK tersebut diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

a. SEDK Nomor 3/SEDK.02/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Kebijakan Akuntansi OJK;
b. SEDK Nomor 8/SEDK.02/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Pedoman Akuntansi OJK;
c. SEDK Nomor 4/SEDK.02/2019 tanggal 15 November 2019 tentang Penyusunan Laporan Keuangan OJK;
d. SEDK Nomor 8/SEDK.02/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan

2. *SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES*

When compiling the OJK Financial Statements in accordance with Article 38, paragraph (7) of the OJK Act (NO. 21) of 2011, the Board of Commissioners applies the Accounting Standards and Policy contained in BoC Regulation (PDK) No. Number 01/13/PDK/ XII/2012, dated 28th December 2012, regarding the OJK Accounting Standards and Policy, most recently amended by PDK No. 14/PDK.02/2014, dated 5th November 2014, as the second amendment to PDK No. 01/13/PDK/ XII/2012 concerning the OJK Accounting Standards and Policy. Further implementation rules are contained in the following regulations:

a. BOC Circular Letter (SEDK) No. 3/SEDK.02/2019, dated 15th November 2019, concerning OJK Accounting Policy;
b. BOC Circular Letter (SEDK) No. 8/SEDK.02/2018, dated 28th December 2018, concerning OJK Accounting Guidelines;
c. BOC Circular Letter (SEDK) No. 4/SEDK.02/2019, dated 15th November 2019, concerning the Preparation of OJK Financial Statements;
d. BOC Circular Letter (SEDK) No. 8/SEDK.02/2015, dated 9th July 2015, concerning OJK Accounting Guidelines on Fixed Assets and Intangible Assets; and

e. SEDK Nomor 1/SEDK.02/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 30/SEDK.02/2017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang OJK.

OJK mengakui transaksi dan peristiwa ekonomi lainnya yang disajikan dalam Laporan Aktivitas dan Laporan Posisi Keuangan secara akrual, kecuali yang disajikan dalam Laporan Arus Kas. Pada umumnya seluruh transaksi dan peristiwa yang mempengaruhi elemen laporan keuangan diukur berdasarkan nilai perolehan, kecuali dinyatakan lain pada kebijakan akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan transaksi serta pelaporan OJK adalah Rupiah.

Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun Kebijakan Akuntansi OJK yang signifikan antara lain:

2.1 Pihak Berelasi

Pihak yang berelasi dengan OJK adalah:

a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki pengaruh signifikan atas OJK, atau merupakan personil manajemen kunci OJK.
b. Entitas atau perusahaan di bawah pengendalian OJK, yaitu:
   1. Dana Pensiun (Dapen) OJK sebagai Penyelenggara Program Pensiun Pegawai OJK, yang didirikan berdasarkan KDK OJK Nomor KEP-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dapen dari Dapen OJK;
   2. Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) OJK, yang didirikan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner (KRDK) Nomor 124/KRDK/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Pendirian YKP OJK.
c. Pemerintah, yaitu kementerian/lembaga pemerintah dan lembaga negara, antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2.2 Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja. Melalui Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2015, DPR-RI menyetujui bahwa OJK menyediakan fasilitas imbalan kerja mulai tahun 2015. Selanjutnya Dewan Komisioner OJK pada tanggal 16 dan 23 Desember 2015 menetapkan bahwa OJK menerapkan PSAK 24 tentang Imbalan Kerja mulai tahun 2015.

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor 155/KRDK/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Persetujuan atas Rancangan SEDK OJK tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (IJPL) dan Penetapan Pihak Ketiga Pengelola Dana IJPL OJK, ditetapkan bahwa dana imbalan kerja jangka panjang lain dikelola oleh pihak ketiga yaitu YKP. Ketentuan teknis mengenai

e. BOC Circular Letter (SEDK) No. 1/SEDK.02/2019, dated 30th July 2019, as an amendment to BOC Circular Letter (SEDK) No. 30/SEDK.02/2019 concerning OJK Accounting Guidelines on Receivables.

OJK recognises financial transactions and other economic events on an accrual basis in the Statement of Financial Position and Statement of Activities, except those measured in the Statement of Cash Flows. In general, all transactions and events that affect elements of the financial statements are based on acquisition value, unless otherwise stated in the accounting policy or the Notes to the Financial Statements. All transactions and OJK reports are presented in rupiah.

The OJK Financial Statements consist of the Statement of Financial Position, Statement of Activities, Statement of Cash Flows as well as Notes to the Financial Statements. The significant OJK Accounting Policies are as follows:

2.1 Related Parties

Parties related to OJK include the following:

a. Individuals or immediate family members with significant influence over the OJK, or key management personnel;
b. Entities or companies under OJK control, namely:
   1. OJK Pension Fund as administrator of the OJK Employee Pension Program, established in accordance with OJK BoC Decree No. KEP-147/D.05/2014, dated 17th December 2014 concerning Enactment of the OJK Pension Fund Regulations;
   2. OJK Employee Welfare Foundation (YKP), established in accordance with OJK BoC Meeting Decree (KRDK) No. 124/KRDK/2015, dated 21st October 2015, concerning Establishment of the OJK YKP.
c. The Government, namely government ministries/institutions and state agencies, including the Ministry of Finance, Bank Indonesia (BI) and Deposit Insurance Corporation (LPS).

2.2 Employment Benefits

Employment benefits encompass all forms of benefits allocated to members of the OJK Board of Commissioners and employees, including short-term employment benefits, other long-term employment benefits, post-employment benefits and severance benefits. Based on a Commission XI of DPR-RI report dated 16th December 2015, the People's Representative Council (DPR) agreed that OJK would begin to provide employee benefit facilities in 2015. Thereafter, the Board of Commissioners meetings held on 16th and 23rd December 2015 determined that OJK would apply PSAK 24 to employee benefits beginning in 2015.

In accordance with KRDK No. 155/KRDK/2018, dated 26th December 2018, concerning Approval of a BOC Circular Letter (SEDK) on Management of Other Long-Term Employment Benefits (IJPL) and Appointment of a Third-Party IPJL Fund Manager, the OJK Employee Welfare Foundation (YKP) was appointed to manage other long-term employment benefits. The technical guidelines are

pengelolaan diatur dalam SEDK Nomor 10/SEDK.01/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain OJK.

Beban dan Liabilitas Imbalan Kerja dihitung oleh aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan metode penilaian aktuaris Projected Unit Credit. Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja disajikan di pos Liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan.

Pihak terkait pelaksanaan pengelolaan dana imbalan kerja OJK yaitu:

a. Dapen OJK
   Berdasarkan Keputusan RDK Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Komisioner menyetujui pemberian manfaat pensiun kepada pegawai melalui Dapen dengan kriteria sebagai berikut.
   1. Mendirikan Dapen OJK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan yang berasal dari Pegawai Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai sisa masa dinas lebih dari 3 (tiga) tahun di OJK; dan
   2. Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi pegawai baru OJK dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas kurang dari atau 3 (tiga) tahun di OJK dari lembaga asal (Kementerian Keuangan dan BI).

   Pendirian Dapen OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dapen dari Dapen OJK.
b. YKP OJK
   Pada tahun 2015, OJK mendirikan YKP. Yayasan tersebut bertujuan memenuhi kewajiban organisasi terhadap karyawan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032949.AH.01.04. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YKP (ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015).
c. OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti bagi Pegawai OJK. Penunjukan DPLK BRI tersebut disahkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor 28/D.02/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Penetapan DPLK BRI.

Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja adalah sebagai berikut.

a. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan; dan
b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga. Perhitungan tersebut menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK.

contained in BOC Circular Letter (SEDK) No. 10/SEDK.01/2018, dated 26th December 2018, concerning Management of Other Long-Term Employment Benefits (IJPL).

The total expenses and liabilities of employee benefits are calculated periodically by an independent actuary. The expenses and liabilities of employee benefits are determined separately for each respective program using Projected Unit Credits. The estimated liabilities of employee benefits are presented in the Liabilities entry of the Statement of Financial Position.

Parties involved in managing OJK employment benefits are as follows:

a. OJK Pension Fund
   Pursuant to KRDK No. KRDK-91/MS.2/2014, dated 8th October 2014, the Board of Commissioners approved the provision of pension benefits to employees through a Pension Fund with the following criteria:
   1. Establishing the OJK Pension Fund to administrate the Defined Benefit Pension Program (PPMP) for ex-employees of the Ministry of Finance (Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK)) and ex-employees of Bank Indonesia (BI) with more than three years of service remaining at OJK; and
   2. Approving the appointment process of the Financial Institution Pension Fund (DPLK) as the administrator of the Defined Contribution Pension Fund (PPIP) for new OJK employees and OJK employees with less than three years of service at OJK from their original organisation (Ministry of Finance and Bank Indonesia).

Establishment of the OJK Pension Fund was authorised in accordance with OJK BOC Decree No. KEP-147/D.05/2014, dated 17th December 2014, concerning the Enactment of OJK Pension Fund Regulations.

b. OJK Employee Welfare Foundation (OJK-YKP)
   In 2015, OJK established the OJK Employee Welfare Foundation (OJK-YKP) to fulfil the organisational responsibility to its employees in accordance with Ministerial Decree from the Ministry of Law and Human Rights No. AHU-0032949.AH.01.04 of 2015 concerning Endorsement of the Establishment of the OJK Employee Welfare Foundation (22nd December 2015).
c. OJK cooperated with Financial Institution Pension Fund (DPLK) of Bank Rakyat Indonesia (BRI) as administrator of the Defined Contribution Pension Fund (PPIP) for OJK employees based on OJK BOC Decree No. 28/D.02/2014, dated 30th November 2014, concerning the Establishment of the Bank Rakyat Indonesia (BRI) Financial Institution Pension Fund.

The recognition and recording of employee benefits is as follows:

a. Liabilities relating to employee benefits our recognised at the end of the reporting period;
b. Liabilities relating to employee benefits our measured based on total net value of the difference between the estimated total benefits as the right of the employee for services in the current period and previous period with the assets program managed by a third party, using actuarial services and techniques based on assumptions in accordance with OJK policy.

Liabilitas terkait Imbalan Kerja disajikan sebagai Liabilitas Jangka Panjang dalam Laporan Posisi Keuangan, sedangkan keuntungan/kerugian aktuaria disajikan dalam Laporan Aktivitas.

2.3 Pendapatan

Pendapatan OJK bersumber dari Pungutan dan APBN. Pendapatan APBN diakui pada saat OJK menerima pencairan dana APBN, sedangkan Pendapatan Pungutan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih atau persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait. Pendapatan diukur sebesar nilai wajar manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima.

Klasifikasi Pendapatan OJK dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Pendapatan Pungutan
   Pendapatan Pungutan terdiri dari:
   1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
   2. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian;
   3. Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan; dan
   4. Pengelolaan, penyimpanan atau penggunaan Pungutan.
b. Pendapatan APBN
   Pendapatan APBN adalah pendapatan yang diperoleh dari:
   1. Pendapatan APBN untuk memenuhi kebutuhan anggaran OJK; dan
   2. Pendapatan lain-lain yang berasal dari APBN.

2.4 Beban

Beban OJK terdiri dari Beban Kegiatan Operasional, Beban Kegiatan Administratif, Beban Kegiatan Pengadaan Aset, dan Beban Kegiatan Pendukung Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

a. Beban Kegiatan Operasional adalah beban yang timbul dari kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, seperti pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan perlindungan konsumen;
b. Beban Kegiatan Administratif adalah beban yang timbul antara lain dari perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia;
c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset adalah beban yang timbul dari kegiatan pengadaan Aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi; dan
d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya adalah beban yang timbul antara lain pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

Beban diakui pada saat kas dikeluarkan atau timbulnya kewajiban pada saat OJK melaksanakan kegiatan dan khusus beban kegiatan pengadaan aset diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Aset Tetap/Aset Takberwujud dan/atau digunakannya Persediaan.

Liabilities relating to work benefits are presented as non-current liabilities in the Statement of Financial Positions, while actuarial profits/losses are presented in the Statement of Activities.

2.3 Revenue

OJK revenues originate from levies and the state budget. State budget revenues are recognised upon receipt of the disbursed fund, while levies are recognised upon acquiring the right to collect or upon approval or agreement between parties. Revenues are measured at a fair value of received or receivable economic benefits.

OJK Revenues are classified as follows:

a. Levy Revenues
   Levy Revenues consist of:
   1. *Licensing, approval, registration, ratification and review fees upon planned corporate action;*
   2. *Annual fees for regulation, supervision, inspections and research;*
   3. *Administrative penalties in the form of fines for violation of laws and regulations in the Financial Services Sector; and*
   4. *Management, accumulation or utilisation of levies.*
b. State Revenue and Expenditure Budget (APBN)
   State Budget Revenues are revenues obtained from:
   1. *State Budget Revenue to meet OJK budgetary requirements; and*
   2. *Other State Budget Revenues*

2.4 Expenses

OJK expenses consist of Operating Expenses, Administrative Expenses, Asset Procurement Expenses and Other Supporting Expenses as follows:

a. Operating Expenses are those incurred from implementing the function, tasks and authority of OJK, including regulation, supervision, law enforcement as well as consumer education and protection;
b. Administrative Expenses are those incurred from office activities, remuneration, education and training, organisational development and human resources;
c. Asset Procurement Expenses are those incurred from the procurement of assets, including depreciation and amortisation expenses; and
d. Other Supporting Expenses are those incurred while supporting implementation of the function, tasks and authority of OJK, excluding the categories mentioned in letter a to letter c.

Expenses are recognised when the cash is issued or as liabilities emerge in the execution of OJK activities, and specifically in the case of asset procurement expenses, the expense is recognised at the end of the useful life of the fixed/intangible asset is utilised and/or the Inventories are used.

Beban diukur sebesar Kas yang dikeluarkan atau alokasi sistematis terhadap Aset yang digunakan seiring berjalannya waktu atau sebesar nilai nominal Liabilitas yang timbul dalam rangka OJK melaksanakan seluruh kegiatannya, baik yang bersifat operasional dan administratif, maupun kegiatan lainnya seperti kegiatan pengadaan aset dan kegiatan pendukung lainnya.

The expense is measured by the cash issued or systematic allocation of asset over utility time or the nominal value of the liabilities that emerge in the execution of OJK activities, operating and administrative, as well as other activities such as asset procurement and other supporting activities.

2.5 Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OJK. Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan saldo bank.

Setara Kas merupakan bagian dari Aset Lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

2.6 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya terdiri dari:

a. Kas Dibatasi Penggunaannya adalah Kas dan Setara Kas yang terbatas penggunaannya dalam suatu periode tertentu yang terdiri dari:
   1. Uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan mengenai pungutan OJK termasuk Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya dengan jangka waktu sampai dengan 3 (tiga) bulan;
   2. Uang yang akan disetorkan ke kas negara; dan
   3. Uang yang ditetapkan oleh RDK untuk digunakan membiayai kegiatan tertentu.

   Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat kas diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh RDK. Kas yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal, kecuali deposito dengan jatuh tempo di bawah 3 (tiga) bulan diukur dengan nilai perolehan.
b. Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya adalah instrumen keuangan yang digunakan OJK untuk mengelola uang yang berasal dari penerimaan Pungutan dalam rangka meningkatkan kapasitas anggaran OJK.

   Penempatan dana OJK dilakukan pada deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK dan/atau surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya dan jatuh temponya serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan dan sampai dengan 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, pendapatan yang berasal dari pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan pungutan dan saksi administratif berupa denda atas

2.5 Cash and Cash Equivalents

Cash includes cash in hand and/or the balance of saving deposits held at a bank that are available to finance OJK activities. Cash consists of cash on hand and cash at bank.

Cash equivalents are the most liquid Current Assets that are readily convertible into cash within three months and without significant risk of change in value.

Cash and cash equivalents are recognised upon receipt by OJK and measured at nominal value upon receipt.

2.6 Restricted Cash and Securities

Restricted Cash and Securities are as follows:

a. Restricted cash is cash and cash equivalents with limited utilisation in a certain period as follows:
   1. Funds originating from OJK Levies Income in the current year that will be used to fund OJK activities in the following year pursuant to prevailing regulations including Restricted Securities for a period of up to 3 (three) months;
   2. Funds to be paid to the state treasury; and
   3. Funds designated at the BOC Meeting to finance certain activities.

   Restricted cash is recognised upon receipt or when allocated for certain activities at the BOC Meeting. Restricted cash is measured at nominal value, excluding deposits that mature within 3 (three) months that are measured at acquisition value.
b. Restricted securities are financial instruments used by OJK to manage funds originating from Levy Income to increase OJK budget capacity.

   Placements in the form of deposits held at a bank approved by OJK and/or securities issued and/or guaranteed by the Central Bank of the Republic of Indonesia or Government of the Republic of Indonesia with fixed or specified payments and a maturity date of between three months and one year.

Pursuant to Article 22 of Government Regulation No 11 of 2014 concerning OJK Levies, revenues originating from the management, accumulation or utilisation of levies and administrative penalties in the form of fines for violations of

pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan merupakan bagian dari penerimaan pungutan OJK. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud tercantum bahwa:

a. Pendapatan yang berasal dari pengelolaan adalah pendapatan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.
b. Pendapatan yang berasal dari penyimpanan antara lain jasa giro dan bunga.
c. Pendapatan yang berasal dari penggunaan antara lain denda wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa.

KDK Nomor 43/KDK.02/2016 tentang Pengelolaan Dana Pungutan OJK mengatur penempatan dana pungutan OJK adalah dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara dan/atau Deposito.

Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat tanggal penempatan. Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan.

Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya disajikan pada kelompok Aset Lancar dalam Laporan Posisi Keuangan.

2.7 Piutang

Piutang adalah hak yang timbul kepada OJK atas terutangnya pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan dan/atau terkait kegiatan OJK yang diharapkan dapat ditagih sehingga menghasilkan kas. Piutang diakui pada saat terdapat dasar untuk pengakuan piutang yaitu hak untuk menagih dan persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait serta nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal. Piutang diukur pada nilai tercatat, yaitu besarnya uang yang akan diterima OJK.

Piutang OJK terdiri dari Piutang Pungutan dan Piutang APBN.

a. Piutang Pungutan terdiri dari:
    1. Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan yang melakukan registrasi secara mandiri (self assesment) pada sistem aplikasi penerimaan.

       Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan tersebut terdiri dari:
       a) kurang bayar biaya pendaftaran dalam rangka pernyataan pendaftaran dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
       b) sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan; dan
       c) biaya tahunan.
    2. Piutang atas pengelolaan dan penyimpanan pungutan.
    3. Piutang atas penggunaan pungutan antara lain wanprestasi dan pengembalian/retur kelebihan pembayaran atas penggunaan dana pungutan.

prevailing financial services sector laws and regulations as part of OJK levy revenue. The Elucidation of the aforementioned Government Regulation stipulates that:

a. Revenues originating from management are those acquired through term deposits held at state-owned banks as well as securities issued and/or guaranteed by the central bank of the Republic of Indonesia or the Government of the Republic of Indonesia.
b. Revenues originating from accumulation, including interest current account and interest.
c. Revenues originating from utilisation, including fines for goods and services procurement default.

BOC Decree Number 43/KDK.02/2016 concerning OJK Levies Management regulates the placement of OJK levy funds in the form of Treasury Bills and/or Term Deposits.

Restricted Securities are recognised upon the settlement date. Securities held to maturity are measured at acquisition cost.

Restricted cash and securities are presented as Current Assets in the Statement of Financial Position.

2.7 Receivables

Receivables are rights arising to OJK from parties operating in the financial services sector and/or due to OJK activities that generate cash. Receivables are recognised when realisable but prior to receiving payment, the value of which can be reliably estimated. Receivables are measured at the carrying value, namely the value to be received by OJK from the receivables.

Receivables consist of levy receivables and state budget receivables.

a. Levy Receivables include:
    1. Receivables on mandatory levies paid by the financial services industry based on a self-assessment using the receipt application system.

       Mandatory Levies paid by the financial services industry include:
       a) Underpayment of registration fee associated with the registration statement and review of the corporate action plan;
       b) Administrative penalties in the form of a fine in the financial services sector; and
       c) Annual fees.
    2. Receivables on levy management;
    3. Receivables on levy utilisation, including default penalty and overpaid return of overpaid on levy fund utilisation.

b. Piutang APBN terdiri dari:
   1. Piutang atas penggunaan dana APBN antara lain pengembalian kelebihan pembayaran/retur penggunaan dana APBN; dan
   2. Piutang lain-lain dari penggunaan dana APBN.

Dalam implementasinya, nilai piutang yang diakui dalam Laporan Keuangan adalah nilai piutang berdasarkan Wajib Bayar yang terdaftar pada aplikasi Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO), sedangkan nilai piutang atas Wajib Bayar yang belum terdaftar dicatat pada Laporan Kontinjensi.

Berdasarkan Pasal 12 PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2018 tanggal 22 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 5/PDK.02/2014 tentang Manajemen Pungutan dinyatakan bahwa Piutang Macet merupakan kewajiban Wajib Bayar yang belum dilunasi di atas 1 (satu) tahun kemudian penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dalam SEDK OJK Nomor 1/SEDK.02/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Perubahan atas SEDK OJK Nomor 30/SEDK.02/2017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang OJK disebutkan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan belum dilunasi, diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan secara kolektif oleh Deputi Komisioner yang melaksanakan fungsi keuangan paling lambat bulan Desember tahun berikutnya kepada:

a. Anggota Dewan Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
b. Rapat Dewan Komisioner untuk jumlah lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam hal usulan penghapusbukuan Piutang PUPN disetujui, maka nilai Piutang PUPN dikurangi sebesar nilai Piutang PUPN yang dihapusbukukan dan selanjutnya dicatat di Laporan Kontinjensi. Pembayaran atas Piutang PUPN yang telah dihapusbukukan dapat mengubah saldo Kas dan Pendapatan pada laporan keuangan. Penerimaan pembayaran tersebut diakui sebagai Pendapatan atas Pungutan tahun berjalan pada saat diterimanya pembayaran dan selanjutnya dihapuskan dari Laporan Kontinjensi.

2.8 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar yang diperoleh antara lain dalam bentuk alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan Satuan Kerja yang dapat melakukan pengadaan persediaan dan belum digunakan untuk kegiatan OJK.

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke OJK. Persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi yang siap untuk digunakan (present location and condition). Biaya perolehan persediaan antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan dan biaya lainnya yang

b. State Budget Receivables consist of:
   1. Receivables on state budget fund utilisation, including returns of overpaid on state budget fund utilisation; and
   2. Other receivables on state budget fund utilisation.

In practice, the value of receivables recognised in the Financial Report is the value of receivables based on the payer registered in the OJK Revenues Information System (SIPO), while the value of unregistered payers is recorded in the Contingency Report.

In accordance with Article 12 of BOC Regulation Number 2/PDK.02/2018, dated 22nd December 2018, as the second amendment to BoC Regulation (PDK) Number 5/PDK.02/2014 concerning Receivables Management, it is stated that Bad Debt is the obligation of the payer that has not been paid in over 1 (one) year, the collection of which is submitted to the State Accounts Receivable Committee (PUPN).

In BOC Circular Letter (SEDK) No. 1/SEDK.02/2019, dated 30th July 2019, as an amendment to BOC Circular Letter Number 30/SEDK.02/2017 concerning OJK Receivables Accounting proposes that Bad Debt for which collection has been submitted to the State Accounts Receivable Committee (PUPN) for more than 6 (six) months should be written-off collectively by the Deputy Commissioner in charge of the financial function no later than December of the following year as follows:

a. Member of the Board of Commissioners in charge of the financial function up to a value of Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah);
b. BoC Meeting if exceeding Rp3,000,000,000.00 (three billion rupiah).

If the write-off proposal is approved, the amount of the receivables written off will be deducted from the value of receivables and measured in an administrative account in the Contingency Statement. Payment of the written-off levy receivables may change the cash and revenue balance. Such receipts are recognised as revenue in the current year's levy upon receipt of the payment. Upon receipt of payment, the transaction measured is written-off in the Contingency Statement.

2.8 Inventories

Inventory includes current assets in the form of office stationery and computer equipment stored by the Logistics Unit that have not been used for OJK activities.

Inventory is recognised upon receipt of the goods or when the ownership rights are transferred to OJK. Inventory is measured at acquisition cost, including the purchase cost and other costs incurred until the inventory arrives at the location and is ready to use (present location and condition). The acquisition cost of inventory includes the purchase price, transportation cost and other costs that can directly be attributed to the acquisition of the equipment. Discounts and

secara langsung dapat diatribusikan pada perolehan perlengkapan. Potongan harga dan pos lain yang serupa, dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian. Biaya perolehan persediaan tidak termasuk biaya penyimpanan.

Sejak tanggal 1 Januari 2018, berdasarkan SEDK Nomor 8/SEDK.02/2018 tentang Pedoman Akuntansi OJK, nilai tercatat persediaan dan beban persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan biaya/saldo kuantitas persediaan dikalikan harga rata-rata perolehan persediaan (moving average method).

2.9 Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu Uang Muka Kegiatan dan Uang Muka Pembelian barang/jasa. Uang Muka Kegiatan adalah pembayaran di depan untuk suatu kegiatan yang belum diketahui secara pasti jumlah beban/pengeluaran sebenarnya dan dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang Muka Pembelian adalah pembayaran uang muka kepada pemasok/rekanan atas pembelian barang atau jasa yang pada saat pembayarannya, barang atau jasa tersebut belum diterima oleh OJK. Pembayaran Uang Muka Pembelian tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang yang diserahkan pada saat penyelesaian pembayarannya. Uang Muka diakui pada saat pembayaran dan diukur sebesar nilai nominal yang dibayarkan. Uang Muka Kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan, sedangkan Uang Muka Pembelian Barang/Jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

2.10 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka adalah aset berupa pembayaran oleh OJK atas jasa/fasilitas yang belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan. Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat pembayaran hak memanfaatkan jasa/fasilitas dilakukan dan diukur sebesar proporsi jasa/fasilitas yang sudah dibayar namun belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

2.11 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap adalah pengeluaran dalam rangka pengadaan barang dengan kriteria sebagai berikut.

a. terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
b. semua jenis barang yang tidak terdapat pada Daftar sebagaimana huruf a di atas dan barang tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun serta digunakan dalam kegiatan dengan Biaya Perolehan per unit barang paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
c. Pengakuan atau pengefektifan Aset Tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

other similar entries are deducted when determining the purchase cost. The acquisition cost of inventory excludes storage costs.

Since 1st January 2018, in accordance with BOC Circular Letter (SEDK) Number 8/SEDK.02/2018 concerning OJK Accounting Guidelines, the recorded value and expenses of inventory have been calculated using the moving average method.

2.9 Advance Payments

Advance Payments are divided into two categories based on usage, namely Activity Advance Payments and Advance Payments of Purchase for Goods or Services. Activity Advance Payments are Advance Payments for activities, the cost of which is yet to be determined and to be paid upon completion of the activity. Advance Payments of Purchase for Goods or Services are Advance Payments to suppliers/partners on the purchase of goods and services that, at the time of payment, have not been received by OJK. The Advance Payments of such purchases is calculated as part of the payment of goods delivered at the time of payment settlement. Advance purchases are recognised at the time of payment and are measured at the nominal value paid. Advance purchases of goods are deducted when the goods are received by OJK.

2.10 Prepaid Expenses

Prepaid expenses are assets in the form of services/facilities paid in advance but not utilised before the date of the financial statements. Prepaid expenses are recognised upon payment for the right to utilise the services/facilities and measured as a portion of the services/facilities already paid for but not used as per the date of the financial statements.

2.11 Fixed Assets

Fixed Assets are tangible assets in the form of ready-to-use or previously built items for OJK activities, not intended for sale and with a useful life of more than one year.

Expenditure capitalised as a Fixed Asset is procurement spending based on the following criteria:

a. Registered on the List of Fixed Assets and Intangible Assets; and/or
b. All goods not registered on the List of Fixed Assets and Intangible Assets referred to in letter a and goods with a useful life of more than one year and utilised for operating activities with a cost per unit of no less than Rp10,000,000.
c. Recognition or Effectiveness of Fixed Assets is as follows:

1. untuk Aset Tetap yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
2. Dalam hal Aset Tetap diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
3. untuk Aset Tetap yang diperoleh secara bertahap, antara lain untuk bangunan, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap terakhir penyelesaian pekerjaan.

Biaya Selanjutnya Aset Tetap terdiri dari:

a. Pengeluaran setelah perolehan tanah dicatat sebagai berikut.
   1. dalam hal meningkatkan manfaat ekonomis semula berupa peningkatan kinerja maka ditambahkan sebagai penambah Nilai Buku.
   2. dalam hal dimaksudkan agar tanah berfungsi normal sesuai rencana semula termasuk beban untuk pajak dan iuran daerah maka diakui sebagai beban pada tahun berjalan.
   3. dalam hal dimaksudkan untuk memperpanjang hak atas tanah maka diakui sebagai Perpanjangan Hak atas Tanah.
b. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap milik OJK yang memperpanjang Masa Manfaat atau yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Tetap.
c. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap yang bukan milik OJK (aset sewa pembiayaan atau pinjaman) yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai Aset Tetap Lainnya.
d. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Tetap selain dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, diakui sebagai beban tahun berjalan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:

a. Biaya Perolehan Tanah, Biaya Perolehan dan Akumulasi Penyusutan dari Aset Tetap dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Tanah atau Aset Tetap dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Tanah atau Aset Tetap diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Tanah atau Aset Tetap diakui sebagai beban tahun berjalan.
d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
e. Nilai Buku dari Tanah atau Aset Tetap yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Tanah atau Aset Tetap yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
f. Prosedur penghapusan Aset Tetap mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

1. *Fixed Assets acquired simultaneously are recognised upon receipt or payment, whichever is earlier.*
2. *Fixed Assets acquired simultaneously and directly without a receipt are recognised upon payment.*
3. *Fixed Assets acquired progressively, including for construction, are recognised upon final receipt of completed work.*

Further Costs of Fixed Assets:

a. Expenditures after land acquisition are measured as follows:
   1. *If intended to enhance economic utility by increasing performance, the expenditure is recorded as additional Book Value.*
   2. *If intended for the land to function normally as initially planned, including expenses for taxes and the regional contribution, the expenditure is recognised in the current year expenses.*
   3. *If intended to extend land rights, the expenditure is recognised as an Extension of Land Rights.*
b. Expenditures relating to Fixed Assets owned by OJK that extend the Useful Life or that increase capacity and meet capitalisation criteria are recognised as additional Fixed Asset Book Value.
c. Expenditures relating to Fixed Assets not owned by OJK (leased or borrowed assets) that increase capacity and meet capitalisation criteria are recognised as additional Other Fixed Assets.
d. Expenditures relating to Fixed Assets not referred to in letters a through c are recognised as current year expenses.

The end of recognition period occurs when:

a. Land Acquisition Cost, Acquisition Cost and Accumulated Depreciation of Fixed Assets are written off the Statement of Financial Position, if the Land or Fixed Asset is sold, granted, exchanged, withdrawn from use or lost.
b. The profit that is realised from released Land or Fixed Assets is recognised as current year revenues.
c. The loss that is incurred from released Land or Fixed Assets is recognised as current year expenses.
d. If an insurance reimbursement is received in the current year, the value is deducted from the loss value, yet if received in the following year is recognised as revenue.
e. The Book Value of Land or Fixed Assets withdrawn from use due to replacement by new Land or Fixed Assets is written off and recognised as an expense in the current fiscal year.
f. The write-off procedure for Fixed Assets refers to prevailing regulations concerning writing off assets.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap:

a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Tanah terdiri dari:
   1. harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan;
   2. biaya konstruksi atau pembuatan tanah, bila lahan tanah diciptakan;
   3. biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
   4. biaya pembelian tanah lain sebagai pengganti;
   5. biaya komisi perantara jual beli tanah; dan
   6. biaya pematangan tanah.
b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Hak atas Tanah antara lain meliputi:
   1. biaya legal audit seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah, rencana tata kota dalam rangka perolehan hak atas tanah setelah kontrak pengadaan tanah ditandatangani dikapitalisasi sebagai perolehan hak atas tanah;
   2. biaya pengukuran-pematokan-pemetaan ulang;
   3. biaya notaris, biaya jual-beli dan PPAT;
   4. pajak terkait jual-beli tanah; dan
   5. biaya resmi yang harus dibayar ke kas negara untuk perolehan hak, baik status maupun peruntukan.
c. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Tetap selain tanah terdiri dari:
   1. harga Aset Tetap, termasuk biaya perancangan, bea masuk, biaya perijinan dan pajak;
   2. biaya-biaya yang terkait secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan;
   3. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Tetap siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Tetap; dan
   4. dalam hal terdapat komponen yang melekat (telah terpasang) maka Biaya Perolehan komponen dimaksud menambah Biaya Perolehan Aset Tetap sepanjang nilainya tidak material atau masa manfaatnya sama.
d. Biaya Perolehan Aset Tetap atau Tanah yang diperoleh melalui pertukaran diakui sebesar:
   1. dalam hal tidak terdapat pembayaran atau penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan.
   2. dalam hal terdapat pembayaran kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan ditambah dengan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan.
   3. dalam hal terdapat penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap atau Tanah yang diserahkan dikurangi dengan jumlah kas atau setara kas yang diterima.
e. Biaya Perolehan Aset Tetap dan atau Tanah yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Tetap dan/atau Tanah, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.

Measurement at Recognition of Fixed Assets:

a. Expenditures recognised as Acquisition Cost of Land consist of the following:
   1. Procurement price of land, including plants, infrastructure and buildings on the land that must be purchased and subsequently destroyed;
   2. Construction and landscaping costs, if the land must be landscaped;
   3. Compensation for residents, relocation costs;
   4. Cost of purchasing replacement land;
   5. Commission to land intermediary; and
   6. Cost of developing the land.
b. Expenditures recognised as Cost of Acquiring Land Rights consist of the following:
   1. Cost of the legal audit, such as the inspection of land certificate authenticity and spatial planning for the acquisition of land rights after the procurement contract has been signed, which are capitalised for the acquisition of land rights;
   2. Survey and planning costs for the land acquisition;
   3. Notary costs, transaction costs and PPAT;
   4. Taxes relating to land acquisition transactions; and
   5. Official cost that must be paid to State Treasury to acquire the rights, including status and designation.
c. Expenditures recognised as Acquisition Cost of Fixed Assets excluding Land consist of the following:
   1. Cost of Fixed Asset, including design, import duties, licensing and tax costs;
   2. Direct cost of transporting the asset to the location ready to use;
   3. Other costs incurred until the Fixed Asset is ready to use as part of the Fixed Asset procurement contract; and
   4. In the event that a component is already installed, the Acquisition Cost of the component is an additional Acquisition Cost of the Fixed Asset during the useful life or non-material value.
d. Acquisition Costs of Fixed Assets or Land obtained through exchange are recognised as follows:
   1. If no payments or receipts of cash or cash equivalents, then recognised as the Book Value of the Fixed Asset or Land received.
   2. If payment of cash or cash equivalents, then recognised as the Book Value of the Fixed Asset or Land received in addition to the total cash or cash equivalents paid.
   3. If receipts of cash or cash equivalents, then recognised as the Book Value of the Fixed Asset or Land received deducted by the total cash or cash equivalents paid.
e. Acquisition Costs of Fixed Assets or Land obtained through grants or donations are recognised as the Fair Value of the Fixed Asset and/or Land using the estimated price or market price.

f. Perolehan Aset Tetap dan atau Tanah yang berasal dari penerimaan hibah atau donasi diakui sebagai pendapatan tangguhan pada tahun berjalan.
g. Dalam hal terdapat pengadaan Aset Tetap dan/atau Tanah yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.
h. Biaya-biaya dalam rangka survei atau perencanaan pembelian tanah sebelum kontrak pengadaan tanah ditandatangani, antara lain Legal Audit seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah, rencana tata kota dan biaya konsultan dicatat sebagai beban tahun berjalan.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Tetap menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Tetap, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan. Dalam implementasinya, pengeluaran yang menambah nilai perolehan tanah dan bangunan dari biaya lainnya seperti biaya Legal Audit, biaya Notaris dilakukan pembagian secara proporsional berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk bangunan dan tanah.

Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu. Dalam hal terjadi penambahan Nilai Buku Aset Tetap karena adanya pengeluaran setelah Pengakuan, Penyusutan tersebut dihitung berdasarkan Masa Manfaat Aset Tetap baru, sedangkan Penyusutan atas Aset Tetap induk dihitung sampai Masa Manfaatnya habis.

Masa manfaat Aset Tetap untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut.
a. bukan bangunan;
   1. kelompok 1 (satu) dengan Masa Manfaat 4 (empat) tahun;
   2. kelompok 2 (dua) dengan Masa Manfaat 8 (delapan) tahun;
b. bangunan dengan Masa Manfaat 20 (dua puluh) tahun; dan
c. dalam hal Aset Tetap bukan bangunan yang dapat dikapitalisasi namun tidak dapat dikelompokkan pada huruf a dan b, maka satuan kerja yang melaksanakan fungsi Keuangan dan satuan kerja terkait menetapkan kelompok Masa Manfaat aset tersebut.

Masa Manfaat Aset Tetap ditelaah ulang dalam hal:
a. terjadi beban yang menambah Masa Manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Tetap setelah Pengakuan; dan
b. terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya Masa Manfaat Aset Tetap seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus diakui. Dalam hal terdapat nilai kerugian minimal 70 persen dari Nilai Buku, maka Aset Tetap tersebut dihapusbukukan.

Berdasarkan SEDK Nomor 8/SEDK.02/2015 tanggal 19 Juli 2015 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan

f. Acquisition of Fixed Assets or Land obtained through grant or donation receipts are recognised as deferred revenue in the current year.
g. If the procurement of Fixed Assets and/or Land is not completed or implemented, all previous costs incurred are recognised as current year expenses.
h. The survey and planning costs for land acquisition before the procurement contract has been signed include the cost of the legal audit, such as the inspection of land certificate authenticity, spatial planning and consultants' fees, are recorded as expenses in the current year.

Measurement after Fixed Asset Recognition applies the cost model in recognising the value of the Fixed Asset, namely recorded as the Acquisition Cost deducted by Accumulated Depreciation. In implementation, spending that increases the acquisition value of land and buildings from the other costs, such as legal audit costs and notary costs, are divided proportionally based on the Selling Value of Tax Object (NJOP) for buildings and land.

Straight-line depreciation is used for Fixed Assets during the useful life without residual value. In the case of additional Book Value of the Fixed Asset after Recognition, Depreciation is based on the Useful Life of the new Fixed Asset, while Depreciation of the existing Fixed Asset is calculated until the end of the useful life.

The Useful Life of Fixed Assets for the purposes of the Financial Statements are classified as follows:
a. Non-Property:
   1. Group 1 with a Useful Life of four years;
   2. Group 2 with a Useful Life of eight years;
b. Property with a Useful Life of 20 years; and
c. In the case of Non-Property Fixed Assets that may be capitalised but are not contained in letters a and b, the work unit responsible for the financial function and related work units determine the Useful Life of the asset.

The Useful Life of Fixed Assets will be reviewed if:
a. An expense is incurred to extend the Useful Life through an additional or replacement Fixed Asset component after Recognition; and

b. Certain conditions significantly reduce the Useful Life of the Fixed Asset, including accidents, natural disasters, fire damage and unrest, then estimated loss value must be recognised. If the value of the loss is at least 70% of the Book Value, the Fixed Asset is written off.

BOC Circular Letter (SEDK) No. 8/SEDK.02/2015, dated 19th July 2015, concerning OJK Accounting Guidelines for Fixed Assets and Intangible Assets stipulates that recording and reporting fixed assets and intangible assets refers to financial accounting standards set by the Financial Accounting

oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.12 Aset Takberwujud

Aset Takberwujud adalah aset yang dapat diidentifikasikan dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Biaya Perolehan Aset Takberwujud sebagai berikut.

a. Terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
b. Pengeluaran dalam rangka pengadaan semua perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang dibangun (secara swakelola dan/atau outsource) atau dibeli siap pakai atau masih memerlukan modifikasi yang dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud jika mempunyai Masa Manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan OJK dengan Biaya Perolehan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
c. Pengakuan atau pengefektifan Aset Takberwujud, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
    2. Dalam hal Aset Takberwujud diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
    3. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh secara bertahap, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST) tahap terakhir penyelesaian pekerjaan.

Biaya Selanjutnya Aset Takberwujud terdiri dari:

a. Pengeluaran yang diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Takberwujud adalah pengeluaran dalam rangka pengembangan (enhancement) suatu perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi, yang bersifat struktural berdasarkan ketetapan satuan kerja yang membidangi teknologi informasi.
b. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Takberwujud selain dimaksud pada angka 1, diakui sebagai beban tahun berjalan, antara lain: pemeliharaan dan perbaikan, biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi untuk periode setelah tahun perolehan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:

a. Biaya Perolehan Aset Takberwujud dan Akumulasi Amortisasi dari Aset Takberwujud dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Aset Takberwujud dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.

Standards Board of the Institute of Indonesian Chartered Accountants (IAI). The recording and reporting of Fixed Assets and Intangible Assets funded by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) refers to prevailing regulations, namely Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

2.12 Intangible Assets

Intangible assets are identifiable long-term (more than one year) assets not in physical form and used for OJK activities but not intended for sale.

The Acquisition Cost of Intangible Assets is as follows:

a. Registered on the List of Fixed Assets and Intangible Assets; and/or
b. Procurement spending on software/information technology application systems developed (in-house and outsourced) or purchased ready to use or requiring further modification that can be capitalised as an Intangible Asset with a useful life of more than one year and utilised for operating activities with a cost per unit of no less than Rp10,000,000 (ten million rupiah).
c. Recognition or Effectiveness of Intangible Assets is as follows:
    1. Intangible Assets acquired simultaneously are recognised upon receipt or payment, whichever is earlier.
    2. Intangible Assets acquired simultaneously and directly without a receipt are recognised upon payment.
    3. Fixed Assets acquired progressively are recognised upon final receipt of completed work.

Further Costs of Intangible Assets:

a. Expenditures recognised as additional Intangible Asset Book Value include expenditures to develop (enhance) software/information technology application systems that are structural determined by the information technology work unit;
b. Expenditures relating to Intangible Assets not referred to in letter a are recognised as ongoing expenses, including maintenance and repairs, licensing costs of software/application systems for the period one year after acquisition.

The end of recognition period occurs when:

a. Acquisition Cost and Accumulated Depreciation of Intangible Assets are written off the Statement of Financial Position, if the Intangible Asset is sold, donated, exchanged, withdrawn from use or lost.

b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai beban tahun berjalan.
d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan, maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
e. Nilai Buku dari Aset Takberwujud yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Aset Takberwujud yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
f. Prosedur penghapusan Aset Takberwujud mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Takberwujud
a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan suatu Aset Takberwujud terdiri:
   1. harga pengadaan (pembelian/pembangunan) termasuk bea masuk, pajak dan biaya pengiriman;
   2. biaya lisensi pada tahun perolehan, biaya konsultan dalam rangka pengadaan Aset Takberwujud yang merupakan satu kesatuan dengan harga Aset Takberwujud;
   3. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Takberwujud siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud; dan
   4. dalam hal pada perolehan Aset Takberwujud terdapat komponen hardware yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud, maka Biaya Perolehan hardware menambah Aset Takberwujud.
b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang dibangun sendiri/swakelola terdiri dari:
   1. harga beli atau biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi tahun perolehan yang digunakan dalam pengadaan Aset Takberwujud; dan
   2. biaya konsultan dan biaya kepada rekanan dalam rangka pengadaan perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud.
c. Dalam hal terdapat Aset Takberwujud yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.
d. Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang berasal dari hibah atau donasi diakui sebesar nilai wajar Aset Takberwujud, dengan menggunakan harga taksiran atau harga pasar.
e. Perolehan Aset Takberwujud yang berasal dari penerimaan hibah atau donasi diakui sebagai pendapatan tangguhan pada tahun berjalan.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Takberwujud menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Takberwujud, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Amortisasi.

b. The profit that is realised from released Intangible Assets is recognised as current year revenues.
c. The loss that is incurred from released Intangible Assets is recognised as current year expenses.
d. If an insurance reimbursement is received in the current year, the value is deducted from the loss value, yet if received in the following year is recognised as revenue.

e. The Book Value of Intangible Assets withdrawn from use due to replacement by new Intangible Assets is written off and recognised as an expense in the current fiscal year.
f. The write-off procedure for Intangible Assets refers to prevailing regulations concerning writing off assets.

Measurement at Recognition of Fixed Assets
a. Expenditures recognised as Acquisition Cost of Intangible Assets consist of the following:
   1. Procurement price of (purchase/enhancement), including import duty, taxes and freight costs;
   2. Licensing cost at acquisition, consultants' fees to procure Intangible Assets per unit price;
   3. Other costs incurred until the Intangible Asset is ready to use as part of the Intangible Asset procurement contract; and
   4. In the event that a hardware component cannot be capitalised as an Intangible Asset, the Acquisition Cost of the hardware component is an additional Acquisition Cost of the Intangible Asset.
b. Expenditures recognised as the Acquisition Cost of the Intangible Asset developed in-house consist of the following:
   1. Procurement price or licensing cost of software/information technology application systems used to procure the Intangible Assets; and
   2. Consultants' fees for the procurement of software/information technology application systems as part of the procurement contract for Intangible Assets.
c. If the procurement of Intangible Assets is not completed or implemented, all previous costs incurred are recognised as current year expenses.
d. Acquisition Costs of Intangible Assets obtained through grants or donations are recognised as the Fair Value of the Intangible Asset using the estimated price or market price.
e. Acquisition of Intangible Assets obtained through grant or donation receipts are recognised as deferred revenue in the current year.

Measurement after Intangible Asset Recognition applies the cost model in recognising the value of the Intangible Asset, namely recorded as the Acquisition Cost deducted by Accumulated Amortisation.

Aset Takberwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu. Dalam hal terjadi penambahan Nilai Buku Aset Takberwujud karena adanya pengeluaran setelah Pengakuan, Penyusutan tersebut dihitung berdasarkan Masa Manfaat Aset Takberwujud baru, sedangkan Amortisasi atas Aset Takberwujud induk dihitung sampai Masa Manfaatnya habis. Dengan mempertimbangkan masa manfaat atas kelompok Aset Takberwujud yang ditetapkan dalam KDK Nomor KEP-4/MS.4/2017 tanggal 27 April 2017, maka klasifikasi masa manfaat Aset Takberwujud OJK adalah 4 (empat) tahun.

Intangible Assets are amortised by straight line method during the useful life without residual value. In the case of additional Book Value of the Intangible Asset after Recognition, amortisation is based on the Useful Life of the new Intangible Asset, while amortisation of the existing Intangible Asset is calculated until the end of the useful life. Based on the Useful Life of Intangible Assets contained in KDK No. Kep-4/MS.4/2017, dated 27th April 2017, the useful life of Intangible Assets at OJK is set at four years.

Masa Manfaat Aset Takberwujud ditelaah ulang dalam hal:

a. terjadi beban yang menambah Masa Manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Takberwujud setelah Pengakuan; dan
b. terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya masa manfaat Aset Takberwujud, seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusuhan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus dihapuskan beserta nilai akumulasi penyusutan/amortisasi.

The Useful Life of Intangible Assets will be reviewed if:

a. An expense is incurred to extend the Useful Life through an additional or replacement Intangible Asset component after Recognition; and

b. Certain conditions dramatically reduce the Useful Life of the Intangible Asset, including accidents, natural disasters, fire damage and unrest, then the estimated loss value is written off together with the value of accumulated depreciation/amortisation.

Berdasarkan SEDK Nomor 8/SEDK.02/2015 tanggal 19 Juli 2015 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

BOC Circular Letter (SEDK) No. 8/SEDK.02/2015, dated 19th July 2015, concerning OJK Accounting Guidelines for Fixed Assets and Intangible Assets stipulates that recording and reporting fixed assets and intangible assets refers to financial accounting standards set by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesian Chartered Accountants (IAI). The recording and reporting of Fixed Assets and Intangible Assets funded by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) refers to prevailing regulations, namely Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

2.13 Aset Dalam Penyelesaian

Aset Dalam Penyelesaian adalah Aset Tetap dan/atau Aset Takberwujud yang belum siap pakai atau dalam proses pembangunan, yang digunakan dalam kegiatan OJK dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Aset Dalam Penyelesaian diakui jika:

a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset Dalam Penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing Aset Tetap dan/atau Aset Takberwujud yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Aset Dalam Penyesuaian tidak disusutkan.

2.13 Assets Under Construction

Assets Under Construction represent Construction in Progress (CIP) and are Fixed Assets and/or Intangible Assets not ready for use, which are utilised for OJK activity and not intended for sale.

Assets Under Construction are recognised if:

a. It is likely that the future useful economic life of the asset will be realised;

b. The acquisition cost can be measured reliably; and
c. The asset is still under construction.

Assets Under Construction are recognised at acquisition cost. The accumulated acquisition cost will be moved to the respective Fixed Assets and/or Intangible Assets upon completion and ready to use. Assets Under Construction are not depreciated.

2.14 Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah Aset Tidak Lancar selain Aset Tetap dan Aset Takberwujud meliputi Aset Pajak Tangguhan dan Aset Tidak Lancar Lainnya.

Aset Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan badan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang akibat adanya:

a. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (antara lain biaya manfaat pensiun); dan
b. akumulasi rugi fiskal belum dikompensasi.

Aset Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi positif dari beda temporer sehingga Beban Pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada Beban Pajak menurut peraturan perpajakan. Aset Pajak Tangguhan diukur sebesar koreksi positif dari rekonsiliasi fiskal.

Dalam implementasinya, Aset Pajak Tangguhan dihitung perbedaan temporer antara beban berdasarkan pedoman akuntansi OJK dengan berdasarkan peraturan perpajakan. Pemulihan Aset Pajak Tangguhan akan terlihat pada saat pembayaran.

2.14 Other Assets

Other Assets are Non-Current Assets other than Fixed Assets and Intangible Assets, including Deferred Tax Assets and Other Non-Current Assets.

Deferred Tax Assets are the amount of income tax recoverable in future periods due to:

a. Temporary differences that are deductible; and

b. Accumulated uncompensated tax losses.

Deferred Tax Assets are recognised after fiscal reconciliation which result in temporary positive correction, thus the Tax Expense based on the accounting method will be smaller than the Tax Expense based on prevailing tax law. Deferred Tax Assets are measured as the positive correction of the fiscal reconciliation.

In practice, Deferred Tax Assets are calculated using the temporary differences between expenses based on the OJK Accounting Guidelines and in accordance with prevailing tax law. Deferred Tax Asset Recovery is at the time of payment.

2.15 Liabilitas

Liabilitas adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi OJK. Liabilitas terdiri dari:

a. Liabilitas Jangka Pendek
   Liabilitas Jangka Pendek adalah liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain:
   1. Utang Operasional, yaitu liabilitas yang timbul karena kegiatan OJK serta biaya-biaya yang telah terjadi tetapi belum dibayar sampai tanggal laporan keuangan;
   2. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan yang belum merupakan hak OJK seperti adanya kelebihan pembayaran Pungutan atau kelebihan retur transaksi pada periode akuntansi berjalan;
   3. Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa dana APBN dan/atau pungutan OJK sesuai ketentuan yang ditetapkan; dan
   4. Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Laporan Posisi Keuangan yang tidak dapat dikelompokkan dalam poin 1 sampai 3 di atas.
b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja
   Imbalan Kerja adalah seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja.

2.15 Liabilities

A liability is a debt obligation from a past event, the settlement of which causes an outflow of economic resources from OJK. Liabilities consist of the following:

a. Current Liabilities
   Current liabilities are OJK obligations to a third party that will mature or be settled within 12 months of the reporting period, including:
   1. *Operating liabilities, namely the liabilities that emerge due to OJK activities as well as the costs that are incurred but not paid prior to the date of the financial statements;*
   2. *Unearned Revenues are revenues received in advance but not yet earned in the current accounting period for example overpaid levies/ annual fees or overpaid return transactions in the current accounting period;*
   3. *Payable to State Treasury, namely liabilities that occur from residual state budget funds and/or OJK levies pursuant to prevailing regulations;*
   4. *Other Short-Term Debt, namely debt that will mature within 12 months of the date of the Statement of Financial Position not referred to in Paragraphs 1 through 3.*
b. Liabilities relating to Employment Benefits
   Employment benefits encompass all forms of benefits allocated to members of the OJK Board of Commissioners and employees, including short-term employment benefits, other long-term employment benefits, post-employment benefits and severance benefits.

Imbalan Kerja Jangka Pendek adalah imbalan kerja (selain dari pesangon) yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan dimana Dewan Komisioner dan Pegawai OJK memberikan jasa terkait.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain adalah seluruh imbalan kerja selain Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Pascakerja, dan Pesangon yang diberikan secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang sistem remunerasi OJK. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain meliputi tunjangan Cuti Besar, Penghargaan Masa Pengabdian, dan tunjangan Frame Kacamata.

Imbalan Pascakerja adalah imbalan kerja (selain Pesangon dan Imbalan Kerja Jangka Pendek) yang terutang setelah Dewan Komisioner dan Pegawai OJK menyelesaikan masa dinas.

Pesangon adalah imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai OJK.

Aset Program adalah aset yang dimiliki oleh pihak pengelola dana untuk memenuhi kebutuhan Liabilitas terkait Imbalan Kerja OJK dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Aset program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Pesangon, dan Imbalan Pascakerja OJK dikelola oleh pihak ketiga.

Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan tahunan.

2.16 Perpajakan

a. Status dan Kewajiban Perpajakan OJK ditetapkan berdasarkan:
   1. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
      a) Penerimaan OJK yang berasal dari pungutan sektor jasa keuangan, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan; dan
      b) Penerimaan OJK yang bersumber dari APBN bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.
   2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK.03/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Status Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
      a) OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha namun demikian OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Berdasarkan kriteria tersebut, OJK ditetapkan sebagai subjek Pajak Penghasilan.
      b) Sedangkan mengenai pungutan OJK telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui surat Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 bahwa pungutan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.

Short-term employment benefits (excluding severance) are expected to be settled in full before 12 months after the end of the reporting period in which the members of the Board of Commissioners and employees provide their services.

Other long-term employment benefits encompass all forms of benefits, excluding short-term employment benefits, post-employment benefits and severance benefits, disbursed every 2 (two) years or more pursuant to prevailing regulations governing the OJK remuneration system. Other long-term employment benefits include sabbatical leave, long service awards and the eyewear allowance for frames.

Post-employment benefits are employment benefits, excluding short-term employment benefits, extended to OJK board members and employees upon completion of service.

Severance Pay is paid to a board member or employee upon termination of service at OJK.

The Asset Program contains assets held by a fund manager to meet the liabilities relating to OJK Employment Benefits that may not be used for other purposes. The asset program for other long-term employment benefits and post-employment benefits are managed by a third party.

Employment Benefit Liabilities are recognised at the end of the reporting period.

2.16 *Taxation*

a. OJK Taxation Status and Obligations are stipulated based on the following:
   1. Directorate General of Taxation Letter No. S487/PJ/2015, dated 2nd December 2015, concerning OJK Tax Status and Policy states that:
      a) OJK levy revenues from the financial services sector are subject to Income Tax; and
      b) OJK revenues originating from state budget fund are not considered taxable income.
   2. Ministry of Finance Letter No. S-1001/MK.03/2015, dated 10th December 2015, concerning OJK Tax Liability Status, which states that:
      a) OJK is classified as a legal entity, namely a group of people as a union not conducting business. OJK, however, does not meet the criteria as a government agency that is exempt as the subject of Income Tax. Based on that criteria, OJK is subject to Income Tax.
      b) Concerning OJK levies, the Directorate General of Taxation Letter No. S-487/PJ/2015, dated 2nd December 2015, states that levies are a form of taxable income.

3. Surat Ketua OJK Nomor S-350/D.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penggunaan Dana Imbalan Kerja sebagai Pembayaran Kewajiban PPh Badan OJK menyebutkan bahwa:
   a) Dalam pertemuan antara OJK dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 17 Desember 2018 disepakati bahwa perhitungan kewajiban PPh Badan OJK (tax accounting) didasarkan pada hasil penerimaan tahun lalu yang diakui sebagai pendapatan di tahun berjalan, dikurangi dengan beban di tahun berjalan.
   b) Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK.03/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Usulan Penyelesaian Kewajiban Perpajakan OJK, Menteri Keuangan menyetujui bahwa DIK sebesar Rp439 miliar dapat digunakan untuk melunasi kewajiban perpajakan OJK.

b. Perlakukan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai
Sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor: 8/PDK.02/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Sistem Remunerasi Pegawai OJK, disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) atas Remunerasi termasuk Tunjangan Penyetaraan dan Nilai Tunai Bulanan dalam bentuk uang yang diterima Pegawai dibebankan pada anggaran Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, OJK menetapkan kebijakan perlakuan atas Beban PPh Pasal 21 Pegawai sebagai PPh Pasal 21 yang ditanggung OJK.

2.17 Aset Neto

Aset Neto adalah nilai residual dari aset setelah dikurangi liabilitas. Aset Neto OJK merupakan Aset Neto Tidak Terikat.

Aset Neto diakui dalam Laporan Posisi Keuangan berdasarkan pada ketiadaan pembatasan oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali.

Perubahan Aset Neto diukur sebesar jumlah pendapatan sumber daya tidak terikat dikurangi beban-beban OJK. Aset Neto akhir periode diukur dari saldo awal Aset Neto ditambah/dikurangi perubahan Aset Neto dan penyesuaian Aset Neto seperti keuntungan/kerugian aktuaria.

Keuntungan/kerugian aktuaria adalah perubahan atas nilai kini dari kewajiban imbalan pasti sebagai akibat perbedaan antara asumsi aktuaria sebelumnya dengan realisasi dan pengaruh perubahan asumsi aktuaria tersebut.

Keuntungan/kerugian aktuaria diakui pada akhir periode pelaporan tahunan dan diukur dengan menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK. Keuntungan/kerugian aktuaria disajikan sebagai bagian dari penyesuaian Aset Neto.

3. OJK Chairman's Letter No. S-350/D.01/2018, dated 31st December 2018, concerning the Use of Employment Benefits Fund for Mandatory Corporate Income Tax Payments states that:
a) At a meeting between OJK and Directorate General of Taxes (DJP) held on 17th December 2018, it was agreed that Corporate Income Tax (tax accounting) for OJK was based on revenues in the previous year recognised as revenue in the current year deducted by expenses in the current year.
b) In accordance with Minister of Finance Letter No. S-1001/MK.03/2018, dated 20th December 2018, concerning the Proposal to Settle OJK Tax Liabilities, the Minister of Finance agreed that DIK funds totalling Rp439 billion could be used to settle OJK's tax liabilities.

b. Treatment of Article 21 Income Tax for Employees
Article 35, paragraph (3) of BoC Regulation (PDK) No. 8/PDK.02/2017, dated 22nd March 2017, concerning the OJK Employee Remuneration System states that Income Tax (PPh) on Remuneration, including Equalisation Allowance and Monthly Cash Value in the form of monies received by OJK employees is deducted from the OJK budget. Based on that regulation, OJK set the Employee Income Tax (Article 21) Expense as Article 21 Income Tax borne by OJK.

2.17 Net Assets

Net Assets are the residual value of total assets deducted by total liabilities. OJK Net Assets are Unrestricted Net Assets.

Net Assets are recognised on the Statement of Financial Position based on no external restrictions regarding their use or function and no expectation of repayment.

Change in Net Assets are measured as total unrestricted resources less OJK expenses. The Net Asset Ending Balance is measured from the Net Asset Beginning Balance plus/minus the Chance in Net Assets and Net Asset Adjustments, such as actuarial profit/loss.

Actuarial profit/loss is the change in latest value of defined benefit liabilities due to the difference between the previous actuarial assumption and the realisation as well as the effect of the change in the actuarial assumption.

Actuarial profit/loss is recognised at the end of the annual reporting period and measured applying actuarial services and techniques based on the assumptions in accordance with OJK policy. Actuarial profit/loss is presented as part of the Net Asset Adjustments.

3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1 Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp0,00.

3.2 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp6.020.767.017.638,00 dan Rp5.622.933.692.578,00 dengan rincian sebagai berikut.

3. *ELUCIDATION OF FINANCIAL STATEMENT ENTRIES*

3.1 *Cash and Cash Equivalents*

The balance of cash and cash equivalents as of 31st December 2019 and 31st December 2018 were recorded at Rp0.00 respectively.

3.2 *Restricted Cash and Securities*

The balance of Restricted Cash and Securities as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp6,020,767,017,638.00 and Rp5,622,933,692,578.00 respectively as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	31 Desember 2019 31 December 2019		31 Desember 2018 31 December 2018		Description
1. Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka		6.017.189.943.882		5.575.957.290.188	1. Levy Funds and Unearned Revenue
a) Pungutan Tahun Berjalan	5.992.017.790.800		5.529.742.476.307		a) Current Year Levies
b) Pendapatan Diterima Dimuka	25.172.153.082		46.214.813.881		b) Unearned Revenue
2. Dana Setoran Kas Negara		-		508.230.084	Funds for State Treasury Payment
a) Retur atas penggunaan dana	-		348.824.594		a) Returns on Utilised Funds
b) Denda Wanprestasi PT Karya Mentari Seraya	-		159.405.490		b) Default Fines PT Karya Mentari Seraya
3. Dana Pembayaran PPh Badan		3.577.073.756		46.468.172.306	Corporate Tax Payable Funds
a) Pembayaran PPh Badan 2019	3.577.073.756		-		a) Corporate Tax Payable in 2019
b) Pembayaran PPh Badan 2018	-		46.468.172.306		b) Corporate Tax Payable in 2018
Jumlah		**6.020.767.017.638**		**5.622.933.692.578**	**Total**

Pungutan tahun berjalan sebesar Rp5.992.017.790.800,00 terdiri dari penerimaan tahun berjalan sebesar Rp5.970.975.130.001,00 dan pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka menjadi penerimaan sebesar Rp21.042.660.799,00.

Current year levies were recorded at Rp5,992,017,790,800.00, consisting of Current Year Revenue totalling Rp5,970,975,130,001.00 and recognition of Unearned Revenue as revenue totalling Rp21,042,660,799.00.

3.2.1 Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka (PDD)

Saldo Dana Pungutan dan PDD per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp6.017.189.943.882,00 dan Rp5.575.957.290.188,00 dengan rincian sebagai berikut.

3.2.1 *Levy Funds and Unearned Revenue*

The balance of Levy Funds and Unearned Revenue as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp6,017,189,943,882.00 and Rp5,575,957,290,188.00 respectively as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

No	Keterangan	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Description
1	Kas yang Dibatasi Penggunaannya (Dana Pungutan dan PDD)	1.403.839.943.882	5.575.957.290.188	Restricted Cash (Levy Funds and Unearned Revenue)
	a. Giro Bank Indonesia	891.522.561.992	304.153.751.322	a. Bank Indonesia Checking Account
	b. Giro Bank Rakyat Indonesia	511.726.800.854	28.576.511.324	b. BRI Checking Account
	c. Giro Bank Mandiri	590.581.036	757.027.542	c. Bank Mandiri Checking Account
	d. Deposito Bank Rakyat Indonesia	-	1.307.700.000.000	d. BRI Deposit Account
	e. Deposito Bank Mandiri	-	1.235.100.000.000	e. Bank Mandiri Deposit Account
	f. Deposito Bank Negara Indonesia	-	1.149.670.000.000	f. BNI Deposit Account
	g. Deposito Bank Tabungan Negara	-	1.550.000.000.000	d. BTN Deposit Account
2	Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya (Dana Pungutan)	4.613.350.000.000	-	Restricted Securities (Levy Funds)
	a. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BNI	620.375.000.000	-	a. Deposit Accounts with Tenors of 3-12 Months at BNI
	b. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BRI	980.350.000.000	-	b. Deposit Accounts with Tenors of 3-12 Months at BRI
	c. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank BTN	1.936.625.000.000	-	c. Deposit Accounts with Tenors of 3-12 Months at BTN
	d. Deposito dengan jangka waktu 3 s.d. 12 bulan di Bank Mandiri	1.076.000.000.000	-	d. Deposit Accounts with Tenors of 3-12 Months at Bank Mandiri
Jumlah Dana Pungutan dan PDD		**6.017.189.943.882**	**5.575.957.290.188**	**Total Levy Funds and Unearned Revenue**

3.2.2 Dana Setoran ke Kas Negara

Dana Setoran ke Kas Negara pada Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp508.230.084,00. Dana Setoran ke Kas Negara tahun 2018 tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 11 Februari 2019 dan 13 September 2019.

3.2.2 Funds for State Treasury Payment

Funds for State Treasury Payment in Restricted Cash as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp0.00 and Rp508,230,084.00 respectively. Funds for State Treasury Payment in 2018 were paid into the State Treasury on 11th February 2019 and 13th September 2019.

3.2.3 Dana Pembayaran PPh Badan

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya yang dipergunakan untuk Dana Pembayaran PPh Badan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.577.073.756,00 dan Rp46.468.172.306,00 (lihat Catatan 3.20 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

3.2.3 Corporate Tax Payable Funds

The balance of Restricted Cash and Securities used for Corporate Tax Payable Funds as of 31st December 2019 and 2018 was recorded at Rp3,577,073,756.00 and Rp46,468,172,306.00 (refer to Note 3.20 Information and Events After Date of the Financial Statements).

3.3 Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp99.180.029.579,00 dan Rp64.934.053.316,00.

3.3 Receivables

The balance of Receivables as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp99,180,029,579.00 and Rp64,934,053,316.00 respectively.

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Description
Piutang Pungutan	98.393.215.219	63.178.806.016	Levy Receivables
Piutang APBN	786.814.360	1.755.247.300	State Budget Receivables
Jumlah	**99.180.029.579**	**64.934.053.316**	**Total**

Rincian Piutang OJK per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

A breakdown of OJK receivables as of as of 31st December 2019 and 2018 is as follows:

3.3.1 Piutang Pungutan

3.3.1 Levy Receivables

(dalam rupiah | *in rupiah*)

No	Sektor	Piutang Sebelum Penghapusan Receivables Before Write-Off	Penghapusan Piutang Pungutan Written-Off Receivables	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Sector
1	Biaya Tahunan	58.163.204.640	-	58.163.204.640	33.911.349.240	Annual Fee
	a. Perbankan	2.031.318.440	-	2.031.318.440	911.112.611	a. Banking Industry
	b. Pasar Modal	8.439.816.298	-	8.439.816.298	12.804.786.269	b. Capital Market
	c. Industri Keuangan Non Bank	47.692.069.902	-	47.692.069.902	20.195.450.360	c. NBFI
2	Sanksi	16.013.677.000	-	16.013.677.000	11.969.587.992	Penalties
	a. Perbankan	3.202.135.000	-	3.202.135.000	1.582.802.392	a. Banking Industry
	b. Pasar Modal	9.162.632.000	-	9.162.632.000	7.730.834.000	b. Capital Market
	c. Industri Keuangan Non Bank	3.648.910.000	-	3.648.910.000	2.655.951.600	c. NBFI
3	Registrasi	1.025.742.784	-	1.025.742.784	198.279.692	Registration
	Pasar Modal	1.025.742.784	-	1.025.742.784	198.279.692	Capital Market
4	Pengelolaan	3.898.041.581	-	3.898.041.581	10.223.470.218	Management
	a. Bunga Deposito Pengelolaan Dana	3.796.157.531	-	3.796.157.531	9.408.527.554	a. Fund Management Deposit Rate
	b. Denda Wanprestasi	-	-	-	966.720	b. Default Penalties/Fines
	c. Pengembalian Beban	101.884.050	-	101.884.050	813.975.944	c. Return of Overpaid Expenses
5	PUPN	19.292.549.214	-	19.292.549.214	6.876.118.874	State Accounts Receivable Committee (PUPN)
	a. Biaya Tahunan	9.507.977.214	-	9.507.977.214	5.495.408.874	a. Annual Fee
	b. Sanksi Denda	9.784.572.000	-	9.784.572.000	1.380.710.000	b. Fines
Jumlah		**98.393.215.219**	**-**	**98.393.215.219**	**63.178.806.016**	**Total**

Umur piutang pungutan adalah sebagai berikut.

The maturity of levy receivables is presented as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Maturity
Belum jatuh tempo	18.006.311.787	23.628.666.915	Not Yet Due
Telah jatuh tempo			Overdue
a. 1 - 30 Hari	2.114.172.861	1.041.306.864	a. 1 - 30 Days
b. 31 Hari - 3 Bulan	8.690.819.654	13.119.552.127	b. 31 Days - 1 Month
c. 3 Bulan - 6 Bulan	9.349.110.915	4.932.043.008	c. 3 Months - 6 Months
d. 6 Bulan - 1 Tahun	23.623.492.973	6.902.516.302	d. 6 Months - 1 Year
e. Lebih dari 1 Tahun	36.609.307.029	13.554.720.800	e. More than 1 Year
Jumlah	**98.393.215.219**	**63.178.806.016**	**Total**

Dari piutang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun pada tabel di atas sebesar Rp36.609.307.029,00 telah dikategorikan sebagai piutang macet. Dari jumlah tersebut telah dilimpahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp19.292.549.214,00, sehingga masih terdapat piutang macet yang belum dilimpahkan sebesar Rp17.316.757.815,00 (lihat Catatan 3.20 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

Of the receivables with a maturity of more than one year presented in the table above, Rp36,609,307,029.00 was identified as uncollectable. Of that total, Rp19,292,549,214.00 has been referred to the State Accounts Receivable Committee (PUPN), Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance, with the remaining Rp17,316,757,815.00 of uncollectable receivables not yet referred to the State Accounts Receivable Committee (PUPN), Directorate General of State Assets of the Ministry of Finance (Note 3.20 Information and Events After Date of the Financial Statements).

Pada tahun 2019, OJK memiliki hak tagih kepada Wajib Bayar yang belum registrasi pada aplikasi SIPO sejak tahun 2014. Tagihan tersebut dikategorikan sebagai tagihan yang tingkat pembayarannya tidak andal sehingga tidak dicatat sebagai piutang pada neraca (pencatatan off-balance sheet). Berdasarkan SEDK Nomor 1/SEDK.02/2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 30/SEDK.02/2017 tentang Pedoman Akuntansi Piutang OJK, tagihan sebanyak 1.541 (seribu lima ratus empat puluh satu) Wajib Bayar yang belum registrasi dicatat pada Laporan Kontinjensi dengan nilai sebesar Rp51.884.609.071,00 (Lampiran II).

In 2019, OJK maintained the right to collect on levy payers unregistered in the SIPO application since 2014. Such claims are categorised as receivables with unreliable payment levels and are not recorded as receivables on the balance sheet (of-balance sheet). In accordance with BOC Circular Letter (SEDK) No. 1/SEDK.02//2019, dated 30th July 2019, as an Amendment to BOC Circular Letter (SEDK) No. 30/SEDK.02/2017, dated 18th December 2017, concerning OJK Accounting Guidelines for Receivables, claims on 1,541 unregistered payers were recorded in the Contingency Report totalling Rp51,884,609,071.00 (Appendix II).

3.3.2 Piutang APBN

Piutang APBN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp786.814.360,00 dan Rp1.755.247.300,00 merupakan piutang atas kelebihan pembayaran gaji dan kelebihan pembayaran beban yang bersumber dari dana APBN (lihat Catatan 3.22 Penatausahaan Aset Barang Milik Negara).

3.3.2 State Budget Receivables

State Budget Receivables as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp786,814,360.00 and Rp1,755,247,300.00 in the form of overpayment of employee salaries sourced from the state budget (refer to Note 3.22 Administration of State Assets)

3.4 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 merupakan perlengkapan kantor masing-masing sebesar Rp15.677.466.268,00 dan Rp16.663.426.221,00. Mutasi Persediaan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

3.4 Inventories

The balance of Inventory as of 31st December 2019 and 2018 was recorded at Rp15,677,466,268.00 and Rp16,663,426,221.00 respectively. The movement of inventories in 2019 was as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	Jumlah Total		Description
Saldo per 31 Desember 2018		**16.663.426.221**	**Balance as of 31st December 2018**
Mutasi Tambah:			Additions
Pembelian Persediaan		23.197.880.839	Inventory Purchases;
Mutasi Kurang:			Deductions
Beban Persediaan (sebelum penyesuaian)	22.920.017.522		Inventory Expenses (before adjustment)
Penyesuaian atas persediaan yang didanai APBN (Persediaan Usang)	1.263.823.270		Adjustment to Inventories Funded by State Budget (Obsolete Inventory)
Jumlah Beban Persediaan (setelah penyesuaian)		24.183.840.792	Total Inventory Expenses (After Adjustment)
Saldo per 31 Desember 2019		**15.677.466.268**	**Balance as of 31st December 2019**

Lokasi persediaan OJK adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Lokasi	31 Desember 2019	Location
Kantor Pusat	11.277.484.075	Head Office
Kantor Regional	1.701.532.560	Regional Offices
Kantor OJK	2.698.449.633	Branch Offices
Jumlah	**15.677.466.268**	**Total**

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp15.677.466.268,00 terdiri dari:

a. Nilai Persediaan yang dibiayai dari APBN sebesar Rp181.089.590,00 (lihat Catatan 3.22 Penatausahaan Aset Barang Milik Negara).
b. Nilai Persediaan yang dibiayai dari Pungutan sebesar Rp15.496.376.678,00.

Saldo Persediaan Usang yang dibiayai dari APBN sebesar Rp1.263.823.270,00 (Lampiran III) tidak disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2019 namun hanya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlakuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan PMK 181/PMK.06/2016 Lampiran V Pedoman Akuntansi Dalam Penatausahaan BMN Romawi II angka 2 yang menyatakan bahwa Persediaan usang cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Perlakuan Persediaan Usang dimaksud dibagi dalam 4 (empat) kategori antara lain:

a. Penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan untuk barang persediaan yang memiliki identitas organisasi sebesar Rp388.954.300,00. Progres penghapusan per 31 Desember 2019, OJK telah menyampaikan usulan penghapusan melalui Surat Kepala Departemen Logistik Nomor S-292/MS.3/2019 tanggal 15 Oktober 2019 hal Usul Penghapusan atas Barang Milik Negara Berupa Persediaan Usang yang Memiliki Identitas Organisasi dengan Tindak Lanjut Pemusnahan. Atas surat tersebut, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA) meminta kelengkapan usulan penghapusan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2415/AG/2019 tanggal 21 November 2019 hal Permintaan Kelengkapan Usulan Penghapusan BMN Berupa Persediaan Barang Usang, dan OJK menyampaikan kelengkapan usulan penghapusan tersebut melalui Surat Kepala Departemen Logistik selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor S-386/MS.33/2019 tanggal 13 Desember 2019 hal Penyampaian Dokumen Asli Usulan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Persediaan Barang Usang. Selanjutnya, berdasarkan surat tersebut, DJA menyampaikan persetujuan pemusnahan melalui Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2672/AG/2019 tanggal 20 Desember 2019 hal Persetujuan Pemusnahan Barang Milik Negara Berupa Persediaan Barang Usang pada Otoritas Jasa Keuangan (lihat Catatan 3.20 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

The balance of Inventory as of 31st December 2019 was recorded at Rp15,677,466,268.00, consisting of:

a. Inventory funded by the State Budget recorded at Rp181,089,590.00 (refer to Note 3.22 Administration of State Assets).
b. Inventory funded by the Levy Fund recorded at Rp15,496,376,678.00.

The balance of Obsolete Inventories funded by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN), totalling Rp1,263,823,270.00 (Appendix III) is not presented in the balance sheet as of 31st December 2019 yet disclosed in the Notes to the Financial Statements in accordance with PMK No. 181/PMK.06/2016, Appendix V Accounting Guidelines for the Administration of State Property, II point 2, which states that Obsolete Inventories must be disclosed in the Notes to the Report on State Property (CaLBMN) and the Notes to the Financial Statements (CaLK). The treatment of Obsolete Inventories is divided into 4 (four) categories as follows:

a. Written-off for destruction of inventories with organisational identity totalling Rp388,954,300.00. In terms of write-off progress as of 31st December 2019, OJK submitted a write-off proposal through Head of Logistics Department Letter No. S-292/MS.3/2019, dated 15th October 2019, regarding Writing Off State Property in the form of Obsolete Inventory with an Organisational Identity without Destruction. Based on that letter, the Directorate General of Budget of the Ministry of Finance requested a comprehensive proposal through Director General of Budget Letter No. S-2415/AG/2019, dated 21st November 2019, regarding a Request for Comprehensive Write-Off Proposal for State Property in the form of Obsolete Inventory, which OJK provided through Head of Logistics Department Letter No. S-386/MS.33/2019, dated 13th December 2019, regarding the Original Document of Write-Off Proposal for State Property in the form of Obsolete Inventory. Based on that letter, the Directorate General of Budget of the Ministry of Finance approved the destruction of State Property in the form of Obsolete Inventory through Director General of Budget Letter No. S-2672/AG/2019, dated 20th December 2019, regarding Approval for the Destruction of State Property in the form of Obsolete Inventory at the Financial Services Authority (Note 3.20 Information and Events After Date of the Financial Statements).

b. Penghapusan dengan tindak lanjut penjualan untuk barang persediaan yang masih memiliki nilai jual sebesar Rp640.951.770,00. Progres penghapusan saat ini dalam tahap penunjukan Konsultan Penilai untuk melakukan penilaian untuk menentukan nilai limit terendah penjualan.
c. Penghapusan melalui proses Tuntutan Ganti Kerugian Negara (TGR) untuk barang persediaan yang tidak ditemukan senilai Rp229.297.200,00. Progres penghapusan saat ini dalam tahap penyusunan konsep usulan penetapan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) ke Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.
d. Persediaan sebesar Rp4.620.000,00 telah digunakan dan didistribusikan oleh satker pengguna.

3.5 Uang Muka

Saldo Uang Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp28.133.965.259,00 dan Rp0,00. Uang Muka tahun 2019 merupakan Uang muka pembelian, terdiri dari:

a. Uang muka pembelian atas pekerjaan di Kantor OJK sebesar Rp24.870.039.471,00 dengan rincian:
   - Pengadaan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung KOJK Provinsi Nusa Tenggara Barat (Mataram) Tahun Anggaran 2019-2020 sebesar Rp9.125.812.126,00;
   - Pengadaan Jasa Konstruksi Struktur dan Mekanikal Elektrikal Plumbing (MEP) dalam rangka Pembangunan Gedung KOJK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan KOJK Solo Tahun Anggaran 2019-2020 sebesar Rp9.259.926.302,00 dan Rp3.845.256.591,00; dan
   - Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konstruksi Interior dan Fasilitas Penunjang Dalam Rangka Pembangunan Gedung KOJK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan KOJK Solo Tahun Anggaran 2019-2020 sebesar Rp2.639.044.452,00.
b. Uang muka pembelian atas pekerjaan di Kantor Pusat OJK sebesar Rp3.263.925.788,00 dengan rincian:
   - Pengadaan Jasa Konsultan Quantity Surveyor Dalam Rangka Pembangunan Gedung Indonesia Financial Center (IdFC) Di Lot 1 SCBD Tahun Anggaran 2019-2022 sebesar Rp363.925.788,00; dan
   - Pengadaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Dalam Rangka Pembangunan Gedung IdFC di Lot 1 Tahun Anggaran 2019-2023 sebesar Rp2.900.000.000,00.

3.6 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp356.626.494.298,00 dan Rp451.932.891.208,00 terdiri dari:

b. Written-off for sale for inventory items with a resale value totalling Rp640,951,770.00. OJK is currently seeking to appoint an Appraisal Consultant to establish the lowest selling value.

c. Written-off through state compensation claims (TGR) for lost inventory totalling Rp229,297,200.00. OJK is currently formulating a proposal of a concept to establish a State Loss Settlement Team (TPKN) to the Director General of Budget of the Ministry of Finance.

d. Inventory totalling Rp4,620,000.00 that has been distributed and utilised by the respective work units.

3.5 Advance Payments

The balance of Advance Payments as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp28,133,965,259.00 and Rp0.00. Advance Payments in 2019 were used for the following:

a. Advance Payments for work at OJK Offices totalling Rp24,870,039,471.00 recapitulated as follows:
   - *Construction Services for OJK Regional Office in West Nusa Tenggara (Mataram) in 2019-2020 fiscal year totalling Rp9,125,812,126.00;*
   - *Construction Services and Mechanical Electrical Plumbing (MEP) for OJK Regional Offices in Yogyakarta and Solo in 2019-2020 fiscal year totalling Rp9,259,926,302.00 and Rp3,845,256,591.00; and*
   - *Interior Construction Services and Supporting Facilities for OJK Regional Offices in Yogyakarta and Solo in 2019-2020 fiscal year totalling Rp2,639,044,452.00.*

b. Advance Payments for work at OJK Head Office totalling Rp3,263,925,788.00 recapitulated as follows:
   - *Quantity Surveyor Consultancy Services for Indonesia Financial Centre (IdFC), located at Lot 1, SCBD, in 2019-2020 fiscal year totalling Rp363,925,788.00; and*
   - *Construction Management Consultancy Services for Indonesia Financial Centre (IdFC), located at Lot 1, SCBD, in 2019-2020 fiscal year totalling Rp2,900,000,000.00.*

3.6 Prepaid Expenses

The balance of Prepaid Expenses as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp356,626,494,298.00 and Rp451,932,891,208.00 respectively as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Description
Sewa Kantor OJK	259.008.534.428	392.015.446.062	OJK Office Leases
Sewa Rumah Jabatan	24.949.926.895	33.643.716.150	Official Residence Leases
Software dan Lisensi	72.279.283.037	25.851.687.498	Software and Licenses
Premi Asuransi	388.749.938	422.041.498	Insurance Premiums
Jumlah	**356.626.494.298**	**451.932.891.208**	**Total**

Mutasi Beban Dibayar Dimuka sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut.

The movement of Prepaid Expenses as of 31st December 2019 was as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	Jumlah	Description
Saldo per 31 Desember 2018	**451.932.891.208**	**Balance as of 31st December 2018**
Mutasi Tambah:		Additions
Pembayaran atas Beban Dibayar Dimuka sampai dengan 31 Desember 2019	250.448.639.290	Prepaid Expenses Payments as of 31st December 2019;
Mutasi Kurang:		Deductions
Jumlah yang Telah Dimanfaatkan/Beban	345.755.036.207	Total Utilised
Penyesuaian atas BDM yang didanai APBN	(7)	Adjustment to State Property funded by State Budget
Saldo per 31 Desember 2019	**356.626.494.298**	**Balance as of 31st December 2019**

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp356.626.494.298,00 yang dibiayai dari dana pungutan sebesar Rp356.209.827.614,00 dan yang dibiayai dari dana APBN sebesar Rp416.666.684,00 (lihat Catatan 3.22 Penatausahaan Aset Barang Milik Negara).

The balance of Prepaid Expenses as of 31st December 2019 totalling Rp356,626,494,298.00 was paid from the Levy Fund totalling Rp356,209,827,614.00 and from the State Budget totalling Rp416,666,684.00 (refer to Note 3.22 Administration of State Assets).

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 dikelompokkan sebagai berikut.

A summary of Prepaid Expenses as of 31st December 2019 is as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	Kantor Pusat Head Office	Kantor Regional Regional Offices	Kantor OJK Branch Offices	Jumlah Total	Description
Sewa Kantor	221.135.800.556	17.289.756.331	20.582.977.541	259.008.534.428	Office Leases
Sewa Rumah Jabatan	19.349.875.000	2.561.467.611	3.038.584.284	24.949.926.895	Official Residence Leases
Premi Asuransi	141.160.840	24.250.582	223.338.516	388.749.938	Insurance Premiums
Software dan Lisensi	72.279.283.037	-	-	72.279.283.037	Software and Licenses
Jumlah	**312.906.119.433**	**19.875.474.524**	**23.884.900.341**	**356.626.494.298**	**Total**

Terkait sewa gedung kantor pusat, Gedung Wisma Mulia 1 disewa selama 3 (tiga) tahun dengan opsi perpanjangan 1 (satu) tahun menggunakan harga sewa yang sama. Pada tanggal 27 Desember 2016, OJK telah menandatangani Surat Perjanjian Sewa Gedung Wisma Mulia 1 dengan PT Sanggarcipta Kreasitama Nomor SPJ-01/MS.4/PPK/PSGKPWM1/2016 untuk masa sewa selama 3 (tiga) tahun dengan opsi pembelian dan nilai kontrak sebesar Rp608.869.024.632,00. Kontrak tersebut mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 14 Juli 2021 dengan masa

Concerning the lease of the head office building, Gedung Wisma Mulia 1 was leased for three years with a further one-year option at the same rate. On 27th December 2016, OJK signed a lease agreement for Gedung Wisma Mulia 1 with PT Sanggarcipta Kreasitama No. SPJ-01/MS.4/PPK/PSGKPWM1/2016 for a period of three years with an option to buy with a contract value of Rp608,869,024,632.00. The lease agreement is effective from the signing date until 14th July 2021 with a 12-month grace period. The first term payment

grace period selama 12 bulan. Pembayaran termin I sebesar Rp412.308.289.800,00 dilakukan pada tanggal 28 Desember 2016 dan service charge Tahun 2018 sebesar Rp57.053.801.112,00 pada tanggal 6 Juni 2018. Pembebanan sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp309.448.923.212,00 sehingga saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp159.913.167.700,00. Selain itu, Saldo Beban Dibayar Dimuka untuk Sewa Kantor Pusat terdiri dari:

a. Sewa Data Centre Co Location sebesar Rp3.675.003.750,00 dengan masa sewa kontrak 5 (lima) tahun dan berakhir pada Juni 2020;
b. Sewa gudang sebesar Rp200.040.192,00 dengan masa sewa kontrak 6 (enam) bulan dan berakhir pada Juni 2020;
c. Sewa gedung Wisma Mulia II sebesar Rp42.997.154.816,00 dengan masa sewa kontrak 1 (satu) tahun dan berakhir antara Bulan November - Desember 2020; dan
d. Service charge Wisma Mulia II sebesar Rp14.350.434.098,00 dengan masa sewa kontrak 1 (satu) tahun dan berakhir antara Bulan November - Desember 2020.

Beban Dibayar Dimuka untuk Sewa Kantor Regional terdiri dari Kantor Regional 6 sebesar Rp8.976.000.000,00, Kantor Regional 7 sebesar Rp1.133.333.327,00, Kantor Regional 8 sebesar Rp5.562.500.000,00, Kantor Regional 9 sebesar Rp1.324.999.994,00, dan Kantor Regional 5 sebesar Rp292.923.010,00. Beban Dibayar Dimuka untuk Sewa Kantor OJK merupakan sewa 23 KOJK di seluruh Indonesia sebesar Rp20.582.977.541,00.

totalling Rp412,308,289,800.00 was disbursed on 28th December 2016 and the service charge for 2018 totalling Rp57,053,801,112.00 on 6th June 2018. As of 31st December 2019, a rental fee of Rp309,448,923,212.00 was paid, thus bringing the Balance of Prepaid Expenses as of 31st December 2019 to Rp159,913,167,700.00. In addition, the Balance of Prepaid Expenses for the Head Office Lease consists of the following:

a. Lease of Data Centre Colocation totalling Rp3,675,003,750.00 for a 5-year period ending in June 2020;
b. Lease of warehouse and storage totalling Rp200,040,192.00 for a 6-month period ending in June 2020;
c. Lease of Wisma Mulia II building totalling Rp42,997,154,816.00 for a 1-year period ending in November-December 2020; and
d. Service Charge incurred for Wisma Mulia II building totalling Rp14,350,434,098.00 for a 1-year period ending in November-December 2020.

Prepaid Expenses for regional office leases consist of Region 6 totalling Rp8,976,000,000.00, Region 7 totalling Rp1,133,333,327.00, Region 8 totalling Rp5,562,500,000.00, Region 9 totalling Rp1,324,999,994.00 and Region 5 totalling Rp292,923,010.00. In total, Prepaid Expenses for regional office leases encompass 23 regional offices throughout Indonesia totalling Rp20,582,977,541.00.

3.7 Aset Tetap

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.322.027.084.365,00 dan Rp1.131.006.861.461,00. Rincian dan mutasi Aset Tetap selama Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

3.7 *Fixed Assets*

The balance of Fixed Assets as of 31st December 2019 and 2018 was recorded at Rp1,322,027,084,365.00 and Rp1,131,006,861,461.00 respectively. The summary and movement of Fixed Assets in 2018 are detailed as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Harga Perolehan	31 Desember 2018	Penambahan Additions	Pengurangan Deductions	Penyesuaian*) Adjustments*	31 Desember 2019	Acquisition Cost
Tanah	786.058.436.795	228.562.133.418	-	-	1.014.620.570.213	Land
Gedung dan Bangunan	65.100.338.153	2.658.037.992	17.635.469.814	-	50.122.906.331	Office Buildings
Peralatan dan Mesin	656.979.627.962	66.750.323.019	-	4.188.145.214	727.918.096.195	Equipment and Machinery
Aset Tetap Lainnya	76.806.324.781	6.759.478.228	-	45.986.003.466	129.551.806.475	Other Fixed Assets
Jumlah	**1.584.944.727.691**	**304.729.972.657**	**17.635.469.814**	**50.174.148.680**	**1.922.213.379.214**	**Total**
Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2018	Penambahan Additions	Pengurangan Deductions	Penyesuaian*) Adjustments*	31 Desember 2019	Acquisition Cost
Tanah	-	-	-	-	-	Land
Gedung dan Bangunan	(4.317.406.206)	(3.233.020.804)	(1.763.546.982)	-	(5.786.880.028)	Office Buildings
Peralatan dan Mesin	(412.474.365.977)	(97.999.895.343)**	-	(21.119.929.048)	(531.594.190.368)	Equipment and Machinery
Aset Tetap Lainnya	(37.146.094.047)	(25.659.130.406)	-	-	(62.805.224.453)	Other Fixed Assets
Total Penyusutan	(453.937.866.230)	(126.892.046.553)	(1.763.546.982)	(21.119.929.048)	(600.186.294.849)	Total Depreciation
Jumlah Tercatat Aset Tetap	**1.131.006.861.461**	**177.837.926.104**	**(15.871.922.832)**	**29.054.219.632**	**1.322.027.084.365**	**Book Value of Fixed Assets**

*) Penyesuaian sebesar Rp29.054.219.632,00 merupakan penyesuaian Aset Tetap yang didanai APBN per 31 Desember 2018.
**) Penambahan penyusutan sebesar Rp97.999.895.343,00 termasuk penyesuaian Beban Penyusutan tahun berjalan atas Aset Tetap yang didanai APBN sebesar Rp6.806.102.787,00.

* *Adjustments totalling Rp29,054,219,632.00 to Fixed Assets funded by the State Budget as of 31st December 2018.*
** *Additions totalling Rp97,999,895,343.00, including adjustments to Depreciation Expenses in the current year on Fixed Assets funded by the State Budget totalling Rp6,806, 102,878.00.*

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.322.027.084.365,00 terdiri dari:

a. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp64.799.520.262,00 (lihat Catatan 3.22 Penatausahaan Aset Barang Milik Negara); dan
b. Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp1.257.227.564.103,00.

Atas Aset Tetap tersebut, terdapat Aset Tetap hilang yang belum dihapuskan dari pencatatan senilai Rp177.043.540,00 per 31 Desember 2019 sebagaimana pada Lampiran IV. Aset tersebut masih tercatat karena tindak lanjut atas barang hilang dimaksud masih dalam proses. Progres tindak lanjut penghapusan tersebut sebagai berikut.

a. Penghapusan Aset Tetap (BMN), OJK telah menyampaikan usulan permohonan penghapusan kepada Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (DJA) melalui Surat Kepala Departemen Logistik selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor S-362/MS.33/2019 tanggal 4 Desember 2019 hal Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Hilang (lihat Catatan 3.20 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan); dan
b. Penghapusan Aset Tetap (BMOJK), OJK telah melakukan verifikasi sebagaimana dituangkan dalam LAP-1/MS.212/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Laporan Hasil Verifikasi Hilangnya Barang Milik Negara dan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan. Kepala Departemen Logistik melalui Nota Dinas Nomor ND-329/MS.33/2019 dan ND-330/MS.33/2019 tanggal 1 November 2019 hal Penghapusbukuan Barang Hilang di Satuan Kerja telah meminta Kepala OJK Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua dan Kepala OJK Purwokerto untuk melakukan penghapusbukuan BMOJK sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam SEDK Nomor 1/SEDK.01/2019 tentang Penghapusan Barang Milik Otoritas Jasa Keuangan.

Pada tahun 2019, OJK melakukan pengadaan Tanah, Gedung dan Bangunan yaitu:

The balance of Fixed Assets as of 31st December 2019 was measured at Rp1,322,027,084,365.00 as follows:

a. Book value of the acquisition of Fixed Assets in 2013 and 2014 paid using Rp64,799,520,262.00 of the State Budget (refer to Note 3.22 Administration of State Assets) and;
b. Book value of the acquisition of Fixed Assets in 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019 paid using Rp1,257,227,564,103.00 of Levy Funds.

Of the Fixed Assets, Rp177,043,540.00 had not been written off as of 31st December 2019 as presented in Appendix IV. The assets were still measured because the follow-up action for lost goods is still under process as follows:

a. Write-off of Fixed Assets, OJK has submitted a write-off proposal to the Directorate General of Budget of the Ministry of Finance through Head of Logistics Department Letter No. S-362/MS.33/2019, dated 4th December 2019, regarding Writing Off Lost State Property (refer to Note 3.20 Information and Events After Date of the Financial Statements); and
b. Write-off of Fixed Assets (OJK Property), OJK has performed verification activities pursuant to LAP-1/MS.212/2019, dated 25th March 2019, concerning the Verification of Lost State Property and OJK Property. Through Official Memorandum No. ND-329/MS.33/2019 and ND-330/MS.33/2019, dated 1st November 2019, concerning Writing Off Lost Property in Work Units, the Head of the Logistics Department requested the Head of OJK offices in Region 6, namely Sulawesi, Maluku and Papua, as well as the Head of OJK Purwokerto, to write off fixed assets in accordance with BOC Circular Letter (SEDK) No. 1/SEDK.01/2019 concerning Writing Off OJK Property.

In 2019, OJK purchased the following Land and Buildings:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	Jumlah	Description
Tanah		Land
KOJK Provinsi Lampung	40.162.408.930	Lampung OJK Branch Office
KOJK Provinsi Jambi	14.526.180.000	Jambi OJK Branch Office
KR 7 Sumatera Bagian Selatan	125.161.136.800	Region 7 Office - Southern Sumatra
KOJK Solo	6.434.840.250	Solo OJK Branch Office
KR 4 Jawa Timur	42.047.567.438	Region 4 Office - East Java
Kapitalisasi atas Tanah Perolehan 2018 (KOJK Malang)	230.000.000	Capitalisation of Land Acquired in 2018 (Malang OJK Branch Office)
Jumlah	**228.562.133.418**	**Total**

Keterangan	Jumlah	Description
Gedung dan Bangunan		Buildings
KR 4 Jawa Timur	2.213.465.312	Region 4 Office - East Java
KOJK Malang	444.572.680	Malang OJK Branch Office
Jumlah	**2.658.037.992**	**Total**

Status hak kepemilikan Tanah per 31 Desember 2019 yaitu satu lokasi dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan, satu lokasi dengan status Hak Pakai atas nama Pemerintah RI c.q. OJK dan dalam proses balik nama, tiga lokasi dengan Sertifikat Hak Pakai, dan enam lokasi dalam proses balik nama. Berdasarkan Surat dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1898/29.2/VII/2018 tanggal 11 Juli 2018 tentang Pengajuan Usulan Penetapan Status Hak Atas Tanah yang Dibeli dengan Menggunakan Anggaran OJK yang Bersumber dari Pungutan dapat disampaikan sebagai berikut.

a. Status tanah yang dibeli OJK menggunakan anggaran OJK yang bersumber dari Pungutan dapat diberikan Hak Pakai selama dipergunakan;
b. terkait dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hal ini merupakan kewenangan Menteri Keuangan dan Pemerintah Daerah.

The status of Land Ownership Rights as of 31st December 2019 is one location with Building Rights Certificate, one location with Usage Rights on Behalf of the Government of the Republic of Indonesia, c.q. OJK and in the transfer of ownership process, three locations with Usage Rights Certificates and six locations in the transfer of ownership process. In accordance with Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency No. 1898/29.2/VII/2018 dated 11th July 2018, concerning Request for Ownership Rights on Purchased Land using OJK Budget Funds from Levies:

a. The land purchased by OJK using OJK budget from levy funds receives Usage Rights during the period of use;
b. The Transfer Duty on Land and Buildings (BPHTB) is under the authority of the Ministry of Finance and Local Government.

Terdapat pengurangan aset tetap sebesar Rp17.635.469.814,00 yang merupakan penghapusan aset tetap berupa gedung dan bangunan yang telah dibongkar yaitu gedung KOJK Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp11.449.322.557,00, gedung KOJK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp3.327.926.242,00 dan gedung KOJK Solo sebesar Rp2.858.221.015,00. OJK menggunakan Gedung Sumitro Djojohadikusumo sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335/KM.6/2019 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara yang Dioperasikan Oleh Pihak Lain Dalam Rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

A deduction to fixed assets totalling Rp17,635,469,814.00 was recorded as a write-off of fixed assets in the form of deconstructed buildings, namely the Branch Office in West Nusa Tenggara totalling Rp11,449,322,557.00, Branch Office in Yogyakarta totalling Rp3,327,926,242.00 and Branch Office in Solo totalling Rp2,858,221,015.00. OJK utilised the Sumitro Djojohadikusumo Building in accordance with Minister of Finance Decree No. 335.KM.6/2019 concerning the Status of State Property Operated by a Third Party for Government Affairs based on Regulations in the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia.

Dalam Diktum Keempat Keputusan tersebut dinyatakan bahwa Jangka waktu pengoperasian Barang Milik Negara dhi Gedung Sumitro Djojohadikusumo adalah selama OJK melaksanakan tugas dan fungsinya untuk penyelenggaran urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

The fourth Dictum stipulates that the period of operation of state property in the Sumitro Djojohadikusumo Building is the duration of task and function implementation by OJK for government affairs based on prevailing regulations.

Untuk pembelian peralatan dan mesin selama tahun 2019 tercatat sebesar Rp66.750.323.019,00 antara lain Data Storage HPE 3Par 20840 sebesar Rp4.527.242.390,00, Perangkat Jaringan Netscout Infinitestream sebesar Rp4.465.633.332,00, dan Perangkat Jaringan Trend Micro sebesar Rp3.370.412.100,00.

Purchases of equipment and machinery in 2019 were recorded at Rp66,750,323,019.00, including HPE 3Par 20840 Data Storage totalling Rp4,527,242,390.00, Netscout InfiniStream network appliances totalling Rp4,465, 633,332.00 and Trend Micro network appliances totalling Rp3,370,412,100.00.

Sementara itu, pembelian aset tetap lainnya selama tahun 2019 tercatat sebesar Rp6.759.478.228,00 antara lain Penataan Gedung Kantor KOJK Nusa

Meanwhile, purchases of other fixed assets in 2019 were recorded at Rp6,759,478,228.00, including the arrangement of OJK Branch Office in East

Tenggara Timur sebesar Rp5.220.003.121,00, Penataan Lantai 2 Gedung MRP sebesar Rp210.916.211,00, Penataan Hall Lantai 3 Gedung KOJK Cirebon sebesar Rp62.817.568,00, dan Penataan Rumah Jabatan Ketua DK OJK sebesar Rp46.365.000,00.

Nusa Tenggara totalling Rp5,220,003,121.00, arrangement of the second floor of the MRP building totalling Rp210,916,211.00, arrangement of the third-floor hall of OJK Branch Office in Cirebon totalling Rp62,817,568.00 and arrangement of the Official Residence of the Chairman of OJK BoC totalling Rp46,365,000.00.

3.8 Aset Takberwujud

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp88.817.745.651,00 dan Rp107.174.046.659,00.

Rincian dan mutasi Aset Takberwujud selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

3.8 *Intangible Assets*

The balance of Intangible Assets as of 31st December 2019 and 2018 was recorded at Rp88,817,745,651.00 and Rp107,174,046,659.00 respectively.

A summary of Intangible Assets and movements in 2019 is as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Harga Perolehan	31 Desember 2018	Penambahan Additions	Reklasifikasi Reclassifications	Penyesuaian*) Adjustments*	31 Desember 2019	Acquisition Cost
Aset Takberwujud	292.350.109.917	15.975.426.074	2.303.642.000	(4.131.593.367)	306.497.584.624	Intangible Assets
Jumlah	**292.350.109.917**	**15.975.426.074**	**2.303.642.000**	**(4.131.593.367)**	**306.497.584.624**	**Total**

Harga Perolehan	31 Desember 2018	Penambahan Additions	Reklasifikasi Reclassifications	Penyesuaian*) Adjustments*	31 Desember 2019	Acquisition Cost
Aset Takberwujud	(185.176.063.258)	(63.592.472.868) **	-	31.088.697.153	(217.679.838.973)	Intangible Assets
Jumlah	**(185.176.063.258)**	**(63.592.472.868)**	**-**	**31.088.697.153**	**(217.679.838.973)**	**Total**

*)Penyesuaian sebesar Rp26.957.103.786,00 merupakan penyesuaian Aset Takberwujud yang didanai APBN per 31 Desember 2018.
**) Penambahan amortisasi sebesar Rp63.592.472.868,00 termasuk penyesuaian Beban Amortisasi tahun berjalan atas Aset Takberwujud yang didanai APBN sebesar Rp4.961.173.943,00.

* *Adjustments totalling Rp26,957,103,786.00 to Fixed Assets funded by the State Budget as of 31st December 2018.*
** *Additions totalling Rp63,592,472,868.00, including adjustments to Amortisation Expenses in the current year on Intangible Assets funded by the State Budget totalling Rp4,961,173,943.00.*

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp88.817.745.651,00 terdiri dari:

a. Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN sebesar Rp21.995.929.843,00 (lihat Catatan 3.22 Penatausahaan Aset Barang Milik Negara).
b. Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud Tahun Anggaran 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 yang dibiayai dari pungutan sebesar Rp66.821.815.808,00.

The balance of Intangible Assets as of 31st December 2019, recorded at Rp88,817,745,651.00, consists of the following:

a. Book value of acquired Intangible Assets in 2013 and 2014, funded by the State Budget totalling Rp21,995,929,843.00 (refer to Note 3.22 Administration of State Property);
b. Book value of acquired Intangible Assets in 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019, funded by levy funds totalling Rp66,821,815,808.00.

Terdapat reklasifikasi masuk dari Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp2.303.642.000,00 yang terdiri dari:

a. Aplikasi Record Management System OJK (SIPENA) sebesar Rp1.137.895.000,00;
b. Aplikasi Learning Management System (LMS) sebesar Rp513.414.000,00;
c. Aplikasi Sistem Informasi Pasar Modal Terpadu (SIPM) sebesar Rp97.713.000,00; dan
d. Aplikasi Sistem Perizinan dan Registerasi Terintegrasi (SPRINT) sebesar Rp554.620.000,00.

In 2019, there was a reclassification from Assets Under Construction totalling Rp2,306,642,000.00 consisting of:

a. OJK Record Management System (SIPENA) totalling Rp1,137,895,000.00;
b. Learning Management System (LMS) totalling Rp513,414,000.00;
c. Integrated Capital Market Information System (SIPM) totalling Rp97,713,000.00; and
d. Integrated Licensing and Registration System (SPRINT) totalling Rp554,620,000.00

3.9 Aset Dalam Penyelesaian

Saldo Aset Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp100.660.394.196,00 dan Rp2.303.642.000,00.

3.9 *Assets Under Construction*

The balance of Assets Under Construction as of 31st December 2019 and 2018 was recorded at Rp100,660,394.00 and Rp2,303,642,000.00 respectively.

A summary of Assets Under Construction and movements in 2019 is as follows:

Akun	31 Desember 2018	Penambahan *Additions*	Pengurangan *Deductions*	Reklasifikasi *Reclassifications*	31 Desember 2019	*Account*
Aset Dalam Penyelesaian	2.303.642.000	100.660.394.196	-	(2.303.642.000)	100.660.394.196	*Assets Under Construction*
Jumlah Tercatat Aset Dalam Penyelesaian	2.303.642.000	100.660.394.196	-	(2.303.642.000)	100.660.394.196	*Total Recorded Value of Intangible Assets*

Pada tahun 2019, terdapat penambahan Aset Dalam Penyelesaian sebesar Rp100.660.394.196,00 yang terdiri dari:

a. Persiapan Pembangunan Gedung Kantor Pusat sebesar Rp3.349.297.005,00.

b. Pekerjaan pembangunan dan penataan Gedung Kantor OJK dengan rincian:
   - Pembangunan Gedung Kantor KOJK Solo sebesar Rp40.996.805.922,00;
   - Pembangunan Gedung Kantor KOJK DIY sebesar Rp30.689.965.246,00;
   - Pembangunan Gedung Kantor KOJK NTB sebesar Rp22.067.748.483,00; dan
   - Penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp198.572.000,00.

c. Pengembangan dan pembangunan aplikasi dengan rincian:
   - Pengembangan Dashboard Keuangan sebesar Rp1.000.000.000,00;
   - Pembangunan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebesar Rp905.098.040,00; dan
   - Pembangunan Sistem Aplikasi Penerimaan OJK (SIPO) G2 sebesar Rp1.452.907.500,00.

Terdapat reklasifikasi keluar ke Aset Takberwujud sebesar Rp2.303.642.000,00 yang terdiri dari:

a. Aplikasi Record Management System OJK (SIPENA) sebesar Rp1.137.895.000,00;
b. Aplikasi Learning Management System (LMS) sebesar Rp513.414.000,00;
c. Aplikasi Sistem Informasi Pasar Modal Terpadu (SIPM) sebesar Rp97.713.000,00; dan
d. Aplikasi Sistem Perizinan dan Registerasi Terintegrasi (SPRINT) sebesar Rp554.620.000,00.

In 2019, additions to Assets Under Construction totalling Rp100,660,394,196.00 consisted of the following:

a. Preparations for construction of Head Office buildings totalling Rp3,349,297,005.00;

b. Construction and arrangement work at OJK offices recapitulated as follows:
   - *Construction of OJK Branch office in Solo totalling Rp40,996,805,922.00;*
   - *Construction of OJK Branch office in Yogyakarta totalling Rp30,689,965,246.00;*
   - *Construction of OJK Branch office in West Nusa Tenggara totalling Rp22,067,748,483.00; and*
   - *Arrangement of OJK Provincial office in East Kalimantan totalling Rp198,572,000.00*

c. Development of application systems recapitulated as follows:
   - *Development of Financial Dashboard totalling Rp1,000,000,000.00;*
   - *Development of Consumer Protection Portal (APPK) totalling Rp905,098,040.00; and*
   - *Development of second generation OJK Revenue Information System (SIPO) totalling Rp1,452,907,500.00.*

In 2019, there was a reclassification to Intangible Assets totalling Rp2,303,642,000.00 consisting of:

a. OJK Record Management System (SIPENA) totalling Rp1,137,895,000.00;

b. Learning Management System (LMS) totalling Rp513,414,000.00;

c. Integrated Capital Market Information System (SIPM) totalling Rp97,713,000.00; and

d. Integrated Licensing and Registration System (SPRINT) totalling Rp554,620,000.00.

3.10 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp601.178.905.612,00 dan Rp442.315.027.899,00 merupakan Aset Pajak Tangguhan.

Mutasi Aset Pajak Tangguhan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

3.10 *Other Assets*

The balance of Other Assets as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp601,178,905,612.00 and Rp442,315,027,899.00 respectively in the form of Deferred Tax Assets.

The movement of Deferred Tax Assets as of 31st December 2019 and 2018 is as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Description
Saldo Awal	**442.315.027.899**	**488.341.340.634**	**Opening Balances**
Mutasi:			**Movements**
Penambahan tahun berjalan	313.702.894.586	90.590.899.192	Current Year Additions
Pemulihan	(154.839.016.873)	(136.617.211.927)	Recovered
Saldo Akhir	**601.178.905.612**	**442.315.027.899**	**Closing Balance**

Hal-hal yang berkaitan dengan Perpajakan:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Description
Beban pajak kini	173.105.994.250	189.492.643.000	Current Tax Expense
Beban (penghasilan) pajak tangguhan yang berasal dari timbulnya perbedaan temporer dan pembaliknya	(158.863.877.713)	46.026.312.735	Deferred (Income) Tax Expense Originating from Temporary Differences and Returns
Beban pajak penghasilan badan	**14.242.116.537**	**235.518.955.735**	**Corporate Income Tax Expense**

3.11 Utang Operasional

Saldo Utang Operasional per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp82.397.090.906,00 dan Rp37.678.791.658,00. Utang Operasional timbul dari beban yang telah terjadi untuk membiayai kegiatan OJK tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

3.11 Operating Liabilities

The balance of Operating Liabilities as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp82,397,090,906.00 and Rp37,678,731,658.00 respectively. Operating liabilities are obligations and costs incurred through OJK operating activities that remain unsettled as of the reporting date as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Description
Utang kepada Pihak Ketiga	82.395.845.906	37.678.061.658	Third-Party Payables
Utang kepada Pegawai	1.245.000	730.000	Employee Payables
Jumlah	**82.397.090.906**	**37.678.791.658**	**Total**

a. OJK menerima tagihan biaya pemakaian listrik dan air Gedung Sumitro Djojohadikusumo untuk pemakaian tahun 2013 - 2018 melalui Surat Kepala Biro Umum Kementerian Keuangan Nomor S-149/SJ.8/2019 tanggal 28 Februari 2019 sebesar Rp33.230.554.227,00. Berdasarkan tagihan tersebut, OJK masih memiliki saldo utang sebesar Rp16.035.470.477,00 per 31 Desember 2019.
b. OJK menerima tagihan biaya Service Charge Gedung Wisma Mulia I periode sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp65.545.569.284,00.

Selain itu, OJK juga menanggung kewajiban subsidi bunga atau subsidi bagi hasil sebagai bagian dari tunjangan fasilitas remunerasi atas pinjaman multiguna dan pembiayaan yang dimanfaatkan oleh Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai kepada Bank yang ditunjuk OJK.

a. OJK receives utility costs for electricity and water supply to the Sumitro Djojohadikusumo building for the period from 2013-2018 totalling Rp33,230,554,227.00, with the claim submitted through Ministry of Finance Letter No. s-149/SJ.8/2019, dated 28th February 2019. Based on that claim, the balance of payables was recorded at Rp16,035,470,477.00 as of 31st December 2019.
b. OJK it is also obliged to pay the Service Charge for the Wisma Mulia I building for the period ending 31st December 2019 totalling Rp65,545,569,284.00.

In addition, OJK was also obliged to bear the interest subsidy or profit-sharing subsidy as part of the remuneration facilities on multipurpose loans and financing utilised by members of the Board of Commissioners and employees at OJK-approved banks.

3.12 Utang Pajak

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp86.310.361.235,00 dan Rp196.794.620.952,00 dengan rincian sebagai berikut.

3.12 *Tax Payable*

The balance of Tax Payable as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp86,310,361,235.00 and Rp196,794,620,952.00 respectively as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Description
Utang PPh Badan	27.247.238.813	194.464.152.600	Corporate Tax Payable
Utang PPh Pasal 21	24.461.076.588	2.330.468.352	Income Tax Payable
Utang Pajak Lainnya	34.602.045.834	-	Other Tax Payable
Jumlah	**86.310.361.235**	**196.794.620.952**	**Total**

a. Saldo Utang PPh Badan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp27.247.238.813,00 dan Rp194.464.152.600,00 merupakan Utang PPh Badan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang disusun secara self-assesssment.

a. The balance of Corporate Tax Payable as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp194,464,152,600.00 and Rp901,090,694,655.00 respectively, consisting of Corporate Income Tax in accordance with Act No. 36 of 2008 concerning Self-Assessed Income Tax.

Adapun rincian Utang PPh Badan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

A summary of corporate tax payable as of 31st December 2019 and 31st December 2018 is as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Description
Saldo Awal Utang PPh Badan	194.464.152.600	901.090.694.655	Opening Balance of Corporate Tax Payable
Penyesuaian Utang PPh Badan Tahun 2016	-	(85.812.689.250)	Adjustments to Corporate Tax Payable in 2016
Penyesuaian Utang PPh Badan Tahun 2017	-	(35.828.851.750)	Adjustments to Corporate Tax Payable in 2017
Penghapusan Sanksi Administrasi	(118.106.754.600)	-	Administrative Penalties Written Off
Utang PPh Badan Tahun Berjalan	173.105.994.250	189.492.643.000	Corporate Income Tax Payable in Current Year
Angsuran PPh Badan	(222.216.153.437)	(774.477.644.055)	Corporate Income Tax Instalments
Jumlah	**27.247.238.813**	**194.464.152.600**	**Total**

Sanksi Administrasi sebesar Rp118.106.754.600,00 merupakan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Badan Tahun 2015 sesuai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00001/206/15/075/16 tanggal 23 Desember 2016 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Sawah Besar Dua yang telah dilakukan proses pengajuan penghapusan melalui Surat Nomor S-02/ MS.5/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi atas SKPKB Tahun 2015. Permohonan tersebut telah disetujui oleh DJP sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03246/NKEB/WPJ.06/2019 tanggal 5 September 2019 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Secara Jabatan.

Administrative penalties totalling Rp118,106,754,600.00 in the form of penalties on late payment of corporate income tax in 2015 in accordance with SKPKB No. 00001/206/15/075/16, dated 23rd December 2016, issued by the Tax Office (KPP) Pratama Jakarta, Sawah Besar Dua, are currently in the process of being written off pursuant to Letter No. S-02/MS.5/2018, dated 27th December 2018, concerning Requests to Reduce or Write-Off Administrative Penalties. The request has been approved by the Directorate General of Taxes in accordance with Director General of Taxes Decree No. KEP-03246/NKEB/WPJ.06/2019, dated 5th September 2019, concerning the Write-Off of Administrative Penalties on SKPKB.

Adapun rincian angsuran PPh Badan OJK selama tahun 2019 adalah sebagai berikut.

OJK paid the following corporate income tax instalments in 2019:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	Total Pembayaran Total Payment	Pembayaran Periode Berjalan Payment in Current Period	Tanggal Pembayaran Payment Date	Sumber Dana Source of Funds
PPh Badan Tahun 2018 Corporate Income Tax in 2018	76.901.465.000	46.468.172.306	30 Januari 2019	RKA tahun 2018 Work Plan and Budget (RKA) in 2019
		30.433.292.694	26 April 2019	
PPh Badan Tahun 2019 Corporate Income Tax in 2019	145.314.688.437	11.486.646.979	15 Mei 2019	RKA tahun 2019 Work Plan and Budget (RKA) in 2019
		11.486.646.979	15 Mei 2019	
		11.486.646.979	15 Mei 2019	
		15.836.392.500	15 Agustus 2019	
		15.836.392.500	6 Desember 2019	
		15.836.392.500	6 Desember 2019	
		15.836.392.500	31 Desember 2019	
		15.836.392.500	31 Desember 2019	
		15.836.392.500	31 Desember 2019	
		15.836.392.500	31 Desember 2019	
Jumlah **Total**	**222.216.153.437**	**222.216.153.437**		

b. Saldo Utang PPh Pasal 21 per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp24.461.076.588,00 dan Rp2.330.468.352,00. Utang PPh Pasal 21 per 31 Desember 2019 terdiri dari PPh Pasal 21 Pegawai sebesar Rp24.461.032.338,00 dan Non Pegawai sebesar Rp44.250,00. Adapun rincian utang PPh Pasal 21 Pegawai adalah sebagai berikut (lihat Catatan 3.20 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

b. The balance of Income Tax Payable as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp24,461,076,588.00 and Rp2,330,468,352.00 respectively. Income Tax Payable as of 31st December 2019 consisted of Employee Income Tax (Article 21) totalling Rp24,461,032,338.00 and Non-Employee Income Tax totalling Rp44,250.00 as follows (refer to Note 3.20 Information and Events After Date of the Financial Statements).

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Description
Saldo Awal Utang PPh Pasal 21 Pegawai	2.330.468.352	-	Opening Balance of Income Tax Payable
Utang PPh Pasal 21 Pegawai Tahun Berjalan	499.624.123.898	360.793.072.653	Income Tax Payable in Current Year
Pembayaran PPh Pasal 21 Pegawai	(477.493.559.912)	(358.462.604.301)	Income Tax Payments
Jumlah	**24.461.032.338**	**2.330.468.352**	**Total**

c. Saldo Utang Pajak Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp34.602.045.834,00 terdiri dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas pembelian Tanah dan Bangunan sebesar Rp34.564.000.700,00 dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp38.045.134,00. Adapun rincian BPHTB atas pembelian Tanah dan Bangunan adalah sebagai berikut.

c. The balance of Other Tax Payables as of 31st December 2019 and 31st December 2018 consisted of Fees for the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) on land and buildings purchased totalling Rp34,564,000,700.00 and is Property Tax (PBB) totalling Rp38,045,134.00. A summary of BPHTB on land and buildings purchased is as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

No	Daerah Region	Nilai Value
1	Solo	7.849.000.000
2	Semarang	7.697.000.000
3	Surabaya	12.773.000.700
4	Palembang	6.245.000.000
Jumlah **Total**		**34.564.000.700**

Pengakuan utang BPHTB berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada masing-masing daerah. Sebagai lembaga negara yang menjalankan sebagian tugas pemerintahan sebagaimana amanah Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK akan melakukan upaya pengecualian pengenaan kewajiban BPHTB atas pembelian Tanah dan Bangunan. Beberapa daerah telah memberikan pengecualian kewajiban BPHTB tersebut.

Recognition of BPHTB payable is based on the Regional Regulation concerning Fees for the Acquisition of Land and Building Rights (BPHTB) in each respective region. As a state institution implementing government affairs as mandated by Act No. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, OJK will seek exemption from BPHTB obligations on the land and buildings purchased. Several regions have provided exemption from BPHTB obligations.

3.13 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp25.172.153.082,00 dan Rp46.214.813.881,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kelebihan penerimaan atas pembayaran pungutan oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

3.13 *Unearned Revenue*

The balance of Unearned Revenue as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp25,172,153,082.00 and Rp46,214,813,881.00 respectively. Unearned Revenue is surplus revenue from levy payments by entities operating in the financial services sector. A summary of Unearned Revenue as of 31st December 2019 and 31st December 2018 is as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

No	Sektor	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Sector
1	Registrasi	1.643.494.311	611.266.683	Registration
	a. Perbankan	20.263.123	263.123	q. Banking Industry
	b. Pasar Modal	1.549.897.855	611.003.560	b. Capital Market
	c. Industri Keuangan Non Bank	73.333.333	-	c. NBFI
2	Biaya Tahunan	22.464.912.070	45.064.485.171	Annual Fee
	a. Perbankan	7.820.008.109	33.954.334.574	a. Banking Industry
	b. Pasar Modal	6.127.022.001	6.029.660.875	b. Capital Market
	c. Industri Keuangan Non Bank	8.517.881.960	5.080.489.722	c. NBFI
3	Sanksi	68.614.006	56.015.801	Penalties
	a. Perbankan	35.178.063	29.915.601	a. Banking Industry
	b. Pasar Modal	25.806.200	25.786.200	b. Capital Market
	c. Industri Keuangan Non Bank	7.629.743	314.000	c. NBFI
4	Pengelolaan Pungutan	995.132.695	483.046.226	Levy Management
Jumlah		**25.172.153.082**	**46.214.813.881**	**Total**

3.14 Utang Setoran ke Kas Negara

Saldo Utang Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp721.220.010,00 dan Rp2.909.974.928,00 dengan rinciannya sebagai berikut.

3.14 *Debt to State Treasury*

The balance of Debt to State Treasury as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp721,220,010.00 and Rp2,909,974,928.00 respectively as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

No	Keterangan	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Description
1	Pungutan	83.129.050	795.220.944	Levies
	a. Pengembalian Anggaran Tahun 2019	83.129.050	-	q. Budget Returns in 2018
	b. Pengembalian Anggaran Tahun 2018	-	795.220.944	b. Budget Returns in 2019
2	APBN	638.090.960	2.114.753.984	State Budget
	a. Penerimaan Denda Wanprestasi	637.621.960	2.102.284.984	a. Default Fine Revenues
	b. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji atas pembiayaan dana APBN Tahun	469.000	12.469.000	b. Excess Returns of Remuneration Disbursements on State Budget Funding in the Previous Year
	Jumlah	**721.220.010**	**2.909.974.928**	**Total**

3.15 Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang dan Pascakerja

a. Program Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang lainnya terdiri dari:

1. Program Imbalan Pascakerja
   a) Program Pensiun
      Program Pensiun ini berlaku bagi pegawai Eks. Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Eks. Pegawai Bank Indonesia yang masih mempunyai sisa masa dinas >3 tahun di OJK dan dikelola oleh Dapen.
   b) Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT)
      TPHT dan TKHT merupakan fasilitas yang diberikan kepada Pensiunan Pegawai OJK dan dikelola oleh YKP.
   c) Uang Pesangon
      Uang pesangon diberikan kepada pegawai dan Anggota Dewan Komisioner (ADK) sebagai uang perpisahan pada akhir masa dinas di OJK.
   d) Tunjangan Pasca Jabatan
      Pemberian penghargaan kepada ADK dan Pegawai Tetap yang telah mencapai masa kerja tertentu.
   e) Cinderamata
      Cinderamata merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai OJK dan ADK yang memasuki masa purnabakti.
2. Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain
   a) Cuti Besar
      OJK memberikan tunjangan cuti besar kepada pegawai yang telah mencapai Masa Dinas paling singkat 6 (enam) tahun secara terus menerus dan Dewan Komisioner setelah bekerja selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus.

3.15 *Long-Term Employee and Post-Employment Benefit Liabilities*

a. The Post-Employment and Other Long-Term Employee Benefit Programs consist of:

1. Post-Employment Pension Program
   a) Pension Program
      Ex-employees of the Ministry of Finance (Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK)) and ex-employees of Bank Indonesia with more than three years of service remaining at OJK are eligible for the Pension Program, which is managed by the OJK Pension Fund;
   b) Retirement Housing Allowance (TPHT) and Retirement Healthcare Allowance (TKHT)
      TPHT and TKHT are facilities offered to retired employees managed by the OJK Employee Welfare Foundation.
   c) Severance Pay
      Severance pay is paid to a board member or employee upon termination of service at OJK.
   d) Post-Office Allowance
      Awarded to members of the Board of Commissioners and Permanent Employees after a specified length of service.
   e) Reminders
      Reminders are awarded to employees and members of the Board of Commissioners.
2. Other Long-Term Employee Benefits Program
   a) Sabbatical Leave
      OJK provides a leave entitlement for employees who have worked for six years continuously and for members of the Board of Commissioners employed for three years.

b) Penghargaan Masa Pengabdian
OJK memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah mencapai masa dinas paling sedikit 15 (lima belas) tahun secara terus menerus, dan kelipatan 5 (lima) untuk periode selanjutnya dan Dewan Komisioner setelah menyelesaikan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

c) Kacamata
OJK memberikan bantuan pembelian frame kacamata kepada pejabat dan pegawai.

b. Perubahan Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pascakerja

Saldo Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dan Pascakerja per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp2.404.715.622.451,00 dan Rp1.769.260.111.598,00 dengan rincian sebagai berikut.

b) Long Service Award
Awarded to employees serving a minimum of 15 consecutive years and in multiples of five for the subsequent periods as well as members of the Board of Commissioners after completion of a 5-year tenure.

c) Eyewear
OJK subsidises the purchase of eyewear frames for officials and employees.

b. Reclassification of Long-Term Employee and Post-Employment Benefit Liabilities
The balance of Long-Term Employee and Post-Employment Benefit Liabilities as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp2,404,715,622,451.00 and Rp1,769,260,111,598.00 respectively as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Liabilitas Imbalan Kerja Total Liabilities of Long-Term Employee and Post-Employment Benefits	Dana pensiun Pension	TPHT Retirement Housing Allowance	TKHT Retirement Health Care Allowance	Pesangon Severance Pay	Cinderamata Reminders	Tunjangan Pasca Jabatan Post-Office Allowance	Cuti Besar Sabbatical	Penghargaan Masa Pengabdian Long Service Award	Frame Kacamata Eyewear	Jumlah Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2018 Balance of Assets (Liabilities) as of 31st December 2018	(38.567.933.083)	(231.807.104.000)	-	(523.579.977.410)	(3.280.481.750)	(14.502.590.502)	(277.889.007.853)	(641.687.509.000)	(37.945.508.000)	(1.769.260.111.598)
Iuran OJK (Pendanaan) OJK Contribution (Funding)	167.286.796.243	167.802.731.000	92.796.019.362	-	-	-	56.041.670.107	115.171.004.037	1.713.226.656	600.811.447.405
Pembayaran Manfaat Benefits Payments	-	-	-	7.853.897.847	444.070.000	10.246.652.239	-	-	-	18.544.620.086
Beban Imbalan Kerja 2019 Employee Benefits Expenses	(101.991.566.180)	(228.775.944.058)	(43.276.576.710)	(62.789.983.073)	(1.125.827.837)	(14.433.968.606)	(136.321.816.575)	(297.757.306.874)	(2.413.410.905)	(888.886.400.818)
Pendapatan/(Beban) Komprehensif Lain 2019 Other Comprehensive Income (Expenses)	(197.991.833.910)	(36.206.941.161)	(136.825.804.799)	20.698.757.949	(1.377.623.510)	(14.221.732.095)	-	-	-	(365.925.177.526)
Penyesuaian Adjustments	-	-	-	284.872.038.349	-	-	(80.709.204.454)	(204.162.833.895)	-	-
Saldo Aktiva/(Kewajiban) 31 Desember 2019 Balance of Assets (Liabilities) as of 31st December 2019	(171.264.536.930)	(328.987.258.219)	(87.306.362.147)	(272.945.266.338)	(5.339.863.097)	(32.911.638.964)	(438.878.358.775)	(1.028.436.645.732)	(38.645.692.249)	(2.404.715.622.451)

c. Asumsi-asumsi Aktuarial
Perhitungan Kewajiban Imbalan Kerja (employee benefits) per 31 Desember 2019 dilakukan oleh aktuaris independen PT Dayamandiri Dharmakonsilindo dengan Nomor 2113/MR-HR-PSAK24-OJK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019. Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria untuk menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut.

c. Actuarial Assumptions
The Employee Benefits as of 31st December 2019 were calculated by an independent actuary, PT Dayamandiri Dharmakonsilindo, according to Actuary Report No. 2113/MR-HR-PSAK24-OJK/XII/2019, dated 31st December 2019. The main assumptions used by the actuary when determining the employee benefit liabilities are as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	2019	2018	Description
Asumsi Ekonomi			Economic Assumptions
Tingkat diskonto :			Discount Rate
- Dana Pensiun	8,19% per tahun	9,15% per tahun	Pension Program -
- Perumahan	7,80% per tahun	8,30% per tahun	Housing Allowance -
- Kesehatan	8,19% per tahun	10,19% per tahun	Healthcare Allowance -
- Pesangon	7,87% per tahun	8,32% per tahun	Severance Pay -
- Cinderamata	8,17% per tahun	8,84% per tahun	Reminders -
- Pasca Jabatan	6,00% per tahun	8,05% per tahun	Post-Office Allowance -
- Cuti Besar (Pegawai)	7,58% per tahun	8,15% per tahun	Sabbatical Leave (Employee) -
- Cuti Besar (DK)	5,50% per tahun	7,55% per tahun	Sabbatical Leave (BoC) -
- PMP (Pegawai)	7,60% per tahun	8,22% per tahun	Long Service Award (Employee) -
- PMP (DK)	6,11% per tahun	8,00% per tahun	Long Service Award (BoC) -
- Kacamata	7,31% per tahun	8,14% per tahun	Eyewear -
Tingkat kenaikan PhDP	9,00% per tahun	9,00% per tahun	Increase Rate Of PhDP
Tingkat kenaikan Manfaat Pensiun	5,00% per tahun	5,00% per tahun	Increase Rate of Pension Benefits
Tingkat kenaikan biaya kesehatan (trend biaya)	8,00% per tahun	8,00% per tahun	Increase Rate of Health Costs
Faktor Demografis			Demographic Factors
Tingkat Mortalita	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2011 untuk masa aktif dan Group Annuity Mortality 1983 untuk masa pensiun Refers to the Indonesian Mortality Table for 2011 for the Active Period and Group Annuity Mortality of 1983 for the Retirement Period	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2011 untuk masa aktif dan Group Annuity Mortality 1983 untuk masa pensiun Refers to the Indonesian Mortality Table for 2011 for the Active Period and Group Annuity Mortality of 1983 for the Retirement Period	Mortality Rate
Tingkat Cacat	10% dari tingkat mortalita 10% of the mortality rate	10% dari tingkat mortalita 10% of the mortality rate	Disability Rate
Pengunduran Diri	0,5% untuk seluruh usia Resignation Rate 0.5% for all ages	0,5% untuk seluruh usia Resignation Rate 0.5% for all ages	the Retirement Period
Pensiun	100% pada usia pensiun normal 100% of normal retirement age	100% pada usia pensiun normal 100% of normal retirement age	Pension
Asumsi Lainnya	1 Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp11.100.000,00/orang/tahun di usia 56 Average cost of healthcare is Rp11,100,000 per person per year at the age of 56	1 Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp10.700.000,00/orang/tahun di usia 56 Average cost of healthcare is Rp10,700,000 per person per year at the age of 56	Other Assumptions;
	2 Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal The basic calculation of eligibility for retirement healthcare facilities is 50 years old with 20 years of service for employees from the Ministry of Finance and 50 years old with 10 years of service for employees from Bank Indonesia. The duration of service includes time spent at original institution	2 Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal The basic calculation of eligibility for retirement healthcare facilities is 50 years old with 20 years of service for employees from the Ministry of Finance and 50 years old with 10 years of service for employees from Bank Indonesia. The duration of service includes time spent at original institution	
Usia Pensiun Normal	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita)	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita)	Normal Retirement Age

Keterangan	2019	2018	Description
Loading Pajak			Tax Loading
Asumsi Pajak:			Tax Assumptions
- Dana Pensiun	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pension Program
- Perumahan	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Housing Allowance
- Pesangon	PPh 21	PPh 21	Severance Pay
- Pasca Jabatan	PPh 21	PPh 21	Post-Office Allowance
- Cuti Besar (Pegawai)	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Sabbatical Leave (Employee)
- Cuti Besar (DK)	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Sabbatical Leave (BoC)
- PMP (Pegawai)	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Long Service Award (Employee)
- PMP (DK)	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Long Service Award (BoC)
- Cinderamata	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%	Reminders
- Kacamata	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Pajak Individual dengan maksimum 30%	Eyewear

Aset program OJK pada Dapen dan YKP sebesar Rp1.759.246.741.754,00. Imbal hasil atas aset program dimaksud mengacu pada kebijakan investasi. Aset Program OJK per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

The Asset Program for the OJK Pension Fund and OJK Employee Welfare Foundation totalled Rp1,759,246,741,754.00. The yield on the asset program refers to the investment policy. A summary of the OJK Asset Program as of 31st December 2019 is as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	Aset Program *Asset Program*	Description
Dapen OJK	713.232.965.367	OJK Pension Fund
YKP OJK	1.046.013.776.387	OJK Employee Welfare Foundation
a TPHT	467.513.349.454	Housing
b. TKHT	504.464.849.483	Healthcare
c. IJPL	74.035.577.450	Other Long-Term Benefits
Jumlah	**1.759.246.741.754**	**Total**

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada Dapen per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Asset program placements were allocated to the Pension Fund as of 31st December 2019 as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

No	Penempatan pada Dapen	Per 31 Desember 2019 31 December 2019	Pension Fund Placements:
1	Kas dan Setara Kas	66.930.812.952	Cash and Cash Equivalents
2	Saham	44.549.865.588	Shares
3	Obligasi	571.847.421.941	Bonds
4	Investment Funds	20.762.116.000	Investment Funds
5	Efek Beragun Aset	5.487.793.431	Asset-Backed Securities
6	Aset Lainnya	3.654.955.455	Other Assets
	Jumlah	**713.232.965.367**	**Total**

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada YKP per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut.

Asset program placements were allocated to the Pension Fund as of 31st December 2019 as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Penempatan pada YKP		Per 31 Desember 2019 31 December 2019	YKP Placements
TPHT			Housing
1	Kas dan setara Kas	392.737.189.922	Cash and Cash Equivalents
2	Saham	21.371.068.114	Shares
3	Obligasi	29.574.964.437	Bonds
4	Investment funds	23.830.126.981	Investment Funds
	Jumlah	467.513.349.454	Total
TKHT			Healthcare
1	Kas dan setara Kas	423.778.503.077	Cash and Cash Equivalents
2	Saham	23.060.202.820	Shares
3	Obligasi	31.912.521.858	Bonds
4	Investment funds	25.713.621.728	Investment Funds
	Jumlah	504.464.849.483	Total
IJPL			Other Long-Term Benefits
1	Kas dan setara Kas	62.193.998.687	Cash and Cash Equivalents
2	Saham	3.384.329.817	Shares
3	Obligasi	4.683.501.707	Bonds
4	Investment funds	3.773.747.239	Investment Funds
	Jumlah	74.035.577.450	Total
Jumlah		**1.046.013.776.387**	**Total**

3.16 Aset Neto

Saldo Aset Neto per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp6.033.752.655.182,00 dan Rp5.786.405.328.325,00.

Mutasi Aset Neto pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut.

3.16 Net Assets

The balance of Net Assets as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp6,033,752,655,182.00 and Rp5,786,405,328,325.00 respectively.

Movements of Net Assets as of 31st December 2019 and 31st December 2018 are as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Description
Saldo Awal	5.786.405.328.325	4.201.122.726.832	Opening Balance
Mutasi:			Movements
Perubahan Aset Neto	439.069.487.112	533.789.636.584	Changes in Net Assets
Penyesuaian Aset Neto	(191.722.160.255)	1.051.492.964.909	Net Asset Adjustments
Saldo Akhir	**6.033.752.655.182**	**5.786.405.328.325**	**Closing Balance**

Rincian penyesuaian Aset Neto sebagai berikut.

A summary of corrections to net assets is presented as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

No	Keterangan	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Description
1	Koreksi Utang Pajak Potput MS1 tahun 2016	114.000	-	Correction to Tax Payable (MS1) in 2016
2	Koreksi Utang Pajak Potput MS1 tahun 2016	(15.000)	-	Correction to Tax Payable (MS1) in 2016
3	Penghapusan Sanksi Administrasi	118.106.754.600	-	Write-Off of Administrative Penalties
4	Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain atas Liabilitas Imbalan kerja	(365.925.177.526)	480.721.863.231	Other Comprehensive Income (Expenses) on Employee Benefit Liabilities
5	Koreksi Utang Setoran Ke Kas Negara	-	439.913.513.466	Correction of Debt to State Treasury
6	Koreksi Utang Pajak Potong/Pungut Tahun 2015	-	942.152.692	Correction to Tax Payable in 2015
7	Koreksi Utang PPh Badan Tahun 2016 dan 2017	-	121.641.541.000	Correction to Corporate Tax Payable in 2016 and 2017
8	Koreksi Beban Dibayar Dimuka	-	8.273.894.520	Correction to Prepaid Expenses
9	Kapitalisasi Aset Tanah KOJK Solo	84.840.250	-	Capitalisation of Land Assets at Solo Branch Office
10	Penyesuaian atas nilai aset dan beban dibayar dimuka yang didanai APBN agar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	56.011.323.421	-	Adjustment to Value of Prepaid Assets and Expenses Funded by State Budget in accordance with Government Accounting Standards
Jumlah		**(191.722.160.255)**	**1.051.492.964.909**	**Total**

a. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan Hubungan Masyarakat Nomor ND-3/MS.31/2019 tangggal 7 Februari 2019 perihal Tindak Lanjut Utang Pajak 2016 menginformasikan bahwa Utang Pajak Potput MS I tahun 2016 sebesar Rp114.000,00 merupakan pajak atas transaksi yang sudah dibatalkan sehingga dilakukan koreksi. Selain itu, terdapat koreksi Utang Pajak Potput MS I tahun 2016 sebesar Rp15.000,00 yang merupakan kekurangan pengakuan utang pajak tahun 2016.
b. Penyesuaian atas nilai aset yang didanai APBN dilakukan dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (lihat Catatan 3.22 Penatausahaan Aset Barang Milik Negara).

a. *Official Memorandum of the Secretariat of the Board of Commissioners and Public Relations No. ND-3/MS.31/2019, dated 7th February 2019, concerning Follow-Up Action to Tax Payable in 2016 stated that Tax Payable (MS1) in 2016 totalling Rp114,000.00 represents tax on cancelled transactions, which has been corrected. In addition, there was also a correction on tax payable (MS one) in 2016 totalling Rp15,000, representing tax payable not recognised in 2016.*
b. *The value of assets funded by the State Budget was corrected when formulating the Financial Statements of the Central Government (refer to Note 3.22 Administration of State Assets).*

3.17 Pendapatan

Pendapatan OJK sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp6.027.949.391.897,00 dan Rp5.569.587.680.495,00.

Rincian Pendapatan Pungutan sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebagai berikut.

3.17 Revenue

OJK Revenue for the period ending 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp6,027,949,391,897.00 and Rp5,569,680,495.00 respectively.

A summary of Levy Income as of 31st December 2019 and 31st December 2018 is as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

No	Sektor	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	
1	Pendapatan Biaya Registrasi dan Aksi Korporasi	53.487.861.598	63.637.814.238	1. Registration Fee and Corporate Action
	a. Perbankan	995.000.000	1.311.344.308	a. Banking industry
	b. Pasar Modal	46.416.194.931	58.251.469.930	b. Capital market
	c. Industri Keuangan Non Bank	6.076.666.667	4.075.000.000	c. NBFI
2	Biaya Tahunan	5.596.941.830.043	5.182.836.105.754	2. Annual Fee
	a. Perbankan	4.093.389.000.782	3.684.304.977.707	a. Banking industry
	b. Pasar Modal	693.591.782.648	717.125.865.923	b. Capital market
	c. Industri Keuangan Non Bank	809.961.046.613	781.405.262.124	c. NBFI
3	Sanksi Denda	83.913.468.004	45.611.736.495	3. Fines
	a. Perbankan	55.374.256.400	22.069.484.571	a. Banking industry
	b. Pasar Modal	22.526.425.604	16.925.381.224	b. Capital market
	c. Industri Keuangan Non Bank	6.012.786.000	6.616.870.700	c. NBFI
4	Pengelolaan Pungutan	293.606.232.252	277.502.024.008	4. Levy Management
	a. Imbal Hasil Pengelolaan Pungutan	285.971.758.313	251.720.341.973	a. Levy management yield
	b. Imbal Hasil Pengelolaan Dana Imbalan Kerja	-	18.856.287.374	b. Employee Benefit Fund Management Yield
	c. Jasa Giro Pungutan	6.079.792.288	5.999.153.856	c. Levy Current Account Services
	d. Denda Wanprestasi	1.040.792.479	791.910.930	d. Default Fines
	e. Pengembalian Penggunaan Dana Pungutan	193.011.792	134.329.875	e. Levy fund returns
	f. Pendapatan Pengelolaan Pungutan Lainnya	320.877.380	-	f. Other levy management income
Jumlah		**6.027.949.391.897**	**5.569.587.680.495**	**Total**

3.18 Beban

Beban OJK sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp5.588.879.904.785,00 dan Rp5.035.798.043.911,00 dengan rincian:

3.18 Expenses

Total Expenses as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp5,588,879,904,785.00 and Rp5,035,798,043,911.00 respectively as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Description
Beban Kegiatan Operasional	470.357.727.971	438.803.713.298	Operating Expenses
Beban Kegiatan Administratif	4.848.302.219.693	4.357.779.595.716	Administrative Expenses
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	231.672.956.305	204.307.428.277	Asset Procurement Expenses
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya	38.547.000.816	34.907.306.620	Other Supporting Expenses
Jumlah	**5.588.879.904.785**	**5.035.798.043.911**	**Total**

a. Beban Kegiatan Operasional
Beban Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp470.357.727.971,00 dan Rp438.803.713.298,00 dengan rincian:

a. Operating Expenses
Operating Expenses as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp470,357,727,971.00 and Rp438,803,713,298.00 respectively as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Beban Kegiatan Operasional	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Operating Expenses
Fungsi Pengaturan	41.126.500.731	158.011.373.233	Regulatory Function
Fungsi Pengawasan	200.078.489.450	195.716.712.612	Supervisory Function
Fungsi Penegakan Hukum	15.108.548.897	12.886.468.778	Law Enforcement Function
Fungsi Edukasi dan Perlindungan Konsumen	43.247.680.764	31.076.500.827	Education and Consumer Protection Function
Fungsi Manajemen Strategis	170.796.508.129	41.112.657.848	Strategic Management Function
Jumlah	**470.357.727.971**	**438.803.713.298**	**Total**

b. Beban Kegiatan Administratif

Beban Kegiatan Administratif sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp4.848.302.219.693,00 dan Rp4.357.779.595.716,00 dengan rincian:

b. Administrative Expenses

Administrative Expenses as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp4,848,302,219,693.00 and Rp4,357,779,595,716.00 as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Beban Kegiatan Administrasi	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Administrative Expenses
Beban Remunerasi	3.256.695.347.800	2.696.138.330.556	Remuneration Expenses
Beban Imbalan Kerja	933.277.397.200	843.085.460.000	Employee Benefit Expenses
Beban Perkantoran	559.878.026.885	545.201.215.714	Office Expenses
Beban Pengembangan Organisasi dan SDM	30.271.316.270	16.015.353.991	Organisational and HR Development Expenses
Beban Pajak	49.847.038.207	235.518.955.735	Tax Expenses
Beban Pendidikan dan Pelatihan	18.333.093.331	21.820.279.720	Education and Training Expenses
Jumlah	**4.848.302.219.693**	**4.357.779.595.716**	**Total**

Pada kelompok Beban Imbalan Kerja terdapat Beban Imbalan Pascakerja Iuran Pasti sebesar Rp66.749.240.077,00 yang terdiri dari beban pegawai sebesar Rp22.822.598.431,00 dan beban OJK sebesar Rp43.926.641.646,00.

Within Remuneration Expenses is contained Defined Benefit Post-Employment Benefit Expenses totalling Rp66,749,240,077.00, consisting of Employee Expenses totalling Rp22,822,598,431.00 and OJK Expenses totalling Rp43,926,641,646.00.

Rincian atas kelompok fungsi Beban Remunerasi sebagai berikut.

A summary of Remuneration Expenses is as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Beban Remunerasi	31 Desember 2019 31 December 2019	31 Desember 2018 31 December 2018	Remuneration Expenses
Beban Gaji, Tunjangan, dan lain-lain	2.759.717.487.402	2.355.347.504.495	Salary, Allowance and Other Expenses
Beban PPh Pasal 21	496.977.860.398	340.790.826.061	Income Tax Expenses
Jumlah	**3.256.695.347.800**	**2.696.138.330.556**	**Total**

Rincian atas kelompok fungsi Beban Pajak sebagai berikut.

A summary of tax expenses is as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Beban Pajak 31 Desember 2019 31 December 2019		31 Desember 2018 31 December 2018	Tax Expenses
Beban Pajak Badan	173.105.994.250	189.492.643.000	Corporate Tax Expenses
Pajak Tangguhan	(158.863.877.713)	46.026.312.735	Deferred Tax
Pajak Lainnya	35.604.921.670	-	Other Taxes
Jumlah	**49.847.038.207**	**235.518.955.735**	**Total**

Pajak Lainnya terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan, BPHTB, Pajak Kendaraan dan Sanksi Denda. Penjelasan atas BPHTB dapat dilihat pada Catatan 3.12. Utang Pajak.

Other taxes consist of Property Tax, BPHTB, Motor Vehicle Tax and Fines. Clarification of BPHTB is presented in Note 3.12 Tax Payable.

c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset

Beban Kegiatan Pengadaan Aset sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp231.672.956.305,00 dan Rp204.307.428.277,00 dengan rincian:

c. Asset Procurement Expenses

Asset Procurement Expenses as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp231,672,956,305.00 and Rp204,307,428,277.00 and respectively as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Beban Kegiatan Pengadaan Aset 31 Desember 2019 31 December 2019		31 Desember 2018 31 December 2018	Asset Procurement Expenses
Beban Penyusutan	126.892.046.553	116.978.821.626	Depreciation Expenses
Beban Amortisasi	63.592.472.868	64.255.701.076	Amortisation Expenses
Beban Persediaan	24.183.840.792	17.811.970.039	Inventory Expenses
Beban Perkantoran	5.100.000	5.260.935.536	Office Expenses
Beban Kerugian Aset	16.999.496.092	-	Asset Loss Expenses
Jumlah	**231.672.956.305**	**204.307.428.277**	**Total**

d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp38.547.000.816,00 dan Rp34.907.306.620,00 dengan rincian:

d. Other Supporting Expenses

Other Supporting Expenses as of 31st December 2019 and 31st December 2018 was recorded at Rp38,547,000,816.00 and Rp34,907,306,620.00 as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Beban Kegiatan Pendukung Lainnya 31 Desember 2019 31 December 2019		31 Desember 2018 31 December 2018	Other Supporting Expenses
Beban Representasi	31.601.244.370	29.458.169.816	Representation Expenses
Beban Kekaryawanan	5.969.291.483	5.437.385.064	Employment Expenses
Beban Lainnya	976.464.963	11.751.740	Other Expenses
Jumlah	**38.547.000.816**	**34.907.306.620**	**Total**

3.19 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas Sampai Dengan 31 Desember 2019

a. Arus Kas Masuk

Arus Kas masuk berasal dari Pendapatan Pungutan OJK dan Pendapatan APBN sebesar Rp5.972.708.744.800,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan Pungutan OJK sebesar Rp5.971.740.311.860,00 merupakan pungutan yang kasnya diterima sampai dengan 31 Desember 2019, terdiri dari:

3.19 Elucidation of Statement of Cash Flow Entries as of 31st December 2019

a. Cash Inflow

Cash Inflow from OJK Levy Income and State Budget Income, totalling Rp5,972,708,744,800.00, is summarised as follows:

1. *Total cash inflow from OJK Levy Income of Rp5,971,740,311,860.00 as levies received as of 31st December 2019 consisting of the following:*

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	Jumlah	Description
Penerimaan Piutang Tahun Sebelumnya	18.741.096.549	Levy Receipts in Previous Year
Penerimaan Pendapatan Tahun 2019	5.951.639.037.962	Receipts in 2019
Penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2019	594.995.490	Receipts and Unearned Revenue in 2019
Sub Jumlah Kas Masuk Tahun 2019	5.970.975.130.001	Subtotal Cash Inflow in 2019
Penerimaan Pengembalian Beban Tahun Lalu untuk disetor ke Kas Negara	765.181.859	Receipts from Returned Expenses in Previous Year Payable to State Treasury
Jumlah	**5.971.740.311.860**	**Total**

2. Jumlah arus kas masuk dari Pendapatan APBN sebesar Rp968.432.940,00 merupakan arus kas masuk dari pengembalian wanprestasi dan remunerasi tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut.

2. *Total Cash Inflow from State Budget Income of Rp968,432,940.00 as Cash Inflow from returns of default fines and remuneration summarised as follows:*

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Keterangan	Jumlah	Description
Pembayaran cicilan pengembalian kelebihan gaji	12.000.000	Instalments of Excess Returns of Remuneration
Pengembalian wanprestasi	956.432.940	Returns of Default Fines
Jumlah	**968.432.940**	**Total**

b. Arus Kas Keluar

Kas Keluar dari Laporan Arus Kas digunakan untuk aktivitas operasi dan aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut.

b. Cash Outflow

Cash Outflow from the Statement of Cash Outflow is used for operating activities and investment activities as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

No	Keterangan	Jumlah	Description
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi			Cash Outflow - Operating Activities
1	Pembayaran kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan pendukung lainnya	4.900.972.464.399	Operating, Administrative, Asset Procurement and Other Supporting Activity Payments
2	Pembayaran Utang PPh Badan	222.216.153.437	Corporate Tax Payable Payments
3	Setoran ke Kas Negara Tahun 2019	2.271.883.968	State Treasury Payments in 2019
	Total	**5.125.460.501.804**	**Total**
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi			Cash Outflow - Investment Activities
1	Perolehan Aset Tetap dan Aset Takberwujud	449.414.917.936	Acquisition of Fixed Assets and Intangible Assets
	Total	**449.414.917.936**	**Total**
Jumlah		**5.574.875.419.740**	**Total**

3.20 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan

a. Berdasarkan surat DJA Nomor S-2672/AG/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal persetujuan pemusnahan Barang Milik Negara Berupa Persediaan Barang Usang pada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan pemusnahan fisik barang persediaan dengan cara dibakar. Pelaksanaan pemusnahan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Negara Nomor BAP-01/MS.33/PBUM/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan telah disampaikan kepada DJA melalui Surat Kepala Departemen Logistik selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor S-42/MS.33/2020 tanggal 21 Januari 2020 sebagai dasar penetapan Surat Keputusan Penghapusbukuan. Sampai dengan saat ini, OJK masih menunggu Surat Keputusan Penghapusbukuan dari DJA sebagai dasar untuk melakukan penghapusbukuan atas barang persediaan usang yang telah dihapuskan dengan cara dibakar (lihat Catatan 3.4 Persediaan);
b. DJA melalui surat Nomor S-4/AG/2020 tanggal 6 Januari 2020 meminta OJK untuk terlebih dahulu memproses Tuntutan Ganti Kerugian Negara (TGR) sebagai dasar DJA untuk melakukan proses lebih lanjut. Menindaklanjuti surat tersebut, OJK telah menyampaikan Surat Nomor S-65/MS.33/2020 tanggal 3 Februari 2020 perihal Permohonan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Dalam Rangka Penghapusan BMN OJK Hilang (lihat Catatan 3.7 Aset Tetap);
c. Pembayaran PPh Pasal 25 tahun 2019 sebesar Rp3.577.073.756,00 dilakukan pada tanggal 10 Januari 2020 (lihat Catatan 3.2.3. Dana Pembayaran PPh Badan);
d. Pembayaran PPh Pasal 21 tahun 2019 sebesar Rp24.461.076.588,00 dilakukan pada tanggal 10 Januari 2020 sebesar Rp22.046.803.477,00 dan 28 Januari 2020 sebesar Rp2.414.273.111,00 (lihat Catatan 3.12. Utang Pajak);
e. Pembayaran Utang Setoran ke Kas Negara sebesar Rp83.129.050,00 yang berasal dari pengembalian anggaran tahun 2019 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 22 Januari 2020 (lihat Catatan 3.14. Utang Setoran ke Kas Negara); dan
f. Pada tanggal 7 Februari 2020, OJK melakukan pelimpahan piutang macet per tanggal 31 Desember 2019 kepada PUPN melalui Surat Nomor S-13/MS.51/2020 sebesar Rp11.104.798.180,00 atau 64,13% dari jumlah piutang macet yang belum dilimpahkan sebesar Rp17.316.757.815,00. Sedangkan atas sisa piutang macet sebesar Rp6.211.959.635,00 (35,87%) dalam proses pelimpahan kepada PUPN (lihat Catatan 3.3.1 Piutang Pungutan).

3.21 Perkara Hukum yang Dihadapi OJK

Sepanjang tahun 2019, OJK telah menghadapi 368 (tiga ratus enam puluh delapan) perkara yang terdiri dari perkara Perdata, perkara Agama, perkara Tata Usaha Negara, perkara Praperadilan, dan perkara Komisi Informasi Publik di berbagai tingkat pengadilan.

Persebaran perkara berada di beberapa wilayah kantor regional OJK yaitu:

3.20 Information and Events After Date of the Financial Statements

a. In accordance with DJA Letter No. S-2672/AG/2019, dated 20th December 2019, concerning approval of destruction of State Property in the form of Obsolete Inventory at the Financial Services Authority (OJK), the state property in question has been incinerated. The state property was destroyed in accordance with Letter No. BAP-01/MS.33/PBUM/2020, dated 17th January 2020, as submitted to DJA through Head of Logistics Letter No. S-42/MS.33/2020, dated 21st January 2020, as the basis for the Write-Off Decree. Currently, OJK is still waiting for the Write-Off Decree from the DJA as the legal basis for writing off the obsolete inventory that has been incinerated (refer to Note 3.4 Inventories);

b. Through Letter No. S-4/AG/2020, dated 6th January 2020, the DJA requested OJK to process the state compensation claims (TGR) as a legal basis for the DJA to process the claim. In response, OJK submitted Letter No. S-65/MS.33/2020, dated 3rd February 2020, requesting the state loss settlement team to write-off lost state property (refer to Note 3.7 Fixed Assets);

c. Income Tax (Article 25) payments in 2019 totalling Rp3,577,073,756.00 were paid on 10th January 2020 (refer to Note 3.2.3 Corporate Tax Payable Funds);

d. Income Tax (Article 25) payments in 2019 totalling Rp24,461,076,588.00 were paid on 10th January 2020 totalling Rp22,046,803,477.00 and 28th January 2020 totalling Rp2,414,273,111.00 (refer to Note 3.12 Tax Payable);

e. State Treasury payments totalling Rp83,129,050.00 from budget returns in 2019 was paid into the state treasury on 22nd January 2020 (refer to Note 3.14 Debt to State Treasury);

f. On 7 February 2020, transferred uncollectible receivables as of 31st December 2019 to the States Receivables Committee (PUPN) through Letter No. S-13/MS.51/2020 totalling Rp11,104,798,180.00 or 64.13% of total uncollectible receivables totalling Rp17,316,757,815.00. The remaining Rp6,211,959,635.00 (35.87%) is currently being transferred to the States Receivables Committee (refer to Note 3.3.1 Levy Receivables).

3.21 Legal Cases Against OJK

In 2019, OJK faced 368 legal cases, consisting of civil cases, religious cases, state administration cases, pre-trial cases and Public Information Commission cases at various levels of the judiciary.

The distribution of cases against OJK based on region is presented as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Wilayah Kantor	Jumlah Perkara Total Cases	Office Region
Kantor OJK Pusat dan KR 1 DKI Jakarta &Banten	113 perkara	Head Office and Region 1 - Jakarta & Banten
Kantor Regional 3 Jawa Tengah & DIY	76 perkara	Region 3 - Central Java and Yogyakarta
Kantor Regional 9 Kalimantan	46 perkara	Region 9 - Kalimantan
Kantor Regional 4 Jawa Timur	42 perkara	Region 4 - East Java
Kantor Regional 6 Sulampua	42 perkara	Region 6 - Sulampua
Kantor Regional 2 Jawa Barat	15 perkara	Region 2 - West Java
Kantor Regional 7 Sumatera Bagian Selatan	12 perkara	Region 7 - Southern Sumatra
Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara	11 perkara	Region 5 Northern Sumatra
Kantor Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara	11 perkara	Region 8 - Bali and Nusa Tenggara
Jumlah	**368 perkara**	**Total**

Atas tabel di atas terdapat 135 perkara telah putus dan belum ada upaya hukum sisanya masih dalam proses hukum sebanyak 233 perkara. Dari perkara-perkara tersebut terdapat perkara yang bersifat strategis baik yang meminta ganti kerugian maupun yang menyangkut Reputasi Lembaga.

Of the total, verdicts have been delivered on 135 cases, with the remaining 233 cases still in the legal process. Furthermore, some of the legal cases are strategic in nature, requesting compensation, or involving Institutional Reputation.

3.22 Penatausahaan Aset Barang Milik Negara

Sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2015, OJK menerima dana APBN untuk membiayai operasional OJK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya dan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-322/PB/2014 tentang Penambahan Unit Badan lainnya (UBL) dalam daftar UBL Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, OJK ditetapkan sebagai UBL Satuan Kerja (Satker) dan UBL Bukan Satker.

Laporan Keuangan OJK sebagai UBL Satker mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sedangkan Laporan Keuangan OJK sebagai UBL Bukan Satker mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Kedua Laporan Keuangan OJK tersebut merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Berdasarkan SEDK Nomor 8/SEDK.02/2015 tanggal 9 Juli 2015 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap yang pendanaannya bersumber dari APBN mengacu pada Peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.22 Administration of State Assets

In accordance with Article 34 of Act No. 21 of 2011, the OJK budget is sourced from the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) and/or levies from parties operating in the financial services sector. From 2013 to 2015, OJK received state budget funds to fund operating activities.

Based on Minister of Finance Regulation (PMK) No. 219/PMK.05/2016 as an amendment to PMK No. 260/PMK.05/2014 concerning the Accounting and Financial Reporting System as well as Director General of the Treasury Decree No. KEP-322/PB/2014 concerning Additional Units in the UBL Accounting and Financial Reporting System Module, OJK was designated as a UBL Work Unit and UBL non-Work Unit.

The Financial Statements of OJK, as a UBL work unit, follow the Government Accounting Standards (SAP), while the financial statements of OJK, as a UBL non-work unit, follow the Financial Accounting Standards (SAK). Both financial statements form an integral part of the Central Government Financial Statements (LKPP).

In accordance with BOC Circular Letter (SEDK) No. 8/SEDK.02/2015, dated 9th July 2015, concerning Fixed Asset and Intangible Asset Accounting, OJK records and reports the accounting of Fixed Assets funded by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) pursuant to prevailing regulations. Currently, the main reference is Government Regulation No. 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards.

Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan OJK berdasarkan SAK (audited) dan Laporan Keuangan OJK berdasarkan SAP (audited) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, OJK melakukan penyesuaian atas nilai aset (yang didanai APBN) pada Laporan Keuangan OJK (SAK). Semula aset tersebut dicatat sesuai ketentuan SAK kemudian disesuaikan pencatatannya mengikuti ketentuan SAP dengan penjelasan sebagai berikut.

To consolidate the OJK Financial Statements based on SAK (audited) and OJK Financial Statements based on SAP (audited) in the Central Government Financial Statements, OJK has adjusted the asset value (funded by the state budget) in the OJK Financial Statements (SAK). Assets previously recorded in accordance with SAK have been adjusted to follow the SAP regulations as follows:

(dalam rupiah | *in rupiah*)

Uraian	SAK Sebelum Penyesuaian SAK Before Adjustment	SAK Setelah Penyesuaian SAK After Adjustment	SAP SAP	Description
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Piutang	786.814.360	786.814.360	786.814.360	Receivables
Beban Dibayar Dimuka	416.666.677	416.666.684	416.666.684	Prepaid Expenses
Persediaan	1.444.912.860	181.089.590	181.089.590	Inventories
JUMLAH ASET LANCAR	**2.648.393.897**	**1.384.570.634**	**1.384.570.634**	**TOTAL CURRENT ASSETS;**
ASET TETAP				FIXED ASSETS
Peralatan dan Mesin	352.715.844.023	356.903.989.237	356.903.989.237	Equipment and Machinery
Aset Tetap Lainnya	-	45.986.003.466	45.986.003.466	Other Fixed Assets
Akumulasi Penyusutan	(310.164.440.606)	(338.090.472.441)	(338.090.472.441)	Accumulated Depreciation
Jumlah Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	**42.551.403.417**	**64.799.520.262**	**64.799.520.262**	**Total Fixed Assets after Accumulated Depreciation**
ASET TAKBERWUJUD				INTANGIBLE ASSETS
Aset Tak Berwujud	85.658.658.479	81.527.065.112	81.527.065.112	Intangible Assets
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(85.658.658.479)	(59.531.135.269)	(59.531.135.269)	Amortisation of Intangible Assets
Jumlah Aset Takberwujud - setelah dikurangi amortisasi	-	21.995.929.843	21.995.929.843	Total Intangible Assets after Amortisation
JUMLAH ASET	**45.199.797.314**	**88.180.020.739**	**88.180.020.739**	**TOTAL ASSETS**

OJK melakukan penyesuaian pencatatan Aset pada Laporan Keuangan OJK (SAK) mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, namun OJK tetap memiliki hak pengendalian dan penggunaan aset yang didanai APBN dalam kegiatan operasional OJK.

OJK adjusted the Asset entries in the OJK Financial Statements (SAK) referring to the Government Accounting Standards, yet OJK retains the right to control and use the assets funded by the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) in the operating activities.

Lihat catatan terkait kebijakan 2.11 Aset Tetap, 2.12 Aset Takberwujud dan penjelasan pos-pos pada 3.4 Persediaan, 3.6 Beban Dibayar Dimuka, 3.7 Aset Tetap, dan 3.8 Aset Takberwujud

Refer to Notes 2.11 Fixed Assets and 2.12 Intangible Assets as well as the elucidation in Notes 3.4 Inventories, 3.6 Prepaid Expenses, 3.7 Fixed Assets, and 3.8 Intangible Assets.

Lampiran 1
Appendix 1

A. STRUKTUR ORGANISASI OJK-WIDE-EKSISTING

A. *ORGANISATIONAL STRUCTURE - EXISTING*

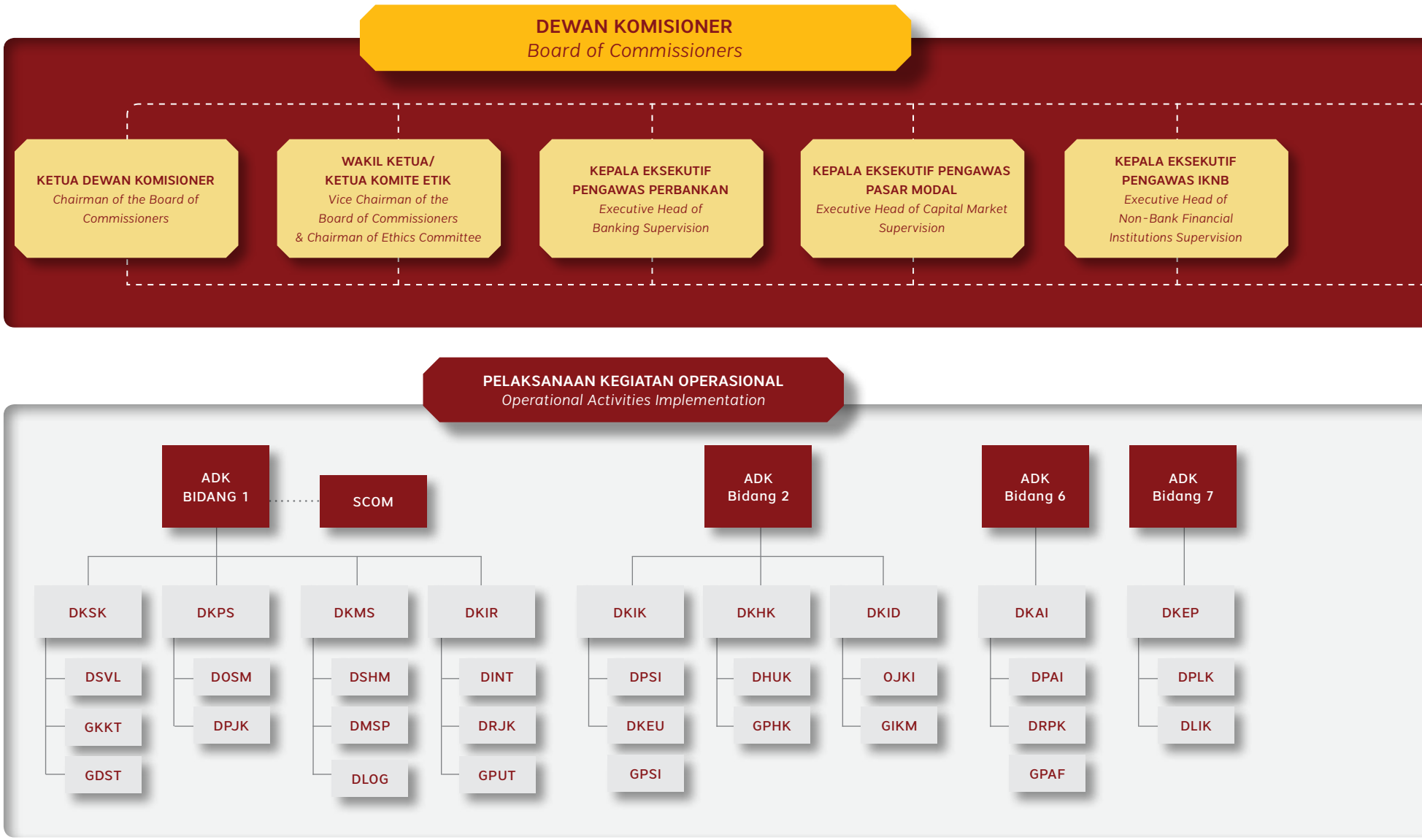

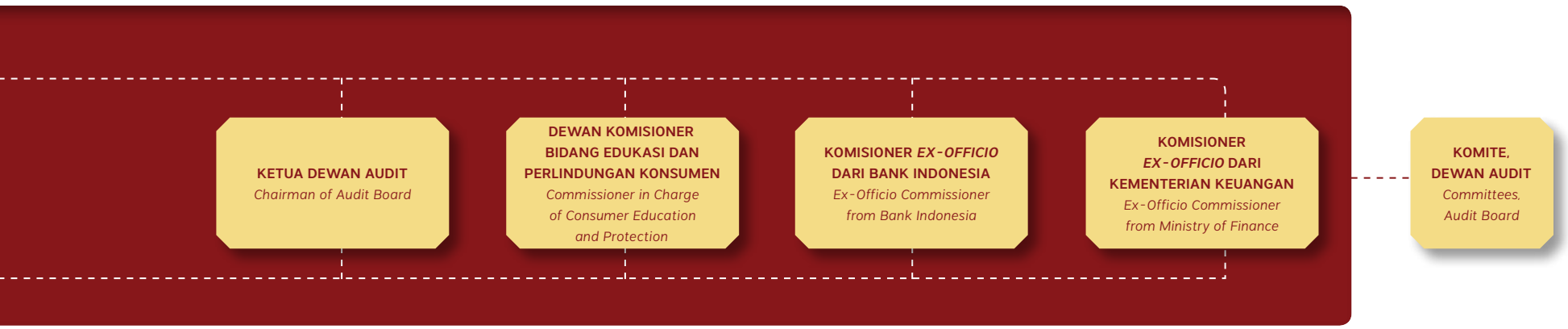
KETUA DEWAN AUDIT
Chairman of Audit Board
DEWAN KOMISIONER BIDANG EDUKASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Commissioner in Charge of Consumer Education and Protection
KOMISIONER EX-OFFICIO DARI BANK INDONESIA
Ex-Officio Commissioner from Bank Indonesia
KOMISIONER EX-OFFICIO DARI KEMENTERIAN KEUANGAN
Ex-Officio Commissioner from Ministry of Finance
KOMITE, DEWAN AUDIT
Committees, Audit Board

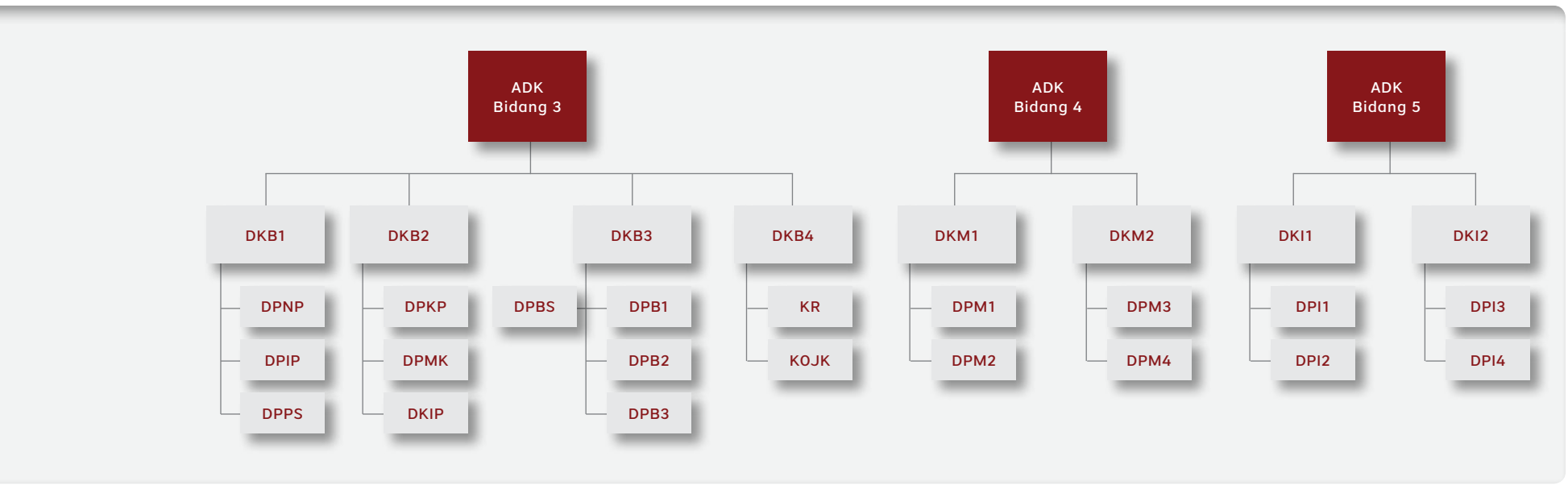
ADK Bidang 3
DKB1
DPNP
DPIP
DPPS
DKB2
DPKP
DPMK
DKIP
DKB3
DPBS
DPB1
DPB2
DPB3
DKB4
KR
KOJK
ADK Bidang 4
DKM1
DPM1
DPM2
DKM2
DPM3
DPM4
ADK Bidang 5
DKI1
DPI1
DPI2
DKI2
DPI3
DPI4

Lampiran II
Appendix II

I. PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN

I. WRITTEN-OFF RECEIVABLES

No.	Keterangan Description	Saldo Balance 31 Desember 2017 31 December 2017	Penghapusan Piutang Write-Offs	Penyesuaian Denda & Bunga Fine and Interest Adjustment	Pembayaran Payments
		(a)	(b)	(c)	(d)
I	Perbankan Banking Sector	71.046.766	99.266.498	-	31.425.856
A	Bank Perkreditan Rakyat Rural Banks	-	71.640.390	-	-
B	Profesi Penunjang Perbankan Supporting Professions	71.046.766	27.626.108	-	31.425.856
II	Pasar Modal Capital Market	4.106.461.200	3.371.846.919	-	76.270.470
A	Emiten Issuers	3.481.258.630	2.848.698.786	-	33.360.000
B	Pengelolaan Investasi Investment Managers	-	-	-	-
C	Perusahaan Efek Securities Companies	446.400	-	-	-
D	Perusahaan Publik Public Companies	1.300.000	-	-	-
E	Profesi Penunjang Pasar Modal Supporting Professions	623.456.170	523.148.133	-	42.910.470
III	Industri Keuangan Non Bank NBFI	110.260.000	1.672.394.120	-	-
A	Lembaga Pembiayaan Finance Companies	-	7.744.026	-	-
B	Lembaga Penunjang IKNB Supporting Professions	110.260.000	1.664.650.094	-	-
	Total **Total**	**4.287.767.966**	**5.143.507.537**	**-**	**107.696.326**

Pada tahun 2019, tidak terdapat penambahan piutang yang dihapusbukukan.

In 2019, no additional receivables were written off.

	Saldo Balance 31 Desember 2018 31 December 2018	Penghapusan Piutang Write-Offs	Penyesuaian Denda & Bunga Fine and Interest Adjustment	Pembayaran Payments	Saldo Balance 31 Desember 2019 31 December 2019
	(e) = (a) + (b) - (c) - (d)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e) + (f) - (g) - (h)
	138.887.408	-	-	-	138.887.408
	71.640.390	-	-	-	71.640.390
	67.247.018	-	-	-	67.247.018
	7.402.037.649	-	-	26.479.172	7.375.558.477
	6.296.597.416	-	-	-	6.296.597.416
	-	-	-	-	-
	446.400	-	-	-	446.400
	1.300.000	-	-	-	1.300.000
	1.103.693.833	-	-	26.479.172	1.077.214.661
	1.782.654.120	-	-	-	1.782.654.120
	7.744.026	-	-	-	7.744.026
	1.774.910.094	-	-	-	1.774.910.094
	9.323.579.177	**-**	**-**	**26.479.172**	**9.297.100.005**

II. PIUTANG ATAS WAJIB BAYAR YANG TIDAK MELAKUKAN REGISTRASI

II. RECEIVABLES ON UNREGISTERED PAYMENTS

No.	Bidang Sector	Wajib Bayar Payers		Per 31 Des 2017	Penambahan Additions
		2018	2019		
I	PERBANKAN/Banking Sector	0	10	79.155.181	19.953.790
a	Bank Perkreditan Rakyat/Rural Banks	-		0	
b	Lembaga Penunjang Perbankan/Supporting Institutions	-		0	
c	Profesi Penunjang Perbankan/Supporting Professions	-	10	79.155.181	19.953.790
II	PASAR MODAL/Capital Market	1.538	1.529	37.601.566.272	11.059.078.854
a	Emiten/Issuers	2	2	174.569.000	21.500.132
b	Perusahaan Efek/Securities Companies	-		0	
c	Manajer Investasi/Investment Managers	-		0	
d	Profesi Penunjang Pasar Modal/Supporting Professions	1.536	1.527	37.426.997.272	11.037.578.722
-	Akuntan Publik/Public Accountants	24	24	374.487.841	119.768.476
-	Konsultan Hukum/Legal Consultants	376	366	9.123.475.386	2.744.807.670
-	Notaris/Notaries	1.129	1.113	27.512.625.447	8.077.964.576
-	Penilai/Appraisers	3	3	122.408.598	27.038.000
-	Perorangan/Individuals	4	18	294.000.000	68.000.000
-	Pemegang Saham Emiten/Shareholders		3		
III	IKNB/NBFI	2	2	255.312.890	25.749.465
a	Jasa Penunjang IKNB/Supporting Services	-		0	0
-	Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi/Insurance Loss Appraisers	-		0	
-	Perusahaan Pialang Asuransi/Insurance Brokers	-		0	
b	Dana Pensiun/Pension Funds	2	2	255.312.890	25749465
-	Dana Pensiun Lembaga Keuangan/Financial Institution Pension Fund	-		0	
-	Dana Pensiun Pemberi Kerja/Pension Program	2	2	255.312.890	25.749.465
c	Perasuransian/Insurance	-		0	0
-	Asuransi Jiwa Life Insurance/Life Insurance	-		0	
Jumlah		**1.540**	**1.541**	**37.936.034.343**	**11.104.782.109**

Keterangan:
*) Pengurangan terjadi dikarenakan adanya:
1. Pembayaran Piutang
2. Registrasi SIPO
3. Penyesuaian Tagihan

Notes:
*) *Deductions due to:*
1. *Receivables Payments*
2. *SIPO Registration*
3. *Claims Adjustment*

Pengurangan *) Deductions	Per 31 Des 2018	Penambahan Additions	Pengurangan *) Deductions	Per 31 Des 2019
99.108.971	0	161.289.980	4.435.255	156.854.725
	0			0
	0			0
99.108.971	0	161.289.980	4.435.255	156.854.725
2.695.628.233	45.965.016.893	6.693.538.058	1.214.405.109	51.444.149.842
0	196.069.132	5.078.568	0	201.147.700
	0			0
	0			0
2.695.628.233	45.768.947.761	6.688.459.490	1.214.405.109	51.243.002.142
33.623.673	460.632.644	45.822.670	49.723.929	456.731.385
831.614.362	11.036.668.694	506.433.205	215.724.456	11.327.377.443
1.810.236.198	33.780.353.825	1.528.171.264	940.179.138	34.368.345.951
20.154.000	129.292.598	2.032.351	8.777.586	122.547.363
	362.000.000	4.505.600.000		4.867.600.000
		100.400.000		
0	281.062.355	2.542.149	0	283.604.504
0	0	0	0	0
	0			0
	0			0
0	281.062.355	2.542.149	0	283.604.504
	0			0
	281.062.355	2.542.149		283.604.504
0	0	0	0	0
	0			0
2.794.737.204	**46.246.079.248**	**6.857.370.187**	**1.218.840.364**	**51.884.609.071**

Lampiran III

Appendix III

Daftar Barang Persediaan Yang Tidak Dapat Digunakan Lagi (Usang)

List of Obsolete Inventory

(dalam rupiah | *in rupiah*)

No.	Nama Barang Item	Barang Persediaan Usang Obsolete Inventory			
		Jumlah Total		Secara Fisik Belum Ditemukan Missing Inventory	
		Kuantitas Quantity	Nilai Value	Kuantitas Quantity	Nilai Value
1	Blanko SSP	4	2.200.000	4	2.200.000
2	Buku Agenda Kerja	2.520	243.936.000	902	87.313.600
3	Buku Direktori Perasuransian 2013	60	4.950.000	-	-
4	Buku Perasuransian 2012	66	13.794.000	-	-
5	Buku Statistik DP 2012 Dan Direktori DP 2013	30	4.620.000	-	-
6	Buku Statistik LP 2012 Dan Direktori LP 2013	110	15.972.000	-	-
7	Buku Statistik UKL 2012 Dan Direktori UKL 2013	107	18.564.500	-	-
8	Buku Telepon	700	96.250.000	-	-
9	Cartridge HP Deskjet C 6656 A Black	5	1.105.500	-	-
10	Cartridge HP Deskjet C 6657 A Colour	5	1.837.000	-	-
11	CD Statistik UKL 2012 clan Direktori UKL 2013	176	6.776.000	-	-
12	CF 9,5 x 11 (3 ply)	10	3.300.000	-	-
13	CF 9,5 x 11 (4 ply) NCR	15	4.435.200	-	-
14	Chassing CD	34	93.500	-	-
15	Cover DIPA	100	1.430.000	-	-
16	Door Bell	15	2.561.625	-	-
17	Drum Facsimile Toshiba DP 80 F	2	3.439.700	-	-
18	Drum Fax Panasonic KX-FA84E	2	2.684.000	-	-
19	Drum Panasonic KX FA 412F	3	2.970.000	-	-
20	Kop Surat OJK Garuda BW A4	26	1.573.000	-	-
21	Kumpulan UU dan PP	50	4.675.000	-	-
22	Map LHP Dapen	400	3.960.000	306	3.029.400
23	Map Peraturan Dapen	650	6.435.000	-	-
24	Name Tag	100	110.000	-	-
25	Note OJK AS	4.500	108.900.000	4.444	107.544.800
26	Note OJK Kecil	4.500	54.450.000	2.414	29.209.400
27	Pita Epson 5015505/5015384 (DFX 9000)	19	5.407.875	-	-

No.	Nama Barang Item	Barang Persediaan Usang Obsolete Inventory			
		Jumlah Total		Secara Fisik Belum Ditemukan Missing Inventory	
		Kuantitas Quantity	Nilai Value	Kuantitas Quantity	Nilai Value
28	Pita Epson LQ 2190/2180	9	1.148.400	-	-
29	Pita Mesin Tik Brother GX-8250 (AX 1030)	25	841.500	-	-
30	Pita Mesin Tik Fullmark F 7115 BKSC	59	2.336.400	-	-
31	Pita Mesin Tik Nakajima AX 200	3	100.980	-	-
32	Roll up Banner 60x160	68	31.416.000	-	-
33	Stempel a.n Ketua (Warna)	10	825.000	-	-
34	Stempel Pribadi	26	2.145.000	-	-
35	Stiker Dilarang Merokok 20x25cm	240	7.920.000	-	-
36	Stiker Dilarang Merokok 7x26cm	80	1.320.000	-	-
37	Stiker Rahasia (Inggris)	7.500	29.700.000	-	-
38	Toner Fax Panasonic KX-FA83A	11	4.536.400	-	-
39	Toner Fax Panasonic OF 4100	3	2.970.000	-	-
40	Toner Fuji Xerox 200226 Black DC1648	30	27.390.000	-	-
41	Toner Fuji Xerox Phaser 30K 106RO1532	5	15.785.000	-	-
42	Toner Fuji Xerox Phaser 40K 106RO2625	5	20.573.440	-	-
43	Toner HP U 2613 A	21	21.101.850	-	-
44	Toner HP U 5949 A	10	10.417.000	-	-
45	Toner HP U 6511 A	9	14.107.500	-	-
46	Toner HP U 7115 A	25	22.275.000	-	-
47	Toner HP U CB 380 A	11	25.773.000	-	-
48	Toner HP U CB 381 A	12	38.676.000	-	-
49	Toner HP U CB 382 A	12	43.956.000	-	-
50	Toner HP U CB 383 A	11	35.453.000	-	-
51	Toner HP U CB 384 A	15	20.295.000	-	-
52	Toner HP U CB 385 A	14	30.877.000	-	-
53	Toner HP U CB 386 A	13	28.671.500	-	-
54	Toner HP U CB 387 A	13	28.671.500	-	-
55	Toner HP U CB 436 A	14	11.319.000	-	-
56	Toner HP U CC 364 A	26	46.332.000	-	-

No.	Nama Barang Item	Barang Persediaan Usang Obsolete Inventory			
		Jumlah Total		Secara Fisik Belum Ditemukan Missing Inventory	
		Kuantitas Quantity	Nilai Value	Kuantitas Quantity	Nilai Value
57	Toner HP U CC 530 A	13	16.588.000	-	-
58	Toner HP U CC 531 A	10	12.595.000	-	-
59	Toner HP U CC 532 A	11	13.854.500	-	-
60	Toner HP U CC 533 A	10	12.595.000	-	-
61	Toner Xerox CT 200655 Black C2535	4	5.632.000	-	-
62	Toner Xerox CT 200656 Cyan C2535	5	19.387.500	-	-
63	Toner Xerox CT 200657 Magenta C2535	5	19.387.500	-	-
64	Toner Xerox CT 200658 Yellow C2535	5	19.387.500	-	-
65	Topas 3:1 A4 1/2 White 35 Loop	1	264.990	-	-
66	Topas 3:1 A4 1/4 White 35 Loop	1	125.730	-	-
67	Topas 3:1 A4 5/16 White 35 Loop	2	301.180	-	-
68	Topas 3:1 A4 5/8 White 23 Loop	1	170.500	-	-
69	Topas 3:1 A4 5/8 White 35 Loop	1	170.500	-	-
	TOTAL		**1.263.823.270**		**229.297.200**

Lampiran IV
Appendix IV

Daftar Aset Tetap Yang Hilang
List of Missing Fixed Assets

(dalam rupiah | *in rupiah*)

No	Nama Barang Item	Merk/Tipe Brand/Type	Jumlah Barang Quantity	Harga Perolehan Acquisition Price
Tahun Perolehan 2014				140.857.500
1	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.290.420
2	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.290.420
3	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
4	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
5	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
6	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
7	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.200.522
8	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000
9	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000
10	Camera Digital	Sony DSC-WX350	1 unit	3.324.050
11	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	20.350.000
Tahun Perolehan 2015				36.186.040
1	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	17.156.040
2	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.030.000
Jumlah				**177.043.540**

Daftar Singkatan

Glossary

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	*APBN*	*: State Revenue and Expenditure Budget*
ADK	: Anggota Dewan Komisioner	*ADK*	*: Member of the Board of Commissioners*
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan	*Bapepam-LK*	*: Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency*
BI	: Bank Indonesia	*BI*	*: Bank Indonesia*
DAPEN	: Dana Pensiun	*DAPEN*	*: Pension Fund*
DK	: Dewan Komisioner	*DK*	*: Board of Commissioners*
DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan	*DPLK*	*: Financial Institution Pension Funds*
IKNB	: Industri Keuangan Non Bank	*IKNB*	*: Nonbank Financial Industry*
KDK	: Keputusan Dewan Komisioner	*KDK*	*: OJK BoC Decree*
Kepdepkom	: Keputusan Deputi Komisioner	*Kepdepkom*	*: Deputy Commissioner Decree*
KRDK	: Keputusan Rapat Dewan Komisioner	*KRDK*	*: BoC Meeting Decree*
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan	*LPS*	*: Deposit Insurance Corporation*
PDK	: Peraturan Dewan Komisioner	*PDK*	*: BoC Regulation*
RDK	: Rapat Dewan Komisioner	*RDK*	*: BoC Meeting*
SEDK	: Surat Edaran Dewan Komisioner	*SEDK*	*: BOC Circular Letter*
YKP	: Yayasan Kesejahteraan Pegawai	*YKP*	*: OJK Employee Welfare Foundation*

2019

Laporan Tahunan
Annual Report

OTORITAS JASA KEUANGAN

Indonesia Financial Services Authority
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta 10710
Tel. 62-21 29600000
Fax. 62-21 385 7917